MENTERI-MENTERI

AGAMA RI

Biografi Sosial-Politik

Pengantar

Menteri-Menteri Agama RI

Biografi Sosial-Politik

Pengantar
Prof. Dr. Taufik Abdullah,

Menteri-Menteri Agama RI

Biografi Sosial-Politik

Editor
Dr. Azyumardi Azra
Saiful Umam, MA

Badan Litbang Agama Departemen Agama RI
bekerjasama dengan
PPIM-IAIN Jakarta
1998

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan

Azra, Azyumardi; Umam, Saiful (ed.)
Menteri-Menteri Agama RI:
Biografi Sosial-Politik/Azyumardi Azra (ed.).—Jakarta: PPIM, 1998,
493 hlm.+liii; 23 cm.

ISBN 979-95248-3-0
1. Islam—Indonesia I. Judul

.....

©Hak cipta dilindungi undang-undang
Editor: Azyumardi Azra dan Saiful Umam

Diterbitkan oleh :
Badan Litbang Agama Departemen Agama RI
bekerjasama dengan
Pusat Pengkajian Islam Dan Masyarakat
(PPIM) - IAIN Jakarta

Cover&tata letak: Heni Nuroni

Tim Penyusun

Pengarah	: **Mustoha**
Nara Sumber	: **Muljanto Sumardi**
Koordinator	: **Taufik Abdullah**
Wakil Koordinator	: **Nurhayati Djamas**
Editor	: **Azyumardi Azra**
	: **Saiful Umam**
Asisten Editor	: **Qowaid**
	Didin Syafruddin
Tim Penulis	: **Taufik Abdullah**
	Muljanto Sumardi
	Azyumardi Azra
	Akh. Minhaji dan M. Atho Mudzhar
	Ahmad Syafi'i
	Saiful Umam
	Didin Syafruddin
	Masdar F. Mas'udi dan M. Syafiq Hasyim
	Abdul Aziz
	AG Muhaimin
	Kamal Muchtar
	Ali Munhanif
	Masykuri Abdillah
	Bahtiar Effendy, Hendro Prasetyo, Arief Subhan
	Usep Fathudin
Sekretariat	: **Muchtamil Kastuba**
	Aden Daenuri
	Fatchan Kamal

Sambutan Kepala Badan Litbang Agama

Negara Indonesia bukanlah negara teokratis karena tidak didasarkan pada agama tertentu, tetapi juga bukan negara sekuler karena tetap mengakui agama sebagai salah satu aspek penting yang menjiwai dasar negara, sebagaimana tercantum dalam sila pertama Pancasila yakni, Ketuhanan Yang Maha Esa, dan dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa." Lebih dari itu, negara juga mengatur kehidupan keberagamaan bangsanya melalui satu departemen, Departemen Agama. Dengan demikian, Indonesia dengan Pancasila sebagai falsafah negara, sebagai jalan tengah dari dua sistem negara modern yang dikenal secara umum, yaitu sekuler atau teokrasi.

Keberadaan negara Indonesia seperti sekarang ini diakui sebagai jalan keluar terbaik dari perdebatan panjang mengenai hubungan antara agama dan negara. Sebagaimana diketahui, menjelang dan masa-masa awal kemerdekaan, telah terjadi perdebatan yang melelahkan antara kalangan nasionalis dan Islam. Kalangan nasionalis, di satu pihak mengehendaki negara Indonesia yang sekuler, sementara di pihak lain, kalangan Islam menghendaki Islam menjadi agama negara. Kompromi antara dua aspirasi ini tercapai dalam apa yang dikenal sebagai Piagam Jakarta.

Namun, karena keberatan dari sebagian penduduk non Muslim, atas tujuh kata yaitu "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya", dihapuskan dari Pembukaan Undang-undang Dasar pada satu hari setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Dalam situasi keamanan negara berada di bawah ancaman serangan Belanda, aspirasi kalangan Islam untuk beberapa waktu tidak muncul ke permukaan. Meski demikian, karena struktur pemerintahan yang baru dianggap kurang menampung aspirasi umat Islam, maka ada tuntutan agar diadakan kementerian yang mengurusi semua masalah-masalah keagamaan, khususnya Islam. Untuk itulah kemudian dibentuk Kementerian Agama pada 1946 yang di kemudian hari berubah menjadi Departemen Agama. Dengan demikian, keberadaan departemen ini dapat dianggap sebagai perwujudan dari tertampungnya salah satu aspirasi kaum agama dalam konteks negara-bangsa.

Terlepas dari munculnya kembali perdebatan masalah hubungan agama dan negara dalam Konstituante, perjalanan Departemen Agama sendiri mencerminkan dinamika intern umat beragama dalam bernegara. Untuk itu, menelusuri kembali jejak sejarah Departemen Agama akan menggambarkan pergumulan peran agama dalam negara. Salah satu aspek penting dalam melihat sejarah Departemen Agama tentu saja dengan mencatat kecenderungan-kecenderungan dan kebijakan-kebijakan para menterinya. Naiknya seorang menteri dan kebijakan-kebijakan yang diambilnya sering tidak bisa dilepaskan dari situasi sosio-politik dan keagamaan pada masanya. Untuk itu, studi atas kehidupan para Menteri Agama dan aktivitas serta kebijakan-kebijakannya selama menjadi menteri akan mampu mengungkap banyak hal, tidak hanya perjalanan Departemen Agama, tetapi juga dinamika kehidupan umat beragama dan hubungan antara agama dan negara.

Atas dasar itulah kehadiran buku ini patut disambut gembira. Ini adalah buku pertama yang membahas biografi tokoh-tokoh pemimpin puncak Departemen Agama secara komprehensif. Dengan buku ini kita dapat melihat perjalanan Departemen Agama sejak dibentuk sampai sekarang, berikut konteks sosial politiknya. Selain itu, kita juga dapat lebih memahami kebijakan-kebijakan yang dikembangkan setiap menteri dengan memperhatikan latar belakang sosial, keluarga, dan pendidikan masing-masing.

Penghargaan yang tinggi kami sampaikan kepada tim di bawah koordinator Prof. Dr. Taufik Abdullah yang telah bekerja keras mewujudkan buku ini. Selain itu ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh penulis yang telah menyumbangkan tulisannya. Sebagai karya manusia, tidak tertutup kemungkinan adanya kesalahan atau kekurangan di sana sini. Karena itu, kami mengharapkan masukan, kritik dan saran dari para pembaca untuk penyempurnaan di waktu mendatang.

Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat bagi keluarga besar Departemen Agama, khususnya, dan bagi semua pihak yang menaruh perhatian terhadap masalah agama dan negara di Indonesia, pada umumnya.

Jakarta, Januari 1998
Kepala Badan Litbang Agama

Drs. H. Mustoha, MA

Daftar Isi

v Sambutan

vii Daftar Isi

ix Menteri Agama Republik Indonesia:
Sebuah Pengantar Profil Biografis
Taufik Abdullah

xli Posisi Departemen Agama
Muljanto Sumardi

1 H.M. Rasjidi, BA;
Pembentukan Kementerian
Agama dalam Revolusi
Azyumardi Azra

35 Prof. K.H. Fathurrahman Kafrawi;
Pengajaran Agama di Sekolah Umum
Akh. Minhaji dan M. Atho Mudzhar

53 K.H. Masjkur;
Kementerian Gerilya dan Waliyul Amri
Ahmad Syafi'i

81 K.H. Wahid Hasyim;
Konsolidasi dan Pembelaan Eksistensi
Saiful Umam

115 K.H. Fakih Usman:
Pengembangan Pendidikan Agama
Didin Syafruddin

153 K.H. Mohammad Ilyas;
Pengembangan Kementerian Agama
Masdar F. Mas'udi dan M. Syafiq Hasyim

175 K.H. Muhammad Wahib Wahab:
Kementerian Agama pada Masa Demokrasi Terpimpin
Abdul Aziz

201 K.H. Saifuddin Zuhri;
Eksistensi Agama dalam *Nation Building*
AG Muhaimin

243 K.H. Mohammad Dachlan;
Departemen Agama di Masa Awal Orde Baru
Kamal Muchtar

269 Prof. Dr. A. Mukti Ali;
Modernisasi Politik-Keagamaan Orde Baru
Ali Munhanif

321 Alamsjah Ratu Perwiranegara;
Stabilitas Nasional dan Kerukunan
Masykuri Abdillah

367 Munawir Sjadzali, MA;
Pencairan Ketegangan Ideologis
Bahtiar Effendy, Hendro Prasetyo, Arief Subhan

413 Dr. H. Tarmizi Taher;
Globalisasi Kerukunan
Usep Fathudin

468 Appendix
1. Teuku Moehammad Hasan;
   Menteri Agama Kabinet PDRI
2. Sekilas para penulis

481 Indeks

Menteri Agama Republik Indonesia:

Sebuah Pengantar Profil Biografis

Taufik Abdullah

Biografi dan sejarah.

Seorang ahli sejarah Inggris pernah menulis sebuah buku mengenai kegunaan sejarah. Ia menyebutkan berbagai kegunaannya, mulai dari yang bersifat praktis sampai yang filosofis. Namun ia juga tidak melupakan hal lain yang sering terlupakan, yaitu sejarah sebagai "rekreasi", sebagai hiburan di saat istirahat. Kisah sejarah bisa menjadi obat kejemuan dalam perjalanan yang meletihkan. Atau, siapa tahu, bisa dipakai sebagai pengantar menjelang tidur.

Sejarah sebagai hiburan. Ia benar juga. Bukankah tak jarang berbagai kisah tentang masa lalu itu memberikan sekadar kenikmatan, yang bisa menyebabkan kita melupakan sejenak kegelisahan hari kini? Kisah tentang orang masa lalu bisa mengasyikan juga. Bahkan peninggalan masa lalu pun dapat juga memberikan "hiburan". Maka kita pun kini telah mengenal istilah pariwisata-budaya. Apapun yang dikisahkan—entah tentang perang, percintaan, pemberontakan petani, diplomasi, dan entah tentang apa saja—sejarah bisa memberikan hiburan yang menyegarkan. Kisah-kisah itu menghamparkan berbagai corak drama kehidupan, yang pernah terjadi, bukan yang rekaan, tetapi memantulkan berbagai perasaan. Mungkin seketika kita terlarut di dalamnya, tetapi segera sadar, bahwa sesungguhnya kita tidak berada di dalam kisah itu. Keunggulan sejarah yang berkisah, yang *narrative,* memang terletak pada kemungkinannya untuk menyebabkan kita, yang membaca atau yang mendengar, merasa seakan-akan berada dalam

waktu yang berdimensi ganda. Dan, apapun jenis peninggalan itu—entah bangunan keagamaan, istana para raja, kuburan, keris pusaka, patung-patung dan entah apa saja—bisa juga membangkitkan perasaan seolah-olah kita berada di masa lalu yang diwakilinya.

Maka, tidaklah mengherankan kalau dalam keasyikan berkisah ini bisa juga terjadi transformasi *sejarah*—sebagai usaha untuk mengisahkan kembali peristiwa yang terjadi di masa lalu—menjadi *mitos*—sebagai nilai yang dikisahkan dalam bentuk rekonstruksi masa lalu. Bisa pulalah dimaklumi kalau peninggalan masa lalu itu, apalagi yang bercorak arkelogis, bisa juga meninggalkan berbagai mitos dan legenda, baik tentang pembuatannya, maupun tentang peristiwa yang konon ada kaitannya dengan peninggalan itu. Kalau sejarah telah menjadi mitos, yang menyimpan seperangkat nilai, dan peninggalan masa lalu itu telah memantulkan berbagai legenda dan mitos, maka kisah yang konon "historis" itu pun telah menjadi alat dan saluran bagi terwujud dan terjaganya integrasi sosial. Mitos itupun bisa juga menjadi landasan bagi kelangsungan legitimasi politik. Bukanlah sebuah pandangan yang sinis kalau sekiranya ada saja yang mengatakan bahwa mitologisasi sejarah adalah unsur utama dalam pemupukan patriotisme dan, bahkan juga, nasionalisme. Maka biarlah, kemudian, para sejarawan dan arkeolog, kalau perlu, berusaha untuk menemukan kembali "sejarah" yang terkubur di dalam sejarah yang telah bersifat mitologis itu.

Tetapi sebenarnya sejarah—sebagai kisah tentang masa lalu—memberikan lebih dari pada itu. Kenikmatan kita membaca dan mendengar kisah masa lalu juga dibentuk oleh pengetahuan bahwa semua itu terjadi di suatu tempat dan di suatu waktu. Tak ubahnya dengan kita sekarang, yang berada di sebuah tempat dan di suatu waktu. Jadi, mendengar atau membaca kisah sejarah itu bisa dikatakan sebagai sebuah pelancongan, yang seakan-akan membebaskan kita dari kungkungan kekinian kita. Entah sedih, entah gembira, kisah-kisah sejarah bisa membebaskan kita dari tirani waktu dan tempat—dua corak konteks yang abadi membelenggu kita. Bukankah kita selalu berada di suatu waktu dan di suatu tempat? Dengan sejarah seakan-akan kita dimungkinkan untuk berkelana menembus batas-batas waktu dan ruang. Kita, yang berada di sini pada waktu ini, diajak berkelana ke sana—kemana

saja—dan ke waktu lain—ke zaman apapun juga. Begitulah, pada saatnya, ketika kematangan reflektif telah semakin menaik, kisah-kisah sejarah yang mula-mula hanyalah "hiburan" dan kemudian terasa sebagai "pembebas" ini, akan memberikan juga kepada kita sesuatu yang lain, yaitu kearifan—kearifan dari seorang pengembara yang kembali ke kampung halaman setelah merantau mengharungi lautan luas.

Barangkali tidaklah terlalu sukar untuk memahami mengapa kisah dan uraian sejarah yang paling mudah menyentuh kesadaran adalah kisah pergumulan anak manusia dengan nasibnya. Bagaimanakah jadinya pergumulan itu? Apakah ia, sang aktor sejarah, kalah atau sesungguhnya mengalah? Atau menang? Kalau kisah itu terasa memilukan dan menyedihkan kitapun menghela nafas dalam-dalam sambil berdesah, "betapa tragis nasibnya." Seandainya kisah tersebut menceritakan pergumulan seseorang yang pantang menyerah, tetapi berakhir juga dengan kekalahan, kitapun akan berkata, "sebuah tragedi kehidupan telah terjadi". Sekiranya kita berhadapan dengan kisah tentang anak manusia yang seakan-akan bermain-main dengan nasibnya namun berakhir dengan senyum bangga tanda sebuah perjuangan telah dimenangkan, kitapun mungkin geli dan tersenyum menghadapi komedi manusia ini. Tragedi, peristiwa tragis, komedi, bahkan *farce*, kekonyolan, dan entah apa lagi, adalah corak dari berbagai kemungkinan dari drama kehidupan yang mungkin terpantul dari kisah sejarah. Memang kisah sejarah itu adalah drama kehidupan.

Tetapi apakah yang bisa diberikan sejarah, kalau sejarah itu hanyalah berkisah tentang hal-hal biasa saja, yang tak ubahnya ulangan dari kehidupan nyata belaka? Lebih dari dua ribu tahun yang lalu, Aristoteles menjadi jengkel dengan sejarah, yang baginya tak lebih dari cerita tentang "apa yang dilakukan Alcibiades dan apa yang dideritanya". Kejengkelan ini pula yang menghinggapi Tolstoy, yang dengan geram menulis pada seorang kawannya, bahwa baginya sejarah tak ubahnya dengan "cerita para perempuan tua" dan "tak lebih daripada kumpulan cerita dan tetek bengek yang tak berguna". Perduli amat dengan cerita raja-raja yang kawin dan cerai. Betapa membosankan hal-hal seperti ini bagi seseorang yang ingin mencari makna dalam kehidupan. Aristoteles mencari pemecahan keserbadangkalan dari yang disebutnya "sejarah" itu pada *puisi*, karya intelektual yang menjelejahi

hi problem yang universal dan abadi. Tolstoy berpaling pada novel sejarah, yang secara bebas dan imaginatif merekonstruksi "kisah sejarah" yang bersifat keseharian menjadi sesuatu yang uraian, yang reflektif, yang menyentuh masalah kehidupan yang fundamental.

Tetapi, apakah berpaling pada "puisi" atau "novel sejarah", kesemuanya berasal dari kisah sederhana yang dialami dan dirasakan manusia. Renungan reflektif dan imaginatif itu berasal dari hal-hal yang sederhana—seseorang melangkah dan berbuat sesuatu karena ia melawan atau menginginkan sesuatu. Setelah kisah itu didapatkan, maka renungkanlah kesemuanya—sejarah pun telah menjadi sesuatu yang melebihi dirinya, filsafat, sastra, atau teori sosial. Memang pada awal perkembangannya sejarah berkisar pada pengalaman, perjuangan, kemenangan, kekalahan, kegembiraan dan kesedihan dari individu- individu tertentu sebagai anak manusia yang berbuat dan bertindak. Barulah kemudian, ketika perkembangan ilmu sejarah telah semakin menaik dan semakin canggih, kisah anak manusia ini mulai diperlakukan sebagai salah satu cabang dari pengetahuan sejarah. Maka, kisah seperti inipun disebut *biografi.* Kalau sejarah bisa bercerita tentang hal apa saja—politik, sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya—dan menjadikan masyarakat—bukannya manusia dalam kesendiriannya dan dan tidak pula manusia dalam pengertian filosofis—sebagai sasaran perhatiannya, maka biografi, seperti telah dikatakan di atas, menjadikan pergumulan dan penghadapan anak manusia dengan nasibnya sebagai perhatian utama.

Dalam sejarah, "anak manusia", yaitu individu-individu, yang merupakan unsur utama sejarah, diperlakukan sebagai bagian dari denyut dinamika sosial. Ia tak terlepas dari konteks sosialnya. Bisa jadi ia dilihat oleh pengisah sejarah sebagai (menurut kategori Sidney Hook tentang "pahlawan") *eventful man*—yang secara kreatif memberi jawab terhadap tantangan zaman— atau *event-making man*—yang berhasil menjadikan tindakan dan perbuatannya, di saat ia menemukan dirinya dalam persimpangan sejarah, menentukan arah perjalanan sejarah. Namun ia tetap merupakan bagian dari denyut nadi sejarah masyarakatnya.

Dalam "biografi" ia, sang "anak manusia" yang diperlakukan sebagai aktor-sejarah, adalah segala-galanya. Ialah yang menjadi pusat perhatian. Tempat dan fungsi dari konteks sosial dan waktu

dalam proses pengisahan mengalami perubahan dan lebih sering bersifat ganda. Di satu pihak konteks ini dipakai sebagai latar belakang, sebagai wadah dalam mana sang-aktor berbuat dan bertindak. Sebagai latar belakang, maka konteks waktu, tempat, dan sosial ini adalah hasil rekonstruksi yang dikerjakan oleh penulis biografi. Tetapi, di pihak lain, konteks itu adalah sesungguhnya hasil konstruksi dan pemahaman sang aktor. Pemahamannya tentang konteks inilah yang menentukan pilihannya dalam menentukan tindakan. Bagi sang aktor hasil pemahamannya tentang konteks strukturalnya itulah yang memantulkan padanya berbagai corak pilihan. Manakah pilihan yang paling sesuai dengan hasrat normatifnya dan yang secara rasional dianggapnya paling menguntungkan? Soekarno dan Hatta tidak akan memprokmasikan kemerdekaan Indonesia jika saja mereka tidak melihat dan memahami situasi bulan Agustus 1945 sebagai sebuah momentum yang tak boleh dibiarkan lepas. Mereka tidak akan menjadi proklamator kalau saja mereka melihat bahwa hanyalah Jepang satu-satunya harapan yang bisa membawa Indonesia ke alam kemerdekaan. Landasan awal dari pola perilaku ditentukan oleh afinitas antara pemahaman sang aktor tentang konteks sejarah ia berada dengan hasrat, cita-cita, idealisme, yang dipunyainya. Karena itulah bisa dipahami juga mengapa penulis biografi sangat memerlukan memoir dan otobiografi dari aktor yang dikisahkannya, dan tak kurang pentingnya, jika mungkin semua tulisan dan cacatan tentang apa yang pernah diucapkannya. Kesemuanya adalah bahan-bahan untuk merekonstruksi lagi corak konteks atau wadah sebagaimana dipahami oleh sang aktor.

Meskipun dalam perkembangan ilmu sejarah modern "biografi" dan "sejarah" telah dibedakan, namun pada biografi lah sesungguhnya kita mendapatkan unsur sejarah yang paling akrab, yaitu manusia yang berpikir dan bertindak; yang kecewa dan bahagia; yang sedih dan gembira. Dalam biografi kita tidak saja berhadapan dengan dunia yang objektif—sebagaimana bukti-bukti yang sahih menunjukkan—tetapi juga lebih dimungkinkan untuk menangkap dan memahami dunia subjektif—sebagaimana dilihat, dirasakan, dan dibangun oleh sang aktor. Dalam biografi kita lebih mungkin mengikuti dengan baik proses pemahaman konteks dan struktur lingkungan, pengambilan keputusan, sampai akhirnya semacam pola perilaku yang diwujudkan oleh sang aktor—ia

yang menjadi tokoh dalam biografi itu. Keresahan dan harapan sang aktor di saat tahap-tahap dalam proses tersebut harus dilalui dan di saat hasil dan akibat dari tindakan dinantikan akan lebih mungkin dengan jelas tergambar dalam biografi. Dengan kata lain, dengan kesemestaannya, *universe*, yang terbatas, bahkan sangat terbatas, biografi sesungguhnya memberikan aspek dan vista sejarah yang mendalam. Demikianlah, biografi bukan saja—sebagaimana biasanya—bisa dipakai sebagai salah satu sumber sekunder dalam penulisan sejarah, tetapi dapat juga dilihat sebagai perwujudan mikroskopis dari sejarah. Liwat biografi, kita dimungkinkan untuk melihat sejarah dari aspek mereka yang memilih untuk berbuat sesuatu di atas pentas sejarah. Kita, dengan kata lain, melihat sejarah dari sudut aktor atau pelaku sejarah. Dengan begini kitapun akan lebih mungkin memahami denyut sejarah dengan lebih mendalam. Biografi memberikan kepada kita sikap empati terhadap sejarah, sebagai gambaran pergumulan manusia dan masyarakat di masa lalu—entah bila dan entah di mana.

Barangkali terasa berelebih-lebihan, tetapi sesungguhnya siapapun yang pernah membaca biografi yang baik dari Sun Yat Sen, Mao Tse Tung, dan Chiang Kai Sek, meskipun mungkin tidak akan bisa mengetahui segala segi dari sejarah modern Cina, ia akan lebih memahami dinamika sejarah itu. Demikian pula halnya dengan irama sejarah modern dari anak benua India, semakin bisa dipahami seandainya riwayat hidup Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, dan Ali Jinnah dipelajari dengan baik. Dalam hal-hal tertentu sejarah bisa juga dipahami melalui biografi dari para *event-making men*, mereka yang merintis perjalanan sejarah dari komunitas-bangsa. Dalam biografi kita lebih dimungkinkan untuk mengetahui bagaimana sang aktor memahami konteks sosial dan historisnya dan berusaha mewujudkan hasrat normatifnya .

Biografi boleh dikatakan sebagai pengetahuan tentang "sebagian", yaitu tentang pengalaman dan nasib seorang anak manusia dalam konteks kerangka waktu dan tempat tertentu, dari "keseluruhan" sejarah, yang berkisah dan membuat analisa tentang tempat dan waktu tertentu pula. Mengetahui struktur dari "keseluruhan" melalui pemahaman yang mendalam tentang yang "sebagian" adalah salah satu cara yang syah dalam ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan. Meskipun yang "sebagian" itu tidak bisa dianggap dengan begitu saja sebagai wakil dari "keseluruhan", apala-

gi sebagai sesuatu yang identik dengan "keseluruhan", tetapi yang "sebagian" memberi kesan-kesan dan membayangkan gejala umum tentang " keseluruhan". Cobalah bayangkan situasi sebuah pentas. Sebagian dari yang di atas pentas itu mendapat lampu sorot. Yang kena lampu sorot itu adalah fokus utama. Makin jauh dari fokus maka makin berkuranglah kekuatan lampu sorot. Walaupun begitu posisi dari fokus yang terkena lampu sorot itu dalam konteks "keseluruhan" dapat diketahui dengan jelas. Dengan begini maka struktur "keseluruhan" itu dapat juga tertangkap. Kini, kembalikanlah masalahnya ke lapangan kemasyarakatan dan pilihlah "fokus" yang strategis, maka kita akan bisa juga mengetahui struktur dan—kalau kita berbicara tentang sejarah—corak dan dinamika dari masyarakat.

Kalau proses *nation-building* dan masalah integrasi bangsa akan dibicarakan maka "kehidupan keagamaan dan hubungan antarumat beragama" adalah merupakan salah satu tema yang semestinya mendapat lampu sorot—setidaknya begitulah halnya dengan negeri kita. Setelah itu carilah berbagai pranata sosial keagamaan—masjid, pura, pesantren, madrasah, kiai, pastor, gereja, organisasi, sekolah, dan entah apa lagi—yang dianggap sebagai bagian yang integral dari fokus itu. Sekiranya perhatian lebih tertuju pada zaman kemerdekaan, kita lebih dimungkinkan untuk mencari fokus yang lebih terbatas, umpamanya Departemen Agama. Jikalau mungkin belum dalam kenyataan empiris, setidaknya secara konstitusional dan hukum Departemen Agama secara teoretis bisa dianggap sebagai fokus yang dikitari dan dikelilingi secara intensif oleh struktur "keselurahan" dari dinamika dan corak kehidupan keagamaan—sebuah tema yang secara teoretis telah dianggap sebagai "sebagian" yang dapat menyorot "keseluruhan" dinamika kehidupan bangsa. Tetapi pemilihan fokus ini bukan tak mungkin menyebabkan kita tergelincir pada sejarah institusional, kelembagaan, yang sempit. Kalau telah begini, maka yang kita temukan tak lain dan tak bukan adalah "sebagian" yang telah utuh menjadi dirinya. Ia tak lagi menjadi "sebagian", yang merupakan bagian yang strategis dari "keseluruhan", tetapi telah menjadi "keseluruhan" yang kecil dan terpisah dari yang lain. Kitapun diperkenalkan dengan berbagai perubahan struktur internal Departemen, nama-nama para pejabat, dan sebangsanya. Setelah selesai membaca kita hanya tahu sejarah departemen, tetapi sama sekali tidak mempu-

nyai pengertian tentang "keseluruhan". Kalau begitu, mengapa sejarah institusional itu tidak didampingi oleh biografi? Jika telah begini, maka Departemen Agama tidak lagi hanya akan tampil sebagai lembaga yang sibuk dengan dirinya sendiri, tetapi akan muncul sebagai kumpulan orang-orang yang terpanggil untuk berbuat berbagai hal demi pencapaian tujuan normatif yang telah dipupuk.

Dalam kaitan inilah kumpulan biografi dari para Menteri Agama, yaitu mereka—yakni individu-individu yang utuh pada diri masing-masing—yang terpanggil oleh nasib untuk berpikir, berbuat, dan bertindak untuk mencapai tujuan normatif yang telah digariskan oleh cita-cita bangsa. Maka kitapun berhadapan dengan berbagai proses dialog antara ia, sang Menteri, dengan konteks kelembagaan yang bisa dipakainya untuk menjalankan segala hal yang diharuskan, dan dengan kenyataan struktural yang harus dijinakkan, diubah, dipertahankan, atau diperbaikinya.

Begitulah biografi. Tetapi bila biografi harus dianggap sebagai kisah seseorang secara utuh—betapapun mungkin ditulis dengan ringkas—dua wilayah atau *space* yang dipunyainya terpaksa diperhatikan juga. Pertama, wilayah pribadi, yang gelap tersembunyi, dalam kesendirian masing-masing. Kedua, wilayah publik atau *public space*. Dalam wilayah inilah sang tokoh tampil memperlihatkan wajahnya. Ia berdialog, berbuat dan bertindak dalam konteks sosial yang terbuka. Jika dalam wilayah pribadi, *private space*, ia tersembunyi dan menjadi "raja" dalam kesendiriannya, maka dalam *public space* ia terbuka dan *vulnerable*, kata orang. Siapapun bisa menilainya, memuji atau memakinya. Dalam wilayah ini ia seakan-akan tanpa punya pertahanan terhadap tilikan masyarakat. Tetapi bukankah timbul juga pertanyaan apakah wajah dalam "wilayah publik" adalah dirinya otentik ataukah tak lebih dari topeng belaka? Maka, janganlah heran kalau para biograf (terutama di dunia Barat), setelah mengumpulkan segala peristiwa yang terjadi dalam "wilayah publik", kerap kali juga berusaha mengintip ke "wilayah pribadi". Siapa tahu apa-apa yang ditemukan dalam "wilayah pribadi" ini bisa juga menjawab hal-hal yang menimbulkan pertanyaan di dalam "wilayah publik".

Buku ini adalah kumpulan biografi Menteri Agama, bukan biografi tentang tokoh A atau B. Jadi sejak awal telah harus disadari bahwa biografi ini terjadi dalam "wilayah publik".

Profil Biografis Para Menteri Agama

Sudah berapa orangkah yang telah pernah diangkat atau dipilih sebagai Menteri Agama? Barangkali telah 13 orang. Tetapi kalau Mr. Teuku Muhammad Hasan, yang hanya memangku jabatan ini selama 2-3 bulan saja di saat Pemerintah Darurat Republik Indonesia (P.D.R.I.), di bawah pimpinan Mr. Sjafruddin Prawiranegara, yang berpusat di Sumatra Barat, belum sempat mengadakan kontak dengan Jawa, harus dihitung, maka jumlahnya ialah 14 orang. Tetapi perbedaan jumlah ini tak terlalu penting. Bukan saja situasi darurat, akibat Agresi Kedua yang dilancarkan Belanda, di bulan Desember 1948, praktis tak memungkinkan Menteri Agama itu bertindak sebagai Menteri Agama, karena lebih sibuk ikut mengatur perang gerilya, tetapi juga, dan tak kurang pentingnya, perbedaan ini tidak mengubah profil umum para Menteri Agama. Terlepas dari segala perbedaan pendidikan, latar belakang keluarga, lama masa jabatan, dan sebagainya, semua mereka yang sempat mendapat kehormatan atau—dengan gaya yang lebih disukai—menunaikan darma bakti sebagai Menteri Agama Republik Indonesia adalah para aktivis di masa remaja mereka. Ada yang aktif dalam organisasi kepemudaan dan keagamaan; entah Gerakan Pemuda Ansor, seperti Wahib Wahab, entah NU, seperti M. Ilyas, entah GPII, seperti Munawir, entah Muhammadiyah, seperti Fakih Usman, atau, seperti Tarmizi, menjadi aktivis kampus yang tak gentar berkonfrontasi dengan CGMI yang sedang naik daun, atau bahkan, sejak awal telah tergabung dalam organisasi militer, seperti Alamsyah. Pada umumnya Menteri Agama kita adalah mereka yang pernah ditempa oleh pengalaman, di saat harapan dan cita-cita yang mereka pupuk dihadapkan dengan kenyataan empiris yang tak selamanya ramah. Dalam hal ini barangkali tidaklah salah kalau dikatakan bahwa secara ideologis profil para Menteri Agama lebih "meyakinkan" dari golongan (mantan) menteri-menteri yang lain, apalagi kalau dibandingkan dengan golongan menteri-menteri teknis.

Gambaran yang "meyakinkan" ini ditambah lagi dengan kenyataan bahwa terlepas dari segala perbedaan latar belakang dan sebagainya, mereka yang pernah menjabat Menteri Agama ini, dengan kadar yang berbeda-beda, juga ditandai oleh apa yang disebut orang Belanda *belezenheid* dan erudisi yang pantas menjadi contoh. Mereka bukanlah hanya produk dari lembaga pendidik-

an yang mereka lalui, tetapi adalah pula hasil dari usaha sendiri. Dikatakan otodidak mereka bukan, sebab mereka juga hasil dari lembaga pendidikan tertentu, tetapi mereka bukan saja lebih dari sekadar hasil lembaga tersebut, mereka juga memperlihatkan kemampuan yang lain. Mereka tidak saja selalu berusaha meningkatkan keahlian, tetapi juga menambah jumlah kemampuan. Maka, kitapun berkenalan dengan kiai pesantren yang bukan saja lancar tetapi ingin mengembangkan pengetahuan berbahasa Eropa yang modern, diplomat yang bergumul dengan filsafat politik Islam, jenderal yang mendalami sejarah pemikiran politik tanah air, anak seorang ulama besar yang menjadi anggota perumus termuda dari Pembukaan UUD, dokter tentara yang mempelajari masalah Cina perantauan, anak pesantren yang menjadi pelopor studi perbandingan agama, anak abangan yang menjadi guru besar Indonesia yang pertama tentang *Islamic studies* di sebuah universitas terkemuka, dan sebagainya.

Pernah di suatu saat, di awal tahun 1950-an, para politisi, apapun partai dan ideologinya, di negara kita yang tercinta ini secara sembunyi-sembunyi dibedakan oleh publik politik atas dua golongan, yaitu yang "Republikein" dan yang "Federalis". Dalam konteks negara baru, yang setelah sekian lama mengalami revolusi dan perang kemerdekaan, perbedaan ini dengan sengaja tidak diungkit-ungkit secara terbuka. Sebab bukankah masa depan, bagaimanapun juga, adalah milik kita bersama sebagai sebuah bangsa yang merdeka? Namun begitu, di saat-saat pertentangan politik sedang meruncing dan ketika hasrat ingin menjatuhkan lawan sedang menggebu-gebu, tuduhan "Federalis" pada tokoh politik tertentu terkatakan juga. Dan tuduhan ini bisa juga dianggap sebagai pengungkapan aib sejarah, sebab kata ini menunjukkan bahwa sang tokoh pernah di satu saat, ketika revolusi sedang berkecamuk, bersedia ikut serta dalam proyek "negara bagian", yang diprakarsai oleh Van Mook. Karena adanya "negara-negara bagian" inilah maka salah satu hasil Konperensi Meja Bundar (1949) mengatakan bahwa bentuk negara Indonesia yang berdaulat adalah Republik Indonesia Serikat. Tentu bisa dicatat juga bahwa umur R.I.S ini tak lebih dari delapan bulan. Tanggal 17 Agustus 1950 Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali berdiri.

Tetapi apa hubungan kilasan sejarah politik yang anekdotal ini dengan profil Menteri Agama? Hubungannya sedikit saja, tetapi

secara simbolik penting. Tak seorangpun dari rentetan Menteri Agama yang terkena tuduhan dan bisa dituding "Federalis", aib sejarah yang ingin—dan memang semestinya—dilupakan ini. Semua mereka adalah kaum "Republikein". Bahkan ketika, di bulan Desember, 1948, Yogyakarta, ibukota Republik, diduduki Belanda dan Presiden, Wakil Presiden, yang merangkap Perdana Menteri, serta sekian banyak menteri mereka tawan, Menteri Agama, baik yang mula-mula dijabat Teuku M.Hasan, maupun yang kemudian kembali dijabat oleh K.H. Masykur, ikut bergerilya, sebagai pejabat teras dari Pemerintah Darurat Republik Indonesia.

Kalau saja—sekali lagi, kalau saja—Menteri Agama adalah sebuah organisasi massa atau sekurang-kurangnya *"pressure group"*, bukannya jabatan yang pernah dipangku seseorang, barangkali "golongan" ini akan mempunyai penawaran politik yang tinggi juga. Coba saja lihat, tiga orang dari "golongan ini" (K.H.Wahid Hasyim, K.H.Masykur, dan T.M.Hasan) bisa diperlakukan secara resmi sebagai *founding fathers* dari negara ini. Mereka adalah anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Jika badan yang pertama merencanakan UUD, maka yang kedua, pada tanggal 18, 1945 mengadakan revisi sekadarnya dan mensyahkan UUD serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. Bahkan Wahid Hasyim adalah salah seorang anggota Panitia Sembilan, yang merumuskan Pembukaan UUD 1945, yang sempat dinamai (atas usul Mohammad Yamin) *Jakarta Charter.* Bukankah Pembukaan ini yang menjadi landasan ideologis dan konstitusional negara kita? Jika H.M. Rasjidi B.A. (kemudian dikenal sebagai Prof. Dr. H.M. Rasjidi), Menteri Agama yang pertama (dalam Kabinet Sjahrir II) adalah pula salah seorang diplomat kita yang pertama, yang bersama-sama H.Agus Salim, *"the Grand Old Man of the Republic"*, berhasil menarik simpati dan dukungan negara-negara Islam, maka Hasan adalah gubernur R.I. yang pertama dari propinsi Sumatra (satu dari delapan propinsi yang disyahkan PPKI, yang telah menjadikan dirinya sebagai Komite Nasional Indonesia). Kalau hal-hal ini saja belum cukup, maka bisa juga dikatakan bahwa bukan saja Alamsyah yang sejak muda telah ikut berjuang sebagai anggota TNI, semua Menteri Agama yang bergelar Kiyai adalah pula mantan pimpinan lokal ataupun nasional dari lasykar Sabilillah atau Hizbullah.

Biografi, kata orang, hanyalah ingin mengisahkan jalan dan irama kehidupan seseorang sebagai mana "adanya". Tetapi kalau biografi itu telah menyibukkan diri dengan usaha membesar-besarkan tokoh yang dikisahkannya, bahkan telah usil pula untuk mempersuci-sucikannya—seakan-akan tokoh tersebut tanpa salah dan khilaf—maka kitapun tidak lagi berhadapan dengan biografi, tetapi dengan hagiografi, riwayat hidup orang suci. Riwayat hidup para santo di dalam tradisi Katholik disebut hagiografi, demikian juga tampaknya dengan riwayat hidup para sufi Islam yang telah mencapai maqam yang tertinggi. Hagiografi adalah sebuah kemestian dalam komunitas agama sebab dengan hagiografi kebenaran ajaran yang hakiki boleh diaktualkan dalam kehidupan seseorang. Hagiografi adalah kisah-kisah yang memantulkan personifikasi dari keimanan, nilai-nilai luhur, dan kesucian.

Tetapi kalau sekiranya yang kita dapatkan ialah sekian banyak ikhtisar biografi, yang biasa disebut *collective biography*, dibanding-bandingkan, maka kitapun telah mempunyai prosopografi. Dengan prosopografi kita akan bisa melihat latar belakang umum dari tokoh-tokoh yang menaikkan peranan penting dalam sejarah, dan dengan ini pula kita bisa mengetahui corak struktur sosial dan mobilitas. Maka, bagaimanakah kalau sekiranya biografi para Menteri Agama ini kita perlakukan sebagai prosopografi? Tidak perlu hal-hal yang pelik itu ditanyakan, tetapi cukup yang menarik saja. Inilah sebagian dari hasilnya.

Ada yang menjabat sebagai Menteri Agama hanya sekali saja dan itupun juga sangat sebentar. Rekor dalam hal ini dipegang oleh Teuku Hasan. Ia memegang jabatan ini hanya dua-tiga bulan saja, menjelang hubungan antara P.D.R.I. dengan Jawa berjalan dengan baik, sehingga K.H. Masjkur, yang telah menjadi Menteri Agama dalam Kabinet Hatta I, kembali menjabatnya. Bukan itu saja, ketika menjabat sebagai Menteri Agama itu, Teuku Hasan juga menjabat tiga portfolio (Urusan Dalam Negeri, Sosial, dan juga P.P. dan K.) yang lain. Tetapi kalau yang terlama yang akan ditanyakan, maka sampai sekarang belum ada yang bisa memecahkan rekor Munawir Sjadzali, yang menjadi menteri selama sepuluh tahun. Meskipun begitu ia hanya sempat menjadi Menteri Agama dalam dua kali masa jabatan saja. Rekor yang tersering menjadi Menteri dipegang oleh K.H. Masykur, yang menjadi menteri dalam enam kabinet. Setelah berturut-turut—kecuali sebentar

di awal PDRI— menjadi Menteri Agama, mulai dari Kabinet Amir Sjarifuddin, kemudian Kabinet Hatta I dan II, dan Kabinet peralihan Mr. Soesanto, menjelang R.I. resmi menjadi salah satu bagian RIS (20 Desember 1948 sampai 21 Januari 1949), Masykur terakhir menjabat dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo I (30 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955).

Meskipun kalau dihitung-hitung lamanya menjadi menteri hanya empat tahun lebih sedikit, namun dalam rekor K.H. Masjkur dalam keseringan menjabat Menteri Agama ini barangkali tidak akan pernah dipecahkan oleh siapapun. Pengharaman secara konstitusional terhadap sistem Kabinet Parlementer telah memperkecil kemungkinan orang menjadi Menteri terlalu sering. Menteri-menteri dalam sistem Kabinet Presidensial seperti yang kini kita punyai tidak bertanggunjawab kepada Parlemen. Jadi Parlemen atau DPR tak akan bisa menjatuhkan kabinet. Apalagi Presiden bukan saja Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan adalah pula secara konvensional dianggap sebagai Mandataris MPR. Jadi masa jabatan sebagai menteri cukup lama, tidak hanya beberapa bulan, seperti bisa terjadi dalam sistem kabinet parlementer. Di samping sistem politik, jangan pula dilupakan faktor lain. Tingkat kepekaan politik dari jabatan Menteri Agama, kalau dibandingkan dengan menteri-menteri teknis, semakin memperkecil kemungkinan orang bisa menjadi Menteri Agama berkali-kali.

Munawir terlama, padahal ia cuma dua kali menjadi menteri, Masjkur tersering padahal lamanya ia menjabat tak sampai satu masa jabatan Munawir. Dari perbedaan ini kita sudah bisa melihat perbedaan Orde Baru dengan masa Demokrasi Parlementer dan zaman Demokrasi Terpimpin. Kestabilan politik relatif yang dibina oleh Orde Baru lebih memungkinkan seorang Menteri untuk mengerjakan rencana kerjanya dalam waktu yang memadai. Kemewahan ini nyaris tak dipunyai oleh menteri-menteri dari kedua periode sebelum Orde Baru, apalagi oleh kabinet di zaman Demokrasi Parlementer. Sewaktu-waktu, entah karena apa, parlemen bisa mengajukan mosi tidak percaya dan, lagi-lagi entah karena apa, salah satu partai pendukung kabinet, ikut mendukung mosi itu, maka jatuhlah kabinet. Selanjutnya nasib sang menteri, yang telah demisioner, ditentukan oleh perbandingan kekuatan partai-partai politik dan oleh hasil dari apa yang dahulu disebut *koehandel* alias "dagang sapi", yang maksudnya, tentu saja, tawar-

menawar dalam pembagian kursi jabatan.

Tetapi biarlah para ahli ilmu politik memperdebatkan untung ruginya sistem-sistem politik yang telah dan sedang kita jalani ini. Ada hal lain yang menarik untuk diperhatikan. Berapakah umur seseorang ketika ia mendapat kehormatan atau tugas sebagai Menteri Agama? Entah kapan rekor Rasjidi akan terpecahkan, *wallahu alam*. Tetapi yang jelas ia diangkat sebagai Menteri Agama yang resmi, tanpa memperhitungkan bahwa sebelumnya ia telah menjadi Menteri Negara dalam Kabinet Sjahrir II (1946), ketika ia berumur 31 tahun. Rekor ini hanya bisa didekati—meskipun cukup jauh juga—oleh Wahid Hasyim, yang menjadi Menteri Agama ketika berusia 35 tahun. Di zaman Orde Baru yang telah mantap umur 30-an hanya mungkin "laku" untuk menjadi Menteri Pemuda, tak ubah halnya dengan kenyataan bahwa hanya wanita yang mungkin akan bisa diangkat menjadi Menteri Urusan Peranan Wanita. Rekor tertua dipegang oleh K.H. Dachlan yang diangkat menjadi Menteri waktu ia telah berumur 59 tahun. Dalam soal ketuaan ini ia diikuti oleh Munawir yang diangkat waktu berumur 58 tahun.

Rekor termuda yang sampai kini tak "terpecahkan"—kalau boleh memakai bahasa olah raga—tercapai di zaman Revolusi, sedangkan rekor umur tertua "diperoleh" di dalam periode Orde Baru. Apakah artinya ini? Di zaman pra Orde Baru yang diangkat atau dipilih sebagai Menteri Agama, kecuali Rasjidi dan Wahid, berumur 40-an. Di zaman Orde Baru, kecuali Mukti Ali, yang menjadi menteri pada usia 48 tahun, mereka yang diangkat sebagai Menteri Agama ketika telah berumur 50-an. Jadi? Apakah ini menunjukkan bahwa di zaman yang stabil umur yang tua lebih menjanjikan kematangan, sedangkan di masa peralihan, ketika ketidakpastian sangat kuat dirasakan, mereka yang muda lebih bisa diandalkan? Ataukah, memang sesungguhnya Revolusi Kemerdekaan adalah saat ketika percepatan proses pematangan terjadi dengan gencar—yang muda cepat dianggap matang—sedangkan zaman Orde Baru adalah periode ketika perlambatan berada dalam situasi kemudaan diperlukan? Maka dibiarkanlah orang berlama-lama menikmati fase sebagai anggota generasi muda, yang masih harus menunggu giliran, yang entah kapan akan datang.

Tetapi sudahlah. Serahkan saja hal ini pada mereka yang lebih ingin mengkajinya lebih lanjut. Hanya saja ada satu hal lagi yang

menarik kalau masa lalu dibandingkan dengan masa kini. Bisakah dibayangkan sekarang bagaimana kalau sekiranya seorang mantan Menteri kemudian diangkat sebagai Sekretaris Jenderal di Departemen yang pernah dipimpinnya? Hal yang lebih mungkin dan agak lumrah ialah seorang birokrat Departemen mencapai puncak karirnya ketika ia keluar dari ketentuan birokratis, tentang pensiun dan sebagainya, dan mendapat jabatan politik yang tertinggi, yaitu menjadi pembantu mandatarsi MPR, alias menteri. Sekian banyak menteri kabinet Pembangunan mengalami nasib yang baik seperti ini. Hirarkisasi atau eselonisasi yang telah sedemikian rapi seakan-akan telah menutup segala kemungkinan yang bisa mengobrak-abrik tata tertib yang telah tersusun rapi itu. Tidak demikian halnya ketika roda revolusi nasional sedang berjalan, bahkan juga sesudah kedaulatan negara mendapat pengakuan. Setelah kabinet Sjahrir II jatuh, Rasjidi pun tidak lagi menjadi Menteri Agama. Kafrawi pun dipilih untuk menggantikannya. Tetapi Rasjidi diangkat menjadi Sekretaris Jenderal. Dalam konteks revolusi rupanya semuanya hanyalah masalah pembagian tugas saja. Dalam suasana inilah konsep "sirkulasi elite", seperti yang pernah didengungkan oleh sebuah teori klassik, seakan-akan menemukan bentuknya yang paling murni. Sirkulasi yang bisa naik dan turun, ke samping dan ke depan. Tetapi memang perlu dicatat bahwa kelancaran dari sirkulasi elite hanya mungkin terjadi dalam konteks masyarakat madani, *civil society*, yang kuat, bukan dalam situasi ketika "negara" menjadi faktor penentu yang bersifat hegemonik. Dan revolusi bukan saja suasana ketika partisipasi politik masyarakat sangat intens dan meluas, tetapi juga saat sirkulasi elite berjalan dengan cepat.

Meskipun hanya bertolak dari prosopografi para Menteri Agama ternyatalah bahwa lahirnya Orde Baru dan bermulanya periode teknokratis merupakan sebuah pembatas-sejarah, sebuah *caesure*, yang penting dalam sejarah kontemporer tanah air kita. Lihat saja latar belakang keluarga dan pendidikan para Menteri Agama. Kecuali Rasjidi, yang sadar sekali bahwa ia sesungguhnya berasal dari kalangan keluarga yang *abangan*, yang tak perduli ajaran dan ibadah agama Islam yang resmi dianut, semua Menteri Agama di zaman pra-Orde Baru berasal dari keluarga santri yang saleh (termasuk T.M. Hasan, yang keturunan *uluebalang* dari Aceh) dan bahkan sebagian besar dari keluarga ulama pesantren. Kecuali Teuku

Hasan (yang harus juga dicatat tak begitu sempat memainkan peranannya sebagai Menteri Agama) semua yang lain, termasuk Rasjidi, bukan saja keluaran pesantren, tetapi juga adalah mereka yang menekuni masalah keagamaan, khususnya Islam, meskipun tidak semua mendapat gelar kehormatan kiyai. Pesantren, Jawa Timur, dan fikih adalah gambaran umum dari latar belakang sosial dan intelektual dari para menteri agama. Keseragaman ini menjadi buyar di zaman Orde Baru. Beragam latar belakang keluarga kita temui. Memang ada juga yang berasal dari keluarga santri "tradisionalis", tetapi di samping itu ada juga anak kepala kampung dari sebuah desa di Lampung, yang telah yatim piatu sejak kecil; ada anak seorang ulama desa yang secara material serba-kekurangan, tetapi selalu memperdalam ilmu keagamaan, yang berasal dari Jawa Tengah; dan ada pula anak dari seorang nasionalis yang pedagang besar berasal dari Sumatra Barat.

Selama Orde Baru hanya seorang kiyai yang sempat diangkat sebagai Menteri Agama, Kiyai Dachlan. Itupun terjadi di masa awal, ketika Orde Baru sedang sibuk mengadakan konsolidasi kekuasaan. Setelah itu? Ada guru besar IAIN, yang mempunyai kecenderungan "reformis", ada jenderal, yang mantan Sekretaris Negara, dutabesar, yang mempunyai profil politik yang tinggi; ada diplomat karir, yang tak pernah menghentikan usahanya untuk mempelajari masalah keislaman; dan ada pula dokter, yang laksamana angkatan laut, tetapi suka berdakwah dan mempelajari masalah golongan Cina.

Bukan itu saja. Lagi-lagi kecuali T. Hasan yang serba-darurat, semua Menteri Agama di zaman pra-Orde Baru adalah wakil dari partai-partai Islam. Dari kesemuanya hanyalah Rasjidi dan Fakih Usman yang tidak berasal dari kalangan (yang mula-mula "anggota istimewa" dari Masyumi, kemudian, di tahun 1952, menjadi partai yang independen) Nahdlatul Ulama. Dalam konteks sistim politik kepartaian, kecederungan ini bisa dianggap bahwa Kementerian, yang kemudian disebut Departemen, Agama bukan saja bisa—setidak-tidaknya secara teoretis, kalau tak perlu dibuktikan secara empiris—merupakan sumber patronage politik bagi N.U. tetapi juga benteng pertahanan "tradisionalisme Islam", yang cenderung menekankan keberlakuan ketentuan fiqih daripada dorongan reformisme, yang ingin mempersoalkan semua. Bahkan semua Menteri Agama yang dihasilkan oleh "tradisionalisme Is-

lam" adalah pula para ahli fikih yang disegani. Karena itu bisalah dimengerti kalau kadang-kadang kecenderungan berfikir yang serba-fikih ini terpantul juga dalam kebijaksaaan politik. Masalahnya baru muncul, bila pendekatan serba-fikih ini tak sejalan dengan pemikiran ideologis dan strategi politik. Maka semacam *"cosmic misunderstanding"* di antara partai-partai Islam tak selalu bisa dihindarkan.

Ketika akhirnya konsolidasi politik Orde Baru telah semakin mantap dan Mukti Ali diangkat sebagai Menteri Agama di tahun 1972, identifikasi semu antara N.U. dan Departemen Agama pun mencair. Teknokratisme, kestabilan politik, perubahan sistim politik dan tak kurang pentingnya perubahan sosial-ekonomi yang terjadi di saat menjelang dan selama masa pembangunan, yang serta merta menimbulkan tantangan baru, telah menyebabkan terjadinya perubahan pola penunjukan Menteri Agama. Hal ini juga berarti bahwa meskipun masalah umat Islam tetap merupakan sasaran utama dari pembinaan yang harus dijalankan oleh Departemen Agama, tetapi perubahan sosial-ekonomi yang berjalan dengan cepat—setelah lebih dulu mengalami tragedi nasional yang dahsyat di tahun 1965—menyebabkan masalah keagamaan menjadi lebih kompleks dan sensitif.

Menteri Agama hanyalah salah satu jabatan dalam kabinet. Bahkan dari sudut senioritas dan protokoler Menteri Agama berada di bawah beberapa menteri yang lain, seperti Menteri Dalam Negeri, Luar Negeri, dan Pertahanan. Tetapi bukan saja peranannya semakin penting saja di saat pluralisme sosial semakin menaik, berbagai corak kebijaksanaan yang dijalankan atau gagal dijalankan oleh Menteri Agama selalu bisa dipakai sebagai indikator yang penting tentang situasi dan perkembangan masyarakat-bangsa. Kepekaan agama dalam kehidupan masyarakat-bangsa menjadikan jabatan Menteri Agama tak pernah bisa dibatasi oleh kenyataan bahwa ia sesungguhnya hanyalah salah seorang penanggung jawab sebagian dari tugas administrasi negara belaka. Dalam situasi perubahan sosial, agama, yang bertolak dari pengakuan akan adanya sesuatu yang mutlak benar, mempunyai kemungkinan untuk membentuk sikap yang *non-negotiable,* yang tak dapat ditawar. Agama pun mungkin tampil sebagai landasan dari pengingkaran akan keabsyahan realitas sosial yang berkembang. Kalau yang pertama menciptakan situasi konflik, terpendam atau

bukan, maka yang kedua, memupuk apatisme. Kedua kemungkinan ini merugikan dan keduanya bisa pula menyesatkan. Masyarakat-bangsa, yang mungkin telah dibina dalam situasi keharmonisan hubungan dan toleransi yang sehat, hanya mungkin mendapatkan kemajuan, sesuai dengan hasrat normatif dalam suasana keikutsertaan masyarakat-bangsa yang menyeluruh. Karena itulah langkah-langkah Menteri Agama serta keberhasilan dan kegagalan, kegembiraan dan kekecewaannya, bukan saja indikator dari kinerja Departemen yang dipimpinnya, tetapi juga adalah sesungguhnya merupakan gambaran perkembangan sosial, politik, dan ekonomi serta budaya yang sedang terjadi.

Derap Langkah Menteri Agama

Barangkali telah terlupakan, tetapi adalah Mohammad Yamin yang mengusulkan dalam salah satu sidang BPUPKI agar pemerintah Republik Indonesia, di samping mempunyai kementerian-kementerian yang telah umum, seperti luar negeri, dalam negeri, keuangan, dan sebagainya, membentuk juga beberapa kementerian negara yang khusus. Salah satu kementerian yang diusulkannya ialah "Kementerian Islamiah", yang, katanya, "memberi jaminan kepada urusan Islam (mesjid, langgar, surau, wakaf), yang di tanah Indonesia dapat dilihat dan dirasakan artinya dengan kesungguhan hati". Tetapi meskipun beberapa usulnya tentang susunan negara bisa diterima dan menjadi bagian dari UUD 1945, usulnya tentang ini tidak begitu mendapat sambutan. Mungkin karena ketika ia mengajukan usul ini *Jakarta Charter* atau Piagam Jakarta dengan "tujuh kata bertuah" yang merupakan kompromi antara golongan "Islam" dan "kebangsaan" telah tercapai. Bukankah ucapan "ke Tuhanan, *dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya*" telah mencakup semuanya? Hanya saja, setelah Proklamasi Kemerdekaan telah diucapkan dan konstutusi harus disyahkan, dalam rapat yang diadakan pada tanggal 18 Agustus, atas usul Bung Hatta, yang didukung oleh beberapa tokoh Islam, PPKI mengganti "tujuh kata bertuah" itu, dengan "*keTuhanan yang Maha Esa*".

Ketika Kabinet Presidential dibentuk di awal bulan September 1945, jabatan Menteri Agama belum diadakan. Demikian juga halnya, di bulan November, ketika kabinet Presidential digantikan oleh kabinet parlementer, di bawah Perdana Menteri Sjahrir. Baru-

lah tanggal 3 Januari 1946, atas usul Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, Kementerian Agama diputuskan untuk dibentuk. Pada bulan Maret 1946, Rasjidi diangkat sebagai menteri yang pertama, meskipun ia mula-mula mengetahuinya dari berita surat kabar saja. Ia menjadi menteri dalam Kabinet Sjahrir II.

Baiklah, kini kementerian telah resmi berdiri dan Menteri pun telah pula diangkat, tetapi apakah yang harus dikerjakan? Tentu saja tugas pertama ialah mencari tempat yang bisa dijadikan kantor. Sesudah itu? Satu-satunya preseden yang bisa diikuti oleh menteri pertama ialah peninggalan kantor agama, *Shumubu*, dari masa pendudukan Jepang, yang sebenarnya juga mengikuti preseden yang telah dirintis pemerintah kolonial Belanda, dengan Kantor Penasehat Urusan Bumiputera-nya. Jadi urusan yang terpenting ialah, sebagaimana Rasjidi pernah menyebutnya, masalah "ibadat" yang, tentu saja, khusus menyangkut umat Islam. Jadi sesuai juga dengan usul Yamin tentang perlunya "kementerian Islamiah". Tetapi, bagaimanakah struktur kementerian itu dan siapakah yang bisa menjalankan tugas-tugas kebirokrasian agama ini?

Sejak mulai dibentuk, penyelenggaraan "ibadat", dengan segala cabang-cabang dan wujudnya, serta penyempurnaan struktur dan personalia kementerian atau departemen adalah dua benang emas yang selalu merupakan perhatian utama dari para menteri. Bahkan ada menteri yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk membenahi kelancaran hubungan antara bentuk struktural kementerian dengan penyelengaraan "ibadat", untuk semua agama yang diakui. Salah satu hal yang selalu menjadi perhatian utama Tarmizi, tokoh yang ke-13 atau ke-14 yang dipercayakan menjabat sebagai Menteri Agama, adalah pengurusan dan penyempurnaan "perjalanan haji". Terlepas dari tingkat keberhasilan mereka, "perjalanan haji" merupakan salah satu program utama dari setiap Menteri Agama sejak awal tahun 1950-an. Hal ini diwujudkan juga dalam susunan struktural kelembagaan Departemen. Dari usaha Menteri Agama untuk melancarkan "perjalanan haji" ini kita bisa juga melihat tingkat perkembangan ekonomi masyarakat Islam. Sedemikian pentingnya "perjalanan haji" ini sehingga tidak jarang masyarakat, khususnya, dari kalangan umat Islam, menilai keberhasilan atau kegagalan seorang Menteri berdasarkan kelancaran pelaksanaan "perjalanan haji" ini. Ironis, mungkin, karena setiap

tahun, peristiwa yang baru beberapa tahun terakhir ini bisa melibatkan sekitar satu persen penduduk—sesuai dengan kuota yang ditentukan pemerintah Saudi—menjadi ukuran. Tetapi, bukankah "perjalanan haji" merupakan ibadat yang sangat tergantung pada kelancaran organisasi yang rapi dan bersih?

Ketika Tarmizi masih menjabat Sekretaris Jenderal, atas dukungan Menteri Munawir, ia berhasil mengusahakan pengiriman sekian banyak birokrat Departemen ke luar negeri untuk mendapatkan latihan management. Ketika telah menjadi menteri usaha ini terus dilanjutkan. Terobosan yang penting ini berakar dari keharusan yang telah sejak semula menjadi perhatian para Menteri Agama—lagi-lagi dengan tingkat perhatian yang tak sama dan hasil yang juga berbeda-beda—yaitu penyempurnaan struktur Departemen serta peningkatan mutu personalia. Barangkali tidak perlu dijelaskan bahwa ketertiban struktur serta pembagian kerja yang jelas antara unit-unit barulah tercapai di zaman Orde Baru. Kestabilan politik dan sistem politik Presidensial dari Orde Baru, yang secara teoretis lebih menjamin hubungan kerja sama lintas-sektoral dan lintas-departemental, telah lebih memungkinkan Menteri Agama untuk membenahi masalah birokrasi dan administrasi ini.

Di samping kenyataan demografis bahwa hampir 90 persen rakyat Indonesia beragama Islam, keharusan sosiologis pun menyebabkan setiap Menteri Agama harus memperhatikan "ibadat" dari pemeluk agama Islam dan "struktur serta personalia organisasi". Bukankah Islam pada dasarnya sebuah agama yang tanpa struktur? Makhluk, ciptaan Allah, memang harus langsung bertanggungjawab kepada Al-Khalik yang Maha Pencipta, tetapi hidup bermasyarakat memerlukan ikatan struktural yang jelas. Kalau dalam agama lain hal ini bisa diberikan oleh gereja dan pendeta, pura dengan pedanda, wihara dengan bikshu, bagaimanakah dengan Islam? Masjid adalah "rumah Allah", yang anti-struktur dan egaliter. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang sangat tergantung pada ketertiban struktur. Tetapi struktur dari lembaga ini, secara formal, hanya teruntuk bagi dirinya. Begitulah, berbagai corak struktur pun muncul juga, bukan sebagai keharusan teologis, tetapi kebutuhan sosiologis yang tak terhindarkan. Struktur dan sistem otoritas keagamaan itu berakar dari sistim dan dinamika masyarakat setempat. Tetapi bagaimanakah kalau sekiranya semua komunitas lokal itu telah diikat oleh se-

buah wadah politik yang disebut negara-bangsa? Bagaimanakah corak struktur dan sistem otoritas keagamaan yang harus dibuat dan dibina? Maka bisalah dimengerti juga kalau dalam pemahaman para Menteri Agama—sejak yang pertama sampai sekarang—"ibadat" tidaklah hanya diartikan sebagai hubungan makhluk dengan al-Khalik dan hubungan sesama mahkluk, tetapi juga dan, terutama, bagaimana sebaiknya komunitas umat mengatur dan meningkatkan harkat dirinya. Kelihatanlah bahwa Menteri Agama, sebagai pelaksana dari sebagian tugas kenegaraan, lebih menekankan perannya dalam membina masalah komunitas umat ini. Menteri Agama biasanya berusaha memberi keleluasaan dan, bila mungkin fasilitas bagi terselenggaranya dengan baik hubungan individu dengan Penciptanya—maka pembangunan masjid pun bila perlu dibantu dan "perjalanan haji" diselenggarakan—tetapi penyelenggaraan ke arah terwujudnya masyarakat yang diridhai dan rukun adalah perhatian utama. Dalam hal yang kedua inilah para Menteri Agama meninggalkan jejak mereka. Dalam hal ini pulalah kita bisa melihat pemahaman sang Menteri tentang tuntutan doktrin dan corak dinamika dari masyarakat yang sedang mengalami perubahan.

Tak bisa dielakkan kalau Rasjidi, menteri pertama, lebih sibuk mengurus hal-hal yang bersifat keorganisasian. Kafrawi, menteri kedua, di samping meneruskan usaha pembenahan masalah keorganisasian kementerian, telah mulai memperhatikan dua masalah kemasyarakatan, yaitu masalah Nikah, Talak, dan Rujuk, serta pengajaran agama. Dengan mulai menangani kedua masalah kemasyarakatan ini menteri Kafrawi bukan saja telah menyentuh masalah otoritas keagamaan, tetapi juga telah mulai meletakkan landasan baru bagi pembinaan umat. Masjkur, mungkin boleh dikatakan sebagai menteri yang tak pernah lepas dari situasi krisis. Ia harus menjalani krisis politik yang dialami Kabinet Amir Sjarifuddin, akibat "perjanjian Renville", yang dianggap sebagian besar anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP, yaitu "perlemen sementara") merugikan posisi Republik. Belum sempat bernafas lega, karena diangkat kembali menjadi menteri di dalam Kabinet Hatta, yang jauh lebih kuat dan berwibawa, ia harus kembali mengalami "peristiwa Madiun", (1948) yaitu pemberontakan P.K.I., yang dipimpin Muso dan Amir Sjarifuddin. Baru saja konflik sesama bangsa ini bisa diatasi, Belanda melancarkan Agresi

Kedua dan Yogyakarta pun diduduki. Masjkur harus menjadi menteri yang bergerilya. Jadi, tidaklah mengherankan bahwa ia hanya bisa melanjutkan usaha yang telah dimulai oleh kedua pendahulunya saja. Peranan para Menteri Agama dan kementerian yang mereka pimpin di zaman Revolusi masih perlu diteliti lebih lanjut. Meskipun sebagai kementerian yang mempunyai urusan khusus—soal "peribadatan" dalam pengerian luas—kementerian belum bisa berbuat banyak, namun peranan aktual dan simbolik yang dimainkan oleh Menteri Agama, sebagai "umat Islam" dalam pemerintahan kabinet-kabinet Sosialis (Sjahrir dan Amir Sjarifuddin) tidak bisa dianggap enteng, apalagi kalau diingat Masyumi, satu-satunya partai Islam, berada di pihak oposisi.

Barangkali tidaklah berlebih-lebihan kalau dikatakan bahwa kementerian agama barulah berfungsi sebagai kementerian yang utuh, bukan sekadar merupakan bagian dari perjuangan bangsa, setelah kedaulatan negara mendapat pengakuan. Wahid Hasyim bukanlah Menteri Agama yang pertama, tetapi sebagai Menteri Agama dari R.I.S. ialah sesungguhnya menteri pertama yang mempunyai wilayah di seluruh bekas Hindia Belanda (kecuali Irian Barat, yang waktu itu masih dipersengketakan). Setelah kementerian Agama R.I.S. dan R.I. , yang berpusat di Yogya, dikoordinasikan di bawah Menteri Agama R.I.S., Menteri Agama pun harus menyusun struktur kelembagaan yang sesuai. Zaman damai telah datang, periode perjuangan bersenjata telah selesai, dan seluruh Indonesia telah berada di bawah sebuah kekusaan yang syah. Bagaimanakah kementerian agama harus memainkan peranannya? Kesempatan emas yang didapatkan Wahid karena menjadi menteri setelah kedaulatan negara didapatkan ditambah lagi dengan sebuah kemewahan yang langka. Ia menjadi Menteri Agama dalam tiga kabinet—Hatta, Natsir dan Soekiman—secara berturut-turut.

Salah satu masalah kelembagaan yang diselesaikannya ialah pembentukan Bagian Urusan Haji—jadi pembenahan "perjalanan haji". Bukankah telah sekian tahun, sejak zaman pendudukan Jepang, umat Islam hampir tidak mendapat kesempatan untuk menunaikan ibadah haji, akibat situasi politik yang sama sekali tak menguntungkan? Adalah pula di masa jabatan Wahid masalah pendidikan tinggi Islam diperhatikan pemerintah. Memang benar, perlu juga dicatat, bahwa di akhir 1930-an telah berdiri pergu-

ruan tinggi Islam di Bukittingi, tetapi kecurigaan pemerintah kolonial, karena memang didirikan oleh kerjasama para ulama "Kaum Muda" atau "reformis" dan kalangan pergerakan politik, serta pecahnya Perang Pasifik menyebabkan usaha ini hanya terhenti sampai di situ saja. Pada tanggal 15 September, 1951, Menteri Agama pun meresmikan berdirinya Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di bekas ibukota Republik, Yogyakarta.

Wahid Hasyim menjadi menteri dalam kabinet parlementer, ketika Presiden hanyalah (menurut UUD RIS. dan UUD Sementara) "Kepala Negara", tetapi bukan kepala pemerintahan. Presiden adalah simbol- negara, tetapi bukan yang langsung terlibat dalam masalah politik kenegaraan—seakan-akan Presiden berada di atas politik. Waku itu secara teoretis boleh dikatakan, *"The President can do no wrong"*. Dalam konteks ini maka tradisi merayakan hari besar Islam, isra'-mi'raj, maulid Nabi, dan Nuzulul Qur'an di Istana Negara dengan pidato sambutan dari Presiden, yang diletakkan oleh Menteri Agama, adalah sebuah tindakan simbolik—dan politik—yang sangat penting. Arti simbolik ini bertambah jelas, ketika pertentangan ideologis antara Presiden Soekarno, yang tidak pernah bisa menerima kenyataan bahwa ia secara konstitusional adalah Kepala Negara yang di atas politik, dengan partai-partai Islam sedang memuncak. Tradisi ini seakan-akan mengatakan bahwa betapapun mungkin Indonesia bukan sebuah negara Islam dan betapapun tidak adanya keharusan seorang Presiden beragama Islam—sebagaimana akhirnya diputuskan oleh sidang PPKI yang historis itu—tetapi negara, yang dilambangkan oleh istana dan Presiden, tak terlepas dari nilai kerohanian Islam. Tradisi ini meniadakan atau setidaknya mengurangi kemungkinan perpecahan yang disruptif. Tradisi ini terus berjalan, meskipun kini diadakan di Masjid Istiqlal. Dalam kaitan ini pula bisa dilihat makna simbolik dari takbir dan zikir yang dilakukan Presiden Soeharto di malam takbiran (1417 dan 1418 H).

Peranan dan fungsi yang *tidak* tertulis dari seorang Menteri Agama, sebagai jurubicara pemerintah terhadap umat dan sebagai pembela kepentingan umat di pemerintahan, dengan sangat jelas dipertegas oleh Wahid Hasyim. Sejak itu tak ada jalan kembali. Setiap Menteri Agama selalu mengadakan artikulasi terhadap peran yang tak tertulis, tetapi merupakan harapan sosial yang berat, ini. Tetapi memang tidak selamanya artikulasi ini berhasil. Ada

kalanya perwujudan peran ini malah membawa perdebatan internal umat, yang hanya bisa diselesaikan dalam perjalanan waktu. Hal ini terjadi di bulan Maret 1954 dalam masa jabatan K.H. Masjkur dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo. Konferensi para ulama di Cipanas, Jawa Barat, memberikan kepada Presiden Soekarno gelar *wali al-amri dharuri bi al-syaukah.* Alasan fiqih yang diberikan oleh Departemen Agama—kepala negara sebagai wali yang syah, yang mendelegasikan haknya kepada pejabat nikah setempat—tidak bisa diterima oleh berbagai kalangan.

Kearifan politik untuk memberi gelar ini ataupun keharusan fiqhiah tentu akan bisa terus diperdebatakan. Tetapi terlepas dari argumen fiqih atau politik, peristiwa ini tak terlepas dari keinginan untuk menjaga jembatan yang menghubungkan dengan simbol negara. Dengan begini, maka barangkali boleh dikatakan bahwa meskipun ia bukan menteri yang pertama, Wahid Hasyim adalah *founding father* Departemen Agama yang sesungguhnya. Tanpa disibukkan oleh masalah perjuangan bangsa mempertahankan kemerdekaan, seperti yang dialami oleh menteri-menteri sebelumnya, Wahid Hasyim mempunyai "kemewahan " relatif untuk meletakkan dasar yang lebih kokoh bagi berfungsi dan berperannya Departemen ini.

Keluarnya NU (di bawah pimpinan para kiyai yang mempunyai kecenderungan fiqih yang tinggi) dari Masyumi (yang berada di bawah kepemimpinan para Islam "reformis", yang berpendidikan Barat), yang secara langsung disebabkan oleh dipilihnya Fakih Usman dari unsur Muhammadiyah oleh pimpinan Masyumi untuk duduk sebagai Menteri Agama dalam Kabinet Wilopo, membawa akibat yang fundamental, bukan saja atas sistem kepartaian Islam, tetapi juga pada konstelasi politik Indonesia umumnya. Perpecahan ini memungkinkan dua partai yang pada dasarnya ingin memperjuangkan idealisme yang relatif sama, menemukan diri mereka berhadap-hadapan dalam menjalankan politik praktis. Kegagalan Pemilihan Umum untuk menghasilkan perbandingan kekuatan politik yang menjanjikan kestabilan politik, ketidakberhasilan Konstituante untuk merumuskan UUD yang baru, dikeluarkannya dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945, serta akhirnya dibubarkannya DPR hasil Pemilu dan dibentuknya DPR Gotong Royong, yang ditunjuk, untuk melancarkan berdiri tegaknya Demokrasi Terpimpin, membawa akibat yang penting juga

terhadap persepsi Menteri Agama membawa peran tak tertulisnya. Siapakah yang dimaksud sebagai "umat", yang bagaimanapun juga tak terpisah dari simbol kenegaraan, dipersonifikasikan oleh Presiden? Jika benar bahwa negara Indonesia, yang kini secara ideologis berdasarkan pada konsep Manipol-USDEK, secara politik didukung oleh tiga unsur, yang tergabung dalam konsep NASAKOM, dan NU, secara resmi dianggap sebagai wakil unsur A (Agama), bagaimanakah seorang Menteri Agama merumuskan kebijaksaaannya? KOM (Komunis) bagaimanapun juga tidak bisa ditolerir dari sudut ajaran—sebagaimana kemudian dirumuskan dengan baik oleh M. Ilyas—tetapi dalam konstelasi Demokrasi Terpimpin, partai yang mewakili aliran ini (PKI) harus dianggap sebagai sesama "kekuatan revolusioner", sedangkan Masyumi, harus berada di luar, karena telah dicap sebagai kekuatan kontra-revolusioner. Apakah pengikut Masyumi bisa dianggap "umat"?

Menjadi Menteri Agama dalam sistim Demokrasi Terpimpin, yang NASAKOM-is, berarti menghadapkan diri pada berbagai corak dilema. Tetapi sementara itu ada beberapa hal yang bisa juga dijalankan, demi umat, yang non-sektarian (kalau istilah sekarang boleh dipakai). Wahib Wahab mengadakan transformasi PTAIN menjadi IAIN. Usaha inipun dilanjutkan oleh Saifuddin Zuhri yang menambah jumlah sampai sembilan buah, yang tersebar di beberapa kota penting di tanah air. Tentu saja berbagai tuduhan bisa juga dilemparkan terhadap kebijaksanaan Menteri Agama terhadap situasi internal IAIN, tetapi kehadiran lembaga pendidikan ini tak bisa dipungkiri telah mengukir lembaran baru dalam sejarah umat Islam di Indonesia.

Saifuddin Zuhri bukan saja yang paling lama menduduki jabatan Menteri Agama di masa Demokrasi Terpimpin, tetapi adalah pula yang paling banyak menghadapi masalah dilematis. Ia menjadi menteri di masa puncak Demokrasi Terpimpin sampai menjelang regim ini telah mulai goyah. Lebih merupakan seorang intelektual, yang selalu ingin menembus segala kerutinan, dari pada seorang ulama, yang menginginkan kemantapan, Saifuddin adalah Menteri yang pertama mengadakan konferensi nasional mengenai peran dan kedudukan pesantren dan ia pulalah yang mendirikan Lembaga Penerjemahan al-Qur'an. Keduanya bolehlah dikatakan bersifat konsensual, dalam arti secara prinsipil keduanya

bisa diterima umat, yang tanpa batas-batas politik. Tetapi bukankah ini belum menyelesaikan masalah hubungan "A" dengan negara, yang dipersofikasikan oleh Presiden Seumur Hidup? Maka, iapun menambah pada serentetan gelar yang telah terlekat di pundak Presiden Soekarno dengan memberikannya gelar Doktor *honoris causa* dalam ilmu dakwah. Tetapi, di pihak lain, ia pula yang tegar berhadapan dengan Presiden, untuk meletakkan jabatan, jika saja Presiden menerima usul PKI untuk membubarkan HMI. Organisasi mahasiswa ini tidak dibubarkan, bahkan, kemudian tampil sebagai salah satu kekuatan penting yang menjatuhkan Demokrasi Terpimpin dan, bersama organisasi mahasiswa lain, yang tergabung dalam KAMI, ikut aktif merintis berdirinya Orde Baru.

Peristiwa di malam 30 September 1965 merontokkan pilar-pilar politik yang mendukung Demokrasi Terpimpin dan melepaskan unsur-unsur konflik yang selama ini secara artifisial dibendung dengan segala slogan dan ancaman kekerasan. Pada waktunya, ketika takarannya telah berlebihan, unsur-unsur konflik yang dibendung tanpa penyaluran yang wajar dalam sistim perwakilan dan tanpa adanya keterbukaan sistem politik, akhirnya meledak juga. Maka, tragedi nasional yang sangat traumatis pun terjadi. Setelah melalui pergolakan politik di pusat dan di daerah, akhirnya Orde Baru berdiri. Tetapi sejalan dengan itu unsur konflik yang baru pun juga muncul. Indonesia mulai berkenalan dengan konflik agama pada tingkat nasional. Inilah hal yang paling peka yang harus dihadapi Saifuddin Zuhri, ketika ia dingkat kembali oleh Acting Presiden sebagai Menteri Agama. Ia harus berhadapan dengan berbagai peristiwa lokal yang dibawa ke tahap nasional. Masalah P.K.I. dan peristiwa tragis yang terjadi akibat usaha G-30-S belum selesai, kini konflik baru telah menganga pula. Sejak saat ini masalah hubungan antar-agama merupakan agenda utama para Menteri Agama.

"Konflik agama" semakin memuncak ketika K.H. Dachlan yang diangkat sebagai menteri dalam kabinet Pembangunan I. Ia adalah menteri pertama setelah kedudukan jenderal Soeharto sebagai Presiden penuh dikukuhkan oleh MPRS. Sebagai menteri yang berasal dari sebuah partai politik, ia harus berhadapan dengan kenyataan bahwa ia berada dalam kabinet yang seakan-akan telah bersemboyan, *"Ideology, no. Program, yes"*. Ia mewakili sebuah

ideologi dalam kabinet yang "anti-ideologi". Bahkan ia adalah pula wakil dari partai, NU, yang semakin menunjukkan diri sebagai partai yang bisa mengimbangi Golkar, yang baru lahir dengan tanda gambar "Beringin" yang bernomer 5. Tidak kurang pentingnya, dalam periodenya pula gerakan yang kemudian, secara salah, disebut "neo-Islam", mulai membuat gaung dalam perpolitikan Islam. Di satu pihak gerakan intelektual ini ingin menggairahkan kembali pemikiran Islam, dengan berani mempertanyakan hal-hal yang selama ini telah diterima begitu saja. Dan di pihak lain, gerakan ini mulai mempertanyakan keabsyahan "partai yang berideologi Islam".

Berbagai hal yang kontroversial terus membayangi. Tetapi sementara itu Dachlan berhasil juga meletakkan dasar dari tradisi yang konsensual, yang kehadirannya tak diperdebatkan, yaitu mengadakan secara berkala *Musabaqah Tilawatil Qur'an* (1968) dan mendirikan Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (1971). Di masa jabatannya pulalah proyek Tafsir Al-Quran, Departemen Agama dimulai. Kalau sekiranya program yang konsensual ini sampai kini masih bertahan dan mendatangkan hasil, maka hal ini membuktikan bahwa Dachlan, meskipun menteri yang terakhir yang mewakili partai politik, adalah pula seorang yang peka terhadap panggilan zaman. Dalam hal ini Mukti Ali, yang diangkat setelah Golkar tampil sebagai kekuatan politik terbesar dan kekuatan Orde Baru telah semakin terkonsilidasi, mendapat kebebasan relatif untuk merumuskan tantangan baru dan merencanakan program baru.

Mukti Ali melihat tiga hal yang fundamental yang harus dihadapi. *Pertama,* kerukunan umat beragama. Maka, iapun tampil dengan gagasan perlunya dikembangkan tradisi dialog antar-agama. Masa kepemimpinannya memang ditandai antara lain dengan seri seminar dan dialog antar-agama. *Kedua,* menjadikan agama sebagai landasan pembangunan nasional. Ia ingin membantah, baik dengan argumen akademis, maupun secara empirik, bahwa agama adalah sesungguhnya pendorong utama dalam proses pembangunan. Maka, iapun mengusahakan agar pesantren bukan saja merupakan lembaga pendidikan, tetapi juga bisa berfungsi sebagai lembaga yang produktif. Iapun berhasil bersama-sama Menteri P dan K dan Menteri Dalam Negeri membuat SK Tiga Menteri, yang memungkinkan seorang tamatan madrasah Aliyah, menjadi

mahasiswa kedokteran, misalnya. Usaha peningkatan mutu IAIN pun dijalankan. IAIN mulai pula berkenalan dengan penelitian sosial keagamaan dan membuka diri pintu bagi para ahli ilmu sosial dan kemanusian lain. *Ketiga,* masalah kepemimpinan umat Islam. Iapun, sebagaimana sering dikatakan, "membidani" kelahiran Majelis Ulama Indonesia (1975).

Tetapi berada di saat pembaharuan dan pembangunan sedang menggebu-gebu dan ketika kekuasaan politik yang extra-konstitusional masih seakan-akan bebas bersileweran, berbagai hal yang ditimpakan dari luar tak selalu bisa diatasi oleh Mukti Ali. Iapun menjadi Menteri Agama pertama yang didemonstrasi oleh anak-anak madrasah, ketika ia memberikan keterangan pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang Perkawinan. Masalah inipun akhirnya harus diselesaikan secara extra-parlementer. UU Perkawinan yang lebih memuaskan golongan Islam, tetapi agak mengecewakan non-Islam, akhirnya disyahkan juga. Di saat terjadi kecurigaan pada golongan Islam, sebagai kekuatan yang dituduhkan anti-Pancasila oleh pihak-pihak tertentu, bukan saja kredibilitas Mukti Ali dipertanyakan oleh umat, yang justru ingin dibinanya, tetapi kecenderungan "kembali ke umat dan meninggalkan negara" pun semakin kuat di kalangan pemimpin umat. Ketika inilah Alamsyah, setelah Sidang Umum MPR 1978, diangkat sebagai Menteri Agama. Bisakah menyelesaikan dua hal yang sangat sensitif, yaitu kerukunan umat beragama dan pemulihan kepercayaan umat kepada negara?

Penunjukan Alamsyah menyalahi semua ketentuan tak tertulis tentang siapa semestinya yang bisa diangkat sebagai Menteri Agama—ia bukan tamatan pesantren, tetapi dari sekolah militer, tidak berasal dari organisasi masyarakat, tetapi dari birokrasi kemiliteran. Namun ia adalah menteri yang paling dekat dengan pusat kekuasaan. Mantan Sekretaris Negara, dutabesar di Belanda, dan wakil Ketua DPA. Alamsyah adalah pula sesungguhnya yang paling siap untuk menduduki jabatan sebagai menteri. Dengan cepat ia dapat merumuskan strategi politik untuk mengatasi kedua hal tersebut. Dari pembacaannya tentang proses perumusan UUD 1945, ia mengambil kesimpulan bahwa "Pancasila adalah pemberian dan pengorbanan umat Islam bagi bangsa". Peranan Wahid Hasyim pun ditonjolkannya di kalangan NU. Ia pun sangat menonjolkan peranan K.H. Bagus Hadikusumo dan Kahar Muzak-

kir di kalangan Muhammadyah. Dengan strategi ini Alamsyah bukan saja ingin meniadakan kecurigaan umat Islam terhadap Pancasila dan pemerintah Orde Baru, tetapi juga mengajak mereka untuk kembali "ke negara", sebagai pendukung pemerintah. Keharusan izin dakwah pun berhasil dihapuskannya. Menteri Agama pun menampilkan diri sebagai "pembela" umat dalam berhadapan dengan kecurigaan umat terhadap "Kristenisasi", dengan mengharuskan bantuan asing, melalui Departemen Agama, dan "kepercayaan", dengan menempatkannya sebagai bagian dari kebudayaan.

Strategi ideologis yang dijalankan Alamsyah untuk mendekatkan umat Islam dengan pemerintah Orde Baru bisa jadi merupakan hal-hal yang kontroversial, meskipun kini, dengan keuntungan tinjauan ke belakang, bisa dikatakan adalah awal dari terwujudnya paradigma politik Islam yang baru. Tetapi, "trilogi kerukunan" yang dicanangkannya—antarumat beragama, intra umat seagama, dan antara umat beragama dengan pemerintah—adalah konsep politik yang jitu, meskipun memerlukan strategi sosial yang tak terlalu mudah. Masalahnya ialah kerukunan dan konflik lebih sering ditentukan oleh faktor-faktor lain, bukan pada perbedaan agama atau pandagnagn terhadap ajaran doktrin yang sama dianut. Meskipun demikian sejak itu "trilogi kerukunan" ini tetap merupakan pedoman dari Departemen Agama.

Ketika Munawir diangkat sebagai Menteri Agama, Presiden dengan dukungan MPR telah melancarkan ofensif ideologisnya yang mengharuskan semua organisasi sosial untuk berazaskan Pancasila. Hal ini barangkali tidak terlalu berat bagi partai-partai yang memang telah melalui proses penggabungan, tetapi merupakan masalah bagi organisasi keagamaan, yang bukan saja berumur lebih tua dari negara, tetapi juga sejak semua bertolak dari landasan doktrin agama. Munawir, sang diplomat karir, kini harus "berdiplomasi" menghadapi organisasi keagamaan. Khusus mengenai masyarakat Islam Munawir bukan saja meneruskan usaha Alamsyah, untuk mengubah orientasi politik umat, tetapi juga menggugah umat Islam untuk merenungkan kembali tuntutan doktrin Islam. Dengan konsep yang kontroversial, "reaktualisasi pemikiran Islam" ia mempersoalkan pemahaman lama tentang ajaran dan mengajak umat menemukan afinitas faham kegamaan dengan realitas dan tuntutan zaman. Ia mungkin adalah Menteri

Agama pertama yang secara aktif melibatkan diri dalam diskursus keagamaan. Ia bukan saja tampil sebagai seorang birokrat yang ingin menjalankan kebijaksanaan pemerintah, tetapi juga sebagai seorang pemikir.

Kontroversi yang dimulai Munawir bisa dinggap sebagai "gugatan ke dalam", yang merambah jalan bagi pelaksanaan kebijaksanaan yang lebih fundamental. Akhirnya usaha yang sekian puluh tahun—sejak pemikiran *"de ondekking van het adatrecht"* dari van Vollenhoven diterima oleh pemerintah kolonial—diperjuangkan organisasi Islam tercapai juga. Undang-undang Pengadilan Agama akhirnya disyahkan. Di samping itu kodifikasi Hukum Islam pun bisa juga diselesaikan. Selanjutnya, jika Mukti Ali mulai membuka tabir-tabir yang memisahkan IAIN dari lembaga keilmuan lain, maka Munawir memacu gerak tersebut dengan mengadakan kontak-kontak dengan berbagai universitas luar negeri yang terkemuka, terutama dengan Leiden, di negeri Belanda, dan McGill di Kanada. Rintisan Munawir inilah yang gencar diteruskan oleh Tarmizi, penggantinya.

Tarmizi diangkat menjadi menteri dalam suasana optimisme. Tahun 1992 menunjukkan bertambah mantapnya perkembangan pembangunan ekonomi dan semakin sehatnya situasi politik. Keterbukaan politik yang diperkenalkan setahap demi setahap seakan-akan menjanjikan proses demokratisasi telah semakin berjalan dengan lancar. Terlebih lagi hubungan pemerintah dengan umat Islam telah semakin akrab. Berdirinya ICMI dan suksesnya penyelenggaraan Festival Istiqlal adalah pertanda dari keharmonisan baru ini. Berbagai pertanda mengisyaratkan mulai terbentuknya sebuah paradigma politik Islam yang baru. *Bayt-ul Qur'an* dan *Museum Istiqlal,* yang megah, yang didirikan atas inisiatif Tarmizi, seakan-akan menjadi saksi dari suasana optimisme dan munculnya paradigma Islam yang baru ini.

Tak kurang pentingnya, ketika ia mulai menjadi menteri, kerukunan hidup keagamaan berjalan dengan baik. Dalam situasi seperti ini apakah yang harus lebih dulu ditangani Menteri Agama, yang mantan Sekretaris Jenderal Departemen yang kini dipimpinnya, selain dari memperbaiki program yang sejak semula ia telah ikut merencanakannya? Kinerja administrasi "perjalanan haji", sistim dan organisasi kerja departemen, peningkatan kemampuan managerial, adalah hal-hal yang segera ditanganinya. IAIN

dan pendidikan Islam, seperti pendahulunya, merupakan prioritas yang tak kalah pentingnya. Di bawah kepemimpinannya IAIN tidak lagi diperlakukan hanya sebagai "penerima", tetapi mulai digiatkan untuk juga "pemberi" dalam dunia ilmu pengetahuan. Lembaga penelitian didirikan dan majalah ilmiah yang berskala internasional diterbitkan. Cabang-cabang IAIN dijadikan unit-unit yang independen, sebagai Sekolah Tinggi Agama Islam, yang dimungkinkan untuk mengembang diri tanpa tergantung pada IAIN yang pernah secara administsratif dijadikan sebagai induk.

Keberhasilan akan kerukunan hidup keagamaan adalah kebanggaan Tarmizi. Hal inilah yang ingin diperkenalkannya ke dunia internasional. Maka, bukan saja sebuah lembaga akademis yang khusus mempelajari masalah kerukunan, seminar dan konferensi internasional masalah kerukunan hidup keagamaan pun diadakan. Tarmizi ingin mejadikan Indonesia sebagai "model" dari "trilogi kerukunan" yang telah menjadi *credo* Departmen Agama. Tetapi berbagai peristiwa yang terjadi di tahun 1996 dan, terutama 1997, meyakinkan Tarmizi juga bahwa kerukunan hubungan antar-agama hanya bisa dijaga dengan baik, kalau pola-pola konflik dipahami juga dan sistem pemantauan yang tepat ditemukan. Ternyata faktor-faktor luar, khususnya sosial-ekonomi dan politik, dengan mudah bisa menggoyakan sendi-sendi kerukunan yang telah terbina baik. Kesadaran ini dibuktikan dengan re-orientasi dalam strategi program penelitian.

Bagaimanakah Tarmizi atau siapa saja akan merumuskan tantangan yang dihadapi Departemen Agama ketika kini, sejak bulan Juli, 1997, Indonesia mengalami "badai yang enggan berlalu"? Apakah yang harus dan bisa dilakukan oleh Menteri Agama, yang urusan resminya hanyalah memberikan pelayanan bagi kelancaran kehidupoan keagamaan, dalam menghadapi krisis moneter yang telah merembes jauh ke sendi-sendi yang paling mendasar dari kehidupan ekonomi, sosial, dan politik kita ?.

Kesimpulan

Barangkali kumpulan biografi para Menteri Agama tak lebih dari tumpukan dari riwayat beberapa orang yang telah ditakdirkan untuk mendapatkan nasib baik karena menduduki kedudukan yang terhormat dalam pemerintahan negara kita. Baragkali pula riwayat hidup ini hanyalah sekadar menyenangkan hati anak cucu

dan keluarga mereka. Tetapi, barangkali pula biografi yang serba ringkas ini tidaklah sekadar berkisah tentang "apa yang dikerjakan Alcibiades dan apa yang dideritanya", sebagaimana Aristoteles pernah merumuskan sejarah, tetapi pergulatan putra-putra bangsa untuk memperjuangkan secercah impian bangsa. Barangkali pula kumpulan biografi memperlihatkan pahit getir putra-putra dari sebuah masyarakat-bangsa yang pluralistik untuk membangun sebuah tatanan sosial yang rukun dan maju. Kalau setengah saja kemungkinan terakhir ini bisa diberikan oleh kumpulan biografi ini, maka kita telah mendapatkan pelajaran yang berharga.

Tetapi kumpulan ini lebih dari sekadar berkisah tentang orang perorang. Kumpulan biografi ini adalah riwayat hidup dari para pemangku peran sosial-politik yang strategis. Dengan begini, maka kita tidak sekadar berhadapan "apa yang dikerjakan Alcibiades" dan juga bukan pula hanya mengenai pergumulannya dengan nasib serta perjuangannya untuk mencapai cita-cita, tetapi juga, dan tak kurang pentingnya, struktur kontektual yang dihadapi oleh pemangku peran itu. Maka, liwat biografi, yang hanya merupakan "sebagian" dari "keseluhan" sejarah, kita dimungkinkan juga untuk memahami dinamika perjalanan bangsa, sejak masa awal kemerdekaan sampai sekarang. Dan, sebagai sejarah, dari biografi pun kita tidak hanya akan mendapatkan sekadar "hiburan"—penanti beduk berbunyi di kala petang beranjak senja—tetapi juga pengetahuan tentang perjalanan bangsa serta kearifan dari "pengelana" dalam dimensi waktu.

Posisi Departemen Agama

Muljanto Sumardi

Agama dalam Lintasan Sejarah Indonesia

Sejarah yang menjelaskan pemelukan agama-agama oleh penduduk di berbagai bagian Nusantara sebelum kedatangan orang-orang Eropa tidak banyak. Namun bukti yang sedikit itu memberikan informasi awal bahwa kerajaan-kerajaan di Nusantara cenderung memperlihatkan corak pemerintahan agama, sebagaimana umumnya pola pemerintahan masa itu di mana pun. Dalam corak pemerintahan seperti itu, pemelukan suatu agama oleh raja-raja yang berkuasa biasanya diikuti pemelukan agama tersebut oleh rakyat mereka, sehingga pada tingkat tertentu diperlukan seperangkat organisasi pemerintahan yang mengelola masalah-masalah keagamaan.

Di kerajaan Hindu Kutai di Kalimantan, kasta Brahmana (agamawan) diketahui menempati posisi penting dalam kerajaan tersebut karena raja-raja Kutai menerima pengaruh besar dari para Brahmana dalam menjalankan roda pemerintahan. Sementara itu, di kerajaan Sriwijaya, para rajanya bertindak sebagai pelindung agama Budha dan memberikan perhatian khusus bagi penyebaran agama melalui lembaga pendidikan yang mereka dukung. Sekolah tinggi agama Budha di Palembang sangat terkenal ke manca negara.[1]

---

[1]Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid II, edisi ke-4 (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hal. 30-76.

Kerajaan Hindu Majapahit di Jawa juga menempatkan para pemuka agama pada posisi yang tinggi. Raja-raja Majapahit menempatkan diri sejajar dengan para dewata. Prabu Hayam Wuruk, misalnya, adalah penjelmaan dewa di dunia yang memegang otoritas tertinggi di seluruh kerajaan, termasuk bidang agama. Untuk mengurus persoalan agama, raja-raja Majapahit dibantu pejabat agama yang dihimpun ke dalam Dharmadhyaksa, yang terbagi atas Dharmadhyaksa Ring Kasaiwan untuk utusan agama Syiwa dan Dharmadhyaksa Ring Kasogatan untuk urusan agama Budha. Kedua Dharmadhyaksa tersebut dibantu sekelompok pemuka agama yang secara hierarkhis diorganisasikan ke dalam Dharma Upapati. Para pemuka agama yang tergabung dalam Dharma Upapati tersebut biasa dipanggil Sang Pamuget.[2]

Baik selama berada dalam pengaruh agama Hindu maupun sesudah penetrasi agama Budha yang semakin kuat, pemerintahan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara memiliki tradisi pengelolaan masalah keagamaan tersendiri—suatu tradisi yang masih terus berlangsung ketika Islam mulai menanamkan pengaruhnya di wilayah ini. Sejak kelahirannya, Islam mendorong kaum muslimin untuk memenuhi kebutuhan akan pengaturan tersendiri masalah-masalah keagamaannya. Hukum-hukum yang terkandung dalam ajaran Islam menyangkut tindak perdata dan pidana yang menghendaki suatu organisasi pemerintahan yang melaksanakannya. Tuntutan inilah yang antara lain melahirkan jabatan Qadli (hakim), Qadli al-Qudlat (Hakim Agung), dan Mufti (pemberi fatwa) di berbagai kerajaan Islam.[3]

Meskipun administrasi bidang agama pada kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara tidak banyak diketahui secara rinci, para raja yang memeluk Islam umumnya menggunakan gelar Sultan dan memiliki kekuasaan yang juga mencakup wilayah agama. Tidak jarang para raja sendiri sebenarnya adalah orang-orang yang telah mendalami ajaran Islam sehingga dalam diri mereka tergabung

---

[2]Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah ...*, hal. 30-76.

[3]Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh Islam al-Siyasiyyah wa al-Diniyyah wa al-Tsaqafiyah wa al-Ijtima'iyyah*, Jilid II, edisi ke-9 (Kairo: Maktabah al-Nahdliyyah, (1964), hal.263-300.

dua fungsi, yaitu sebagai penguasa sekaligus ahli agama. Hal ini antara lain tampak pada diri Sunan Giri sehingga penguasa Pajang meminta gelar Sultan kepadanya. Demikian pula penguasa Cirebon, Panembahan Ratu, yang disebut sebagai seorang guru susuhunan yang dipercayai memiliki kekeramatan. Walaupun pada saat itu Cirebon telah dinyatakan sebagai negara taklukan Mataram, penguasa Mataram memperlakukannya dengan istimewa.[4]

Di kerajaan Islam Samudera Pasai di Aceh, Hamzah Fansuri, Syamsuddin al-Sumatrani, dan Nuruddin Ar-Ramiri pernah menduduki jabatan Syekh al-Islam, jabatan tinggi kerajaan di bawah Sultan. Posisi sebagaimana diduduki Ar-Ramiri sebagai pembantu dan penasehat utama Sultan juga pernah diemban Syekh Yusuf al-Maqassari di kesultanan Banten semasa Sultan Agung Tirtayasa.[5]

Pengaruh para pemuka agama di kerajaan seperti Demak dan Mataram sudah umum diketahui. Sunan Kudus, salah seorang dari sembilan wali penyebar agama Islam di Jawa, diketahui sangat dekat dengan Sultan Demak dan mempunyai andil dalam penyerangan terhadap kerajaan Hindu Majapahit. Sunan Giri, wali penyebar Islam yang lain, memiliki kekuasaan luas di Gresik dan pengaruhnya sampai ke Ambon, Lombok dan Makassar dan hanya ditundukkan oleh penguasa Mataram di kemudian hari dengan menggunakan simbol-simbol keagamaan.

Sebagaimana telah dialami kedua ajaran pendahulunya—Hindu dan Budha—agama Islam juga dijadikan sumber legitimasi bagi raja-raja beragama Islam yang baru memperoleh kekuasaan atau yang ingin memperluas pengaruh. Ketika Ki Ageng Pamanahan melantik puteranya sebagai penguasa Mataram, ia memberikan gelar *Senopati Ingalaga Sayidin Panatagama*. Gelar Sayidin Panatagama memberikan legitimasi kepadanya sebagai pemimpin kerohanian. Demikian pula Sultan-Sultan Mataram selanjutnya selalu menambah gelar dengan *Susuhunan*. Sultan Agung-raja Mataram terbesar selain bergelar *Prabu Anyakrakusuma*, juga bergelar *Susu-*

---

[4]Hoesien Djajadiningrat, *Tinjauan Kristis tentang Sejarang Banten*, edisi Indonesia (Jakarta: Djambatan, 1983), hal. 110, 200.

[5]Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII* (Bandung: Mizan, 1994), hal. 166-177 ; 223-226.

hunan Ingalaga Mataram. Gelar susuhunan bermakna kerohanian karena pada umumnya digunakan para wali penyebar Islam yang biasanya dipendekkan menjadi *Sunan*, seperti Sunan Kudus, Sunan Giri, dan seterusnya.[6]

Tradisi pengelolaan masalah keagamaan di tingkat pemerintahan tersebut terus bertahan sejalan dengan timbul tenggelamnya kerajaan-kerajaan Islam, khususnya di Jawa, yakni kerajaan Mataram dan kerajaan-kerajaan penerusnya di Surakarta dan Yogyakarta. Fungsi Sultan Mataram sebagai Sayidin Panatagama dilakukan melalui sebuah lembaga yang dipimpin seorang Penghulu Agung atau biasa disebut Kanjeng Penghulu. Selain di tingat pusat, ada pula lembaga agama tingkat kabupaten, Kawedanan, serta di tingkat desa.[7]

Agama pada Masa Penjajahan

Penyatuan kekuasaan politik dan agama pada kerajaan di Jawa, khususnya Mataram, bukan hanya terjadi di tingkat pusat melainkan juga di tingkat lebih bawah. Kedatangan orang Eropa tidak dengan sendirinya mengubah pola hubungan kekuasaan politik dan agama, karena pada awalnya kedatangan mereka lebih menitik beratkan pada perdagangan. Salah satu institusi warisan masa lalu yang justru tumbuh di masa penjajahan adalah yang apa dikenal dengan *kepenghuluan*. Penghulu adalah seorang ahli agama Islam yang diangkat oleh pemerintah untuk secara terbatas melaksanakan ketentuan agama di tengah masyarakat. Jabatan Penghulu memang mengalami proses penertiban administratif selama kurun waktu penjajahan. Sebelumnya tidak ada pembakuan. Meskipun Islam tidak mengenal hierakhi keulamaan, jabatan penghulu, khususnya di Jawa, mengenal tingkatan yang mengikuti penganturan kewilayahan pemerintah Hindia Belanda. *Penghulu Kepala*, misalnya, ada di tingkat Kabupaten, di bawahnya ada *Penghulu Distrik* dan di tingkat lebih bawah lagi ada *Penghulu Onderdis-*

---

[6]H.J. de Graaf *Puncak Kekuasaan Mataram, Politik Ekspansi Sultan Agung* (Jakarta: Pustaka Grafiti Pers, 1986), hal. 131-133, 221.

[7]Departemen Agama RI, *Amal Bakti Departemen Agama RI, Eksistensi dan Derap Langkahnya* (Jakarta: 1987), hal. 5-6.

trik.[8] Selain memiliki wewenang mengawasi pernikahan, perceraian dan pembagian warisan menurut hukum Islam, penghulu juga mempunyai kewenangan di bidang peradilan. Seorang penghulu menangani berbagai persoalan masyarakat yang diputuskan berdasarkan hukum Islam dan untuk itu ia juga menjabat ketua pengadilan agama.

Pada dasarnya politik Hindia Belanda adalah sekuler dengan alasan untuk menjamin kebebasan warganya untuk memeluk agamanya masing-masing. Namun karena sebagian besar rakyat beragama Islam sedangkan ajaran Islam mengandung unsur-unsur yang tidak dapat dipisahkan dengan kenegaraan, maka pemerintah Hindia Belanda terpaksa mengatur dan mengawasi bidang agama demi menjaga keamanan dan ketertiban serta kepentingan rakyat, meskipun dalam kenyataannya kebijaksanaan Kolonial Belanda disesuaikan dengan kepentingan mereka sebagai negara kolonial. Demikianlah secara sesingkat politik keagamaan yang dirumuskan Snouck Horgronje.

Kebijaksanaan Pemerintah Hindia Belanda dalam mengelola masalah agama secara garis besar dapat dikemukakan sebagai berikut: (1) Pemerintah menjamin kemerdekaan setiap orang untuk memeluk agama menurut keyakinannya masing-masing dan ibadah diselenggarakan di rumah-rumah sepanjang tidak mengganggu ketertiban umum. Ibadah yang diselenggarakan di luar rumah harus mendapat izin. (2) Bagi golongan Nasrani dijamin hak hidup dan kedaulatan organisasi dan gereja, walaupun ada keharusan izin bagi guru agama, pendeta dan petugas missi/zending dalam melakukan pekerjaan di suatu daerah tertentu. (3) Bagi penduduk pribumi yang tidak memeluk agama Nasrani semua urusan agama diserahkan pelaksanaan dan pengawasannya kepada raja, bupati, dan kepala bumiputra lainnya. (4) Pelajaran agama tidak diberikan pada sekolah-sekolah negeri atau sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah otonom, tetapi dalam penjabarannya diatur dalam ordonantie 1905, yang kemudian diubah dengan "Guru Ordonantie" yang mengharuskan guru-guru agama meminta izin atau memberitahu dalam memberikan pelajaran

---

[8]Departemen Agama RI, *Amal...*, hal. 16.

agama.[9]

Kalau urusan agama di tingkat pusat saat ini ditangani satu departemen, di masa penjajahan Belanda urusan tersebut ditangani beberapa instansi. Misalnya, urusan peribadatan umum, terutama bagi golongan Nasrani, menjadi wewenang Departemen Pengajaran dan Ibadah. Urusan pengangkatan pejabat agama pribumi, urusan perkawinan, kemasjidan, haji dan lain-lain menjadi urusan Departemen Dalam Negeri melalui para Residen dan Kepala Pemerintahan Swapraja lain. Soal politik dan gerakan agama ditangani Kantoor der Adviseur voor Inlandsche en Mohammedansche Zaken, sedangkan soal Mahkamah Islam Tinggi menjadi wewenang Departemen Kehakiman.

Adapun pengurusan bidang agama di daerah, para raja, bupati dan kepala pribumi lainnya melakukan tugasnya menurut tata-cara dan kebiasaan yang berlaku, yaitu tata aturan masyarakat serta tata pemerintahan pribumi sejak pra-Kolonial di mana bidang agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan. Sampai akhir masa penjajahan Belanda susunan dan tata pemerintahan di daerah di bawah tingkat keresidenan pada dasarnya masih merupakan bentuk-bentuk pribumi.

Pada masa pendudukan Jepang, aturan-aturan yang berhubungan dengan urusan keagamaan pada umumnya tidak banyak mengalami perubahan selain penghapusan Kantoor der Adviseur voor Inlandsche en Mohammedansche Zaken. Sebagai gantinya Pemerintah Balatentara Jepang mendirikan Shumubu (Kantor Urusan Agama) yang menjadi bagian dari Gunsaikanbu (Gubernur), sedangkan di daerah-daerah didirikan Shumuka (Kantor Agama Daerah) sebagai bagain dari Pemerintah Karesidenan (Shu).

Pemerintah pendudukan Jepang mula-mula bermaksud menjadikan Shumubu sebagai pengganti Adviseur voor Inlandsche en Mokammedansche Zaken, dengan tugas (1) memberikan nasehat-nasehat dalam soal Islam, dan (2) menjalankan penyelidikan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan politik pergerakan-pergerakan Islam. Dalam perkembangannya, lembaga ini tidak dapat

---

[9]Departemen Agama RI, *Amal Bakti Departemen Agama RI. Eksistensi dan Derap Langkahnya*, edisi ke-II (Jakarta: 1996), hal. 7-8.

sepenuhnya melaksanakan tugas tersebut karena iklim politik dan perkembangan Perang Dunia II tidak menguntungkan Jepang. Sehingga, bala tentara Jepang membutuhkan bantuan dari bangsa Indonesia dalam berperang menghadapi Sekutu.

Di masa pendudukan Jepang yang relatif singkat ini sejumlah tokoh agama pribumi mendapat kesempatan menduduki jabatan di Shumubu dan Shumuka, seperti Dr. Husein Djajadiningrat dan K.H. Hasyim Asy'ari. Keduanya pernah menjadi kepala Shumubu. Dr. Abdul Karim Amrullah, K.H. Abdul Kahar Muzakkir dan K.H. Mas Mansur sebagai penasehat. Ulama terkemuka yang pernah duduk di Shumuka, antara lain, adalah K.H. Abu Dardiri sebagai kepala Shumuka Karesidenan Banyumas.[10]

Agama pada Masa Kemerdekaan

Kalau pada masa penjajahan Belanda urusan agama ditangani berbagai instansi atau kementerian, pada masa kemerdekaan masalah-masalah agama secara resmi diurus satu lembaga, yaitu Departemen Agama. Keberadaan Departemen Agama dalam struktur pemerintah Republik Indonesia melalui proses panjang. Sebagai bagian dari pemerintah negara Republik Indonesia Departemen Agama (awalnya bernama Kementerian Agama) didirikan pada 3 Januari 1946. Dasar hukum pendirian ini adalah Penetapan Pemerintah tahun 1946 Nomor I/SD tertanggal 3 Januari 1946.

Apabila pada zaman penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang, masalah-masalah Agama, terutama Islam, menjadi bagian dari pemerintahan penjajah, maka wajar dan dapat dipahami jika umat Islam pada masa kemerdekaan menuntut adanya lembaga yang secara khusus menangani masalah-masalah agama dalam bentuk Kementerian Agama. Persoalan ini pertama kali muncul dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada Agustus 1945. Pada waktu itu komite yang diketuai Achmad Subardjo mengusulkan berdirinya kementerian tersebut. Latuharhary, seorang tokoh Kristen dari Maluku, mengusulkan kepada rapat agar masalah-masalah agama diurus Kementerian Pendi-

---

[10]Departemen Agama RI, *50 Tahun Departemen Agama: Perjuangan dan Pengabdian* (Jakarta, tt.), hal. 10-11.

dikan. Abdul Abbas, seorang wakil Islam dari Lampung, mendukung usul agar urusan agama ditangani Kementerian Pendidikan. Iwa Kusumasumatri, seorang nasionalis dari Jawa Barat, setuju gagasan perlunya Kementerian Agama tetapi karena pemerintah itu sifatnya nasional, agama seharusnya tidak diurus kementerian khusus. Ia sependapat dengan pikiran Latuharhary. Ki Hadjar Dewantoro, tokoh pendidikan Taman Siswa, lebih suka urusan-urusan agama mejadi tugas Kementerian Dalam Negeri. Dengan penolakan beberapa tokoh penting ini, usul pendirian Kementerian Agama akhirnya ditolak. Hanya enam dari 27 Anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang setuju didirikannya Kementerian Agama.[11]

Meski Kementeria Agama belum ada dalam Kabinet Republik Indonesia pertama (2 September 1945 - 14 Nopember 1945), K.H.A. Wahid Hasyim yang diangkat sebagai Menteri Negara bertugas menangani urusan politik, terutama yang berhubungan dengan Islam dan umat Islam. Dalam kabinet Syahrir yang pertama, H.M. Rasjidi diangkat sebagai Menteri Negara dengan tugas yang sama. H.M. Rasjidi inilah yang kemudian diangkat sebagai Menteri pertama saat Kementerian Agama lahir pada 3 Januari 1946.

Para pemimpin Islam seperti K.H. A. Wahid Hasyim, K.H. Mas Mansur, K.H. Abdul Kahar Muzakir, H. Agus Salim, Ki Bagus Hadikusumo dan Abikusno Cokrosujoso mempunyai andil besar atas kehadiran Departemen Agama. Demikian pula halnya para utusan delegasi KNI (Komite Nasional Indonesia) Banyumas yang dipimpin K.H. Dardiri dengan Anggota M. Sukoso Wiryosaputro dan M. Saleh Su'aidy yang menyampaikan usul didirikannya Kementerian Agama dalam sidang pleno KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) pada 26 Nopember 1945 di Jakarta.

Sistem politik yang berlaku waktu itu menyebabkan kabinet sering berganti. Pergantian Kabinet berarti pula pergantian menteri. Dalam periode 1946-1950, misalnya, Kementerian Agama dipimpin 11 orang menteri yang bergantian seirama dengan pergantian Kabinet, yang terbentuk dan jatuh berulang kali dalam tempo yang sangat singkat. Dalam Kabinet Syahrir II, misalnya,

---

[11]Departemen Agama RI, *50...*, hal. 16.

H.M. Rasjidi sebagai Menteri Agama pertama hanya menjabat selama kurang lebih enam bulan (12 Maret s/d 2 Oktober 1946).[12]

Tanpa mengurangi rasa hormat dan penghargaan kita kepada para menteri yang telah memimpin Departemen Agama pada masa pra-Orde Baru, pergantian Kabinet dan Menteri yang sering terjadi mustahil akan dapat menghasilkan program dan kinerja yang baik. Tidak bisa dipungkiri bahwa K.H. Wahid Hasyim dan H.M. Rasjidi sebagai Menteri Negara yang bertanggung jawab atas urusan agama pada awal kemerdekaan telah meletakkan dasar organisasi Departemen Agama dan seperangkat aturan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pokok Departeman Agama yang kemudian dikembangkan dan disempurnakan oleh menteri-menteri agama berikutnya.

Kesulitan untuk menilai kinerja dan keberhasilan program seorang menteri sulit dilakukan, bukan hanya terlalu seringnya pergantian kabinet dan menteri di zaman Orde Lama tetapi juga karena pada waktu itu orieantasi masing-masing kementerian lebih pada politik dari pada program. Kalau Kementerian Penerangan dan Kementerian Dalam Negeri didominasi PNI (Partai Nasional Indonesia), tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa Kementerian Agama pada waktu itu didominasi NU. Ini bisa dilihat dari nama-nama seperti K.H.R. Fathurrahman, K.H. Masjkur, K.H. Wahid Hasjim, K.H. Mohammad Ilyas, K.H. Wahib Wahab, dan K.H. Saifuddin Zuhri. Hanya K.H. Fakih Usman dan H.M. Rasjidi yang berasal dari Muhammadiyah—meskipun H.M. Rasjidi ketika diangkat sebagai menteri tidak atas nama organisasi tetapi pribadi.

Dari sekian banyak Meteri Agama yang berasal dari NU barangkali tidak salah kalau dikatakan K.H. Saifuddin Zuhri yang paling kental orentasi politiknya. Pada masa jabatan Menteri Agama inilah terjadi "NU-nisasi" di pusat maupun di daerah-daerah. Namun kita patut berterima kasih kepadanya karena dengan dalih untuk membendung pengaruh komunisme ia mendirikan IAIN sampai ke pelosok tanah air; tidak hanya di tingkat propinsi tetapi juga di tingkat kabupaten, terlepas dari soal mutunya.

---

[12]Departemen Penerangan , *Susunan Kabinet RI 1945-1970* (Jakarta: Pradmya Paramita, (1970), hal. 4.

Dari modal dasar dua lembaga pendidikan tinggi, yaitu PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri) di Yogyakarta dan ADIA (Akademi Dinas Ilmu Agama) di Ciputat, Jakarta, yang kemudian digabungkan menjadi IAIN (Institut Agama Islam Negeri), dikembangkanlah menjadi 13 (sekarang 14) IAIN di Ibu Kota propinsi dan hampir 100 IAIN cabang di kota-kota Kabupaten di seluruh Indonesia.

Pada waktu Mukti Ali tampil sebagai Menteri Agama menggantikan K.H. M. Dachlan, salah satu yang dilakukan adalah membenahi IAIN, tidak hanya secara kuantitatif tetapi juga kualitatif. Menurut Mukti Ali ada tiga kelemahan pokok IAIN, yaitu kelemahan di bidang sistem, metode, dan bahasa asing. Untuk mengatasi masalah ini diadakan rasionalisasi IAIN, terutama IAIN-IAIN cabang. Mereka yang tidak memenuhi syarat-syarat akademik secara berangsur-angsur ditutup. Sebaliknya, sebuah IAIN baru, yaitu IAIN Sumatera Utara didirikan di Medan. Kurikulum tidak hanya dirampingkan tetapi juga berorientasi pada masa depan dan kebutuhan masyarakat.

Untuk melanjutkan studi, dosen-dosen IAIN tidak hanya dikirim ke perguruan tinggi di Timur Tengah tetapi juga ke Amerika Serikat, Kanada dan Belanda. Karena jumlah guru besar di IAIN masih sangat terbatas—yakni Sunarjo, Hasbi Ashiddiqi, Mukti Ali, dan Mochtar Yahya di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta Sunardjo, Mahmud Yunus, dan Bustami Abdul Gani di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta—Direktorat Perguruan Tinggi Agama yang mengelola IAIN seluruh Indonesia membentuk Steering Committee Program Doktor IAIN yang anggotanya tidak hanya terdiri dari para guru besar tersebut di atas melainkan juga para cendikiawan dari luar jajaran Departemen Agama, seperti Taufik Abdullah, Harsja Bachtiar, H.M. Rasjidi, dan Bustanul Arfin. Steering Committee ini merupakan embrio lembaga-lembaga yang kemudian dikenal dengan Program Pasca-Sarjana di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Berbagai terobosan lain dilakukan Mukti Ali, seperti peningkatan pelajaran ketrampilan di madrasah dan pondok pesantren, penggunaan mahasiswa IAIN sebagai pramugara dan pramugari haji. Hikmah hari-hari besar Islam tidak lagi hanya diisi tokoh-tokoh dari organisasi-organisasi Islam tetapi juga dari departemen dan organisasi lain. Pada masa jabatan Mukti Ali lahirlah Undang-

Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Majlis Ulama Indonesia (MUI).

Biarpun berbagai prestasi telah dicapai Mukti Ali, ia memimpin Departemen Agama hanya satu periode karena dinilai terlalu "kompromistis" dengan umat Islam. Kebenaran masalah ini masih diragukan, tetapi yang jelas pada Pemilu 1971, suara Golkar di Departemen Agama kalah dari suara parpol. Dari pengalaman ini lalu ditampilkan Alamsyah Ratu Perwiranegara, seorang perwira tinggi ABRI yang untuk pertama kalinya dalam sejarah Departemen Agama dipercaya memimpin departemen ini.

Misi Alamsyah terutama menghilangkan citra negatif hubungan antara Islam sebagai agama dan Pancasila sebagai dasar negara, serta membuka peluang bagi perkembangan aliran kepercayaan yang selama menjelang Pemilu 1977 banyak ditentang umat Islam. Karena banyak kecaman akhirnya aliran kepercayaan yang selama periode Mukti Ali menjadi salah satu tugas Badan Litbang Agama (lembaga baru setara Direktorat Jenderal) tidak lagi berada dalam binaan Departemen Agama tetapi berada di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Keluarnya aliran kepercayaan dari Departemen Agama melegakan umat Islam karena hal ini menegaskan bahwa aliran kepercayaan bukan agama melainkan kebudayaan. Namun sebagian pihak justru berpendapat bahwa keluarnya aliran kepercayaan dari Depertemen Agama menimbulkan kesulitan pembinaannya untuk kembali ke agama masing-masing.

Alamsyah ditugaskan meyakinkan umat Islam bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Tugas yang diberikan kepada Alamsyah tentu saja tidak terlepas dari kebijakaan pemerintah untuk meratakan jalan, terutama di kalangan organisasi-organisasi Islam, untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya azas bagi semua organisasi politik maupun sosial di Indonesia. Alamsjah, dengan demikian, membendung arus radikalisme agama yang cenderung meningkat dalam tubuh umat Islam.

Dalam pengarahaannya pada Musyawarah Nasional II Majelis Ulama Indonesia, Mei 1980, Alamsyah mengemukakan delapan masalah yang dihadapi umat Islam, yaitu (1) partisipasi umat beragama dalam pembangunan, (2) sikap dan pandangan umat Islam terhadap Pancasila dan P4, (3) kerukunan hidup antar umat beragama, (4) aliran kebatinan dan aliran kepercayaan, (5) pendidikan

agama, (6) representasi umat Islam dalam lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif, (7) isu sekularisasi dan Kristenisasi, dan (8) isu kebangkitan Islam di Indonesia.[13]

Dengan berbagai kebijakan yang dinilai memperkuat kembali posisi Islam, Alamsyah "dipromosikan" menjadi Menteri Kordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) dalam kabinet berikutnya dan posisi Menteri Agama digantikan Munawir Sjadzali, yang sebelumnya menjabat Dirjen Politik Departemen Luar Negeri. Munawir tidak memiliki basis dukungan Islam karena memang belum pernah menginjakkan kaki membina komunitas Islam tertentu. Latar belakang pendidikan dan pengalaman Barat yang dimilikinya selain menjadi diplomat tentu saja mempengaruhi kebijakannya selama memimpin Departemen Agama. Kepada para intelektual Muslim berkali-kali ia menganjurkan untuk melakukan peninjauan ulang (re-aktualisasi) terhadap berbagai ajaran Islam agar tetap kontekstual. Ia mencoba meyakinkan umat Islam melalui berbagai pidatonya bahwa pemerintah tidak pernah bermaksud mengurangi peran politik Islam, bahkan sebaliknya hak-hak politik umat Islam diberikan secara penuh dan dilindungi pemerintah.

Selain itu, ia juga mengirimkan lebih banyak lagi dosen-dosen muda IAIN untuk belajar ke negara-negara Barat, seperti Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan Australia. Pada masa kepemimpinannya lahirlah ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia) di mana ia ikut serta dalam proses pendiriannya. Misi pemerintah dinilai lebih berhasil di bawah kepemimpinan Munawir Sjadzali. Tidak mengherankan jika ia kemudian diangkat menjadi Menteri Agama untuk periode kedua.

Dalam kabinet berikutnya, kedudukannya digantikan Tarmizi Taher seorang perwira tinggi Angkatan Laut. Tarmizi bukan orang baru di lingkungan Departemen Agama karena selama Munawir Sjadzali menjadi Menteri Agama, ia adalah Sekretaris Jenderal departemen ini. Selain melanjutkan apa yang telah dirintis ketiga menteri pendahulunya, ia sangat menonjol dalam usahanya meningkatkan mutu pendidikan agama, mulai dari tingkat Ibtidaiyah

---

[13]Himpunan Pidato Mneteri Agama RI, Buku ke-9, hal. 192.

sampai perguruan tinggi agama. Dosen-dosen muda IAIN terus dikirim ke berbagai perguruan tinggi di luar negeri untuk meraih gelar magister dan doktor. Kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi di luar negeri ditingkatkan. Selain program Pasca-Sarjana di IAIN Jakarta dan Yogyakarta, program Pasca-Sarjana juga dibuka di IAIN Aceh, Ujung Pandang, Surabaya dan Padang. Dialog antarumat beragama lebih ditingkatkan tidak hanya pada taraf nasional dan regional, tetapi juga internasional. Pelayanan ibadah haji terus ditingkatkan dan disempurnakan dari tahun ke tahun.

Terobosan baru di tingkat perguruan tinggi adalah di berlakukannya Kurikulum baru IAIN tahun 1997, yang terdiri dari 60% kurikulum nasional dan 40% kurikulum lokal yang ditentukan sendiri oleh masing-masing IAIN. Disamping itu, IAIN cabang yang berada di kabupaten-kabupaten diubah menjadi STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) berdasarkan Keppres No. 11 tahun 1997.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa gerak langkah Departemen Agama sebagai salah satu bagian pemerintah Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah republik kita. Keberadaan Departemen Agama mempunyai latar-belakang sosial-politik yang kuat sebagaimana telah dikemukan di atas. Secara yuridis latar belakang kelahiran Departemen Agama dapat ditelusuri baik dalam Pembukaan UUD 1945, yang mengandung falsafah negara Pancasila, maupun dalam Batang Tubuh UUD 1945 sendiri, khususnya Bab XI pasal 29 ayat (1) dan (2) yang semuanya mengandung aspek-aspek kehidupan bangsa yang erat hubungannya dengan keagamaan. Demikian pula penjabarannya dalam pelaksanaan tugas dan struktur organisasi Departemen Agama sebagai bagian dari pemerintah.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa keberadaan Departemen Agama dalam negara Republik Indonesia merupakan salah satu ciri dari sistem pemerintahan negara yang berdasarkan Pancasila. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan departemen ini juga tidak terlepas dari sejarah pertumbuhan dan perkembangan negara Republik Indonesia secara keseluruhan. Kehadiran departemen ini dalam struktur organisasi pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila merupakan suatu kebutuhan dan berakar dalam konsensus nasional sejak perjuangan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia.

H.M. Rasjidi, BA;

Pembentukan Kementerian Agama dalam Revolusi

Azyumardi Azra

"Ada tiga hal yang selalu diingat orang bila nama Pak Rasjidi disebut. *Pertama*, ialah peranan beliau sebagai salah seorang pejuang bagi adanya pengakuan kedaulatan Indonesia merdeka dari negara-negara Islam. *Kedua*, beliau adalah Menteri Agama pertama negara kita. *Ketiga*, pengembaraan intelektual beliau ke negara-negara Barat" (Madjid, 1985: 216)

"Aku ini seorang warganegara Indonesia, dari suku Jawa. Keluargaku adalah keluarga yang biasanya disebut "Keluarga Abangan", artinya yang beragama Islam tetapi tidak melakukan ibadat sehari-hari... Aku belajar agama Islam. Berat bagiku untuk melakukan sembahyang lima kali sehari. Sering aku meninggalkan, sering aku merangkap sembahyang, ini namanya "Qadha". Orang Jawa menamakan "Kolo". Baru setelah aku menjadi tua, aku dapat menunaikan ibadat sehari-hari pada waktunya...Dalam jiwaku terdapat Islam Abangan, Islamnya orang-orang yang tak mengetahui seluk beluk pengetahuan Islam. Islam yang dipeluk oleh almarhum bapakku, Atmosudigdo. Aku dapat nembang pangkur, mijil, kinanti, aku dapat menulis huruf Jawa; waktu aku kawin, aku memilih memakai blankon dan wiron. Aku senang sekali mendengar gamelan, menonton wayang orang dan tari serimpi...Dalam jiwaku terdapat Islam orthodox; aku menghafal al-Qur'an, aku menghafal *Alfiyah* Imam Malik, *Matan Rahbiyyah* dan lain-lain...Tetapi aku ini juga seorang Muslim yang moderen. Walaupun aku tidak pernah mengunjungi sekolah Belanda, tetapi aku paham membaca buku-buku dalam bahasa Belanda. Di samping itu aku lancar berbahasa Inggris dan Prancis" (Rasjidi, 1968: 9, 10, 11).

Masyarakat Indonesia pada umumnya mengenal H.M. Rasjidi adalah sebagai Menteri Agama pertama RI. Tetapi sebenarnya, Rasjidi pernah menjadi Menteri Negara dalam Kabinet sebelumnya (Kabinet Sjahrir I, 14 Nopember 1945-12 Maret 1946). Dalam jabatan Menteri Negara ia bertugas menangani permasalahan ummat Islam. Ia diangkat menggantikan Wahid Hasjim sebagai Menteri Negara pada kabinet sebelumnya, yakni Kabinet Presidensil I yang berusia sangat singkat (2 September 1945-14 Nopember 1945) di bawah Presiden Soekarno (lihat, Departemen Penerangan R.I, 1965: I, 197-200).

Menurut rekaman Soebagijo I.N. yang kelihatan mencatatnya langsung dari Rasjidi sendiri (1985: 31-35), Rasjidi tidak tahu menahu mengenai pengangkatannya. Cuma kebetulan pada hari pembentukan Kabinet Sjahrir I itu, ia membeli suratkabar *Merdeka*, yang antara lain memuat daftar nama-nama menteri kabinet tersebut, termasuk namanya. Mengetahui hal ini, Rasjidi tidak melakukan apa-apa, karena ia memang tidak pernah dihubungi Sjahrir tentang pengangkatannya. Beberapa hari kemudian barulah datang utusan resmi kabinet untuk menjemputnya menghadiri sidang pertama kabinet. Dalam sidang inilah Sjahrir secara "resmi" meminta dia untuk mengurusi "soal peribadatan" di republik ini.

Tetapi, sebagaimana kabinet sebelumnya, Kabinet Sjahrir I juga berumur sangat singkat. Dan kelihatannya tidak banyak yang bisa dilakukan Rasjidi sebagai Menteri Negara [bidang "ibadat"] ini. Menurut penuturan Rasjidi, seperti disampaikannya kepada Soebagijo I.N., Kabinet Sjahrir I tidak pernah dilantik oleh kepala negara, tegasnya Presiden Soekarno; dan tidak ada pula surat keputusan pengangkatan. Sjahrir dalam sidang pertama tadi hanya menyatakan bahwa menteri-menteri kabinet ini bekerja di kantor Sekretariat Kabinet di Jalan Cilacap Jakarta. Selebihnya, menteri-menteri kabinet ini bekerja sendiri-sendiri, tanpa ada kejelasan tentang tugas-tugas mereka.

Rasjidi diangkat sebagai Menteri Agama RI pertama pada masa Kabinet Sjahrir II, yang bertugas sejak 12 Maret sampai 2 Oktober 1946. Ia merasa tidak diangkat atas nama Masjumi. Seperti pengalamannya dalam pengangkatannya sebagai Menteri Negara, Rasjidi tidak mengetahui bahwa ia telah ditunjuk menjadi Menteri Agama RI pertama. Karena dia sudah terlibat langsung dalam Kabinet Sjahrir I, bukan tidak mungkin bahwa pengangkatannya justru diketahuinya dari Sjahrir sendiri atau anggota-anggota kabinet lainnya.

Kontroversi Kementerian Agama

Tidak begitu jelas sebenarnya bagaimana kronologi rinci pembentukan Kementerian Agama. Deliar Noer (1978: 8) dengan mengutip sebuah artikel yang dimuat dalam majalah *Panji Masyarakat* menyatakan, proposal atau usulan pembentukan Kementerian Agama pertama kali diajukan kepada BP-KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) pada tanggal 11 Nopember 1946 oleh K.H. Abudardiri, K.H. Saleh Su'aidy, dan M. Sukoso Wirjosaputro, yang semuanya merupakan anggota KNIP dari Karasidenan Banyumas. Usulan ini mendapat dukungan dari Mohammad Natsir, Muwardi, Marzuki Mahdi, dan Kartosudarmo yang semuanya juga merupakan anggota KNIP untuk kemudian memperoleh persetujuan BP-KNIP.

Kelihatannya, usulan tersebut kembali dikemukakan dalam sidang pleno BP-KNIP tanggal 25-28 Nopember 1945 bertempat di Fakultas Kedokteran [UI] Salemba. Wakil-wakil KNIP Daerah Karesidenan Banyumas dalam pemandangan umum atas keterangan pemerintah kembali mengusulkan, antara lain; "Supaya dalam negara Indonesia yang sudah merdeka ini janganlah hendaknya urusan agama hanya disambillalukan dalam tugas Kementerian Pendidikan, Pengajaran & Kebudayaan atau departemen-departemen lainnya, tetapi hendaknya diurus oleh suatu Kementerian Agama tersendiri" (Departemen Penerangan, 1965, VII: 358-9).

Usul tersebut mendapat sambutan dan dikuatkan oleh tokoh-tokoh Islam yang hadir dalam sidang KNIP pada waktu itu. Tanpa pemungutan suara, Presiden Soekarno memberi isyarat kepada Wakil Presiden Mohamad Hatta, yang kemudian menyatakan, bahwa "adanya Kementerian Agama tersendiri mendapat perhatian pemerintah. Sebagai realisasi dari janji tersebut, pada 3 Januari 1946 pemerintah mengeluarkan ketetapan No. 1/S.D. yang antara lain berbunyi: "Presiden Republik Indonesia, Mengingat: Usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, memutuskan: Mengadakan Departemen Agama". Keputusan dan penetapan pemerintah ini dikumandangkan di udara oleh RRI ke seluruh dunia, dan disiarkan oleh pers dalam dan luarnegeri, dengan H. Rasjidi BA sebagai Menteri Agama yang pertama (Ibid, VII, 359; Departemen Agama, 1965: 104).

Pembentukan Kementerian Agama segera menimbulkan kontroversi di antara berbagai pihak masyarakat Indonesia. Kaum Muslimin umumnya memandang bahwa keberadaan Kementerian Agama merupakan suatu keharusan sejarah; ia merupakan kelanjutan dari instansi yang bernama Shumubu (Kantor Urusan Agama) pada masa pendudukan Jepang, yang mengambil preseden dari Het Kantoor voor Inlandsche Zaken (Kantor untuk Urusan Pribumi [Islam]) pada masa kolonial Belanda. Bahkan sebagian Muslim melacak eksistensi Kementerian Agama ini lebih jauh lagi, ke masa kerajaan-kerajaan Islam atau kesultanan, yang sebagiannya memang memiliki struktur dan fungsionaris yang menangani urusan-urusan keagamaan.

Tetapi argumen ini dibantah oleh dokumen resmi yang diterbitkan pemerintahan Soekarno. Dalam buku *20 Tahun Indonesia Merdeka*, jilid VII, dinyatakan sebagai berikut:

> "Sebagaimana kita ketahui, bahwa di zaman kolonial Belanda dulu, soal-soal yang bertalian dengan urusan agama diurus terpencar-pencar dalam beberapa departemen. Sebagai contoh soal urusan haji, perkawinan, pengajaran agama tersebut diurus oleh Departement van Binnenlandsche Zaken [*sic*, atau Departemen urusan-urusan Dalam Negeri]. Soal Mahkamah Islam Tinggi, Raad Agama [peradilan agama] serta penasihat Pengadilan Negeri diurus oleh Departement van Justitie. Soal Pergerakan Agama diurus oleh Kantoor v/d Adviseur voor Inlandsche en Mohammedaansche Zaken. Soal peribadatan diurus oleh Departement van Onderwijs en Eerendienst...[]

Dan di zaman penjajahan Jepang, urusan agama itu dipegang oleh Shumubu, sebagai bagian dari Gunsei kanbu, sedang di daerah-daerah diurus oleh Shumuka sebagai bagian dari pemerintah keresidenan" (h. 358).

Setelah menguraikan panjang lebar tentang sifat negara Indonesia yang memberikan perhatian sepenuhnya kepada masalah-masalah ketuhanan, atau tegasnya agama, dokumen resmi ini menyimpulkan:

> "Oleh sebab itu, kalau diperhatikan dengan seksama, maka Departemen Agama adalah suatu departemen yang baru, yang tidak ada hubungannya dengan zaman penjajahan, karena ia dilahirkan seiring dengan Proklamasi Rakyat Indonesia menentang penjajahan itu. Ia ditampilkan ke tengah-tengah forum perjuangan oleh rakyat yang berjuang itu sendiri sebagai cermin jiwa dan kehendak aspirasi rakyat terbesar yang setia

kepada ajaran-ajaran agamanya yang revolusioner...[] Kalau dilihat selintas pandang, walaupun sebagian tugas kewajiban Departemen Agama dengan Kantoor v/d Adviseur voor Inlandsche en Mohammedaansche Zaken tampak persamaannya di sana sini, tetapi hakekat dan tujuannya secara prinsipil amat berbeda sekali. Yang satu menjalankan tugas kewajibannya untuk pengabdian kepada kolonialisme dan imperialisme, dan yang satu lagi berfungsi sebagai pembimbing dan penjamin azas kemerdekaan beragama untuk menunaikan dharma-baktinya bagi kepentingan Rakyat Indonesia Merdeka dan berdaulat" (Ibid, VII, 360-1).

Sebagaimana tersirat, pembedaan itu lebih pada "ideologi" Kementerian Agama daripada masalah fungsi. Dengan demikian, argumen ini bertitiktolak dari posisi yang berbeda dengan argumen-argumen yang dikutip lebih dulu.

Terlepas dari masalah pengaitan eksistensi Kementerian Agama dengan kelembagaan semacamnya yang pernah ada di masa sebelumnya, beberapa pengamat berargumen bahwa pembentukan Kementerian Agama merupakan bagian dari strategi Sjahrir untuk mendapatkan dukungan bagi kabinetnya dari kaum Muslimin. Rosihan Anwar, tokoh sosialis Muslim, misalnya, menyatakan, pandangan ini berdasarkan pada pengakuan Sjahrir bahwa kaum Muslimin merupakan mayoritas penduduk Indonesia, yang secara alamiah wajar memerlukan Kementerian khusus untuk mengelola masalah-masalah keagamaan mereka (Anwar, 1985: 154)

Pada pihak lain, sejumlah pemimpin Indonesia, terutama dari kalangan non-Muslim dan nasionalis, memandang Kementerian Agama merupakan konsesi yang terlalu besar dari Republik yang baru berdiri kepada kaum Muslimin. Mereka khawatir, bahwa Kementerian akan didominasi pejabat-pejabat Muslim dan, dengan demikian, akan lebih memprioritaskan urusan-urusan Islam daripada urusan agama-agama lainnya yang ada di Indonesia. Lebih jauh lagi, di antara mereka ada yang menuduh bahwa Kementerian Agama merupakan langkah pertama kaum Muslimin untuk mewujudkan "negara Islam" di Indonesia, setelah mereka gagal dalam sidang BPUPKI untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara.

Bentuk tipikal oposisi kalangan non-Muslim terhadap eksistensi Kementerian Agama dapat terlihat dari pandangan J.W.M. Bakker, pemimpin Katolik yang bermukim di Indonesia. Se-

bagaimana dikutip Boland (1982:106-7), Bakker menyatakan, bahwa sejak semula Kementerian Agama merupakan "kubu Islam dan batu loncatan untuk pembentukan sebuah negara Islam". Dia lebih lanjut menuduh, bahwa pada perkembangan awalnya kementerian ini bersikap defensif, tetapi ketika ia semakin kuat dan sadar akan kekuatannya, ia mulai melancarkan propaganda [Islam] melewati batas-batas yang pernah diduga Sjahrir sendiri; bagian propaganda [penyiaran/penerangan Islam?] dari Kementerian Agama menjadi sekuat negara itu sendiri.

Tuduhan ini tentu saja dijawab oleh para pemimpin Islam. Wahid Hasyim, pemimpin NU yang kemudian menjabat Menteri Agama pada 1950-52 menyatakan, adalah pantas bagi Kementerian Agama untuk memberikan perhatian lebih besar kepada masalah-masalah Islam, karena jumlah penduduk Muslim jauh lebih banyak dibandingkan jumlah kaum non-Muslim. Karena itu, ujarnya, tugas-tugas untuk pengelolaan masalah-masalah Islam dan kaum Muslimin tidak sama besarnya dengan penanganan masalah-masalah kaum non-Muslim. Jadi, perbedaan ini tidaklah didasarkan pada diskriminasi agama (lihat Noer, 1987: 347).*

Kementerian Revolusi

Kementerian Agama di masa Rasjidi adalah "kementerian revolusi". Sejak dikeluarkannya keputusan pembentukannya di seluruh Indonesia, Kementerian Agama mulai 12 Maret 1946 berkantor di ibukota revolusi, Yogyakarta, ketika Belanda kembali menguasai Jakarta. Dalam Maklumat Kementerian Agama No. 1 tanggal 14 Maret 1946 diumumkan bahwa alamat sementara Kantor [pusat] Kementerian Agama adalah di Jalan Bintaran 9 Yogyakarta. Kemudian dalam surat No. 187/VII tanggal 8 Mei 1946, alamat Kementerian Agama pindah ke Jalan Malioboro 10 Yogyakarta. Kantor ini tersedia berkat jasa baik K.H. Abu Dardiri dan K.H. Muchtar (Departemen Agama, 1980/81: 28).

Memandang kontroversi tentang eksistensi Kementerian Agama itu, dengan mudah bisa dipahami, bahwa Rasjidi sebagai Menteri Agama pertama, mencurahkan banyak perhatian dan enerji untuk memberikan penjelasan di seputar *raison d'etre*

---

*Lebih lanjut lihat bab tentang Wahid Hasyim.

Kementerian ini. Dalam Konperensi Kementerian Agama seluruh Jawa dan Madura yang diselenggarakan di Surakarta pada 17-18 Maret 1946, misalnya, Rasjidi menjelaskan bahwa Kementerian Agama selain bertujuan untuk merealisasikan pasal 28 UUD 1945, juga untuk mengakhiri ekses-ekses pemecahbelahan ummat beragama akibat penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang (lihat, Departemen Agama, 1996a: 19-20; 1987: 20).

Menteri Agama Rasjidi juga menegaskan bahwa negara—melalui Kementerian Agama—tidak akan campur tangan dalam urusan agama. Kementerian Agama memberikan tempat yang sewajarnya kepada setiap agama yang ada di Indonesia. Penegasan ini dikemukakan Rasjidi, kelihatannya dalam upaya menjawab usulan kalangan Katolik dan Protestan tentang perlunya pemisahan antara kekuasaan agama dan negara; dan bahwa negara seharusnya tidak mencampuri urusan agama. Keterangan itu sekaligus untuk "menenangkan" ummat Kristiani, yang khawatir bahwa Kementerian Agama akan memberikan perhatian hanya kepada penganut agama Islam.

Dalam saat yang sama, Rasjidi juga melakukan konsolidasi ruanglingkup tugas-tugas dan wewenang Kementerian Agama. Karena Kementerian Agama adalah sebuah kementerian baru, maka belum jelas benar batas-batas ruang gerak, tanggungjawab dan wewenangnya. Karena itulah diperlukan konsolidasi, yang melibatkan pengambilalihan beberapa bidang tugas yang sebelumnya ditangani kementerian-kementerian lain. Sesuai dengan Penetapan Pemerintah No. 5/SD tanggal; 25 Maret 1946, Menteri Agama, Rasjidi mengambilalih tugas-tugas keagamaan dari beberapa kementerian, yakni: pertama, dari Kementerian Dalam Negeri tugas dan urusan yang berkenaan dengan masalah perkawinan, peradilan agama, kemasjidan, dan urusan haji; kedua, dari Kementerian Kehakiman tugas dan wewenang yang berkenaan dengan Mahkamah Islam Tinggi (MIT); ketiga, dari Kementerian P&K, berkenaan dengan pengajaran agama di sekolah-sekolah (Departemen Agama, 1980/1: 26; 1996: 20).

Untuk melaksanakan pengalihan tugas dan wewenang tersebut, Kementerian Agama mengeluarkan Maklumat No. 2 tertanggal 23 April 1946 menetapkan bahwa: Pertama, Shumuka yang dalam zaman Jepang termasuk ke dalam kekuasaan resi-

den menjadi Jawatan Agama Daerah yang selanjutnya ditempatkan di bawah Kementerian Agama; kedua, hak untuk mengangkat penghulu atau *landraad* (sekarang pengadilan negeri), ketua dan *raad* agama yang ada dalam tangan residen, selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Agama; ketiga, hak untuk mengangkat penghulu mesjid, yang dahulu berada di tangan bupati, selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Agama (Departemen Agama, 1965: 105).

Dalam upaya konsolidasi tersebut Menteri Agama Rasjidi melakukan penempatan kembali bagi tenaga-tenaga ahli yang dulu pernah bertugas pada Het Kantoor voor Inlandsche Zaken. Atas usulan dan bantuan K.H. Abudardiri, Menteri Rasjidi mengambil kebijaksanaan merekrut beberapa pegawai tinggi Kementerian Agama dari kalangan tenaga ahli yang dulu pernah bekerja sebagai pegawai Het Kantoor voor Inlandsche Zaken di masa kolonial Belanda; mereka selanjutnya juga pernah bertugas pada Shumubu di masa Jepang. Di antara tenaga-tenaga ahli yang direkrut sesuai dengan kebijaksanaan ini adalah: pertama, R. Subagio yang ditugaskan menjadi Sekretaris/Kepala Bagian Umum; kedua, R. Sunarjo, mantan Ketua Mahkamah Islam Tinggi (MIT) yang dipercayai menjadi Kepala Bagian Mahkamah; ketiga, J. Ibrahim, yang ditugaskan sebagai Kepala Bagian Kepegawaian; keempat, R.A.C. Djaelani, yang dipercayai sebagai Kepala Bagian Keuangan; dan kelima, H. Abubakar, ahli dalam bidang penyiaran, penelitian dan kebudayaan. Tenaga ahli lainnya yang juga direkrut adalah Huson Iskandar, Suwirjo, S. Siswopranoto, dan M. Supardi.

Kementerian Agama, tegasnya Menteri Agama Rasjidi tidak sepenuhnya berhasil melaksanakan seluruh pengambilalihan tugas dan wewenang tersebut. Hal ini disebabkan bukan hanya karena masa jabatan Rasjidi yang demikian singkat, tetapi juga karena situasi nasional yang masih berada dalam suasana revolusi. Akibatnya, pengalihan tugas dan wewenang khususnya dari Kementerian P&K yang disebutkan di atas tidak bisa terlaksana. Kepanitiaan yang dipimpin Ki Hadjar Dewantoro dari BP-KNIP yang ditugaskan untuk merealisasikan tujuan itu gagal menyelenggarakan pengalihan kepada Kementerian Agama (Ibid).

Pengembaraan Religio-Intelektual

Muhammad Rasjidi, Menteri Agama pertama ini, adalah tokoh multi-dimensi, yang secara selintas bukan tanpa kontradiksi, seperti tercermin dalam kutipan langsung dari penuturannya sendiri pada awal tulisan ini (cf. Azra, 1994). Ia lahir di Kotagede pada 20 Mei 1915 M/4 Rajab 1333 H. Muhammad Rasjidi adalah nama yang diberikan oleh Ahmad Syurkati, tokoh reformis Persatuan Islam (Persis). Nama kecilnya adalah Saridi, yang kedengarannya sedikit tipikal nama Jawa. Ia memang dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan keluarga "abangan". Dan Rasjidi tidak malu dengan latarbelakang ini dan, karena itu ia tidak menyembunyikannya. Dengarlah penuturannya lebih lanjut:

> "Semenjak kecil saya hidup dalam suasana Jawa Islam. Rumah keluarga saya berbentuk rumah joglo, dengan ruang amben tengah, sentong kulon, sentong wetan, emper, pendapa, di samping kulon omah dan wetan omah. Kalau hari Kemis sore apalagi Jumat kliwon dan Selasa kliwon, ibu saya selalu menyuruh beli kembang untuk ditaruh di pojok rumah, dekat pintu dan sebagainya" (Rasjidi, 1967, cetak ulang 1992: 1)

Penuturan ini mengindikasikan tentang kehidupan keagamaan yang cenderung sinkretis di kalangan kaum Muslimin Jawa. Tetapi, di tengah lingkungan sinkretis seperti itu, jelas bahwa Saridi dididik ayahnya secara Islam. Ayahnya mendatangkan guru untuk mengajar Saridi membaca al-Qur'an. Selanjutnya ia dikirim ayahnya belajar ke sekolah "Ongko Loro", sekolah Belanda yang menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar. Tetapi belakangan, agaknya atas permintaan ayahnya, ia melanjutkan pelajarannya di sekolah rakyat [dasar] Muhammadiyah. Pada waktu-waktu itu, Muhammadiyah yang didirikan di Yogyakarta pada 1912 menemukan momentumnya pula di Kotagede (Cf. Nakamura, 1983). Bagi Saridi, sekolah-sekolah Muhammadiyah lebih baik, karena murid-murid mempelajari tidak hanya matapelajaran-matapelajaran umum, tetapi juga matapelajaran-matapelajaran agama.

Setelah menamatkan pendidikannya pada Sekolah Rakyat Muhammadiyah, Saridi melanjutkan pelajarannya ke Kweekschool Muhammadiyah, sekolah pendidikan guru model Be-

landa. Meski kurikulum sekolah ini cukup komprehensif, Saridi merasa tidak puas dengan metode pengajarannya yang tidak jauh berbeda dengan metode yang digunakan di langgar; yang lebih menekankan kepada murid untuk menghapal teks, bukan memahaminya.

Ketidakpuasan Saridi merupakan awal dari pengembaraan intelektual dan spiritualnya. Ia tidak puas dengan apa yang diperolehnya dari sekolah. Karena itu, ia mulai membaca suratkabar yang dilanggan ayahnya, termasuk *Swara Oemoem*, dan *Kedjawen*. Melalui suratkabar inilah ia mengetahui bahwa Ahmad Syurkati, pimpinan al-Irsyad, sebuah organisasi reformis, telah mendirikan sekolah di Lawang, Jawa Timur (Cf. Affandi, 1976). Berkat bacaannya, Saridi kelihatan menjadi tertarik kepada Ahmad Syurkati, sehingga ia ingin belajar darinya. Saridi lalu mengirim surat, yang kemudian dibalas Syurkati yang menyatakan bahwa ia bersedia menerimanya sebagai muridnya. Saridi berangkat ke Lawang dengan meninggalkan kedua orangtuanya untuk pertama kalinya.

Semula Saridi seolah menemukan apa yang selama ini dicarinya; pendidikan agama yang lebih berorientasi kepada pemahaman daripada sekedar hapalan. Tetapi, ia segera merasa tidak puas, karena apa yang ia pelajari di sekolah al-Irsyad hanyalah pengulangan dari apa yang pernah ia pelajari di sekolah Muhammadiyah. Karena itu, sekali lagi ia berpikir untuk mencari sekolah lebih baik, yang lebih sesuai dengan keinginannya. Tetapi, sebelum ia meninggalkan sekolah al-Irsyad ia diberkahi oleh Ahmad Syurkati dengan nama baru "Muhammad Rasjidi". Seperti banyak Muslim Jawa lain yang mendapat nama baru, nama "Muhammad Rasjidi" baru dipakai secara resmi oleh Saridi setelah ia menunaikan ibadah haji beberapa tahun kemudian. Seperti lazim dalam anggapan Muslim Jawa, penggantian nama setelah menunaikan ibadah haji mencerminkan "transformasi spiritual", sehingga pemilik nama baru itu menjadi lebih relijius baik lahir maupun batin.

Meski Rasjidi merasa tidak puas dengan sekolah Muhammadiyah dan al-Irsyad, hampir bisa dipastikan bahwa secara intelektual ia berhutang banyak kepada kedua organisasi reformis ini. Jelas bahwa semangat reformis yang menyala-nyala dalam dirinya nanti berasal dari lingkungan Muhammadiyah

dan al-Irsyad. Begitu kuatnya semangat reformis dalam diri Rasjidi, sehingga ia terkenal sebagai salah seorang tokoh utama reformisme Islam di masa kontemporer.

Bibit-bibit reformisme yang diperoleh Rasjidi dari Muhammadiyah dan al-Irsyad tumbuh lebih subur lagi ketika ia melanjutkan pelajarannya ke Kairo; dengan tujuan pertama masuk Universitas al-Azhar. Pada 1931 ia bersama temannya Tahir Ibrahim menumpang sebuah kapal ke Kairo. Seperti kebanyakan calon mahasiswa Indonesia lainnya, Rasjidi pertama kali masuk ke Qism 'Am, sekolah persiapan sebelum memasuki Universitas al-Azhar. Tetapi, lagi-lagi Rasjidi merasa tidak puas. Bahkan, menurut Soebagijo, Rasjidi merasa tidak puas terhadap Universitas itu sendiri. Dalam pandangan Rasjidi, sistem pendidikan al-Azhar tidak lebih baik daripada pesantren. Pengajaran masih berlangsung secara tradisional, tidak secara moderen (Soebagijo, 1985: 12).

Jelas bahwa hal inilah yang kemudian membuat Rasjidi membatalkan niatnya melanjutkan pendidikan di al-Azhar. Ia malah memilih Universitas Kairo, terutama atas pengaruh teman terdekatnya, Kahar Muzakkir, yang juga sama-sama berasal dari Kotagede (Cf. Nakamura, 1977). Muzakkir kelihatannya bukan hanya memberikan saran-saran kepadanya dalam hal-hal akademis, tetapi juga memperkenalkannya kepada Sayyid Quthb, yang kelak menjadi pemimpin besar organisasi al-Ikhwan al-Muslimun. Rasjidi mengakui bahwa ia juga belajar banyak dari Sayyid Quthb (Ibid, 14).

Pada Universitas Kairo, Rasjidi belajar di Fakultas Filsafat. Salah seorang temannya di Fakultas ini adalah Mustapha 'Abd al-Raziq, murid Muhammad 'Abduh, yang kemudian menjadi Rektor Universitas al-Azhar. Agaknya aneh bahwa Rasjidi memilih belajar filasafat, karena mayoritas kaum Sunni masih menganggapnya sebagai subyek tabu untuk dipelajari. Tidak populernya filsafat dapat juga dilihat dari jumlah mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Kairo. Selain Rasjidi terdapat hanya enam mahasiswa; dan ia adalah satu-satunya mahasiswa asal Indonesia. Nampaknya Rasjidi adalah mahasiswa Indonesia yang pertama kali mempelajari filsafat sehingga mendapatkan gelar akademis (BA) dalam bidang ini dari Universitas Kairo. Pengalaman akademis dalam bidang ini kemudian memben-

tuk salah satu kecenderungan intelektual pokok Rasjidi; belakangan ia menerjemahkan beberapa buku penting tentang filsafat Barat ke dalam bahasa Indonesia (Cf. Rasjidi, 1965; 1984).

Karir Rasjidi selama di Kairo tidak terbatas pada bidang akademis. Selama di Kairo ia juga menceburkan diri ke dalam organisasi pemuda-kemahasiswaan. Ia adalah aktivis organisasi Jam'iyyah al-Khayriyyah al-Thalabiyyah al-Jawiyyah yang didirikan pada 1931 di bawah kepemimpinan Djanan Thaib, mahasiswa Indonesia pertama yang memperoleh gelar akademis dari Universitas al-Azhar. Belakangan ketika Jam'iyyah al-Khayriyyah al-Thalabiyyah al-Jawiyyah diubah menjadi Perpindom (Persatuan Pemuda Indonesia-Malaya), Rasjidi dipilih sebagai salah seorang wakil ketua (Roff, 1970; Abaza, 1994; 1993: 4-11; Azra, 1995: 210-12).

Roff dan Abaza secara meyakinkan telah memperlihatkan bahwa mahasiswa-mahasiswa Indonesia semasa Rasjidi di Kairo pada umumnya cenderung kepada modernisme atau reformisme Islam, yang agaknya lebih tepat disebut sebagai "neo-Salafisme" sebagaimana dianjurkan al-Afghani, Abduh, dan Ridha. Tema pokok neo-Salafisme adalah kembali kepada al-Qur'an dan Hadits Sahih, atau kepada "Islam yang murni" sebagaimana diamalkan kaum Salaf, dan penolakan terhadap bid`ah, khurafat dan takhyul. Dengan demikian, secara ideologis, gerakan neo-Salafi adalah revivalis; modernismenya terletak lebih pada pendekatan dan metodologi. Mereka menawarkan pengadopsian pendekatan dan metodologi moderen dalam gerakan Islam seperti organisasi moderen, sistem persekolahan moderen, dan sebagainya.

Semua tendensi ini cocok dalam pengalaman Rasjidi. Lingkungan intelektualnya di Kairo menyumbang banyak kepada semangat revivalis yang dimilikinya setelah ia kembali ke Indonesia dan menjadi aktivis Islam. Inilah latar belakang yang menghasilkan pembentukan salah satu ciri personal yang sangat distingtif, yang pada gilirannya membuat ia dianugerahi julukan "pembela keimanan" (*guardian of faith*), seperti akan kita lihat lebih jauh di bawah.

Pendidikan dan lingkungan intelektual Rasjidi di Kairo menyempurnakan pengembaraan religio-intelektualnya. Ia kini bukan lagi pewaris "Islam Jawa Abangan"; tetapi adalah seo-

rang "ortodoks". Hal ini terlihat jelas dalam penolakan kerasnya terhadap "Aliran Kepercayaan", atau "Kebatinan Jawa". Tetapi, ia menolak untuk tidak mengakui para pengikut Aliran Kepercayaan sebagai "bukan Muslim". Menurut dia, mereka adalah Muslim, tetapi tidak mengerti sepenuhnya tentang Islam. Karena itu adalah tugas mereka yang lebih paham tentang Islam untuk mengajar dan menjelaskan Islam kepada mereka. Sikap Rasjidi seperti ini kelihatannya berbeda dengan sikap tokoh-tokoh revivalis neo-Salafi lainnya, seperti Sayyid Quthb atau Abu al-A`la al-Mawdudi yang sering menuding orang-orang seperti itu sebagai "kafir". Rasjidi tidak pernah menudingkan telunjuknya seperti itu kepada orang-orang Islam yang belum mengamalkan Islam dengan benar karena ketidaktahuan atau ketidakpahaman mereka. Tetapi, penting dicatat, Rasjidi sangat keras terhadap orang-orang Muslim yang dipandangnya mengerti tentang Islam, namun memegangi paham atau pendapat yang menurutnya tidak sesuai dengan doktrin murni Sunni.

Karir Politik dan Diplomatik

Pada 1938, setelah tujuh tahun di Kairo, Rasjidi kembali ke Kotagede dan menikah. Dengan beban keluarga di pundaknya, Rasjidi diharapkan mertuanya untuk mengelola usaha dagang kecil-kecilan. Tetapi ia merasa tidak memiliki bakat dagang; karena itu ia memutuskan untuk mengabdikan diri pada karir keilmuan. Langkah pertama yang ditempuhnya adalah menjadi guru pada Madrasah Ma'had al-Islami di Kotagede. Belakangan, ketika sejumlah tokoh Muslim, termasuk Satiman Wiryosanjoyo, mengambil inisiatif mendirikan Pesantren Luhur di Solo, Rasjidi diminta untuk mengajar tentang Islam dan bahasa Arab. Pesantren Luhur ini, pendidikan tingkat universitas, merupakan usaha untuk memodernisasi pesantren. Tetapi eksperimen Pesantren Luhur ini berakhir dengan invasi Jepang pada 1941 (Azra, 1994: 97).

Selain menekuni kegiatan mengajar, Rasjidi juga menerjunkan diri ke dalam gerakan nasional untuk mencapai kemerdekaan. Untuk itu ia memasuki Partai Islam Indonesia (PII) yang baru dibentuk. Dalam kongres pertama PII pada 1940 di Yogyakarta, Rasjidi terpilih sebagai anggota Komite Nasional partai

ini. Selain itu, Rasjidi juga aktif dalam Islam Studie Club, yang bertujuan mengkaji Islam dalam konteks perkembangan moderen. Tak kurang pentingnya, Rasjidi juga adalah anggota Muhammadiyah. Belakangan, dalam masa penjajahan Jepang, Rasjidi menjadi salah seorang pemimpin Masyumi. Selain itu, Jepang juga menawarinya untuk menjadi kepala Perpustakaan Islam di Jakarta. Dalam kenyataannya, Perpustakaan Islam lebih daripada sekadar perpustakaan; ia juga adalah tempat pertemuan banyak pemimpin Islam dari berbagai wilayah di Indonesia, yang sebagiannya datang ke Jakarta untuk mengikuti latihan militer yang diselenggarakan Jepang. Rasjidi semakin sibuk, karena ia juga bekerja menerjemahkan berita-berita ke dalam bahasa Arab untuk disiarkan melalui radio yang dikuasai Jepang.

Berakhirnya penjajahan Jepang, dan tercapainya kemerdekaan Indonesia menguak karir baru bagi Rasjidi. Karir puncak Rasjidi dalam pemerintahan adalah sebagai Menteri Agama, sebagaimana dibahas di atas, dan tidak perlu lagi diulangi di sini. Yang perlu ditegaskan kembali adalah bahwa mengingat banyaknya tantangan terhadap eksistensi Kementerian agama, maka tugas Rasjidi sebagai Menteri Agama sangat berat. Tetapi tugas berat itu tidak lama dipikulnya, karena oposisi keras terhadap Kabinet Syahrir II memaksa Perdana Menteri Syahrir mengundurkan diri pada 2 Oktober 1946. Rasjidi digantikan Kiyai Fathurrahman Kafrawi sebagai Menteri Agama.* Dan Rasjidi kembali ke Kotagede; tetapi seminggu kemudian ia diangkat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

Namun, revolusi Indonesia memanggil Rasjidi untuk tugas penting lainnya. Belanda yang mencoba untuk kembali menjajah Indonesia mendapatkan perlawanan keras dari bangsa Indonesia. Tetapi Republik yang masih muda ini memerlukan bukan hanya perlawanan bersenjata, namun sekaligus perjuangan diplomasi untuk memenangkan pengakuan internasional terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Karena itu, pemerintah RI memutuskan untuk mengirim sebuah delegasi ke Timur Tengah. Rasjidi diangkat sebagai sekretaris missi diplomatik RI yang dipimpin H. Agus Salim ke beberapa negara

*Lihat bab tentang Fathurrahman Kafrawi.

Arab. Selain kedua tokoh ini, missi diplomatik tersebut juga mencakup Nazir Pamuntjak, Abdul Kadir dan A.R. Baswedan. Mereka meninggalkan Indonesia pada 17 Maret 1947, pertama menuju Bombay untuk menghadiri Konperensi Hubungan Antar-Asia. Konperensi ini memutuskan untuk mendukung kemerdekaan Indonesia sepenuhnya.

Missi diplomatik yang lebih melelahkan dilakukan di negara-negara Arab. Titik fokus missi itu adalah Kairo, di mana mereka berhasil mendapat dukungan sepenuhnya dari Raja Faruk dan seluruh rakyat Mesir, yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara resmi pada 2 Juni 1947. Delapan hari kemudian, Agus Salim atas nama pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian persahabatan dengan pemerintah Mesir. Missi diplomatik ini kemudian melanjutkan perjuangannya ke Yordania, Syria, Lebanon dan Iraq. Karena Agus Salim kemudian diangkat sebagai Wakil Indonesia di PBB, Rasjidi ditunjuk sebagai perwakilan Indonesia di Mesir, yang bertanggungjawab memenangkan missi diplomatik di Arab Saudi. Untuk mencapai tujuan ini, Rasjidi menuju Saudi, di mana ia berhasil mendapatkan pengakuan pemerintah Saudi atas kemerdekaan Indonesia.

Setelah Konperensi Meja Bundar 1949, yang diselenggarakan di Den Haag, Rasjidi ditugaskan Wakil Presiden Mohammad Hatta untuk mengambilalih bekas Kedutaan dan Konsulat Belanda yang masing-masing terletak di Jeddah dan Mekkah. Selain itu, secara resmi ia diangkat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Mesir dan Arab Saudi dengan kedudukan di Kairo. Pada 1953 ia dipindahkan ke Teheran, sebelum kembali ke Jakarta 13 bulan kemudian, di mana dia ditugaskan pada jabatan-jabatan administratif yang tidak penting. Ini pada akhirnya mendorongnya untuk meninggalkan tugas pemerintahan dan birokrasi guna mencapai pengembaraan akademis dan intelektualnya yang tertunda.

Karir Akademis dan Keagamaan

Rasjidi adalah orang yang penuh dengan etos intelektual. Meski ia sibuk dengan tugas-tugas diplomatik pada masa Revolusi Indonesia, ia tidak bisa melepaskan diri dari mengejar tujuan-tujuan keilmuan. Begitulah, ketika ia menjalankan missi diplomatik, ia "mencuri" waktu mengunjungi Universitas Paris di

Sorbonne untuk menjumpai Louis Massignon, yang telah dikenalnya sejak ia berada di Kairo. Massignon, sarjana terkemuka dalam Sufisme, menurut Rasjidi adalah salah seorang di antara sedikit Orientalis yang simpati kepada Islam. Dengan dukungan moral Massignon dan bantuan keuangan Yayasan Rockefeller, Rasjidi dapat melanjutkan studinya di Sorbonne. Hasilnya, pada 23 Maret, 1956, Rasjidi mempertahankan disertasi doktornya yang berjudul "L'evolution de l'Islam en Indonesie ou consideration critique du livre Tjentini" ("Perkembangan Islam di Indonesia atas dasar kajian kritis terhadap Kitab [Serat] Centini"). Lulus dengan nilai *cum laude*, Rasjidi menjadi orang Indonesia pertama menerima gelar *"docteur"* dari sebuah universitas Prancis.

Disertasi Rasjidi itu kemudian diterbitkan dengan judul *Documents pour servir a l'histoire de l'Islam a Java* (Dokumen untuk Kajian Sejarah Islam di Jawa, Paris, 1977). Bagian pertama buku ini membahas Serat Centini yang mengandung sejumlah ajaran kerohanian dan mistik Jawa. Rasjidi berhujjah, bahwa ajaran-ajaran ini pada kenyataannya bersumber dari Sufisme. Penting dicatat, Rasjidi tidak menuduh ajaran-ajaran kerohanian dan mistik Jawa itu sebagai sesat. Ia malah menganggapnya tidak relevan bagi kehidupan kaum Muslim di masa moderen. Bagian kedua buku ini membahas kebangkitan dan perkembangan berbagai organisasi Muslim dan peranan mereka sampai masa pendudukan Jepang.

Tetapi, lagi-lagi karir akademis-ilmiah Rasjidi terganggu. Ia sekali lagi diangkat sebagai Dutabesar Indonesia untuk Pakistan. Setelah kurang dari dua tahun di Pakistan, ia terbelah di antara dua pilihan yang muncul sebagai akibat dari pemberontakan PPRI/Permesta masing-masing di Sumatera Tengah dan Sulawesi Selatan. Pada satu pihak adalah para pendukung PRRI yang dipimpin oleh sejumlah mantan pemimpin Masyumi, seperti Mohammad Natsir dan Syafruddin Prawiranegara yang merupakan teman-temannya. Mereka memintanya untuk mendukung PRRI. Pada pihak lain adalah pemerintah pusat di Jakarta yang mengharapkannya untuk tetap setia kepada Republik. Tetapi, akhirnya paling tidak secara formal Rasjidi tidak harus memilih salah satu pihak. Sebaliknya ia menerima tawaran mengajar dari Institute of Islamic Studies, McGill University di Montreal, Kanada, yang pada waktu itu dipimpin Wilfred Cantwell Smith, gu-

rubesar terkemuka modernisme Islam dan perbandingan agama. (Cf. Smith, 1957). Mulai musim gugur 1958, Rasjidi mulai mengajar beberapa matakuliah tentang sejarah Islam dan hukum Islam.

Secara restrospek, masa Rasjidi selama lima tahun di McGill merupakan saat-saat pertukaran intelektual yang sangat intens baginya. Ia tidak hanya mengajar, tetapi juga mengikuti beberapa matakuliah, khususnya tentang Kristianitas. Selain itu, Rasjidi juga terlibat dalam pertukaran intelektual dengan dosen-dosen McGill sendiri seperti Smith, Izutsu, dan Niyazi Berkes, dan dosen-dosen tamu yang diundang memberikan ceramah di McGill. Salah seorang dosen tamu itu adalah J. Schacht, seorang ahli dalam hukum Islam, yang ketika itu bertugas tetap di Columbia University, New York. Schacht, tentu saja, terkenal dengan pendapat-pendapatnya yang kontroversial bagi sarjana Muslim tentang asal-usul dan perkembangan hukum Islam. Hal ini juga jelas bagi Rasjidi ketika Schacht memberi ceramah di McGill.

Argumen pokok yang dimajukan Schacht dalam ceramah di McGill itu adalah bahwa Nabi Muhammad tidak memiliki kekuatan legislatif dan hukum; ia memiliki hanya kekuasaan keagamaan. Schacht bersikeras bahwa Muhammad tidak membangun suatu entitas politik yang utuh; ia hanya mendirikan *ummah* Muslimin, yaitu komunitas keagamaan yang dibangun sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Karena Muhammad tidak memiliki otoritas legislatif dan hukum, ia harus menyelesaikan berbagai masalah secara arbitrase, yang diadopsinya dari tradisi Arab pra-Islam. Dalam masa ini, seorang arbiter biasanya adalah orang bijak, atau bahkan filosof. Jadi, Muhammad lebih memiliki kebijaksanaan daripada otoritas dan keahlian hukum. Karena itu, menurut Schacht, istilah Arab yang digunakan dalam al-Qur'an adalah *hakim* yang berarti "arbiter", "penengah", atau bahkan "juri", daripada *qadi* yang berarti "hakim", atau "pemutus hukum" yang mempunyai otoritas hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum atau bahkan menetapkan hukum.

Argumen Schacht tidak diterima Rasyidi, satu-satunya orang dari kalangan audiens yang mempersoalkan validitasnya. Menurut Rasjidi, argumen Schacht berdasarkan salah pengertiannya terhadap kedua istilah tadi dan terhadap al-Qur'an secara keseluruhan. Rasjidi menyatakan, kedua istilah itu digunakan al-Qur'an secara sinonim. Hanya pada satu tempat

atau ayat al-Qur'an menggunakan istilah *hakama* sebagaimana dipahami Schacht. Lebih jauh, Rasjidi memandang bahwa argumen Schacht lebih daripada sekedar salah pengertiannya terhadap istilah-istilah Islam. Argumen Schacht bahkan merupakan ancaman terhadap kenabian Muhammad, karena argumen tersebut membawa kepada teori bahwa Muhammad hanyalah seorang tokoh agama, bukan pemimpin politik yang bertekad untuk membangun sebuah "negara Islam". Ini berarti mengurangi Islam menjadi agama yang hanya peduli terhadap masalah-masalah keagamaan, tidak terhadap masalah-masalah politik. Implikasi lebih lanjut dari argumen Schacht adalah bahwa seluruh ketentuan hukum Islam yang menggunakan hadits tidak mempunyai hubungan dengan Nabi Muhammad sendiri karena hadits hanyalah fabrikasi kaum Muslimin pada masa awal Islam (Cf. Schacht, 1950; 1984; Rahman, 1966; Azami, 1977).

Argumen tandingan yang dikemukakan Rasjidi menimbulkan kehebohan di Institute of Islamic Studies McGill. Schacht sendiri membalas dengan marah sambil menuduh Rasjidi tidak memahami masalah. Lebih jauh, Niyazi Berkes, (Cf. Berkes, 1964) dikenal sebagai sarjana sekuler tipikal Turki, melancarkan kampanye fitnah terhadap Rasjidi; ia menuduhnya sebagai "sangat ortodoks" dan, karena itu, haruslah tidak dibiarkan mengajar di McGill. Smith, Direktur Institute, membatalkan seluruh perkuliahan dan menyelenggarakan pertemuan khusus untuk membahas masalah. Rasjidi pertama-tama diminta untuk menjelaskan pendapatnya; tetapi Rasjidi sendiri merasakan bahwa pertemuan itu merupakan pengadilan terhadapnya. Tetapi ia berhasil keluar dari situasi sulit ini ketika Izutsu mendukungnya dengan menyatakan bahwa argumen Rasjidi sepenuhnya benar (Soebagijo, 1985: 62-4. Cf. Izutsu, 1966/1933).

Rasjidi memang tidak terpesona dan gentar kepada nama besar seperti yang dimiliki Schacht. Ia kembali menunjukkan sikap ini ketika ia menjabat Direktur Pelaksana Pusat Islam Washington D.C. yang dipegangnya pada 1963. Atas nama Pusat Islam ia menghadiri sebuah Konperensi bertajuk "Islam and Peace" yang diselenggarakan University of North Carolina. Salah seorang pembicara adalah Majid Khadduri, ahli tentang Islam dan perdamaian. Pada konperensi itu Khadduri berargumen bahwa Islam (atau tepatnya *Dar al-Islam*) memandang du-

nia dalam keadaan perang abadi melawan *Dar al-Harb*. Cara satu-satunya untuk mengakhiri situasi itu adalah melalui kekerasan dan perang. Argumen Khadduri ini sebenarnya tidaklah baru. Ia merupakan pengulangan saja dari argumen lebih rinci dalam bukunya *War and Peace in the Law of Islam* (Baltimore: 1955).

Rasjidi tanpa ragu-ragu lagi segera menyatakan keberatannya terhadap teori Khadduri. Menurut dia, adalah benar jika orang-orang kafir yang ingin hidup damai, dapat memeluk Islam atau membayar *jizyah* sebagai imbalan atas perlindungan yang diberikan negara Muslim. Selama mereka tidak bersikap bermusuhan terhadap kaum Muslimin atau mengancam stabilitas negara, tidak ada alasan bagi kaum Muslimin untuk melancarkan perang (*jihad*) terhadap mereka. Al-Qur'an tidak membenarkan kaum Muslimin memerangi orang-orang kafir guna memaksa mereka masuk Islam.

Argumen Rasjidi tentu saja juga tidak baru. Sejak awal perkembangan hukum Islam, sejumlah ulama telah merumuskan secara rinci hukum damai dan perang dalam Islam. Apa yang dikemukakan Rasjidi pada intinya adalah sama dengan apa yang telah ditetapkan para ahli hukum Islam di masa silam (Cf. Azra, 1994A; Peters, 1979; 1977).

Dalam kenangannya terhadap masa lima tahun bertugas di McGill, Rasjidi mengingatkan bahaya mengritik Orientalis terkemuka semacam Schacht atau Khadduri. Pengritik bukan hanya dapat dituduh sebagai "ortodoks" atau bahkan "fundamentalis", tetapi juga bisa menyebabkan ia kehilangan pekerjaan. Tetapi keliru menganggap bahwa Rasjidi menentang seluruh Orientalis. Ia jelas memiliki penghargaan yang tinggi kepada Massignon. Ia bahkan membela Snouck Hurgronje dengan menyatakan bahwa Orientalis terkemuka Belanda ini adalah teman kaum Muslimin Indonesia karena memberikan sumbangan bagi kemajuan Islam. Pembelaan Rasjidi terhadap Snouck yang dikritik banyak ahli itu menimbulkan kontroversi hebat dalam media massa Indonesia.

Kritik kerasnya terhadap Schacht dan Khadduri merupakan polemik-polemik pertama yang dilakukan Rasjidi. Selanjutnya, sebagaimana akan kita lihat, Rasjidi kemudian juga terkenal sebagai seorang polemikus ulung di Indonesia. Dari polemik-

polemik yang dilakukannya, terlihat bahwa *concern* pokok Rasjidi adalah melindungi kemurnian ajaran Islam dan sekaligus membela keimanan ummat. Menjadi seorang polemikus sering tidak mudah. Polemik akan membuka batas-batas yang jelas dari pendapat-pendapat yang berbeda, Polemik juga dapat menyulitkan kehidupan polemikus, khususnya jika lawan berpolemiknya berada dalam posisi yang kuat untuk membalas. Rasjidi bukanlah pengecualian dalam hal ini. Keberaniannya untuk bersuara lantang menimbulkan perlawanan dari pengurus Islamic Center Washington D.C., yang sebenarnya telah tercabik-cabik konflik internal yang berkepanjangan jauh sebelum Rasjidi diangkat sebagai Direktur Pelaksana. Rasjidi akhirnya disingkirkan secara halus dari jabatannya.

Dengan demikian mulailah babak baru dalam kehidupan Rasjidi. Kembali ke Indonesia, ia menemukan situasi politik tahun 1965 telah didominasi PKI. Tidak ragu lagi, Rasjidi merupakan salah seorang penentang komunisme yang paling gigih. Ia bahkan menulis sebuah buku khusus berjudul *Islam Menentang Komunisme* yang mengungkapkan kekeliruan komunisme baik pada tingkat konseptual maupun praksis. Tetapi, mempertimbangkan kelantangannya, kelihatan agak aneh kalau Rasjidi tidak secara terbuka mengungkapkan penentangannya kepada PKI. Kenyataan bahwa kekuasaan Presiden Soekarno dan PKI begitu nampaknya memaksa Rasjidi untuk diam. Penindasan PKI terhadap Islam dan para pemimpin Muslim agaknya menyebabkan Rasjidi memilih untuk mengadakan perjalanan ke luarnegeri, ke Arab Saudi, di mana ia dipilih sebagai anggota Rabithah al-'Alam al-Islami. Belakangan ia ditunjuk sebagai Direktur Perwakilan Rabithah di Jakarta.

Jadi, ketika PKI melancarkan kudeta yang gagal pada 30 September 1965, Rasjidi sedang berada di Arab Saudi mengadakan pertemuan dengan pemimpin-pemimpin puncak negara itu, termasuk Raja Faisal. Menjawab pertanyaan Raja Faisal tentang situasi politik Indonesia yang kacau waktu itu, Rasjidi menegeaskan: "Adalah kegagalan Soekarno menguasai PKI yang membawa Indonesia ke dalam kesulitan-kesulitan politik dan ekonomi".

Kembali ke Indonesia, Rasjidi menganggur. Tetapi dalam waktu yang tidak terlalu lama, pada September 1966, ia diangkat

sebagai gurubesar hukum Islam pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dan pada 20 April 1968 ia dipromosikan kepada posisi gurubesar hukum dan institusi Islam. Pada kesempatan promosi itu, Rasjidi menyampaikan orasi ilmiah berjudul "Islam dan Indonesia dalam Masa Moderen". Sayang ia tidak memberikan pembahasan sistematik tentang subyek penting ini. Ia mulai dengan mengritik banyak Muslim Indonesia yang menurutnya tidak memiliki pengetahuan memadai tentang Islam. Meski mereka percaya pada kebenaran syari`ah, mereka melanggar ketentuan-ketentuannya dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi Rasjidi segera menemukan apologi: "Ini adalah tingkat religiusitas bangsa Indonesia umumnya, termasuk para penganut Kristen" (Cf. Ananda, ed. 1985, 86-92).

Rasjidi kemudian terus mengritik para missionaris Kristen dan etnografer yang cepat menemukan kelemahan religiusitas kaum Muslimin, sementara melupakan peranan negatif Kristianitas dalam sejarah Eropa. Ia dengan fasih mengutip Snouck Hurgronje yang menyatakan, meski Kristianitas telah memiliki sejarah panjang di Eropa, masih banyak orang Eropa yang menyembah patung. Lebih jauh, ujar Rasjidi, mereka tidak pernah membaca Injil; mereka bodoh dan percaya takhyul. Konsekuensinya, orang-orang Kristen tidak punyak hak moral untuk mengajak orang lain masuk ke dalam agama mereka. Inilah salah satu alasan kenapa ia percaya bahwa Snouck Hurgronje merupakan pembela Islam dan kaum Muslimin dari usaha terus menerus pihak misionaris Kristen untuk mengkristenkan orang-orang Islam.

Memelihara keimanan kaum Muslim dari Kristenisasi memang merupakan salah satu tema paling distingtif dari wacana Rasjidi. Menjelang akhir 1960an hubungan antara Muslim-Kristen di Indonesia cukup terganggu.* Pada 1967 sebuah gereja dihancurkan orang-orang Islam karena seorang pemimpin gereja dianggap telah menghina Nabi Muhammad; di Aceh menentang penggunaan sebuah gereja baru yang dibangun di wilayah yang tak memiliki seorangpun penganut Kristen. Selain itu, para

*Lihat bab tentang Mohammad Dachlan.

missionaris sangat ekspansif dan agresif, yang menjalankan usaha Kristenisasi *door-to-door* ke rumah orang-orang Islam. Padahal, sebelumnya pada saat-saat penumbangan PKI banyak orang yang takut dituduh PKI masuk ke dalam agama Kristen. Menghadapi semua perkembangan yang tidak sehat ini, pemerintah berusaha menetapkan ketentuan-ketentuan yang lebih *fair* dalam aktivitas-aktivitas penyiaran agama. Ini dilakukan dengan mengumpulkan para pemimpin agama-agama, termasuk Rasjidi. Dalam pertemuan ini, mayoritas peserta mengusulkan agar penyiaran agama tidak dilakukan di wilayah yang penduduknya telah menganut agama tertentu. Pertemuan ini gagal menghasilkan kesepakatan karena para pemimpin Kristen menolak menyetujui proposal tersebut.

Jelas bahwa kegiatan penyiaran Kristen merupakan salah satu *concern* pokok Rasjidi. Untuk tujuan itu, ia menghabiskan banyak enerji guna mengungkapkan tidak hanya penyimpangan doktrin-doktrin Kristen sepanjang sejarah Eropa, tetapi juga tentang berbagai *tricks* yang dipakai para missionaris untuk mengkristenkan orang-orang Islam. Tidak mengherankan kalau Rasjidi menulis sejumlah karya tulis tentang masalah ini, antara lain: *Mengapa Saya tetap Memeluk Islam; Sikap Ummat Islam terhadap Ekspansi Kristen; Kasus RUU Perkawinan dalam Hubungan Islam dan Kristen,* yang akhirnya dilarang beredar oleh pemerintah; *Sidang Raya Dewan Gereja Sedunia di Jakarta 1975: Artinya bagi Dunia Islam;* dan *Dari Rasjidi dan Maududi kepada Paus Paulus VI.*

Kini orang bisa lebih memahami kenapa Rasjidi tanpa ragu-ragu membawa kasus ekspansi Kristen di Indonesia ke dalam seminar antar-agama yang diselenggarakan di Tokyo pada 28 Oktober 1968. Ketika berbicara pada seminar ini, Rasjidi pertama-tama mengutip kode etik yang panjang bagi kegiatan-kegiatan missionaris sebagaimana ditulis Daniel J. Fleming, profesor pada Union Theological Seminary, New York. Kode Etik ini antara lain menyatakan, konversi keagamaan janganlah dilakukan dengan cara-cara yang tidak beradab (*uncivilized*), misalnya dengan menghina tokoh-tokoh dan kepercayaan agama orang lain. Lebih lanjut, konversi haruslah tidak melibatkan penggunaan ancaman fisik atau politik; rayuan imbalan materi atau pendidikan. Akhirnya, konversi haruslah tidak dilakukan di

antara anak-anak atau yang menyebabkan pertikaian dan perpecahan di antara keluarga atau suku.

Setelah mengutip ini, Rasjidi terus bercerita tentang aktivitas missionaris di Indonesia. Menurut orbservasinya, gereja-gereja di Indonesia telah mengeksploatasi kemiskinan rakyat. Para missionaris membagi-bagikan beras, pakaian dan uang di kalangan petani miskin atau buruh yang menganggur dengan syarat bahwa mereka mengirim anak-anak mereka ke sekolah-sekolah missionaris. Orang-orang Kristen membangun gereja-gereja atau sekolah-sekolah di perkampungan Muslim. Untuk tujuan ini mereka, kalau perlu, membeli tanah dengan harga dua kali lipat dari harga sebenarnya. Kadang-kadang mereka membeli tanah melalui orang lain yang tidak punya hubungan dengan gereja, tetapi kemudian harus menjual tanah itu kepada gereja. Atau mereka membeli toko atau rumah yang kemudian diubah secara tidak sah menjadi gereja. Lebih jauh, ujar Rasjidi, anak-anak muda Kristen, baik laki-laki maupun perempuan, secara sengaja disebarkan untuk menggoda anak-anak muda Muslim. Akhirnya, para missionaris Kristen mendatangi rumah-rumah Muslim tanpa izin dan mendesak untuk mendengarkan penjelasan tentang agama mereka (Anwar, 1985: 158-61).

Rasjidi selanjutnya menyatakan, para missionaris Kristen sering menggunakan prinsip "toleransi beragama" untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Mereka menekankan bahwa kaum Muslimin, sebagai mayoritas penduduk Indonesia, harus toleran kepada ummat Kristiani yang merupakan kelompok minoritas. Mereka juga menggunakan isyu hak asasi manusia untuk mengabsahkan kegiatan-kegiatan penyiaran agama mereka. Mereka bahkan mengidentikkan Kristianitas dengan modernitas dan, sebaliknya mengindentikkan agama lain, khususnya Islam, dengan tradisionalisme dan keterbelakangan.

Akhirnya Rasjidi mengingatkan audiens Seminar, bahwa rencana pembangunan nasional yang dilancarkan Jenderal Soeharto setelah Orde Baru mengkonsolidasikan kekuasaannya akan berakhir dengan kegagalan jika aktivitas misionaris seperti itu tidak diselesaikan. Negara manapun yang terbelah oleh konflik keagamaan tidak akan mampu membangun ekonominya. Dan jika pembangunan Indonesia gagal, ini akan memberikan kesempatan emas kepada komunis untuk bangkit. "Kadang-

kadang kita menangis melihat kenyataan ini", ujar Rasjidi.

Apa reaksi pemimpin Kristiani terhadap pernyataan Rasjidi ini? Sulit mengetahui dengan pasti, karena bahan-bahan tentang ini sulit diperoleh. Ihromi, seorang pemimpin Protestan yang hadir dalam seminar antar-agama tersebut bersama Rasjidi kelihatannya menahan diri untuk membalas atau mengritik Rasjidi. Dalam artikelnya yang termasuk dalam buku *Feeschrift* bagi Rasjidi, ia hanya menyatakan bahwa ia [Ihromi] juga tidak menyukai cara-cara sebagian misionaris mengajak orang masuk ke dalam agama Kristen. "Sangat memalukan mengkristenkan orang dengan cara [membagikan] beras, obat-obatan, penyekolahan dan [posisi-posisi] politik" (Ihromi, 1985: 167-71).

Keterusterangan Rasjidi membuka masalah yang sangat sensitif ini bisa mencengangkan sebagian orang. Ia adalah seorang intelektual yang memperoleh gelar PhD dari sebuah universitas Barat yang dikenal dengan liberalismenya; ini seyogyanya membuat ia secara intelektual dan keagamaan juga liberal. Kenapa Rasjidi tidak mewarisi tradisi Barat dalam liberalisme intelektual dan keagamaan, atau tradisi Jawa tentang harmoni keagamaan dan sinkretisme?

Jawaban atas pertanyaan ini agaknya lebih berkaitan dengan lingkungan intelektual dan keagamaan yang dialami Rasjidi pada waktu ia di Kairo. Ia kelihatan seirama dengan Sayyid Quthb, temannya dan seorang Muslim moderen yang dibesarkan dalam sistem pendidikan Mesir yang telah mengalami Westernisasi tetapi sangat terkenal karena sikap polemiknya terhadap tradisi Barat, termasuk Kristianitas. Qutb, bersama Mawdudi yang bersama Rasjidi menulis himbauan kepada Paus Paulus VI, terkenal sebagai pemikir terkemuka "fundamentalis". Rasjidi juga pernah disebut sebagai "fundamentalis". Ia kelihatan tidak keberatan dengan julukan ini. Ia bahkan memandangnya sebagai kehormatan; karena ia merasa memang mengabdikan diri untuk menjaga fundamental keimanan Islam (Anwar, 1985: 164-5).

Tetapi penting dicatat, walau Rasjidi begitu polemik terhadap Kristianitas, ia mengakui pentingnya penghargaan terhadap pluralitas keagamaan dalam dunia moderen. Karena itu, ia sangat mendukung gagasan toleransi beragama. Sebagai seorang Muslim, tentu saja ia meyakini bahwa Islam adalah agama pa-

ling benar, yang akan membawa para pemelukriya kepada kemajuan dalam dunia moderen selama mereka memahami dan menjalankan Islam secara benar.

Kontroversi dan polemik penting lain yang dilakukan Rasjidi adalah berkenaan dengan gagasan dan gerakan pembaruan yang dilancarkan Nurcholish Madjid, yang terjadi pada 1971-1972. Gagasan sentral pembaruan Nurcholish adalah bahwa ummat Islam telah terjebak dalam kejumudan karena mereka berpegang kepada penafsiran tradisional yang tidak mendorong tumbuhnya sikap mental konstruktif bagi modernisasi Indonesia. Nurcholish menyatakan, pembaharuan sekarang ini merupakan tugas mendesak, karena pembaruan yang dilancarkan organisasi reformis seperti Muhammadiyah dan Persis telah gagal. Dalam pandangannya, persoalan ini tidak bisa dipecahkan dengan pendekatan politik, karena partai politik Islam tidak atraktif dan gagal membangun citra positif. Karena itu, pembaruan harus melibatkan gagasan yang disebut Nurcholish Madjid sebagai "Islam yes, partai Islam no", liberalisasi, dan "sekularisasi" (cf. Madjid 1987; Hassan 1982).

Untuk kepentingan esei ini tidak perlu mengungkapkan lebih jauh dan rinci gagasan pembaruan Nurcholish. Yang penting adalah, bahwa Rasjidi termasuk salah seorang tokoh terpenting yang menentang gagasan-gagasan pembaruan tersebut. Untuk kepentingan itu, Rasjidi bahkan menulis buku khusus berjudul *Koreksi terhadap Drs. Nurcholis[h] Madjid tentang Sekularisasi,* di mana ia mengritik hampir setiap detil gagasan Nurcholish. Buku ini dalam banyak segi mencerminkan keahlian Rasjidi dalam banyak bidang. Ia dengan fasih mengutip argumen-argumen keagamaan, filosofis, sosiologis dan historis guna membuktikan "kekeliruan" Nurcholish.

Menurut Rasjidi, Nurcholish menggunakan istilah "sekularisasi" dan "sekularisme" secara semena-mena dengan memisahkan makna kedua kata yang berkaitan erat ini. Sekularisasi dalam pendangan Rasjidi identik dengan adopsi sekularisme, yang berarti pemisahan antara urusan keagamaan dengan keduniaan. Rasjidi, seperti juga Nurcholish, percaya bahwa sekularisme bertentangan dengan Islam, atau bahkan dengan agama manapun. Untuk menunjukkan bahaya sekularisme, Rasjidi mengacu kepada perkembangan sekularisme di Eropa. Menu-

rut dia, sekularisme mulai mendapatkan momentum pada masa pertengahan, ketika ranah-ranah keduniaan dalam kehidupan mulai dipisahkan dari agama, persisnya Katolik. Dengan kebangkitan gereja-gereja reformis, seperti Protestan, pemisahan antara kedua bidang ini menjadi semakin lebar. Menurut Rasjidi inilah asal muasal ateisme (Rasjidi, 1972: 14-6).

Setelah beragumen panjang, Rasjidi menyimpulkan bahwa gagasan pembaruan Islam yang dilontarkan Nurcholish merupakan ancaman terhadap ummat Islam. Ia menilai Nurcholish kebingungan dalam beberapa isyu keagamaan, karena ia belum "cukup dewasa" dan, karena itu, tidak kualified untuk menyinggung masalah-masalah serius tentang agama. Teori-teorinya dangkal, dan tak seorangpun yang akan menerimanya (Ibid: 56, 85).

Rasjidi secara konsisten mempertahankan citranya sebagai pembela terkuat keimanan Islam. Untuk tujuan itu, kembali ia membuka polemik dengan: Harun Nasution, Rektor IAIN Jakarta; almarhum Ahmad Wahib, dan AMW Pranarka, Ketua CSIS Jakarta. Ia juga membuka polemik untuk membuktikan "kekeliruan" Syi`ah (Rasjidi, 1984A).

Inti dari kritik keras Rasjidi terhadap Harun Nasution terletak pada keteguhan Harun menyebarkan semangat Islam liberal, khususnya di kalangan mahasiswa IAIN, melalui bukunya *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Rasjidi menulis buku khusus untuk mengritik Harun berjudul *Koreksi terhadap Dr. Harun Nasution tentang "Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (1977). Rasjidi tidak hanya fasih dalam mengritik hampir setiap aspek pemikiran Harun Nasution, tetapi juga menuduhnya sebagai "agen" Orientalis dan pembangkit kembali ajaran-ajaran rasional Mu`tazilah. Setelah memberikan label-label ini kepada Harun Nasution, Rasjidi menyimpulkan, gagasan-gagasan Harun Nasution mengancam Islam dan kaum Muslimin di Indonesia (Rasjidi, 1977: 11-2, 107).

Ancaman terhadap Islam dan kaum Muslimin juga dilihat Rasjidi dalam gagasan-gagasan Ahmad Wahib, seperti terdapat dalam buku *Pergolakan Pemikiran Islam* yang disunting Djohan Effendi dan Ismet Natsir (Jakarta, LP3ES: 1981). Buku yang berasal dari catatan harian almarhum Ahmad Wahib ini sangat kontroversial karena mencakup penolakan terhadap kemapan-

an Islam baik segi doktrinal maupun ideologis. Tetapi berbeda dengan kritik-kritik Rasjidi yang sebelumnya bersifat substantif, kritiknya kali ini lebih tertuju kepada penerbitan buku itu sendiri. Ia menyimpulkan, catatan harian itu merupakan sebuah tragedi dalam kehidupan Islam pada masa Orde Baru. Ia juga menyesalkan Mukti Ali, salah seorang pelanjutnya sebagai Menteri Agama, yang memberi kata pengantar bagi buku itu.

Polemik terakhir Rasjidi yang penting dikemukakan di sini adalah dengan Pranarka, tokoh CSIS yang merupakan *think tank* kelompok Katolik dan sekuler, berkenaan dengan dua tema pokok: nasionalisme dan agama, khususnya Islam; dan strategi kebudayaan dalam hubungan dengan pendidikan nasional. Perdebatan dimulai dengan penerbitan wawancara Pranarka yang dimuat Harian *Suara Karya* (14 April, 1978). Gagasan pokok Pranarka adalah bahwa nasionalisme Indonesia telah ada sejak masa pra-sejarah, dan agama, khususnya Islam, merupakan kendala terhadap nasionalisme.

Dalam membantah Pranarka, sekali lagi Rasjidi menunjukkan penguasaannya yang mengesankan terhadap sejarah dan filsafat nasionalisme dan hubungannya dengan agama. Karena Pranarka mengutip Hegel sebagai titik awal pembahasannya, Rasjidi memberikan analisis panjang tentang filsafat Hegelian guna membuktikan bahwa Pranarka telah salah paham terhadap filsafat Hegelian. Kemudian, mengutip salah seorang otoritas paling menonjol dalam soal nasionalisme, Hans Kohn, Rasjidi menyatakan adalah absurd untuk menyatakan bahwa nasionalisme telah eksis di Indonesia sejak masa pra-sejarah. Kohn bahkan percaya bahwa nasionalisme baru mendapat landasan yang kuat di Eropa pada abad 18.

Selanjutnya menurut Rasjidi, dalam pengalaman Indonesia, tidak ada distingsi assosiatif antara nasionalisme dan Islam di kalangan kaum Muslimin. Islam merupakan salah satu faktor terpenting dalam pembentukan nasionalisme Indonesia. Adalah Islam yang menyatukan berbagai suku bangsa di Indonesia. Karena itu, Rasjidi membantah argumen Pranarka bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional negara-bangsa Indonesia tidak mempunyai hubungan dengan doktrin agama tertentu. Di sini Rasjidi mengutip Muhammad Yamin yang menjelaskan bahwa, misalnya, sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang

Maha Esa, harus dipahami dalam kaitannya dengan ajaran agama monoteistik.

Sikap Rasjidi terhadap masalah hubungan antara Pancasila dan Islam sekali lagi menunjukkan posisi politiknya. Ia adalah seorang nasionalis, yang tidak pernah mempertentangkan antara keimanannya dengan ideologi nasional Indonesia. Meski ia kadang-kadang mengritik sejumlah kebijakan pemerintah yang dipandangnya dapat mengancam kepentingan Islam dan kaum Muslimin, ia tak pernah menunjukkan tanda-tanda ketidaksetiaan kepada Republik.

Penutup

Biografi Rasjidi, sang Menteri Agama pertama, menceritakan banyak hal: akomodasi dan konflik antara Islam dan pandangan hidup Jawa; transformasi seorang Jawa dari keluarga Abangan menjadi Muslim ortodoks; pengembaraan menuntut ilmu (*rihlah ilmiyah*) ke negeri yang dipandang sebagai salah satu pusat intelektualisme Islam yang lengkap dengan aktivisme politik mahasiswa; pembentukan Kementerian Agama dan oposisi terhadap eksistensinya; *encounters* dengan tradisi keilmuan dan akademis Barat; dan dinamika Islam pasca-Orde Lama. Kehidupan Rasjidi dengan demikian adalah sebuah "teks" sejarah sosial yang melukiskan tidak hanya lingkungan keagamaan, sosial dan politik; tetapi juga dapat ditafsirkan ulang dan bahkan menjadi obyek kritisisme.

Pengalaman kehidupan Rasjidi sebagai sebuah teks sosial dapat membimbing kalangan kaum Muslimin Indonesia tentang bagaimana cara memandang dan memahami Islam dan dinamikanya di negeri ini. Dengan demikian "teks sosial" Rasjidi telah ikut menyumbang dengan caranya sendiri kepada wacana dinamik tersebut. Teks itu sendiri pun belum sepenuhnya selesai ditulis; karena itu *re-assessment* agaknya diperlukan di masa datang.

Bibliografi

Abaza, Mona, *Islamic Education, Perception and Exchanges: Indonesian Students in Cairo* (Paris: Cahier d'Archipel No. 33, 1994).

Abaza, Mona, *Changing Images of Three Generattions of Azharites in Indonesia* (Singapura: ISEAS, Occasional Paper, No. 19, 1993).

Affandi, Bisri, "Syaikh Ahmad al-Surkati: His Role in al-Irsyad Movement in Java in the Early Twentieth Century", MA Thesis, McGill University (1976).

Ananda, Endang Basri (ed.), *70 Tahun Prof. Dr. Rasjidi* (Jakarta: Pelita, 1985).

Anwar, Rosihan, "Prof. DR. H. Muhammad Rasyidi Disclosed [sic] the Interreligious Relationship in Indonesia", dalam *Religiosa*, Vol. 3 No. 1 (1997), hh. 24-38.

Anwar, Rosihan, "Prof. Dr. H.M. Rasjidi: Pengungkap Gamblang Hubungan Antar Agama di Indonesia", dalam Endang Basri Ananda (ed.), *70 Tahun Prof. Dr. Rasjidi* (Jakarta: Pelita, 1985).

Azami, M.M., *Studies in Hadith Methodology and Literature* (Indianapolis: Islamic Teaching Center, 1977).

Azra, Azyumardi, "Melacak Pengaruh and Pergeseran Orientasi Tamatan Kairo", *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies*, Vol. 2, No. 3 (1995).

Azra, Azyumardi, "Guarding the Faith of the *Ummah*: Religio-Intellectual Journey of Mohammad Rasjidi", dalam *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies*, Vol. I, no. 1 (1994).

Azra, Azyumardi, "Jihad dan Terorisme: Konsep dan Perkembangan Historis", *Islamika*, 4 (1994A).

Boland, B.J., *The Struggle of Islam in Modern Indonesia* (Den Haag: Martinus Nijhoff, 1982).

Berkes, Niyazi, *The Development of Secularism in Turkey* (Montreal: McGill University Press, 1964).

Departemen Agama, *Amal Bakti Departemen Agama RI: Eksistensi dan Derap Langkahnya* (Jakarta, 1996a).

Departemen Agama, *50 Tahun Departemen Agama: Perjuangan dan Pengabdian* (Jakarta, 1996b).

Departemen Agama, *Amal Bakti Departemen Agama R.I.: Eksistensi dan Derap Langkahnya* (Jakarta, 1987).

Departemen Agama, *Peranan Departemen Agama dalam Revolusi dan Pembangunan Bangsa* (Jakarta, 1965).

Departemen Penerangan R.I., *20 Tahun Indonesia Merdeka*, 9 jilid (Jakarta, 1965).

Hassan, Muhammad Kamal, *Muslim Intellectual Responses to "New Order" Modernization in Indonesia* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1982).

Ihromi, "Hubungan Antar-Agama", dalam Ananda (ed.) (1985).

Izutsu, T., *Ethico-Religio Concept in the Qur'an* (Montreal: McGill University Press, 1966); *Etika Beragama dalam Qur'an* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993).

Madjid, Nurcholish, *Islam, Kemoderenan dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1987).

Madjid, Nurcholish, "Sekitar Usaha membangkitkan Etos Intelektualisme Islam di Indonesia", dalam Endang Basri Ananda (ed.), *70 Tahun Prof. Dr. Rasjidi* (Jakarta: Pelita, 1985).

Ministry of Religious Affairs, *Ministry of Religious Affairs: Tasks and Functions* (Jakarta, 1996).

Nakamura, Mitsuo, *The Crescent Arises over the Banyan Tree* (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1983).

Nakamura, Mitsuo, "Professor Kahar Muzakkir and Development of the Muslim Reformist Movement in Indonesia", dalam *Religion and Social Ethos in Indonesia* (Clayton: Monas University, 1977).

Noer, Deliar, *Partai Islam di Pentas Nasional* (Jakarta: Grafitipers, 1987).

Noer, Deliar, *Administration of Islam in Indonesia* (Ithaca, N.Y.: Cornell Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, Cornell University, Monograph Series No. 58, 1978).

Peters, R., *Islam and Colonialism: The Doctrine of Jihad in Modern History* (Den Haag: E.J. Brill, 1979).

Peters, R., *Jihad in Medieval and Modern Islam* (Leiden: Mouton, 1977).

Puslitbang Kehidupan Beragama Departemen Agama, *Laporan Sejarah Departemen Agama* (Jakarta, 1980/81).

Rahman, Fazlur, *Islam*, Second Edition (Chicago: University of Chicago Press, 1966).

Rasjidi, H.M., *Persoalan-persoalan Filsafat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984, diterjemahkan dari Harold H. Titus, Marilyn S. Smith & Richard T. Nolan, *Living Issues in Philosophy*, New York: D. van Nostrand, 1979).

Rasjidi, HM., *Apa Itu Syi'ah* (Jakarta, 1984A).

Rasjidi, H.M., "Pergolakan Pemikiran Islam: Suatu Tragedi", *Panji Masyarakat* (1982), h. 346.

Rasjidi, H.M., *Strategi Kebudayaan dan Pembaharuan Pendidikan Nasional* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980).

Rasjidi, H.M., *Koreksi terhadap Dr. Harun Nasution tentang "Islam ditinjau dari*

Berbagai Aspeknya (Jakarta: Bulan Bintang, 1977).

Rasjidi, *Koreksi terhadap Drs. Nurcholis[h] Madjid tentang Sekularisasi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1972 cetak ulang 1977).

Rasjidi, H.M., *Mengapa Aku Tetap Memeluk Agama Islam?* (Jakarta: Bulan Bintang, 1968).

Rasjidi, H.M., cetak ulang 1992, *Islam & Kebatinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967).

Rasjidi, H.M., *Filsafat Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1965, diterjemahkan dari David Trueblood, *Philosophy of Religion.*

Schacht, J., *Introduction to Islamic Law* (Oxford: Oxford University Press, 1984).

Schacht, J., *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* (Oxford: Oxford University Press, 1950).

Smith, W.C., *Islam in Modern History* (Princeton: Priceton University Press, 1957, repr. 1977).

Prof. K.H. Fathurrahman Kafrawi;

Pengajaran Agama di Sekolah Umum

Akh. Minhaji
dan M. Atho Mudzhar

Prof. K.H.R. Fathurrahman Kafrawi adalah figur yang menarik dan penuh kombinasi. Hal ini bisa dilihat dari pengalaman pendidikan, perjuangannya melawan penjajah, dan upayanya ikut membangun bangsa Indonesia, khususnya umat Islam. Sayang, hingga kini baru ada tiga tulisan tentang Fathurrahman yang diterbitkan Departemen Agama Pusat, itupun merupakan tulisan yang amat singkat.[1] Untuk menghadirkan informasi yang lebih lengkap, tulisan berikut di samping didasarkan pada ketiga informasi tersebut juga ditambah dengan beberapa hasil wawancara yang dilakukan baik dengan keluarganya maupun kawan sejawatnya, antara lain adalah Dr. Salladin,[2] Muhammad Fadlan Abdul Ghani,[3] Ny. Dr. M.

---

[1]Informasi dari Depag RI adalah *Laporan Sejarah Departemen Agama* (Jakarta: Proyek Penelitian Keagamaan, 1980/1981), *Amal Bakti Departemen Agama R.I: Eksistensi dan Derap Langkahnya* (Jakarta: Departemen Agama R.I., 1996) dan *50 Tahun Departemen Agama: Perjuangan dan Pengabdian* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1996).

[2]Ia adalah putra Fathurrahman yang sekarang tinggal di Malang dan menjadi dosen tetap Pascasarjana IKIP Negeri Malang.

[3]Ia adalah kawan sejawat Fathurrahman yang pernah menjabat sebagai Walikota Madya Yogyakarta dan juga pernah menjadi Sekrteris II Dewan Pengurus Perguruan Tinggi Islam (sekarang UII). Menurut pengakuan Fadlan, setelah Fathurrahman bertugas di Yogyakarta, dialah orang pertama yang memperkenalkan Fathurrahman kepada tokoh-tokoh masyarakat setempat di Yogyakarta seperti Adnan, Muchtar Yahya, Hasbi Ash-Shiddieqy dan pihak Keraton Yogyakarta. Fadlan sekarang berusia 68 tahun dan tinggal di Yogyakarta. Karena Fadlan umurnya sudah agak uzur, maka ketika wawancara dilakukan ia banyak dibantu oleh Kalimin Rahmat Tohari, seorang yang selalu mendampingi Fadlan.

Amin,[4] dan Drs. H. Tarmudji.[5]

Pendidikan dan Kepribadiannya

Fathurrahman Kafrawi lahir dari keluarga santri di Tuban, Jawa Timur, pada 10 Desember 1901. Ibunya bernama Aisyah, meninggal dan dimakamkan di Surabaya. Sedangkan bapaknya, Kafrawi, adalah seorang kiyai dari lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) dan Penghulu pada masa penjajahan Belanda. Ia kawin dengan Buchainah binti Hisyam dan dikaruniai anak lima orang: Salladin, Latifah Hanum, Kamal Hidayat, Djalaluddin Fuad, dan Liliek Amalia.[6] Menurut M. Fadlan Abd. Ghani, Buchainah berasal dari lingkungan Muhammadiyah; namun setelah menikah dengan Fathurrahman dan pindah ke Yogyakarta, ia menjadi anggota NU dan salah seorang pengurus Muslimat di Yogyakarta. Dari latarbelakang dirinya yang NU dan isterinya yang Muhammadiyah, bisa dipahami jika Fathurrahman adalah orang yang terbuka terhadap berbagai golongan dan kelompok umat Islam yang ada ketika itu, tanpa melepaskan diri dari karakter ke-NU-annya.

Fathurrahman mempunyai latar belakang pendidikan yang beragam. Ia pernah belajar di pesantren, di Timur Tengah dan juga di Barat. Pertama, ia mondok di Pesantren Jamsaren, Solo, dibawah pimpinan K.H. Umar—pondok yang dikenal telah melahirkan banyak ulama dan tokoh nasional.[7] Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya di Mekkah dan kemudian di Al-Azhar (Mesir) selama sekitar sepuluh tahun. Sewaktu di Mesir, ia aktif dalam berbagai kegiatan termasuk dalam organisasi mahasiswa Indonesia di Kairo, *Jamaah al-Khayriyah al-Talabiyah al-Azhariyah al-Jawiyah*. Menjelang

---

[4]Ia adalah isteri Dr. M. Amin, keponakan Fathurrahman, sekarang tinggal di Yogyakarta.

[5]Ia adalah Kabagset Kanwil Departemen Agama Yogyakarta.

[6]Dr. Salladin bertempat tinggal di Malang dan kawin dengan Sri Sudarmi, MSPD. Latifah Hanum kawin dengan Nursohib Hudan, S.H. sekarang tinggal di Surabaya. Kol. Djalaluddin Fuad (AL) kawin dengan Jeni Surjani tinggal di Jakarta. Liliek Amalia kawin dengan Ir. Agus Sudiman (almarhum) dan tinggal di Bogor. Sedangkan Kamal Hidayat, S.H. (almarhum) kawin dengan R.A. Kusumangastuti sekarang tinggal di Jakarta.

[7]Antara lain adalah K.H. Masjkur dan H. Munawir Sjadzali. Lihat bab tentang K.H. Masjkur dan Munawir Sjadzali.

1925, ia bahkan menjadi ketuanya.[8] Selain itu, bersama Djanan Thaib,[9] ia juga turut melahirkan dan mengelola jurnal *Seruan Azhar*.[10]

Dari Mesir, Fathurraman memperdalam pengetahuannya di Leiden University, Belanda, hingga memperoleh gelar B.A. Kemudian, selama satu tahun ia berada di Prancis dan Inggris untuk belajar bahasa kedua negara tersebut. Dari sini, tidak aneh jika kemudian ia dikenal menguasai banyak bahasa asing, seperti Arab, Belanda, Inggris, Prancis, dan Latin. Dengan latarbelakang pendidikan seperti itu, jelas wawasan Fathurrahman cukup luas dan karena itu dapat dimaklumi, jika kemudian ia terpilih untuk menduduki posisi-posisi penting, antara lain Menteri Agama RI.

Fathurrrahman dikenal sebagai figur dan tokoh yang sederhana dan hangat dalam pergaulan dan dekat dengan rakyat kecil. Kesederhanaannya antara lain terlihat ketika ia tidak mau menggunakan fasilitas mobil yang diberikan pemerintah dengan alasan karena hal itu akan menjauhkan hubungannya dengan rakyat kecil. Dr. Salladin menceritakan bahwa jika pulang dari Jakarta setelah mengikuti sidang-sidang MPRS, Fathurrahman selalu ikut kereta api dan menyempatkan diri berbincang-bincang dengan para penumpang lainnya bahkan sesekali juga dengan masinisnya, menyangkut masalah-masalah sosial. Di samping itu, ia juga menghargai perbedaan pendapat dan terbuka akan kritik, baik yang datang dari kalangan Islam maupun dari koleganya yang non-Muslim. Bahkan diceriterakan, seringkali pemimpin agama lain (misalnya pastor) datang ke rumahnya untuk membicarakan masalah sosial dan keaga-

---

[8]Organisasi ini merupakan organisasi mahasiswa Indonesia-Melayu di Universitas al-Azhar dan didirikan pada 1922. Ketua pertamanya adalah Djanan Thaib, mahasiswa asal Minangkabau yang menjadi orang Indonesia pertama yang mendapat gelar akademis resmi dari Universitas Al-Azhar pada 1919. Lihat William Roff, "Indonesian and Malay Students in Cairo in the 1920s," *Indonesia*, 9 (1970), hal. 76.

[9]Selain sebagai orang Indonesia pertama yang memperoleh gelar akademis dari Al-Azhar, Djanan Thaib adalah salah satu anggota Konferensi Islam pertama di Mekah 1926. Ia kemudian menetap di Mekah dan mendirikan Madrasah Indonesia yang sempat bertahan selama 40 tahun. Di samping itu ia juga menjadi Ketua Majlis Syuro Indonesia di Mekah. Lihat, Mona Abaza, *Islamic Education Perceptions and Exchanges: Indonesian Studens in Cairo* (Paris: Cahier d'Archipel 23, 1994), hal. 76. Lihat juga pengalaman Rasjidi di Kairo dalam lingkungan intelektual dan sosial yang sama.

[10]Mona Abaza, *Islamic Education*, hal. 76.

maan di Indonesia.

Fathurrahman juga dikenal sebagai pekerja keras, ulet, dan teliti. Diceriterakan, misalnya, selama belajar ia mencari biaya sendiri. Ketika di Mekkah dan di Mesir ia mengajar *ngaji* untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dan juga untuk membiayai pendidikannya. Sedangkan ketika di Belanda, Perancis, dan Inggris, ia main piano (musik) di beberapa restoran. Ketika menjabat Menteri Agama, ia amat teliti mengoreksi setiap surat yang akan dikirim. Kesalahan ketik satu huruf, titik ataupun koma tidak pernah lepas dari pengamatannya, apalagi menyangkut isi surat itu sendiri.

Selain itu, bersama-sama kawan sejawatnya ia juga aktif dalam kegiatan menentang penjajah, baik pada masa penjajahan Belanda, Jepang, ataupun ketika Belanda kembali lagi menyerang Indonesia. Ia aktif mendukung berbagai organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Pada 2 September 1969, ia meninggal dunia pada usia enam puluh delapan tahun dengan meninggalkan seorang isteri dan lima orang anak, seperti disebutkan di muka, serta sejumlah cucu. Ia dimakamkan di Karangkajen, Yogyakarta, di mana terdapat pula makam tokoh ternama lainnya, seperti K.H. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah.[11]

Karir

Selama hidupnya, dapat dikatakan bahwa Fathurrahman mempunyai dua karir yang berbeda tapi saling menunjang, yakni bidang pendidikan dan politik. Sekembali dari luar negeri, ia mendirikan *Madrasah Hidayat Islamic School* yang terdiri dari tingkat Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah. Karir Fathurrahman, dengan demikian, dimulai sebagai guru dan profesi ini menyatu dalam dirinya hingga akhir hayatnya. Selain sebagai pendidik, Fathurrahman juga seorang

---

[11]Untuk informasi tentang K.H. Dahlan, baca antara lain Munir Mulkhan, *K.H. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990); idem, *Warisan Intelektual K.H. Ahmad Dahlan dan Amal Muhammadiyah* (Yogyakarta: Percetakan Pustaka, 1990); M. Yusron, *Kyai Haji Ahmad Dahlan: Pemikiran dan Kepemimpinannya* (Yogyakarta: Offset, 1983); Hamka, *K.H.A. Dahlan* (Djakarta: Sinar Pudjangga, 1952); Solihin Salam, *K.H. Achmad Dahlan: Reformer Islam Indonesia* (Djakarta: Djaja Murni, 1961); idem, *K.H. Ahmad Dahlan: Tjita-Tjita dan Perdjuangannja* (Djakarta: Dep. Pengadjaran Muhammadijah, 1962).

aktivis di NU.[12] Keaktifannya di organisasi inilah yang kemudian membawanya terlibat dalam kegiatan politik, karena NU kemudian menjadi salah satu unsur Masyumi.

Sebagaimana diketahui, setelah Indonesia merdeka, partai-partai politik didirikan. Masyumi saat itu dinyatakan sebagai satu-satunya partai Islam. Dalam kepengurusan pertama (1945-1949) yang diketuai Sukiman Wirjosandjojo, Fathurrahman menjadi salah satu anggota Pimpinan Pusat, mewakili unsur NU. Dari sinilah karir politik Fathurraman melesat cepat, karena dalam Kabinet Syahrir III (2 Oktober 1946-27 Juni 1947), ia dipercaya sebagai Menteri Agama RI, menggantikan H.M. Rasjidi. Setelah selesai menjabat Menteri Agama, karir politiknya tidak berhenti. Ia menjadi Wakil Ketua Konstituante (1957-1959). Ia juga menjadi anggota MPRS sebagai wakil Karya Ulama.

Karirnya dalam dunia pendidikan juga tetap berlanjut. Pada 1947, ia diangkat sebagai Ketua Panitia Perbaikan Sekolah Tinggi Islam di Yogyakarta.[13] Sejak November 1947, Sekolah Tinggi Islam ini berubah menjadi Universitas Islam Indonesia (UII) dengan membuka empat fakultas: Agama, Hukum, Pendidikan, dan Ekonomi.[14] Sejak itu, Fathurrahman diangkat sebagai Ketua Badan Wakaf UII hingga akhir tahun 1963, dan diangkat sebagai Guru Besar UII oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Selain itu, Fathurrahman juga ikut membidani lahirnya percetakan UII, yang waktu itu terletak di jalan Pasar Kembang Yogyakarta, Perpustakaan Islam, dan Poliklinik NU Yogyakarta.

---

[12]Baca antara lain A. Farichin Chumaidy, "The Jam`iyyah Nahdlatul `Ulama: Its Rise and Early Development (1926-1945)" (Tesis Master, McGill University, 1976) dan Kacung Marijan, *Quo Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah 1926* (Jakarta: Erlangga, 1992).

[13]Sekolah Tinggi Islam ini didirikan pertama kali oleh Masyumi pada masa Jepang. Bermula dari keinginan untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi Islam pada awal 1945, Masyumi kemudian membentuk panitia persiapan yang diketuai Hatta. Secara resmi perguruan tinggi ini dibuka pada 8 Juli 1945 di Jakarta. Namun pada Desember tahun yang sama, sekolah ini ditutup setelah kedatangan tentara Sekutu. Ia dibuka kembali pada Juli 1946, namun tidak lagi di Jakarta melainkan di Yogyakarta. Lihat, B.J. Boland, *The Struggle of Islam in Indonesia* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1982) hal. 118-119.

[14]B.J. Boland, *The Struggle*, hal. 19. Lebih jauh tentang sejarah UII, lihat Dahlan Thaib, S.H. dan Moh. Mahfud MD, S.H., *5 Windu UII* (Yogyakarta: Liberty, 1984).

UII dianggap sebagai perguruan tinggi tertua di Indonesia. Hal ini karena ia didirikan pada 1945, sedang Universitas Gajah Mada, yang sering dianggap universitas tertua di Indonesia, didirikan pada 1948. UII ini juga mempunyai arti penting bagi sejarah IAIN karena bermula dari sinilah IAIN lahir. Pada Agustus 1950, keluar Peraturan Pemerintah No. 34 yang mengatur pengembangan Fakultas Agama UII menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang kemudian diresmikan pembukaannya pada September 1951 di Yogyakarta. PTAIN ini kemudian digabung dengan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) yang didirikan di Jakarta pada 1957 dan diubah namanya menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang sampai sekarang telah mencapai 14 di seluruh Indonesia.[15]

Dalam proses pengembangan Fakultas Agama UII menjadi PTAIN tersebut tadi, Fathurrahman ikut memiliki andil besar. Ia adalah ketua Tim beranggotakan sebelas orang yang dibentuk Menteri Agama K.H. Wahid Hasyim untuk melakukan pengembangan dan mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan pembukaan PTAIN tadi, mulai dari mempersiapkan gedung, peralatan, sampai proses penerimaan mahasiswa baru.

Sebagai Menteri Agama RI

Fathurrahman menjabat Menteri Agama RI pada awal kemerdekaan ketika situasi politik belum begitu stabil. Walaupun Indonesia telah merdeka ternyata masih menghadapi agresi militer Belanda. Seperti diketahui, setelah terjadinya agresi militer tersebut, secara *de facto* Republik Indonesia hanya meliputi wilayah Jawa/Madura dan Sumatera. Akibatnya, hanya pada dua wilayah tersebut pula upaya pembenahan organisasi kantor-kantor Kementerian Agama dapat dilaksanakan. Sedangkan sebagian pegawai Kementerian Agama di daerah-daerah yang diduduki tentara Belanda (NICA), terpaksa mengungsi ke daerah-daerah yang masih dikuasai Republik. Karena kesulitan transportasi pada waktu itu, alat-alat perlengkapan kantor terpaksa ditinggalkan di daerah pendudukan.

---

[15]B.J. Boland, *The Struggle*, hal. 119-120; *Laporan Sejarah Departemen Agama* (Jakarta: Proyek Penelitian Keagamaan, 1980/1981), hal. 51; H. Aboebakar, *Sedjarah Hidup K.H. A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar* (Jakarta: Panitya Buku Peringatan Alm. K.H.A. Wahid Hasyim, 1957), hal. 665-670.

Perlu juga dicatat di sini tentang perubahan sistem kabinet yang terjadi pada saat itu. Setelah dikeluarkannya Maklumat No. X Tahun 1945, kekuasaan Presiden semakin dibatasi dan tidak lagi tak terbatas seperti pada masa sebelumnya.[16] Kemudian, dikeluarkan juga Maklumat Wakil Presiden tanggal 3 Nopember 1945 yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendirikan partai politik. Sejak saat itu, kebebasan mendirikan partai politik terbuka lebar dan Indonesia kemudian mengenal sistem multi partai. Sejalan dengan ini, pada 14 Nopember 1945 dikeluarkan juga Maklumat Pemerintah yang menetapkan adanya perubahan kabinet dari presidensial ke parlementer. Pada dasarnya, berbagai langkah ini membuka wacana demokratis yang pluralistik. Namun, dalam waktu yang sama harus pula diakui bahwa sistem demikian itu sering menggoyahkan pemerintahan, yang pada gilirannya mempengaruhi stabilitas politik. Hal ini terlihat, misalnya, bahwa dalam kurun waktu empat tahun (1945-1949), partai-partai politik yang ada saling berkompetisi untuk mengendalikan pemerintahan dan telah menyebabkan jatuh bangunnya pemerintahan yang ada. Tercatat dalam sejarah bahwa hingga tahun 1947 saja telah terjadi tiga kali perubahan kabinet, yakni Kabinet Syahrir I, II, dan III. Kabinet Syarifuddin yang mengganti Kabinet Syahrir III juga tidak bisa bertahan lama.[17] Dalam suasana politik seperti itulah Fathurrahman menjabat Menteri Agama RI.

Fathurrahman sendiri menjadi Menteri Agama selama sepuluh bulan saja, sejak 2 Oktober 1946 hingga 3 Juli 1947 pada masa Kabinet Syahrir III. Ia diangkat sebagai Menteri Agama mewakili Masyumi dari unsur NU, menggantikan Menteri Agama pertama,

---

[16]Maklumat No. X tersebut pada dasarnya berisi penetapan fungsi legislatif bagi KNIP dan juga pembentukan BP-KNIP yang ditugaskan untuk menjalankan tugas sehari-hari KNIP.

[17]Menurut catatan, dalam waktu yang amat singkat telah terjadi sejumlah pemerintahan yang jatuh bangun, bahkan ada diantara pemerintahan itu yang hanya bisa bertahan selama dua bulan saja. Untuk diskusi masalah tersebut, baca antara lain Moh. Mahfud, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993); idem, "Perkembangan Politik Hukum: Studi tentang Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia" (Disertasi UGM, 1993); George T. Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 1952).

H.M. Rasjidi. Yang menarik, ternyata K.H. Rasjidi kemudian diangkat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Menteri Agama pada masa kepemimpinan Fathurrahman. Namun, Rasjidi hanya memangku jabatan tersebut selama kurang lebih dua bulan karena ia kemudian menjadi anggota misi diplomatik RI di Timur Tengah. Jabatan Sekjen kemudian dipegang Mr. R. Sunarjo.

Sebagai Menteri Agama kedua, kebijakan yang diambil Fathurrahman, antara lain, adalah membenahi struktur organisasi Kementerian Agama. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 1185/KJ tanggal 20 November 1946, struktur organisasi Kementerian Agama peninggalan Rasjidi diperbarui. Terdapat sepuluh bagian yang disebut Bagian A sampai dengan H, dengan bagian-bagian tertentu dipecah dalam beberapa sub. Bagian A, misalnya dibagi dalam tiga, A-I, A-II, dan A-III. Kesepuluh bagian tersebut masing-masing menangani beberapa urusan. Bagian B, misalnya, menangani urusan Jawatan Agama Daerah, Penghulu, Hakim Agama, dan Wakaf. Sementara, bagian H mengurusi arsip dan ekspedisi.

Kebijaksanaan dalam bidang organisasi seperti dijelaskan di atas dilanjutkan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan lain guna memperlancar tugas-tugas seperti yang telah digariskan. Salah satunya adalah dilahirkannya UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Ruju'. Semula, UU ini dimaksudkan untuk mengoreksi dan memperbaiki peraturan perkawinan yang berlaku pada masa Pemerintahan Hindia Belanda. Yang ditugasi melakukan hal tersebut adalah Mr. R. Sunarjo, yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Bagian B. Rancangan UU tersebut kemudian diajukan ke Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) yang waktu itu dipimpin Mr. Asaat, untuk dibahas dalam sidang BP-KNIP yang dilaksanakan di Purworejo. Namun, dalam sidang tersebut diusulkan agar materi UU yang baru tersebut bukan hanya memperbaiki peraturan yang ada, tetapi harus merombak aturan-aturan yang lahir di alam penjajahan untuk kemudian disesuaikan dengan alam kemerdekaan. Usul ini diterima baik oleh pihak pemerintah, dan akhirnya pada 20 November 1946 ditetapkan UU No. 22 Tahun 1946 yang mengatur tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (NTR).

Sebelumnya, para pegawai yang mengurus masalah-masalah nikah, talak, dan rujuk menerima bayaran dari pihak-pihak yang

berurusan dengan mereka. Namun, sejak diberlakukannya UU tersebut, semua biaya masuk ke kas negara, dan para pegawai menerima gaji setiap bulan dari pemerintah. Sebagai penertiban lebih lanjut, pemerintah mengadakan pengangkatan pegawai secara formal. Tahap pertama, pemerintah menformalkan jabatan-jabatan yang sudah ada sebelumnya. Misalnya, penghulu diserahi tugas untuk tingkat kabupaten sedangkan naib-penghulu untuk daerah-daerah kewedanan dan kecamatan.[18]

Pada masa sebelumnya, penghulu bertugas rangkap, yakni Kepala Kantor Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk (NTR); Ketua Raad Agama; dan Penasehat pada Pengadilan Negeri. Setelah diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1946, penghulu hanya bertugas untuk bagian nomor satu di atas, sedangkan tugas nomor dua dan tiga diserahkan kepada petugas yang lain.

Guna melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diambil, Menteri Agama Fathurrahman mengambil langkah-langkah lebih lanjut. Misalnya, sebagian petugas masjid yang sudah ada diangkat sebagai pegawai negeri. Saat itu diangkat pula pegawai pemerintah yang tugasnya membantu pegawai pencatat NTR. Sejalan dengan itu, pada 30 April 1947 ditetapkan Maklumat Bersama Kementerian Dalam Negeri (dibawah pimpinan Mr. Moh. Roem) dengan Kementerian Agama (dibawah pimpinan Fathurrahman) No. 3 Tahun 1947. Maklumat ini berisi aturan-aturan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban para *kaum*, baik yang disebut modin, kayim, atau lebai.

Kaum adalah satu jabatan yang sudah ada sejak masa kesultanan, yakni perangkat desa yang khusus mengurusi masalah-masalah keagamaan. Sejak dikeluarkannya Maklumat di atas, kaum mempunyai posisi, hak, dan penghargaan yang sama dengan pamong-

---

[18]Sebenarnya, jabatan Penghulu menjadi cikal bakal lahirnya Departemen Agama di kemudian hari. Kebijaksanaan Snouck Hurgronje menyangkut posisi dan peran penghulu membuat struktur kepenghuluan bersifat sentralisasi yang sangat kuat dan hal ini tergambar pada struktur Depag yang berjalan hingga kini; baca Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 213-33. Lihat juga "Penghulu" dalam *Encyclopaedia of Islam* yang diterbitkan oleh E.J. Brill, Leiden.

pamong desa lainnya. Sebagaimana pejabat-pejabat desa lainnya, pengangkatan seorang kaum dilakukan secara pemilihan yang diawali dengan pengajuan calon minimal dua orang, dan dilanjutkan dengan ujian resmi yang dilaksanakan oleh pihak kenaiban. Hasil pemilihan dan ujian ini harus diterima oleh semua pihak termasuk pamong praja setempat.

Kebijakan lain yang ditempuh oleh Fathurrahman adalah menyangkut pendidikan agama di sekolah-sekolah umum. Pada saat itu berhasil diperjuangkan agar pendidikan agama diberikan di sekolah-sekolah umum negeri dari tingkat Sekolah Rakyat (sekarang SD) hingga Sekolah Menengah Atas (sekarang SMU). Namun pada saat itu nilai pelajaran agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas. Usulan menjadikan agama sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah-sekolah umum dan juga pentingnya perhatian terhadap pelajaran agama pada umumnya memakan waktu yang cukup panjang. Hal ini bisa dilihat dari usaha-usaha berikut:

Pertama, Ki Hajar Dewantoro, selaku Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PPK) dalam kabinet pertama RI, mengusulkan agar pelajaran agama diberikan di sekolah-sekolah negeri. Kedua, berdasarkan keputusan BP-KNIP No. 15 Tahun 1945 tertanggal 22 Desember 1945, antara lain ditegaskan bahwa dalam rangka memajukan pendidikan dan pengajaran yang ada, maka pendidikan yang ada di langgar-langgar dan madrasah-madrasah hendaknya mendapat perhatian dan juga bantuan dari pemerintah. Ketiga, dalam rapatnya pada 27 Desemebr 1945, BP-KNIP mengusulkan kepada pemerintah, melalui Menteri PPK, tentang perlunya pembaruan dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Usulan tersebut antara lain meliputi dua hal berikut:

a. Pengajaran agama hendaklah mendapat tempat yang teratur, seksama, dan mendapat perhatian yang semestinya dengan tidak mengurangi kemerdekaan golongan-golongan yang berkehendak mengikuti kepercayaan yang dipeluknya. Tentang cara melakukan hal ini, Kementerian diminta mengadakan perundingan dengan Badan Pekerja.
b. Madrasah-madrasah dan pesantren-pesantren yang pada hakekatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam

masyarakat Indonesia pada umumnya,[19] hendaklah mendapat perhatian dan bantuan yang nyata, berupa tuntunan dan bantuan materiil dari Pemerintah."

Usulan-usulan BP-KNIP tersebut mendapat respon positif dari Menteri PPK. Berdasarkan SK Menteri PPK No. 104/Bhg.0 tanggal 1 Maret 1946, dibentuklah Panitia Penyelidik Pengajaran yang dipimpin Ki Hajar Dewantoro dan beranggotakan 51 orang. Panitia tersebut bertugas: merencanakan susunan baru tiap-tiap macam sekolah; menetapkan bahan-bahan pengajaran yang sifatnya praktis dan tidak terlalu berat; dan menyiapkan rencana pelajaran untuk tiap-tiap sekolah dan tiap-tiap kelas, termasuk fakultas.

Di antara yang dibahas Panitia tersebut adalah masalah pendidikan agama, budi pekerti, kewajiban belajar dan bahasa. Dalam bidang pelajaran agama, panitia tersebut melahirkan keputusan-keputusan sebagai berikut:

1. Hendaknya agama menjadi salah satu pelajaran yang diberikan di Sekolah Rakyat (SR).
2. Guru agama disediakan oleh pihak Kementrian dan dibayar oleh pemerintah.
3. Guru agama harus mempunyai pengetahuan umum dan untuk maksud itu harus didirikan sekolah Pendidikan Guru Agama (PGA).
4. Pesantren dan madrasah harus dipertinggi mutunya.

---

[19]Untuk informasi tentang madrasah dan pesantren baca antara lain Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen* (Jakarta: LP3ES, 1986); Kenneth Orr, M.M. Billah, dan Budi Lazarusli, "Education for this Life or for the Life to Come: Observations on the Javanese Village Madrasah," *Indonesia* 23 (1977), 129-56; Clifford Geertz, "The Javanese Kijaji: The Changing Role of a Cultural Broker," *Comparative Studies in Society and History* 2 (1959-1960), 228-49; Leonard Binder, "Islamic Tradition and Politics: The Kijaji and the Alim," *Comparative Studies in Society and History* 2 (1960), 250-6; Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren* (Jakarta: LP3ES, 1982); Slamet Effendy Yusuf, Mohammad Ichwan Syam, dan Masdar Farid Mas'udi, *Dinamika Kaum Santri* (Jakarta: Rajawali, 1983).

Berdasarkan hasil usaha Panitia tersebut, lahirlah peraturan bersama Menteri PPK dan Menteri Agama No. 1142/BHG A (Pengajaran) tanggal 2 Desember 1946 dan 1285/KJ9Agama tanggal 12 Desember 1946 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1947.[20]

Sebenarnya, upaya-upaya menjadikan agama sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah umum telah dilakukan sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Dalam sidang-sidang *Volksraad*, usulan tersebut selalu disampaikan, namun tidak pernah membuahkan hasil. Pada awal masa kemerdekaan, usulan tersebut diangkat lagi dan disetujui, khususnya pada saat Fathurrahman menjabat Menteri Agama. Seperti diketahui, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan kebijaksanaan tentang pelajaran agama seperti tertuang dalam Bab I pasal 179 (2) IS yang menyatakan: "Pengajaran umum (*openbaar onderwijs*) adalah netral, artinya bahwa pengajaran itu diberikan dengan menghormati keyakinan agama masing-masing. Pengajaran agama hanya boleh berlaku di luar jam sekolah."[21] Namun perlu dicatat, bahwa pelajaran agama telah berjalan dengan baik di sekolah-sekolah swasta, misalnya di sekolah-sekolah *HIS met de Quran, MULO met de Quran*, dan juga sekolah Kristen (*Bijzondere scholen*). Begitu pula, Staatsblad No. 68 Tahun 1924 menentukan: *het godsdient-onderwijs is niet verplicht voor de leerlingen wier ouders daarentegen gemoedsbezwaren hebben*, yakni tidak mewajibkan murid-murid untuk mengikuti pelajaran agama jika orang tuanya menyatakan keberatan.

Sejalan dengan upaya-upaya tersebut, berdasarkan keputusan BP-KNIP di atas, madrasah dan pondok pesantren dan juga lembaga-lembaga pendidikan lainnya yang sudah ada sejak masa kera-

---

[20]Khusus tentang sejarah pendidikan agama pada sekolah umum, lihat M. Atho Mudzhar, "Religious Education and Politics in Indonesia" (Tesis Master, University of Queensland, Australia, 1981).

[21]Kebijaksanaan pemerintah kolonial itu merupakan bukti jelas tentang pola pikir sekuler, yakni memisahkan agama dengan yang disebut non-agama. Hal ini merupakan kebijaksanaan yang didasarkan atas nasehat Snouck Hurgronje; baca Amry Vandenbosch, resensi terhadap *The Crescent and Rising Sun*, oleh Harry J. Benda, *Comparative Studies in Society and History* 2 (1960), 257; Ruth McVey, "Faith as the Outsider: Islam in Indonesian Politics," dalam *Islam in the Political Process*, ed. James P. Piscatori (Cambridge: Cambridge University Press, 1983), 200; M. Natsir, *Capita Selecta*, vol. 1 (Bandung: Penerbit W. Van Hoeve, 1954), 155.

jaan dan kesultanan (seperti surau, langgar, dan rangkang)[22] mulai mendapat perhatian secara baik. Misalnya, pemerintah memberikan bantuan uang sebesar Rp 1.50 perbulan untuk setiap murid. Kebijaksanaan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1946.

Keterangan di atas menggambarkan betapa usaha menjadikan pelajaran agama sebagai bagian dari kurikulum pendidikan umum telah melalui proses dan upaya yang cukup panjang. Saat ini, kedudukan pendidikan agama di sekolah adalah wajib terutama setelah dikeluarkannya TAP MPRS No. XXVII tahun 1966 dan TAP-TAP MPR sesudahnya, dan telah menjadi bagian penting dari GBHN. Jadi, kedudukan pendidikan agama di sekolah umum telah kuat. Namun harus diakui bahwa peranan pendidikan agama di sekolah umum hingga kini belum menunjukkan hasil yang maksimal, terutama dari segi pembentukan akhlak dan kepribadian anak.[23]

Selanjutnya, ada dua kebijakan lain yang diambil Menteri Fathurrahman. Pertama adalah menyangkut dihentikannya pelaksanaan haji untuk sementara. Hal ini dilakukan karena pada saat itu masih dalam keadaan perang, sehingga situasi keamanan tidak terjamin. Kebijakan ini berawal dari fatwa K.H. Hasyim Asy'ari, tokoh NU yang amat disegani, yang mengatakan bahwa pergi haji pada masa perang tidak wajib, apalagi mengingat situasi keamanan yang tidak menentu. Isi fatwa itu kemudian dituangkan dalam Maklumat Menteri Agama No. 4 Tahun 1947 yang menegaskan bahwa ibadah haji dihentikan selama keadaan masih dalam keadaan genting dan tidak menentu.

---

[22]Infromasi menarik tentang asal-usul surau bisa dibaca dalam R.A. Kern, "The Origins of the Malay Surau," *Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society* 29 (1956), 179-81.

[23]Ada sebagian kalangan yang secara ekstrim menilai pendidikan agama tersebut masih sebagai "anak tiri"; baca, misalnya, Muhammad Wajdi Rahman, "Pengembangan Studi Keislaman di PTU," *Republika* (26 September 1997), 6. Belakangan ini mulai dipertanyakan adanya pemisahan antara pelajaran agama dan pelajaran non-agama (umum) yang merupakan warisan penjajah yang menganut paham sekularisme. Paling tidak, keinginan mengubah IAIN menjadi universitas adalah contoh kongkrit akan fenomena perlunya menghilangkan dikotomi ilmu dengan agama dan perlunya mulai mengaitkan studi agama dengan Iptek dan sebaliknya.

Kebijakan kedua berkenaan dengan upaya mengatasi perselisihan intern umat Islam, khususnya yang berkaitan dengan masalah-masalah khilafiyah. Salah satu persoalan yang sangat menonjol ketika itu adalah masalah ru'yah dan hisab, yakni penentuan awal dan akhir bulan, khususnya awal dan akhir puasa Ramadhan. Untuk mengatasi masalah tersebut, dikeluarkanlah Maklumat Kementrian Agama No. 5 Tahun 1947. Sebenarnya, masalah ru'yah dan hisab ini hanyalah salah satu contoh perdebatan yang muncul di kalangan umat Islam saat itu. Seperti diketahui, tahun-tahun tersebut merupakan saat-saat menjamurnya gerakan "pembaruan." Gerakan ini telah melahirkan berbagai respon, baik positif maupun negatif, dari masyarakat ketika itu.[24] Tidak jarang masalah tersebut bahkan melahirkan benturan fisik antara mereka yang berselisih tentang hukum-hukum agama.

Fathurrahman menyadari masalah tersebut, dan sebagai Menteri ia berusaha menjaga kesatuan dan persatuan umat Islam dengan jalan mengeluarkan kebijaksanaan seperti tersebut di atas. Upaya penyelesaian itu belum tuntas, bahkan hingga kini ru'yah dan hisab ini masih menjadi masalah yang tidak berkesudahan dan menjadi agenda cukup penting bagi Departemen Agama setiap tahun khususnya menjelang awal atau akhir puasa Ramadan.

Catatan Akhir

Dari kajian tentang sosok Fathurrahman di atas ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Pertama, pola pendidikan yang dialami Fathurrahman cukup menarik untuk direnungkan dan diteladani generasi sesudahnya, terutama kegigihannya dalam mengenyam pendidikan dari manapun asalnya. Fathurrahman belajar di Barat dan di Timur, dan hal itu tidak menjadi persoalan baginya; yang penting adalah bagaimana dapat memanfaatkan sebaik-baiknya dan hasil yang diperoleh bisa berguna untuk kepentingan umat Islam bahkan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Kedua, kepribadian Fathurrahman yang luwes membuat dirinya diterima oleh umat Islam dan non-Muslim sekaligus. Ketiga,

---

[24]Untuk berbagai respon tersebut baca Akh. Minhaji. "Ahmad Hassan and Islamic Legal Reform in Indonesia" (Disertasi, McGill University, 1997), 292-326.

kebijakan yang ditempuh Fathurrahman merefleksikan kondisi dan situasi ketika itu, baik menyangkut politik, sosial, maupun keagamaan.

Keempat, melalui berbagai kebijakan strategis yang ditempuh, Fathurrahman telah ikut menyumbang bagi kemajuan bangsa Indonesia pada umumnya dan umat Islam khususnya. Meskipun hanya memangku jabatan Menteri Agama selama sepuluh bulan, ia telah berhasil meletakkan landasan-landasan penting untuk generasi Menteri Agama berikutnya.

K. H. Masjkur;

Kementerian Gerilya dan Waliyul Amri

Ahmad Syafi'i

"Kerjakan sesuatu sampai tuntas. Sekecil apapun pekerjaan itu, jika ditangani secara tuntas akan sangat berarti," kata K.H. Masjkur. Dan itulah prinsip yang dipegang teguh salah satu tokoh NU yang pernah menjabat Menteri Agama RI ini. Prinsip tersebut sangat mempengaruhi sikap hidup K.H. Masjkur sehingga secara konsisten terlihat dalam peranannya di bidang kemiliteran, politik dan pendidikan. Dengan memegang teguh prinsip tersebut K.H. Masjkur memulai pekerjaan dan karirnya dari bawah.

Perjalanan hidup K.H. Masjkur penuh dinamika dan nuansa. Kiyai yang berasal dari kota kecil Singosari ini memiliki kompetensi, kredibilitas, dan loyalitas dalam perjuangan menegakkan nilai-nilai Islam. Ia sering berbeda pandangan dengan tokoh-tokoh lainnya karena memegang teguh prinsip yang dianggapnya benar. Ini terlihat saat K.H. Masjkur mengikuti sidang-sidang BPUPKI, Konstituante, dan sidang DPR.

K.H. Masjkur memulai karirnya dari dunia pesantren. Ia menimba ilmu dari satu pesantren ke pesantren lainnya selama kurang lebih 15 tahun. Di pesantrenlah, K.H. Masjkur merasakan pahit-getirnya kehidupan; di pesantren pula ia menyadari eksistensi di-

rinya dan bangsanya. Ia bangkit untuk turut menegakkan kedaulatan dan kemerdekaan bangsanya dari cengkeraman bangsa asing.

Modal dasar yang kuat ini dimanfaatkan dan disumbangkan K.H. Masjkur kepada masyarakat dan bangsanya. Ia aktif dalam berbagai macam kegiatan, diawali dari pergerakan hingga puncak karirnya menjadi Menteri Agama. K.H. Masjkur adalah salah satu Menteri Agama yang memimpin Kementerian Agama beberapa kali. Dalam usianya yang panjang, kurang lebih 92 tahun, K.H. Masjkur berjuang dan mengabdikan dirinya bagi kepentingan bangsa dan negara hingga akhir hayatnya.

Masa Kecil

Masjkur lahir di Singosari, Malang, tahun 1899 M/1315 H.[1] Ia dilahirkan dari pasangan Maksum dengan Maemunah. Maksum adalah seorang perantau yang berasal dari sebuah dusun di kaki gunung Muria, Kudus, Jawa Tengah. Ia datang ke Singosari memenuhi perintah ibunya untuk mencari ayahnya yang pergi meninggalkan kampung halaman. Kemudian di Singosari, Maksum tinggal di pesantren yang dipimpin Kiyai Rohim. Berkat kerajinan, ketekunan, dan kejujurannya, akhirnya Maksum dijadikan menantu oleh Kiyai Rohim, dikawinkan dengan anak perempuannya, Maemunah. Pasangan Maksum dan Maemunah ini melahirkan enam saudara yaitu: Masjkur (tertua), Toyib, Hafsah, Barmawi, Toha, dan Hasan. Ketika berusia sembilan tahun, Masjkur menyertai kedua orang tuanya menunaikan ibadah haji.

Sepulang haji, Masjkur memulai proses pendidikannya di dunia pesantren. Ia belajar pada tidak kurang dari tujuh pesantren terkemuka di berbagai daerah dengan konsentrasi keilmuan yang berbeda-beda. Masjkur kecil diantarkan ayahnya ke Pesantren Bungkuk Singosari, di bawah pimpinan Kiyai Thohir. Selesai belajar di Pesantren Bungkuk, Masjkur pindah ke Pesantren Sono, yang terletak

---

[1]Tahun kelahiran Masjkur terdapat perbedaan pendapat, didalam buku *K.H. Masjkur Sebuah Biografi* karya Soebagijo disebutkan bahwa Masjkur lahir tahun 1900 M. Sedangkan di dalam *Ensiklopedi Islam* disebutkan bahwa Masjkur lahir pada 1902 M. Dalam hal ini penulis mengambil tahun kelahiran yang umumnya digunakan buku-buku referensi dari Departemen Agama RI.

di Bundaran Sidoarjo, untuk belajar ilmu sharaf dan nahwu. Empat tahun kemudian, ia pindah ke Pesantren Siwalan Panji, juga di Sidoarjo, untuk mendalami fikih. Selanjutnya, Masjkur pindah ke Pesantren Tebuireng Jombang, pimpinan K. H. Hasyim Asy'ari, untuk belajar ilmu hadits dan tafsir. Setelah menamatkan pelajaran di Tebuireng, Masjkur berangkat ke Bangkalan Madura untuk belajar qiraat al-Qur'an pada Kiyai Kholil. Setahun kemudian, Masjkur pergi ke Solo menuntut ilmu di Pesantren Jamsaren.

Pesantren Jamsaren memiliki makna tersendiri bagi Masjkur karena waktu itu ia sudah mulai menginjak masa dewasa. Di sini Masjkur bergaul dengan teman-temannya yang di kemudian hari menjadi ulama terkenal dan pemimpin masyarakat di daerah masing-masing, seperti Kiyai Musta'in (Tuban), Kiyai Arwani (Kudus), Kiyai Abdurrahim (adik Kiyai Abdul Wahab Chasbullah, Jombang). Di pesantren ini pula Masjkur mulai mengenal jati dirinya dan menyadari arti penting perjuangan. Hal ini muncul dalam diri Masjkur sebagai hasil pengamatannya terhadap kehidupan gurunya yang bersifat non-kooperatif terhadap Belanda dan kehidupannya di dunia pesantren.

Selain itu, di Pesantren Jamsaren ini perkembangan berpikir Masjkur mengalami kemajuan pesat. Ia mulai menyadari, bahwa kelemahan umat Islam selama ini antara lain karena mereka tidak bisa tulis-baca latin. Para santri umumnya, termasuk ia sendiri, hanya mengenal huruf Arab. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, ia mempunyai keinginan kuat untuk bisa baca-tulis latin. Keinginannya tersebut terpenuhi setelah ia belajar membaca dan menulis huruf latin kepada seorang janda tua keturunan Indo-Belanda. Padahal tidak lazim pada saat itu seorang santri laki-laki belajar kepada seorang wanita. Ini menunjukkan betapa besarnya motivasi Masjkur untuk menguasai ilmu yang bermanfaat, dari manapun dan dari siapapun ilmu itu.

Menapaki Aktivitas Baru

Masjkur yang telah memiliki bekal yang cukup memadai dalam bidang keislaman ingin mendirikan pesantren di kampung halamannya. Tetapi untuk lebih memperluas wawasannya tentang dunia pesantren, setelah dari Jamsaren, ia mengunjungi pesantren Kresek Penyosokan, Cibatu, Jawa Barat dan tinggal di sana selama satu tahun; baru kemudian Masjkur kembali ke kampung halaman-

nya, Singosari, Malang. Cita-citanya mendirikan pesantren terwujud pada 1923 dengan membuka pondok pesantren yang diberi nama Misbahul Wathan (Pelita Tanah Air) di Singosari, Malang.

Pada tahun yang sama Masjkur melangsungkan pernikahannya dengan cucu Kiyai Thahir, gurunya di Pesantren Bungkuk. Setelah 16 tahun hidup bersama, istrinya meninggal dunia tanpa memberinya seorang anak. Pada 1939, atas saran dari Kiyai Khalil dari Genteng, Masjkur menikahi adik almarhumah istrinya yang bernama Fatimah. Setahun kemudian, pada 1940, pasangan itu dikaruniai seorang putra yang diberi nama Syaiful Islam.

Ketika masih di Singosari, Masjkur sudah aktif di NU[2] sebagai Ketua Cabang Malang, yang kala itu merupakan cabang ke-6. Awal mula perkenalan Masjkur dengan NU terjadi ketika ia meminta nasehat Kiyai Wahab Chasbullah (Surabaya) tentang adanya gangguan-gangguan dari pemerintah setempat terhadap pesantren yang dipimpinnya. Kiyai Wahab menganjurkan agar Masjkur mengubah nama pesantrennya menjadi Pesantren Nahdatul Wathan yang merupakan cabang dari Nahdatul Wathan Surabaya. Sejak saat itu Masjkur sering datang ke Surabaya untuk mengadakan pertemuan dengan kelompok Taswirul Afkar yang membahas masalah agama, dakwah dan sosial.

Masjkur merasa memperoleh pengalaman baru dengan pertemuan tersebut. Ia berkenalan langsung dengan para pemimpin Taswirul Afkar, seperti Kiyai Mas Alwi, Kiyai Mas Mansur, dan Kiyai Ridwan. Kelompok inilah yang kemudian memprakarsai keikutsertaan beberapa ulama "tradisional" dalam kongres Islam se-du-

---

[2]Menurut K.H. Saifuddin Zuhri, berdirinya organisasi NU atas prakarsa Kiyai Wahab Chasbullah dan K.H. Hasyim Asy'ari yang mengadakan pertemuan antara para ulama di Jawa Timur dan Jawa Tengah pada tanggal 16 Rajab 1344 H / 31 Januari 1926. Ada dua hal penting yang diputuskan dalam pertemuan tersebut yaitu: Pertama, meresmikan berdirinya Komite Hijaz untuk mengirim delegasi untuk berjumpa muka dengan Raja Ibnu Saud di Mekkah dan mengikuti Kongres Islam se-dunia di Mekkah; kedua, membentuk suatu Jam'iyah untuk wadah persatuan para ulama di dalam tugas memimpin umat Islam menuju tercapainya cita-cita *'izzul islam wal muslimin* (kejayaan Islam). Lihat K.H. Saifudin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia* (Bandung: Al-Ma'arif), hal. 473.

nia di Hijaz dan membidani lahirnya NU. Karena Masjkur sering terlibat dalam kelompok tersebut, Masjkur pun ditunjuk menjadi ketua NU Cabang Malang. Aktivitas Masjkur di NU semakin hari semakin meningkat. Pada 1938 Masjkur diangkat sebagai salah seorang Pengurus Besar NU yang bermarkas di Surabaya. Sejak itu, Masjkur selama hampir 12 tahun sering pulang pergi dari Malang ke Surabaya.

Peran Perjuangan

Pada masa pendudukan Jepang, Masjkur terlibat dalam laskar Hizbullah. Ia mengikuti latihan kemiliteran yang diadakan di Cisarua Bogor pada akhir Februari 1945. Selain itu, Masjkur juga ikut latihan khusus bagi ulama yang diadakan Jepang pada Juli 1945. Masjkur saat itu menjadi utusan dari keresidenan Malang bersama dengan Haji Nuryasin dan H. M. Kholil. Selepas latihan, Masjkur diangkat menjadi anggota Syu Sangi-kai (semacam DPRD).

Menjelang kemerdekaan, Masjkur diangkat menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Bersama-sama Kahar Muzakkir, Agus Salim, dan Wahid Hasyim, ketika membahas rancangan Undang-undang Dasar, Masjkur termasuk anggota sidang yang mengusulkan agar Islam menjadi dasar negara yang akan dibangun.

Pada saat kemerdekaan diproklamasikan, Masjkur berada di Malang. Ia mendengar berita proklamasi dari rekan-rekannya yang datang ke rumahnya untuk memberitahukan perihal kemerdekaan itu. Mereka mendapatkan berita proklamasi dari siaran radio yang disebarluaskan Kantor Berita Domei di Pasar Baru Jakarta dan diterima kantor cabang di seluruh Jawa. Berita proklamasi ini pada awalnya hanya diterima sebagian kecil masyarakat. Pada saat itu masyarakat pun belum menyadari apa yang harus diperbuat setelah merdeka. Untuk menggalang dukungan kepada proklamasi, diadakan rapat raksasa di lapangan Ikada Jakarta pada 19 September 1945. Dari sinilah masyarakat mulai menyadari perlunya mempertahankan kemerdekaan dengan cara apapun.

Bertepatan dengan rapat raksasa di lapangan Ikada Jakarta, di Surabaya terjadi insiden bendera di Hotel Yamato. Seorang Belanda berusaha menaikkan bendera triwarna yaitu merah-putih-biru di atas tiang hotel tersebut. Peristiwa ini menimbulkan reaksi keras dari masyarakat Surabaya. Saat terjadi peristiwa tersebut, Masjkur

berada di Wonokromo. Sekembalinya dari Wonokromo, Masjkur tergugah hatinya untuk menggalang dan menggerakkan kembali pemuda-pemuda yang tergabung dalam Hizbullah. Kelompok paramiliter ini merupakan kelanjutan dari laskar Hizbullah yang sudah ada pada zaman Jepang dan pada hakikatnya belum pernah dibubarkan. Dengan penggalangan kembali dan konsolidasi, Hizbullah turut memainkan peranan penting dalam mempertahankan kemerdekaan RI.

Kelompok kelasykaran ini adalah salah satu bagian Masyumi—sebagai satu-satunya partai Islam yang ada saat itu. Partai ini menyadari pentingnya mempunyai barisan senjata.[3] Karena itu, Masyumi membentuk komandonya sendiri, yang disebut bagian pembelaan. Pimpinan bagian ini dipercayakan kepada Masjkur yang sudah punya pengalaman memimpin Hizbullah pada masa Jepang. Belakangan, Masjkur juga diangkat sebagai anggota Dewan Pertahanan Negara.

Selain melakukan perjuangan fisik, bangsa Indonesia pun melancarkan perjuangan diplomasi yang pada gilirannya menghasilkan beberapa perjanjian. Perjanjian pertama yang dilakukan antara Indonesia dan Belanda adalah Perjanjian Linggarjati yang sidangnya berlangsung pada 10-15 Nopember 1946. Delegasi Indonesia dipimpin Perdana Menteri Sutan Syahrir, sedangkan delegasi Belanda dipimpin Dr. H. J. Van Mook. Penengah dari pihak Inggris semula diwakili Lord Innverchapel, kemudian diganti Lord Killearn. Namun perjanjian tersebut malah menimbulkan perpecahan di kalangan tokoh politik Indonesia. Sebagian mendukung dan sebagian lain menolak. Perjanjian tersebut juga berdampak pada menurunnya reputasi kabinet Syahrir dan menyebabkan pecahnya Partai Sosialis yang dipimpinnya. Karena perpecahan itu sulit diatasi, pada Februari 1947 Syahrir menyerahkan mandatnya kepada Presiden yang kemudian

[3]Masyumi adalah kependekan dari Majlis Syura Muslimin Indonesia yang dibentuk pada tanggal 7 November 1945. Secara organisasi Masyumi merupakan sebuah badan federasi atau gabungan dari organisasi-organisasi Islam yang pada mulanya terdiri dari Muhammadiyah, NU, Perikatan Umat Islam dan Persatuan Umat Islam. Lihat *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1993) hal. 195.

menunjuk Mr. Amir Syarifuddin untuk membentuk kabinet baru.

Tantangan berat yang dihadapi kabinet Amir Syarifuddin adalah agresi Belanda Pertama pada 21 juli 1947. Belanda melanggar Perjanjian Linggarjati yang telah disepakati bersama; Belanda menduduki dan menyerang kota-kota di Indonesia. Aksi ini mendapatkan kecaman Inggris dan Amerika. Kedua negara tersebut mendesak Belanda untuk segera menghentikan agresinya terhadap Indonesia. India dan Australia juga melakukan hal serupa. Kedua negara terakhir ini mendesak Dewan Keamanan PBB agar membahas masalah Indonesia.

Atas usul Amerika Serikat, PBB membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) untuk membantu menyelesaikan persoalan Indonesia-Belanda. Pada 29 oktober 1947 KTN yang baru dibentuk datang ke Yogyakarta. Komisi yang datang terdiri dari: Australia diwakili Richard C. Kirby, Belgia diwakili Paul Van Zeeland, dan Amerika Serikat diwakili Prof. Dr. Frank Graham.

Sementara itu di dalam negeri, pergolakan antarpartai terus berlangsung. Selaku Perdana Menteri, Mr. Amir Syarifuddin dituntut mampu menyelesaikan berbagai persoalan, baik yang menyangkut pertentangan antarpartai maupun tuntutan resolusi Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan perundingan dengan Belanda. Menghadapi situsasi seperti itu, Mr. Amir Syarifudin berinisiatif mengadakan *reshuffle* dalam kabinetnya. Ia ingin memasukkan Masyumi dalam kabinetnya karena Masyumi adalah partai besar dan satu-satunya partai Islam.

Pada saat itu, Masjkur sedang berada di markas besarnya di Kediri sebagai anggota Dewan Pertahanan Negara. Dewan ini dibentuk Presiden karena negara dinyatakan dalam keadaan bahaya. Dewan Pertahanan Negara terdiri dari Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Panglima Besar dan tiga orang wakil organisasi rakyat. Masjkur dalam Dewan tersebut adalah utusan Masyumi.

Peran dalam Kabinet

Saat menjadi anggota Dewan Pertahanan Negara, tepatnya pada November 1947 Masjkur dipanggil Bung Karno untuk segera datang ke Yogyakarta. Karena tanpa diberitahu untuk keperluan apa, hati Masjkur bertanya-tanya apakah maksud panggilan Presiden

itu. Setibanya di Yogyakarta Masjkur tidak langsung menuju ke Gedung Agung, tetapi terlebih dahulu datang ke kantor pusat Masyumi untuk melapor sekaligus mencari informasi tentang panggilan tersebut. Dari situ, ia mendapatkan informasi bahwa sebentar lagi kabinet Amir Syarifuddin akan mengadakan reshuffle dan Masyumi yang semula ditinggalkan akan diikutsertakan dalam kabinet.

Mendengar informasi tersebut, Masjkur langsung menemui Bung Karno. Saat itulah Masjkur diminta untuk menjadi Menteri Agama oleh Bung Karno dalam kabinet Amir Syarifuddin ke-2 yang mulai bertugas sejak 11 November 1947. Dalam kondisi politik yang belum stabil dan perekonomian yang masih terpuruk, sebagai Menteri Agama, K.H. Masjkur hanya mendapat gaji Rp 300,- Oeang Republik Indonesia (ORI) sebulan—gaji yang hanya cukup dimakan sekeluarga antara lima sampai enam hari. Tiap kali rapat kabinet, jamuannya pun hanya teh belaka. Kadang-kadang saja, ketika harus bersidang lama, para menteri disediakan makan siang atau makan malam. Namun hal itu tidak mengurangi semangat anggota kabinet untuk terus memikirkan strategi perjuangan melawan Belanda dan mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih.[4]

Dengan kondisi seperti itu, dapat dimaklumi jika pada masa kabinet Amir Syarifudin kedua, K.H. Masjkur belum dapat melakukan pembenahan terhadap tugas dan fungsi Kementerian Agama seperti yang telah diamanatkan dalam Konperensi I (Rapat Kerja) Jawatan Agama seluruh Jawa dan Madura di Surakarta pada 17-18 Maret 1946. Perhatian kabinet tercurah untuk menyiapkan perundingan dengan Belanda yang dilaksanakan di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat, yang kemudian menghasilkan Perjanjian Renville.

Ironisnya, isi perjanjian Renville justru memperlemah posisi Republik Indonesia. Dalam perjanjian tersebut diputuskan bahwa kedaulatan atas Hindia Belanda akan tetap di tangan kerajaan Belanda sampai pada saat nanti diserahkan ke Republik Indonesia Serikat. Selain itu, dalam perjanjian tersebut diakui pula adanya garis

---

[4]Lihat Soebagijo, *K.H. Masjkur Sebuah Biografi* (Jakarta: GunungAgung, 1982), hal. 71.

Van Mook yakni garis yang menghubungkan dua daerah terdepan yang diduduki Belanda. Dan yang lebih tragis lagi, pasukan dan laskar Republik Indonesia yang masih beroperasi di daerah-daerah haruslah hijrah ke daerah Republik Indonesia. Bila hal itu sudah terlaksana barulah diadakan dasar-dasar baru untuk meneruskan perundingan.

Perjanjian yang ditandatangani pada 17 Pebruari 1948 tersebut mendapatkan reaksi keras dari berbagai golongan. Bahkan, anggota-anggota Masyumi dan PNI yang duduk di kabinet meletakkan jabatannya, sambil mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tidak ikut bertanggungjawab atas hasil perundingan Renville dan menuntut pergantian kabinet.[5] Karena kabinet Amir Syarifuddin tidak mendapat dukungan dari Masyumi dan PNI, ia akhirnya meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri pada 23 Januari 1948. Dengan demikian Kabinet Amir Syarifuddin kedua hanya berjalan dua setengah bulan.

Dalam waktu yang relatif singkat tersebut, Masjkur selaku Menteri Agama menghasilkan Peraturan Menteri Agama No. 5/1947 tentang biaya perkara Pengadilan Agama yang harus disetor ke kas negara. Dalam masa itu pula berlangsung Konperensi Agama dengan Jawatan-Jawatan Agama seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta pada 13 s/d 16 Nopember 1947. Salah satu keputusan penting dalam konperensi tersebut adalah ditambahkannya bagian Penyiaran dan Penerangan Agama di setiap Jawatan Agama.[6]

Dengan mundurnya Amir Syarifuddin, Presiden Soekarno menunjuk Hatta untuk memimpin kabinet presidensial darurat yang bukan bertanggungjawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) melainkan kepada Soekarno sebagai Presiden. Para anggota kabinet berasal dari golongan tengah, terutama terdiri dari PNI, Masyumi dan tokoh-tokoh yang tidak berpartai.

Pada awalnya orang-orang Masyumi ragu untuk duduk di Kabinet Hatta ini karena trauma dengan perjanjian Renville. Di tubuh Masyumi sendiri terjadi pertentangan antara yang pro dan kontra untuk duduk di kabinet. Namun hal ini dapat diselesaikan berkat

---

[5]Soebagijo, *K.H. Masjkur*, hal. 76.

[6]Departemen Agama RI, *Sejarah Departemen Agama RI*, hal. 34.

usaha yang dilakukan K.H. Wahab Chasbullah, sehingga akhirnya Masyumi mendukung sepenuhnya Kabinet Hatta. Pada kabinet baru ini, K.H. Masjkur kembali ditunjuk sebagai Menteri Agama.[7]

Dalam kabinet yang dikenal dengan Kabinet Hatta I ini K.H. Masjkur memberlakukan UU No. 19/1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan yang salah satu pasalnya, 35 (2), menyatakan bahwa perkara-perkara perdata antar-umat Islam diperiksa dan diputuskan menurut hukum Islam oleh pengadilan dengan formasi satu orang ketua hakim beragama Islam, dan 2 orang anggota hakim yang ahli agama Islam. Demikian pula halnya dengan peradilan tingkat kasasi, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 53. Semua hakim yang dimaksudkan itu diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Agama dengan persetujuan Menteri Kehakiman.[8]

Dalam menjalankan programnya, Kabinet Hatta I mendapatkan tantangan cukup berat dari Front Demokrasi Rakyat (FDR)—yang menjadi oposisi dan beraliran komunis. Kelompok FDR ini mendapat dukungan Muso, seorang komunis berasal dari Rusia. Kelompok ini berusaha keras untuk dapat kembali memegang kemudi pemerintahan dengan berbagai cara. Di mana-mana mereka mengadakan rapat raksasa dan demonstrasi, meneriakkan tuntutan agar Amir Syarifuddin diangkat kembali menjadi Perdana Menteri. Puncak aksi mereka adalah terjadinya perebutan kekuasaan di Madiun pada 19 September 1948. Pemberontakan ini telah merusak dan membakar tempat-tempat ibadah dan pesantren-pesantren, terutama di daerah Madiun, Magetan, dan Ponorogo.

Menteri Agama, K.H. Masjkur, setelah pemberontakan berhasil dipadamkan, lalu memerintahkan stafnya untuk membentuk sebuah tim untuk mengadakan penyelidikan serta pencatatan jumlah penghulu, naib, alim ulama dan pesantren yang menjadi korban keganasan kaum komunis. Kecuali itu, Kementerian Agama juga membentuk sebuah tim yang bersama-sama kementerian lainnya mengadakan perjalanan keliling ke berbagai daerah yang terkena dampak pemberontakan kaum komunis, khususnya Madiun dan

---

[7]Deliar Noer, *Mohammad Hatta: Biografi Politik* (Jakarta: LP3ES, 1990) hal. 311.

[8]Lihat *Sejarah Departemen Agama*, hal. 35 dan *50 Tahun Departemen Agama*, hal. 24-25.

Kediri. Tim ini juga memberi penjelasan dan penerangan kepada berbagai organisasi kemasyarakatan mengenai peristiwa yang baru terjadi, sekaligus menganjurkan ketahanan mental menghadapi kasus tersebut.[9]

Di Kediri, K.H. Masjkur menemui Kiyai Abdul Kholik dan menginstruksikan kepadanya agar membentuk Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat Kabupaten. Dalam sejarah Kementerian Agama, KUA Kabupaten Kediri merupakan kantor pertama yang ada di Indonesia. Sebagai kepala KUA Kabupaten Kediri ditetapkan Kiyai Mohammad Makhin, yang waktu itu penghulu kabupaten, dan dibantu beberapa tenaga muda.[10]

Di samping itu, K.H. Masjkur ditugaskan kabinet pergi ke Jawa Barat untuk menemui Kartosuwiryo, yang telah melepaskan diri dari Masyumi dan mendirikan Negara Islam Indonesia. Usaha K.H. Masjkur menemui Kartosuwiryo gagal, karena Kartosuwiryo tidak ada di tempat dan sengaja menghindari pertemuan dengan Menteri Agama.[11]

Tugas lain yang dijalankan K.H. Masjkur selaku Menteri Agama adalah berkunjung ke Jakarta untuk mengadakan pertemuan rahasia dengan orang-orang kepercayaannya di Jalan Cemara, Menteng. Pertemuan itu membahas cara-cara mendapatkan senjata, membelinya, dan mengangkutnya ke daerah pedalaman. Kunjungannya ke Jakarta ini juga dimanfaatkan K.H. Masjkur untuk melawat ke wilayah Serang dan Banten. Di daerah tersebut K.H. Masjkur memberikan penjelasan perihal situasi saat itu, baik yang berkaitan dengan jalannya perundingan maupun mengenai tugas dan kewajiban rakyat untuk menjaga dan memperkokoh persatuan.[12]

Keberhasilan Republik Indonesia menumpas pemberontakan kaum komunis mengubah simpati Amerika yang semula samar-samar, yang didasarkan atas sentimen anti penjajahan, menjadi dukungan diplomatik yang di dasarkan pada strategi global. Hal ini dapat dimaklumi karena pada saat itu mulai terjadi perang dingin

---

[9]Saifullah Ma'shum (ed.), *Menapak Jejak , Mengenal Watak: Sekilas Biografi 26 Tokoh NU*, (Jakarta: Yayasan Saifudin Zuhri, 1994) hal. 184.

[10]Saifullah Ma'shum (ed.), *Menapak Jejak*, hal 185.

[11]Soebagijo, *K.H. Masjkur*, hal. 83

[12]Soebagijo, *K.H. Masjkur*, hal. 84-85.

antara Amerika dengan Uni Sovyet yang beraliran komunis. Keberhasilan Republik Indonesia menumpas pemberontakan PKI menunjukkan dirinya anti komunis dan karenanya patut mendapat dukungan Amerika.

Dukungan Amerika semakin terlihat nyata setelah Belanda melakukan agresi militer kedua pada 18 Desember 1948. Amerika menghentikan bantuan kepada Belanda yang dialokasikan untuk keperluan di Indonesia. Selain itu, Kongres Amerika juga semakin menekan agar semua bantuan ekonomi kepada Belanda dihentikan.

Aksi militer kedua sebetulnya merupakan bencana militer dan politik bagi Belanda, meski tampaknya mereka memperoleh kemenangan.[13] Pada 19 Desember 1948 Yogyakarta berhasil diduduki Belanda dan para pemimpin Republik Indonesia sengaja membiarkan dirinya ditangkap dengan harapan bahwa opini dunia akan begitu tersinggung sehingga kemenangan militer Belanda akan berbalik menjadi kekalahan diplomatik. Soekarno, Hatta, Agus Salim, dan seluruh anggota Kabinet ditangkap Belanda, kecuali beberapa orang yang tidak ada di tempat.

K.H. Masjkur adalah salah seorang menteri yang lolos dari penyergapan Belanda. Ia meloloskan diri dari belakang rumahnya dengan membawa putra tunggalnya, Syaiful, yang masih kecil. Sejak saat itu, K.H. Masjkur mulai bergerilya. Mula-mula ia pergi ke wilayah Kauman. Di sana ia menemui seorang pegawai Kementerian Agama yang ditugaskan memberitahu orang di rumah bahwa K.H. Masjkur dan Syaiful selamat dan hendak pergi ke luar kota untuk bergerilya. Perjalanan dilanjutkan ke arah Solo, kemudian ke Ponorogo. Setibanya di Ponorogo K.H. Masjkur diikuti oleh 12 anggota tentara pelajar. Bersama dengan pasukannya K.H. Masjkur singgah di Pondok Gontor selama beberapa hari untuk mencari informasi mengenai tokoh-tokoh pemerintahan yang juga bergerilya. Di Gontor, Masjkur bertemu dengan Menteri Susanto. Rencananya mereka ingin bergabung untuk bergerilya, tetapi Masjkur agak keberatan. Atas pertimbangan strategis, bergerilya dengan rombongan kecil akan lebih baik ketimbang rombongan besar.

---

[13]Soebagijo, *K.H. Masjkur*, hal. 347.

Setelah beristirahat di Gontor, K.H. Masjkur dan pasukannya meneruskan perjalanan ke daerah Trenggalek. Di daerah ini ia bertemu dengan Harsono Cokroaminoto, penasehat Panglima Besar Sudirman waktu itu, yang akhirnya mempertemukan K.H. Masjkur dengan Jenderal Sudirman. Sejak itu pasukan Masjkur bergabung dengan pasukan Panglima Sudirman. Tiga hari setelah mengikuti perjalanan Jendral Sudirman, di daerah Pacitan Menteri Agama beserta pasukannya memisahkan diri. Kemudian, K.H. Masjkur pergi ke arah Barat menuju kota Yogyakarta.[14]

Selama menjadi Menteri Agama sampai masa gerilya tersebut, ada beberapa kebijakan penting yang diambil K.H. Masjkur.[15]

1. *Bidang Pendidikan*

   Dalam bidang ini K.H. Masjkur mengeluarkan Peraturan Menteri Agama No. 2/1948 tentang bantuan kepada perguruan agama.

2. *Bidang Haji*

   K.H. Masjkur mengirimkan misi haji ke tanah suci Makkah di bawah pimpinan K.H. Adnan. Misi ini adalah misi haji pertama setelah perang dunia kedua. Sebelumnya misi haji Indonesia dihentikan pemerintah dengan keluarnya Maklumat Kementerian Agama No. 4/1947 tentang penghentian ibadah haji di masa perang.

3. *Bidang Perkawinan.*

   Dalam bidang perkawinan ada dua kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama K.H. Masjkur yaitu:

   a. Penetapan Menteri Agama No. 1/1948 yang mencabut Penetapan Menteri Agama No. 7/1947, tentang penambahan biaya NTR Rp. 10,- untuk kas masjid (75%) dan kaum (25%).
   b. Peraturan Menteri Agama No. 3/1948 tentang penyetoran

---

[14]Lebih jauh tentang rute gerilya K.H. Masykur, lihat Drs. H. Nur Sjamsju, *Sejarah Gerilya Menteri Agama RI: K.H.M. Masykur di Kabupatern Trenggalek Tahun 1949.* Laporan tidak diterbitkan.

[15]Lihat *Sejarah Departemen Agama*, hal. 35-37

biaya pencatatan NTR oleh naib kepada penghulu kabupaten. Peraturan ini mengganti Peraturan Menteri Agama No. 2/1947 pasal 2 (1).

Ketika Belanda melakukan agresi ke Yogyakarta pada 19 Desember 1948, Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Hatta mengirim kawat ke Sumatera yang berisi pelimpahan kekuasaan, apabila pemimpin-pemimpin Republik di Yogyakarta ditangkap Belanda dan tidak dapat menjalankan tugasnya. Kawat itu diterima Mr. Syafrudin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran, yang sedang mengadakan kunjungan ke Sumatera. Syafruddin segera mengambil alih kekuasaan dan membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera.

Menteri Agama dalam kabinet PDRI di Sumatera ini adalah Mr. Teuku Muhammad Hasan. Waktu itu ia merangkap tiga kementerian sekaligus, yakni Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan; Urusan Dalam Negeri; dan Agama. Perangkapan jabatan ini juga dilakukan menteri-menteri lain, karena situasi yang serba darurat.

Mr. Teuku Muhammad Hasan yang lahir di Sigli, 4 April 1906, sebelumnya menjabat Komisariat Pemerintah Pusat yang ada di Sumatera. Tugas Komisariat ini adalah mengumpulkan bahan-bahan untuk pembentukan daerah otonom propinsi, meninjau semua program yang dulu dijalankan Gubernur Sumatera, dan mengajukan usul kepada Pemerintah Pusat.[16] Ia juga aktif di Muhammadiyah sebagai konsul daerah Clumpang Payong. Waktu itu di Aceh tidak ada organisasi politik yang aktif, maka Muhammadiyah di bawah pimpinan Mr. Teuku Muhammad Hassan menjadi organisasi yang bergerak di bidang politik, sehingga pemerintahan Belanda melarangnya. Selain itu ia pun berjasa membawa informasi tentang kemerdekaan dari Jakarta ke Sumatera, sehingga daerah-daerah Sumatera mendengar proklamasi pada tanggal 27 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan, tepatnya pada 2 September 1945, Mr. Teuku Muhammad Hassan diangkat sebagai Gubernur Sumatera.[17]

---

[16]A.H. Nasution, *Sekitar Kemerdekaan RI* (Bandung: Angkasa), Hal. 561.

[17]*Tiga Puluh Tahun Indonesia Merdeka* Jakarta: PT Citra Lamtorogung Persada, 1985), hal. 70.

Kebijakan yang diambil Menteri Agama PDRI di Sumatera antara lain adalah mengeluarkan Penetapan Pemerintah No. 1/PDRI/K.A tanggal 14 Juni 1949 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan untuk seluruh Sumatera. Penetapan ini berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang telah disetujui oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) selaku lembaga legislatif.[18]

Sementara itu, di Jawa, para menteri yang lolos dari penangkapan Belanda kemudian membentuk komisariat PDRI di Jawa setelah mengetahui bahwa Syafrudin Prawiranegara telah membentuk Pemerintahan Darurat di Sumatera. Komisariat yang berkedudukan di Tawangmangu ini dikepalai Sukiman dan dilanjutkan Kasimo setelah Sukiman ditangkap Belanda ketika ia kembali ke Yogyakarta. Dalam masa PDRI inilah kemudian disepakati perjanjian Roem-Royen pada 7 Mei 1949. Meski hasil perjanjian ini tidak memuaskan banyak pihak, tapi prinsipnya ia telah mengembalikan pemerintah RI di Yogyakarta, sekaligus berarti membebaskan Soekarno dan Hatta dari tahanan. Segera setelah Soekarno Hatta kembali ke Yogyakarta, Sjafruddin Prawiranegara menyerahkan mandatnya kepada Kepala Negara.

Dengan Penetapan Presiden No. 6/1949, tertanggal 4 Agustus 1949, PDRI berarti bubar dan pemerintahan berada di tangan Kabinet Hatta, yang kemudian dikenal dengan Kabinet Hatta II. Dengan Penetapan Presiden tersebut, Kabinet Hatta mengalami berbagai perubahan karena ada menteri yang direshuffle, mengundurkan diri, dan berpindah jabatan. Natsir adalah salah seorang menteri yang mengundurkan diri karena tidak setuju dengan hasil perjanjian Roem-Royen. Sementara Syafrudin Prawiranegara yang dalam Kabinet Hatta I menjadi Menteri Kemakmuran, dalam Kabinet Hatta II menjadi Wakil Perdana Menteri. Dalam Kabinet Hatta II ini, K.H. Masjkur tetap dipercaya menjadi Menteri Agama.[19]

Kabinet Hatta II tidak menyusun program khusus. Tampaknya perhatian dan kegiatan dicurahkan untuk menggalang persatuan

---

[18]*50 Tahun Departemen Agama*, hal. 76.
[19]Deliar Noer, *Muhammad Hatta*, hal. 352.

Indonesia kembali dalam menyongsong pelaksanaan penyerahan kedaulatan dari Belanda.[20] Dalam melaksanakan pemerintahannya, Kabinet Hatta II belum sepenuhnya efektif karena masih mendapatkan tekanan militer dari Belanda. Meskipun demikian, pembentukan kabinet ini memiliki makna politis penting yakni untuk membuktikan kehadiran pemerintah Republik Indonesia ke dunia luar dan guna melakukan persiapan mengikuti Konperensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag pada 23 Agustus 1949 yang menghasilkan pengembalian kedaulatan RI dan pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada 16 Desember 1949, para wakil negara-negara bagian sepakat menunjuk Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat.

Sejak Kabinet Hatta II ini, Kementerian Agama memasuki awal periode restaurasi yaitu periode penyusunan kembali organisasi, baik di pusat maupun di daerah, setelah mengalami kerusakan dan pemusnahan.[21]

Kabinet Hatta II ini kemudian diganti dengan kabinet Peralihan pimpinan Perdana Menteri Mr. Susanto Tirtoprodjo berdasarkan Keppres-RIS No. 2 tahun 1949 yang berlaku efektif mulai 20 Desember 1949 sampai 24 Januari 1950. Sekali lagi, dalam kabinet yang hanya berusia sekitar satu bulan ini, K.H. Masjkur ditunjuk sebagai Menteri Agama. Dalam periode yang singkat ini dikeluarkan peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1949 tentang lapangan pekerjaan (tugas-tugas) Kementerian Agama.[22] Berdasarkan peraturan pada 24 Desember 1949 itu, Kementerian Agama mempunyai program kerja yaitu :

a. Melaksanakan asas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan sebaik-baiknya.
b. Menjaga bahwa tiap-tiap penduduk mempunyai kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.
c. Membimbing, menyokong, memelihara dan mengembangkan aliran-aliran agama yang sehat.

---

[20]Deliar Noer, *Muhammad Hatta*, hal. 353
[21]*Sejarah Departemen Agama RI*, hal 38.
[22]*Sejarah Departemen Agama RI*, hal. 39-41

d. Menyelenggarakan, memimpin dan mengawasi pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri.
e. Menjalankan, memimpin, menyokong serta mengamat-amati pendidikan dan pengajaran di madrasah-madrasah dan perguruan-perguruan agama lain.
f. Menyelenggarakan segala sesuatu yang bersangkut paut dengan pelajaran rohani kepada anggota-anggota tentara, asrama-asrama, rumah-rumah penjara dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu.
g. Mengatur, mengerjakan dan mengamat-amati segala hal yang bersangkutan dengan pencatatan pernikahan, rujuk dan talak orang Islam.
h. Memberikan bantuan material untuk perbaikan dan pemeliharaan tempat-tempat untuk beribadat (mesjid-mesjid, gereja-gereja dan lain-lain).
i. Mengerjakan, mengurus dan mengawasi segala sesuatu yang bersangkut paut dengan Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi.
j. Menyelidiki, menentukan, mendaftar dan mengawasi pemeliharaan wakaf-wakaf.
k. Mempertinggi kecerdasan umum dalam hidup bermasyarakat dan hidup beragama.

Guna mengantisipasi masalah kepegawaian yang mungkin timbul sebagai akibat pendudukan wilayah RI oleh Belanda, Menteri Agama mengeluarkan Instruksi No. 1/1950, tertanggal 13 Januari 1950, yang berkenaan dengan masalah kepegawaian. Dalam instruksi tersebut dinyatakan bahwa kedudukan pegawai berdasarkan Maklumat Menteri Negara RI No. S/2 tahun 1949, yang bekerja dan menerima sokongan dari pemerintah pendudukan dianggap bukan pegawai lagi. Namun mereka masih dapat diterima kembali sebagai pegawai RI jika berada di tempat, dengan jalan mengajukan permohonan kepada Kementerian Agama di atas kertas bermaterai Rp. 75,- dengan ketentuan tidak diberi kedudukan dan gaji lebih tinggi dari kedudukan dan gaji sebelum tanggal 19 Desember 1949.

Sesudah kabinet peralihan itu, pemerintah RI, sebagai salah satu negara bagian Republik Indonesia Serikat, berada di tangan kabinet baru yang dipimpin Perdana Menteri A. Halim. Dalam kabinet ini,

Menteri Agama dijabat K.H. Fakih Usman, menggantikan posisi K.H. Masjkur yang telah sakit-sakitan akibat bergerilya. Pada saat yang sama terbentuk pula pemerintahan Republik Indonesia Serikat yang kabinetnya dipimpin Muhammad Hatta dengan Menteri Agama K.H. Wahid Hasyim.

K.H. Masjkur yang pada saat itu telah sakit-sakitan beristirahat di kampung halamannya hingga datang surat panggilan dari K.H. Wahid Hasyim, selaku Menteri Agama dalam Kabinet Natsir. Surat panggilan itu berisi perintah agar K.H. Masjkur datang ke Jakarta karena ada pembicaraan mengenai tugas yang sangat penting.

Setelah bertemu Menteri Agama, Wahid Hasyim, di Jakarta, K.H. Masjkur ditugaskan untuk mengadakan kunjungan kerja ke seluruh Indonesia. Tujuannya adalah membuka kantor-kantor agama di seluruh penjuru tanah air. Dalam menjalankan tugas ini K.H. Masjkur ditemani K.H. Fakih Usman. Tugas K.H. Masjkur dalam hal ini bukan hanya mendirikan kantor-kantor agama, tetapi juga mengangkat pegawai dan memberi petunjuk apa dan bagaimana mengelola kantor agama.[23]

Selesai menunaikan tugasnya, K.H. Masjkur tidak kembali ke Singosari, Malang, tetapi pindah ke Jakarta. Ini semata-mata karena desakan K.H. Wahid Hasyim supaya ia dapat membantu tugas-tugasnya.

Pada saat itu situasi politik dalam negeri diwarnai berbagai perkembangan penting. Pertentangan antarpartai dan golongan mulai bangkit kembali. Masyumi sebagai organisasi Islam terbesar pada saat itu berselisih dengan NU. Pada awalnya NU keberatan dengan komposisi Pengurus Besar Masyumi karena wakil NU hanya sedikit, padahal NU memiliki anggota paling besar. Kemudian NU mengusulkan agar Masyumi dijadikan partai/badan federasi semua partai Islam. Usul ini oleh Pengurus Masyumi tidak diterima. Puncak kekecewaan NU atas Masyumi adalah ketika K.H. Fakih Usman yang *nota bene* dari Muhammadiyah diangkat sebagai Menteri Agama atas nama Masyumi dan menggantikan posisi K.H. Wahid Hasyim. Akibat kekecewaan ini NU menyatakan keluar dari Masyumi dan dalam Muktamar NU di Palembang, 1 Mei 1952, NU

[23]Saifullah Ma'shum (ed), *Menapak Jejak*, hal. 186

secara resmi menjadi partai politik tersendiri.[24] Dalam Muktamar tersebut, ditetapkan pula komposisi kepengurusan PB NU di mana K.H. Wahid Hasyim menjadi Ketua Umum dan K.H. Masjkur sebagai Ketua I.

Di tengah perjalanan, komposisi kepengurusan PB NU mengalami perubahan karena pada 19 April 1953 K.H. Wahid Hasyim meninggal dunia akibat kecelakaan mobil dalam perjalanan antara Jakarta dan Bandung. Posisi Ketua Umum PB NU kemudian digantikan K.H. Masjkur hingga berakhir masa jabatannya.

Pada saat K.H. Masjkur menduduki posisi Ketua Umum PB NU, ia ditunjuk Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo menjadi Menteri Agama yang mewakili NU. K.H. Masjkur menjabat Menteri Agama menggantikan K.H. Fakih Usman berdasarkan Keppres No. 123/1953, terhitung sejak 30 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955.

Usaha-usaha perbaikan dalam tubuh Kementerian Agama di bawah pimpinan K.H. Masjkur terus dilanjutkan. Rencana-rencana ke arah itu dituangkan dalam Konperensi Dinas Kementerian III di Tretes Jawa Timur, pada 25-30 Juni 1955. Namun, tak lama kemudian mengalami penggantian pimpinan, sehingga rencana-rencana tersebut tidak dapat dijalankan.

Struktur organisasi Kementerian Agama tidak mengalami perubahan. Struktur organisasi dan lapangan pekerjaan Kementerian Agama masih sama dengan masa K.H. Fakih Usman, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1952 jo Peraturan Menteri Agama No. 9, 10, 31, dan 39 tahun 1952.

Adapun beberapa kebijakan K.H. Masjkur sewaktu memimpin Kementerian Agama dalam periode ini adalah sebagai berikut :

A. Bidang Pendidikan.

Kebijakan Menteri Agama K.H. Masjkur mengenai pendidikan di antaranya berupa :

1. Perubahan masa belajar PGA menjadi 6 tahun yang dibagi dua :
   a. Bagian pertama, dari kelas I s/d IV : 4 tahun.
   b. Bagian atas, dari kelas V s/d VI : 2 tahun.

---

[24]*Sejarah Departemen Agama*, hal. 62 dan Soebagijo, *K.H. Masjkur*, hal. 155-156.

2. Dengan penetapan Menteri Agama Np. 109 tanggal 19 Mei 1954, terhitung mulai 1 Juni 1954, SGHA (Sekolah Guru dan Hakim Agama) bagian A (bahasa), bagian B (ilmu pasti) dan bagian C (agama) berangsur-angsur dihapus. Sedang bagian D (Hukum Agama) dijadikan PHIN (Pendidikan Hakim Islam Negeri) di Yogyakarta. Perubahan terakhir ini dilakukan atas dasar penetapan Menteri Agama No. 14/1954.
3. Berkenaan dengan berlakunya Undang-Undang No. 12 tahun 1954 tentang pendidikan maka dilakukan:
   a. Usaha persiapan pelaksanaan wajib belajar di lingkungan Kementerian Agama.
   b. Pelaksanaan pengajaran Agama pada sekolah-sekolah umum berdasarkan keputusan bersama Menteri PPK dan Menteri Agama.
   c. Menjadikan pondok pesantren sebagai sasaran pendidikan yang perlu dipertahankan.

B. Bidang Perkawinan

1. Mengadakan P3NTR di desa-desa seluruh daerah luar Jawa dan Madura, dengan Penetapan Menteri Agama No. 14/1955.
2. Semua petugas P3NTR diwajibkan untuk melaksanakan UU No. 22/1946 jo UU No. 32/1954, yang diatur dengan Peraturan Menteri Agama No. 1/1955.

C. Bidang Haji.

Mengenai bentuk paspor haji, diatur dengan penetapan Menteri Agama No. 3/1955 dan mengenai cara-cara penyetoran ongkos haji serta perubahan-perubahan akomodasi penumpang kapal dengan Penetapan Menteri Agama No. 4/1955 dan No. 5/1955.

Mengenai tugas dan kewajiban MPH dan kedudukan penasehat MPH diatur dengan Penetapan Menteri Agama No. 8/1955. Sedangkan mengenai susunan rombongan haji diatur dengan penetapan Menteri Agama No. 13/1955.

D. Kerjasama dengan Departemen Dalam Negeri.

Bersama dengan Departemen Dalam Negeri K.H. Masjkur mengeluarkan pernyataan tentang berlakunya maklumat bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama. Mak-

lumat bersama tersebut berisi tentang Peraturan Kaum dan Rois (PKR) di luar Jawa.[25]

Di samping mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang penting, K.H. Masjkur juga memprakarsai Konperensi Ulama di Cipanas, Jawa Barat. Dalam konperensi tersebut, para ulama, umumnya NU, menetapkan "gelar" Presiden Republik Indonesia selaku *Waliyul Amri Dharuri bis Syaukah* (pemegang pemerintahan dalam keadaan darurat dengan kekuasaan penuh). Penetapan tersebut sering dipandang sebagian penentang NU sebagai sikap politik NU yang oportunistis agar bisa berlindung secara aman di bawah Presiden Soekarno.[26] Penetapan itu sendiri didasari pertimbangan *syara'* dan untuk memenuhi ketentuan dalam hukum fiqh.

Waktu itu ada penilaian bahwa syarat-syarat sultan menurut pengertian *syara'* belum sepenuhnya terpenuhi oleh presiden RI saat itu—antara lain belum memperoleh bai'at dari rakyat karena tidak dipilih melalui pemilihan umum. Untuk memenuhi ketentuan berdasarkan hukum fiqh itulah disepakati perlunya menetapkan presiden RI sebagai *Waliyul Amri Dharuri bis Syaukah*. Kesepakatan itu juga untuk menghapus kecurigaan golongan tertentu, apakah umat Islam Indonesia itu pro Republik Indonesia atau DI/TII; mengakui kepemimpinan Nasional Presiden Soekarno atau Kartosuwiryo.

Setelah tidak lagi menjadi Menteri Agama karena Kabinet Ali Sastroamidjojo I jatuh, ada satu kasus yang belum diselesaikan K.H. Masjkur. Semasa dia menjabat Menteri Agama, diberitakan di media ibukota bahwa Menteri Agama K.H. Masjkur melakukan manipulasi kain kafan sebanyak satu juta yard. Berita itu menggegerkan masyarakat. K.H. Masjkur sendiri menanggapi berita tersebut dengan tenang dan sabar karena ia yakin bahwa berita itu disiarkan dengan tujuan menjelekkan pribadinya dan menjatuhkan partai yang diwakilinya, bahkan menjatuhkan Ka-

---

[25]Kebijakan-kebijakan tersebut dapat dilihat dalam *Pedoman Pedjabat Kantor-Kantor Agama*, jilid II(Jakarta: Kementerian Agama bagian D); dan juga dapat dilihat dalam *Amal Bhakti Departemen Agama RI*, hal. 50-51.

[26]Saifullah Ma'shum (ed), *Menapak Jejak*, hal. 187.

binet Ali Sastroamidjojo I.[27]

Sampai Kabinet Ali jatuh, kasus itu belum dapat diselesaikan tuntas. Baru pada awal Desember 1955 pihak Kejaksaan Agung secara resmi mengumumkan bahwa "setelah diadakan pemeriksaan-pemeriksaan teliti dan mendalam di sekitar soal pembagian kain kafan dalam Kementerian Agama sebanyak lebih kurang satu juta yard dan menurut berita-berita yang tersiar telah terjadi kekusutan dan kecurangan di dalamnya, maka pihak Kejaksaan Agung kini telah mengambil keputusan, menganggap tidak ada alasan untuk mengadakan sesuatu tuntutan terhadap diri mantan Menteri Agama, K.H. Masjkur."[28]

Kiprah Pasca Kabinet

Tidak lama setelah tidak menjabat Menteri Agama, K.H. Masjkur mendapatkan tugas dari Sekretariat Negara untuk menyertai Ibu Haryati Soekarno menunaikan ibadah haji bersama dengan rombongan ibu-ibu lainnya. Sebelum menjalankan tugas, K.H. Masjkur mengajukan syarat agar istrinya juga diizinkan menyusul ke Tanah Suci. Istri dan anaknya menyusul bersama rombongan di bawah pimpinan Kiyai Wahab. Di sanalah K.H. Masjkur bertemu keluarganya. Selesai menunaikan ibadah haji, rombongan Ibu Haryati pulang ke Indonesia, sedang K.H. Masjkur dan keluarganya tinggal beberapa hari di Mekkah kemudian mengunjungi Mesir, Libanon, Irak dan Iran. Selesai melakukan perjalanan ia pulang ke Indonesia melalui Hongkong, Jepang dan Filipina.

Setibanya di Indonesia, kondisi politik mengalami perubahan besar. Kabinet Burhanuddin Harahap yang menyelenggarakan Pemilu pertama tahun 1955 telah jatuh dan digantikan kabinet Ali Sastroamidjojo II. Kabinet Ali II adalah kabinet pertama hasil Pemilu 1955. Susunan kabinet ini intinya terdiri dari tiga partai besar yaitu PNI, Masyumi, dan NU. Sedangkan PKI yang merupakan partai besar keempat dalam Pemilu sengaja ditinggalkan.

Pada masa Kabinet Ali II diadakan pemilihan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (Konstituante) yang akan menetapkan

---

[27]Soebagijo, *K.H. Masjkur*, hal. 178
[28]Soebagijo, *K.H. Masjkur*, hal. 178

Undang-Undang Dasar Negara. K.H. Masjkur adalah salah satu anggota Konstituante. Sebagaimana diketahui, terjadi perdebatan sengit dalam sidang Konstituante mengenai masalah dasar negara. Sebagian anggota, yakni kalangan Islam, mengusulkan agar dasar negara Indonesia adalah Islam mengingat mayoritas penduduknya adalah Muslim; sebagian lain, kalangan nasionalis, menolak usulan tersebut dengan alasan heterogenitas agama yang dipeluk masyarakat Indonesia—perdebatan yang sama pernah terjadi sepuluh tahun sebelumnya ketika BPUPKI bersidang.

K.H. Masykur adalah salah seorang yang memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Meski ia pernah menjadi menteri dalam beberapa kabinet sebelumnya, tapi ia tetap memperjuangkan agar, paling tidak, Piagam Jakarta dapat diterima. Untuk memutuskan perdebatan ini, akhirnya dilakukan pemungutan suara. Dalam pemungutan suara, golongan Islam ternyata kalah.

Selanjutnya, sidang-sidang Konstituante yang diadakan untuk menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, menggantikan UUD 1945, mengalami kemacetan. "Kegagalan" Konstituante melahirkan UU baru menyebabkan situasi politik semakin tegang. Pada 3 Juli 1959, Presiden mengadakan sidang kabinet di mana dia menyatakan akan mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945, dan itu terbukti ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959.

Dengan Dekrit ini, berarti Idonesia kembali menggunakan UUD 1945, Konstituante yang merupakan hasil Pemilu 1955 dibubarkan, dan dimulainya era Demokrasi Terpimpin. Untuk menggantikan Konstituante yang dibubarkan, pemerintah mengeluarkan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959 tertanggal 22 Juli 1959 yang menetapkan bahwa sementara DPR belum tersusun menurut UUD 1945, maka DPR yang dibentuk berdasarkan UU No. 7 tahun 1953 menjalankan tugasnya sesuai UUD 1945. DPR ini dibubarkan Presiden Soekarno lewat Penetapan Presiden No. 3 tahun 1960, setelah terjadi perselisihan pendapat antara Pemerintah dengan DPR mengenai penetapan Anggaran Belanja Negara tahun 1960. Presiden Soekarno kemudian mengeluarkan Penetapan Presiden No. 4/1960 yang mengatur susunan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Di dalam DPR-GR ini K.H. Masjkur dan Ny. Wahid Hasyim ikut serta sebagai anggota.

Setelah terbentuknya DPR-GR situasi politik di dalam negeri se-

makin parah. Banyak peristiwa penting dan membahayakan terjadi, seperti munculnya berbagai pemberontakan di daerah, percobaan pembunuan atas diri Presiden Soekarno, berhentinya Hatta sebagai Wakil Presiden, persengketaan dengan Malaysia, inflasi yang cukup tinggi, dan keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB. Melihat kondisi tersebut Presiden Soekarno membentuk suatu badan yang dinamakan Kotrar, yakni Komando Retuling Aparatur Revolusi. Di dalam Kotrar ini K.H. Masjkur duduk sebagai anggota staf biro politik.

Ketika terjadi pemberontakan G 30 S/PKI, K.H. Masjkur juga ikut berperan dalam menghadapi aksi PKI. Sebagai Ketua Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi), organisasi yang berafiliasi ke NU, K.H. Masjkur mengeluarkan instruksi agar seluruh anggota Sarbumusi di seluruh daerah ikut menguasai sarana komunikasi, jaringan kereta api, pabrik-pabrik dan lain-lain.[29]

Pada masa Orde Baru K.H. Masjkur aktif di DPR. Ia pernah menjadi Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan. Pada masanya terjadi perdebatan keras tentang RUU Perkawinan. Umat Islam banyak melakukan demonstrasi dan protes terhadap RUU yang dianggap bertentangan dengan hukum Islam tersebut. RUU tersebut akhirnya disyahkan menjadi UU No. 1 tahun 1974, setelah mengalami perubahan penting di sana-sini.

Aktivitas Menjelang Akhir Hayat

Memasuki usia senja, K.H. Masjkur masih tetap aktif di NU. Ia konsisten dengan cita-cita dan perjuangan NU. Ketika terjadi konflik dalam tubuh NU, K.H. Masjkur berusaha ikut mencari jalan keluar memecahkan masalah tersebut. Konflik dalam tubuh NU telah berlangsung lama, terutama perebutan kepemimpinan. Benih-benih konflik, khususnya dalam masalah kepemimpinan antara K.H. Idham Chalid dan KH. Mohammad Dachlan, telah muncul sejak Kongres di Bandung tahun 70-an. Konflik ini semakin jelas ketika memasuki masa Pemilu 1982. Waktu itu NU mengajukan daftar calon anggota DPR kepada Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun, usul tersebut diubah Pimpinan PPP tan-

[29]Soebagijo, *K.H. Masjkur*, hal. 189.

pa sepengetahuan NU; akibatnya, NU menolak perubahan tersebut. Sejak itu, NU terpecah menjadi dua golongan, yakni yang pro masuk ke PPP dan yang kontra. K.H. Masjkur berusaha ikut menyelesaikan perpecahan ini dengan menemui beberapa tokoh yang dianggapnya dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Tetapi usaha K.H. Masjkur tersebut tidak membuahkan hasil yang menggembirakan; bahkan konflik tersebut tidak pernah selesai.

Selain aktif di NU, K.H. Masjkur juga aktif dalam membentuk dan mengelola Forum Ukhuwah Islamiyah yang berusaha menyatukan barisan Islam yang tercerai berai karena fanatisme kelompok. Ketika Sri Paus hendak berkunjung ke Jakarta, beberapa ormas Islam menyatakan keberatan. Tetapi K.H. Masjkur berpendapat lain. Ia menyatakan bahwa kunjungan kenegaraan Paus tidak mungkin ditolak. Karena itu, ia justru harus dimanfaatkan untuk membeberkan adanya Kristenisasi di Indonesia yang tidak sesuai dengan Konsili Vatikan. Akhirnya forum setuju, sehingga ditulislah surat berisi informasi mengenai hal tersebut dan harapan umat Islam yang disampaikan kepada Sri Paus.

Selain itu, K.H. Masjkur juga menjabat Ketua Yayasan Universitas Islam Malang (UNISMA) dan Dewan Kurator Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ), yang diembannya hingga akhir hayat. Pada 18 Desember 1992, K.H. Masjkur dipanggil menghadap Sang Pencipta dalam usia 92 tahun.

K. H. Wahid Hasyim;

Konsolidasi dan Pembelaan Eksistensi

Saiful Umam

> Kementerian Agama terutama bekerja menyelenggarakan hidup keagamaannya masing-masing golongan agama yang berhubungan dengan negara dan antara satu golongan agama dengan golongan agama lainnya.[1]
>
> Dalam pandangan Islam, bahwa ilmu pengetahuan tidaklah dianggap sebagai satu syarat hidup yang dapat berdiri sendiri. Di samping pengetahuan, diletakkan syarat lain, yaitu taqwa... Dua syarat hidup tadi, ilmu pengetahuan dan taqwa, dalam pandangan Islam tidak mungkin dijauhkan dan harus sama-sama cukup lengkap.[2]

Usia K.H. Wahid Hasyim memang relatif pendek, sependek jalan yang mengabadikan namanya di Jakarta.[3] Tapi dia selalu dikenang orang karena kepribadian dan pengabdiannya pada negara. Dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan pesantren, menjadikan Wahid Hasyim sangat kental dengan nilai-nilai Is-

---

[1]Bagian ini diambil dari tulisan Wahid Hasyim berjudul "Sekitar Pembentukan Kementerian Agama RIS," yang dimuat pertama kali dalam *Mimbar Agama*, No. 3-4, Maret-April 1951, dan dimuat kembali dalam H. Aboebakar, *Sejarah Hidup K.H.A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar*, (Jakarta: Panitia Buku Peringatan Alm. K.H.A. Wahid Hasyim, 1957), hal. 859. Kutipan di sini merujuk pada sumber terakhir.

[2]Pidato Wahid Hasyim pada acara peresmian Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di Yogyakarta, 26 September 1951. H. Aboebakar, *Sejarah Hidup*, hal. 815.

[3]Analog ini dibuat Zamakhsyari Dhofier dalam tulisannya "K.H.A. Wahid Hasyim, Rantai Penghubung Peradaban Pesantren dengan Peradaban Indonesia Modern," *Prisma*, No. 8, 1984, hal. 73.

lam. Namun, kecerdasannya yang luar biasa dan didukung oleh kegemarannya membaca, membuat dunia Wahid Hasyim tidak hanya terbatas dalam lingkungan pesantren. Dia tampil menjadi tokoh nasional yang turut berjasa besar dalam melahirkan negara Indonesia merdeka berdasarkan Pancasila. Dengan demikian, Wahid Hasyim semasa hidupnya menjalani dua tradisi sekaligus; tradisi pesantren yang telah mapan dan tradisi Indonesia moderen yang sedang diupayakan. Dalam konteks inilah Zamakhsyari Dhofier menyebutnya sebagai mata rantai paling kukuh yang menghubungkan tradisi pesantren dengan peradaban Indonesia moderen.[4]

Aktivitas Wahid Hasyim dalam skala nasional telah dimulai ketika Belanda masih menjajah Nusantara dan makin aktif selama masa penjajahan Jepang. Hal ini terkait dengan kebijakan pemerintah militer Jepang yang memilih bekerjasama dengan kalangan Islam. Pada masa itu Wahid Hasyim tercatat pernah menduduki jabatan-jabatan penting dalam Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) dan Shumubu (Kantor Urusan Agama Pusat). Karena peran itulah Benda menyebutnya sebagai "wakil Islam Indonesia yang paling berpengaruh pada masa Jepang."[5]

Peran Wahid Hasyim terus berlanjut pada masa Indonesia menjelang merdeka. Perannya sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) berhasil turut menyelamatkan persatuan bangsa Indonesa dari perpecahan karena perbedaan aspirasi tentang dasar negara. Karena itu, penilaian Benda bahwa Wahid Hasyim adalah "salah satu pemimpin umat Islam yang paling berpengaruh selama dan setelah masa penjajahan,"[6] tidak berlebihan.

Wahid Hasyim melanjutkan aktivitas kenegarawannya setelah kemerdekaan. Peran sangat penting yang diembannya adalah ketika menjadi Menteri Agama dalam tiga kabinet berturut-

---

[4]Zamakhsyari Dhofier, "K.H.A. Wahid Hasyim," hal. 75.

[5]Harry J. Benda, *The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam under the Japanese Occupation 1942-1945*, (The Hague: W. van Hoeve, 1958), hal. 189.

[6]Harry J. Benda, *The Crescent*, hal. 278 (16).

turut (1949-1952). Jabatannya ini dapat juga dianggap sebagai puncak kariernya dalam pemerintahan, karena tidak lama setelah dia tidak menjadi Menteri Agama dia meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil. Dua kutipan di atas dapat dianggap mewakili dua *concerns* utama Wahid Hasyim ketika ia menjabat Menteri Agama. Pertama, pemantapan peran lembaga ini dalam konteks negara dan bangsa, sehingga ia tidak dicurigai sebagai departemen orang Islam dan sekaligus menjadikannya sejajar dengan departemen-departemen teknis lainnya. Kedua, peningkatan apresiasi terhadap pentingnya menguasai ilmu pengetahuan umum dan Islam secara seimbang. Dari perhatian kedua ini, kita dapat melihat dari lahirnya Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN)—yang di kemudian hari berkembang menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN)—sebagai lembaga pendidikan tinggi agama yang modern; dan pengajaran pelajaran agama di sekolah-sekolah umum. Selain kedua hal tersebut tentu masih banyak kebijakan-kebijakan penting Wahid Hasyim selaku Menteri Agama.

Restrukturisasi Kementerian Agama

Menjadi Menteri Agama bukanlah jabatan pertama bagi Wahid Hasyim. Sebelumnya dia pernah menjadi menteri, yakni Menteri Negara pada Kabinet Soekarno 1945 dan Sjahrir III 1946-7. Dengan demikian, Wahid Hasyim bukan orang baru lagi dalam pemerintahan. Dalam urusan kementerian ini pun, paling tidak dia sudah punya pengalaman pada masa Jepang. Namun, keberadaan Wahid Hasyim sebagai Menteri Agama pada masa kemerdekaan menjadi khusus, jika dilihat dari konteks situasi saat itu dan apa yang telah dihasilkan Wahid Hasyim dalam kapasitasnya sebagai Menteri Agama.

Wahid Hasyim diangkat Menteri Agama untuk pertama kali pada 20 Desember 1949. Ketika itu, usia kemerdekaan Indonesia masih muda dan baru saja diakui Belanda dalam bentuk negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Usia Wahid Hasyim juga masih relatif muda, sekitar 35 tahun. Tapi dia sudah menjadi tokoh nasional berkat aktivitasnya sebelum dan sesudah kemerdekaan, seperti akan dibahas di bawah. Wahid Hasyim juga pernah menjabat jabatan serupa pada masa Jepang, yakni Wakil Kepala Shumubu. Meski jabatan formalnya sebagai Wak-

il, tapi dialah sebetulnya yang menjalankan tugas sehari-hari, karena K.H. Hasyim Asy'ari, yang menjabat Kepala, memilih tinggal di Jawa Timur dan menyerahkan tugas pimpinan kepadanya.

Sebagai tindak lanjut dari Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda, dibentuklah negara Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden merangkap Perdana Menteri. Dalam kabinet baru ini, Wahid Hasyim menjadi Menteri Agama untuk pertama kali. Ketika itu, dapat dikatakan ada dualisme pemerintahan. RIS dengan Perdana Menterinya Mohammad Hatta berkedudukan di Jakarta dan RI yang berkedudukan di Yogyakarta dengan Perdana Menterinya A. Halim. Kementerian Agama pun ada dua, di dalam RIS dan dalam RI yang Menterinya adalah K.H. Faqih Usman. Dalam kondisi politik seperti itu, Wahid Hasyim dapat dikatakan membangun Kementerian Agama dalam RIS ini dari nol, karena Kementerian Agama yang dibentuk pada 1946 saat itu berkedudukan di Yogyakarta. Bahkan kantor milik sendiri pun belum punya. Karena itu dia dihadapkan pada tantangan untuk mengembangkan lembaga ini.

Langkah pertama yang diambil Wahid Hasyim sebagai Menteri Agama adalah menentukan di mana kantor kementerian tersebut. Karena memang belum punya gedung, dia akhirnya menyewa ruangan di Hotel Des Indes di Jl. Gajah Mada Jakarta (yang sekarang menjadi Duta Merlin). Di kamar No. 4 hotel tersebut, Wahid Hasyim memulai tugasnya sebagai Menteri Agama. Sekitar sebulan kemudian, berkat jasa Menteri Dalam Negeri, Anak Agung Gde Agung, kantor kementerian ini pindah ke sebuah paviliun di Jl. Merdeka Utara No. 7. Meski ruangannya tidak besar, ia cukup memadai mengingat personil Kementerian Agama RIS waktu itu hanya tujuh orang, termasuk Menteri.[7]

Dalam masa-masa awal, Wahid Hasyim selalu mengadakan

---

[7]Ketujuh orang tersebut, selain Wahid Hasyim, adalah R.M. Kafrawi sebagai Sekjen, H. Abubakar sebagai Kepala Penerangan dan Penerbitan, K.H.M. Djunaedi sebagai Kepala Kantor, R.A.K. Djaelani sebagai Kepala Keuangan, dan dua orang pembantu sebagai sopir dan pesuruh.

koordinasi dengan Kementerian Agama di Yogyakarta. Dualisme kementerian ini memang cukup menjadi hambatan bagi pengembangan peran Kementerian Agama. Karena itulah kemudian diadakan pembicaraan diantara kedua Menteri yang juga menyertakan para pejabat di lingkungan masing-masing dalam usaha menyatukan kedua kementerian ini. Upaya ini semakin intensif dilakukan setelah terjadi kesepakatan bersama antara Hatta selaku Perdana Menteri RIS dan A. Halim selaku Perdana Menteri RI untuk membentuk Negara Kesatuan pada 19 Mei 1950.

Akhirnya, lewat Surat Keputusan No. A II/2/2175 tertanggal 7 Juni 1950 yang ditandatangani Wahid Hasyim dan Faqih Usman, dicapailah kesepakatan untuk menyatukan kedua Kementerian tersebut dan pegawai kedua kementerian pun dilebur menjadi satu. Meski status pemerintahan RI di Yogyakarta adalah bagian dari RIS, keberadaan Kementerian Agama di sana dijadikan modal dasar untuk pengembangan Kementerian ini, mengingat ia sudah lahir lebih dulu dan telah mempunyai berbagai perangkat serta menghasilkan berbagai keputusan. Namun kantor pusat kementerian ini berkedudukan di Jakarta, dengan bagian-bagian tertentu tetap di Yogyakarta, seperti Jawatan (setingkat Direktorat) Urusan Agama, Jawatan Pendidikan Agama dan Jawatan Penerangan Agama.

Dengan penyatuan Kementerian Agama, Wahid Hasyim mulai melakukan restrukturisasi kementerian ini, baik struktur organisasi maupun lapangan pekerjaan. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan baik karena didukung dua hal: pertama mulai stabilnya negara, setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dan tidak melakukan agresi; kedua, Wahid Hasyim secara berturut-turut menduduki jabatan ini dalam dua kabinet berikutnya, Kabinet Natsir (1950-1951) dan Sukiman (1951-1952), sehingga kontinyuitas program tersebut dapat dijaga. Dalam struktur organisasi, Kementerian Agama mempunyai 8 bagian, di luar Menteri dan Sekjen, yakni: Sekretaris Umum, Hukum, Urusan Haji, Kristen Protestan, Katolik, Pergerakan Agama, Politik, Kepegawaian, dan Perbendaharaan. Selain itu, ia juga mempunyai tiga jawatan yang ada di Yogyakarta, seperti telah disinggung di atas. Jawatan-jawatan inilah yang mempunyai pelaksana di daerah-daerah. Bahkan, salah satu jawatan ini,

yakni Jawatan Urusan Agama, telah mencapai tingkat kecamatan, yang dikenal dengan Kantor Urusan Agama.

Sementara itu, dalam hal lapangan pekerjaan, Wahid Hasyim menegaskan kembali apa yang telah menjadi garapan kementerian ini pada masa RIS, yang meliputi 12 poin. Antara lain, melaksanakan asas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan sebaik-baiknya; menjaga bahwa tiap-tiap penduduk mempunyai kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya; menyelenggarakan, memimpin dan mengawasi pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri; dan memberi bantuan material untuk perbaikan dan pemeliharaan tempat-tempat ibadah.[8] Semua lapangan pekerjaan tersebut merupakan pengejawantahan fungsi utama Kementerian Agama sebagai pendukung dan pelaksana utama asas sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan banyaknya struktur dan lapangan pekerjaan yang luas, jumlah personalia berubah drastis. Tidak lagi tujuh orang seperti ketika Wahid Hasyim pertama kali menjadi Menteri Agama, tetapi mencapai ribuan. Dana yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas kementerian ini pun bertambah besar. Semua itu berarti menuntut penanganan lebih serius, dan tidak bisa lagi dianggap sekedar pelengkap, seperti ketika masa RIS. Wahid Hasyim menyadari bahwa melakukan restrukturisasi tersebut merupakan pekerjaan besar. Tapi dengan tekun dan penuh keyakinan dia lakukan semua itu. Sampai batas-batas tertentu, Wahid Hasyim berhasil melaksanakan kerja besar tadi. Sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Wahid Hasyimlah yang meletakkan fondasi kuat kementerian ini, sehingga ia mampu berkembang seperti sekarang. Penilaian ini, selain berangkat dari keberhasilan Wahid Hasyim melakukan restrukturisasi tersebut, juga karena dia berhasil mempertahankan Kementerian Agama dari mereka yang tidak setuju dan menentang keberadaannya.

---

[8]Isi lengkap 12 poin tersebut dapat dilihat dalam H. Abubakar, *Sejarah Hidup*, hal. 600-601.

Mempertahankan Kementerian Agama

Pembentukan Kementerian Agama pada 1946 pada awalnya memang untuk memenuhi tuntutan sebagian besar umat Islam. Mereka merasa bahwa permasalahan umat sangat banyak dan tidak efektif kalau ditangani berbagai departemen; mereka meminta agar semua itu ditangani oleh satu departemen saja. Pemenuhan tuntutan tersebut jelas berkaitan juga dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia saat itu. Umat Islam bisa dikatakan tengah "kecewa" karena aspirasi mereka mengenai sistem pemerintahan—yang disuarakan kalangan Islam dalam BPUPKI dan PPKI—tidak terpenuhi. Bahkan Piagam Jakarta yang merupakan hasil minimal bagi umat Islam dan telah menjadi kesepakatan bersama diubah sehari setelah kemerdekaan. Sementara di sisi lain, Belanda tengah mengancam keberadaan pemerintahan yang baru lahir, sehingga membutuhkan dukungan dari seluruh pihak, khususnya umat Islam yang mayoritas. Karena itulah tanpa pembicaraan panjang, usul didirikannya Kementerian Agama ini langsung disetujui Presiden Soekarno. Ini berarti, pada awalnya kementerian ini sebetulnya dimaksudkan untuk mengurus umat Islam saja. Namun dalam perkembangan berikutnya, kementerian juga mengurus umat non-Islam. Tentu saja, konsentrasi utamanya tetap umat Islam, mengingat mereka adalah mayoritas warganegara Indonesia.

Meski sudah disetujui Presiden, keberadaan kementerian ini tidak luput dari kritik tajam dan bahkan tuntutan agar dibubarkan dengan berbagai alasan. Ketika masa revolusi, tuntutan tersebut nyaris tidak terdengar karena semua pihak disibukkan permasalahan lebih besar, yakni menghadapi Belanda.* Namun ketika Wahid Hasyim menjadi Menteri Agama, di mana negara sudah terbebas dari ancaman Belanda, tuntutan tersebut kembali mengemuka. Tugas berat yang harus diemban Wahid Hasyim, dengan demikian, adalah bagaimana meyakinkan mereka bahwa kementerian ini penting dan sekaligus mempertahankan keberadaannya.

Dalam pidato yang diucapkan di suatu Konperensi antara Kementerian Agama dan Pengurus-pengurus Besar Organisasi

---

* Catatan editor, lebih lengkap tentang perdebatan di sekitar pembentukan Kementerian Agama ini, lihat tulisan Muljanto Sumardi, "Posisi Departemen Agama", dan Azyumardi Azra tentang Rasjidi.

Islam non-politik, pada November 1951, Wahid Hasyim menggambarkan bahwa ada tiga kelompok masyarakat yang mempunya persepsi berbeda terhadap keberadaan Kementerian Agama. Pertama, mereka yang tidak senang atas keberadaan kementerian ini karena dianggap akan mengganggu prinsip-prinsip mereka sendiri. Kelompok pertama ini adalah orang-orang yang tidak punya semangat keagamaan, atau sekuler. Kedua, mereka yang antusias menyambut kementerian ini, bahkan cenderung menyandarkan harapan yang tinggi. Kelompok ini adalah umat Islam umumnya yang menjadi mayoritas penduduk. Ketiga, mereka yang menyambut baik tapi dengan sikap khawatir bahwa kementerian ini akan mengganggu mereka. Kelompok terakhir ini datang dari kalangan agama minoritas.[9]

Kementerian Agama, menurut Wahid Hasyim, harus menghadapi ketiga kelompok tersebut secara simultan. Bagi kelompok kedua, tugas Kementerian Agama jelas tidak terlalu berat. Harapan yang sangat besar dari kalangan mayoritas memang dapat berbalik menjadi kekecewaan manakala kementerian ini ternyata tidak mampu memenuhi harapan mereka. Namun hal itu bisa diatasi dengan memberi pengertian yang benar tentang fungsi Kementerian Agama. Sementara itu, kekhawatiran dari golongan minoritas bisa saja berubah menjadi keberatan atau bahkan penolakan terhadap Kementerian Agama tatkala mereka menganggap bahwa kementerian ini telalu banyak mengurusi umat Islam. Pada pihak lain, mereka yang tidak senang dengan pembentukan kementerian ini terus berusaha agar ia dibubarkan. Mereka beralasan bahwa tugas-tugas yang diemban kementerian ini bisa ditangani sekaligus oleh kementerian-kementerian lain yang sudah ada, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Kehakiman. Keberadaan Kementerian Agama, menurut mereka, hanyalah merupakan pemborosan anggaran negara saja. Bahkan, ada yang berpendapat bahwa kementerian ini hanyalah merupakan ajang rebutan jabatan antarpartai. Karena itu tidak ada alasan kuat untuk melanjutkan keberadaannya.[10]

---

[9]H. Abubakar, *Sejarah Hidup*, hal . 873-875.

[10]*Laporan Sejarah Departemen Agama* (Jakarta: Proyek Penelitian Keagamaan Departemen Agama RI, 1980/1981), hal. 47

Wahid Hasyim dengan teguh mempertahankan keberadaan Kementerian Agama sekaligus menolak argumen mereka yang menghendaki pembubaran kementerian ini. Menurut dia, dengan adanya Kementerian Agama, pemerintah merasa wajib melayani keperluan rakyat tentang agama, dengan dasar Pancasila. Pemisahan agama dan negara, menurut Wahid Hasyim, hanya terjadi dalam teori. Dalam kenyataannya, tak ada satu pun yang betul-betul mempraktekkan pemisahan tersebut, kecuali negara ateis. Karena itu, meski penghapusan kementerian ini dapat saja dilakukan, dan berbagai fungsinya dilaksanakan berbagai kementerian lain, Wahid Hasyim mengingatkan bahwa hal itu akan menyinggung perasaan umat Islam Indonesia.

Sementara itu, terhadap keberatan kalangan non-Muslim bahwa kementerian ini lebih banyak memperhatikan umat Islam, Wahid Hasyim menunjukkan adanya fakta bahwa jumlah penganut Islam jauh lebih besar daripada non-Muslim. Jadi, wajar kalau Kementerian Agama memberikan perhatian lebih besar kepada umat Islam. Tapi hal itu dilakukan bukan karena diskriminasi, melainkan semata karena jumlah umat Islam yang sangat besar itu.[11] Dari pernyataan terakhir ini, Wahid Hasyim menegaskan bahwa Kementerian Agama bukanlah kementerian bagi umat Islam saja, tapi bagi semua pemeluk agama.

Apa yang dilakukan Wahid Hasyim ternyata berhasil membungkam mereka yang mengritik keberadaan kementerian ini sehingga ia tetap bertahan. Selain itu, sampai batas tertentu, dia juga berhasil meyakinkan kalangan non-Muslim agar tidak perlu khawatir tentang keberadaannya. Keberhasilan Wahid Hasyim ini dicatat dengan baik oleh Boland yang menyatakan bahwa "Wahid Hasyim-lah yang mengorganisasi Kementerian Agama sehingga menjadi penting dan meninggalkan jejaknya di situ."[12]

---

[11]Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional* (Jakarta: Grafiti Pers, 1987), hal. 340-341. Lihat juga Deliar Noer, *Administration of Islam in Indonesia* (Ithaca, NY: Cornell Modern Indonesia Project Southeast Asia Program, 1978), hal. 13-15.

[12]B.J. Boland, *The Struggle of Islam in Modern Indonesia* (The Hague: Martinus Hijhoff, 1982), hal. 10

Menyeimbangkan Ilmu Agama dan Umum

Selain memantapkan peran Kementerian Agama, Wahid Hasyim juga menaruh perhatian besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Latar belakang pendidikan pesantren yang ia miliki ditambah dengan bacaannya yang luas, sebagaimana akan dijelaskan di bawah, menjadikan Wahid sebagai pribadi yang sadar akan pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan, agama dan umum sekaligus. Dia memahami bahwa Indonesia yang sedang membangun membutuhkan tidak hanya ilmu agama, tapi juga ilmu-ilmu pengetahuan umum lainnya. Sebaliknya, pembangunan yang sedang berlangsung juga membutuhkan agama agar terhindar dari dekadensi moral.

Berkali-kali Wahid Hasyim menegaskan pentingnya ilmu pengetahuan, atau dalam dalam bahasa Wahid, logika. Dengan mengutip Hadits "tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal," dia mengatakan bahwa Islam bukan saja menghargai akal dan otak yang sehat, tetapi juga menganjurkan orang supaya menyelidiki, memikirkan dan mengupas segala ajaran Islam.[13] Lebih jauh dia mengatakan:

> Dalam Islam...logika adalah pokok yang penting bagi menentukan benar atau salah. Suatu hal atau suatu kejadian atau suatu peristiwa yang menurut logika tidak dapat diterima, di dalam anggapan Islam tidak bisa juga diterima. ....Islam tidak mengakui segala yang tidak tunduk pada logika.[14]

Dalam kesempatan lain, dia mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan tidak boleh dikurung perasaan keagamaan sempit. "Tiap-tiap Muslim sejati...memandang pengetahuan dari sudut logika semata-mata; perasaan dan batin dalam lapangan mencari pengetahuan dan mengadu kebenaran harus dikesampingkan." Demikian pula, ilmu harus bebas dari pertimbangan-pertimbangan politik.[15]

Namun, dia juga mengingatkan akan keterbatasan akal. Karena itu, meski tidak harus dikungkung agama, ilmu pengetahuan

---

[13]H. Aboebakar, *Sejarah Hidup*, hal. 681.
[14]H. Aboebakar, *Sejarah Hidup*, hal. 634.
[15]H. Aboebakar, *Sejarah Hidup*, hal. 813-814.

tetap harus dilengkapi dengan agama. Dengan agama itulah, menurut Wahid Hasyim, manusia bisa membedakan antara akal sehat dan hawa nafsu.[16] "Kemajuan otak yang tidak disertai dengan kemajuan budi pekerti atau takwa telah menyebabkan nilai dan pandangan manusia jadi berubah banyak, tidak ke atas tapi ke bawah."[17]

Dari pandangannya itu dapat disimpulkan bahwa Wahid Hasyim adalah sosok yang moderat, dalam pengertian tidak menganggap salah satu ilmu lebih unggul daripada lainnya, atau akal lebih utama daripada akhlak. Moderasi tersebut diimplementasikan dalam beberapa kebijakannya sebagai Menteri Agama. Salah satu implementasi dari pandangannya ini adalah keputusannya untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi Islam yang baik. Dari pendidikan ini diharapkan akan lahir sarjana yang menguasai dua lapangan sekaligus: agama dan logika (ilmu pengetahuan). Lembaga pendidikan yang ia bayangkan adalah tempat untuk mempelajari Islam dengan menggunakan sistem pendidikan modern yang menekankan pentingnya rasionalitas.

Untuk mewujudkan itu, keluarlah Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1950 tentang pengembangan Fakultas Agama dari Universitas Islam Indonesia (UII) menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN). Guna melaksanakan peraturan ini dibentuklah Panitia Perguruan Tinggi Islam, beranggotakan 11 orang dan diketuai oleh K.H. Fathurrahman Kafrawi,* yang bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembukaan perguruan tinggi tersebut. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, tepatnya pada 15 September 1951, lembaga ini resmi dibuka dengan nama PTAIN dan berkedudukan di Yogyakarta.

Dalam sambutannya ketika meresmikan perguruan ini, Wahid Hasyim menjelaskan bahwa pendirian lembaga ini dilatarbelakangi beberapa hal. Antara lain, keprihatinan dia akan rendahnya kualitas sumber daya manusia di kalangan umat Islam. Padahal, mereka adalah kelompok terbesar. Karena kelemahan kualitas yang mereka hadapi, kelompok mayoritas

---

[16]H. Aboebakar, *Sejarah Hidup*, hal. 687-688.
[17]H. Aboebakar, *Sejarah Hidup*, hal. 815
*Lihat juga bab tentang K.H. Fathurrahman Kafrawi

ini tidak akan mampu menyukseskan pembangunan yang dilakukan dalam waktu yang cepat. Selain itu, pendirian ini juga didorong oleh fakta bahwa umat Islam belum mempunyai sekolah yang mengajarkan dan memelihara pendidikan agama Islam dengan dasar pengetahuan setingkat universitas. Sementara, kelompok minoritas sudah mempunyainya, dalam bentuk Sekolah-sekolah Tinggi Theologia.

Di samping kedua latar belakang tersebut, dia juga mengemukakan bahwa dalam masyarakat saat itu dijumpai dua macam pimpinan Islam. Pertama, pemimpin politik Islam yang umumnya berpendidikan Barat tapi tidak punya pengetahuan agama yang cukup. Kedua, pemimpin agama Islam, yakni para ulama yang pada umumnya tidak mempunyai pengetahuan umum dan politik. Sebab itu, Wahid Hasyim mengharapkan bahwa Peguruan Tinggi Agama Islam tersebut mampu melahirkan cendekiawan yang tidak hanya mendalam ilmu pengetahuan agama dan umum serta takwanya kepada Allah, tetapi juga memahami persoalan-persoalan politik. Dengan demikian, tidak akan terjadi adanya ulama yang, karena tidak sadar, menundukkan ilmu pengetahuan pada politik.[18]

Pendirian PTAIN ini merupakan salah satu peninggalan Wahid Hasyim yang paling penting. Lembaga ini kemudian berkembang menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang sekarang berjumlah 14 di seluruh Indonesia, dan mampu menyerap lebih dari 15 persen dari jumlah keseluruhan mahasiswa Indonesia.[19]

Perhatian Wahid Hasyim dalam menyeimbangkan antara ilmu pengetahuan umum dan agama juga diimplementasikan dalam bentuk lain, yakni memberikan pelajaran agama di sekolah-sekolah umum. Menyusul ditetapkannya UU Pendidikan No. 4/1950, Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan dan Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Bersama pada 1951, yang intinya menegaskan bahwa pelajaran agama harus diajar-

---

[18]H. Aboebakar, *Sejarah Hidup*, hal. 812-818.

[19]Untuk sejarah perkembangan IAIN dan prospek masa depannya, lihat *The Baseline Study of IAIN: The Guidelines of IAIN Development Plan for the Twenty-five Years* (Jakarta: Censis dan Dibinperta, 1996).

kan di sekolah-sekolah umum. Selain itu, keputusan bersama ini juga menyatakan bahwa belajar di sekolah agama yang telah mendapatkan pengakuan dari Kementerian Agama dianggap telah memenuhi wajib belajar.[20]

Untuk memenuhi kebutuhan akan guru agama, sebagai konsekuensi dari surat keputusan bersama tersebut, Wahid Hasyim mengeluarkan surat edaran yang menganjurkan agar di tiap daerah Karesidenan didirikan Sekolah Guru Agama Islam (SGAI)—yang kemudian diubah menjadi Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN).[21] Pengaruh surat edaran ini ternyata sangat besar, terbukti kemudian PGA berkembang pesat dan dapat dijumpai, tidak hanya di tiap karesidenan, tapi di hampir tiap kabupaten. Berkembangnya PGA pada gilirannya tidak hanya mencukupi kebutuhan guru agama, tapi juga menjadi sumber pengembangan IAIN. Dengan makin banyaknya lulusan PGA—di samping Madrasah Aliyah, tentu saja—yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi, maka makin banyak pula kebutuhan akan IAIN, karena bagaimanapun IAIN merupakan tempat yang tepat bagi mereka.[22]

Memperbaiki Manajemen Haji

Usaha penting Wahid Hasyim lainnya ketika dia menjadi Menteri Agama adalah memperbaiki penanganan urusan haji. Ketika masa revolusi, sulit sekali bagi umat Islam Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji, karena mereka disibukkan dengan upaya mempertahankan kemerdekaan yang baru diraih. Selain itu, juga karena adanya fatwa dari K.H. Hasyim Asy'ari, ayah Wahid Hasyim, yang melarang umat Islam Indonesia melaksanakan haji sebagai boikot terhadap Belanda yang saat itu menguasai armada pelayaran yang digunakan untuk mengangkut calon jamaah haji.

Ketika masih dalam masa revolusi, pemerintah Indonesia sempat dua kali mengirim missi haji ke Arab Saudi untuk menjelaskan kepada dunia Islam perihal politik Indonesia yang te-

---

[20]*Laporan Sejarah Departemen Agama*, hal. 60.
[21]H. Aboebakar, *Sejarah Hidup*, hal. 631.
[22]Zamakhsyari Dhofier, "K.H. Wahid Hasyim," hal. 78.

ngah melarang umat Islam Indonesia melaksanakan haji, sekaligus meminta dukungan terhadap perjuangan yang sedang dilaksanakan masyarakat Indonesia dalam menentang penjajah. Di samping itu, missi ini juga bertugas mempelajari manajemen pengiriman jamaah haji.

Ketika Wahid Hasyim menjadi Menteri Agama, dia menetapkan kebijakan bahwa pelaksanaan ibadah haji sepenuhnya ditangani pemerintah, yakni oleh Bagian Urusan Haji dari Kementerian Agama. Dalam pelaksanaannya, bagian ini bekerjasama dengan PHI (Yayasan Perjalanan Haji Indonesia). Lembaga terakhir ini merupakan hasil dari resolusi Kongres Muslimin Indonesia pada Desember 1949. Dengan demikian, selain pemerintah, PHI adalah satu-satunya lembaga yang mengurus masalah haji. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memudahkan penyelenggaraan ibadah haji dan juga menyelamatkan calon jamaah dari tipuan pihak-pihak tertentu yang ingin mengeksploatasi mereka. Penipuan pernah terjadi pada 1949 terhadap jamaah haji dari Jawa Barat. Banyak dari mereka yang terlantar ketika di Arab dan kemudian menimbulkan kekacauan.[23]

Sebagai konsekuensi dari kebijakan tersebut, Wahid Hasyim mengeluarkan surat edaran agar di tiap karesidenan didirikan PHI untuk memperlancar pengurusan haji. Konsekuensi lainnya adalah tidak diperkenankannya lagi adanya perwakilan pemondokan-pemondokan di Arab Saudi (yang dikenal dengan *Badal Syekh*) beroperasi di Indonesia, menawarkan tempat tinggal bagi calon jamaah haji. Warga Arab yang mempunyai pemondokan cukup mengajukan penawarannya kepada pemerintah Indonesia, dan pengaturan selanjutnya ditangani pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama.

Dalam masa itu, ditetapkan pula beberapa persyaratan yang harus dipenuhi calon jamaah haji. Antara lain, di samping harus berbadan sehat dan sudah baligh, mereka juga harus mengetahui ilmu agama Islam, khususnya yang berkaitan dengan ibadah haji. Mereka juga harus mempunyai bekal yang cukup, tidak hanya bagi yang hendak melaksanakan ibadah haji tapi juga bagi keluarga yang ditinggalkan, yang menjadi tanggung-

---

[23]H. Aboebakar, *Sejarah Hidup*, hal. 648.

jawab mereka. Sebab itu, tidak diperbolehkan menjual harta kekayaan yang menjadi gantungan hidup, demi melaksanakan haji. Selain itu, ada juga persyaratan bahwa calon jamaah haji tidak boleh buta huruf. Untuk ukuran saat itu, ketika tingkat buta huruf masih tinggi di kalangan umat Islam Indonesia, persyaratan ini menimbulkan kesan menghambat orang yang ingin pergi haji. Tapi Wahid Hasyim punya alasan sendiri. Dengan mencantumkan syarat ini, dia ingin mendorong umat Islam untuk belajar yang pada gilirannya nanti akan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Memang, sulit mengetahui apakah syarat-syarat tersebut dilaksanakan secara penuh. Tapi, kebijakan yang diambil Wahid Hasyim tersebut jelas menunjukkan bahwa dia mempunyai keinginan kuat untuk meningkatkan kualitas umat Islam.

Dalam pengaturan pelaksanaan haji saat itu sudah dicantumkan kuota masing-masing daerah. Ini menunjukkan bahwa pembatasan jumlah tidak hanya terjadi pada masa sekarang, yang sedang diributkan orang, tapi sudah ada sejak masa itu. Sistem kuota ini diterapkan mengingat besarnya minat umat Islam melakukan ibadah haji setelah beberapa tahun mereka tidak dapat melakukannya, selain juga karena pembatasan jumlah calon jamaah haji yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi. Dalam kaitan ini, Kementerian Agama mengeluarkan himbauan agar mereka yang telah melakukan haji memberi kesempatan kepada mereka yang sama sekali belum pernah melakukannya. Hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pengaturan ibadah haji bagi umat Islam Indonesia memang bukan suatu hal yang ringan. Banyak sekali masalah yang terkait dengannya, sehingga bagi mereka yang tidak mengetahui kondisi sebenarnya dapat dengan mudah menuduh Kementerian Agama hanya mengambil keuntungan besar dari pelaksanaan haji yang dilakukan lewat satu pintu.[24]

Kebijakan Wahid Hasyim lainnya yang masih berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji adalah menyertakan petugas kesehatan untuk menjaga kesehatan para jamaah. Selain itu diserta-

---

[24]Lihat misalnya tulisan Deliar Noer dalam *Administration of Islam in Indonesia*, hal. 53-64.

kan pula petugas yang diangkat Kementerian Agama yang menangani berbagai hal, mulai dari membimbing jamaah, mengatur dan mengurus masalah-masalah teknis, baik selama dalam perjalanan maupun ketika di Arab, sampai mengurus jamaah yang meninggal, berikut barang-barang bawaannya. Meski sistem rekruitmen tenaga-tenaga tersebut di kemudian hari mendapat banyak kritikan,[25] tapi ide dasar kebijakan ini jelas untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah haji.

Kemudian, Wahid Hasyim juga mewajibkan setiap jamaah membayar sebesar Rp 500,- yang dapat digunakan untuk membeli kapal pengangkut jamaah haji. Waktu itu, pemerintah selalu menyewa kapal dari pihak lain untuk keperluan ini. Sehingga terpikirkan olehnya agar Kementerian Agama mempunyai kapal sendiri, sehingga dapat menghemat devisa dan mengurangi ongkos haji. Untuk keperluan ini, pada 1952, Wahid Hasyim sendiri sempat pergi ke Jepang guna menjajagi kemungkinan pembelian kapal. Namun rencana ini tidak diketahui akhirnya, karena kemudian terjadi pergantian Menteri. Namun hasil perjalanan Wahid Hasyim tersebut sudah dilaporkan kepada Kementerian Agama dan PHI.[26]

Selain yang berkaitan dengan haji ini, satu lagi kebijakan Wahid Hasyim yang perlu dicatat ketika menjadi Menteri Agama adalah dimulainya pelaksanaan perayaan hari besar Islam secara kenegaraan, tepatnya adalah Peringatan Maulid Nabi yang diadakan di Istana Negara pada 2 Januari 1950. Sejak saat itu, peringatan tersebut selalu diadakan di tempat yang sama dan dihadiri Kepala Negara.[27]

Pribadi dan Keluarga Wahid Hasyim

Wahid Hasyim datang dari keluarga yang sangat dihormati. Ayahnya adalah K.H. Hasyim Asy'ari, seorang ulama kharismatis yang terkenal ahli dalam bidang hadits dan tafsir. Bagi kalangan santri di Jawa dan pulau-pulau lain, nama Hasyim Asy'ari sangat dikenal luas dan dihormati. Bukan saja karena

---

[25]Deliar Noer, *Administration of Islam*, hal 53-64.

[26]Untuk laporan tersebut, secara lengkap dapat dibaca dalam H. Aboebakar, *Sejarah Hidup*, hal. 912-914.

[27]*Laporan Sejarah Departemen Agama*, hal. 48.

dia adalah pendiri dan sekaligus kiyai pengasuh Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, tapi karena ilmunya memang sangat dalam. Pengaruh K.H. Hasyim Asy'ari makin meluas karena banyak santrinya yang kemudian mendirikan pesantren setelah *ngaji* dengan beliau. Selain sebagai kiyai, dia juga dikenal sebagai salah satu pendiri dan ketua pertama Nahdlatul Ulama. Dia sering pula dipanggil dengan *Hadratus Syaikh*, guru yang mulia, di kalangan para santri. Ini menunjukkan penghormatan mereka yang tinggi kepada kiyai ini.[28]

K.H. Hasyim Asy'ari diceritakan memiliki lebih dari satu istri. Tapi istri yang melahirkan Wahid Hasyim, adalah Nafiqah putri Kyai Iljas, pemimpin Pesantren Sewulan Madiun. Ini berarti dari kedua jalur, Wahid Hasyim adalah keturunan kiyai. Meski bukan satu-satunya yang membentuk kepribadiannya, faktor genealogis ini menjadi cukup penting untuk memahami pribadi Wahid Hasyim, khususnya dalam hal kekentalannya dengan tradisi pesantren dan kecerdasannya yang luar biasa.

Wahid Hasyim adalah anak kelima dari pasangan K.H. Hasyim Asy'ari dan Nafiqah, dan merupakan anak laki-laki pertama dari 10 bersaudara. Dia dilahirkan pada hari Jum'at, 1 Juni 1914, di Tebuireng, Jombang, Jawa Timur.[29] Nama aslinya adalah Abdul Wahid, tapi ketika menginjak dewasa dia lebih suka menulis namanya dengan A. Wahid dan ditambah nama ayahnya dibelakangnya, sehingga menjadi A. Wahid Hasyim. Dan kemudian, dia lebih dikenal dengan Wahid Hasyim.

Ada cerita menarik sekitar bayi Wahid Hasyim. Ibunya setiap kali mengandung selalu payah. Kepayahan tersebut dirasakan lebih parah ketika dia mengandung Wahid Hasyim, sehingga dia khawatir jika bayi yang sedang dikandungnya itu tidak sempurna. Dalam suasana seperti itu, dia bernazar: seandainya bayinya itu selamat dan tidak tidak kurang suatu apa, dia akan

---

[28]Untuk memahami lebih detail tentang peran dan kehidupan K.H. Hasyim Asy'ari, lihat Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1982), hal.92-99.

[29]Tanggal lahir di sini merujuk pada H. Aboebakar, *Sejarah Hidup*, hal. 141. Namun ada pula yang menulis bahwa Wahid Hasyim dilahirkan pada 12 Februari 1913. Lihat, misalnya, *Risalah Sidang BPUPKI-PPKI* (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1995), pada bagian Biodata Anggota BPUPKI dan PPKI.

bawa berkunjung ke Kiyai Kholil, di Bangkalan, Madura, yang juga guru K.H. Hasyim Asy'ari. Tradisi nazar memang suatu hal yang biasa dalam tradisi pesantren, begitu juga mengunjungi rumah kyai terkenal. Nazar ini dilaksanakan ibunya ketika Wahid Hasyim berusia sekitar 3 bulan. Ketika mereka sampai di rumah Kyai Kholil, hari telah malam dan turun hujan. Namun apa yang terjadi? Mereka tidak dibenarkan masuk ke rumah tapi juga tidak dizinkan pergi dari situ. Mereka diminta untuk tetap di depan rumah sambil kehujanan. Ketika hujan makin deras, sang ibu meletakkan anaknya di lantai halaman rumah Kiyai Kholil, agar terlindung dari hujan, karena khawatir anaknya yang masih kecil itu akan sakit. Tapi Kiyai Kholil melarang hal ini dan memerintahkan sang ibu untuk mengambil kembali anaknya. Kejadian ini diyakini sebagai pertanda bahwa sang bayi akan menjadi orang yang luar biasa.[30]

Sebagai anak seorang kiyai terkenal, Wahid Hasyim tumbuh dan berkembang dalam lingkungan pesantren yang sarat dengan nilai-nilai keagamaan. Pendidikan dasarnya dilalui di lingkungan rumahnya. Saat itu memang sudah ada sekolah moderen yang diperkenalkan pertama kali oleh pemerintah penjajah dan diikuti organisasi-organisasi Islam, seperti Muhammadiyah. Tapi mereka yang mendapatkan kesempatan untuk belajar di lembaga pendidikan moderen tersebut masih sangat terbatas. Selain itu, jenis pendidikan tersebut, ketika Wahid Hasyim kecil, belum menyentuh pesantren. Tidak aneh bila dia tidak pernah duduk di bangku sekolah umum dan hanya belajar di madrasah yang ada di lingkungan pesantren orangtuanya pada pagi hari ditambah belajar langsung dengan ayahnya di malam hari. Kegiatan ini dijalaninya sampai usia 12 tahun.

Wahid Hasyim kecil adalah anak yang sangat cerdas dan gemar membaca. Dia tidak pernah mondok dalam pengertian yang sebenarnya, sebagaimana kebiasan anak-anak kiyai saat itu dan bahkan sampai sekarang. Dia memang sempat mondok di Pondok Siwalan Pandji, Sidoarjo, tapi hanya dalam hitungan hari. Demikian pula yang terjadi ketika dia mencoba mondok

---

[30]H. Aboebakar, *Sejarah Hidup*, hal. 141-143.

di Lirboyo, Kediri. Tapi berkat kecerdasan dan kegemarannya membaca, dia belajar banyak hal secara otodidak. Jadi, meski tidak pernah mondok, pada usia 16 tahun dia sudah mampu mengajar beberapa kitab, seperti *al-Durar al-Bahiya* dan *Kafrawi*.

Belajar secara otodidak juga dia lakukan dalam bidang-bidang lain. Misalnya, meski dia tidak pernah belajar di sekolah umum, dia bisa baca tulis huruf Latin. Demikian pula dalam bahasa Belanda dan Inggris. Dia belajar sendiri ketiga bidang tersebut dengan jalan berlangganan majalah-majalah dan membaca buku-buku yang ditulis dalam huruf Latin, baik berbahasa Melayu, Belanda, maupun Inggris. Di antara majalah yang dia berlangganan adalah *Penjebar Semangat, Daulat Rakjat, Pandji Pustaka, Sumber Pengetahuan*, di samping majalah-majalah berbahasa Arab, seperti *Ummul Qura* dan *Shautul Hijaz*.

Dalam usia 15 tahun, Wahid Hasyim betul-betul mulai keranjingan membaca. Dan karena hobinya inilah matanya menjadi agak rusak sehingga harus memakai kacamata. Namun hal itu tidak mengurangi kebiasaannya membaca, bahkan makin bertambah. Beruntung, dia adalah anak seorang kiyai terkenal yang secara ekonomi berkecukupan, sehingga kebiasaan ini tentu saja tidak menjadi masalah. Bagi banyak orang, dalam masa itu, mendapatkan bacaan-bacaan seperti tersebut tadi jelas bukan suatu hal yang mudah dan murah. Tapi dia bisa mendapatkannya secara berkala. Dan pengaruh banyak membaca ini ternyata cukup besar terhadap sikap dan tingkah laku Wahid Hasyim dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana akan dibahas lebih lanjut di bawah.

Selain pandai dan gemar membaca, Wahid Hasyim juga dikenal peramah dan pandai mengambil hati orang. Dia juga suka bergaul dengan siapa saja, tanpa memandang keturunan, pangkat dan jabatan dan suka menolong kawan. Wahid Hasyim juga dikenal sebagai orang yang sederhana. Bahkan ketika telah menjadi Menteri Agama-pun kesederhanaan tersebut tetap bagian dari sifatnya. Ini tampak, misalnya, dari kesediaan dia menerima tamu kapan saja dan di mana saja, tanpa harus bikin janji dulu. Pada saat itu ada pepatah bahwa kantor Menteri Kementerian Agama adalah mushalla sedang rumah Wahid Hasyim adalah hotel. Ini sekedar menunjukkan bagaimana bebas dan mudahnya orang datang dan menemuinya, baik itu di

kantor maupun di rumah.[31]

Di mata H.M. Isa Anshary, salah seorang pimpinan Persatuan Islam (Persis) saat itu, Wahid Hasyim adalah sosok pemimpin yang tenang dan dapat menyatukan berbagai aspirasi. Dia adalah organisator ulung, pandai dan bijaksana dalam memainkan "kartu" perjuangan. Kalau M. Natsir, di mata Isa Anshary, memiliki kejernihan dan ketajaman analisa, maka Wahid Hasyim memiliki pengetahuan dan kemampuan berorganisasi. Salah satu kebiasaan baik Wahid Hasyim yang dicatat Isa Anshary adalah dia selalu membalas surat-surat yang dia terima dari siapa saja dan menyimpannya dengan rapi.

Sebagai seorang manusia, Wahid Hasyim tidak lepas juga dari berbagai kekurangan dan kelemahan. Di mata K.H. Mohammad Dachlan, yang juga pernah menjadi Menteri Agama, Wahid Hasyim tidak dapat melepaskan diri dari kebiasaan anak seorang kiyai pada umumnya yang biasa mendapat pelayanan istimewa dari para santri orangtuanya. Bahkan ketika di Mekkah-pun, menurut Dachlan, Wahid Hasyim dilayani sebagaimana di Indonesia.[32] Dalam tradisi pesantren, kiyai adalah figur yang sangat dihormati. Penghormatan tersebut bahkan tidak hanya terbatas pada kiyai melainkan juga pada keluarga kiyai. Tradisi ini, oleh sebagian besar ahli, dianggap sebagai pengaruh besar dari kitab *Ta'lim al-Muta'allim*, sebuah kitab yang mengajarkan hubungan ideal antara guru dan murid.[33]

Wahid Hasyim mengakhiri masa lajangnya pada usia sekitar 25 tahun dengan menikahi Solehah binti K.H. Bisyri Syamsuri—pendiri dan pemimpin Pesantren Denanyar Jombang serta salah satu pendiri Nahdlatul Ulama dan pernah juga menjadi Rais Aam PBNU. Dari perkawinan ini Wahid Hasyim dikaruniai 6 anak, 4 putra dan 2 putri. Masing-masing adalah Abdurrahman Ad-Dachil (sekarang lebih dikenal dengan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur), Aisyah, Salahuddin al-Ayyubi, Umar, Chadijah, dan Hasyim. Sayang sekali, Wahid Hasyim tidak sempat mendidik anak-anaknya lebih lama karena ia meninggal dunia dalam usia relatif muda,

---

[31]H. Aboebakar, *Sejarah Hidup*, hal 201.

[32]H. Aboebakar, *Sejarah Hidup*, hal. 283-285.

[33]Mengenai pengaruh *Ta'lim al-Muta'allim* terhadap pesantren, lihat Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, hal. 82-85.

39 tahun, tepatnya pada 19 April 1953. Bahkan anak bungsunya lahir setelah dia meninggal. Namun kecerdasannya yang luar biasa tadi dan kepandaiannya berorganisasi paling tidak diwarisi oleh anak sulungnya yang sekarang menjadi Ketua Umum PBNU.

Aktivitas Sosial-Edukatif

Meski tidak pernah mengenyam pendidikan moderen, wawasan berfikir Wahid Hasyim dikenal cukup luas. Hal ini dapat diduga sebagai hasil dari luasnya bacaan dia, sebagaimana telah disinggung di atas. Wawasan ini kemudian diaplikasikan dalam kegiatan-kegiatan bersifat sosial dan pendidikan. Pada 1935, misalnya, bersama KH Iljas—yang kemudian juga menjadi Menteri Agama*—Wahid Hasyim mendirikan Madrasah Nizhamiyah[34] yang tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama tapi juga ilmu-ilmu umum, termasuk bahasa Belanda dan Inggris. Apa yang dilakukan Wahid Hasyim bersama teman karibnya ini jelas merupakan inovasi baru bagi kalangan pesantren. Pada saat itu, pelajaran umum masih dianggap hal tabu oleh pesantren karena dipandang identik dengan Barat atau penjajah yang memperkenalkan ilmu tersebut ke Indonesia. Kebencian mendalam terhadap penjajah membuat pesantren mengharamkan semua yang berkaitan dengannya, seperti memakai dasi dan topi, di samping ilmu pengetahuan umum tersebut. Tidak mengherankan bila Wahid Hasyim, khususnya, dan pesantren Tebuireng, umumnya, kemudian mendapat kritikan banyak pesantren karena langkah baru tadi. Namun Wahid Hasyim dengan yakin melanjutkan usahanya ini, karena dia melihat bahwa tidak semua yang datang dari Barat itu jelek atau tercela, apalagi dalam hal ilmu pengetahuan.

Usaha Wahid Hasyim ini juga dapat dilihat sebagai pengaruh dari perkembangan pendidikan saat itu. Sejak diperkenalkannya "politik etis" oleh Belanda—yang kemudian memberikan

---

[34]Tidak begitu jelas, kenapa Wahid Hasyim menggunakan nama Nizhamiyah, madrasah yang didirikan Nizham al-Muluk, Wazir Dinasti Saljuk. Madrasah Nizhamiyah, Baghdad, yang dikenal sebagai pusat pengajaran ortodoksi Sunni, terkenal dengan beberapa syaikhnya, seperti al-Juwayni (Imam al-Haramayn) dan al-Ghazali. Tentang Madrasah Nizhamiyah Baghdad, lihat Ali Anwar, *Madrasah Nizamiyah dan Perkembangan Ilmu-ilmu Islam*, Tesis M.Ag., Program Pascasarjana, IAIN Jakarta, 1997.

*Lebih jauh tentang K.H. Moh Iljas lihat bab khusus mengenai dia.

kesempatan belajar bagi sebagian kecil masyarakat Indonesia—dan didorong semangat pembaruan yang berasal dari Timur Tengah, umat Islam Indonesia pada akhir abad 19 dan awal abad 20 mulai mengembangkan sistem pendidikan moderen. Para pengelola pendidikan Islam tidak hanya mengubah pendidikan tradisional, seperti pesantren, ke bentuk madrasah atau pendidikan klasikal; sebagian mereka mengembangkan sistem pendidikan Barat yang dimuati nilai-nilai Islam, seperti dilakukan Muhammadiyah. Pada 1930-an telah dijumpai banyak sekolah moderen Islam yang mengajarkan ilmu pengetahuan umum ditambah dengan pelajaran-pelajaran agama. Hal inilah yang tampaknya ikut mempengaruhi Wahid Hasyim mendirikan Madrasah Nizhamiyah di atas.

Kemudian, Wahid Hasyim juga mendirikan taman bacaan di lingkungan pesantrennya. Semua buku dan majalah yang dia punyai ditempatkan dalam perpustakaan dan dia menganjurkan para santrinya untuk membacanya. Apa yang dilakukan Wahid Hasyim ini adalah untuk mendukung idenya bahwa umat Islam, khususnya generasi muda, harus banyak membaca. Wahid Hasyim berpendapat, bahwa umat Islam terbelakang dan dikuasai umat agama lain karena kurang membaca. Memang, kalangan pesantren telah menjadi kelompok terpelajar saat itu, tapi pengetahuan mereka terbatas hanya pada apa yang dianggap sebagai ilmu-ilmu agama. Sumber-sumber yang mereka baca juga terbatas pada kitab-kitab berbahasa Arab. Hal ini, di mata Wahid Hasyim, belum cukup karena ilmu yang berkembang di masyarakat tidak terbatas pada lapangan keagamaan. Karena itu, inovasi ini menjadi sangat penting dalam upaya memenuhi tuntutan zaman yang sedang berkembang.

Pengaruh lain yang datang dari kesukaan membaca tadi adalah partisipasi aktif Wahid Hasyim dalam dunia pergerakan. Sebagaimana diketahui, pada masa itu telah tumbuh dan berkembang berbagai perkumpulan, seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, al-Irsyad, dan NU. Meski motif awal pendirian organisasi-organisasi tersebut berbeda-beda, tapi selanjutnya mereka disatukan oleh semangat yang sama, yakni nasionalisime Indonesia. Hal ini terjadi khususnya setelah diikrarkannya Sumpah Pemuda pada 1928. Salah satu hal penting yang dipahami Wahid Hasyim dari munculnya ber-

bagai perkumpulan saat itu adalah pentingnya berorganisasi. Dengan organisasi, sekelompok manusia disatukan berdasarkan latar belakang dan tujuan yang sama dan selanjutnya secara bersama-sama berusaha mencapai tujuan tersebut. Hal inilah yang kemudian mendorong Wahid Hasyim mendirikan Ikatan Pelajar-pelajar Islam pada 1936. Meski sifatnya lokal, anggotanya mencapai lebih dari 300 orang. Tujuan utama pembentukan organisasi ini adalah, sekali lagi, untuk memasyarakatkan budaya baca di kalangan para anggotanya. Dari organisasi yang kecil ini Wahid Hasyim kemudian melanjutkan keterlibatannya dalam organisasi-organisasi berskala nasional, seperti NU dan Masyumi.

Aktivitas di Nahdlatul Ulama

Aktivitas Wahid Hasyim dalam organisasi makin diperluas. Pada 1938, dia mulai aktif dalam NU. Sebagai anak dari salah satu pendiri dan sekaligus Rais 'Am NU, wajar kalau Wahid Hasyim memilih organisasi "tradisional" ini. Bahkan tidak terbayangkan seandainya Wahid Hasyim tidak memilih NU. Jadi, faktor lingkungan dan keluarga tampaknya sangat menentukan. Memang, ada tulisan Wahid Hasyim berjudul "Mengapa Saya Memilih NU" di mana dia menyebutkan beberapa alasan memilih NU. Tapi kalau dikaji lebih dalam, munculnya tulisan tersebut berkaitan erat dengan kampanye NU sebagai partai menjelang Pemilu 1955.[35]

---

[35]Dalam tulisan tersebut, Wahid Hasyim menjelaskan, paling tidak ada empat faktor yang menyebabkan dia bergabung dengan NU. Pertama, keberhasilan NU mengembangkan organisasi dalam waktu singkat dan meliputi daerah yang luas. Kedua, anggotanya punya mentalitas tinggi, meski tidak punya kaum terpelajar yang banyak. Ketiga, NU memperhatikan pelaksanaan ajaran-ajaran Islam. Dan keempat, adanya ulama yang terus menjaga ajaran Islam. Faktor kiyai, yang dulunya dianggap sebagai penghambat keberhasilan NU, justru menjadi kunci keberhasilannya. Lihat Aboebakar, *Sejarah Hidup*, hal. 739-741. Namun secara keseluruhan, sulit memperlakukan tulisan tersebut sebagai alasan riel bergabungnya Wahid Hasyim dalam NU. Apalagi jika dilihat bahwa tulisan tersebut muncul dalam *Gema Muslimin*, November 1953, atau lebih dari enam bulan setelah Wahid Hasyim wafat. Selain itu, Aboebakar sendiri menyantumkan catatan bahwa tulisan tersebut disusun oleh A. Sjahri, Sekjen PBNU saat itu. Karena itu, sangat mungkin tulisan tersebut dibuat untuk kepentingan kampanye Partai NU.

Karir pertama Wahid Hasyim dalam NU adalah menjadi sekretaris NU Ranting Cukir, tingkatan paling bawah dalam struktur organisasi NU. Tidak lama kemudian dia menjadi Ketua NU Cabang Jombang. Dua tahun kemudian dia diserahi tugas memimpin Bagian Ma'arif (pendidikan dan pengajaran) Pengurus Besar NU yang berkedudukan di Surabaya. Karir Wahid Hasyim dalam organisasi melesat cepat. Faktor genealogis Wahid Hasyim, sebagai putra Kiyai Hasyim Asy'ari, jelas mempunyai pengaruh dalam hal ini, namun itu bukan alasan utama. Kemampuan dia sendiri dalam berorganisasi tampaknya sangat menentukan dalam penunjukannya memimpin organisasi tersebut. Ini terbukti dari keberhasilannya menyusun dan mengembangkan fungsi Ma'arif dalam lingkungan NU. Hasilnya, salah satu tugas utama Ma'arif adalah mengembangkan madrasah-madrasah di lingkungan NU, baik kualitas maupun kuantitas. Secara lebih lengkap, kewajiban dan hak bagian ini adalah "mengusahakan, memelihara, mengurus, dan membereskan hal-ikhwal sekolah-sekolah NU seluruhnya."[36]

Sayang sekali Wahid Hasyim tidak sempat melaksanakan ide-ide besarnya dalam bidang pendidikan karena kondisi politik, keamanan dan ekonomi saat itu, yang masih berada dalam genggaman penjajah, kurang mendukung. Selain itu, dia sendiri juga kemudian banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik, baik dalam MIAI yang kemudian menjadi Masyumi, dalam pemerintahan Jepang, maupun karena jabatannya dalam pemerintahan RI setelah kemerdekaaan. Tambahan lagi, secara organisatoris, NU kemudian juga menjadi organisasi politik, sehingga perhatian organisasi ini lebih tercurah pada politik sedang lapangan pendidikan kurang, atau bahkan tidak, mendapat perhatian.

Selama aktif di NU, Wahid Hasyim juga sering menulis dalam berbagai penerbitan NU, seperti *Suara NU* yang menggunakan huruf Arab *pegon*, dan *Berita NU* yang menggunakan huruf latin. Bahkan dia sendiri kemudian menerbitkan dan

---

[36]Aboebakar, *Sejarah Hidup*, hal. 164.

memimpin *Suluh NU* yang khusus digunakan untuk menyebarluaskan ide-ide pembaruan dalam bidang pendidikan Islam.

Peran Wahid Hasyim dalam NU menjadi kontroversial ketika organisasi ini memutuskan keluar dari Masyumi pada 1952 dalam Muktamarnya ke-19 di Palembang. Keputusan yang merupakan buntut dari tidak terpilihnya orang NU menjadi Menteri Agama ini kemudian menimbulkan silang pendapat mengenai siapa yang "bersalah" dalam keluarnya NU dari Masyumi. Kalangan NU, pada umumnya, berpendapat bahwa kesalahan ada pada pimpinan Masyumi. Sebaliknya, Masyumi menyalahkan para pemimpin NU.[37] Wahid Hasyim, yang saat itu baru saja selesai menjadi Menteri Agama selama tiga periode berturut-turut dan kritikannya yang tajam terhadap Masyumi jauh sebelum keputusan tersebut dibuat, menimbulkan spekulasi bahwa Wahid Hasyim-lah yang menjadi insiator perpecahan ini. Dari sini kemudian timbul desas-desus di kalangan Masyumi, ketika Wahid Hasyim meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil, bahwa dia kena tuah ayahnya sendiri yang dikabarkan pernah berkata bahwa siapa yang akan memecah belah Masyumi maka dia sendidi akan mati terbelah.

Spekulasi dan desas-desus tersebut berlebihan kalau melihat kiprah Wahid Hasyim selama hidupnya. Demi kepentingan persatuan, dia tidak hanya rela mengorbankan kepentingan kelompoknya, NU, tapi kalau perlu juga aspirasi agama, seperti terjadi pada sehari setelah proklamasi kemerdekaan RI, 18 Agustus 1945, sebagaimana akan dibahas di bawah. Dalam kasus Masyumi, Wahid Hasyim justru mengusulkan beberapa langkah untuk menghindari perpecahan tersebut, antara lain agar Masyumi melakukan reorganisasi dengan menjadi organisasi federatif, di mana anggotanya adalah organisasi-organisasi dan bukan campur aduk antara organisasi dan pribadi seperti kondisi saat itu.[38]

---

[37]Lihat, misalnya, M. Ali Haidar, *Nadhatul Ulama dan Islam di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1994), hal.101-110 untuk mewakili mereka yang membela NU dan Deliar Noer, *Partai-partai Islam di Pentas Nasional*, khususnya hal. 61-62, untuk mewakili mereka yang menyalahkan NU.

[38]Aboebakar, *Sejarah Hidup*, hal. 491-493.

Aktif dalam Pergerakan

Dari kedudukannya sebagai pengurus NU, Wahid Hasyim kemudian ditarik Jepang dan aktif dalam Masyumi, Shumubu (Kantor Urusan Agama), BPUPKI dan PPKI, serta dalam pemerintahan pasca kemerdekaan sebagai menteri.

Sebagaimana diketahui, setelah mengalahkan tentara Sekutu dan menduduki wilayah Indonesia, Jepang pertama kali melarang semua organisasi yang ada, baik yang bersifat politik maupun tidak. Dua organisasi yang diizinkan tetap beroperasi hanya NU dan Muhammadiyah. Berbeda dengan penjajah sebelumnya, Belanda, Jepang memilih bekerjasama dengan kalangan agama, khususnya umat Islam. Sebab itu umat Islam mendapatkan banyak "konsesi" dan menggantikan "posisi" kalangan bangsawan dan priyayi pada masa Belanda. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat Jepang yang menerapkan kebijakan memilih bekerjasama dengan kalangan agama di daerah-daerah yang didudukinya. Wahid Hasyim yang saat itu bisa dikatakan sebagai *the rising star* NU, segera mendapat tawaran menduduki beberapa pos penting.

Pos pertama yang diduduki Wahid Hasyim adalah Wakil Ketua Masyumi, sementara Ketua Masyumi saat itu dijabat ayahnya, K.H. Hasyim Asy'ari. Karena K.H. Hasyim Asy'ari tetap memilih tinggal di Jombang, memimpin pondok pesantrennya, maka yang menjalankan tugas sehari-hari adalah Wakil Ketua. Ada dua Wakil Ketua, yakni Wahid Hasyim dan K.H. Mas Mansur dari Muhammadiyah. Namun pada Januari 1944, K.H. Mas Mansur mengundurkan diri dari jabatannya karena kegiatan-kegiatan politiknya. Sebagai penggantinya, diangkat Abdul Mukhti. Akibat penggantian tersebut, praktis Wahid Hasyim lebih dominan dalam memimpin organisasi ini.[39]

Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) pertama kali didirikan pada Oktober 1943 sebagai ganti dari MIAI (Majlis al-Islam al-A'la Indonesia). MIAI sendiri yang didirikan pada 1937 dalam Kongres Islam adalah federasi organisasi-organisasi Islam yang sangat anti kolonial dan non-koperatif terhadap penjajah. Karena latar belakang itulah pemerintah Jepang merasa

---

[39]Benda, *The Crescent and the Rising Sun*, hal 262-263, note 6.

perlu membubarkan organisasi ini dan menggantinya dengan Masyumi sebab khawatir karakter anti penjajah tadi akan berubah menjadi anti Jepang.[40] Dengan demikian, keberadaan Masyumi, yang kelahirannya atas inisiatif Jepang, diharapkan tidak akan menentang, bahkan kalau bisa mendukung, keberadaan Jepang di Indonesia.

Jabatan kedua yang dipegang Wahid Hasyim pada masa pendudukan Jepang adalah menjadi Wakil Kepala Kantor Urusan Agama Pusat, Shumubu. Sekali lagi, di sini yang menjabat sebagai kepalanya adalah K.H. Hasyim Asy'ari. Karena alasan yang sama, Wahid Hasyim-lah yang bertindak sebagai pelaksana sehari-hari, bersama-sama Abdul Kahar Muzakkir dari Muhammadiyah. Atas permintaan ayahnya, Wahid Hasyim bertindak sebagai wakil ayahnya secara permanen. Dengan demikian, pengaruh Wahid Hasyim dalam kantor ini menjadi makin penting. Pengalaman memimpin Shumubu pula yang memberikan banyak pelajaran kepada Wahid Hasyim, sehingga ketika menjadi Menteri Agama dia sudah memahami tugas kementeriannya.

Shumubu dapat dikatakan kelanjutan dari Kantoor vor Inlandse Zaken (Kantor Urusan Pribumi) pada masa Belanda. Pembentukan Shumubu juga terkait erat dengan kebijakan Jepang dalam menangani umat Islam di Indonesia. Lembaga ini pertama kali dipimpin orang Jepang, Kol. Horie, kemudian digantikan Hoesain Djajadiningrat. Sesuai dengan perubahan kebijakan Jepang yang lebih konsiliatori terhadap kalangan Islam, lembaga ini mengalami reorganisasi; K.H. Hasyim Asy'ari kemudian diangkat sebagai Kepala Shumubu. Kantor ini kemudian bertanggung jawab menghubungkan antara pihak pemerintah dengan kalangan Islam, sekaligus menyampaikan propaganda pemerintah Jepang kepada penduduk pribumi. Karena itu, beberapa latihan, seperti Latihan Kyai dan Latihan Guru Madrasah, yang semuanya bertujuan agar para peserta memahami dan mendukung posisi Jepang, dikoordinasi oleh lembaga ini.[41]

---

[40]Boland, *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*, hal. 11.

[41]C.A.O van Nieuwenhuijze, *Aspects of Islam in Post-Colonial Indonesia*, (The Hague: W. van Hoeve, 1958), hal. 109-159. Lihat juga Kobayashi Yasuko, "Kyai and Japanese Military," *Studia Islamika*, Vol. 4, No. 3, 1997, hal. 89-92.

Dengan menerima jabatan dalam kedua lembaga tersebut, tidak langsung berarti bahwa Wahid Hasyim menjadi kolaborator Jepang. Memang keduanya adalah kreasi Jepang dan pada dasarnya dimaksudkan untuk mendukung keberadaan pemerintah penjajah. Namun, Wahid Hasyim juga mempunyai agenda tersendiri dengan aktif dalam kedua lembaga tadi. Dia mengatakan:

> Dalam perjuangan bisa belaku tipu-menipu. Musuh menipu kita dan kita memakai akal, sehingga siapa memperalat siapa... Di kalangan santri, Nippon yang oleh Jepang harus diucapkan *nippong*, itu diartikan "*nipu wong*". Mereka katanya akan membebaskan kita dari penjajahan Belanda. Itu memang benar kita dibebaskan, tidak lagi dijajah Belanda, tetapi apakah setelah bebas dari Belanda kita jadi merdeka ataukah dijajah mereka, itu tidak mereka katakan. Inilah bentuk penipuannya. Masa kita tidak bisa membalas mengakali mereka?[42]

Jadi, dia menerima "kebaikan" Jepang tersebut, tapi ia gunakan untuk kepentingan bangsa sendiri. "Prinsipnya kita membantu kita sendiri. Kita membantu diri kita melalui kesempatan yang mereka berikan kepada kita. Mungkin, dan ini pasti, mereka akan memperalat kita. Tetapi kita bukan benda mati. Yang penting kita pergunakan sebaik-baiknya kesempatan yang mereka berikan."[43] Dari sini Wahid Hasyim kemudian melakukan transformasi besar-besaran peran kiyai, sehingga mereka memahami dan terlibat dalam politik dan pemerintahan. Selain itu, Wahid Hasyim juga merekrut tenaga-tenaga muda yang kritis terhadap penjajah, seperti M. Natsir dan Prawoto Mangkusasmito untuk aktif dalam Masyumi sehingga lembaga yang dipimpinnya tidak sekedar perpanjangan tangan Jepang.[44] Kebaikan Jepang justru dimanfaatkan untuk memperkuat pertahanan rakyat, dengan antara lain mendorong terbentuknya Hizbullah dan Sabilillah.

Berkat peran menonjol Wahid Hasyim tersebut, ketika Jepang

---

[42]Seperti dikutip Saifuddin Zuhri dalam *Guruku Orang-orang dari Pesantren*, (Bandung: Almaarif, t.t.), hal. 173

[43]Saifuddin Zuhri, *Guruku Orang-orang dari Pesantren*, hal. 173.

[44]Aboebakar, *Sejarah Hidup*, hal. 331-332.

membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dia menjadi salah satu anggota dan termuda. Sebagaimana diketahui, ketika Jepang makin terdesak oleh tentara Sekutu di beberapa wilayah, mereka menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia, dengan harapan mendapat bantuan rakyat Indonesia dalam peperangan yang diperkirakan akan pecah dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sebab itu, badan ini diberi tugas mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan persiapan kemerdekaan. Badan ini mengadakan dua kali rapat. Pertama, tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 dan kedua pada 10-17 Juli 1945. Dalam sidang pertama, badan ini membicarakan dasar-dasar negara Indonesia yang akan lahir. Dalam rapat ini, Wahid Hasyim adalah salah satu peserta yang menghendaki agar negara yang akan dibentuk berdasarkan Islam mengingat Islam adalah agama mayoritas penduduk Indonesia. Mereka dikenal dengan golongan Islam. Sementara itu, sebagian peserta lain menghendaki agar negara yang akan dibentuk tidak berdasarkan pada agama tertentu karena adanya fakta bahwa selain umat Islam terdapat pula penganut agama lain di nusantara ini. Yang terakhir ini dikenal dengan golongan nasional—meski sebagian besar anggota golongan ini juga beragama Islam. Rapat ini berakhir dengan dibentuknya Panitia Sembilan, di mana Wahid Hasyim menjadi salah satu anggotanya, yang bertugas merumuskan hasil akhir berdasarkan usulan-usulan peserta sidang. Panitia kecil ini akhirnya berhasil merumuskan rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar yang kemudian lebih dikenal sebagai Piagam Jakarta. Dalam piagam tersebut, tercantum satu kalimat yang di kemudian hari menimbulkan kontroversi, yakni sila pertama: "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Bagi Panitia Kecil, rumusan ini dianggap sebagai jalan tengah yang paling maksimal dari kedua aspirasi besar tadi.

Rapat kedua yang mestinya membicarakan isi Undang-Undang Dasar sempat diawali perdebatan sekitar Piagam Jakarta tersebut tadi. Namun berkat campur tangan Soekarno, isi piagam tersebut dapat diterima sebagaimana adanya. Selanjutnya mereka membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Sekali lagi, Wahid Hasyim menjadi bagian dari mereka yang mengusulkan agar negara berdasarkan Islam. Mereka, antara lain, men-

gusulkan agar Presiden harus orang Indoensia asli dan beragama Islam. Dalam pasal lain, diusulkan pula bahwa agama negara adalah Islam. Setelah perdebatan yang panjang, kalangan nasionalis atas himbauan Soekarno menerima tuntutan umat Islam saat itu.

Dua kasus di atas menunjukkan bahwa Wahid Hasyim adalah orang yang gigih mengusulkan agar Indonesia menjadi negara yang berdasarkan Islam. Namun Islam bukan harga mati bagi dia. Ini terbukti ketika pada satu hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, Wahid Hasyim tanpa berbelit-belit dapat menerima usulan yang diajukan Mohammad Hatta agar segala rumusan yang memuat Islam secara eksplisit dihapuskan dari Pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar, karena disinyalir ada keberatan dari penduduk Indonesia bagian timur yang tidak ingin bergabung dengan Indonesia merdeka jika berdasarkan Islam.[45] Di sinilah peran Wahid Hasyim cukup penting dalam ikut menyelamatkan persatuan bangsa Indonesia. Tidak terbayangkan apa yang terjadi seandainya Wahid Hasyim menolak usulan tersebut—suatu hal yang secara teoritis sangat mungkin jika dikaitkan dengan perannya selama sidang BPUPKI. Namun semua itu tidak terjadi karena bagi Wahid Hasyim, persatuan bangsa yang baru saja merdeka jauh lebih penting dari pengakuan formal terhadap Islam. Sebelum sidang BPUPKI, Wahid bahkan telah menekankan hal ini:

> Sejarah masa lampau kami telah menunjukkan bahwa kami belum mencapai kesatuan. Demi pentingnya kesatuan ini, yang sangat kami perlukan secara mendesak dan dalam usaha untuk membangun negara Indonesia kita, di dalam pikiran kami pertanyaan yang terpenting bukanlah "Di manakah akhirnya tempat Islam [di dalam negara itu]?" akan

---

[45]Memang terjadi perbedaan pendapat, apakah Wahid Hasyim hadir dalam rapat tanggal 18 Agustus 1945 itu. Prawoto mengatakan tidak karena Wahid Hasyim sedang berada di luar Jakarta, sementara Hatta yakin dia ada dalam rapat tersebut. Lihat Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional* (Jakarta: Grafiti, 1987), hal. 39-43. Tapi Andrée Feillard yang menulis tentang NU berani memastikan bahwa Wahid Hasyim hadir dalam rapat tersebut. Lihat Johan Hendrik Meuleman, "NU: Pergumulan Islam dan ABRI di Masa Kontemporer," *Studia Islamika*, Vol. 4 No. 1, 1997, hal. 220, *cf* 4.

> tetapi pertanyaan yang terpenting adalah "Dengan jalan manakah akan kami jamin tempat agama [kami] di dalam Indonesia Merdeka?" Karena itu sekali lagi saya ulangi: Yang sangat kita butuhkan saat ini adalah persatuan bangsa yang tak terpecahkan.[46]

Dari sini dapat disimpulkan bahwa Wahid Hasyim adalah seorang Muslim yang demokrat. Dalam salah satu tulisannya, dia mengatakan "tiap-tiap Muslim mesti demokrat, karena agama Islam adalah agama demokratis."[47] Sifat demokrat tersebut juga ditunjukkan fakta bahwa Wahid Hasyim tidak pernah mempersoalkan lagi dasar negara yang disahkan pada 18 Agustus tadi. Yang dilakukan Wahid Hasyim justru adalah bagaimana menempatkan aspirasi kalangan agama, tidak hanya Islam, dalam negara Indonesia moderen melalui institusi Kementerian Agama.

---

[46]"Agama dalam Indonesia Merdeka," dalam *Indonesia Merdeka*, I, 3 (25 Mei 1945), hal. 3, sebagaimana dikutip dalam Benda, *The Crescent*, hal. 189.

[47]H. Aboebakar, *Sejarah Hidup*, hal 887.

K. H. Fakih Usman:

Pengembangan Pendidikan Agama

Didin Syafruddin

Fakih Usman adalah sosok yang sangat gemar akan ilmu pengetahuan. Sejak baru keluar dari pesantren, kecintaannya kepada ilmu pengetahuan kian berkembang. Namun ayahnya mendorong untuk membantu usahanya dalam galangan kapal. Begitu Muhammadiyah datang ke Gresik, ia segera aktif di dalamnya, seolah memperoleh iklim yang ia dambakan. Semakin aktif ia di organisasi ini, semakin terdorong ia untuk terjun ke dunia pergerakan. Ia lalu giat di Muhammadiyah Surabaya, MIAI, Masyumi, dan Muhammadiyah Pusat. Dengan kegiatan ini, semangatnya untuk belajar makin menjadi-jadi. Sewaktu di Surabaya, ia belajar bahasa Belanda. Bahkan ia juga mengadopsi sebagian budaya Belanda seperti memakai celana panjang dan jas, sehingga masyarakat menyindirnya dengan sinis sebagai *Londo silit ireng* atau Belanda berpantat hitam.

Ia sangat menyesal bahwa dirinya tidak berkesempatan mengikuti pendidikan sekolah. Karena itu, begitu ia membaca klausul *Staatblad* yang membolehkan seseorang mengikuti sekolah umum asal membayar pajak, ia langsung mendorong saudaranya untuk sekolah. Anak-anaknya pun ia dorong sekolah sehingga semua anaknya (7orang) berpendidikan tinggi: satu HIK, 5 dokter dan satu sarjana ekonomi. Agenda pendidikan ini kemudian tidak hanya menjadi agenda pribadi atau keluarganya, melainkan juga menjadi salah satu agenda penting saat ia menjadi Menteri Agama. Ia men-

curahkan perhatian besar pada pendidikan dan penataan organisasi Kementerian Agama. Namun, tidak bisa optimal karena menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan dana. Selain itu, hal paling menghambat ialah usia kabinet yang pendek karena konflik antarpartai.

Lingkungan Santri dan Pedagang

Fakih Usman dilahirkan pada 2 Maret 1904 di Gresik.[1] Tepatnya di Jalan Kemuteran yang sekarang telah diganti dengan namanya sendiri, yakni Jalan Fakih Usman.

Gresik adalah kota pelabuhan, yang masyarakatnya telah lama mengenal Islam. Pada masa Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-13 dan ke-14, kota ini menjadi pelabuhan niaga yang penting. Pelbagai perdagangan hasil pertanian antar pulau menuju ke wilayah Jawa Timur berlangsung melalui pelabuhan ini. Fungsi pelabuhan terus berlangsung sampai sekarang, walaupun tidak sesibuk Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Kota Gresik telah disebut dalam laporan perjalanan yang ditulis Ma-huan dalam naskah *Ying-yai Sheng Lan* akhir abad ke-14. Nama Gresik juga disebut-sebut sebagai salah satu daerah Islam oleh Pigafetta, pengarang Portugis abad ke-16. Wilayah Gresik juga terkenal karena di sana terdapat makam Maulana Malik Ibrahim, yang hingga kini ramai diziarahi orang. Terdapat juga makam Sunan Giri, salah seorang Wali Sanga lainnya yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15 dan ke-16.[2]

Lingkungan keluarga Fakih Usman adalah perpaduan santri dan pedagang. Ibunya adalah anak seorang ulama. Sedang ayahnya, Usman Iskandar, adalah pedagang. Sebagai keluarga ulama, ayah-ibunya sangat memperhatikan pendidikan agamanya. Karena itu, Fakih Usman kecil sudah mendapat pelajaran baca al-Qur'an dan dasar-dasar agama dari orangtuanya. Dari usia 10-14 tahun (atau 1914-1918), ia melanjutkan pelajaran ke beberapa pesantren yang

---

[1]Gresik adalah sebuah kota yang awalnya bagian dari Kabupaten Surabaya namun sejak 1975 telah menjadi kabupaten sendiri.

[2]*Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid 6 (Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1989), hal. 233.

ada di sekitar kota Gresik. Kemudian pada 1918-1922, ia belajar ke pesantren yang berada di luar kota Gresik.[3] Di antaranya, ke Pondok Pesantren Maskumambang di Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, yang sekarang telah menjadi pesantren moderen Muhammadiyah.

Pendidikan pesantren Fakih Usman terbatas di daerah-daerah Gresik. Ia tidak melanjutkan ke pesantren-pesantren besar yang ada di Jawa Timur. Juga tidak meneruskan ke Mekkah seperti Wahid Hasyim (1914-1953),* putera Hasyim Asy'ari dari Jombang atau al-Azhar seperti Mahmud Yunus (1899-) dari Minangkabau. Hal itu barangkali karena orangtuanya tidak memimpikan anaknya untuk menjadi ulama atau kiyai besar model Jawa Timur. Ayahnya, sebagai pedagang kayu dan pengusaha galangan kapal bahkan banyak mempercayakan usahanya kepada Fakih Usman, padahal ia mempunyai tiga kakak dan seorang adik.

Ketika Fakih Usman remaja, bongkar-muat kapal di pelabuhan Gresik sangat aktif karena lalulintas perdagangan masih melalui pelabuhan ini. Keadaan ini tentunya sangat menguntungkan usaha ayahnya dalam bidang kayu dan galangan kapal. Karena dengan demikian kapal masih sangat dibutuhkan. Sehingga setamat dari pesantren, Fakih Usman banyak membantu ayahnya. Taraf ekonomi keluarga Fakih Usman semakin baik dengan perkembangan pelabuhan yang demikian ramai.

Namun, Fakih Usman sendiri rupanya mempunyai obsesi untuk terus mengembangkan pengetahuan. Ini terutama setelah belajar di pesantren Kiyai Cholil, Gresik. Guru ini diceritakan berpikiran maju sehingga pesantrennya kurang laku atau santrinya hanya sedikit. Melalui guru inilah tampaknya pandangan dan wawasan Fakih Usman terbuka luas.[4] Sejak itu, Fakih Usman memilih belajar secara otodidak.

---

[3]*Kementrian Agama 10 Tahun: 3 Djanuari 1946-3 Djanuari 1956* (Jakarta: Kementrian Agama,tt.).

[4]Wawancara dengan Ismed Usman, putera kelima Faqih Usman, pada 22 Oktober 1997. Ia adalah dokter spesialis anak di Rumah Sakit Islam Jakarta dan dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

*Lihat bab tentang Wahid Hasyim

Muhammadiyah Gresik

Pada saat Fakih Usman aktif dalam dunia dagang dan tekun belajar secara otodidak, sekitar 1920-an dan 1930-an, di Surabaya, seperti juga di Jakarta dan Bandung, dinamika pergerakan kebangsaan tengah berkembang, baik di kalangan nasionalis sekuler maupun nasionalis Muslim. Ini terutama berkat penerapan "politik etis" pada 1901 oleh pemerintah Belanda dengan memberikan kesempatan terbuka bagi pribumi dalam bidang pendidikan. Berdasarkan kebijakan itu, pemerintah kolonial membuka HIS (SD), MULO (SLTP), OSVIA (Sekolah Penyiapan Pamong Praja), STOVIA (Sekolah "Dokter Jawa") dan NIAS, Sekolah Teknik, Sekolah Hukum. Di samping itu, pemerintah juga memberi kesempatan kepada bumiputra untuk melanjutkan pendidikannya di Eropa (Belanda). Hasilnya, walaupun terbatas di kalangan priyayi, pegawai pemerintah, dan pengusaha kaya, mulai terbentuk lapisan terpelajar pribumi yang menyadari hak-haknya sebagai warga negara.

Sementara di kalangan Muslim sendiri, pada saat itu mulai berdatangan mereka yang belajar di Mekkah dan Kairo yang membawa paham baru dan lebih cocok dengan dunia moderen. Mereka menyadari perlunya perjuangan hak-hak bagi masyarakat apalagi bagi kaum Muslim yang dalam masa kolonial selalu memperoleh perlakuan diskriminatif. Dalam mewujudkannya, mereka meyakini bahwa aspirasi mereka tidak sepenuhnya sama dengan mereka yang tamat dari lembaga pendidikan kolonial Belanda. Karena itu, mereka memandang perlu mengembangkan organisasinya sendiri.

Pada awal abad ke-20 itulah pelbagai organisasi bermunculan. Tahun 1908, Budi Utomo didirikan oleh mahasiswa kedokteran STOVIA di kota Jakarta dengan tujuan meningkatkan keterpelajaran bangsa Indonesia, khususnya suku Jawa. Sarikat Dagang Islam (kemudian menjadi Sarikat Islam) didirikan di Surakarta pada 1911. Pembentukannya dimaksudkan sebagai usaha konsolidasi pedagang pribumi (Muslim) yang terancam pedagang Cina. Pada 1912, Kiyai Ahmad Dahlan, alumni Mekkah, mendirikan Muhammadiyah di Yogyakarta. Missi utamanya ialah untuk mengembangkan ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada 30 Januari 1926, kalangan Muslim tradisional mendirikan NU yang bertujuan mempertahankan dan mengembangkan pemahaman dan praktek Islam yang bersumber dari kitab-kitab klasik yang mereka anggap mulai

terancam oleh perkembangan kalangan pembaru Islam seperti Muhammadiyah, Sarikat Islam maupun al-Irsyad.

Walaupun pembentukan pelbagai organisasi tersebut berlangsung di tempat yang berbeda-beda, namun gerakannya atau pengaruhnya meluas ke seluruh daerah, terutama di kota-kota besar di Pulau Jawa seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Surakarta, Semarang dan Yogyakarta. Interaksi yang begitu cepat antar pelbagai wilayah itu disebabkan transportasi yang semakin mudah dan kesadaran rakyat Indonesia yang semakin kuat dalam menghadapi pemerintah kolonial. Dalam kurun ini, peristiwa yang terjadi di suatu daerah dengan cepat menggema ke tempat lain. Apalagi pelbagai organisasi tersebut membuka cabangnya di pelbagai daerah. Kongres-kongres pelbagai pergerakan pun sering berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Sehingga pergerakan kebangsaan pada perempat pertama sudah bergema secara nasional.

Surabaya pada awal dekade ketiga merupakan salah satu pusat pergerakan nasional. Pemerintah kolonial Belanda juga membuka sekolah-sekolah di kota ini. Pada tahun 1932, telah terdapat MULO (SMP), Sekolah Teknik, HBS, Sekolah Dokter (NIAS).[5] Untuk lembaga pendidikan Islam, Surabaya jelas merupakan basis utamanya. Di lingkungan wilayah inilah, ulama-ulama besar seperti Hasyim Asy'ari, Wahid Hasyim dan Mas Mansur dibesarkan. Karena Surabaya merupakan pusat pendidikan, kota ini juga menjadi salah satu pusat pergerakan kebangsaaan.

Pada 1913, Kongres Sarekat Islam yang diketuai Tjokroaminoto, tamatan OSVIA, diselenggarakan di kota ini. Muhammadiyah sementara itu telah mendapat sambutan sebagian Muslim di Surabaya. Dua pembaru Islam di Surabaya, yakni Mas Mansur (1896-1946) dan Faqih Hasyim, pedagang pembaru Islam dari Minangkabau, bersama Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah di Surabaya pada 1 November 1921.[6] Dari kalangan nasionalis, Dr. Sutomo, sepulang dari Belanda pada 1923, selain mengajar di Sekolah Dokter (NIAS), juga mendirikan *Indonesiasche Studiclub*, sebuah ke-

---

[5]Yayasan Gedung Bersejarah, *45 Tahun Sumpah Pemuda* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1974), hal. 153.

[6]Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3S, 1990), hal. 88 dan 247.

lompok studi yang bertujuan mengkonsolidasi lapisan intelektual dalam masyarakat Indonesia, di Surabaya.[7] Pendirinya meyakini bahwa hanya dengan jalan inilah perjuangan nasional akan dapat diwujudkan. Kelompok ini nantinya akan menjadi model yang dikembangkan di pelbagai sekolah tinggi, termasuk di Sekolah Teknik Bandung, di mana Soekarno menjadi salah seorang eksponen utamanya.

Organisasi-orgnisasi tersebut kemudian memperluas basis keanggotannya. Muhammadiyah Surabaya terus memperluas kegiatannya ke kota Gresik, yang saat itu masih menjadi bagian Surabaya. Fakih Usman adalah salah seorang yang pertama menyambut kedatangan Muhammadiyah di Gresik. Sejak 1922, ia aktif dalam kegiatan persyarikatan ini.[8] Ia seolah mendapat penyaluran atas obsesinya selama ini. Pada 1925, Fakih Usman muda dipercayakan menjadi Ketua Group Muhammadiyah Gresik. Ia pun semakin terlibat dalam wacana keagamaan Muhammadiyah yang lebih berorientasi pembaruan berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits dan berorientasi sosial. Berkat kepemimpinannya, group Muhammadiyah Gresik ditingkatkan menjadi cabang. Perubahan status ini semakin mendorong Fakih Usman untuk aktif dalam pengembangan Muhammadiyah, khususnya di Surabaya.

Pada saat itu, situasi Surabaya semakin dinamis. Pendirian Nahdlatul Ulama, misalnya, telah memacu konsolidasi dan perluasan Muhammadiyah. Apalagi saat ini perseteruan antara Muhammadiyah dan Sarekat Islam berlangsung terbuka. Pada 1927, Mas Mansur, Ketua Muhammadiyah Surabaya, terkena disiplin partai untuk memilih Muhammadiyah atau Sarekat Islam. Ia memutuskan untuk memilih yang pertama.[9] Dalam keadaan ini, Faqih Usman semakin aktif di Muhammadiyah Surabaya. Periode 1932-1936, ia terpilih menjadi anggota konsul Hoofdbestuur Muhammadiyah Daerah Surabaya sekaligus Ketua Majelis Tarjih yang dijabatnya

---

[7]Robert van Niel, *Munculnya Elit Indonesia Modern* (Jakarta: Pusataka Jaya, 1984), hal. 292 dan 296.

[8]*Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jilid 1, tt., hal. 273.

[9]Soebagijo I.N., *K.H. Mas Mansur, Pembaharu Islam di Indonesia* (Jakarta: P.T. Gunung Agung, 1982), hal. 22.

mulai 1934. Di samping itu, ia juga memimpin majalah *Bintang Islam*, organ resmi Muhammadiyah.[10]

Awal dekade 30-an adalah periode keterlibatan Fakih Usman dalam pergerakan kebangsaan yang berbasis di Surabaya. Sejak periode ini sampai kepindahannya ke Malang pada 1945, ia harus pulang pergi Gresik-Surabaya. Di Gresik ia harus mencari nafkah untuk isteri dan keluarganya. Fakih Usman menjalankan usaha yang diwariskan ayahnya di bidang penjualan kayu gelondongan besar untuk pembuatan kapal. Untuk pulang-pergi Gresik-Surabaya, baginya, tidak menjadi masalah karena saat itu ia telah mempunyai kendaraan roda empat. Anak Fakih Usman, Ismed Usman, masih menyimpan SIM ayahandanya. SIM yang bertahunkan 1934 telah mengalami perpanjangan. Dengan bukti SIM yang ada, berarti Fakih Usman telah mengendarai mobil beberapa tahun sebelumnya. Bukti ini juga menunjukkan bahwa Fakih Usman memang termasuk kalangan berada pada zamannya. Pemilikan mobil pada tahun 30-an hanya mungkin bagi mereka yang benar-benar berkecukupan. Pantas kalau Fakih Usman bisa dengan mudah menyesuaikan diri dengan pergerakan di Surabaya.[11]

Interaksi di lingkungan Muhammadiyah Surabaya telah mendorong Fakih Usman untuk terus mengembangkan pengetahuan dan mempertajam wawasannya. Pada saat itu ia telah berkenalan dengan pemikiran pembaruan Muhammad Abduh. Ia bahkan memiliki salah satu karya monumentalnya, *Tafsir al-Manar*.[12] Untuk membaca literatur berbahasa Arab, baginya tampaknya tidak masalah, karena dasar-dasar bahasa Arab telah dipelajarinya saat di pesantren.

Isteri Fakih Usman juga menceritakan bahwa suaminya sering belajar bahasa Belanda secara sembunyi-sembunyi kepada salah seorang tamatan sekolah Belanda yang berada di kota Gresik. Di kota Gresik saat itu tampaknya tidak terlalu sulit mencari anggota masyarakat yang mampu berbahasa Belanda karena Gresik merupakan salah satu kota penting. Pada 1820 saja, saat pemerintah Belanda menguasai kembali Indonesia dari Inggris, dan bermaksud

---

[10]*Ensiklopedi Islam di Indonesia*, hal. 274.
[11]*Ensiklopedi Islam di Indonesia*, hal. 274.
[12]Wawancara dengan Ismed Usman.

membuka sekolah untuk penduduk Eropa, salah satu tempat yang dipilih adalah Gresik, selain Batavia, Cirebon, Semarang, Surakarta dan Surabaya.[13]

Fakih Usman merasakan pentingnya penguasaan bahasa Belanda barangkali karena para pemimpin pergerakan Islam moderen, apalagi dari kalangan nasionalis sekuler, sering menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa percakapan mereka. Posisi-posisi tertentu juga sering menuntut penguasaan atas bahasa Belanda. Pada 1929-1940, misalnya, ia menjadi salah seorang anggota Dewan Kota Surabaya[14] di mana para anggotanya sebagian berpendidikan moderen. Tuntutan pergaulan dari posisi semacam ini memaksanya untuk memahami percakapan dan menguasai literatur atau dokumen berbahasa Belanda. Apalagi sumber-sumber intelektual pada waktu itu umumnya juga berbahasa Belanda.

Berkat pergaulan yang semakin luas, Fakih Usman menjadi seorang Gresik yang benar-benar telah teremansipasi. Pemikirannya melampaui daerah di mana ia berasal. Cara berpakaian pun sudah berbeda. Saat itu, ia sudah memakai celana panjang dan jas sebagaimana umumnya para pemimpin pembaru Islam. Masyarakat Islam tradisional yang berada di sekitarnya sering memandang aneh atas pandangan dan prilakunya. Mereka menjuluki Fakih Usman secara sinis dengan ungkapan *Londo silit ireng* atau orang Belanda berpantat hitam.[15] Barangkali masyarakat sekitar menganggap Fakih Usman sebagai seorang pribumi yang telah terbius kebudayaan Belanda. Isteri Fakih Usman berceritera bahwa saat mereka berada di kota Gresik rumahnya sering dilempar batu oleh sementara warga masyarakat.[16]

Muhammadiyah Surabaya

Pada 1938, Fakih Usman dipilih menjadi Ketua Muhammadiyah Surabaya menggantikan Mas Mansur yang dalam Kongres Muhammadiyah ke-26, 1937, terpilih sebagai Ketua PP Muhammadiyah.

---

[13]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Pendidikan di Indonesia dari Zaman ke Zaman* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985), hal. 90.

[14]*Ensiklopedi Islam di Indonesia*, hal. 274.

[15]Wawancara dengan Ismed Usman.

[16]Wawancara dengan Ismed Usman.

Posisi Fakih Usman sebagai Ketua Muhammadiyah Surabaya mengokohkan keberadaannya sebagai salah seorang pemimpin organisasi Islam yang semakin aktif dalam pergerakan nasional Indonesia.

Periode kepemimpinannya adalah masa di mana para tokoh organisasi Islam mempunyai keinginan kuat untuk mewujudkan persatuan antar sesama mereka. Sampai 1937, telah banyak organisasi Islam dibentuk, mulai dari SDI (SI), Muhammadiyah, NU sampai Jong Islamieten Bond (JIB). Keberadaan organisasi-organisasi Islam tersebut di satu sisi telah memperluas keterlibatan Muslim dalam pergerakan kebangsaan; tetapi, di sisi lain, pelbagai organisasi tersebut sering terjebak dalam pertentangan dan perbedaan paham sehingga memperlemah posisi umat Islam secara keseluruhan. Menyadari bahaya keadaan ini, para tokoh Islam mulai menekankan pentingnya menyingkirkan perbedaan dan perlunya membina persatuan. K.H. Hasyim Asy'ari dalam Kongres NU di Kalimantan, 1935, memberi perhatian besar mengenai soal persatuan ini. Maka para tokoh organisasi Islam, seperti Mas Mansur dari Muhammdiyah, Mohammad Dachlan dan Wahab Chasbullah dari NU, dan W. Wondoamiseno dari SI, yang semuanya berbasis di Surabaya, pada 21 September 1937 memprakarsai pembentukan wadah nonpolitik dengan nama Majlis Islam A'la Indonesia (MIAI) yang bertujuan mendamaikan perbedaan dan pertikaian serta mewujudkan persatuan antarsesama umat Islam.[17] Dalam asas MIAI yang ditandatangani para pendirinya antara lain berbunyi sebagai berikut:

> Majlis ini adalah suatu tempat permusyawaratan, suatu badan perwakilan, yang terdiri daripada wakil-wakil atau utusan-utusan dari beberapa perhimpunan-perhimpunan yang berdasarkan Islam di seluruh Indonesia, yang telah sama menyatakan suka dan masuk menjadi anggotanya Majlis tersebut. Pada tiap-tiap waktu yang bakal ditentukan, maka majlis ini hendak mengadakan persidangan-persidangan untuk membicarakan dan memutuskan soal-soal yang dipandang penting bagi kemaslahatan umat dan agama Islam, yang keputusannya harus dipegang teguh dan dilakukan bersama-sama oleh segenap perhimpunan-perhimpunan yang menjadi anggotanya, baik yang datang mengirimkan wakilnya di dalam persidangan Majlis itu maupun yang tidak.[18]

---

[17]Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam*, hal. 263.
[18]Djarnawi Hadkusuma, *Matahari-Matahari Muhammadiyah*, hal. 53.

Fakih Usman dapat diduga mengikuti perkembangan umat Islam tersebut karena peristiwanya berlangsung di Surabaya. Apalagi Mas Mansur, ketua Muhammadiyah yang digantikannya, adalah salah satu tokoh yang memprakarsai pembentukan MIAI.

MIAI

Awalnya MIAI dipimpin oleh Sekretariat yang diketuai W. Wondoamiseno, Mas Mansur sebagai bendahara, Mohammad Dachlan dan Wahab Chasbullah selaku anggota. Namun Mas Mansur kemudian mengundurkan diri, karena terpilih sebagai Ketua PP Muhammadiyah dalam Kongres Muhammadiyah ke-26 pada 1937 dan harus pindah ke Yogyakarta. Kedudukannya sebagai bendahara dalam MIAI digantikan Fakih Usman.[19] Dengan kedudukan ini, Fakih Usman mempunyai kesempatan lebih luas untuk berinteraksi dengan para pemimpin senior yang datang dari pelbagai organisasi Islam. Apalagi Konferensi MIAI pada 14 dan 15 September 1940 mengangkatnya sebagai kepala sekretariat dan bendahara MIAI. Pada saat itu, susunan kepengurusan MIAI sebagai berikut: Wahid Hasyim (NU) sebagai ketua, W. Wondoamiseno (PSII) sebagai wakil ketua, Mas Mansur (Muhammadiyah), Umar Hubais (al-Irsyad) dan Dr. Sukiman (PII) masing-masing sebagai anggota.[20]

Sekalipun sejak 1937 Fakih Usman sudah masuk dalam kepengurusan MIAI, namun ia belum termasuk dalam barisan pimpinan utama. Pada waktu itu kepemimpinan masih dikendalikan tokoh-tokoh senior seperti disebutkan di atas. Satu-satunya tokoh muda yang saat itu telah menjadi pimpinan utama adalah Wahid Hasyim dari NU. Sejak 1940 itulah, Fakih Usman aktif sepenuhnya dalam kegiatan MIAI. Bagi Fakih Usman hal ini tentu tidak masalah karena federasi ini lahir terutama dari semangat para tokoh organisasi Islam yang berada di Surabaya. Dari segi orientasi pun, organisasi ini tidak berbeda dengan Muhammadiyah, yakni bukan organisasi politik. Apalagi ia sendiri saat itu sudah tidak lagi menjadi ketua Muhammadiyah Surabaya. Ditambah lagi, MIAI bermarkas di Surabaya, sehingga aktifitasnya dapat dilakukan dengan pulang pergi Surabaya-Gresik.

---

[19]Djarnawi Hadkusuma, *Matahari-Matahari Muhammadiyah*, hal. 54.
[20]Djarnawi Hadkusuma, *Matahari-Matahari Muhammadiyah*, hal. 54.

Pada saat itu, MIAI sebagai sebuah federasi non-politik, lebih banyak memberi perhatian pada isu-isu keagamaan, seperti terlihat dari kongres ke kongres. Misalnya, dalam Kongres MIAI di Surabaya, 26 Februari-1 Maret 1938, salah satu pokok bahasan penting adalah menanggapi tulisan Siti Sumandari dalam majalah *Bangun*, yang diterbitkan Parindra (Partai Indonesia Raya) pimpinan Dr. Sutomo, yang menyatakan bahwa banyak bagian hukum Islam mulanya hanya untuk membenarkan "nafsu" Nabi. Pokok bahasan lain adalah menuntut pemerintah agar memfungsikan pengadilan agama serta menyarankan organisasi-organisasi Islam agar melakukan salat gaib dan menuntut Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membatalkan pemisahan Palestina sebagaimana dilakukan Inggris. Sementara itu, dalam Kongres MIAI II yang berlangsung di Solo, 2-7 Mei 1939, para peserta juga hanya menekankan perlunya penerangan soal perkawinan wanita dan menjauhkan selir, membentuk komisi tentang masalah-masalah fikih, dan menekankan perlunya persatuan antarpemuda Islam. Peserta Kongres MIAI III di Solo menuntut pembebasan Haji Rasul, perlunya perbaikan pengumpulan zakat fitrah, pembentukan komisi penyiaran Islam, perlunya perhatian terhadap masalah naik haji dan para mukimin karena ancaman perang, dan masalah transfusi darah bagi musuh.[21]

Penekanan utama MIAI pada isu keagamaan maupun urusan umat di atas tampaknya merupakan pembagian kerja di antara organisasi-organisasi Islam. Bidang politik pada saat itu telah disalurkan PSII (tadinya SI), Partai Penyadar (pimpinan Agus Salim) dan Partai Islam Indonesia (PII, pimpinan Dr. Sukiman). Namun akhirnya organisasi federasi ini juga sulit menjauhkan diri dari politik karena sebagian pemimpin MIAI juga orang-orang politik. Sejak terbentuknya Gabungan Politik Indonesia (Gapi) pada 1939 dan Majelis Rakyat Indonesia pada 1941, hubungan organisasi Islam dengan kalangan nasionalis makin membaik. Gapi adalah federasi partai-partai politik Indonesia di mana PSII dan PII bergabung di dalamnya. Sedang MRI merupakan federasi lebih besar, yang terdiri dari Gapi, MIAI dan Persatuan Vakbonden Pegawai Negeri. Dengan dukungan penuh semua pihak mereka sama-sama menuntut Indo-

[21]Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, hal. 265-267.

nesia Berparlemen. Namun mereka retak kembali setelah kalangan nasionalis mengadakan perundingan dengan pihak Belanda, tanpa memusyawarahkan terlebih dahulu dengan kalangan Islam. Apalagi pada saat-saat akhir, pemerintahan kolonial Belanda kelihatannya memandang kalangan nasionalis sebagai satu-satunya jurubicara rakyat Indonesia. Akibatnya, perlawanan kalangan Islam terhadap Belanda semakin mengeras.[22]

Syu Sangi Kai

Karena kekecewaan panjang rakyat Indonesia, terutama kalangan Islam, terhadap kolonialisme Belanda dan mungkin juga disebabkan ketidaktahuan mereka atas bahaya fasisme Jepang, rakyat Indonesia menaruh harapan besar kepada Jepang. Tapi tenyata sehari setelah penyerahan pemerintahan Belanda kepada Jepang, pemerintah Jepang melarang semua organisasi dan rapat-rapat. Semua organisasi membubarkan diri termasuk organisasi Islam. Dengan demikian, MIAI, PSII, dan Partai Islam Indonesia (PII) terpaksa bubar pada Mei 1942.[23] Dengan dibubarkannya MIAI, berarti untuk sementara Fakih Usman tidak aktif lagi di MIAI.[24]

Namun beberapa waktu kemudian kalangan Islam memperoleh tempat baik dalam kebijakan pemerintah Jepang. Promosi pertama kalangan Islam pada masa pendudukan Jepang ialah penunjukan Mas Mansur dalam Empat Serangkai bersama Soekarno, Mohammad Hatta dan Ki Hadjar Dewantara. Selain itu, pemerintah Jepang juga memberi perhatian besar pada perkembangan organisasi Islam. Pada 5 September 1942 kalangan Islam sudah dapat menghidupkan kembali MIAI yang pada akhir 1943 kemudian diubah menjadi Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi). Pada 10 September 1943 pemerintah Jepang mengijinkan NU dan Muhammadiyah bergerak kembali, dan pada 1 Februari 1944 hal yang sama dilakukan terhadap Perikatan Umat Islam (PUI) di Majalengka dan Persatuan Umat Islam (PUI) di Sukabumi.

Pada 1944 didirikan juga Hizbullah, yakni organisasi pemuda

---

[22]Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional* (Jakarta: LP3ES,1987), hal. 19-21.
[23]Harry J. Benda, *Bulan Sabit Matahari Terbit*, hal. 142.
[24]*Kementrian Agama 10 Tahun*, hal. 73.

Islam yang memperoleh latihan militer dari tentara Jepang. Selain Hizbulah dibentuk pula Seinendan (Korp Pemuda) yang bisa dimasuki kalangan pemuda Islam maupun bukan. Saat Peta (Pembela Tanah Air) didirikan pada Oktober 1943, banyak ulama, kiyai dan santri yang bergabung karena pihak Jepang sendiri lebih menyukai para peserta yang berpengaruh di kalangan rakyat.[25] Fakih Usman sendiri pada 1943 ditunjuk sebagai anggota Syu Sangi Kai,[26] sebuah dewan penasihat Jepang tingkat karesidenan, dalam hal ini Surabaya. Sementara itu, pemerintah Jepang masih melarang organisasi kalangan nasionalis, termasuk membatasi gerak Taman Siswa.[27]

Deliar Noer menyebut empat alasan mengapa kebijakan politik Jepang terhadap organisasi Islam bersifat positif. Pertama karena pemerintah Jepang membutuhkan dukungan luas dari rakyat dalam menghadapi peperangan dengan pihak Sekutu. Kedua, hubungan tokoh Islam dengan rakyat ternyata terus berlangsung sekalipun organisasi-organisasi mereka dibubarkan. Ketiga, Putera (Pusat Tenaga Rakyat) dan Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa Hokokai yang didirikan Jepang masing-masing 9 Maret 1943 dan 1 Maret 1944 ternyata tidak mampu menghimpun dan memperoleh dukungan umat Islam. Dan terakhir karena pemerintah Jepang ingin memperbaiki citra atas pelbagai kesalahan, seperti kasus keharusan *seikeirei* (memberi hormat kepada Kaisar Jepang dengan membungkukkan badan 90 derajat ke arah Tokyo 90), penangkapan tokoh sepuh K.H. Hasyim Asy'ari dan lain-lain.[28]

Namun harus dicatat bahwa sekalipun pemerintah Jepang melaksanakan kebijakan positif terhadap kalangan Islam, gerakan kemerdekaan tetap berpusat di kalangan nasionalis Putera dan Jawa Hokokai. Pada saat menjelang proklamasi, Jepang memberi tempat lebih besar kepada kalangan nasionalis daripada kalangan Islam. Dalam keanggotaan BPUPKI, misalnya, wakil kalangan Islam hanya 15 dari 60 orang anggota. Dan pada saat ditambah, wakil kalangan Islam hanya 2 orang dari 26 orang tambahan. Begitu juga dalam Syu Sangi In (Dewan Penasihat Pusat) wakil kalangan Islam hanya

---

[25]Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, hal. 22-23.
[26]*Kementerian Agama 10 Tahun*, hal. 74.
[27]Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, hal. 22-23.
[28]Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, hal. 23-26.

7 orang dari 28 anggota. Saat PPKI dibentuk pada 5 Agustus 1945, wakil dari kalangan Islam hanya 2 orang dari 21 anggota.[29] Pengikutsertaan yang tidak seimbang antara dua kalangan sedikit banyak menimbulkan kekecewaan kalangan pemimpin umat Islam. Apalagi saat sebagian besar anggota Badan Penyelidik menolak Islam dijadikan dasar negara Republik Indonesia. Akhirnya, usulan kalangan Islam yang terkenal dengan Piagam Jakarta yang menyatakan kewajiban bagi orang Islam untuk menjalankan syari'at Islam memang diterima. Tetapi hal itu dihapus kembali saat Mohammad Hatta menyarankan penghapusan demi persatuan dan kesatuan Indonesia yang sangat dibutuhkan saat itu. Pemimpin Islam menerima saran itu. Namun Ki Bagus Hadikusumo memperlihatkan kekecewaannya sehingga meminta diadakan Sidang Tanwir Muhammadiyah di Yogyakarta. Ia mengemukakan kekecewaannya, sambil menegaskan perjuangan kalangan Islam belum berakhir. Namun kekecewaan seperti itu tidak sempat berkembang karena situasi tidak memungkinkan.[30]

Masyumi dan Muhammadiyah

Posisi Jepang makin tersudut dari pertempuran ke pertempuran. Para pemimpin Indonesia terus mengikuti perkembangan berita perang Jepang melawan Sekutu. Saat tersiar Jepang mengalami kekalahan demi kekalahan dalam peperangannya, mereka mengambil prakarsa mengumumkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 yang disampaikan Soekarno dan Mohammad Hatta. Sehubungan dengan ini terdapat sejumlah tokoh seperti Sjahrir yang meragukan efektifitasnya. Apalagi proklamasi akan tersiar sebagai ciptaan Jepang. Tetapi setelah melihat sambutan rakyat Indonesia yang luar biasa, mereka dengan sepenuh hati mendukung proklamasi tersebut. Di pelbagai pelosok tanah air kabar proklamasi ini disambut dengan suka cita, termasuk di Surabaya yang menerima gema proklamasi dengan cepat. Fakih Usman sebagai salah seorang tokoh Islam terkemuka di kota tersebut terus mengikuti berita dan mengadakan kontak dengan pelbagai kalangan.

---

[29]Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, hal. 31-39.
[30]Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, hal. 34-43.

Pada Oktober 1945, pemerintah Republik Indonesia mengumumkan agar masyarakat yang terdiri dari pelbagai aliran membentuk partai politik masing-masing. Sebagian kalangan Islam menyayangkan kebijakan pemerintah tersebut karena khawatir bahwa suasana persatuan yang mewarnai proklamasi itu akan berubah menjadi perpecahan kembali sebagaimana terjadi pada masa pra-kemerdekaan. Namun sebagian besar justru menyambutnya dengan alasan realisasi kemerdekaan dan kebebasan yang selama masa penjajahan tidak ditemukan. Para pemimpin umat Islam sendiri memandang penting hal itu untuk menunjukkan persatuan dan kesatuan kalangan Islam. Untuk itu, pada 8-7 Nopember 1945 diadakan Muktamar Islam Indonesia di Yogyakarta yang dihadiri para tokoh organisasi dari hampir seluruh daerah di Indonesia. Dalam muktamar ini disepakati bahwa Masyumi adalah satu-satunya partai politik bagi umat Islam Indonesia.

Fakih Usman sebagai tokoh umat Islam Surabaya dan pernah menduduki kepengurusan MIAI turut hadir dalam muktamar ini. Bahkan ia diangkat menjadi anggota Pimpinan Pusat Masyumi bersama Moh. Natsir, Mr. Mohamad Roem, dan lain-lain. Adapun ketuanya ialah tokoh senior yaitu Dr. Sukiman Wirjosandjojo. Masuknya Fakih Usman dalam barisan pimpinan pusat menunjukkan bahwa keberadaannya semakin diperhitungkan secara nasional. Apalagi ia juga diangkat sebagai salah seorang anggota Komite Nasional Indonesia Pusat,[31] sebuah lembaga perwakilan rakyat yang bersifat sementara sebelum terbentuknya perwakilan rakyat berdasarkan pemilihan umum. Sayang situasi saat itu belum memungkinkan untuk menjalankan program secara efektif karena masih berada dalam masa revolusi. Belanda sebagai bagian dari Sekutu yang memenangkan pertempuran melawan Jepang masih terus berusaha masuk kembali ke Indonesia. Sehingga rakyat Indonesia, termasuk pimpinan Masyumi, harus berjuang mempertahankan kemerdekaan. Pada 10 November 1945 rakyat Indonesia khususnya yang berada di Surabaya bertempur melawan tentara Sekutu yang berusaha menguasai kota ini.

Fakih Usman yang saat itu berada di Gresik terpaksa mengung-

---

[31] *Kementerian Agama 10 Tahun.*, hal. 74.

si bersama keluarga ke Malang karena tentara Sekutu terus memburunya. Di Malang, ia menggalang kekuatan perlawanan bersama Masjkur (yang kemudian menjabat Menteri Agama dalam beberapa periode) dan Zainul Arifin (kemudian menjadi Wakil Perdana Menteri II dalam Kabinet Ali Sostroamidjojo)[32] dari NU melalui Sabilillah dan Hizbullah. Sabilillah adalah pasukan bersenjata dari kalangan Islam yang sudah menginjak usia dewasa, sedang Hizbullah, pasukan bersenjata dari kalangan pemuda Islam yang ketika Jepang takluk anggotanya sudah berjumlah 50.000 orang. Keduanya pada masa pendudukan Jepang pernah mendapat latihan militer dari Jepang sebagai persiapan menghadapi peperangan dengan Sekutu. Pada masa proklamasi, mereka bergabung ke Masyumi.[33] Melalui kekuatan inilah Masyumi memobilisasi kekuatan perlawanan dalam menghadapi agresi Belanda. Masjkur dan Fakih Usman masing-masing adalah Ketua dan Wakil Pucuk Pemimpin Markas Tertinggi Barisan Sabilillah di Malang. Dan ketika Hizbullah dan Sabilillah digabung, Fakih Usman menjadi ketua I.[34] Ketika tentara Sekutu melakukan agresi kedua pada 1948, Fakih Usman dan keluarga mengungsi lagi ke Surakarta karena NICA mulai masuk Malang. Di sini, Fakih Usman sering pulang-pergi Surakarta-Yogyakarta.[35] Kota akhir ini pada saat itu adalah tempat Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan ibukota Negara Republik Indonesia.

Di Surakarta Fakih Usman mulai aktif lagi di Muhammadiyah sehingga dalam kepengurusan Muhammadiyah 1948-1952, yakni saat Bagus Hadikusumo menjadi Ketua Umum, ia diangkat menjadi Ketua I PP Muhammadiyah. Dengan demikian, ia menjadi anggota pimpinan pusat dua organisasi sekaligus, Masyumi dan Muhammadiyah. Hal ini juga dilakukan tokoh Muhammadiyah lain, seperti Faried Ma'roef dan Junus Anies (Ketua PP Muhammadiyah 1959-1962). Bagi Muhammadiyah apalagi bagi Masyumi, rangkap jabatan tidak menjadi persoalan karena kelahiran Masyumi di antaranya berkat dukungan penuh Muhammadiyah. Bagi Muham-

---

[32]Lihat susunan Kabinet Ali Sastroamidjojo dalam Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, hal. 240.

[33]Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, hal. 55-56.

[34]*Kementerian Agama 10 Tahun*, hal. 74

[35]Wawancara dengan Ismed Usman, 25 November 1997.

madiyah, Masyumi bukan SI atau PSII yang pernah berseberangan dalam sejarah karena perbedaan sikap politik dalam menghadapi pemerintah kolonial di mana Muhammadiyah lebih memilih kooperatif sedang PSII mengambil langkah non-kooperatif.[36]

Posisi Fakih Usman dalam kepemimpinan Muhammadiyah tingkat pusat tentunya membuka akses untuk berinteraksi dengan tokoh-tokoh pemimpin Republik Indonesia Yogyakarta. Apalagi ketuanya, Bagus Hadikusuma, sudah tidak asing lagi bagi mereka, terutama sejak kehadirannya dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI menjelang proklamasi kemerdekaan. Dan hal itu ternyata benar karena pada saat Menteri Agama Masjkur sakit akibat bergerilya dan pindah dari satu tempat ke tempat lain, yang dipilih untuk menggantikan posisinya sebagai Menteri Agama pada masa Kabinet Abdul Halim atau Kabinet RI Yogyakarta (21 Januari-6 September 1950) adalah Fakih Usman. Formatur kabinet tentunya telah mempertimbangkan kemampuannya. Yang memuluskan, kalau tidak menentukan, barangkali adalah perkenalan Fakih Usman dengan menteri yang digantikannya, Masjkur. Hubungan Masjkur-Fakih Usman telah terbina sejak sama-sama menjadi pimpinan Hizbullah-Sabilillah di Malang. Sangat mungkin ketika itu telah terbina sikap saling percaya di antara mereka.

Menteri Agama Kabinet Halim

Mulai 20 Desember 1949 sampai 6 September 1950 Indonesia berbentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar di Den Haag, 23 Agustus 1949. Negara RIS adalah federasi 15 negara kecil ciptaan Belanda seperti Negara Pasundan, Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera Timur dan satu negara yang paling besar serta berpengaruh, yaitu Negara Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Perdana Menteri RIS adalah Mohammad Hatta sedang Menteri Agamanya adalah A. Wahid Hasyim. Sedang Perdana Menteri RI di Yogyakarta adalah dr. A. Halim dan Fakih Usman sebagai Menteri Agama. Ini berarti, jurisdiksi Kementerian Agama di bawah kepemimpian Fakih Us-

[36]Lihat daftar nama Pimpinan Pusat Masjumi 1945 dalam Deliar Noer, *Partai Politik Islam di Pentas Nasional*, hal. 100.

man terbatas pada wilayah Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Meski demikian, posisi Kementerian ini sangat penting karena ia mewarisi Kementerian Agama yang didirikan pada 1946. Sebagaimana diketahui, sejak ibukota RI dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta, Kementerian Agama juga ikut pindah berikut personel dan arsip-arsipnya. Karena itulah, meski ia hanya menjadi Menteri Agama satu negara bagian pada masa itu, nama Fakih Usman disejajarkan dengan Menteri-Menteri Agama lainnya, dalam sejarah Departemen Agama.[37]

Meski Kementerian Agama pada masa Fakih Usman ini tidak dapat sepenuhnya merealisasikan missi dan tugas-tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8/1950, ada dua hal penting yang pantas dicatat. Pertama, pengembangan lembaga pendidikan agama dan kedua, reorganisasi Kementerian Agama.

Pengembangan Lembaga Pendidikan Agama

Paling tidak sejak awal abad ke-20, ada dua masalah yang menjadi keprihatinan kalangan Islam Indonesia menyangkut pendidikan. Pertama ialah memudarnya nilai-nilai agama, tumbuhnya sikap sekuler atau sikap anti agama di sebagian masyarakat Indonesia. Ini dirasakan, terutama, sejak berdirinya sekolah-sekolah moderen pada masa kolonial Belanda. Kalangan pemimpin Islam yakin apabila keadaan tersebut terus berlanjut, maka pada zaman merdeka, negara dan masyarakat Indonesia akan rapuh. Sebab itu, pendidikan agama harus menjadi materi pendidikan pokok. Karena keyakinan ini, para menteri agama memberi perhatian besar terhadap pendidikan agama. Sejak periode Fathurrahman Kafrawi (2 Oktober 1946-3 Juli 1947)* pendidikan agama sudah berusaha ditingkatkan. Ia dan Menteri Pendidikan pernah membuat keputusan bersama tentang penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah rakyat mulai kelas IV yang mulai berlaku pada 1 Januari 1947. Sekalipun pada waktu itu pengajaran agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas,

---

[37]Lihat *Amal Bakti Departemen Agama RI (3 Januari 1946-3 Januari 1987): Eksistensi dan Derap Langkahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1987), hal. 105-111.

*Tentang usaha pengembangan pada masa itu, lihat bab tentang K.H. Fathurrahman Kafrawi.

kebijakan ini merupakan langkah penting.[38]

Masalah kedua ialah rendahnya mutu pengetahuan moderen para siswa di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Karena itu, persoalan ini juga menjadi perhatian penting Menteri Agama pada masa awal Indonesia merdeka. Namun berbeda dengan masalah pertama, masalah kedua ini menjadi keprihatinan kalangan nasionalis juga. Karena itu, pada 1946 Panitia Penyelidik Pengajaran yang dipimpin Ki Hajar Dewantara dengan 51 anggota, yang terdiri dari tokoh-tokoh yang mewakili pelbagai aliran dan lapisan masyarakat, menghimbau agar guru agama mempunyai pengetahuan umum dan untuk itu perlu diselengggarakan pendidikan guru agama.[39]

Sayang dua agenda di atas tidak dapat diwujudkan oleh menteri-menteri agama periode 1946-1949 karena perhatian mereka dicurahkan sepenuhnya untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Usaha peningkatan pendidikan agama dan moderenisasi lembaga pendidikan Islam baru bisa dilanjutkan kembali pada 1950 secara bersama-sama oleh Menteri Agama Kabinet RIS dan Menteri Agama RI. Pada periode ini, dua menteri agama terus mengadakan kerjasama.

Sebenarnya, pada 16 Mei 1948 telah didirikan Sekolah Guru dan Hakim Islam (SGHI) di Solo, yang kemudian dipindahkan ke Yogyakarta pada 8 Desember 1948. Namun karena Belanda melakukan aksi militer II, sekolah ini tidak dapat berjalan. Baru pada 16 Januari 1950 sekolah itu dibuka kembali di Yogyakarta dengan murid berikatan dinas. Setelah diangkat menjadi Menteri Agama RI, salah satu perhatian utama Fakih Usman adalah pendidikan. Karena itu ia kemudian berusaha mendapatkan guru-guru untuk mengajar di SGHI tersebut serta menyediakan tunjangan beasiswa bagi para siswanya. Ia juga menganjurkan pembukaan SGHI dan Sekolah Guru Agama Islam pada setiap karesidenan.[40] Salah seorang tenaga yang diajak memperkuat Kementerian Agama dalam bidang

---

[38]*Amal Bakti Departemen Agama RI*, hal. 23. Lihat juga Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Cet. V (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995), hal. 357.

[39]*Amal Bakti Departemen Agama RI*, hal. 25.

[40]*Amal Bakti Departemen Agama RI*, hal. 33.

pendidikan ini ialah Arifin Temyang—lulusan HIK yang menguasai persoalan pendidikan. Meski banyak sejawatnya yang mempersoalkan penugasan Arifin Temyang ini dengan alasan ia bukan dari kalangan Islam, Fakih Usman tetap mempetahankannya. Fakih Usman menyatakan bahwa Arifin adalah orang yang menguasai pendidikan dan sedang sangat dibutuhkan Kementerian Agama.[41]

Bagi lingkungan Departemen Agama, Arifin Temyang termasuk di antara sedikit orang yang paling berjasa dalam pengembangan pendidikan agama di Indonesia, di samping Mahmud Yunus dan Abdullah Sigit. Ia berperan dalam mengembangkan PGA, dan pada 1957 turut memprakarsai pembentukan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) yang menjadi cikal bakal IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ketika Fakih Usman menjabat Menteri Agama, Kepala Jawatan Pendidikan Agama (Japenda) dipegang Drs. Abdullah Sigit, yang pada 1947 pernah memimpin Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam bersama Ki Hajar Dewantara. Salah satu usaha menonjol yang dilakukan Abdullah ketika menjadi Kepala Japenda ialah pengembangan guru melalui SGHI yang diorientasikan untuk menguasai pengetahuan umum moderen. Baginya, guru agama harus pula menguasai pengetahuan umum moderen. SGHI sendiri juga dikembangkan menjadi beberapa jurusan: Bagian A ialah untuk guru kesusastraan; Bagian B untuk guru ilmu alam/pasti; Bagian C untuk guru agama; dan Bagian D untuk guru pengadilan agama.[42] Dalam bidang pendidikan, Fakih Usman, selaku Menteri Agama, tampaknya menyerahkan kepada mereka yang lebih mengetahui pendidikan. Karena itu, tidak ditemukan informasi yang menunjukkan bahwa Fakih Usman menentang program penekanan pengembangan pengetahuan umum moderen yang ditawarkan Abdullah Sigit ini. Bahkan ia sangat mendukung upaya-upaya untuk menguasai pengetahuan umum moderen.

Sewaktu masih di Gresik, Fakih Usman sudah gemar dengan pengetahuan umum dan pendidikan dalam arti luas. Ini bisa dilihat dari bagaimana ia berusaha menguasai bahasa Belanda. Meski pen-

---

[41]Wawancara dengan Ismed Usman, 22 Oktober 1997.

[42]Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, hal. 361.

duduk sekitar sering melempari rumahnya dengan batu dan menyindirnya sebagai *wong londo silit ireng*, hal itu tidak menyurutkan langkahnya. Ketika Fakih Usman mengetahui ada klausul dalam *Staatblad* yang memperbolehkan seseorang mengikuti sekolah Belanda setelah membayar pajak tertentu, ia segera mendorong saudara pihak ibu, bernama Rasyad, untuk melanjutkan sekolah. Ia pula yang mengurus sekolah Rasyad ke HIS, MULO, AMS, dan Sekolah Kedokteran, sehingga yang bersangkutan menjadi dokter di Malang. Ketika mengetahui bahwa Lutfi Usman ikut latihan tentara TRIP di Mojo Agung, Jawa Timur, Fakih Usman langsung memanggilnya dan meyakinkannya untuk melanjutkan sekolah dari pada ikut latihan tentara. "Saya dulu tidak sempat belajar. Sekarang kamu harus sekolah," kata Fakih Usman. Dari sini tidak mengherankan bila ketujuh anak Fakih Usman, semuanya berpendidikan tinggi dalam bidang pengetahuan umum moderen, kecuali satu yang hanya sampai HIK. Lima anaknya menjadi dokter dan seorang ekonom.

Pendidikan anak-anaknya tersebut mencerminkan betapa besarnya perhatian Fakih Usman terhadap pendidikan umum. Malah tidak ada di antara anaknya yang meneruskan ke pesantren seperti apa yang pernah dialaminya. Jangankan pesantren, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsnawiyah, Madrasah Aliyah dan IAIN pun tidak ada. Ini karena dalam pandangan Fakih Usman, lebih baik memperbanyak ahli yang menguasai bidang-bidang pengetahuan umum ketimbang bidang pengetahuan agama karena yang terakhir ini jumlahnya lebih banyak daripada yang pertama.

Fakih Usman selalu berkata kepada putra-putrinya: "Kamu jangan mengharapkan warisan berupa harta. Saya hanya bisa memberikan pendidikan sampai sarjana." Fakih Usman memang tidak pernah sayang membelanjakan uang asal untuk hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. "Soal beli buku, tidak ada kata boros," katanya.[43] Ini tentu saja berbeda dengan sebagian besar masyarakat. Yang menarik, ia tidak pernah mendorong anak-anaknya untuk aktif dalam organisasi seperti Muhammadiyah. Ia lebih membebaskan kepada pilihan anak-anaknya.

---

[43]Wawancara dengan Ismed Usman pada tanggal 22 Oktober 1997.

Penataan Kepegawaian dan Administrasi

Selain persoalan pengembangan pendidikan, Fakih Usman juga melakukan penataan kepegawaian dan administrasi Kementerian Agama. Ini dilakukan berkaitan dengan terbentuknya Kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 20 Desember 1949 yang menjadikan Negara Republik Indonesia di Yogyakarta sebagai salah satu negara bagian dari RIS. Sebagai negera bagian, kementerian-kementerian RI, termasuk Kementerian Agama, harus melakukan penyesuaian-penyesuaian, misalnya, mengenai batas wilayah yang hanya mencakup Jawa dan Sumatra.

Dalam rangka memperoleh masukan untuk mengembangkan visi dan pedoman yang sama, pada 14-18 April, Kementerian Agama RIS dan RI menyelenggarakan Konferensi Besar yang dihadiri para pejabat instansi departemen agama dari pelbagai negara bagian. Acara ini mendapat perhatian besar baik dari *acting* Presiden Mr. Assaat maupun Perdana Menteri RI dr. A. Halim. Karena pada saat itu makin banyak negara bagian yang memilih bersatu dengan negara RI, maka Kementerian Agama RIS dan RI sibuk merespon perkembangan tersebut. Pada 7 Juni 1950, kedua menteri sepakat mempercepat penyatuan dua kementerian menjadi satu kementerian. Kedua belah pihak sepakat untuk mengatur segala sesuatu di lapangan keagamaan sedemikian rupa sehingga tercipta satu Kementerian Agama. Dalam bidang organisasi, mereka bersepakat untuk mengikuti bentuk Kementerian Agama RI sebagaimana termaktub pada Peraturan Pemerintah RI No. 33 tahun 1949. Keduanya juga setuju untuk melebur pegawai; dan apabila timbul sesuatu masalah menyangkut penempatan akan diputuskan menteri terpilih dengan mengacu pada persyaratan intergritas, kecakapan, pendidikan, pengalaman dan jiwa perjuangan. Mengenai kantor pusat, mereka menyepakati berkedudukan di Jakarta.[44]

Pada 17 Agustus 1950, masa RIS secara resmi berakhir dan negara kembali ke bentuk kesatuan dengan nama yang sudah dipatrikan dalam Proklamasi Kemerdekaan: Republik Indonesia. Soekarno dan Hatta kembali menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Mereka menjadi kepala negara sedang kepala pemerintahan ada di ta-

---

[44]*Anual Bakti Departemen Agama RI*, hal. 38-39.

ngan Perdana Menteri. Untuk menyusun kabinet, Mohammad Natsir dari Masyumi ditunjuk sebagai formatur. Dalam kabinet Natsir ini, Menteri Agama yang ditunjuka adalah Wahid Hasyim. Dalam kabinet berikutnya, Sukiman, Wahid Hasyim kembali menduduki kursi Menteri Agama, sebelum kemudian kembali ke tangan Fakih Usman dalam kabinet Wilopo.

Pasca Menteri Agama Kabinet Halim

Sekalipun tidak lagi menjabat Menteri Agama dalam kabinet Natsir, keterlibatan Fakih Usman di Kementerian Agama terus berlanjut karena ia menjabat Kepala Jawatan Pendidikan Agama[45] yang berkedudukan di Yogyakarya. Selain itu dia juga tetap aktif di Muhammadiyah sebagai Ketua I di mana Ketua Umumnya adalah Bagus Hadikusuma. Sementara itu di Masyumi, pada 1949 ia tidak terdaftar dalam komposisi pimpinan pusat. Tetapi dalam susunan pimpinan pusat tahun 1951, ia masuk lagi bersama tokoh-tokoh seperti Sjafruddin Prawiranegara, Wahid Hasyim, dan Bagus Hadikusumo.[46] Dengan demikian sejak 1950, Fakih Usman mempunyai tiga tempat kegiatan utama: Muhammadiyah, Masyumi dan Kementerian Agama.

Suasana politik pada 1950-an agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau sebelum tahun 1950, partai-partai yang terdiri dari pelbagai aliran dapat bekerja sama, misalnya kasus bersatunya PNI, Masyumi dan PKI dalam menolak perundingan Linggarjati 15 November 1946, maka hal itu tidak ditemukan lagi pada masa sesudahnya. Jangankan antara PKI dan Masyumi yang terus menjadi musuh bebuyutan, PNI-Masyumi juga semakin renggang. Bahkan, antarpartai Islam pun sering mengalami konflik. Ini diawali dengan keluarnya PSII dari Masyumi pada 1947. Demikian pula Hubungan NU-Masyumi pasca 1950, mulai menghadapi persoalan serius.

Dapat dikatakan, jika periode 1945-1950 adalah periode kesatuan dalam perjuangan, periode 1950-1955 adalah periode perebutan partai-partai dalam memperoleh kekuasaan. Pada tahun-tahun itu,

---

[45]Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, hal. 263. Juga wawancara dengan Ismed Usman, 4 Desember 1997.

[46]Lihat susunan Pimpinan Pusat Masjumi 1949 dalam Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, hal. 101.

kalangan NU yang memimpin Majelis Syura Masyumi mulai kecewa karena tidak lagi dilibatkan dalam pengambilam pelbagai keputusan penting partai, sehingga pertimbangan politik praktis lebih banyak daripada pertimbangan agama.[47] Pada masa-masa awal Masyumi, ulama mendapat tempat mulia, tapi hal itu tidak lagi terjadi pasca 1950. Sebagaimana dikemukakan Idham Chalid setelah NU keluar dari Masyumi, para ulama sering tersinggung oleh ulah Masyumi yang merendahkan mereka. Kekecewaan itu meledak setelah Masyumi di bawah Mohammad Natsir periode 1952-1954 mengajukan Fakih Usman sebagai Menteri Agama dalam Kabinet Wilopo, padahal dari 5 jatah menteri bagi Masyumi, 4 di antaranya sudah diambil non-NU. Akibat perasaan luka itulah, NU memutuskan keluar dari Masyumi. Kekecewaan mengenai pos menteri agama merupakan *immediate cause* penarikan NU dari Masyumi pada tanggal 5 April 1952 dan pembentukannya sebagai partai politik.[48]

Yang menjadi pertanyaan, mengapa Masyumi tetap mengajukan Fakih Usman? Salah satu alasan ialah karena Muhammadiyah merasa belum mendapat kesempatan. Salah seorang anggotanya, Rasjidi, memang pernah menjadi Menteri Agama. Tetapi menurut pengakuan Rasjidi, posisi itu bukan atas nama Muhammadiyah, melainkan pribadi. Yang paling menyinggung pimpinan Masyumi tampaknya ialah tindakan Wahab Chasbullah, Ketua PB NU 1952-1956, yang mengadakan pembicaraan langsung dengan formatur kabinet, Wilopo, menyangkut tuntutannya atas pos menteri agama.[49] Ketua Masyumi, Mohammad Natsir, sebagai seorang moderenis yang berlatar belakang Persatuan Islam Bandung secara intelektual dan personal mungkin juga dekat dengan Muhammadiyah daripada dengan NU. Faktor ini di samping perasaan tersinggung sedikit banyak ikut mempengaruhi keputusan Ketua PP Masyumi menjatuhkan pilihan pada calon dari Muhammadiyah. Demikian pula, pihak NU, lebih baik menarik diri dari Masyumi

---

[47]B.J. Boland, *The Struggle of Islam in Modern Indonesia* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1971), hal. 47.

[48]B.J. Boland, *The Struggle...*, hal. 46.

[49]Uraian secara kronologis tentang langkah-langkah Wahab Chasbullah dapat dilihat dalam Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, hal. 80-88.

*Lihat biografinya dalam bab tentang Rasjidi.

daripada harus berada di bawah kendali Mohammad Natsir. Dengan perpecahan ini, Masyumi semakin tidak memiliki legitimasi untuk mengklaim satu-satunya partai Islam sebagaimana dicetuskan pada 1945. Dengan demikian, polarisasi intern umat Islam semakin tak terelakkan.

Menteri Agama Kabinet Wilopo

Dalam situasi seperti itulah, Fakih Usman dilantik sebagai Menteri Agama, menggantikan Wahid Hasyim, dalam Kabinet Wilopo (3 April 1952 - 30 Juli 1953). Pada saat diangkat, Fakih Usman masih menjabat Kepala Jawatan Pendidikan Agama (Japenda) dan tinggal di Yogyakarta bersama keluarganya, sekalipun saat itu sudah sering pulang-pergi Yogyakarta-Jakarta. Dengan pengangkatannya sebagai Menteri Agama, ia dan keluarga harus pindah ke Jakarta.[50]

Ketika menjadi Menteri Agama untuk kedua kali ini, Fakih Usman tentunya lebih berpengalaman. Karena pernah menjadi Menteri Agama, Fakih Usman telah mengetahui berbagai persoalan kehidupan beragama. Apalagi selepas menjadi menteri dalam kabinet Halim ia tetap menjadi pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Agama, yakni Kepala Japenda yang mengurusi masalah-masalah pendidikan. Pada periode ke-2 ini, Fakih Usman memfokuskan pada penajaman perumusan missi, tugas, dan pekerjaan yang dijadikan pijakan, landasan atau acuan resmi dalam melaksanakan pekerjaan.

Reformulasi Tugas Departemen Agama

Perumusan misi dan tugas Kementerian Agama sebenarnya telah ada. Fakih Usman sendiri pada 1950, ketika menjabat Menteri Agama dalam Kabinet Halim, telah memformulasikannya yang mencakup kemerdekaan dan pencerdasan kehidupan beragama; penyelenggaraan pendidikan hakim dan guru agama; pencatatan nikah, talak dan rujuk (NTR); pengadilan agama; dan pendaftaran harta wakaf.[51] Namun rupanya pemerintah memandang perlu memperjelas dan menambah tugas-tugas pokok di atas sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia.

---

[50]Wawancara dengan Ismed Usman, 4 Desember 1997.

[51]Lihat, misalnya, *Amal Bakti Departemen Agama RI*, hal. 32-33.

Maka Fakih Usman mengeluarkan Peraturan Menteri Agama No. 9 Tahun 1952 tertanggal 15 Juni 1952. Isinya antara lain adalah memperjelas peraturan sebelumnya. Dalam lapangan pendidikan agama, misalnya, rumusan peraturan sebelumnya hanya menegaskan bahwa Kementerian Agama bertugas menyelenggarakan pendidikan guru-guru dan hakim agama.[52] Tapi, dalam peraturan ini, pemerintah menggunakan rumusan "menyiapkan tenaga-tenaga yang yang diperlukan pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri, instansi-instansi dan pengadilan-pengadilan berupa guru-guru, hakim agama." Pernyataan eksplisit ini sengaja dibuat karena kebutuhan jumlah guru agama di sekolah-sekolah negeri sangat banyak setelah sekolah-sekolah harus memberikan pendidikan agama.

Selain memperjelas, ada pula yang sifatnya menambah. Misalnya adalah aturan yang menyatakan bahwa Kementerian Agama harus mengadakan hubungan dengan pergerakan-pergerakan dan persekutuan-persekutuan agama serta aliran-aliran keagamaan dan kebatinan yang tidak termasuk dalam agama Islam dan Masehi (Kristen/Katolik).[53] Barangkali saat itu pemerintah menyadari banyaknya persekutuan atau aliran keagamaan dan kebatinan di luar agama resmi. Sejak zaman Belanda, banyak kalangan terpelajar moderen maupun masyarakat yang tidak menganut agama resmi semacam Islam atau Kristen, tapi mereka menganut ajaran-ajaran tertentu atau kebatinan seperti terjadi pada sebagian anggota Budi Utomo. Aliran ini tampaknya terus berlanjut pada masa Indonesia merdeka. Konghucu juga terus tumbuh, apalagi pada masa itu secara politis RRC mulai menjadi salah satu kiblat sebagian masyarakat Indonesia. Penegasan perlunya mengadakan hubungan dengan persekutuan dan aliran agama serta kebatinan dalam tingkat tertentu merupakan pengakuan atas keberadaannya.

Penambahan lain ialah bahwa Kementerian Agama bertugas menetapkan dan mengumumkan hari-hari raya. Hal ini mungkin didorong oleh sering terjadinya kesimpangsiuran dalam penetapan hariraya, khususnya dalam Islam, karena perbedaan metode menentukannya. NU umumnya menggunakan ru'yah, sementara

---

[52]*Amal Bakti Departemen Agama RI*, hal. 32.

[53]*Struktur Organisasi Departemen Agama 1946-1974* (Jakarta: Proyek Penyempurnaan Organisasi dan Tata Laksana Departemen Agama, 1982/1983), hal. 9.

Muhammadiyah menerapkan hisab. Hasilnya sering berbeda dalam penetapan tanggal harirayanya. Kementerian Agama tampaknya bermaksud menertibkan hal itu agar tidak menjurus kepada perpecahan antar umat Islam yang saat itu sangat mudah terjadi karena kuatnya persaingan partai-partai Islam.

Hal yang juga ditambahkan dalam peraturan baru tersebut ialah perlunya Kementerian Agama menetapkan cara-cara pelaksanaan upacara negara yang ada hubungannya dengan agama. Sebagaimana diketahui, Menteri Agama RIS, Wahid Hasyim, pada 2 Januari 1950 untuk pertama kali menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad di Istana Negara. Sejak itu, pemerintah tampaknya terus menyelenggarakan upacara-upacara kenegaraan yang bersifat agama sehingga dirasa perlu adanya pengaturan yang jelas mengenai hal itu. Mungkin pula hal itu disebabkan adanya tuntutan dari kalangan selain Islam untuk menyelenggarakan upacara kenegaraan yang serupa.

Penataan dan Pembangunan Organisasi

Fakih Usman juga merumuskan struktur dan uraian tugas masing-masing aparat Kementerian Agama melalui Peraturan Menteri Agama No. 10 Tahun 1952. Peraturan itu, antara lain, menyatakan bahwa Kementerian Agama terdiri atas Kantor Pusat Kementerian Agama, Jawatan-jawatan dan Biro. Lalu ditegaskan bahwa Kantor Pusat Kementerian Agama terdiri atas staf sekretariat jenderal, bagian tata usaha, urusan pegawai dan seterusnya. Juga ditegaskan bahwa Jawatan Agama terdiri atas Jawatan Urusan Agama, Jawatan Pendidikan Agama dan Jawatan Penerangan Agama. Masing-masing kemudian dibagi lagi dan mempunyai struktur di bawahnya pada tingkat propinsi, daerah, kabupaten dan kecamatan. Peraturan ini juga menyertakan uraian tugas masing-masing. Misalnya, tugas Lembaga Pendidikan dalam Jawatan Pendidikan Agama ialah menyusun daftar buku untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran serta menulis, menerjemahkan dan mengumpulkan buku untuk mempertinggi mutu pendidikan dan pengajaran agama.[54] Uraian

[54]Mengenai Peraturan Menteri Agama No. 10, 1952 tentang Struktur dan Tugas Departemen Agama, lihat *Struktur Organisasi Departemen Agama 1946-1974*, hal. 13-32.

pekerjaan semacam ini pernah dirumuskan Kementerian Agama periode K.H. Masjkur, namun rupanya perkembangan yang terus terjadi menuntut penyesuaian secara terus menerus.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Agama No. 10 Tahun 1952, Fakih Usman mensahkan kantor-kantor Kementerian yang ada di tingkat propinsi; membentuk kantor agama yang menangani urusan agama, seperti NTR, penerangan agama dan pendidikan agama pada kota-kota setingkat kabupaten; dan membentuk Kordinator Urusan Agama dan Inspeksi Pendidikan Agama tingkat karesidenan yang berfungsi mengkordinir Kantor Urusan Agama dan Pendidikan Agama di tingkat kabupaten yang berada di wilayahnya.

Kemudian, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan Kementerian Agama, Fakih Usman juga menata bantuan kepada madrasah-madrasah dan membentuk Majelis Pertimbangan Pendidikan dan Pengajaran Agama (MP3A). Pemerintah mengharapkan bahwa lembaga ini berfungsi memberikan pertimbangan dan mengajukan usul-usul kepada menteri agama tentang masalah-masalah pendidikan dan pengajaran agama. Satu hal yang untuk pertama kalinya di lakukan Kementerian Agama ialah pembagian inspeksi pendidikan agama kepada delapan daerah. Ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengawasan jalannya pengajaran agama pada sekolah-sekolah negeri dan swasta di wilayahnya masing-masing.[55]

Jatuhnya Kabinet Wilopo

Persaingan antarpartai untuk merebut kekuasaan terus berlanjut. Akibatnya, kabinet tidak dapat bertahan lama. Demikian pula Kabinet Wilopo yang dipicu oleh Peristiwa Tanjung Morawa, kecamatan di selatan Medan yang merupakan pusat perkebunan asing. Pada masa pendudukan Jepang dan revolusi, perkebunan telah diduduki warga setempat. Pemerintah bermaksud membersihkan beberapa ribu hektar yang telah diduduki orang-orang Cina yang kebanyakan adalah imigran gelap. Perkebunan tersebut hendak diserahkan kepada pemegang konsesi, yaitu perusahaan tembakau Be-

[55]*Amal Bakti Departemen Agama RI*, hal. 50.

landa. Namun keputusan pemerintah ini mendapat penolakan keras dari mereka dan sebagian warga bumi putra karena mendapat dukungan PKI. Akhirnya, timbullah insiden di mana beberapa orang mati dan banyak luka-luka. Kasus ini dibawa PKI ke parlemen di mana ia menyerang dua orang yang dipandang bertanggung jawab atas peristiwa itu, yakni Gubernur Sumatra Utara, Abdul Hakim, dan Menteri Dalam Negeri, Mohammad Roem, yang keduanya dari Masyumi. Kemudian muncullah mosi yang ditandatangani Sidik Kertapati dari Sarikat Tani Indonesia yang menuntut pemerintah membatalkan rencananya dan membebaskan semua orang yang ditahan. Kabinet menolak, termasuk Wilopo. Namun karena mosi tersebut memperoleh dukungan pula dari PNI—partai Wilopo sendiri—akhirnya Wilopo mengembalikan mandat yang berarti jatuhnya Kabinet Wilopo. Ini juga berarti berakhirnya jabatan Fakih Usman sebagai Menteri Agama.[56]

Persaingan Antarpartai dan Pemilu 1955

Persaingan antarpartai dalam meperebutkan kekuasaan pada saat itu memang sangat kelihatan seperti antara Masyumi dan PNI. Perebutan antarpartai Islam sendiri juga semakin terbuka, khususnya sejak 1953. Pada saat Masyumi menolak berkoalisi dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo 1953-1955, misalnya, NU dan PSII memanfaatkan peluang ini sehingga bisa memasukkan lima anggotanya dalam kabinet. Sejak PSII menjadi partai pada 1947, perebutan itu semakin tak terelakkan. Dalam keadaan ini, Masyumi memperoleh basis pendukung utama dari kalangan Muhammadiyah dan organisasi-organisasi Islam kecil lain. Hubungan antara Masyumi dan Muhammadiyah semakin solid, walaupun yang terakhir ini lebih berkonsentrasi pada pendidikan dan kegiatan sosial. Fakih Usman dalam situasi tersebut tetap aktif dalam keduanya. Dalam kepengurusan Masyumi periode Mohammad Natsir (1952-1954), ia tetap menjadi anggota pimpinan pusat. Demikian pula di Muhammadiyah. Pada periode AR. Sutan Mansur, 1953-1958, ia menjadi Wakil Ketua I PP Muhammadiyah.[57] Namun sejak terpilih sebagai Menteri Agama

---

[56]Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, hal. 226-227.
[57]*Ensiklopedi Islam di Indonesia*, hal. 274.

dalam Kabinet Wilopo yang menyebabkan NU keluar dari Masyumi, Fakih Usman lebih aktif di Masyumi. Pada periode kepemimpinan Mohammad Natsir yang kedua, 1954-1956, ia tetap anggota pimpinan pusat. Periode ini adalah periode perebutan massa dan kekuasaan karena pada 1955, pemerintah di bawah Kabinet Boerhanoedin Harahap dari Masyumi menyelenggarakan pemilihan umum.

Pemilihan umum 1955, menurut para ahli, berlangsung sangat demokratis dan menghasilkan "Empat Partai Besar", yaitu Partai Nasional Indonesia dengan jumlah suara 8,5 juta (22,3%), Masyumi dengan 8 juta sura (20,9%), NU dengan 7 juta suara (18,4%) dan Partai Komunis Indonesia dengan 6,1 juta suara (16,4%). Keempat partai ini berturut-turut mendapat 57, 57, 45 dan 39 kursi di Parlemen. Keempatnya berjumlah 198 dari 257 kursi. Sisanya, 59 anggota, terbagi di antara partai-partai kecil.[58] Dari hasil Pemilu ini, Fakih Usman menjadi salah seorang anggota Konstituante dari Fraksi Masyumi.[59]

Kabinet Boerhanoedin Harahap bubar pada 3 Maret 1956 sesuai dengan maksudnya yaitu setelah hasil pemilihan umum diresmikan. Sebelumnya, Masyumi menekankan pentingnya kabinet koalisi PNI, Masyumi dan NU, dan menentang keras penyertaan PKI. Pada hari itu juga, Soekarno memilih Ali Sastroamidjojo sebagai formatur. Masyumi di bawah pimpinan Natsir menunjuk Prawoto, Mohammad Roem dan Fakih Usman untuk mengadakan pembicaraan dengannya. Pada kesempatan ini, Masyumi gagal memperoleh keinginannya berupa menteri pendidikan, dalam negeri dan agama. Ia hanya memperoleh 4 kursi kabinet dan Wakil Perdana Menteri I. NU juga memperoleh kursi yang sama, sementara PSII memperoleh 2 kursi. Yang penting bagi Masyumi pada saat itu ialah ketidaksertaan PKI, sekalipun sebenarnya diharapkan Presiden Soekarno.

Dalam Konstituante, kalangan Islam kembali memperjuangkan Islam sebagai dasar negara, namun mengalami kebuntuan sampai keluar Dekrit 5 Juli 1959 dan Konstituante dibubarkan. Sebelumnya, Kabinet Ali, hasil pemilihan umum pertama, juga tidak dapat

---

[58]Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, hal. 6.
[59]*Ensiklopedi Islam di Indonesia*, hal. 275.

bertahan lama karena adanya pertikaian antara Masyumi dan PNI yang disebabkan perbedaan pandangan menyangkut hubungan pemerintah pusat dan daerah. Masyumi menarik para menterinya sehingga akhirnya pada 14 Maret 1957, Ali Sastroamidjojo menyerahkan mandatnya. Praktis kabinet parlementer berakhir. Pada saat itu juga diberlakukan keadaan bahaya sehingga pihak militer mulai menentukan keadaan.[60]

Dekade kedua setelah proklamasi atau antara 1955 dan 1965 adalah periode Soekarno. Presiden konstitusional pada masa ini sering menyatakan keinginannya untuk lebih daripada simbol dan menentukan jalannya pemerintahan. Pada 20 Juli 1956, Hatta resmi mengirimkan surat kepada DPR hasil pemilihan umum untuk berhenti sebagai Wakil Presiden karena kecewa terhadap keadaan parlemen yang tidak berwibawa, pemerintah yang tidak mengutamakan pembangunan kesejahteraan rakyat dan Presiden Soekarno yang sering mengambil tindakan sendiri.[61] Peristiwa ini makin "memanaskan" keadaan politik Indonesia.

Soekarno menekankan perlunya mengubur partai-partai sambil menegaskan kembali perlunya Dewan Nasional yang akan dipimpinnya secara langsung. Soekarno memanggil para pemimpin partai, termasuk Masyumi untuk meminta pandangan mereka tentang gagasannya tersebut. Pada saat itu, Mohammad Natsir, Fakih Usman dan M. Yunan Nasution, masing-masing sebagai ketua, wakil ketua III dan sekretaris umum, menyampaikan ketidaksetujuannya. Namun Soekarno terus bertindak.

Pada 14 Maret 1957 ia menunjuk Suwirjo dari PNI sebagai formatur dengan tugas pemembentukan Dewan Nasional. Masyumi tidak diajak formatur dalam kabinet. Tapi ia gagal karena partai-partai agama lain menolak calon-calon PKI. Lalu Presiden menunjuk dirinya untuk membentuk *zaken* kabinet darurat. Parlemen hasil pemilihan umum 1955 sampai Maret 1960 masih bekerja. Tetapi pada bulan itu, dibubarkan dan Presiden membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR).[62] Presiden tidak mengikutsertakan Masyumi. Malah karena beberapa tokoh utama-

---

[60]Lihat Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, hal. 251-256.
[61]Deliar Noer, *Mohammad Hatta, Biografi Politik* (Jakarta: LP3ES, 1990), hal. 482-485.
[62]Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, hal. 357-358.

nya seperti Mohammad Natsir dan Sjafruddin Prawinegara pada 1958 membentuk Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Masyumi diminta membuktikan ketidakterlibatannya. Gagal dalam pembuktian itu, Presiden memerintahkan pembubarannya pada 17 Agustus 1960. Pada saat itu, Prawoto Mangkusasmito menjabat sebagai ketuanya, sedang Fakih Usman sebagai wakil ketua II.[63] Posisi Fakih Usman dalam Masyumi sejak tahun 1956 memang semakin penting dan termasuk di antara inti kepemimpinannya. Setelah partainya dibubarkan, pada tahun yang sama, pemerintah memenjarakan para tokoh yang terlibat dalam PRRI seperti Mohammad Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, dan Boerhanoedin Harahap. Bahkan pada 1962 pemerintah memenjarakan tokoh-tokoh yang tidak turut dalam PRRI seperti Prawoto Mangkusasmito, Mohamad Roem, M. Yunan Nasution, E.Z. Muttaqin, Isa Anshary, Hamka, Kiyai Mukti, Ghazali Sjahlan, Jusuf Wibisono, dan Kasman Singodimedjo. Sutan Sjahrir, bekas Perdana Menteri, Anak Agung Gde Agung, bekas Menteri Dalam Negeri, dan lain-lain, juga ikut mendekam dalam penjara.[64]

Kepribadian Muhammadiyah

Yang menarik ialah bahwa Fakih Usman adalah satu-satunya tokoh Masyumi yang tidak ditahan. Ini mengherankan yang lain seperti diungkapkan Mohamad Roem dalam tulisan mengenang meninggalnya Fakih Usman pada 1968. Kepribadian Fakih Usman memang sederhana. Ia tidak banyak bicara dan tidak bisa berpidato sebagaimana seorang orator. Dalam mengemukakan pemikiranya, ia dikenal sederhana, jernih, luas dan dalam bentuk percapakan biasa.

Saat Masyumi dibubarkan, ia aktif di Muhammadiyah. Saat itu Muhammadiyah dipimpin Junus Anis (1959-1961). Dalam kepengurusan tersebut, posisi Fakih Usman memang tidak sepenting pada masa Bagus Hadikusumo atau AR. Sutan Mansur. Hal itu barangkali karena posisinya sebagai Wakil Ketua II di Masyumi dipandang PP Muhammadiyah sudah menyibukkannya. Apalagi

[63]Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, hal. 104.
[64]Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, hal. 414-415.

Masyumi sedang berada pada masa-masa kritis karena keterlibatan para tokohnya dalam PRRI.

Walaupun demikian, ia masih anggota PP Muhammadiyah dan komunikasinya masih terus berlangsung secara intens. Apalagi setelah Masyumi bubar, ia lebih banyak lagi memperhatikan Muhammadiyah. Ceramahnya pada Ramadhan 1961 malah dijadikan rujukan atas apa yang sekarang populer dengan sebutan Kepribadian Muhammadiyah. Saat itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah meyelenggarakan Kursus Pimpinan yang diikuti para wakil seluruh Pimpinan Muhammadiyah Daerah se-Indonesia. Fakih Usman memberikan kuliahnya dengan judul "Apakah Muhammadiyah itu?" Kuliah tersebut ternyata menyadarkan pimpinan bahwa untuk perjuangan seterusnya, Muhammadiyah memerlukan rumusan yang dapat dijadikan pedoman supaya perjuangan Muhammadiyah nyata dan jelas.[65]

Atas kesadaran itu, PP Muhammadiyah mengambil langkah untuk membentuk sebuah tim yang bertugas merumuskan ceramah Fakih Usman di atas menjadi Kepribadian Muhammadiyah dengan penambahan materi dari anggota tim lainnya. Tim itu terdiri Fakih Usman, Farid Ma'ruf, Wardan Diponingrat, Hamka, Djarnawi Hadikusuma, Djindar Tamimy dan Saleh Ibrahim. Hasilnya dibawa ke Sidang Tanwir 25-28 Nopember 1962 dan kemudian disahkan dalam Muktamar ke-35 tahun 1962 di Jakarta dengan penyempurnaan redaksional.[66]

Isi Kepribadian Muhammadiyah antara lain menekankan bahwa tujuan Muhammadiyah ialah untuk membentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Penegasan identitas atau kepribadian Muhammadiyah ini merupakan respon terhadap perkembangan keadaaan Indonesia pada awal 1960-an yang memberi tempat kepada paham kiri.[67] Respon demikian tentunya dapat dipahami karena Fakih Usman adalah salah seorang yang ikut serta dalam pergulatan politik Islam. Ia sangat prihatin dengan perkembangan

---

[65]H.M. Djindar Tamimy dan H. Djarnawi Hadikusuma, *Muqaddimah, Anggaran Dasar dan Kepribadian Muhammadijah* (Jogjakarta: P.T. Persatuan, 1972),hal. 42.

[66]M. Yunan Yusuf, *Kemuhammadiyahan, Kajian Pengantar*, Cet. 3 (Jakarta: Yayasan "Pembaharu", 1989), hal. 45-46.

[67]M. Yunan Yusuf, *Kemuhammadiyahan*, hal. 45-60.

saat itu dan kepriha tinan tersebut terkandung dalam rumusan Kepribadian Muhammadiyah, sekalipun tidak langsung.

Fakih Usman pada 1960-an menjadi salah satu tempat bertukar pikiran kalangan Islam yang *concern* terhadap perkembangan politik saat itu,[68] terutama kalangan muda seperti Oesman Ralibi, Anwar Haryono, Sulastomo, Agus Sudono, Lukman Harun, dan Mar'ie Muhammad. Mereka umumnya menanyakan perkembangan politik dan mendiskusikan sesuatu.[69] Mereka mengatahui kalau tokoh-tokoh yang dipenjara itu adalah teman seperjuangannya. Semakin lama mereka melihat situasi makin mencekam karena PKI makin berpengaruh. Pada tahun-tahun tersebut, partai kiri ini ibarat negara dalam negara. Situasi ini mendorong pembicaraan dengan sesama kalangan Islam semakin sering dilakukan.

Setelah tragedi G30S/PKI dan suasana berada dalam kendali Orde Baru, Fakih Usman bersama Hasan Basri dan Anwar Haryono mengirim nota kepada Panglima Militer Daerah Jayakarta, menuntut rehabilitasi Masyumi. Nota yang dikirimkan pada tanggal 9 Mei 1966 ini terkenal dengan Nota KH Fakih Usman.[70]

Sementara itu keberadaan Fakih Usman di PP Muhammadiyah juga tampak semakin penting. Pada periode Ahmad Badawi (1962-1965), ia kembali menjabat Ketua I. Pada periode Ahmad Badawi ke-2 (1965-1968), ia diangkat sebagai penasihat PP Muhammadiyah bersama Hamka, Sukiman Wiryosanjoyo, AR. Sutan Mansur, Junus Anis, RH. Hajid dan Sarjono.[71] Ahmad Badawi sering menyerahkan masalah-masalah kepemimpinan kepada Fakih Usman pada saat-saat uzur dan memberi isyarat untuk meneruskan kepemimpinannya. Tetapi Fakih berpendapat lebih baik diserahkan ke angkatan lebih muda. Sekalipun demikian, Muktamar Muhammadiyah ke-37 di Yogyakarta menetapkan Fakih Usman sebagai ketua terpilih didampingi Rasjidi, Hamka, Abdul Kahar Muzakir, Kusnadi, Junus Anis, Malik Ahmad, AR. Fakhruddin dan Djindar Tamimy.

Menyadari kesehatannya yang makin menurun, Fakih Usman

---

[68]Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, hal. 416.
[69]Wawancara dengan Ismed Usman, 22 Oktober 1997.
[70]*Ensiklopedi Islam di Indonesia*, hal. 276.
[71]*Ensiklopedi Islam di Indonesia*, hal. 274.

merasa perlu menunjuk orang-orang yang menjalankan roda organisasi pada saat ia berobat ke luar negeri. Ia lalu mengundang pertemuan di rumahnya pada 2 Oktober 1968. Dalam pertemuan itu ia menyampaikan Garis Kebijaksanaan PP Muhammadiyah periode 1968-1971 dan menunjuk Rasjidi dan AR. Fachruddin untuk menggantikannya selama ia berobat. Namun hari berikutnya, 3 Oktober 1968, PP Muhammadiyah menerima kabar bahwa Fakih Usman telah meninggal dunia. Dalam rapat kilat, AR. Fachruddin ditunjuk sebagai penggantinya.

Demikianlah, Fakih Usman memulai aktifitasnya dari Muhammadiyah Gresik dan pulang ke rahmatullah juga dalam pangkuan Muhammadiyah.[72]

[72]*Ensiklopedi Islam di Indonesia*, hal. 274.

K. H. Mohammad Iljas;

Pengembangan Kementerian Agama

Masdar F. Mas'udi
dan Syafiq Hasyim

K.H. Mohammad Iljas, yang waktu kecil akrab dipanggil Gus Mad,[1] adalah putra pasangan K.H. Mohammad Qolyubi dan Siti Mardhiyyah. Ia lahir pada 23 November 1911 di Kraksan, Probolinggo, Jawa Timur. Ayah Gus Mad adalah kiyai yang disegani dan hakim agama di daerah tersebut. Diceritakan bahwa kakek Gus Mad dari arah bapak adalah seorang yang dipecayai sebagian Muslim sebagai wali yang bernama Kiyai Basyariah. Selain Gus Mad, pasangan Mohammad Qolyubi dan Siti Mardhiyah juga dikaruniai anak perempuan, Ummi Kulsum, yang kemudian menjadi ketua Muslimat NU 1947-1950, dan terkenal dengan panggilan Ibu Nyai Yasin. Pada masa kecil, Gus Mad dan kakaknya mendapatkan pendidikan agama dari orang tuanya. Sebelum mendapatkan pendidikan di pesantren, Gus Mad belajar di sekolah model Belanda, *Holland Indische School* (HIS) di Bubutan Jawa Timur. Di sinilah ia pernah satu kelas dengan Roeslan Abdulgani, mantan Menteri Luar Negeri.

Selepas HIS, Gus Mad *nyantri* di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang di bawah asuhan K.H. Hasyim Asy'ari,[2] yang juga adalah paman Gus Mad. Jauh sebelum *nyantri* di pesantren ini, ketika baru berusia empat tahun (1915), Gus Mad sudah menunjukkan

---

[1]Gus adalah panggilan kehormatan bagi putra Kiyai. Sedangkan untuk putri Kiyai biasa dipanggil Ning. Panggilan ini lebih sering digunakan di pesantren-pesantren Jawa Timur dan Jawa Tengah.

[2]K.H. Hasyim Asy'ari (1871-1947) adalah ulama kharismatis, salah seorang pendiri organisasi keagamaan NU di Jawa Timur. Semasa hidup, ia juga turut berjuang mengerahkan santri-santrinya untuk berperang melawan penjajah. Ketika Masyumi berdiri ia diminta menjadi ketuanya.

kecerdasannya. Tanda-tanda kecerdasannya itu tampak, antara lain, ketika ia menjawab pertanyaan Kiyai Wahab Chasbullah ketika berkunjung ke rumah Kiyai Hasyim. Kiyai Wahab Chasbullah,[3] yang terkenal *alim* dalam fikih, bertanya kepada Iljas kecil yang saat itu sedang bermain-main dengan angsa di depan rumah Kiyai Hasyim: "Gus mengapa suara angsa itu keras sekali?" Secara spontan Gus Mad menjawab, "karena takdir Allah". Mendengar jawaban itu, Kiyai Wahab menyahut, "Ya tidak begitu, angsa bersuara keras *kan* karena lehernya panjang." Mendengar sahutan Kiyai Wahab seperti itu, Gus Mad langsung memberi argumentasi lain. "Kalau alasannya leher panjang, mengapa katak yang tidak punya leher panjang suaranya justru keras sekali, sedangkan ular yang lehernya panjang malah tidak bersuara." Mendengar sanggahan tersebut Kiyai Wahab Chasbullah mengakui bahwa anak usia 4 tahun yang bernama Mohammad Iljas itu benar-benar anak cerdas.[4]

Ketika menjadi santri senior, Mohammad Iljas bersama Wahid Hasyim memelopori masuknya mata pelajaran umum, seperti ilmu bumi, ilmu hayat, berhitung, dan bahasa Inggris, ke dalam kurikulum pesantren. Meskipun banyak yang tidak setuju, mereka berdua tetap bersikukuh agar program tersebut diterapkan.[5] K.H. Wahid Hasyim dan K.H. Mohammad Iljas adalah dua saudara dan sekaligus kawan yang sangat kompak. Meskipun peranannya lebih banyak di belakang layar jika dibandingkan dengan Wahid Hasyim, namun visi pendidikan K.H. Mohammad Iljas banyak di-

---

[3]K.H. Wahab Chasbullah (1888-1971) adalah saudara sepupu K.H. Hasyim Asy'ari. Ia adalah pendiri NU yang sesungguhnya. Di kalangan NU ia dikenal sebagai satu-satunya ulama NU yang *alim* dalam bidang ilmu fikih, terutama fikih politik. Semua langkah politik yang diambilnya selalu dilandasi kaidah-kaidah fikhiyyah.

[4]Saifullah Ma'shum, et.al., *Menapak Jejak Mengenal Watak, Sekilas Biografi 26 Tokoh Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Yayasan Saifuddin Zuhri, 1994), hal. 282-283.

[5]Pada masa itu ilmu-ilmu umum seperti ilmu bumi, ilmu hayat, berhitung, dan mata pelajaran lainnya masih dianggap sebagai ilmu kolonial dan ilmu orang kafir. Stigamatisasi ilmu tersebut sangat bisa dipahami karena pada kenyataannya ilmu-ilmu seperti itu memang dibawa penjajah. Anggapan mereka, ilmu tidak bebas nilai. Jadi sangat dimaklumi apabila pada saat itu sebagian ulama dan pesantren mengharamkan belajar membaca dan menulis huruf latin. Demikian pula, terhadap celana panjang dan dasi, hanya karena keduanya biasa dipakai orang-orang Belanda. Alasan yang kelihatan lucu dan tidak rasional ini nampaknya dilatarbelakangi oleh semangat dan jiwa nasionalisme yang tinggi.

pakai dalam usaha pengembangan Pondok Pesantren Tebuireng.[6]

Kecerdasan dan keaktifan Mohammad juga diakui teman-teman seangkatannya terutama di NU. Suatu ketika ia pernah diminta K.H. Hasyim Asy'ari untuk *mbalah*[7] beberapa kitab di hadapan para santri. Mendapat permintaan tersebut Mohammad Iljas tidak segera menerima, tetapi malah merasa tidak mampu. Lalu, Kiyai Hasyim menegurnya. Didorong oleh rasa malu dan tidak enak kepada gurunya, Mohammad Iljas menyendiri di kamarnya, belajar selama kurang lebih 40 hari. Setelah itu, ia berhenti dari *uzlah*-nya dan langsung mengajarkan kitab yang pernah diminta K.H. Hasyim tanpa dipandu kitab pegangan. Saat itu, ia hafal di keluar kepala semua yang diajarkannya. Karena peristiwa ini, kepercayaan K.H. Hasyim terhadap Mohammad Iljas meningkat sehingga ia bersama Wahid Hasyim sering diutus melakukan kunjungan ke sejumlah kiyai dan pesantren di Jawa untuk menggalang solidaritas dalam rangka mendirikan Jam'iyah NU.

Ketika menjadi anggota *Volksraad*, K.H. Mohammad Iljas mempunyai peranan penting dalam merespon wajib militer (milisi) yang dikeluarkan pemerintah kolonial Hindia Belanda pada pertengahan 1941. Menurut ketentuan, setiap pemuda berusia 18-25 tahun wajib menjadi serdadu sukarela. Menjaga kemungkinan penerapan ketentuan tersebut, NU melakukan penafsiran agar tidak memberatkan rakyat Indonesia. Dalam ketentuan Belanda dikatakan bahwa milisi bumiputera terdiri dari 2 badan. Pertama, *Lansdwachter* (pengawal negeri) dan kedua, *Stadswachter* (pengawal kota). Termasuk dalam kategori penjaga kota adalah tenaga-tenaga keamanan yang menjaga kampung. Berdasarkan peraturan tersebut, NU di bawah pimpinan K.H. Wahab Chasbullah,[8] mengusulkan agar pemuda-pemuda yang terkena *milisi* dikenakan kewajiban menjaga keamanan di kampungnya masing-masing. Dalam merumuskan

---

[6]Wawancara dengan Drs. Sawabi Ihsan, MA, mantan sekretaris pribadi K.H. Mohammad Iljas saat menjabat Menteri Agama. Sawabi Ihsan merupakan salah satu dari enam orang yang paling terakhir meninggalkan Tebuireng setelah Surabaya diserbu Jepang.

[7]*Mbalah* adalah membaca kitab di hadapan orang banyak.

[8]Kepemimpinan Kiyai Wahab Chasbullah di NU merupakan puncak dari karir politik NU. Namun pada sisi lain, kepemimpinannya juga menyebabkan munculnya tuduhan sifat oportunis dalam politik NU.

ketentuan ini, Mohammad Iljas sangat berperan; dia mengatakan bahwa kalau hanya untuk menjaga keamanan kampung, tanpa ada *milisi*pun mereka sudah melakukannya. Dalam Islam, mempertahankan tempat tinggal adalah wajib bagi setiap muslim.

Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebelum maupun sesudah menjadi Menteri Agama dan Duta Besar, Kiyai Mohammad Iljas selalu hidup sederhana. Ketika menjadi Menteri, misalnya, ia mencukupkan diri dengan gaji Rp 3.000,- perbulan, padahal uang sejumlah itu hanya cukup untuk membeli daging ayam selama dua minggu. Istrinya, Zahrah, harus pintar-pintar mengatur pengeluarannya agar cukup untuk sebulan penuh.[9] Sebagai menteri, ia tidak mempunyai rumah kecuali rumah tugas yang diberikan negara. Selepas tugas, rumah tersebut dikembalikan kepada pemerintah. Selain itu, ia juga tidak pernah menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya. Karena itulah ia dikenal sebagai orang yang jujur dan bersih.

Meski berlatar belakang NU, Kiyai Mohammad Iljas memiliki kebiasaan yang sedikit berbeda dengan tradisi NU dalam memandang beberapa hal seperti ilmu *kanuragan*, pembacaan *manakib* tokoh-tokoh spiritual Islam,[10] dan upacara keagamaan lain yang berbau mistis dan kultus. Namun ia tidak menolak ritus memperingati Nabi. Kalau ritus dilakukan selain kepada Nabi Muhammad, Kiyai Mohammad Iljas menolak dengan tegas.[11] Menurut dia, praktik-praktik itu bisa membawa orang pada penghambaan kepada sesama. Tampaknya dalam persoalan teologis, Kiyai Mohammad Iljas lebih dekat kepada teologi rasional daripada tradisional.

---

[9]Wawancara dengan Ibu Zahrah, istri Kiyai Iljas.

[10]*Manakiban*, sesuai dengan maknanya, adalah upacara pembacaan riwayat hidup seorang wali atau manusia lain yang diyakini mempunyai keistimewaan tertentu, seperti membaca *manakib* Syekh Abdul Qadir Jaelani, Syekh Saman, dan lain sebagainya. Meskipun pada awalnya *manakiban* ini ditujukan sebagai sarana untuk mengambil pelajaran atas riwayat hidup orang-orang suci (*i'tibar*), dan bukan sebagai kultus individu, tapi masyarakat awam kemudian menjadikannya sebagai pengkultusan semata. Proses pencarian *i'tibar* justru ditinggalkan. Hal ini karena orang awam jarang yang bisa memahami bahasa Arab, sementara *manakib* tersebut hanya dibaca Arabnya saja. Upacara ini sangat mengakar di kalangan masyarakat NU.

[11]Wawancara dengan HM. Zaki Iljas, putra pertama Kiyai Mohammad Iljas.

Membina dan Mendidik Keluarga

Muhammad Iljas mengakhiri masa lajangnya pada usia 25. Riwayat perkawinannya dapat dirunut ketika ia masih *mondok* di Pesantren Tebuireng, Jombang. Ia mempunyai teman bernama H. Busyairi, putra seorang saudagar di Pekalongan yang terkenal dermawan dan religius. Suatu saat Gus Mad bertandang ke rumah Busyairi. Mohammad Iljas secara sepintas melihat adik perempuan Busyairi yang bernama Zahrah. Pertemuan singkat itu ternyata menimbulkan bekas di hati Gus Mad, sehingga ia menanyakan kepada Busyairi tentang adik perempuannya tersebut.

Namun pertemuan tersebut berhenti di situ karena Mohammad Iljas melanjutkan studinya ke Makkah al-Mukkaramah. Di Mekkah, selain mempelajari ilmu-ilmu agama secara mendalam, ia juga meningkatkan kemampuan bahasa Arabnya. Iljas mempunyai *talenta* bahasa yang luar biasa. Ia bisa berbicara bahasa Arab sefasih orang Arab, dan mampu berbicara bahasa Arab *slang* (pasaran) seperti orang Arab. Memang, Kiyai Mohammad Iljas sangat terkenal dengan kepandaian berbahasa Arab; di kalangan kiyai-kiyai NU sendiri hampir tidak ada yang mampu menandingi kefasihannya.

Ketika Mohammad Iljas belajar di Mekkah, hubungan keduanya terputus sesaat, namun ini tidak akhir dari segalanya. Setelah selesai bermukim di Mekkah kurang lebih 5 tahun, Mohammad Iljas kembali pulang dan sesampainya di tanah air ia memutuskan untuk mengawini Zahrah binti K.H. Isma'il. Ada hal menarik dalam acara pernikahan itu, yakni ia membaca sendiri khutbah nikahnya. Apa yang dilakukannya jelas tidak lazim, karena biasanya pembaca khutbah nikah adalah orang yang lebih tua. Ia melakukan ini dengan alasan ingin menasehati diri sendiri, sesuai dengan anjuran Islam, *ibda' bi nafsik*, mulailah dari diri sendiri.[12]

Setelah menikah, mereka tinggal di Pekalongan. Dalam komunitas baru ini, Mohammad Iljas cepat melakukan penyesuaian dengan kebiasaan masyarakat sekitar sehingga ia tidak merasa tinggal di kampung orang. Bahkan masyarakat sekitar mempercayainya sebagai orang yang paling tahu dalam bidang agama. Dalam

---

[12]Saifullah Ma'shum, *Menapak Jejak*, hal. 289.

kesempatan tertentu, seperti pada bulan kelahiran Nabi Muhammad, Isra' Mi'raj atau menyambut tahun baru, hampir setiap hari Kiyai Mohammad Iljas berceramah. Kalau masyarakat sudah meminta, ia tidak bisa menolaknya. Bahkan bisa jadi ia menomorduakan keluarga demi memenuhi keinginan umat.

Dalam mendidik anak-anaknya, Kiyai Iljas tidak pernah memaksakan kehendaknya. Dari ketujuh anaknya, tidak ada yang pendidikannya diarahkan secara khusus untuk memenuhi keinginannya sendiri.[13] Anak-anaknya diberi kebebasan penuh memilih bidang studi yang mereka minati. Kalau ada salah satu anaknya yang menekuni bidang agama, itu bukan karena ayahnya, tetapi semata-mata merupakan pilihan sendiri. Kiyai Mohammad Iljas selalu mengingatkan anak-anaknya akan pentingnya memanfaatkan waktu untuk mempelajari segala macam ilmu pengetahuan.

Dalam hal pemberian kesempatan belajar kepada anak-anaknya, Mohammad Iljas juga tidak pernah membeda-bedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Semua anaknya memiliki hak yang sama dalam mengakses ilmu pengetahuan tanpa diskriminasi. Hal ini berbeda dengan sikap kebanyakan kiyai yang biasanya lebih mendahulukan anak laki-laki daripada perempuan.

Perjalanan Karir

Kiyai Mohammad Iljas memulai karir politiknya sejak diangkat menjadi anggota parlemen sementara RI pada 1951 mewakili unsur NU dari wilayah Pekalongan. Sejak saat itu, Kiyai Iljas menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tugas-tugas keparlemenan. Karena waktu itu ia masih tinggal di Pekalongan, ia harus bolak-balik Jakarta-Pekalongan tiap minggu. Ketika menjadi anggota parlemen ini, ia memperluas jaringannya dengan tokoh-tokoh nasional yang tidak hanya berlatar belakang NU dan Islam, tapi juga dari

---

[13]Ketujuh putra Kiyai Mohammad Iljas secara urut; H. M. Zaki Iljas, H.M. Roeysdi Iljas, H.M. Maimun Iljas, H.M. Nasir Iljas, Hj. Wiwiek Zakiah Iljas, H.M. Yulianti Roshida Iljas, SH dan terakhir H. Budiyanto M. Basyir Iljas. Dari ketujuh anak ini, sampai sekarang Kiyai Mohammad Iljas sudah mempunyai 18 cucu.

partai-partai lain. Kiyai Iljas mempunyai hubungan akrab, misalnya, dengan Kiyai Hassan Basri dan Wilopo.[14]

Selain pernah menjabat Menteri Agama, sebagaimana akan dibahas di bawah, Kiyai Mohammad Iljas juga pernah menjabat Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi. Sebagai Dubes di negara berkonstitusi Islam, Kiyai Mohammad Iljas mendapatkan tantangan cukup berat. Ketika itu, secara politis, haluan dan pandangan politik Indonesia agak berbeda dengan kerajaan Arab Saudi. Dalam pandangan pemerintah Arab Saudi, Indonesia agak kekiri-kirian (*leftist*), sementara itu Indonesia mengkategorikan Arab Saudi sebagai negara reaksioner. Dalam kondisi seperti itu, kepiawaian Mohammad Iljas benar-benar diuji. Namun berkat kemampuan diplomasinya, Kiyai Mohammad Iljas berhasil memberikan kesan baik mengenai Indonesia kepada Raja Faisal.[15] Setelah masa tugas sebagai duta besar selesai, Kiyai Mohammad Iljas mendapat tugas baru sebagai Menteri Penghubung Alim Ulama. Ini sekaligus merupakan karir terakhir Kiyai Mohammad Iljas pada masa Orde Lama.

Setelah menjabat Menteri Penghubung Alim Ulama, Kiyai Mohammad Iljas sebenarnya ingin beristirahat dari aktivitas politik. Ia ingin mencurahkan waktu di masa tuanya untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan agama. Namun pada masa Orde Baru, ia masih dibutuhkan, yakni sebagai Wakil Ketua DPA.

Dalam waktu-waktu luangnya, Kiyai Mohammad Iljas sering mengutarakan kepada istrinya kalau tiba saatnya dirinya dipanggil Tuhan, ia memohon agar bisa dipanggil pada usia Nabi meninggal dunia (63). Mohammad Iljas ingin *'itba* (mengikuti) Nabinya. Namun, justru ia dianugerahi sampai 69 tahun. Suatu saat ia pergi ke Pekalongan; mobil yang ditumpanginya mengalami kecelakaan di daerah, Losari, Cirebon. Dalam kecelakaan tersebut, ia mengalami cidera tempurung lutut dan pangkal paha. Sejak kecelakaan ini, kondisi kesehatan Kiyai Mohammad Iljas terus menurun. Selain menderita penyakit kencing manis sejak lama, pasca kecelakaan team

---

[14]Wawancara dengan keluarga Kiyai Iljas. Menurut informasi yang diberikan, Kiyai Iljas sering dikunjungi teman-temannya yang tidak hanya berlatar belakang NU.

[15]Saifullah Ma'shum, *Menapak Jejak*, hal. 295.

dokter juga menemukan adanya kanker di tubuhnya. Pada saat itu, Presiden Soeharto atas nama pemerintah keIndonesia menawarkan kepada Kiyai Mohammad Iljas untuk berobat ke luar negeri, namun ia menolaknya. Sebagai Muslim, ia yakin akan takdir Tuhan; bahwa kalau Tuhan memanggil dengan perantara penyakit yang dideritanya, ke manapun berobat juga akan mendapatkan panggilan tersebut. Akhirnya, ia meninggal dunia pada 5 Desember 1970.

Konteks Sosial Politik

Sebelum membicarakan kiprah K.H Mohammad Iljas ketika menjabat Menteri Agama, penting sekali membahas konteks sosial politik saat itu. Secara umum, kondisi sosial politik tidak stabil. Pergantian dari satu kabinet ke kabinet lain berjalan sangat cepat, bahkan ada beberapa kabinet yang bertahan hanya dalam hitungan bulan. Kondisi sosial politik seperti itu disebabkan pertentangan antarpartai yang sangat keras, bahkan termasuk antarpartai Islam, seperti NU dan Masyumi. Hal ini jelas berpengaruh terhadap kinerja lembaga-lembaga pemerintah, yang pada akhirnya menghambat pengembangan struktur kelembagaan pemerintah.[16]

Mohammad Iljas menjadi Menteri Agama dalam tiga kabinet: Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955-19 Januari 1956); Kabinet Ali-Roem-Idham (20 Maret 1956-9 April 1957); dan Kabinet Djuanda (9 April 1957-10 Juli 1959).

Kabinet Burhanuddin Harahap menggantikan kabinet Ali Sastroamidjojo I yang menyerahkan mandatnya kepada Presiden pada 23 Juli 1955. Burhanuddin merupakan sosok pribadi Masyumi yang bisa diterima pelbagai kalangan termasuk PNI dan partai-partai lain. Dalam kabinet ini, NU berhasil mendudukkan dua wakilnya yaitu Menteri Agama, Kiyai Mohammad Iljas, dan Menteri Dalam Negeri, Mr. Sunarjo.

Salah satu kebijakan Burhanuddin yang kontroversial dan ditolak banyak partai termasuk NU, adalah diajukannya RUU anti ko-

---

[16]Untuk pertentangan antarpartai, khususnya antara NU dan Masyumi, lihat Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1987); Martin van Bruinessen, *NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa* (Yogyakarta: LKIS, 1994), dan Kacung Marijan, *Quo Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah 1926* (Jakarta: Erlangga, 1992).

rupsi. Kalangan NU keberatan karena RUU tersebut dianggap tidak mempunyai dasar keadilan hukum. Menurut RUU tersebut, seseorang bisa ditangkap dengan tuduhan melakukan tindak korupsi tanpa terlebih dahulu melalui pengadilan. Artinya, tanpa putusan lembaga hukum resmi, seseorang bisa dianggap sebagai koruptor. Bagi NU, ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak menghormati asas praduga tak bersalah. Dalam Islam, tidak dibenarkan mendakwa seseorang tanpa saksi yang kuat. Selain itu, NU juga mencium adanya gelagat tidak baik di balik RUU ini, yakni dijadikannya senjata untuk menyingkirkan saingan politik dalam Pemilu. Alasan ini cukup masuk akal mengingat waktu diajukannya RUU tersebut bertepatan dengan masa menjelang Pemilu.

Meskipun mendapat protes keras dari NU, Burhanuddin tetap bersikukuh mempertahankan RUU tesebut. Konsekuensinya, Kiyai Mohammad Iljas terpaksa meninggalkan kursi Menteri Agama pada 19 Januari 1956. Ini dilakukan karena partai yang diwakilinya menolak usulan tersebut. Hal yang sama juga dilakukan Mr. Sunarjo dari jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri.

Akhirnya, kabinet Burhanuddin Harahap bubar secara resmi pada 3 Maret 1956 setelah hasil Pemilu diresmikan. Ketua Masyumi sendiri menyatakan bahwa sudah tiba waktunya bagi Kabinet Burhanuddin menyerahkan mandatnya kepada Kepala Negara.[17]

Bubarnya Kabinet Burhanuddin tentu saja disambut baik kalangan NU. Bahkan Kiyai Wahab Chasbullah menyatakan bahwa persetujuan Masyumi merupakan pintu bagi kerjasama dengan NU. Namun, Natsir tidak optimis dengan pemerintah yang akan dibentuk.

Pada waktu pembentukan kabinet penganti, pemerintah menghadapi persoalan baru dari Presiden Soekarno. Ia mengusulkan agar kabinet koalisi yang terdiri dari kalangan nasionalis, Islam dan Marxis segera dibentuk. Usul tersebut tidak disetujui Masyumi karena khawatir negara akan jatuh kepada pemerintahan diktatur. Bahkan secara tegas Masyumi menolak masuknya PKI dalam kabinet. Akibatnya Masyumi harus merelakan kursinya dalam kabinet. NU pada dasarnya sependapat dengan Masyumi, namun lebih realistis melihat

---

[17]Deliar Noer, *Partai Islam*, hal. 247.

kekuatan Presiden. Sementara itu, Perti bisa menerima PKI dengan syarat Masyumi tidak diikutkan. Sebab, apabila keduanya sama-sama masuk, maka umur kabinet tidak akan lama.

Pada 3 Maret 1956 Presiden menunjuk Ali Sastroamidjojo menjadi formatur menghadapi Prawoto, Roem dan Fakih Usman dari Masyumi. Dalam kabinet ini, Masyumi kehilangan kursi yang diharapkannya yaitu pendidikan, dalam negeri dan agama, meski masih mendapat lima kursi. Sementara itu, jabatan Menteri Agama jatuh ke tangah NU, yaitu K.H. Moh Iljas. Pemilihan ini sangat mungkin dilatarbelakangi oleh sikap Kiyai Iljas yang tidak banyak turut campur dalam konflik-konflik di atas. Dalam Kabinet Ali II ini, NU mendapat empat kursi lagi, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Perekonomian, Menteri Sosial, dan Wakil Perdana Menteri II.[18] Namun kabinet Ali II ini juga tidak berusia panjang. Ia jatuh pada 19 April 1957.

Kabinet selanjutnya adalah Kabinet Karya dengan Djuanda sebagai Perdana Menteri. Dalam kabinet yang dilantik 9 April 1957 ini, untuk ketiga kalinya K.H. Mohammad Iljas kembali dipercaya menjadi Menteri Agama. Usia kabinet ini relatif agak panjang, sekitar 2 tahun.

Menjadi Menteri Agama

Dari uraian di atas, ketika memimpin Kementerian Agama, Kiyai Mohammad Iljas mengalami situasi sosial dan politik yang menegangkan. Selain menghadapi pergumulan antarpartai politik Islam yang tidak kunjung berhenti, ia juga mengalami dua peristiwa besar dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu Pemilu 1955 dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Meskipun suasana politik agak labil, semangat K.H. Mohammad Iljas dalam membina Kementerian Agama tidak pernah kendor. Untuk itu, Kementerian Agama di bawah kepemimpinannya telah lebih maju jika dibandingkan dengan kepemimpinan sebelumnya, terutama dalam bidang Susunan Organisasi dan Tatakerja Kementerian Agama dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama No. 2/1958 tanggal 5 September 1958 yang merupakan petunjuk kerja oprerasional Kementerian Agama. Peraturan Menteri

[18]Deliar Noer, *Partai Islam*, hal. 250.

Agama No. 2/1958 ini adalah pengganti Peraturan Menteri Agama No. 9, 10 dan 11 tahun 1952.

Keberhasilan K.H. Mohammad Iljas dalam mengembangkan Kementerian Agama juga didukung kemampuannya berdiri di atas semua golongan. Meski berlatar belakang NU, Mohammad Iljas dikenal sebagai orang yang tidak fanatik kepada kepentingan golongannya. Bahkan di antara menteri-menteri agama dari NU, ia adalah satu-satunya menteri yang tidak terlibat dalam upaya mendominasi Kementerian Agama oleh orang-orang NU. Hal ini memunculkan kesan bahwa ia tidak terlalu loyal kepada organisasinya. Padahal yang dilakukan Kiyai Mohammad Iljas tidak lain hanyalah semata-mata ingin berlaku obyektif untuk pengembangan Kementerian Agama.

Visi dan misi K.H. Mohammad Iljas adalah moderasi non sektarianisme. Walaupun ia Menteri Agama dari NU, namun dalam menjalankan tugas kementeriannya ia tidak melakukan pembedaan dan pilih kasih. Kiyai Mohammad Iljas berusaha menjalankan tugas tanpa dibebani kepentingan-kepentingan primordial organisasi politik. Ia adalah salah satu menteri agama yang mengutamakan profesionalisme. Semboyan *the right man in the right place,* selalu dijunjung tinggi. Visi moderat dan non sektarianismenya terlihat dari orang-orang yang berada di sekitarnya. Mereka tidak hanya datang dari kalangan dalam partai NU saja, akan tetapi juga orang-orang di luar NU. Boleh dikatakan Kiyai Mohammad Iljas merupakan salah satu menteri, jika bukan satu-satunya, menteri yang tidak mempunyai persoalan dengan partai lain. Anak-anak muda seperti Sawabi Ihsan, Mukti Ali, Anton Timor Jaelani dan sebagainya, bukan berasal dari lingkungan NU, akan tetapi Kiyai Mohammad Iljas sangat memperhatikan mereka.

Secara umum ada dua hal yang perlu disoroti dalam membicarakan keberhasilan K.H. Mohammad Iljas ketika memimpin Kementerian Agama. *Pertama,* lapangan tugas Kementerian Agama. *Kedua,* struktur organisasi Kementerian Agama.[19]

---

[19]Lebih jauh tentang lapangan tugas dan struktur organisasi Kementerian Agama pada masa K.H. Moh. Iljas dapat dilihat di Puslitbang Kehidupan Beragama-Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, *Laporan Sejarah Departemen Agama* (Naskah Tahap I), (Jakarta: Proyek Penelitian Keagamaan Departemen Agama, 1981), hal. 72-78

Tugas Kementerian Agama

Lapangan tugas Kementerian Agama pada masa K.H. Mohammad Iljas mengalami perkembangan jika dibandingkan dengan masa sebelumnya. Peraturan Menteri Agama No. 2/1958 yang berisi tugas-tugas Kementerian Agama adalah perluasan dan perngembangan Peraturan Menteri Agama No. 9/1952 pada masa K.H. Fakih Usman.

Dalam bidang ketuhanan dan keagamaan ditekankan makna penting pelaksanaan asas Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai implementasi dari sila pertama Pancasila. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa ini merupakan motor penggerak dari segala tugas Kementerian Agama. Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1949, asas ini selalu dicantumkan dalam urutan pertama dari pelbagai tugas Kementerian Agama.

Kemudian, sebagai lembaga pemerintah, Kementerian Agama harus mampu mengayomi kepentingan-kepentingan agama. Kementerian Agama wajib menjaga hak kebebasan beragama, berpikir, dan berpendapat yang menyangkut persoalan keagamaan. Di samping itu, Kementerian Agama juga harus menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ini sekaligus merupakan implementasi pasal 29 UUD 1945. Dengan demikian, Kementerian Agama dituntut untuk memberi perlindungan yang sama kepada segala perkumpulan dan persekutuan agama yang diakui, walaupun Indonesia mayoritas berpenduduk muslim.

Selain itu, Depertemen Agama wajib bertugas mengatur, mengawasi dan memberikan bantuan kepada pejabat-pejabat agama dan perkumpulan agama sehingga dengan bantuan itu aliran-aliran agama dapat terbimbing, terpelihara dan berkembang dengan baik. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya aliran sempalan dalam agama. Bantuan ini tidak harus berbentuk material tapi juga bisa berbentuk konsultasi-konsultasi. Kementerian Agama juga melakukan pengawasan atas segala upaya persekutuan dan perkumpulan agama serta menyelami dan menghubungi segala persekutuan gerakan agama serta aliran keagamaan/kerohanian, baik di dalam maupun di luar negeri, guna kepentingan perdamaian, ketentraman, keamanan dan kebaikan kehidupan beragama, dalam rangka kebebasan beragama.

Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Agama tidak ber-

tindak sendiri, tetapi juga sering melibatkan kementerian-kementerian lain. Untuk berhubungan dengan pemerintah asing atau organisasi-organisasi di luar negeri yang ada sangkut pautnya dengan agama dan keagamaan, Kementerian Agama bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri. Misalnya, untuk mempermudah pelaksanaan ibadah haji, Kementerian Agama bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dan juga Kementerian Dalam Negeri. Pencantuman tugas seperti ini baru mulai pada masa Kiyai Mohammad Iljas.

Dalam hal-hal yang berkenaan dengan keagamaan masyarakat, Kementerian Agama mempunyai beberapa tugas. Pertama, mengikuti dan memperhatikan pola keagamaan masyarakat; kedua, mengambil inisiatif dalam hal-hal keagamaan yang dianggap perlu bagi kemaslahatan umum; dan ketiga, meningkatkan kehidupan kerohanian sehingga tercapai ketinggian moral dalam hidup bermasyarakat dan beragama.

Kementerian Agama juga mengatur dan mengawasi penerbitan-penerbitan yang membahas soal-soal keagamaan atau kerohanian yang ada di Indonesia serta mengawasi penerbitan-penerbitan sejenis dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Ia juga betugas mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, pengajaran dan pengawasan pada madrasah-madrasah, serta akreditasinya. Selain itu ia juga bertugas memberikan pendidikan rohani kepada anggota-anggota angkatan perang, asrama-asrama, rumah-rumah penjara, dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu.

Tugas lain Kementerian Agama adalah mengatur dan menyelenggarakan pencatatan serta pengawasan nikah, talak dan rujuk (NTR), meski hanya terbatas bagi pemeluk agama Islam. Tidak hanya itu, Kementerian Agama juga memberi bimbingan ke arah perbaikan (*islah*) bagi mereka yang pernikahannya terancam gagal. Pengaturan dan penyelenggaraan pencatatan nikah, talak dan rujuk juga berlaku bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Dalam hal ini, Kementerian Agama bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri.

Kementerian Agama juga bertugas mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pendirian rumah ibadah, wakaf, dan zakat-infaq-sadaqah. Ia juga tetap mengurus dan mengawasi penyelenggaraan ibadah haji. Kemudian, ia mengangkat dan memberhentikan hakim-hakim agama serta menetapkan jatuhnya hari raya dan hari libur keagamaan.

Struktur Organisasi Kementerian Agama

Secara struktural organisasi Kementerian Agama pada masa K.H. Mohammad Iljas terdiri dari Kantor Pusat Kementerian Agama, Jawatan-Jawatan dan organisasi-organisasi yang kedudukan lapangan pekerjaannya ditetapkan Menteri Agama.

Kantor Pusat Kementerian Agama mempunyai tiga biro; *Pertama*, Sekretaris Jenderal. *Kedua*, bagian khusus yang bertugas mengurus pekerjaan-pekerjaan tata usaha yang terdiri dari; bagian umum, bagian arsip, bagian kepegawaian serta bagian keuangan dan rumah tangga. *Ketiga*, bagian khusus yang mengurusi persoalan-persoalan teknis yang tidak ditangani jawatan atau bagian lainnya. Bagian ini antara lain bertugas mengurus perguruan tinggi agama khususnya perguruan tinggi agama Islam (PTAI), urusan penyelenggaraan haji, urusan Kristen, Katolik Roma, Hindu Bali, dan mengurusi juga urusan agama-agama lain dan aliran kerohanian.

Melanjutkan struktur sebelumnya, Kementerian Agama tetap memiliki empat jawatan: Jawatan Urusan Agama; Jawatan Pendidikan Agama; Jawatan Penerangan Agama; dan Jawatan Peradilan Agama.

Pada Jawatan Pendidikan Agama, Menteri Agama memperbanyak Inspeksi Wilayah dari 8 menjadi 12 lewat Ketetapan Menteri Agama No. 31/1958 tertanggal 9 September 1958. Keduabelas Inspeksi Wilayah tersebut adalah I Kotapraja (mengawasi 7 kabupaten), II Medan (10 kabupaten), III Palembang (8 kabupaten), IV Tanjung Pinang (7 kabupaten), V Palembang (13 kabupaten), VI Bandung (20 kabupaten), VII Semarang (32 kabupaten), VIII Surabaya (28 kabupaten), IX Kalimantan (14 kabupaten), X Singaraja (6 kabupaten), XI Makasar (18 kabupaten), dan XII Ambon (4 kabupaten). Inspeksi-inspeksi ini dibentuk untuk memudahkan koordinasi antara Jawatan Pendidikan Agama di tingkat pusat dan daerah.

Organisasi Kementerian Agama di tingkat daerah disesuaikan dengan pembagian kekuasaan daerah yang ada. Di tingkat propinsi terdiri dari KUA, Kantor Pendidikan Agama, Kantor Penerangan Agama, dan Kantor Peradilan Agama. Untuk karesidenan, organisasi Kementerian Agama terdiri dari tiga bagian yaitu KUA, Pengawas Pendidikan Daerah yang merupakan kepanjangan dari Kantor Urusan Pendidikan daerah tingkat I, dan Pengawas Penyuluh Masyarakat Agama daerah yang merupakan organisasi pembantu dari Kantor Urusan Penerangan daerah tingkat I. Semua organisasi Kementeri-

an Agama di tingkat karesidenan adalah pembantu dan penghubung antara daerah tingkat I dan daerah tingkat II (kabupaten). Di tingkat kabupaten, organisasinya sama dengan daerah tingkat I. Ada KUA, Kantor Pendidikan Agama, Kantor Penerangan Agama serta Kantor Pengadilan Agama. Sedang di daerah kecamatan hanya ada Kantor Urusan Agama.

Kebijakan-Kebijakan K.H. Mohammad Iljas

Selain dua bidang di atas, kita juga bisa mencatat beberapa kebijakan K.H. Mohammad Iljas ketika menjadi Menteri Agama. Antara lain adalah pembinaan wilayah, pendidikan, penerangan agama, zakat, hari jadi Kementerian Agama dan pemeliharaan kitab suci.[20]

Dalam pembinaan wilayah, K.H. Mohammad Iljas membentuk KUA, Kantor Pendidikan Agama, dan Kantor Penerangan Agama di beberapa wilayah. Di Nusa Tenggara, misalnya, dibentuk KUA dan Kantor Pendidikan Agama berdasarkan Penetapan Menteri Agama No. 24/1955. Di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan didirikan KUA, Kantor Penerangan Agama dan Kantor Pendidikan Agama. Di Sulawesi, Sumatera Tengah, Riau dan Jambi didirikan KUA. Sementara di Irian Barat dibentuk Kantor Perwakilan Kementerian Agama. Selain itu, Menteri Agama juga mensahkan Kantor Pendidikan Agama di Maluku Utara, Maluku Tengah dan Maluku Tenggara.

Kementerian Agama berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45/1957 Lembaran Negara No. 99/1957 juga membentuk Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di luar pulau Jawa dan Madura. Sebanyak 94 Pengadilan Agama tingkat pertama, dan 6 Pengadilan Agama tingkat banding, seperti di Bukittinggi, Banjarmasin, Makassar dan Palembang.

Dalam bidang pendidikan, Mohammad Iljas melakukan perbaikan mutu guru SLTP/SLTA dengan memberi kesempatan melanjutkan jenjang studinya di Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Jakarta yang mulai dibuka pada 1 Mei 1957. Melalui ADIA ini banyak guru SLTP/SLTA tidak lagi lulusan sederajat dengan yang di-

---

[20]Lebih jauh tentang kebijakan-kebijakan K.H. Mohammad Iljas selama menjadi Menteri Agama, lihat *Laporan Sejarah Departemen Agama*, hal. 78-81.

ajarnya. Bahkan, ada beberapa lulusan ADIA yang akhirnya berhasil melanjutkan studinya ke jenjang lebih tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam waktu berikutnya, ADIA ini dan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN), yang didirikan pada 1952 di Yogyakarta, kemudian digabung dan dijadikan IAIN (Institut Agama Islam Negeri)—yang sekarang telah berkembang menjadi 14.

Dalam bidang penerangan agama, Menteri membuat keputusan tentang pembentukan Majlis Pertimbangan Penerangan Agama (MP2A) yang merupakan inisiatif murni Kiyai Mohammad Iljas.

Dua hal penting lagi yang diputuskan K.H. Mohammad Iljas ketika menjabat Menteri Agama adalah penentuan hari jadi Kementerian Agama dan pemeliharaan kitab suci al-Qur'an. Berdasarkan Penetapan Menteri Agama No. 6 tahun 1956, hari jadi Kementerian Agama ditetapkan tanggal 3 Januari 1946 bertepatan 29 Muharram 1364. Sejak saat itu, setiap 3 Januari selalu diperingati sebagai hari lahirnya Kementerian Agama, yang sekarang dikenal dengan Hari Amal Bakti Departemen Agama.

Mengenai pemeliharaan kitab suci al-Qur'an dilakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pembentukan Lajnah Tashih Qur'an berdasarkan Penetapan Menteri Agama No. 35/1957. Lajnah ini bertugas mengawasi pencetakan dan penerbitan Qur'an di Indonesia. Kedua, penyelesaian penulisan Al-Qur'an Pusaka sebagaimana diatur dalam Penetapan Menteri Agama No. 42/1957. Ketiga, prosedur pencetakan dan penerbitan al-Qur'an diatur dengan Penetapan Menteri Agama No. 50 dan 51 tahun 1957.

Nuansa Individu K.H. Mohammad Iljas

K.H. Mohammad Iljas adalah pribadi yang tekun, jujur dan rajin belajar. Dalam kehidupannya tidak ada batas waktu dalam hal mencari ilmu. Setelah pensiun dari jabatannya sebagai Menteri Agama, Duta Besar Arab Saudi, dan anggota DPA, K.H. Mohammad Iljas mengisi waktunya dengan terus belajar secara otodidak. Bahkan sampai menjelang akhir hayatnya ia masih sempat belajar bahasa Jerman dan Prancis. Kiyai Iljas juga menulis dua buku yang sangat penting pada masa itu. Letak pentingnya buku itu, setidaknya jika dilihat dari konteks sosial politik masa itu, yakni dua tahun setelah peristiwa G. 30 S. PKI. Namun sayangnya buku tersebut tidak ba-

nyak diketahui orang.

Buku pertama K.H. Mohammad Iljas berjudul *Bagaimana Pandangan Marxisme kepada Agama dan Pandangan Agama kepada Marxisme*, yang diterbitkan Penerbit Endang, 1967. Buku setebal 72 halaman ini membahas secara rinci mengenai Marxisme dan paham-paham yang diajarkannya dipandang dari sudut ajaran teologi Islam. Suatu bahasan yang tidak biasa dilakukan seorang Kiyai.

K.H. Mohammad Iljas menulis buku ini berdasarkan keinginannya untuk menyatakan sikap atas gerakan komunisme yang pernah merajalela di Indonesia. Meskipun tidak suka komunisme namun dalam mengkritik PKI ia tidak menggunakan perkataan kasar. Menurutnya, membunuh orang yang sudah mati, walaupun itu musuh, bukanlah perbuatan pahlawan. *"It is not a great hero in slaying the slain"*, katanya.[21] Buku ini merupakan uraian deskriptif namun mendalam mengenai sikap dan pandangan Marxisme terhadap agama.

Dalam mengkaji Marxisme, Kiyai Mohammad Iljas meniru metode Imam Ghazali ketika mengkritik para filosuf. Menurutnya, sangatlah tidak cukup untuk membantah ajaran yang berbahaya ini tanpa terlebih dulu mempelajari Marxisme secara mendalam dari sumber yang ditulis dan diyakini mereka. Dalam pandangan Kiyai Mohammad Iljas, hubungan antara Marxisme dan agama ibarat dua kutub yang berisi muatan negatif dan positif. Jelas, antara Marxisme dan agama lebih banyak titik perbedaannya dibandingkan dengan titik persamaannya. Berdasarkan teori *Historical Materialism* segala benda yang ada di bumi berjalan sesuai dengan daya hidup dan kekuatannya masing-masing. Semua bergerak dinamis tanpa ada akhir. Ini yang menjadi inti dari teori tersebut yang akhirnya menuntun pada suatu kesimpulan bahwa Tuhan tidak ada dan tidak perlu ada.

Menurut Kiyai Mohammad Iljas, antara Marxisme dan agama harus ditarik garis pemisah yang tegas. Pernah suatu ketika ia didatangi seorang pemuda cerdas yang pernah belajar agama di Kairo dan mempelajari Marxisme di Bonn. Pemuda ini mengatakan bah-

---

[21]Mohammad Iljas, *Bagaimana Pandangan Marxisme Terhadap Agama dan Pandangan Agama Kepada Marxisme*, (Jakarta: Endang, 1967), hal. 9.

wa ia baru merasa paham dengan makna surat an-Nisa' ayat 75:

> Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang zalim penduduknya, dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau."

Menurut pemuda tersebut, ajaran Islam bukan saja tidak bertentangan dengan Marxisme, akan tetapi malah ada titik persamaannya. Akan tetapi secara bijak Kiyai Mohammad Iljas menjawab:

> Kalau nanda tertarik kepada ajaran Marxisme, dan memandang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, harap nanda selalu ingat bahwa ajaran Islam telah diajarkan dan dilaksanakan menjadi peradaban manusia yang sangat tinggi, semenjak dari seribu tahun yang lalu hingga sekarang dan Insya Allah akan hidup berkembang sepanjang masa hingga akhir zaman. Bagi nanda sendiri sudah barang tentu akan lebih senang disebutkan sebagai seorang Muslim dan Mu'min dari pada disebut sebagai seorang Marxist yang ingkar kepada Tuhan.[22]

Meskipun ada titik persamaan, secara hakiki Islam dan Marxisme sama sekali beda. Bagaimana dua hal yang titik tolaknya sudah tidak bertemu, pada ujungnya bertemu?

Buku kedua yang ditulis Mohammad Iljas adalah *Bahaya Atheisme Terhadap Keamanan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa*. Buku setebal 236 halaman ini merupakan uraian mengenai pentingnya melindungi dan menjaga keberadaan sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam kehidupan dari bahaya atheisme yang menurutnya disebarkan orang-orang komunis.

Melalui buku ini tampaknya Kiyai Mohammad Iljas ingin memperkuat argumen bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila merupakan ajaran dan nilai yang sangat sesuai dengan Islam. Dalam Islam, mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa merupakan keyakinan pokok yang melegitimasi semua perbuatan lainnya. Segala macam pengabdian, tingkah laku, amal perbuatan, tidak akan ada artinya apabila tidak dilandasi dengan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Islam, menurut Kiyai Mohammad

---

[22]Mohammad Iljas, *Bagaimana Pandangan*, hal. 65.

Iljas, hal itu dibahasakan dengan istilah iman.[23]

Bahaya dan ancaman paling besar terhadap sila Ketuhanan Yang Maha Esa berasal dari paham-paham atheistik. Menurut Kiyai Mohammad Iljas, di antara paham atheistik adalah Feurbachisme dan Marxisme. Dua ajaran ini sangat bertentangan dengan makna dan tujuan yang hendak dicapai oleh sila pertama Pancasila.

Pada intinya kedua buku Kiyai Mohammad Iljas di atas sebenarnya mempunyai tujuan yang sama yaitu menolak atheisme. Tampaknya, Kiyai Mohammad Iljas sangat khawatir apabila negara kita terjangkit ajaran tersebut. Namun yang perlu kita contoh dari Kiyai Mohammad Iljas, kekhawatirannya adalah kekhawatiran apospriori. Yakni sebuah bentuk kekhawatiran yang timbul karena ia mengerti benar akan bahaya yang diakibatkan paham tersebut. Di sinilah kelebihan Kiyai Mohammad Iljas yang selain mempunyai pengetahuan teoritik mengenai Marxisme dan atheisme juga punya pengalaman empiris menghadapi sepak terjang PKI.

---

[23]Mohammad Iljas, *Bahaya Atheisme Terhadap Keamanan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa*, (Jakarta: Pembina, 1968), hal. 27.

K. H. Muhammad Wahib Wahab:

Kementerian Agama pada Masa Demokrasi Terpimpin

Abdul Aziz

Tidak seperti biasanya, pada hari Minggu 13 Juli 1986, halaman Pesantren Bahrul 'Ulum Tambakberas dipenuhi ribuan santri, para pengasuh, beberapa pejabat pemerintahan pusat dan daerah serta ratusan warga masyarakat setempat. Hampir seluruh hadirin menampakkan raut muka yang muram, pertanda sedang menyimpan rasa sedih dan duka yang begitu dalam.

Sehari sebelumnya, Sabtu malam 12 Juli 1986, tersiar berita bahwa K.H. Wahib Wahab, putera tertua pendiri pesantren Tambakberas K.H. Wahab Chasbullah, telah menghembuskan nafasnya yang terakhir pukul 23.15 WIB di Rumah Sakit Islam Jakarta. Sebagaimana pesan keluarga, jenazah K.H. Wahib akan dikebumikan di pesantren rintisan ayahnya yang terletak di kota Jombang, Jawa Timur. Sesuai rencana, sore itu jenazah almarhum tiba di pesantren yang telah melahirkan beberapa tokoh nasional tersebut.

Maka tak heran jika seluruh santri, kerabat, para sahabat dan orang-orang yang merasa kejayaan negerinya turut diperjuangkan almarhum, menyambut kedatangan jenazah mantan Menteri Agama di masa Presiden Sukarno tersebut, untuk memanjatkan doa sekaligus memberikan penghormatan terakhir. Hadir ketika itu, ketua DPD Golkar Jawa Timur Moch. Said, Mantan bupati Jombang Hudan Dardiri, para pejabat Muspida Jombang, serta anggota DPR-RI Akbar Tanjung yang menyampaikan kata sambutan.[1]

---

[1]Lihat Harian *Jawa Pos*, 14 Juli 1986

Wahib "Sang Anak Nakal"

Muhammad Wahib Wahab yang dilahirkan pada tahun 1916, adalah anak pertama K.H. Wahab Chasbullah, hasil perkawinan beliau dengan Khodijah, puteri K.H. Musa asal Surabaya yang waktu itu termasyhur dengan kekayaan sekaligus keulamaannya. Tidak banyak terungkap bagaimana kehidupan kekeluargaan Muhammad Wahib. Hanya dikabarkan, ia mempunyai dua orang adik yang meninggal semasa kecil.[2]

Di Surabaya Wahib lahir serta menghabiskan masa kecil hingga menjelang remaja. Namun karena K.H. Wahab Chasbullah berasal dari Jombang, di mata Wahib kota ayahnya itu adalah kampung halamannya juga, di mana ia pun kerap mengisi hari-hari bahagianya waktu kecil. Sebagai putera kiyai besar yang ikut menggagas kelahiran NU, Wahib tumbuh menjadi anak "nakal" yang susah diatur. Ia sering lupa pulang ke rumah kalau sedang asyik bermain dan kadangkala sampai berada jauh dari daerah tempat tinggalnya. Kegemaran bermain ke mana-mana ini menyebabkan Wahib di masa remajanya memiliki banyak teman. Pembawaannya yang selalu periang dan suka mengobrol atau bercanda membuat orang yang baru mengenalnya mudah akrab dan betah menghabiskan waktu bersamanya.

Memasuki usia sekolah, Wahib pertama kali menuntut ilmu di Madrasah Taswirul Afkar. Madrasah ini pada awalnya adalah forum diskusi yang didirikan oleh K.H. Wahab, ayahnya sendiri. Di sinilah Wahib bertemu dengan sejumlah tokoh yang telah membantu ayahnya mengembangkan berbagai kursus keagamaan, yang kemudian menjadi ulama terkemuka sekaligus gurunya. Di antara mereka adalah K.H. Nawawi, K.H. Mukhtar, K.H. Dachlan serta K.H. Abdullah Ubaid.[3]

Sebelum belajar di Taswirul Afkar, sebagaimana putera kiyai pada umumnya, Wahib kecil diajar oleh sang ayah, khususnya di

---

[2]Wawancara dengan Umroh Mahfudhoh (salah seorang puteri KH. Wahib Wahab) di Jakarta, 19 Juli 1997.

[3]Wawancara dengan H. Madchan (salah seorang teman karib Muhammad Wahib sejak kecil hingga dewasa) di Jombang, 15 Juli 1997. Lihat juga: Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama* (Solo: Jatayu, 1985), hal. 29.

bidang ilmu-ilmu agama. Sebagai anak pertama Kiyai Wahab yang kala itu terkenal lihai berdebat, Wahib memperoleh banyak pengetahuan dan wawasan luas dibanding anak-anak seusianya.

Selepas dari Taswirul Afkar, Wahib meneruskan pendidikannya di Pesantren Tambakberas Jombang, kemudian dilanjutkan ke Pesantren Tebuireng, juga di Jombang, di bawah asuhan K.H. Hasyim Asy'ari. Ia juga pernah *nyantri* di Pesantren Buntet, Cirebon, asuhan K.H. Abbas dan Pesantren Mojosari, Nganjuk, pimpinan K.H. Sholeh. Kebiasaan santri zaman dulu adalah belajar di pelbagai pesantren untuk menambah pengetahuan atau sekedar melaksanakan *tirakatan*.[4] Hal ini juga dilakukan Wahib. Namun selain ke pesantren-pesantren yang telah disebutkan itu, tidak ada keterangan pasti, ke pesantren mana saja Wahib menuntut ilmu dan untuk berapa lama. Pada suatu kesempatan ia mengatakan pernah juga tinggal di Pesantren Bangkalan Madura dan di Termas Pacitan, walau hanya sebentar.[5] Pada 1933 Wahib berangkat ke Mekkah untuk memperdalam pengetahuan agama di madrasah al-Falah.

Yang jelas, banyak pesantren yang telah disinggahinya, meski ia tidak pernah berlama-lama menimba ilmu secara serius di satu pesantren. Mungkin terbawa jiwa petualangan yang tertanam sejak kecil, ditambah keberanian dan "kebandelannya", Wahib tak jarang pergi ke mana-mana dalam waktu cukup lama—sesuatu yang menyebabkan ayahnya hampir selalu marah setiap kali Wahib pulang ke rumah.

Menurut kisah salah seorang temannya, ketika masih di Surabaya, Wahib pernah tidak menampakkan diri sama sekali selama beberapa hari. Setelah diselidiki, ternyata ia mengikuti rombongan sebuah kelompok kesenian ludruk yang menggelar pertunjukan keliling di pelbagai daerah di Jawa Timur.[6] Menurut pengakuannya sendiri kepada sang teman, di usia remaja (sebelum menun-

---

[4]*Tirakatan* adalah melatih diri hidup "sederhana" sambil menjalankan ritus tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah.

[5]Wawancara dengan H. Sullam Syamsun (purnawirawan Letnan Kolonel TNI, salah seorang tokoh sepuh NU yang pernah aktif bersama Muhammad Wahib dalam milisi Hizbullah) di Jakarta, 21 Juli 1997.

[6]Wawancara dengan H. Sullam Syamsun.

tut ilmu di Mekkah), Wahib sudah sempat merantau ke Singapura, tanpa seorangpun tahu apa yang sebenarnya sedang dia cari di sana. Ia hanya bercerita tentang usaha kecil-kecilan yang sempat dijalaninya di sana, yaitu berjualan arang.

Kenakalan Wahib sempat pula dirasakan langsung oleh ayahnya, Kiyai Wahab. Selain sebagai pemuka agama, Kiyai Wahab juga seorang *badal* (wakil) syeikh[7] yang mengkoordinasikan masalah keuangan para calon jamaah haji setempat yang hendak berangkat ke tanah suci. Di suatu musim haji, Wahib mendatangi orang yang belum lunas setoran ONH-nya untuk menagih dengan alasan disuruh Kiyai Wahab. Padahal uang hasil tagihan itu dipakainya sendiri dan dihabiskan untuk jalan-jalan.[8]

Semenjak keluarga Kiyai Wahab "boyongan" ke Tambakberas, saat Wahib masih remaja, sang anak makin jarang berada di rumah. Berkelana, dan begadang semalaman sambil mengobrol bersama kawan-kawan, adalah kesenangannya yang sulit ditinggalkan. Kenakalannya kadangkala tumbuh juga, terutama apabila ia benar-benar kehabisan uang. Dalam keadaan seperti itu, ia tidak jarang meminta padi kepada petani kaya dengan alasan disuruh ibu atau ayahnya, untuk kemudian dijualnya sendiri.[9]

"Keanehan" lain dari Wahib adalah kegemarannya mempelajari ilmu-ilmu *kanuragan* (ajian-ajian untuk kekebalan tubuh, kesaktian, dan semacamnya). Ia senang berkelana dari satu pesantren ke pesantren lain dengan harapan akan banyak memperoleh ilmu tersebut. Mengenai hal ini, K.H. Mustamid, putera pengasuh Pesantren Buntet, K.H. Abbas, menceritakan, sewaktu Gus Wahib[10] *nyantri* di Buntet Cirebon, ia jarang terlihat mengaji ilmu aga-

---

[7]"Syeikh" adalah sebutan bagi penyelenggara akomodasi dan transportasi jamaah haji selama di Saudi Arabia sebelum ada sistem "Muassasah" seperti dikenal sekarang. Lazimnya, para syeikh itu adalah pemukim yang berasal dari berbagai negara dan melayani jamaah haji dari negara asal mereka masing-masing. Untuk jamaah haji Indonesia dikenal antara lain misalnya Syeikh Mukhtar Sedayu dan Syeikh Jamal Rawa.

[8]Wawancara dengan H. Shobih Ubaid (salah seorang anggota keluarga besar PesantrenTambakberas) di Jakarta, 10 Juli 1997.

[9]Wawancara dengan H. Madchan.

[10]Gus: panggilan kehormatan bagi putera Kiyai

ma atau mendalami kitab-kitab kuning dengan serius. Ia justru asyik mempelajari bagaimana cara membuka gembok dan lemari dalam keadaan terkunci melalui wirid atau doa tertentu. Mustamid melihat sendiri betapa senangnya Wahib ketika berhasil mempraktekkan ilmu yang baru dikuasainya di hadapan kawan-kawannya.[11] Terlepas dari semua tingkah laku "urakan" tersebut, di mata teman-teman sebaya, Wahib adalah sahabat yang baik, cerdas, punya solidaritas tinggi, dan dermawanan.[12]

Masa Perjuangan dan Keprihatinan

Pada 1935, ketika Wahib baru berusia 19 tahun dan baru menjalani pendidikan di Madrasah al-Falah Mekkah kurang dari dua tahun, ia mengakhiri masa lajangnya. Ia memulai kehidupan baru dengan mempersunting Siti Hannah, puteri K.H. Faqih dari Gresik, yang kemudian memberinya lima orang anak, yaitu Umroh Mahfudhoh, Nurjat Malihah, Wahibah Maghfuroh, Muhammad Ghozi, dan Faizah.

Keluarga baru ini tinggal di Tambakberas, meski setelah itu Wahib kerap pergi ke luar kota mencari tambahan penghasilan demi menghidupi istri dan anak-anaknya, selain menangani urusan-urusan organisasi. Hal terakhir ini terjadi terutama setalah ia aktif di Gerakan Pemuda Ansor (yang ketika itu bernama Anshoru Nahdlatil Oelama atau ANO) dan NU Jawa Timur, seperti menjadi pengawas sebuah madrasah NU di daerah Surabaya yang dijalaninya pada 1937. Di tahun ini pula ia berangkat lagi ke Singapura menjadi mahasiswa di Merchant's Style Institute, Singapura.[13]

Selang lima tahun sesudah itu tentara Jepang mendarat di Indonesia menggantikan Belanda menjajah bumi pertiwi. Di masa pendudukan Jepang 1942-1945, atas saran ayahnya, Muhammad Wahib masuk tentara sukarela Peta (Pembela Tanah Air). Begitu

---

[11]Wawancara dengan H. Madchan.

[12]Wawancara dengan H. Madchan.

[13]Departemen Agama, *Peranan Departemen Agama dalam Revolusi dan Pembangunan Bangsa* (Jakarta: Biro Penerbitan dan Perpustakaan Agama, 1965), hal. 39. Dalam buku ini, nama sekolah disebut sebagai Merchan Stail Institute.

dianggap memenuhi syarat sebagai calon tentara, ia mengikuti latihan militer di Bogor selama empat bulan. Berhasil menyelesaikan latihan militer dan dinyatakan lulus Wahib langsung ditempatkan di wilayah Mojokerto, Jawa Timur, bersama Yono Sewoyo (terakhir berpangkat Mayor Jenderal).[14]

Pada 1945, Wahib termasuk Shodanco (komandan peleton) Peta angkatan awal. Dibandingkan dengan anggota Peta lainnya, Wahib tergolong aneh, khususnya sebagai seorang komandan. Dia sangat jarang memakai seragam tentara. Sikapnya yang konfrontatif seperti ini sukar sekali ditundukkan. Wahib memang tidak mudah didikte dalam bentuk apapun, tak terkecuali dalam masalah disiplin berpakaian militer. Apabila ada kesempatan berkumpul dengan masyarakat, ia justru senantiasa mengobarkan semangat perlawanan mereka untuk mengusir orang Jepang dari tanah air.

Akibatnya, Wahib pernah dijebloskan Jepang ke penjara dan masuk dalam daftar nama yang diincar pihak Jepang untuk dibunuh. Menurut pengakuan intel tentara Jepang yang ditangkap setelah Indonesia merdeka, rencana pembunuhan ini akan dilaksanakan dalam latihan militer. Itulah sebabnya, pada suatu hari, Wahib bersama beberapa anggota Peta lainnya diperintahkan ke Bogor dengan alasan ada latihan militer yang harus dijalani. Padahal di sanalah Wahib dan sejumlah anggota Peta yang dianggap membangkang, akan dibunuh. Rencana itu tidak jadi terlaksana, karena Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan dan para anggota Peta yang sedang menjalani latihan diperintahkan untuk *daidan wakare*, yaitu pembubaran pasukan mulai 18 Agustus 1945.[15]

Selain tercatat sebagai anggota Peta, Wahib juga ikut bergabung dalam Barisan Hizbullah yang dibentuk pada 4 Desember 1944 sebagai kekuatan cadangan Peta. Barisan ini merupakan organisasi semi militer khusus bagi pemuda-pemuda Islam yang terus eksis pasca pendudukan Jepang serta memainkan peran cukup penting semasa perang kemerdekaan 1945–1947.

Pembentukan Hizbullah tidak lepas dari dua sikap yang berbeda pemerintah militer Jepang: kecurigaan terhadap kaum nasionalis

---

[14]Wawancara dengan H. Sullam Syamsun.

[15]Wawancara dengan H. Madchan. Juga dengan Sullam Syamsun.

sekuler dan penanaman kebaikan hati kepada organisasi-organisasi umat Islam. Sikap terakhir ini dilatarbelakangi anggapan bahwa rakyat Indonesia, khususnya yang berada di pedesaan pulau Jawa, tetap setia pada agama dan pemimpin-pemimpinnya, para kiyai dan ulama. Karena itu, banyak pemuda Islam yang berhasil menduduki posisi penting dalam organisasi-organisasi yang kemudian dibentuk Jepang seperti Putera, Jawa Hokokai, Keibodan, Seinendan, Fujinkai dan Peta, di samping Barisan Hizbullah sendiri.[16]

Di Hizbullah, Wahib sempat menjadi komandan divisi Sunan Ampel Surabaya, menggantikan K.H. Sholeh, dan berada di bawah pimpinan Zaenal Arifin sebagai Komandan Barisan Hizbullah yang mengkoordinasi seluruh wilayah Jawa Timur. Pada 10 November 1945 Wahib diangkat menjadi pimpinan Hizbullah wilayah Jawa Timur.[17]

Ketika BKR (Badan Keamanan Rakyat) dibentuk pada 22 Agustus 1945, banyak anggota Barisan Hizbullah melebur ke dalamnya. Bagitu pula yang terjadi sewaktu BKR diganti menjadi TKR (Tentara Keamanan Rakyat) pada 9 Oktober 1945 dan kemudian menjadi TRI (Tentara Rakyat Indonesia) pada 7 Januari 1946. Penyatuan tentara Republik dengan lasykar-lasykar bersenjata tersebut memperoleh landasan kuat dengan keluarnya Ketetapan Presiden tertanggal 3 Juni 1947.

Ketetapan yang ditandatangai Presiden Soekarno itu berisi pembentukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merupakan penyatuan TRI dengan seluruh lasykar perjuangan.[18] Dengan penyatuan ini, kekuatan-kekuatan Hizbullah secara resmi diintegrasikan ke dalam TNI. Dalam proses penyatuan ini, Wahib menjadi seorang perwira TNI yang bertugas sebagai penghubung dengan lasykar-lasykar perjuangan yang belum melebur diri ke dalam TNI.

---

[16]Harun Nasution, dkk., *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Departemen Agama, 1987), hal. 334-335.

[17]*Peranan Departemen Agama*, hal. 40. Lihat juga C. van Dijk, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan* (Jakarta: Grafiti, 1983), hal. 66.

[18]Mengenai Ketetapan Presiden ini dapat dilihat dalam: Soeharto *Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya* (Jakarta: Citra Lamtorogung Persada, 1989), hal. 39.

Sebagai perwira penghubung, ia mampu memanfaatkan kedekatannya dengan lasykar perjuangan, khususnya Hizbullah dan Sabilillah (yang umumnya berunsurkan kiyai-kiyai NU di Jawa) untuk kepentingan mobilisasi kekuatan bersama. Salah satu peristiwa yang melibatkannya adalah sewaktu NU memandang pemberontakan PKI yang meletus pada 19 September 1948 di Madiun merupakan ancaman bagi keselamatan negara RI. Ketika itu, NU memobilisasi kekuatan yang berada dalam pengaruhnya, antara lain mantan satuan-satuan Hizbullah/Sabilillah Surabaya, untuk dikordinasikan dengan TNI melalui Wahib dan secara bersama-sama menumpas pemberontakan tersebut. Dalam penumpasan ini, pemerintah menggunakan pasukan TNI dari kesatuan Siliwangi sebagai pasukan inti, dibantu oleh kesatuan TNI lain, serta unsur-unsur lasykar perjuangan yang setia kepada pemerintah.[19]

Di luar itu ada cerita menarik tentang pembawaan Wahib yang terbiasa berperilaku sekenanya. Di tengah revolusi fisik yang sedang berkecamuk pada 1945, suatu hari ia tertidur pulas di rumah seorang Cina Jombang, sementara para tokoh NU bingung mencari karena siang itu ia akan disuruh segera membawa pasukannya menuju medan pertempuran melawan penjajah. Kontan saja, dua sahabat dekatnya, Madchan dan Afandi yang sudah dapat menebak di mana ia biasa berada, melapor kepada para sesepuh NU, yaitu Kiyai Wahab, Kiyai Hasyim, Kiyai Romli, dan Kiyai Bisri supaya diizinkan menjemput Wahib. Kemudian, berangkatlah kedua orang sahabat Wahib tersebut menemuinya dan langsung menyiram dengan setimba air agar lekas bangun dan pergi memimpin pasukan Hizbullah yang telah siap berangkat.

Pada 1948, berkat prestasi kemiliterannya yang dinilai berhasil dan pengalaman organisasi yang dipandang cukup, Wahib diangkat menjadi Komandan Resimen TNI Jombang, sekaligus menjabat anggota Komite Nasional Indonesia (KNI) Malang, dengan dibantu sejumlah staf, antara lain H.M. Munasir.[20] Setelah itu Wa-

---

[19]Tentang keterlibatan unsur-unsur Hizbullah/Sabilillah dalam penumpasan pemberontakan PKI Madiun dapat dilihat antara lain dalam: Saifuddin Zuhri, *Berangkat Dari Pesantren* (Jakarta: Gunung Agung, 1987), hal. 361.

[20]Mantan Mayor TNI, kini salah seorang tokoh sepuh NU.

hib ditarik ke Markas Besar Angkatan Darat di Jakarta, walau pada waktu yang sama banyak mantan anggota Hizbullah "dipensiunkan" akibat rasionalisasi besar-besaran di tubuh angkatan perang. Melalui rasionalisasi ini, Hizbullah yang mempunyai andil dan jasa besar dalam perang kemerdekaan, hanya memperoleh jatah empat batalyon.[21]

Sementara itu, dalam kepengurusan NU, kendati mulai berdiam di Jakarta, Wahib masih dipercaya menjabat ketua cabang Jombang periode 1948, didampingi Madchan sebagai sekretaris. Sebelumnya, jabatan ketua dipegang oleh K.H. Mahfudz Anwar. Pada waktu itu, Rais Syuriah cabang yang sama dijabat K.H. Hasbullah, menantu K.H. Bisri Syansuri yang dikenal sebagai pimpinan Pesantren Denanyar, Jombang.

Memasuki Pentas Politik Nasional

Di tahun-tahun awal kedatangannya di Jakarta, Wahib terlibat aktif dalam dinamika politik ibukota melalui kiprahnya di Gerakan Pemuda (GP) Ansor. Ketika GP Ansor dipimpin Chamid Widjaja yang merupakan hasil keputusan kongres ke-1 di Surabaya 1951, Wahib masuk dalam jajaran pengurus bagian siasat. Pada masa ini pula, tepatnya 2 September 1951, lahir persetujuan bersama antara Pengurus Besar NU dan Pucuk Pimpinan GP Ansor mengatasi kekhawatiran berkembangnya benih-benih ketidaksetiaan GP Ansor terhadap garis kebijakan organisasi induknya, NU.[22]

Sebagaimana terungkap dalam banyak tulisan, hubungan NU dengan Masyumi mulai mengalami gangguan, setidaknya sejak Kabinet Sjahrir (1945-1947) yang menandatangani Perjanjian Linggarjati, dan pemerintahan Amir Sjarifuddin (1947-1948) yang menghasilkan Perjanjian Renville. Kedua perjanjian tersebut telah menimbulkan penafsiran dan sikap yang berbeda di antara para tokoh perjuangan ketika itu. Salah satu penyebabnya adalah kenyataan bahwa kedua perjanjian tersebut selalu tidak ditaati Belanda. Bah-

---

[21]Wawancara dengan H. Madchan.

[22]Choirul Anam, "Gerak Langkah Pemuda Ansor", *Majalah Nahdlatul Ulama AULA*, 1990, hal. 63.

kan, Belanda akhirnya melakukan agresi militer, baik sesudah perjanjian pertama maupun kedua.

Di kalangan Masyumi ketika itu terdapat dua kelompok yang berbeda: yang menentang dan mendukung perjanjian. Termasuk dalam kelompok yang menentang adalah Dr. Sukiman Wirjosandjojo dan hampir seluruh tokoh NU, sementara tokoh-tokoh Masyumi seperti Natsir, Roem dan Syafrudin Prawiranegara merupakan bagian dari kelompok pendukung perjanjian.[23] Perselisihan pandangan antara tokoh-tokoh NU dalam Masyumi dengan tokoh-tokoh Masyumi lain, khususnya yang berpendidikan Barat, mewarnai langkah politik mereka di kemudian hari. Tampaknya, perselisihan tersebut tidak mudah diselesaikan, sehingga mendorong NU memperkuat anggota barisannya, termasuk GP Ansor. Puncak perselisihan itu sendiri terjadi ketika NU secara resmi memisahkan diri dari Masyumi pada 1952 dan menjadi partai politik tersendiri, mengikuti jejak PSII yang telah keluar dari Masyumi pada 1947.[24]

Dalam kongres ke-3 GP Ansor di Jakarta pada Desember 1954, Imron Rosyadi terpilih sebagai Ketua Umum dan Wahib menjabat Ketua I, dengan Aminuddin Aziz sebagai Sekretaris Umum dan Madchan, Sekretaris I. Menjelang kongres ke-4 yang rencananya digelar 29 Oktober 1956 di Malang, suhu politik dalam tubuh GP Ansor cukup panas. Keberhasilan NU dalam Pemilu 1955 menembus tiga besar (setelah PNI dan Masyumi)[25] tanpa disadari membawa cuaca buruk bagi lingkaran elit GP Ansor.

Perolehan 45 kursi parlemen oleh NU dan 5 jabatan kementerian yang diberikan kepada partai ini setelah Pemilu 1955, menuntut NU menyediakan tenaga yang memadai. Satu-satunya sumber tenaga yang bisa diandalkan ialah GP Ansor. Hal ini menjadi-

---

[23]Choirul Anam, "Gerak Langkah," hal. 129-130.

[24]Lebih jauh mengenai alasan-alasan pemisahan diri ini dapat dilihat antara lain dalam: M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, a.b. Dharmono Hardjowidjono, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), hal. 367-8. Mengenai pemisahan diri PSII lihat: E.M. Sitompul, *NU dan Pancasila* (Jakarta: Sinar Harapan, 1989), hal. 104.

[25]Tentang perolehan suara pemilu 1955, lihat M.C. Ricklefs, *Sejarah Modern*, hal.377.

kan kongres ke-4 berjalan alot karena diwarnai perebutan kepentingan mengincar jabatan pucuk pimpinan untuk mempermulus jalan menuju gedung parlemen atau ruang sidang kabinet.[26]

Pada 1956, sebagai unsur Pucuk Pimpinan GP Ansor hasil Kongres ke-4, Wahib menjadi anggota Konstituante dari partai NU—yang dipimpin K.H. Achmad Sjaichu—dan duduk di seksi Pertahanan. Pada tahun itu pula, Wahib diangkat menjadi salah satu pengurus bagian Dakwah PBNU yang diketuai M. Noor A.G.N.

Wahib sempat mewakili GP Ansor dalam Badan Kerja Sama Pemuda-Militer (BKS-PM), salah satu bentuk kerja sama antara kelompok-kelompok sipil dan militer yang banyak membicarakan perkembangan politik nasional, berkaitan dengan memburuknya hubungan politisi partai dengan militer. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini. Salah satunya adalah pihak militer mulai tidak sabar menyaksikan bagaimana mayoritas parlemen telah "mematikan" RUU Anti Korupsi yang diajukan Kabinet Burhanuddin.

Sementara itu, kabinet baru di bawah pimpinan Ali Sastroamidjojo tidak berusaha mengajukan RUU sejenis. Sebaliknya, Djody Gondokusumo yang pernah duduk dalam kabinet Ali ke-1 dan dihukum atas tuduhan korupsi, diberi pengampunan. Bahkan, kabinet baru tersebut membagi-bagikan jabatan dan fasilitas dengan cara yang mengganggu perasaan pimpinan tentara, antara lain lewat pemberian lisensi kepada perusahaan-perusahaan Indonesia yang berafiliasi dengan partai politik tertentu.

Hubungan sipil-militer yang buruk tampaknya memiliki akar yang lebih dalam dari sekedar ketidaksabaran militer menyaksikan pembahasan RUU Anti Korupsi, yaitu pencarian format peran militer pasca revolusi kemerdekaan. Tokoh-tokoh militer seperti Kepala Staf Angkatan Darat Kolonel A.H. Nasution dan Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel T.B. Simatupang, didukung Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX, telah mengupayakan rasionalisasi dan demobilisasi angkatan perang yang memungkinkan pembentukan suatu kekuatan militer yang relatif kecil, tetapi lebih disiplin dan "professional". Rencana demobilisa-

[26]Choirul Anam, "Gerak Langkah," hal.66.

si itu akan mengurangi jumlah anggota tentara dari 200.000 menjadi 100.000 orang.[27]

Upaya tersebut ditentang para politisi sipil yang khawatir bahwa peran politik militer akan lebih besar sesudah reorganisasi kelak. Di dalam Dewan Perwakilan Rakyat diajukan tuntutan agar kepemimpinan tentara pusat dibubarkan dan Kementerian Pertahanan direorganisasi—suatu tuntutan yang dipandang pimpinan militer telah melampaui wewenang badan legislatif dan "campur tangan" terhadap urusan eksekutif. Tantangan lain juga datang dari kalangan militer sendiri, khususnya mereka yang kurang terlatih, karena khawatir bahwa reorganisasi akan berdampak pada posisi mereka. Dalam situasi seperti inilah, muncul peristiwa 17 Oktober 1952, ketika tentara mengajukan tuntutan pembubaran DPR dengan mengerahkan tank-tank dan artileri militer ke istana Presiden. Peristiwa itu sendiri telah menimbulkan perpecahan di antara para perwira militer, sehingga muncul kelompok yang pro dan anti peristiwa tersebut.[28]

Tuntutan militer ditolak oleh Presiden Soekarno, tetapi peristiwa tersebut tidak dipandang presiden sebagai kudeta. A.H. Nasution sebagai KASAD menegaskan sikapnya untuk tidak melakukan persekongkolan apapun yang ditujukan kepada pemerintah yang sah. Menurut Nasution, memburuknya hubungan sipil-militer disebabkan tidak adanya kerjasama di antara kedua golongan itu serta kekurangan-kekurangan pemerintah dalam menangani masalah administrasi pertahanan.[29]

Dari latar belakang itulah kemudian muncul ide mendirikan Badan Kerja Sama (BKS) Sipil-Militer, sebuah forum komunikasi yang diharapkan dapat membentuk suasana saling pengertian serta persatuan antara kelompok sipil dan militer.[30] Pada Oktober 1957, K.H. Wa-

---

[27]M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia*, hal. 368.

[28]M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia*, hal. 369. Lihat juga Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI (1985) *40 Tahun ABRI*, Buku I, hal. 102.

[29]lihat Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967* (Jakarta: LP3ES, 1988), hal. 170-171 beserta catatan kaki nomor 136.

[30]Menurut Letkol (pur) Sullam Syamsun, salah satu aktivis utama BKS Sipil-Militer, gagasan pembentukan badan ini bersumber dari pemikiran Presiden Soekarno tentang *civic nation* yang menekankan fungsi pertahanan di tangan militer sementara politik tetap di tangan sipil, namun fasilitas militer turut didayagunakan untuk kepentingan pembangunan bangsa. Wawancara dengan H. Sullam Syamsun.

hib pergi ke Kalimantan untuk sosialisasi gagasan BKS Sipil-Militer, sekaligus mendengar laporan dari daerah yang berkaitan dengan rencana pembangunan sosial-ekonomi dan mensponsori pendirian BKS Sipil-Militer di kawasan yang belum terdapat badan tersebut.

Awal Jabatan Kementerian

Memasuki penggal kedua 1950-an, pergolakan politik yang terus menghangat diiringi kemerosotan ekonomi secara tajam (simpanan devisa turun sampai 400 milyar pada triwulan pertama 1958) mulai serius mengancam persatuan nasional.[31] Diawali pertentangan antara Jawa dan luar Jawa mengenai pemerataan pembangunan serta konflik dalam tubuh Angkatan Darat, Kol. Zulkifli Lubis, Deputi Kepala Staf AD, melancarkan kudeta militer dua kali pada 11 Oktober dan 16 November 1956, meski keduanya gagal. Pada 20 Desember 1956, Let. Kol. Ahmad Husein, Ketua Dewan Banteng, mengambil alih kekuasaan sipil Sumatera Tengah dan keesokan harinya mengumumkan, bahwa hasil-hasil produksi daerahnya tidak akan dikirim ke pemerintah pusat. Dua hari kemudian, Kol. Simbolon, Panglima Militer Sumatera Utara yang membentuk Dewan Gajah, menyatakan hukum darurat perang serta menyatakan bahwa daerahnya tidak lagi mengakui pemerintah pusat.

Sementara itu, Dewan Garuda yang dipimpin Letkol Barlian, Panglima Militer Sumatra Selatan, menyatakan wilayahnya sebagai daerah otonom dan 90% hasil pajak akan ditahan untuk pembangunan daerah. Selanjutnya, 2 Maret 1957, Panglima Militer Sulawesi dan Pimpinan Dewan Manguni, Letkol Ventje Sumual, memberlakukan hukum darurat perang di seluruh wilayah Indonesia Timur dan mengumumkan Piagam Perjuangan Semesta (Permesta), yang menuntut 70% keanggotaan Dewan Nasional untuk wakil daerah agar diubah menjadi Senat, dan meminta Kabinet Gotong Royong Baru dipimpin dwi tunggal Soekarno–Hatta. Duabelas hari kemudian (14 Maret 1957) Presiden Sukarno mengumumkan berlakunya hukum darurat perang.

---

[31]Lihat Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia : Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995), hal. 261-172

Pada 10 Februari 1958, Letkol. Husein beserta kelompoknya mengeluarkan ultimatum yang menuntut: (1) Kabinet Djuanda meletakkan jabatan dalam waktu lima hari; (2) Soekarno menunjuk Hatta dan Hamengku Buwono IX supaya membentuk Kabinet Kerja Nasional yang baru, menggantikan Kabinet Karya; (3) Presiden kembali pada posisi konstitusional. Oleh karena keesokan harinya, 11 Februari, Kabinet langsung menolak ultimatum tersebut, pada 15 Februari kelompok ini memproklamirkan Pemerintah Revolusioner Republik Indinesia (PRRI) di Padang, Sumatera Barat, dengan Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri, dibantu 15 orang menteri.[32]

Dalam suasana genting seperti itu, dan diperparah dengan tajamnya penentangan partai-partai terhadap aksi tentara, lima bulan kemudian, sekitar Juni 1958, Presiden Soekarno melantik K.H. Wahib Wahab sebagai Menteri Negara Urusan Kerja Sama Sipil-Militer, untuk membantu meredam gejolak sosial politik waktu itu.

Mengapa K.H. Wahib yang dipilih untuk tugas tersebut, tidak terlalu jelas. Namun dapat diduga ada beberapa faktor. Pertama, Wahib pernah menjadi anggota Badan Kerja Sama Sipil-Militer, sebagaimana disinggung di atas, dan dinilai berhasil melaksanakan perannya. Kedua, ia berasal dari NU, salah satu partai Islam besar yang di mata Soekarno bisa diajak bekerjasama dalam kabinet berkaitan dengan pelaksanaan "Konsepsi Presiden"nya yang digulirkan pada 1956. Menurut konsepsi yang makin santer disebut pada 1957 itu, upaya memperbaiki kondisi politik memerlukan suatu bentuk Demokrasi Terpimpin.

Konsepsi Presiden tersebut awalnya mendapat perlawanan dari partai-partai. Pada 2 Maret 1957, lima partai, yaitu Masyumi, NU, PSII, Katolik, dan PRI mengeluarkan pernyataan bersama yang menolak konsepsi Soekarno. Namun, dalam pertemuan dengan 69 tokoh partai dan 45 perwira militer dan kepolisian di Istana Negara pada 4 April 1957, tanpa diduga Presiden menunjuk warganegara, Dr. Ir. Soekarno, untuk membentuk *zaken kabinet* darurat ekstra parlementer yang bertindak tegas dan tepat, serta membentuk Dewan Nasional sesuai dengan konsepsi Presiden. Sebagai

---

[32]Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan*, hal.296.

Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, Soekarno akan menunjuk mereka yang layak menjadi menteri.[33]

Seiring perjalanan waktu, NU mulai berpikir untuk kompromi dengan Soekarno. Sebagaimana diberitakan harian *Duta Masjarakat*,[34] Pengurus Besar NU sepakat memberi kesempatan kepada kabinet bentukan Soekarno melaksanakan tugasnya. Memang, banyak pihak menduga bahwa NU tidak punya keberanian menolak keinginan Soekarno atau tidak ingin membuang kesempatan memperoleh manfaat dari partisipasi dalam kabinet. Dalam kaitan ini, van Bruinessen memberikan komentar, bahwa NU seringkali berkalkulasi untuk mendapatkan dukungan Soekarno.[35] Namun, kala itu NU meminta masyarakat luas agar kesediaan orang-orangnya turut dalam kabinet (di bawah pimpinan Djuanda) dapat dimengerti.

Salah satu peran penting Wahib ketika menjadi Menteri di penghujung 1950-an ini adalah keikut sertaannya dalam mewujudkan kembali persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang nyaris tercerai-berai akibat rentetan pemberontakan atau perang saudara. Contohnya adalah ketika terjadi peristiwa PRRI/Permesta, Wahib termasuk sejumlah kecil tokoh yang turun langsung ke kantong-kantong pemberotantakan di Sumatera dan Sulawesi untuk menemui para perwira tentara yang menguasai daerah serta mengajak mereka berdialog mencari jalan keluar terbaik ketimbang terus memaksakan kehendak, menentang pemerintahan pusat.[36]

Semangat nasionalisme yang tertanam kuat telah mengarahkan sikap dan langkahnya. Dalam Konfrensi Alim Ulama se-Jawa Barat awal Oktober 1958, misalnya, sebagai Menteri Kerja Sama Sipil-Militer, K.H. Wahib menceritakan peristiwa yang dialaminya sendiri. Sewaktu memimpin lasykar Hizbullah Jawa Timur, ia pernah diajak Kartosuwirjo dan dikirimi surat pengangkatan sebagai

---

[33]Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965* (Jakarta: Grafiti, 1987), hal. 363.

[34]Tanggal 20 April 1957

[35]Martin Van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: LkiS, 1994), hal. 71.

[36]Wawancara dengan H. Shobih Ubaid. Kebenaran informasi ini diperkuat oleh keterangan H. Madchan serta dokumentasi foto-foto yang memperlihatkan K. H. Wahib saat bertemu dengan para tokoh perirtiwa PRRI/Permesta.

panglima DI/TII. Melalui pertimbangan panjang, timbullah pertanyaan dalam dirinya: apakah untuk mengejar cita-cita yang disebut "baik" harus didahului dan disertai perbuatan-perbuatan buruk, sebagaimana dilakukan Kartosuwiryo dan pengikutnya? Akhirnya, K.H. Wahib menolak ajakan itu dan bertekad tetap berada dalam garis negara RI.[37]

Menjadi Menteri Agama

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menandai berakhirnya pemerintahan parlementer dan menjadi tonggak lahirnya pemerintahan "Demokrasi Terpimpin" yang menghendaki loyalitas tunggal kepada pemimpin besar revolusi, Presiden Soekarno. Sejak saat itu seluruh aparatur negara dituntut mengabdikan diri kepada cita-cita revolusi sebagaimana dijabarkan kemudian dalam Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang diatur dalam Ketetapan MPRS No. II/MPRS/60.[38] Departemen Agama, sebagai bagian pemerintahan RI, jelas harus menyesuaikan diri. Tak beda dengan instansi-instansi lain, Departemen Agama harus menjadi alat revolusi dan alat *Nation and Character Building*, seperti kerap didengungkan Soekarno, sekaligus pelaksana Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera).*

Dalam suasana politik seperti itulah K.H. Wahib Wahab diangkat Menteri Muda Agama pada tanggal 10 Juli 1959 sesuai Keppres. No. 153/1959 pada masa Kabinet Kerja ke-1 yang merupakan kebinet XX sejak berdirinya pemerintahan RI. K.H. Wahib menggantikan K.H. Iljas yang telah meletakkan jabatannya. Kementerian ini berada di bawah kompartemen Kesejahteraan Rakyat yang dipimpin Menko H. Muljadi Djojomartono.

Kabinet Kerja ini secara eksplisit bersifat non partai, di mana anggota-anggota partai yang duduk di dalamnya harus keluar dari partai mereka masing-masing. Namun para perwira tentara yang ditunjuk untuk mengisi kursi kabinet tidak diminta berhenti dari

---

[37]Harian *Indonesia Raja*, 9 Oktober 1958

[38]Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, *Laporan Sejarah Departemen Agama: Naskah Tahap I* (Jakarta: Proyek Penelitian Keagamaan Departemen Agama RI, 1980/1981), hal. 82

*Lihat juga bab tentang Saifuddin Zuhri.

dinas militernya. Dalam kabinet ini Soekarno memangku jabatan Perdana Menteri, tetapi dalam kenyataannya, pimpinan kabinet diserahkan kepada "Menteri Pertama", Ir. Djuanda.[39]

Tentang pengangkatan dirinya, K.H. Wahib Wahab bercerita: "Saya menjabat Menteri Negara Urusan Kerjasama Sipil Militer yang kemudian diangkat menjadi Menteri Agama, merasa perlu memberi pertimbangan sejarah kejadian waktu itu. Pada tanggal 20 Mei 1959, saya mengusulkan secara tertulis kepada Presiden Soekarno agar dikeluarkan dekrit kembali ke UUD 1945 yang dijiwai Piagam Jakarta, denga catatan Konstituante tidak dibubarkan.[40] Usulan tersebut diantarkan sekretaris pribadi saya, Sa'dullah, melalui Menteri Pertama Ir. Djuanda untuk disampakan kepada Presiden. Selanjutnya saya menunaikan ibadah haji bersama Soenaryo, Menteri Dalam Negeri ketika itu, dengan menumpang kapal Gunung Jati. Setelah kapal masuk daerah Sukatra mendekati Aden, saya diberitahu kapten kapal (orang asing), bahwa dia mendengar Presiden telah mengeluarkan dekrit kembali ke UUD 1945 yang dijiwai Piagam Jakarta dan sekaligus membubarkan Konstituante. Dalam perjalanan pulang dari ibadah haji, atas undangan presiden Mesir, saya berkunjung ke Mesir terlebih dahulu. Pada saat itulah saya diangkat menjadi Menteri Agama."[41]

Kabinet Kerja ke-1 selesai masa tugasnya setelah keluar Keppres. No. 21/1960 yang menetapkan pembentukan Kabinet Kerja ke-2, dengan Dr. Ir. Soekarno tetap sebagai Perdana Menteri. Dalam Kabinet baru ini, K.H. Wahib Wahab diangkat kembali sebagai Menteri Agama, terhitung mulai 18 Februari 1960 dan mengakhiri jabatannya berdasarkan Keppres No. 63/1962 menjelang masa tugas kabinet berakhir, 6 Maret 1962.

---

[39]Ulf Sundhaussen, *Politik Militer*, hal. 256

[40]Gagasan kembali ke UUD 1945 melalui dekrit Presiden telah berkembang di kalangan Angkatan Perang RI dan sejumlah pimpinannya gencar melakukan "lobi", antara lain kepada pimpinan NU pada awal bulan Juli, sebelum mereka berangkat ke Tokyo menemui Presiden Soekarno yang tengah sakit dan dirawat di sana. Dua tokoh Angkatan Perang yang bertemu dengan pimpinan NU itu meminta saran, materi apa yang perlu dimasukkan dalam Dekrit Presiden. Lihat: Saifuddin Zuhri, *Berangkat dari Pesantren*, hal.451.

[41]*Laporan Sejarah Departemen Agama*, hal. 83.

Semasa K.H. Wahib memimpin Kementerian Agama, ia mengeluarkan Peraturan Menteri Agama No. 14/1960 disusul dengan Peraturan Menteri Agama No. 14/1961 yang menggantikan Peraturan Menteri Agama No. 2/1958. Kedua peraturan itu menetapkan struktur baru organisasi Departemen Agama Pusat. Secara eksplisit, dalam Peraturan Menteri Agama nomor 14/1960 istilah Kementerian Agama diganti dengan Departemen Agama. Di dalam Peraturan ini tercakup pula rincian tugas Departemen Agama.[42]

Pada masa K. H. Wahib, sejumlah tugas penting berhasil dilaksanakan Departemen Agama. Antara lain:

1. Pembangunan gedung Departemen Agama
   Gedung ini telah didirikan tepatnya tanggal 13 Desember 1958, terletak di Jl. M. H. Thamrin No. 6 sebagai pusat aktivitas Departemen Agama Pusat dan baru diresmikan penggunaannya pada 1 Mei 1963 oleh Menteri Agama Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
2. Pembangunan Masjid Istiqlal
   Peletakan batu pertama pembangunan masjid ini sebenarnya sudah dimulai pada periode K.H. Iljas. Pada 1960 Presiden Soekarno didesak agar mempercepat pelaksanaan proyek dan akhirnya pada tahun itu pula, dilakukan pemancangan tiang pertama pembangunan masjid.
3. Pembentukan IAIN
   Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 10/1960 sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 11/1960, dibentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di bawah pengawasan Bagian Urusan Perguruan Tinggi Agama. Sebelumnya, Departemen Agama mempunyai dua macam Perguruan Tinggi, yaitu: Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) berkedudukan di Yogyakarta dan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) bertempat di Jakarta. Dengan peraturan tersebut, PTAIN dan ADIA ditransformasikan menjadi IAIN.

   Transformasi tersebut didahului perdebatan sengit karena kehadirannya dikhawatirkan bakal memicu kecemburuan umat

[42]*Laporan Sejarah Departemen Agama*, hal. 83-84.

agama lain yang dapat mengganggu persatuan bangsa. Apalagi ketika itu banyak kalangan nasionalis yang terang-terangan menolaknya. Karena itu sewaktu Presiden Soekarno pergi ke luar negeri, K.H. Wahib bersama dua orang stafnya, Kolonel (Pur.) Iskandar Sulaiman dan Letkol (Pur.) Sullam Syamsun, menemui Menteri Djuanda yang diharapkan bersedia mendukung gagasan pembentukan IAIN. Melalui diplomasi cukup panjang, Djuanda akhirnya bersedia.[43]

Begitu Djuanda menyetujui, K.H. Wahib meminta bantuan Mr. Soenaryo, untuk mencari dukungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. DR. Priyono, sehingga keluarlah Peraturan Pemerintah No. 11/1960. Setelah itu, dibentuklah panitia yang beranggotakan Prof. Muchtar Yahya, Prof. Hasbi Assiddieqy, K.H. Fathurrahman Kafrawi, Prof. Bustani A. Gani dan Prof. Mahmud Yunus untuk menangani proyek pendirian IAIN.[44]

4. Penyerahan al-Quran Pusaka
   Pada masa K. H. Wahib ini terjadi peristiwa penting, yakni penyerahan al-Qur'an Pusaka RI dari Menteri Agama kepada Presiden Soekarno. Peristiwa tersebut terjadi dalam peringatan Nuzulul Qur'an yang megah dan meriah di Istana Negara pada 17 Ramadhan 1376 H/15 Maret 1960, dan disaksikan para menteri, pembesar negara baik sipil maupun militer, perwakilan negara-negara sahabat, dan ribuan umat Islam.

Selain prestasi-prestasi di atas, K.H. Wahib juga melakukan perbaikan dalam sistem pemberangkatan jamaah haji lewat Penetapan Menteri Agama No. D/23/59 tertanggal 14 November 1959 dan No. 36 tahun 1959. Sebelumnya, urusan perjalanan haji ditangani Perjalanan Haji Indonesia (PHI) bekerjasama dengan PT. Musi dan PT. Bank Haji, di bawah pengawasan Kementerian Agama. Sejak terbitnya kebijakan tadi, PHI dinyatakan sebagai yayasan partikelir yang terlepas dari organisasi Kementerian Agama dan pengurusan serta penyelenggaraan haji diselenggarakan

---

[43]Wawancara dengan H. Sullam Syamsun.
[44]*Laporan Sejarah Departemen Agama*, hal.84-85.

sepenuhnya oleh instansi-instansi Departemen Agama, baik tingkat pusat maupun daerah.[45] Selanjutnya, badan-badan usaha yang menyelenggarakan haji tersebut, meski mulai menunjukkan hasil positif dari segi administrasi, terpaksa dihentikan. Perwakilan PHI di Jeddah diperintahkan tutup, PT. Musi tidak lagi dipakai sebagai operator pengangkutan haji, dan PT. Bank Haji ditutup.

Program kesejahteraan pegawai Departemen Agama juga menjadi salah satu perhatian K.H. Wahib selaku Menteri Agama. Di masanya, telah mulai dipikirkan pengadaan perumahan bagi karyawan, yang direalisasikan dengan penyediaan lahan di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Program kesejahteraan lainnya adalah, meminta pemilik perusahaan alat-alat elektronik terkenal, Gobel, agar bersedia menyediakan sejumlah besar radio transistor, yang saat itu tergolong barang mahal, untuk dicicil pegawai Departemen Agama dengan harga murah. Sebagian radio tersebut bahkan diminta untuk disumbangkan kepada berbagai pesantren, madrasah dan sekolah agar dapat dimanfaatkan masyarakat bawah. Gobel ternyata tidak keberatan dan memenuhi permintaan ini.[46]

Selain itu, Departemen Agama juga menuntut supaya mendapat pembagian harta pampasan perang Jepang untuk membiayai proyek pencetakan al-Quran. Tuntutan ini dikabulkan, namun kemudian menimbulkan sikap pro dan kontra dari berbagai pihak karena K.H. Wahib menunjuk Jepang sebagai tempat pelaksanaan proyek itu.[47]

Satu lagi kebijakan Departemen Agama di masa K.H. Wahib adalah memberi sumbangan kepada organisasi-organisasi keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan. Madrasah lokal, misalnya, menerima subsidi Rp 10 per murid, dan untuk madrasah yang berafiliasi dengan organisasi berskala nasional, subsidi dinaikkan menjadi Rp 30 per murid. Kebijakan ini akhir-

---

[45]*Ensiklopedi Islam*, hal. 732-737.
[46]Wawancara dengan H. Madchan.
[47]Wawancara dengan H. Madchan.

nya mampu mendongkrak jumlah pesantren dan madrasah.[48]

Beberapa hari menjelang berakhirnya masa tugas Kabinet Kerja ke-2, K.H. Wahib mengajukan pengunduran diri sebagai Menteri Agama. Tidak diketahui secara pasti apa alasannya. Ada kemungkinan bahwa keputusan tersebut diambil karena desakan Soekarno, meski dalam pidato pelantikan Menteri Agama baru Presiden mengatakan bahwa mundurnya K.H. Wahib atas dasar permintaanya sendiri yang disampaikan berulang-ulang kepadanya.[49] Kemungkinan kedua, hal itu dilatarbelakangi merebaknya isu bahwa K.H. Wahib menyimpanan harta kekayaan di Singapura. Isu ini dihembuskan beberapa orang partai, terutama PKI, yang tidak menyenangi sikap dan kebijaksanaan K.H. Wahib selaku Menteri Agama.

Ketika menjadi Menteri Agama, K.H. Wahib dianggap banyak kalangan salah satu penyokong Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Hal ini dikuatkan pernyataannya bahwa penggantian UUDS 1950 adalah hijrah dari liberalisme ke sistim sosialisme. Langkah Soekarno dengan Manipolnya juga dianggap sebuah ijtihad.[50] Selama masa Demokrasi Terpimpin, semua sektor, termasuk Departemen Agama, telah dijadikan alat revolusi—meski isi dan tujuan revolusi tersebut tak pernah jelas. Pembangkangan berarti kontra revolusi yang bisa mencabut hak hidupnya sendiri. Dalam kondisi politik seperti itulah, K.H. Wahib, selaku Menteri Agama, tidak punya banyak pilihan kecuali berpihak kepada Soekarno.

Meski demikian, Wahib diam-diam tidak mendukung gagasan Soekarno untuk menyatukan kaum nasionalis sekuler, agamawan dan komunis yang disimbolkan dengan Nasakom. Dalam suatu kesempatan, ia mengatakan: "Namanya saja Nasakom. Itu kan dalam bahasa Arab berbunyi *nasa kum*, yang artinya 'pecah'. Jadi tidak bakal bersatu."[51]

---

[48]Martin Van Bruinessen, *NU: Tradisi.*

[49]Departemen Agama, *Peranan Departemen Agama*, hal. 269.

[50]Deliar Noer, *Partai Islam*, hal. 405-406.

[51]Wawancara dengan H. Shobih Ubaid.

Tertimpa Cobaan

Lepas dari jabatan Menteri Agama, karir politik K.H. Wahib dapat dikatakan selesai. Berakhirnya Kabinet Kerja ke-2 telah memberinya keleluasaan untuk menghabiskan sisa waktunya dengan mengasingkan diri dan jauh dari hiruk pikuk panggung politik nasional. Namun, tahun 1962 merupakan lembar tragedi bagi K.H. Wahib. Seperti dituturkan Deliar Noer, pada bulan Oktober K. H. Wahib diadili karena dituduh melanggar peraturan devisa dan dihukum 10 tahun penjara serta membayar denda 15 juta rupiah.[52]

Mengenai kasus ini, H. Madchan, orang dekat Wahib, mempunyai cerita lain.[53] Menurutnya, K.H. Wahib tidak bersalah, karena semua harta kekayaan di Singapura yang diributkan orang itu sebenarnya bukan miliknya. Semua itu kepunyaan seorang Cina bernama Maliko, anak seorang advokat di Mojokerto yang sudah lama tinggal di Singapura dan memiliki perusahaan biro perjalanan. Maliko kenal baik dengan K.H. Wahib sejak kecil dan Maliko inilah yang memberi uang Wahib untuk modal berdagang. Mendadak, Wahib diributkan memiliki harta simpanan yang terkait dengan pelanggaran peraturan pemerintah, sehingga diperkarakan. Lama masa penjara juga tidak 10 tahun seperti disebutkan banyak orang, tapi kurang dari sebulan.

Komentar senada juga diberikan H. Shobih Ubaid, salah seorang kerabat dekat Wahib yang merasa sangat tahu kasus tersebut, karena ia juga sempat diinterogasi pihak kejaksaan. Shobih pulalah yang menangani pembayaran dendanya sampai lunas serta relatif rutin mengunjungi K.H. Wahib ketika di rumah tahanan Salemba, tidak lebih dari sebulan. Vonis ini menurutnya tidak dijatuhkan dalam persidangan terbuka. Jadi, bagi H. Shobih, pendapat bahwa K.H. Wahib dihukum 10 tahun penjara itu mungkin terdapat kesalahan informasi.[54]

Dalam analisa Shobih, kebencian K.H. Wahib terhadap manu-

---

[52]Deliar Noer, *Partai Islam*, hal.406. Lihat catatan kaki buku tersebut nomor 145.

[53]Wawancara dengan H. Madchan.

[54]Wawancara dengan H. Shobih Ubaid.

ver-manuver politik PKI, mengakibatkan Presiden Soekarno merasa risih dan tidak suka. Sehingga, orang-orang PKI berusaha mencari celah untuk menjatuhkan K.H. Wahib karena khawatir bahwa posisinya sebagai Menteri Agama akan mudah menggalang opini publik yang dapat mengancam kelangsungan hidup PKI. Oleh karena itu, kasus di atas diyakini Shobih sebagai hasil rekayasa PKI disertai dukungan politis secara tidak langsung dari Presiden.[55]

'Uzlah di akhir perjalanan

Keberhasilan rekayasa PKI atas dirinya tanpa ada pembelaan cukup berarti dari Partai NU yang selama itu ikut diperjuangkannya, membuat K.H. Wahib kecewa dan langsung sadar bahwa dunia politik tidak selamanya menawarkan keasyikan dan kesuksesan, tapi juga dapat mendatangkan kesengsaraan tanpa bisa diduga sebelumnya. Karena itu, sejak keluar dari penjara, K.H. Wahib "banting stir" memasuki dunia usaha yang dijalankan di Bandung. Menurut penjelasan H. Cholid Mawardi,[56] kala itu K. H. Wahib memproduksi ubin yang dikelola sendiri di Bandung, namun tidak bertahan lama.

Sesudah masa tersebut lewat, ia sepertinya merenungkan kembali makna perjalanan hidupnya secara lebih mendalam dengan mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana terlihat dari aktivitasnya sehari-hari. "Setiap saya *sowan* ke rumahnya di Bandung, beliau selalu terlihat sedang wiridan, meskipun sifat periang masih terus nampak sewaktu ngobrol dengan saya" kata Cholid. Tenggelamnya K. H. Wahib dalam rutinitas ritual yang cenderung sufistik ini berlanjut hingga ia ditarik ke Golkar dan menjadi anggota DPR-RI dari Fraksi Karya Pembangunan pada 1977. Wahib terpilih lagi menjadi anggota Dewan pada 1982 sampai wafat, 12 Juli 1986, ketika masih berstatus sebagai anggota Dewan.

---

[55]Wawancara dengan H. Shobih Ubaid.

[56]Wawancara dengan H. Cholid Mawardi (aktivis NU, mantan Anggota DPR-RI dan Dubes RI untuk Suriah) di Jakarta, 30 Juli 1997.

KH Saifuddin Zuhri;

Eksistensi Agama dalam *Nation Building*

Muhaimin Abdul Ghofur

... 17 Februari 1962 Saifuddin dipanggil menghadap ke Istana Merdeka ... Bung Karno minta kepada Saifuddin agar menjadi Menteri Agama menggantikan KH Wahib Wahab ... Saifuddin tidak langsung menjawab ... dia malah minta waktu untuk ... bertemu dengan KH Wahib Wahab dan para tokoh teras NU ... [1]

Kalau Bapak (Bung Karno) tetap hendak membubarkan HMI ... maka tugas saya sebagai Menteri Agama hanya sampai di sini ... [2]

Dua kutipan diatas adalah cuplikan dari episode perjalanan hidup KH Saifuddin Zuhri saat berada di puncak karir politik. Kutipan pertama menggambarkan relung hidupnya sebelum secara resmi diangkat menjadi Menteri Agama RI, yaitu tatkala Presiden Sukarno memintanya duduk sebagai Menteri Agama. Jabatan menteri tentu merupakan kedudukan terhor-

---

[1]Ma'shum, S., ed., *Menapak Jejak Mengenal Watak: Sekilas Biografi 26 Tokoh Nahdlatul Ulama* (Jakarta: Yayasan Saifuddin Zuhri, 1994), hal. 376

[2]Ma'shum, S., ed., *Menapak Jejak Mengenal Watak*, hal. 376

mat, mungkin dambaan setiap politisi, termasuk politisi 'santri'.

Yang menarik dari kutipan di atas barangkali adalah adanya semacam kesan "arogansi" yang diperlihatkan secara terang-terangan oleh seorang santri kepada presiden. Santri itu bernama Saifuddin Zuhri sedangkan sang presiden adalah Bung Karno. Jarang terjadi tentu, apalagi akhir-akhir ini, kehormatan tawaran jabatan menteri tidak disambut dengan bangga dan pesta, melainkan dengan respons dingin yaitu minta waktu untuk terlebih dahulu berkonsultasi dengan orang yang akan ia gantikan (KH Wahib Wahab) dan tokoh-tokoh teras NU. Artinya adalah bahwa bagi Saifuddin Zuhri Sukarno bukan orang yang punya keputusan final untuk dirinya. Dalam benaknya, masih ada orang lain yang lebih dihormati dan lebih diturut nasihatnya ketimbang Presiden Sukarno, walaupun bagi banyak orang saat itu Presiden Sukarno sudah dianggap laksana dewa, penguasa tuggal negeri ini yang nyaris tanpa tandingan dan kata-katanya menjadi undang-undang.

Dan memang orang atau orang-orang yang lebih dihormati dan dituruti Saifuddin Zuhri itu ada, yang tidak lain adalah guru-gurunya, para kiyai dan orang-orang dari pesantren, yang umumnya tergabung dalam NU. Saat itu antara kiyai, dunia pesantren dan NU menjadi identik. Di situlah orang-orang yang paling mempengaruhi dirinya dan membentuk jalan hidupnya. Maka tak mengherankan kalau seberapa besar ketaatannya kepada kiyai, sebesar itu pula komitmennya terhadap NU, termasuk rasa keharusan berkonsultasi tatkala ditunjuk sebagai Menteri Agama. Apakah dengan demikian independensi Saifuddin Zuhri sebagai pribadi hilang termakan oleh doktrin 'paternalisme pesantren', susah dijawab atau barangkali tak perlu dijawab.

Sesudah berkonsultasi, pada akhirnya tawaran untuk menjadi Menteri Agama toh diterimanya dan Saifuddin Zuhri memegang jabatan itu cukup lama, yaitu sekitar lima setengah tahun (1962-1967). Sebagai seorang aparat yang tugas utamanya adalah membantu presiden, ia tentu dituntut untuk mengabdikan kemampuannya dengan loyalitas penuh, dan memang

demikianlah adanya.[3]

Namun agak berlawanan dengan prinsip loyalitas penuh tadi adalah "pembangkangan," yang tercermin pada kutipan kedua diatas, "Ancamannya" untuk mengundurkan diri akibat persoalan prinsip yang menyangkut HMI dan umat Islam pada umumnya, bisa dilihat sebagai satu sisi dari sifat dirinya yang, walau sebagai "anak manis", juga "nakal" karena siap membangkang dalam arti berani melakukan koreksi langsung kepada atasannya demi kebenaran, termasuk saat tuntutan loyalitas sudah dianggap melampaui ambang batas.

Latar belakang keluarga dan pribadinya

Saifuddin Zuhri, anak tertua dari delapan bersaudara, dilahirkan pada tanggal 1 Oktober 1919 oleh pasangan Muhammad Zuhri dan Siti Saudatun, sebuah keluarga sederhana yang tinggal di Desa Kauman, Sokaraja-Tengah, Kabupaten Banyumas (Jawa Tengah). Ayahnya, Muhammad Zuhri, adalah petani santri mewarisi garis profesi orang tuanya sendiri, Haji Abdurrasyid bin Haji Jakfar, kakek Saifuddin, yang juga petani santri di kampungnya.

Adapun ibunya, Siti Saudatun, adalah pengrajin sekaligus pedagang batik yang juga tergolong santri. Ayah Saudatun, Mas

---

[3]Dalam perjalanan sejarahnya, negara Republik Indonesia (R.I.) telah dilanda ketidak stabilan politik yang akut. Ini ditandai oleh timbul tenggelamnya kabinet yang bertugas menjalankan roda administrasi pemerintahan. Dalam jangka waktu kira-kira 21 tahun sejak proklamasi kemerdekaan R.I. 17 Agustus 1945 hingga munculnya pemerintahan Orde Baru, negara ini telah melakukan bongkar pasang kabinet sekitar dua puluh kali. Usia rata-rata sebuah kabinet kira-kira hanya satu tahun saja bahkan ada sebuah kabinet yang usianya hanya sebulan, yaitu Kabinet Susanto yang memegang tampuk pemerintahan dari tanggal 20 Desember 1949 s/d 21 Januari 1950 yang Menteri Agamanya pada saat itu dijabat oleh KH Masykur. Dalam kemelut timbul tenggelamnya kabinet ini ada Menteri Agama yang menjabat lebih dari satu periode pemerintahan (kabinet) secara berturut-turut seperti K.H Wahid Hasyim, KHM. Ilyas, KH Wahib Wahab dan KH Saifuddin Zuhri, atau yang berselang seling seperti K. H. Masykur dan KH Fakih Usman. KH Saifuddin Zuhri adalah orang kesembilan dalam urutan orang-orang yang pernah menjabat sebagai Menteri Agama, dan orang pertama yang menduduki jabatan Menteri Agama yang lamanya melebihi jangka waktu lima tahun.

Amari, kakek Saifuddin dari pihak ibu, walau datang dari keluarga priyayi dan memiliki kesempatan bekerja sebagai pegawai gubernemen, lebih cenderung memilih profesi sebagai pedagang. Ibu Saudatun, nenek (eyang putri) Saifuddin, yang bernama Siti Salbiyatun, adalah putri H. Asraruddin, pemimpin sebuah pesantren di Kebonkapol, Banyumas. Atas desakan Kanjeng Bupati Banyumas, H. Asraruddin diangkat sebagai penghulu Landraad (pengadilan negeri), juga di Banyumas. Penghulu adalah jabatan administrasi di bidang keagamaan yang diangkat sebagai pegawai Belanda. Dengan demikian ayah Salbiyatun adalah seorang santri sekaligus priyayi.[4]

Sementara ibunya yang keturunan priyayi itu melepaskan jabatan kepriyayiannya dan terjun sebagai pedagang, ayah Saifuddin sendiri yang keturunan petani dengan penghasilan rata-rata sekitar 15 sen sehari, misalnya, terlibat dalam profesi yang bila digolongkan secara tegas ke dalam kategori kemasyarakatan Geertzian akan susah:

> ... tidaklah mudah bagiku menyebut masuk golongan apa orang tuaku itu ... sesekali ayah seperti juragan dokar, kali yang lain menemani ibu menjual kain ke pasar. Tapi suatu ketika ayah bekerja membantu kakek di sawah.[5]

Karena kedua orang tuanya bercerai sewaktu ia masih gadis, Saudatun dipelihara bibinya, istri Haji Isro seorang kaya pemilik toko di Purbalingga. Namun ia lebih sering tinggal bersama bibinya yang lain, istri Kiyai Nur Hasani, seorang guru

---

[4]Zuhri, S., KH, *Berangkat dari Pesantren* (Jakarta: Gunung Agung, 1987), hal. 7.

[5]*Berangkat* ... , hal 8. Secara kebudayaan, Clifford Geertz memandang struktur sosial-keagamaan masyarakat Jawa yang 90 % Islam itu ternyata ke-Islaman-nya hanya kulit. Yang benar, kata Geertz, mereka adalah penganut sinkretisme, campuran antara Islam dan agama-agama sebelumnya (animisme, Hindu dan Budha). Mereka terbagi ke dalam tiga varian, yaitu kelompok abangan yang lebih berat animismenya, santri yang lebih berat Islamnya dan priyayi yang lebih berat Hindu/Budhisnya. Ketiga varian keagamaan ini terkait dengan kecenderungan tradisi masing-masing dalam cara mencari nafkah; abangan terkait dengan pertanian di desa-desa dan buruh di kota-kota, santri terkait dengan perdagangan di pasar-pasar dan priyayi terkait dengan kekuasaan dan birokrasi. Tentang perspektif ini secara rinci, lihat: Geertz, C., *The Religion of Java* (Glencoe: University of Chicago Press, 1960).

Tarekat Syattariyah di Pasir Luhur, Purwokerto. Sedikit atau banyak, mungkin antara lain karena sentuhan Syattariyah ini maka Saudatun, ibu Saifuddin, hanyut dalam kemuslimahan yang kental dengan visi kemanusiaan yang agak unik untuk kemudian menjadi bekal yang diajarkan kepada anak-anaknya, termasuk (terutama) Saifuddin. Visi tersebut, misalnya, tercetus dalam pandangan tentang status priyayi *vis-a-vis* non-priyayi dalam struktur sosial masyarakat Jawa:

> Priyayi itu apa? ... priyayi atau bukan, itu sama saja. Manusia yang baik adalah yang sembahyang, kelakuannya baik, mencintai sesama hidup, dan rajin bekerja ... [6]

Saifuddin Zuhri memang tidak sempat mengenyam pendidikan formal yang tinggi. Ia sempat belajar di Sekolah Rendah Nomor Dua Bumi Putra sampai kelas terakhir, yaitu kelas lima. Hanya saja tidak terlalu jelas apakah ia mendapat sertifikat atau tidak; mungkin sekali tidak. Sebabnya, pertama karena sertifikat itu harus ditebus dengan uang sebesar 50 sen, jumlah yang cukup besar dibandingkan dengan penghasilan ayahnya yang rata-rata 15 sen sehari. Namun jumlah itu barangkali tidak terlalu penting dibandingkan dengan persoalan kedua, yaitu keberatannya untuk menjawab pertanyaan gurunya tentang "termasuk golongan apa orang tuanya itu." Mengapa hanya soal sertifikat lalu golongan seseorang harus dipersoalkan? Bukankah ilmu pengetahuan harus menjadi milik semua orang yang karena itu adalah hak setiap orang untuk memilikinya terlepas dari suku, ras, warna kulit, status dan agama? Ketiga, sertifikat Sekolah Bumi Putra yang disebut ayahnya sebagai 'Sekolah Ongko Loro' (karena di depannya ada papan bertuliskan kalimat Belanda berbunyi: "*2e Inlandsche School*" yang artinya

---

[6]Pandangan yang sama juga dianut dan dikembangkan oleh pengikut Tarekat Sattariyah di tempat lain. Kyai Abdul Jamil (turunan Kesultanan Cirebon), misalnya, Guru Tarekat Sattariyah dan pemimpin Pesantren Buntet, Jawa Barat, bahkan melarang anak-cucunya untuk menggunakan gelar kebangsawanan. Lihat: Muhaimin, A.G (1995), *The Islamic Tradition of Cirebon: Ibadat and Adat Among Javanese Muslims*, dissertasi PhD, Canberra: ANU.

Sekolah Bumi Putra Kelas Dua), dianggap orang setempat, yang umumnya santri dan anti Belanda, sebagai tidak berguna sama sekali bahkan ada yang mencemooh sebagai hanya pantas untuk bungkus terasi dan tidak bisa dipakai bekal masuk ke dalam kubur.[7] Itulah barangkali bakat 'nakal' seorang santri yang diperlihatkan Saifuddin terhadap hal yang tidak proporsional.

> Ketika aku memberitahu kepada mereka bahwa insya Allah aku termasuk murid yang lulus dan bakal tamat Sekolah Dasar, mereka amat bersyukur. Dan ketika aku katakan sudah bertekad tidak akan mengambil sertifikat tanda tamat sekolah jika harus membayar Rp.0.50 dengan perlahan-lahan ayah manggut. Tetapi ibu tidak ikut manggut. Ibu tidak bicara apa-apa .... ![8]

Yang barangkali paling terkesan tentang SD-nya adalah Ndoro Guru dan Ndoro Mantri (Kepala Sekolah) karena mempunyai jam kantong, benda berharga yang hanya dimiliki orang-orang tertentu. Sesudah melihat jamnya saat saat tertentu, Ndoro Mantri secara otomatis selalu saja membunyikan bel.[9]

Beruntunglah Saifuddin yang tinggal di Kauman di mana suasana belajar terbentuk secara alami karena di sekitarnya terdapat sejumlah pesantren dan banyak kiyai. Nasihat ibunya yang antara lain berbunyi: "Serap sampai habis seluruh ilmu kiyai di desa ini ..." berusaha diturutinya. Bila di pagi hari pergi ke Sekolah Nomer Loro, pada sore hari ia juga belajar agama di 'Sekolah Arab', sebutan untuk Madrasah Diniyah sekarang, sedangkan malam harinya masih dipakai mengaji, mula-mula dengan ayahnya sendiri kemudian di pesantren-pesantren yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Dalam usia muda (13-14 tahun) ia menamatkan al-Qur'an dan sejumlah kitab, antara lain *Safinah an-Najah, Ajurumiyah, Qatrulghaits* dan *Ta'lim al-Muta'allim.*

Sewaktu duduk di SD kelas tiga, di Sukaraja Wetan (10 km dari rumahnya) didirikan Madrasah al-Huda NU yang dipim-

---

[7]*Berangkat* ... , hal. 1-2. Lihat pula catatan 6 diatas.

[8]*Berangkat* ... , hal 9. Disini tidak jelas apakah ibu yang diam akhirnya menyediakan atau tidak uang untuk menebus sertifikat itu, mungkin sekali tidak.

[9]Zuhri, S, *Guruku Orang-orang dari Pesantren* (Bandung: Al-Ma'arif, 1974), hal. 5.

pin Ustadz Mursyid, seorang kiyai muda asal Solo dengan waktu belajar sore hari mulai jam 2.30. Biasanya sepulang dari sekolah jam 12.00 dan salat Dzuhur ia bermain; saat waktu Asar ia memandikan dan memotong rumput untuk dua ekor kuda penarik delman ayahnya. Ia mendesak ayah-ibunya agar memasukkannya ke sana untuk bisa belajar kepada Ustadz Mursyid yang diam-diam sangat dikaguminya baik karena penampilan maupun karena ilmunya. Ustadz Mursyid adalah kampiun sepak bola bertubuh atletis, namun dalam bidang agama ia menguasai sejumlah 'kitab berat' seperti *Tafsir al-Baidlawi, Hadits al-Bukhari, Ihya Ulumiddin* dan kitab tashawuf *al-Hikam*. Ini sering diperhatikannya setiap kali berlangsung pengajian khusus para kiyai pimpinan Kiyai Syatibi, ulama *kondang* setempat sekitar tahun 1928.

Tahun 1929 Saifuddin mendaftar dan diterima di Madrasah al-Huda. Saat itu tempat belajarnya hanya langgar milik pribadi seorang penduduk; baru kemudian masyarakat setempat bergotong royong membangun gedung. Di madrasah ini pelajaran *al-lughah* (bahasa Arab) dan bahasa Jawa diberikan secara intensif. Mulai kelas III, misalnya, percakapan di lingkungan madrasah antara sesama murid dan antara murid dengan guru harus dengan bahasa Arab. Sedangkan bahasa Jawa diberikan secara terpadu melalui pelajaran sejarah Islam dan budi pekerti. Pelajaran lainnya adalah al-Qur'an berikut tajwid dan qira'atnya, nahwu-sharaf, fiqh, 'aqaid (keimanan), tafsir, hadits, dan olahraga. Bayaran di madrasah ini termasuk mahal, yaitu 25 sen sebulan sangat jauh dibanding Sekolah Arab biasa yang hanya 3 sen. Di samping itu, di madrasah ini juga dibuka kursus bahasa Belanda dengan bayaran lebih mahal lagi yaitu Rp1,00 sebulan. Karena mahal, Saifuddin sempat mengikutinya selama 6 bulan saja. Belajar di sini ditekuninya hingga akhir, walau juga tidak jelas apakah madrasah ini menerbitkan sertifikat. Dalam masyarakat santri, formalitas sertifikat memang tidak begitu dipersoalkan.

Di samping itu dari kiyai setempat ia juga berkenalan dengan berbagai ketrampilan, seperti pencak silat, pidato, bengkel sepeda, jahit-menjahit, gunting rambut, membuat letter, mengetik, dan stensil dengan bahan agar-agar.

Untuk tidak dianggap sebagai 'orang pinter kelas kampung pada 1937 saat umurnya menginjak 18 tahun, yaitu beberapa waktu sesudah tamat dari al-Huda, Saifuddin merantau ke Solo

untuk melanjutkan pelajaran. Mula-mula belajar di Mamba'ul 'Ulum, madrasah yang menyelenggarakan pendidikan gabungan dari tingkat dasar (5 tahun), Tsanawiyah (3 tahun) dan 'Aliyah (3 tahun). Mamba'ul 'Ulum diasuh para ulama dengan restu kraton. Saifuddin diterima di kelas VIII, kelas tertinggi pada kelompok siang. Walau madrasah ini sangat mengesankannya tapi ia hanya menjalani selama lima minggu saja, lalu pindah ke Madrasah Salafiyah, madrasah moderen dengan bahasa pengantar bahasa Arab ala Mesir. Di sini ia diterima di kelas III (tertinggi) juga masuk siang. Inipun dijalaninya hanya sebentar, sekitar sebulan dan pindah lagi ke Madrasah al-Islam, juga kelas tertinggi yang ada di sana yaitu kelas IV. Di madrasah inilah akhirnya ia merasa betah; pertama karena waktu belajarnya pagi sehingga memungkinkannya untuk kerja (*nyambi*); kedua penampilan guru-gurunya sama seperti Mamba'ul 'Ulum (gaya kraton); ketiga, di antara gurunya ada yang beraliran *tajdid* (pembaharu), yaitu pimpinannya, Kiyai Ghozali. Walau beraliran *tajdid* kiyai yang mengajar tafsir al-Qur'an dan fiqh ini tetap menggunakan kitab kuning, yaitu *Tafsir Jalalain* dan *Fathul Muin*. Setelah belajar empat bulan ia mengikuti ujian akhir dan lulus mendapatkan ijazah tingkat Tsanawiyah.

Pengembaraannya di Solo berlangsung kira-kira 13 bulan, lalu kembali ke kampungnya, Sokaraja. Selama merantau itu Saifuddin juga sempat mengikuti kursus jurnalistik, *verkoper* (*salesmanship*), menghadiri ceramah-ceramah Muhammadiyah, ceramah-ceramah pastur dan pendeta Kristen, perkumpulan kebatinan (klenik), serta *nambal* (menambah berbagai pelajaran yang tertinggal) dari teman dan kiyai lain, termasuk menamatkan *Alfiah Ibnu Malik* dari Kiyai Masyhud, yang tinggal di dekat sekolahnya yaitu Madrasah al-Islam. Di rantau ini pula ia mulai bersinggungan dengan dunia luar secara lebih luas dan intensif. Ia sempat menyaksikan berbagai kegiatan berskala nasional seperti kongres wartawan, dan Kongres Bahasa Indonesia serta mengenal secara langsung tokoh-tokohnya. Saat kembali ke Sukaraja, umurnya sudah menginjak 19 tahun. Dua tahun kemudian, tepatnya tanggal 19 September 1941 yaitu saat usianya sekitar 22 tahun, ia menikah dengan Mien Saifuddin. Dari pernikahan ini Saifuddin Zuhri dikaruniai 10 orang anak putra dan putri, yaitu Fahmi, Ida, Anis, Is, Tati, Baihaqi, Yulia, Annie, Adieb dan Lukman.

Titian Karier: Profesi dan Medan Juang

Tahun 1936, ketika masih duduk di Kelas-V (kelas terakhir) Madrasah al-Huda sambil belajar di sejumlah pesantren yang ada, Saifuddin sudah mulai menjadi 'ustadz kecil' mengajar di kelas lebih rendah daripada yang ia duduki. Bahkan juga mengajar di berbagai kursus pemuda. Saat itu usianya 17 tahun, dan mulai haus membaca. Dengan sedikit kemampuan mengetik yang diperolehnya dari kiyai setempat, disertai kegemaran membaca majalah dan suratkabar ia mulai tertarik untuk membuat tulisan dan mencoba menulis berita yang ia kirimkan ke sejumlah penerbitan. Ia kemudian diterima sebagai koresponden Harian *Pemandangan* dan *Hong Po* yang terbit di Jakarta. Untuk apa yang ditulisnya, ia memperoleh imbalan sekitar Rp 2,50 setiap bulan. Namun bersamaan dengan itu, teman-teman sebayanya satu persatu meninggalkan kampung halaman pergi merantau untuk meneruskan pelajaran ke berbagai pesantren. Sesudah melalui 'diplomasi' panjang dengan ayah ibunya, iapun berangkat ke Solo. Di sana ia lebih memperdalam pengetahuan agama dan ketrampilan lainnya serta mematangkan bakat kewartawanan yang sudah ia gandrungi.

Sesudah 13 bulan di Solo Saifuddin pulang ke Sokaraja dengan ijazah Tsanawiyah di tangan dan rasa percaya diri yang jauh lebih besar. Atas restu gurunya di al-Huda, Ustadz Mursyid, dan Pak Mukhtar, ia mendirikan Islamitisch 'Westerse Schoel' (IWS) yang pada perkembangannya lebih lanjut diletakkannya di bawah naungan NU. Untuk direkturnya, diangkat R. Sunarko, temannya, sementara ia sendiri menjadi salah seorang guru agama Islam. Di sini ia berpantalon, berdasi dan berpeci serta dipanggil *meneer* (tuan). Saat itu memakai peci merupakan ciri sebagai orang pergerakan (nasionalis), yang membedakan dengan para *ambtenaar* (birokrat) Belanda. Sejak itu pula ia punya kebiasaan merokok.

Saifuddin juga mendirikan 'Kulliyatul Muballighin' (sekolah dakwah) dan 'Kulliyatul Mu'allimin' (sekolah kegurun/ilmu pendidikan) yang mempersiapkan pemuda-pemudi untuk menjadi juru dakwah dan ustadz. Ia sendiri menjadi direkturnya sementara Kiyai Akhmad Syatibi, ulama kondang setempat, menjadi guru agama. Profesionalisme sebagai pendidik ia peroleh dari pengamatan yang tajam terhadap guru-guru yang

pernah mengajarnya baik di SD dan di madrasah, baik Sukaraja maupun di Solo, serta improvisasi yang ia kembangkan dari pengalamannya sendiri. Juga dengan banyak membaca buku-buku ilmu mendidik dan pendidikan. Ia menganggap perlunya guru mengarahkan pembagian waktu yang proporsional bagi anak usia sekolah untuk bermain, membantu orang tua, belajar dan istirahat agar pembentukan jiwa dan potensi dirinya berkembang dengan baik dan wajar. Kesibukan di dunia pendidikan ini kemudian terhenti beberapa waktu sesudah kedatangan balatentara Jepang. Intensitas perjuangan kemerdekaan meningkat pesat, sekolah-sekolah banyak yang tutup, demikian juga pesantren karena hampir seluruh waktunya tersita oleh pergerakan.

Perhatian Saifuddin terhadap pergerakan kebangsaan sudah mulai bersemi sekitar tahun 1930-an. Saat itu ada seorang pemimpin tenar yang menetap di kampungnya (Sukaraja) selama kira-kira dua tahun. Disaksikannya bagaimana HOS Cokroaminoto, pemimpin tenar itu, menggembleng puluhan pemuda dari Sumatera, Jawa Barat, bahkan Gorontalo. Diketahuinya kemudian bahwa acara itu adalah pembentukan kader organisasi. Namun kemudian Saifuddin akrab dengan NU antara lain melalui hubungan dekat dengan Raden Haji Mukhtar atau Pak Mukhtar, seorang anggota Regentschaap-Raad (DPR Kabupaten). Di samping sebagai pendamping Kiyai Raden Haji Rifa'i, guru Tarekat Naqsabandiyah, Pak Mukhtar juga konsul (koordinator cabang-cabang) NU untuk daerah Banyumas, Kedu dan Yogya. Pak Mukhtar sudah sering mengajaknya keliling ke berbagai daerah untuk rapat atau membina NU saat umur Saifuddin masih 14 tahun. Juga di zaman Jepang saat sejumlah kiyai diadili di Banyumas di mana Pak Mukhtar menjadi pembela KH Wahab Chasbullah dan kiyai-kiyai lain yang dituduh melakukan gerakan bawah tanah menentang Jepang.

Sementara itu bakat kewartawanannya diteruskan dengan melanjutkan kariernya sebagai koresponden *Pemandangan* dan *Hong Po*, bahkan kemudian juga menjadi koresponden *Antara*. Sesekali ia menulis di *Pesat*, majalah populer tingkat nasional yang terbit di Jakarta pimpinan suami istri Sayuti Melik dan SK Trimurti. Di samping itu ia juga menjadi pembantu tetap majalah *Berita Nahdlatul Ulama* dan *Suara Ansor* yang terbit di Sura-

baya. Di tahun 1939, ia menerima surat dari Wahid Hasyim yang waktu itu menjadi Ketua Dewan Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI); selain Wahid Hasyim duduk pula sebagai anggota MIAI adalah tokoh-tokoh pergerakan Islam nasional seperti Abikoesno dan Wondoamiseno dari PSII, Sukiman dan Abdulkahar Muzakkir dari Partai Islam Indonesia, KH Mas Mansur dan KH Hadjid dari Muhamadiyah, Umar Hubeis dari Al-Irsyad, Muhammad Natsir dari Persis, KH Mahfudz Siddiq dan KHM Dahlan dari NU. Dalam suratnya Wahid Hasyim mengemukakan harapan agar Saifuddin membantunya dengan mengirimkan tulisan-tulisan untuk dimuat dalam *Suluh Nahdlaltul Ulama*, majalah pendidikan yang telah terbit beberapa nomor di bawah asuhannya. Wahid Hasyim juga mengundangnya ke Jombang untuk ia jemput sendiri di stasiun. Saifuddin memenuhi harapan itu dan dalam kesempatan perjalanan ke Surabaya untuk menghadiri *mubarazah* (Jambore) GP Ansor ia mampir di Tebuireng. Sambutannya hangat dan dipertemukan dengan Hadratus Syaikh KH Hasyim Asy'ari serta KH Wahab Chasbullah. Sejak kunjungan dua hari itu terjalinlah hubungan erat antara dirinya dengan Wahid Hasyim. Sewaktu Masyumi berdiri pada Oktober 1943 menggantikan MIAI, Wahid Hasyim, sebagai anggota legislatif dan wakil ketuanya, meminta Saifuddin menjadi pemimpin majalah *Suara Muslimin*.

Sejak tahun 1938 Saifuddin sudah aktif sebagai komisaris Ansor Jawa Tengah. Jepang tidak menyukai organisasi pemuda, dan kepanduan Indonesia, termasuk Ansor. Namun saat semua organisasi kepemudaan dibubarkan dan dilebur ke dalam 'Kaiboondan' dan 'Seinendan,' dua organisasi keamanan dan kepemudaan bikinan Jepang. Ansor pimpinan Saifuddin beroperasi seperti biasa. Iapun dipanggil ke kantor Kepolisian Keresidenan Banyumas dan diinterogasi. Menjawab pertanyaan opsir keamanan Jepang, ia katakan antara lain, mengapa harus bubar padahal Ansor mengajarkan kepada anggotanya, sekaligus melaksanakan, apa yang dilakukan Kaiboondan dan Seinendan. Opsir keamanan Jepang yang kebetulan orang Indonesia bernama Umar Khattab itu kewalahan lalu berterus terang bahwa sebenarnya ia diperintahkan menahan Saifuddin dengan tuduhan melakukan gerakan anti Jepang. Sambil berbisik ia menyarankan agar demi keselamatan, untuk sementara Saifuddin pin-

dah saja, jangan tinggal di Banyumas. Pak Mukhtar menyarankannya berangkat ke Magelang sambil mengusulkan kepada PB NU agar Saifuddin diangkat menjadi Konsul NU daerah Kedu. Tugas konsuler ini diembannya dari tahun 1943 sampai dengan 1948. Disela-sela tugas ini ia sempat mengikuti Kongres Wartawan Indonesia di Solo (9 Pebruari 1946) dan sidang BP KNIP (28 Pebruari 1946). Suatu hari di bulan Maret 1946 Saifuddin pergi ke Yogyakarta memenuhi panggilan Menteri Agama RI, HM Rasjidi yang berkantor di Malioboro. HM Rasjidi memintanya agar mau menjadi pegawai Kementerian Agama.* Ia jawab bahwa tawaran itu amat sulit bisa ia penuhi karena sudah memangku berbagai jabatan, di antaranya adalah Ketua Masyumi Karesidenan Kedu, pimpinan Hizbullah dan Konsul NU. Namun HM Rasyidi mengatakan, bahwa seseorang (Sutikno) akan mengaturnya. Sejak saat itu namanya tercantum sebagai pegawai Kementerian Agama golongan IV/C dengan pangkat Komisi Kepala, walau tidak pernah datang ke kantor. Tahun 1949 KH Fakih Usman,** Menteri Agama saat itu, mengangkatnya sebagai Kepala Jawatan Agama Propinsi Jawa Tengah.

Tatkala perang Asia Pasifik memasuki babak baru, Jepang meminta Jawa Hokokai mengumpulkan para pemuda untuk dilatih menjadi Peta dengan pusat latihannya di Jakarta. Menyambut perkembangan ini Wahid Hasyim*** mengusulkan kepada pemerintah kolonial Jepang agar pemuda Islam juga mendapat latihan. Usul itu diterima namun wadah untuk pemuda Islam bukan Peta melainkan Hizbullah dan Sabilillah dengan pusat latihan di Cibarusa.

Sesudan menjalani latihan, Saifuddin diserahi tugas membentuk dan menjadi komandan Hizbullah daerah Kedu. Untuk ini ia minta bantuan Ahmad Yani menyediakan instruktur untuk melatih anak buahnya.[10] Tugas komandan Hizbullah Divisi Sultan Agung terus diembannya setelah Jepang menyerah. Bah-

---

*Cf bab tentang Rasjidi.

**Cf bab tentang Fakih Usman.

***Cf bab tentang Wahib Hasyim.

[10]Kemudian dikenal sebagai Jenderal A. Yani yang gugur oleh kekejaman G30S PKI tahun 1965.

kan selama revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan ia diangkat sebagai anggota Dewan Pertahanan Daerah Kedu (1946-1947), kemudian Penasihat Pemerintah Militer Gubernur Militer Daerah Jawa Tengah (1947-1949), menjadi anggota DPRD Kotapraja Semarang mewakili GPII lalu anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah dan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Ia termasuk di antara yang hadir saat pelantikan Bung Karno sebagai Presiden RIS di Siti Hinggil Kraton Yogyakarta tanggal 17 Desember 1949.

Sementara itu di NU ia telah menjadi salah seorang kepercayaan Wahid Hasyim.* Setidaknya seminggu sekali ia menemui Wahid Hasyim, terkadang di Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogya atau di tempat lain. Wahid Hasyim memperkenalkannya dengan tokoh-tokoh pergerakan yang lain seperti Mr Muhammad Yamin dan Zainul Arifin. Pada 1951 sewaktu ia tinggal di Semarang dan menjadi Kepala Jawatan Agama Jawa Tengah, PBNU mengangkatnya sebagai Ketua Bidang Da'wah. Sesudah Wahid Hasyim meninggal pada 19 April 1953, reputasinya terus menanjak. Ia diangkat sebagai Sekjen PBNU dan berturut-turut menjadi anggota Parlemen RI Sementara, anggota Parlemen hasil Pemilihan Umum 1955, anggota Konstituante, anggota DPRGR dan DPA era Demokrasi Terpimpin, serta anggota Badan Pekerja Depernas. Mulai 1 Desember 1960 ia ditunjuk sebagai Pemimpin Umum dan Redaksi Harian Umum *Duta Masyarakat*, organ resmi Partai NU, dan pada 2 Maret 1962 diangkat Presiden Sukarno menjadi Menteri Agama RI menggantikan KH Wahib Wahab.** Dengan jabatan dalam pemerintahan ini, Muktamar NU tanggal 24-29 Desember 1962 di Surakarta memberhentikannya secara resmi dari kedudukannya sebagai Sekjen PB NU.

Missi Baru Tahta Baru

Seperti telah disinggung di muka, KH Saifuddin Zuhri menduduki jabatan Menteri Agama selama kira-kira lima setengah tahun, yaitu sejak 2 Maret 1962 sampai dengan 11 Oktober 1967.

---

*Cf bab tentang Wahid Hasyim.
**Cf bab tentang Wahib Wahab.

Dalam kurun itu banyak hal penting yang bisa dicatat, walau persoalan mana yang sesungguhnya penting akan sangat tergantung pada kacamata dan cara pandang siapa yang mencatatnya.

Seputar Pengangkatannya sebagai Menteri

Jum'at 17 Pebruari 1962 Saifuddin dipanggil Presiden Sukarno ke Istana Merdeka yang memberitahukan bahwa dirinya akan dijadikan Menteri Agama. Saifuddin dimintai komentar atau jawabannya tentang ini. Sambil mengatasi rasa terkejutnya ia mengatakan, bahwa penunjukan itu tidak tepat karena banyak orang lain yang lebih pantas dan mampu. Ia menyarankan KHM Iljas, namun Bung Karno mengatakan bahwa yang ia maui adalah Saifuddin; apalagi HM Iljas sudah diangkat menjadi Duta Besar untuk Arab Saudi. Selanjutnya Bung Karno menerangkan bahwa keputusan penunjukannya itu sudah dipikirkan lama yaitu sesudah mengamati sepak terjangnya selaku wartawan, orang politik dan pejuang. Ia didekatkan ke pemerintahan mula-mula dengan mengangkatnya sebagai anggota DPA, yang kemudian menimbulkan simpati Bung Karno; lalu ia diajak tour keliling beberapa negara dari Jakarta-Beograd-Washington-Tokyo; Bung Karno merasa lebih yakin dan cocok dengan penampilannya. Dialog selanjutnya berkisar tentang sebab-sebab penunjukannya termasuk, misalnya, mengapa Wahib Wahab harus diganti, dan sebagainya. Presiden Sukarno menyatakan, bahwa Wahib Wahab mengundurkan diri dengan alasan *cape*. Mendengar semua itu Saifuddin minta waktu untuk berpikir.

Dalam waktu seminggu sejak saat itu Bung Karno tiga kali memanggilnya, yang pada kali terakhir Saifuddin masih minta waktu, kali ini untuk berkonsultasi dengan Wahib Wahab, orang yang akan digantikannya, meminta saran istrinya, dan PB NU terutama Rois Aam KH Wahab Chasbullah serta Ketua Umum Idham Chalid. Permintaan waktu untuk konsultasi diluluskan dalam jangka waktu tidak lebih dari tiga hari. Dari Wahib Wahab diperoleh konfirmasi tentang kebenaran permohonan pengunduran dirinya karena ingin memperbaiki ekonomi keluarga. Pengunduran dirinya juga tidak perlu seizin PB NU karena penunjukannya sebagai Menteri Agama oleh Bung Karno ada-

lah atas nama pribadi, tidak melalui dan bukan atas nama NU. Sedangkan KH Wahab Chasbullah menyatakan tidak akan *nggendholi* (mempertahankan) Wahib dan sangat setuju dengan keputusan Bung Karno tersebut. Tentang keinginan Saifuddin untuk *istikharah* lebih dulu, Kiyai Wahab mengatakan bahwa untuk perbuatan yang jelas baik, mengapa menunggu *istikharah*?

Kamis malam Jum'at 25 Ramadhan 1 Maret 1962 Idham Chalid datang menceritakan bahwa pada acara berbuka puasa di Istana Bogor ia disuruh presiden untuk meng-"iya"-kan penunjukan Saifuddin. Sedangkan Kiyai Wahab menitip pesan agar Saifuddin jangan menolak penunjukan presiden, karena Muhammadiyah sudah siap dengan calon-calonnya jika Saifuddin menolak. Tentang hal ini, menurut dia, Mulyadi Djojomartono sudah dihubungi istana. Kata Kiyai Wahab selanjutnya, kalau jabatan Menteri Agama lepas dari tangan orang NU, berarti tali batin yang menandai ikatan antara pemerintah dengan para ulama dan warga NU tak ada lagi. Kalau ini terjadi, bagi NU bisa dianggap "musibah." Saifuddin bertanya kepada Idham Chalid tentang manfaat sebagai Menteri Agama, yang dijawab bahwa pertanyaan itu sebaiknya bukan apa manfaatnya, melainkan apa mudharatnya kalau menolak. Kata Rois Aam, mudharatnya sudah jelas yaitu "musibah hilangnya ikatan batin antara pemerintah dan ulama serta warga NU" tadi. Saat dialog masih berlangsung, terdengar deru jeep berhenti di halaman, yang ternyata adalah ajudan presiden dan protokol istana yang memberitahukan secara resmi berikut rincian acara pelantikan Saifuddin sebagai Menteri Agama pada hari Jum'at 2 Maret 1962 jam 10.00 pagi. Sepulangnya utusan presiden dan Idham Chalid, Saifuddin permisi kepada istri dan keluarganya untuk bisa "menyendiri." Dini hari bangun, berwudlu, salat beberapa raka'at, bermunajat dan istighfar (*Berangkat*, ... 242-245)

Missi dan Visi

Pelantikan KH Saifuddin Zuhri sebagai Menteri Agama dilaksanakan sesuai dengan rencana. Presiden Sukarno dalam pidato pelantikan tanpa teks menyatakan antara lain:

> ... barangkali tidak banyak di antara tokoh-tokoh itu yang mengerti sedalam-dalamnya ... betapa ... dalam lubuk hati Pemerintah Republik Indonesia keinginan dan usaha untuk mengembangkan kehidupan agama di dalam kalangan rakyat Indonesia ... Republik Indonesia bukan suatu negara yang ... tanpa *canthelan* ... Republik Indonesia tegas-tegas berdasarkan atas *principles* ... Pancasila. Dan saudara (Saifuddin) ... adalah salah satu diantara tidak banyak tokoh yang benar-benar menginsyafi hal ini ... Oleh karena itu maka saya percayakan pekerjaan menjadi Menteri Agama ... kepada saudara. Saudaralah yang mengerti bahwa kedudukan agama di dalam masyarakat adalah salah satu unsur mutlak di dalam segenap usaha kita di lapangan *Nation Building*. *Nation Building* yang mengenai segala hal, mengenai bidang politik ... ekonomi ... kejasmanian ... masyarakat ... hubungan-hubungan internasional.[11]

Rupanya, pidato Bung Karno tersebut punya arti tersendiri dan memberi bekal yang sangat penting bagi Saifuddin. Sesudah menerima ucapan selamat dari semua hadirin seusai pelantikan, seorang wartawan *Reuter* ingin mewancarainya namun ia katakan bahwa saat itu belum bersedia memberi keterangan kecuali satu hal: sebagai Menteri Agama, dia akan mensukseskan tugasnya, yaitu melaksanakan amanat presiden bahwa agama merupakan unsur mutlak di dalam *nation building*.

Itulah inti pidato presiden pada momen sangat penting itu, yang kemudian dia adopsi sebagai missi utama tugasnya selaku Menteri Agama RI. Missi utama ini pula yang menjadi dasar bagi visinya dalam segala hal dan yang memberinya semangat untuk melakukan gerak langkah menjawab tantangan pengabdian di berbagai bidang. Dengan misi ini, "tugas Menteri Agama adalah (tidak lebih dari) tugas perjuangan," yang tidak boleh disia-siakan:

> Aku berpikir, aku tidak boleh menyia-nyiakan momentum yang sangat penting dalam pengadianku kepada bangsa, kepada masyarakat dan kepada agama Islam. Wartawan *Reuter* membuka peluang itu untuk mempopulerkan adagium agama adalah unsur mutlak dalam *nation building* sebagai bekal yang diberikan Presiden dalam melaksanakan tugasku.[12]

---

[11]Departemen Agama, "Agama Unsur Mutlak Dalam Nation Building", dalam *Peranan Departemen Agama Dalam Revolusi dan Pembangunan Bangsa* (Jakarta: Biro Penerbitan Perpustakaan Agama, 1965), hal. 279, (garis bawah oleh penulis).

[12]*Berangkat*... hal 498.

Bagi Saifuddin, Bung Karno adalah Presiden, yang memegang jabatan-jabatan lain sekaligus: Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, Panglima Tertinggi dan Pemimpin Besar, yang semua itu jabatan resmi; apakah orang suka atau tidak. Pada saat itu (tahun 1960-an), suka atau tidak, kekuasaan dan pengaruh Presiden Sukarno sedang berada di puncak bukan saja di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Hampir semua orang, pribadi atau kelompok, ingin dekat dengan dia, ingin disukai, sekurang-kurangnya tidak dimusuhi atau dibenci. Namun di balik itu Saifuddin menyadari bahwa seperti dirinya, Bung Karno juga adalah seorang pejuang yang "kesukaan" kepada siapapun, terutama kepada dirinya (Saifuddin) yang notabene punya latar belakang pandangan (dan ideologis) lain, adalah "suka" seorang pejuang (politisi). Artinya, suatu saat suka itu bisa berubah pada saat perjuangannya menghendaki strategi lain, seperti yang sudah ia perlihatkan kepada Bung Hatta, Syahrir, Sartono, Suwiryo, Moh Natsir dan lain-lain, berikut Masyumi, PSI dan juga MURBA. Lepas dari siapa yang salah, nyatanya mereka semua terpelanting dari panggung politik kenegaraan, dan efektifitas perjuangan serta partisipasi masing-masing dalam kancah pembangunan bangsa jauh menurun untuk tidak dikatakan mendekati titik nol. Bahkan, dengan dukungan angkatan perang, Bung Karno bisa menumpas habis APRA, DI/TII, PRRI, Permesta, dalam waktu yang relatif singkat. Akhirnya, maksimal dari sisa-sisa tenaga yang mereka mampu perbuat adalah berteriak dari luar, yang orang banyak enggan mendengarnya atau melakukan tindakan sporadik yang justru sering tidak mengundang simpati banyak orang.

Yang amat disesalkan Saifuddin (dalam hati) adalah "kecintaan" Bung Karno kepada PKI yang sedemikian rupa, sesuai dengan kepentingan politiknya, dan berusaha agar PKI yang memang lincah dan pandai berbicara tentang berbagai hal agar tetap berada di pelukannya. Padahal, tokoh-tokoh seperti Alimin, Tan Ling Djie dan DN Aidit, memandang Bung Karno sebagai tipe pemimpin komprador, bombastik dan kompromistik, yang harus didekati untuk sekedar taktik berlindung sementara. Menurut Saifuddin, Bung Karno saat itu lupa bahwa sementara dirinya dimakan usia, PKI mendapat bantuan komunis seluruh dunia. Maka PKI-pun semakin besar dan

berkembang yang suatu ketika, menurut Saifuddin, pasti akan berhadapan dengan NU dan umat Islam. Masyumi sudah dikalahkannya dan NU tentu akan menjadi target berikutnya. Sebuah partai yang besar sekalipun, seperti Masyumi, kalau sudah bubar, sangat sulit untuk bangun kembali sebagai organisasi kepartaian yang tangguh seperti semula. Semua itu merupakan hasil kepandaian taktik PKI dalam memanfaatkan Bung Karno sebagai perisai, pelindung dan pemukul sekaligus. Korban yang dipukulnya secara telak sudah terkapar tidak bangun lagi. Semua "kejadian itu menjadi pelajaran bagiku dalam bersikap terhadap Presiden Sukarno."[13] Selanjutnya Saifuddin mengatakan:

> Kepada Bung Karno, seperti juga terhadap siapapun, aku harus bersikap *fair* atau jujur. Dia bersikap baik kepadaku, maka akupun bersikap baik kepadanya. Dia memerlukan tenagaku, aku pun memerlukan pengaruhnya dan kekuasaannya. Sebagai manusia aku menilai Bung Karno dari perbuatan lahiriahnya yang bersikap baik terhadapku. Tentang sikap batiniahnya aku tidak tahu ... Meskipun aku bersikap baik tetapi aku tidak pernah menyandarkan serta menggantungkan diri secara mutlak kepada manusia ... Ada kelebihan Bung Karno yang aku tidak bisa meremehkan. Dia telah menciptakan dalil "Agama unsur mutlak dalam *Nation Building*." Dalil tersebut diberikan kepadaku untuk bekal dan (sekaligus) senjataku dalam melaksanakan tugas menteri.[14]

Menggapai Singgasana

Seusai upacara pelantikan, sambil mengucap "selamat" atas pengangkatannya sebagai Menteri Agama, Ir H Juanda membisikkan sesuatu ke telinga Saifuddin. Intinya adalah mengharapkan agar sebelum melaksanakan tugas sebagai menteri, Saifuddin bisa datang berkunjung ke kediamannya di Jl. Diponegoro. Undangan Juanda dipenuhinya sesuai perjanjian, yaitu selepas Maghrib hari itu juga. Dalam pertemuan itu Juanda menyatakan rasa gembiranya bahwa walau semula khawatir akan menolak, pada akhirnya Saifuddin bersedia dilantik.

Inti dari pertemuan itu adalah, Juanda mengulurkan kesediaannya untuk membantu apapun yang dirasa perlu dan meru-

---

[13]*Berangkat* ... hal 500-501.
[14]*Berangkat* ... hal 502.

pakan kunci baginya untuk bisa melaksanakan tugasnya sebagai Menteri Agama. Selain menyambutnya dengan terima kasih, Saifuddin menyatakan bahwa saat itu belum ada yang dirasanya perlu sekali kecuali satu hal. Ia prihatin karena walau Departemen Agama sudah mengalami pergantian menteri beberapa kali, namun tetap saja menempati gedung kantor yang kecil dan sudah penuh sesak. Maka apabila Juanda berkenan, yang paling diharapkannya adalah penyelesaian gedung kantor Jl. MH Thamrin, padahal prosesnya baru sampai pada pemasangan fondasi dan pemancangan tiang. Juanda menyanggupi untuk memprioritaskan kebutuhan departemen yang tugasnya sangat besar, yaitu melaksanakan Pancasila terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa di kalangan masyarakat dan pemerintahan. Kebesarannya juga harus dicerminkan dengan gedungnya.

Setelah dikerjakan siang malam, dalam waktu kira-kira 13 bulan, gedung Departemen Agama yang berbentuk L dan berlantai empat itu selesai dibangun lengkap dengan peralatannya. Pada 1 Mei 1963 gedung yang pada saat itu merupakan gedung termegah di sepanjang Jl Thamrin, dan menjadi kebanggaan jajaran Departemen Agama, mulai ditempati. Di situlah terletak singgasana bagi yang beruntung menjadi Menteri Agama dan di situ pulalah KH Saifuddin Zuhri bertahta selaku pimpinan Departemen Agama.

Kiprah dan Karya

Begitu menduduki jabatan Menteri Agama, langkah pertama yang paling mendapat perhatian utama Saifuddin Zuhri adalah memantapkan missi yang diemban Departemen Agama menjadi acuan operasional dalam bentuk formalitas juridis agar semua kebijakan yang ditempuh terarah dan syah. Ini penting karena iklim sosial-politik yang berkembang saat itu adalah suasana jor-joran di antara ketiga golongan dengan orientasi ideologis yang berbeda: nasional, agama dan komunis yang satu sama lain siap menjegal. Lahirlah Peraturan Menteri Agama No. 1/1963 tentang tugas, fungsi dan susunan organisasi Departemen Agama yang disesuaikan dengan kebutuhan saat itu. Berdasarkan peraturan itu tugas Departemen Agama secara garis besar terdiri dari:

1. Melaksanakan tugas negara seperti yang terkandung dalam pasal 29 UUD 1945;
2. Melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tersimpul dalam Ketetapan MPRS No.I dan II/MPRS 1960 yang menyangkut bidang mental/agama/rohani;
3. Melaksanakan Dekrit Presiden mengenai Piagam Jakarta dalam hubungannya dengan UUD 1945, di mana Piagam Jakarta adalah menjiwai UUD 1945;
4. Melaksanakan segala sesuatu yang bertalian dengan usaha memperkembangkan kehidupan rohani/agama sebagaimana yang digariskan oleh Manifesto Politik RI dan Pedoman Pelaksanaannya.

Garis-garis besar tugas tersebut mencakup berbagai bidang kehidupan yang sangat luas baik bidang sosial, politik, maupun budaya. Keempat tugas umum tersebut kemudian dirinci lebih lanjut kedalam tugas-tugas operasional Departemen. Rincian tugas-tugas operasional ini dituangkan melalui Peraturan Menteri Agama No. 47/1963. Tidak kurang dari 49 butir bidang tugas termaktub pada peraturan itu.[15] Dengan kapasitas politik sebagai pembantu presiden, dan berpedoman pada perincian tugas yang jelas dan sah tersebut, dilaksanakanlah program-program departemen yang meliputi berbagai bidang. Untuk mendukung program-program di bidang lain, empat hal diantaranya yang patut dicatat adalah penterjemahan dan penerbitan al-Qur'an, pemantapan dan pengembangan kehidupan beragama, pendidikan agama tingkat dasar termasuk pondok pesantren, dan pengembangan pendidikan agama tingkat tinggi.

Penerjemahan dan Penerbitan al-Qur'an dan Kitab-kitab Lain

Di samping peresmian gedung baru Departemen Agama yang membawa efek politis tersendiri terhadap reputasi golongan agama, pada akhir 1962 dibentuk Lembaga Penerjemahan al-Qur'an diketuai Prof. Sunaryo dengan anggota-anggota ter-

[15]Lihat: *Amal Bakti Departemen Agama RI, Eksitensi dan Langkah-Langkahnya* (Jakarta: Departeman Agama RI, 1987)

diri dari para ahli yaitu: Hasbi As-Shiddieqy, Toha Yahya Omar, Bustami A. Gani, Mukhtar Yahya, HA Musaddad, HA Mukti Ali, KH Ali Ma'shum dan Asrul Sani. Tujuannya adalah untuk menghasilkan karya terjemahan al-Qur'an yang baik. Dengan demikian program memasyarakatkan isi al-Qur'an agar dapat dibaca dan dimengerti segenap lapisan masyarakat dapat terlaksana. Dalam jangka waktu antara 1963-1965 lembaga ini telah selesai melaksanakan tugasnya dengan baik, yaitu menerjemahkan al-Qur'an sebanyak 30 juz. Namun karena dana yang terbatas penerbitannya terpaksa harus dilakukan secara bertahap menjadi tiga gelombang, masing-masing sepuluh juz. Jilid-I dari karya besar terjemahan ini terbit untuk pertama kalinya pada 28 Maret 1966.

Dalam tekanan ekonomi yang semakin parah, melalui kerjasama dengan Menteri Perdagangan dan Keuangan, Menteri Agama Saifuddin Zuhri berusaha mengatasi kesulitan memperoleh buku-buku agama impor. Melalui kerjasama ini Menteri Agama berhasil memperoleh devisa dalam jumlah terbatas yang kemudian dibagikan kepada sejumlah toko buku untuk mengimpor buku-buku yang sangat diperlukan terutama oleh kalangan pesantren. Dengan fasilitas tersebut, antara tahun 1963-1965 sejumlah buku-buku impor dari Kairo dan Beirut mengalir ke pasaran. Hampir bersamaan dengan itu, pada tahun 1964 juga dirintis berdirinya "Yayasan Pembangunan Islam" (YPI). Tujuan yayasan ini adalah mengerahkan kemampuan umat Islam memberi sumbangan pada kelancaran da'wah dan pendidikan, terutama di bidang penerbitan al-Qur'an dan kitab-kitab lain yang sangat diperlukan oleh pesantren dan madrasah. Melalui pengerahan sumbangan sukarela NTCR akhirnya berdirilah gedung percetakan YPI di atas tanah seluas 2,5 hektar di Ciawi Bogor. Peletakan batu pertama dari gedung itu baru bisa terlaksana pada tanggal 1 April 1967.

Kehidupan Beragama, Pendidikan Agama Tingkat Dasar dan Pesantren

Untuk kegairahan dan kesemarakan kehidupan beragama telah pula dikeluarkan SK Menteri Agama No. 30/1963. Dengan SK ini Departemen Agama dapat mengangkat tenaga-tenaga Guru Agama Honorer (GAH) yang ditugaskan untuk membim-

bing kehidupan keagamaan masyarakat di berbagai lingkungan, khususnya pada: (a) Lembaga Pemasyarakatan; (b) Asrama Kepolisian/tentara; (c) Asrama Sosial; (d) Asrama Buruh. Dalam pada itu, dalam bidang pendidikan agama, diatur pula kedudukan madrasah swasta dan madrasah diniyah, persamaan ijazah madrasah swasta dan bantuan pada madrasah. Karena perhatian dan reputasi KH Saifuddin Zuhri dalam perjuangan *'izzul Islam wal Muslimin* baik di dalam maupun di luar wewenangnya selaku Menteri Agama sangat tinggi, yang tercermin pada pidato-pidatonya di berbagai kesempatan, khususnya pada peresmian IAIN di berbagai tempat. Pada bulan Oktober 1964 Prof Sunaryo, Prof Hasbi As-Shiddieqy dan Prof Mukhtar Yahya menyampaikan keputusan rapat senat IAIN Kalijaga Yogyakarta yang mengangkat Saifuddin Zuhri sebagai guru besar di bidang dakwah. Wisuda bagi pengangkatannya dilaksanakan pada tanggal 2 Nopember 1964.

Sebelum itu, seminar pendidikan yang diadakan pada Juli 1963 di IAIN Yogyakarta memutuskan pemberian gelar Doktor Honoris Causa kepada Presiden Sukarno. Seminar ini ditindaklanjuti rapat senat IAIN Jakarta 2 September 1964 di mana diputuskan bahwa gelar Doktor Honoris Causa yang diberikan kepada Presiden Sukarno adalah bidang dakwah. Alasannya adalah, bahwa Presiden Sukarno memiliki pengertian, perasaan, keahlian dan kemampuan yang bermutu tinggi dalam lapangan Ilmu Ushuluddin. Pemberian gelar dilaksanakan di Istana Negara tanggal 2 Desember 1964 yang ternyata juga membangkitkan sentimen keagamaan presiden, terutama untuk mengangkat citra, harkat dan reputasi dunia pesantren. Pada kesempatan itu Bung Karno menganjurkan perlunya diadakan seminar tentang pesantren. Anjuran ini baru bisa dilaksanakan tanggal 4-7 Juli 1965 di Yogyakarta, menandai era baru dimulainya perhatian yang wajar terhadap dunia pesantren.

Pada periode kepemimpnan KH Saifuddin Zuhri, Departemen Agama pernah terbebas dari rumitnya penyelenggaraan dan pengurusan pemberangkatan jama'ah haji. Pada masa itu penyelenggaraan ibadah haji menggunakan sistem kuota, yang dibagikan kepada daerah berdasarkan proporsi jumlah pendaftar. Karena inflasi yang terus membengkak, agar ONH terjangkau rakyat, setiap tahun Departemen Agama harus ber-

diri dari para ahli yaitu: Hasbi As-Shiddieqy, Toha Yahya Omar, Bustami A. Gani, Mukhtar Yahya, HA Musaddad, HA Mukti Ali, KH Ali Ma'shum dan Asrul Sani. Tujuannya adalah untuk menghasilkan karya terjemahan al-Qur'an yang baik. Dengan demikian program memasyarakatkan isi al-Qur'an agar dapat dibaca dan dimengerti segenap lapisan masyarakat dapat terlaksana. Dalam jangka waktu antara 1963-1965 lembaga ini telah selesai melaksanakan tugasnya dengan baik, yaitu menerjemahkan al-Qur'an sebanyak 30 juz. Namun karena dana yang terbatas penerbitannya terpaksa harus dilakukan secara bertahap menjadi tiga gelombang, masing-masing sepuluh juz. Jilid-I dari karya besar terjemahan ini terbit untuk pertama kalinya pada 28 Maret 1966.

Dalam tekanan ekonomi yang semakin parah, melalui kerjasama dengan Menteri Perdagangan dan Keuangan, Menteri Agama Saifuddin Zuhri berusaha mengatasi kesulitan memperoleh buku-buku agama impor. Melalui kerjasama ini Menteri Agama berhasil memperoleh devisa dalam jumlah terbatas yang kemudian dibagikan kepada sejumlah toko buku untuk mengimpor buku-buku yang sangat diperlukan terutama oleh kalangan pesantren. Dengan fasilitas tersebut, antara tahun 1963-1965 sejumlah buku-buku impor dari Kairo dan Beirut mengalir ke pasaran. Hampir bersamaan dengan itu, pada tahun 1964 juga dirintis berdirinya "Yayasan Pembangunan Islam" (YPI). Tujuan yayasan ini adalah mengerahkan kemampuan umat Islam memberi sumbangan pada kelancaran da'wah dan pendidikan, terutama di bidang penerbitan al-Qur'an dan kitab-kitab lain yang sangat diperlukan oleh pesantren dan madrasah. Melalui pengerahan sumbangan sukarela NTCR akhirnya berdirilah gedung percetakan YPI di atas tanah seluas 2,5 hektar di Ciawi Bogor. Peletakan batu pertama dari gedung itu baru bisa terlaksana pada tanggal 1 April 1967.

Kehidupan Beragama, Pendidikan Agama Tingkat Dasar dan Pesantren

Untuk kegairahan dan kesemarakan kehidupan beragama telah pula dikeluarkan SK Menteri Agama No. 30/1963. Dengan SK ini Departemen Agama dapat mengangkat tenaga-tenaga Guru Agama Honorer (GAH) yang ditugaskan untuk membim-

bing kehidupan keagamaan masyarakat di berbagai lingkungan, khususnya pada: (a) Lembaga Pemasyarakatan; (b) Asrama Kepolisian/tentara; (c) Asrama Sosial; (d) Asrama Buruh. Dalam pada itu, dalam bidang pendidikan agama, diatur pula kedudukan madrasah swasta dan madrasah diniyah, persamaan ijazah madrasah swasta dan bantuan pada madrasah. Karena perhatian dan reputasi KH Saifuddin Zuhri dalam perjuangan *'izzul Islam wal Muslimin* baik di dalam maupun di luar wewenangnya selaku Menteri Agama sangat tinggi, yang tercermin pada pidato-pidatonya di berbagai kesempatan, khususnya pada peresmian IAIN di berbagai tempat. Pada bulan Oktober 1964 Prof Sunaryo, Prof Hasbi As-Shiddieqy dan Prof Mukhtar Yahya menyampaikan keputusan rapat senat IAIN Kalijaga Yogyakarta yang mengangkat Saifuddin Zuhri sebagai guru besar di bidang dakwah. Wisuda bagi pengangkatannya dilaksanakan pada tanggal 2 Nopember 1964.

Sebelum itu, seminar pendidikan yang diadakan pada Juli 1963 di IAIN Yogyakarta memutuskan pemberian gelar Doktor Honoris Causa kepada Presiden Sukarno. Seminar ini ditindaklanjuti rapat senat IAIN Jakarta 2 September 1964 di mana diputuskan bahwa gelar Doktor Honoris Causa yang diberikan kepada Presiden Sukarno adalah bidang dakwah. Alasannya adalah, bahwa Presiden Sukarno memiliki pengertian, perasaan, keahlian dan kemampuan yang bermutu tinggi dalam lapangan Ilmu Ushuluddin. Pemberian gelar dilaksanakan di Istana Negara tanggal 2 Desember 1964 yang ternyata juga membangkitkan sentimen keagamaan presiden, terutama untuk mengangkat citra, harkat dan reputasi dunia pesantren. Pada kesempatan itu Bung Karno menganjurkan perlunya diadakan seminar tentang pesantren. Anjuran ini baru bisa dilaksanakan tanggal 4-7 Juli 1965 di Yogyakarta, menandai era baru dimulainya perhatian yang wajar terhadap dunia pesantren.

Pada periode kepemimpnan KH Saifuddin Zuhri, Departemen Agama pernah terbebas dari rumitnya penyelenggaraan dan pengurusan pemberangkatan jama'ah haji. Pada masa itu penyelenggaraan ibadah haji menggunakan sistem kuota, yang dibagikan kepada daerah berdasarkan proporsi jumlah pendaftar. Karena inflasi yang terus membengkak, agar ONH terjangkau rakyat, setiap tahun Departemen Agama harus ber-

juang mengusahakan subsidi yang besarnya ditetapkan berdasarkan selisih antara kurs resmi dolar dengan kurs bebas, yang acapkali cukup besar. Kerumitan timbul pada perjuangan memperoleh subsidi tersebut dan diperburuk oleh timbulnya bursa kuota haji yang diperdagangkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab baik sipil maupun militer dengan mencari kesempatan dalam kesempitan.

Dalam semangat ingin membantu Muhammadiyah melaksanakan cita-citanya ingin membeli kapal haji, pada 1965 Muljadi Djojomartono, tokoh Muhammadiyah kepercayaan Presiden Sukarno yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, mengambilalih penyelenggaraan pemberangkatan jemaah haji Indonesia. Ia kemudian membentuk PT Arafat yang modalnya diperoleh dari tambahan Rp. 50,000,00 dari ONH resmi yang diwajibkan kepada setiap jama'ah sebagai saham. Saifuddin Zuhri tidak setuju dengan kebijaksanaan Menko Kesra tersebut yang karena itu ia menolak tatkala diminta untuk duduk dalam kepengurusan.[16]

Pendidikan Agama Tingkat Tinggi: Pengembangan IAIN

Menurut KH Saifuddin Zuhri, pada 1938 Dr Satiman (kakak Dr Sukiman) pernah memprakarsai berdirinya pesantren luhur di Solo. Perkembangan gagasan ini tidak jelas ujungnya, namun pada 1950 di Yogyakarta berdiri Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang pelaksanaannya diatur melalui SK Menteri Agama Wahid Hasyim No K/I/14641 Tahun 1951 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mr Wongsonagoro No 28665/Kab Tahun 1951. Dalam pada itu, KHM Iljas melalui penetapan No. 1/1957 mendirikan pula Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Ciputat. Melalui proses yang cukup kompleks KH Wahib Wahab, melalui Penetapan Presiden No.11/1960 dan penetapan Menteri Agama No. 43/1960, berhasil memantapkan status pendidikan agama Islam tingkat universiter dengan menggabungkan PTAIN dan ADIA menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang berkedudukan di Yogyakarta dan Ciputat. Dengan penggabungan itu, Departemen Agama mem-

---

[16]*Berangkat*, hal 519-520

punyai wewenang penuh dalam penyelenggaraan pendidikan agama Islam tingkat perguruan tinggi. Sebelumnya, PTAIN diurus bersama oleh dua departemen, yaitu Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Maka, setidaknya ada dua hal penting yang tampaknya merupakan alasan utama mengapa selama menjadi Menteri Agama KH Saifuddin Zuhri menaruh perhatian dan harapan begitu besar pada IAIN. Pertama adalah rasa hormat, kagum dan penghargaan yang tinggi seorang santri terhadap tokoh-tokoh pendahulunya, yang dianggapnya telah menghasilkan karya besar bagi masa depan umat; kedua, masih terkait dengan yang pertama, adalah pandangannya terhadap posisi strategis IAIN sebagai jalan bagi operasionalisasi missi utamanya selaku Menteri Agama, yaitu mewujudkan agama sebagai unsur mutlak *nation building*. Hal ini terungkap dalam pengakuannya sendiri yang berbunyi:

> ... aku melihat bahwa IAIN mempunyai kedudukan strategis dalam rangka mewujudkan tesis Agama (sebagai) Unsur Mutlak dalam *Nation Building*.[17]

Sewaktu Saifuddin Zuhri diangkat sebagai Menteri Agama, IAIN yang ada hanya satu saja yaitu di Yogyakarta dengan cabangnya di Jakarta dengan dua fakultas dan Kutaraja (satu fakultas). Saifuddin Zuhri bertekad meratakan agar pada setiap propinsi ada IAIN masing-masing dengan empat fakultas (Syari'ah, Ushuluddin, Tarbiyah dan Adab) dalam satu unit yang otonom. Sedangkan di kota kabupaten bisa didirikan fakultas cabang. Sambutan masyarakat dalam hal IAIN memang luar biasa besar. Sebab masyarakat dan pemerintah daerah, baik Tingkat-I (propinsi) maupun Tingkat II (kabupaten), menganggap berdirinya IAIN sebagai simbol status bagi kemajuan daerah.

Karena anggaran Departemen Agama sangat kecil (terkecil setelah Departemen Sosial),[18] daerah yang menghendaki berdi-

---

[17]*Berangkat* ... , hal 504.

[18]Pada waktu itu anggaran Departemen Agama hanya sebesar Rp. 600 juta. Kenaikan tiap tahun memang terjadi yaitu menjadi Rp 800 juta, satu milyar dan terakhir dua milyar sekedar berpacu dengan tingginya laju inflasi, sampai pada tanggal 2 Desember 1965 terjadi devaluasi rupiah dari Rp. 1000,00 menjadi Rp. 1,00.

rinya IAIN diharuskan terlebih dahulu mendirikan Badan Wakaf untuk mengusahakan tanah, gedung dan modal usaha; sedangkan pemerintah (Departemen Agama) akan memberikan fasilitas dan pengakuan (*civil effect*) bagi para lulusannya. Dengan demikian IAIN menjadi milik bersama masyarakat dan pemerintah; masing-masing pihak tidak punya hak untuk mengklaim sebagai pemilik tuggal. Dengan demikian, ternyata kecilnya anggaran Departemen Agama saat itu tidak terlalu menjadi hambatan, bahkan membawa hikmah pada terhindarnya keadaan yang "serba pemerintah." Ini adalah sebuah hikmah politis yang menurut Saifuddin Zuhri sangat menguntungkan dan bermanfaat. Menurut dia rasa kepemilikian masyarakat atas negara ini harus terus dipupuk, demikian pula atas segala fasilitas yang ada. Dengan demikian akan terhindar kecenderungan pemerintah untuk bertindak totaliter dan sewenang-wenang, klaim pembangunan sebagai hasil seseorang atau sekelompok orang sementara yang lain dianggap penonton.

Yang agak istimewa adalah IAIN "Sunan Ampel" Surabaya yang gedung kantor dan ruang kuliahnya berserakan di berbagai tempat. Salah satu fakultasnya menumpang di Madrasah Muallimat NU. Dalam hal ini IAIN Surabaya kurang beruntung dibandingkan IAIN Yogyakarta dan Jakarta yang masing-masing sudah punya gedung. Karena itu, Menteri Agama bersama-sama masyarakat mengusahakan pembangunan kampus IAIN Surabaya di atas tanah yang diusahakan oleh Badan Wakaf. Peletakan batu pertama kampus ini dilakukan Menteri Agama pada 22 Juni 1964.

Dengan modal sebuah IAIN, pada akhir jabatannya Saifuddin Zuhri berhasil mengembangkannya menjadi 9 buah al-Jami'ah. Kesembilan IAIN itu masing-masing berada di Yogyakarta, Jakarta, Surabaya, Banda Aceh, Ujung Pandang, Banjarmasin, Padang, Palembang dan Jambi dengan cabang-cabang di berbagai kota kabupaten pada setiap propinsi di mana IAIN induk berada. Fakultas Tarbiyah Cabang Pontianak, yang tidak menjadi Cabang IAIN Antasari Banjarmasin tetapi menjadi Cabang Jakarta, adalah kekecualian mengingat komunikasi dan transportasi Pontianak-Jakarta lebih mudah dibanding Pontianak-Banjarmasin.

Bagi Saifuddin Zuhri, IAIN adalah bagian dari perjuangan;

karena itu nama IAIN yang semula hanya dikaitkan dengan kota (propinsi) di mana IAIN itu berada, kini dinamai dengan pahlawan Islam setempat. Maka Jakarta, misalnya, dikaitkan dengan Syarif Hidayatullah, Yogyakarta dengan Sunan Kalijaga, Surabaya dengan Sunan Ampel, dan sebagainya. Satu anekdot menarik terjadi saat IAIN Jambi yang oleh masyarakat dan pemerintah setempat diusulkan namanya dengan "Thaha Saifuddin." Saifuddin Zuhri selaku Menteri Agama Menteri Agama mengira bahwa nama itu dikaitkan dengan namanya sendiri untuk menyenangkan hatinya karena "berjasa" meresmikan IAIN di sana. Maka menjelang peresmian ia mengusulkan agar nama IAIN Jambi cukup "Thaha" saja, karena khawatir akan dianggap orang sebagai berbau "kultus individu." Spontan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jambi, KH Thaha yang asal Tegal (Jawa Tengah) itu, senyum-senyum pahit karena namanya akan diabadikan menjadi nama IAIN. Namun Gubernur Jambi segera menjelaskan bahwa Thaha Saifuddin adalah nama seorang sultan-pahlawan yang amat berjasa pada pengembangan Islam di daerah setempat. Atas penjelasan itu Menteri Agama mengusulkan agar untuk menghindari terjadinya salah tafsir, khusus untuk IAIN Jambi sebutan "Sultan" harus selalu menyatu dengan Thaha Saifuddin menjadi "Sultan Thaha (Saifuddin)." Ini berbeda dengan IAIN di tempat-tempat lain seperti Ar-Raniri, Syarif Qasyim, Antasari, Alauddin; gelar jabatan (sultan) pahlawan yang menjadi nama IAIN bersangkutan tidak mutlak harus dikaitkan karena tidak akan menimbulkan salah tafsir.

Sementara itu pengiriman pelajar dan mahasiswa ke luar negeri terutama ke Kairo (Mesir) yang sudah dirintis dan dilakukan menteri-menteri sebelumnya juga diteruskan. Pada 1963 dan seterusnya jumlah pelajar dan mahasiswa yang dikirimkan setiap tahun rata-rata sebanyak 20 orang. Mereka dikirim atas kerjasama dan beasiswa Muktamar Alam Islami Kairo. Mereka dipilih dari berbagai kelompok dan terdiri dari tamatan pesantren dan SMA. Di antara yang dikirim pada angkatan ini adalah Abdurrrahman Wahid, Fatimah Alkaf (dokter), Muhibuddin Wali, Zakiah Daradjat, Laili Mansur, Suryani Thahir dan Syatiri Ahmad.

Geliat politik

Saifuddin Zuhri adalah santri politisi. Karena itu, sejak ia diangkat menduduki jabatan Menteri Agama motivasi politis dari kebijaksanaannya kelihatan menonjol. Seperti disinggung terdahulu, efek politis pengembangan IAIN dengan kerjasama antara Departemen Agama dan Badan Wakaf adalah terkikisnya rasa serba pemerintah, serba negara, serba totaliter. Efek politik lain adalah membendung, setidak-tidaknya mengimbangi gerakan PKI yang sangat giat membuka "universitas rakyat" di tiap kota dalam rangka membentuk kader-kader komunis yang siap mendukung pembentukan sistem politik totaliter. Itulah sebabnya ia giat dan menaruh perhatian besar pada penyebaran IAIN di setiap daerah. Tidak kalah pentingnya adalah harapan agar IAIN menjadi wahana integrasi dan konsolidasi potensi ummat. Melalui IAIN, para cendekiawan Islam dari berbagai golongan dan aliran bisa berkumpul duduk bersama berdampingan dalam satu majelis mengembangkan wawasan keilmuan, khususnya ilmu agama. Di sini, kepentingan dan popularitas ilmiah di kalangan dosen dan mahasiswa harus dipacu, yang bila berhasil akan merupakan sumber kekuatan handal bagi realisasi agama unsur mutlak *nation building*.

Karena perkembangan sosial politik, terutama dengan semakin gencar dan canggihnya agitasi PKI, Saifuddin Zuhri menginginkan strategi dan organisasi dalam Departemennya lebih solid. Iapun mengangkat sejumlah pembantu dalam pos-pos administratif yang kebetulan(?) orang NU. Ternyata langkah ini menjadi bumerang dengan timbulnya ganjalan psikologis bahkan politis. Bagi sebagian orang, wajar belaka kalau seorang pimpinan mengangkat pembantu dari orang yang paling dipercayainya. Karena sejak kecil ia dibesarkan dan bergaul di kalangan NU, orang yang paling ia ketahui sebagai "bisa dipercaya" adalah dari kalangan NU. Namun bagi sebagian yang lain, hal ini dipandang sebagai preseden bagi dimulainya proses NU-nisasi secara sistematis dan menyeluruh.

> Aku menyadari bahwa orang-orang yang mendampingiku itu dapat menjadi faktor kesuksesan maupun kegagalan. Oleh karena itu harus orang-orang yang benar-benar aku kenal kualitasnya. Sebagai warga NU tentulah aku lebih mengenal orang-orang NU daripada orang-orang Masyumi maupun Muhammadiyah. Sebab itu, apa salahnya aku me-

nempatkan mereka di sampingku tanpa meninggalkan norma-norma yang berlaku dalam dunia kepegawaian. Dan orang-orang Muhammadiyah maupun Masyumi yang mempunyai konduite bagus, mengapa harus disingkirkan dari sekelilingku?[19]

Tak urung salah pengertian satu sama lain baik di kalangan para dosen maupun mahasisiwa IAIN terjadi dan huru-hara kecil tak terhindarkan. Mula-mula timbul di Yogyakarta kemudian di Jakarta.

Menjawab Agitasi Politik PKI dan Lainnya

Antara tahun 1963-1965 agitasi PKI terhadap umat Islam semakin menjadi-jadi dan dilakukan dengan berbagai cara dan dalam semua lini. Buruh, tani, karyawan, seniman, cendekiawan, pemuda, pelajar dan mahasiswa semua dikerahkan melakukan agitasi atheisme untuk merongrong kredibilitas agama dan golongan agama. Semangat ini lebih diperhebat oleh hembusan angin kemenangan kaum komunis dari utara, terutama Cina dan Vietnam. PKI-pun sesumbar bahwa "gerakan rakyat" progresif revolusioner tak mungkin bisa dibendung oleh siapapun dan dengan kekuatan apapun. Aksi sepihak dan sabotase dilancarkan di mana-mana. Sebagai pejabat negara yang sedang berusaha melaksanakan missinya, Saifuddin Zuhri sangat tertantang.

Peristiwa Bangkuning

Bangkuning adalah sebuah kampung terletak agak ke dalam dari Jalan Raya Darmo, Surabaya. Di sana ada sebuah mesjid kuno, dikenal dengan sebutan "Masjid Bangkuning". Konon, masjid tersebut adalah peninggalan Raden Rahmat alias Sunan Ampel, seorang wali penyebar Islam di Jawa sehingga masjid tersebut terkenal juga dengan sebutan Masjid "Raden Rahmat."

Suatu hari terjadi musibah yang menimpa masjid tersebut. Sekelompok Pemuda Rakyat dan Gerwani (generasi muda PKI) tiba-tiba menyerbu Masjid Bangkuning, masuk ke dalamnya menginjak-injak dengan kaki dan sepatu berlumpur, menari-nari sambil menyanyikan lagu "genjer-genjer" lalu menguasai masjid tersebut dan menjadikannya sebagai markas kegiatan

---

[19]*Berangkat* ... , hal. 515.

mereka. Perbuatan tersebut langsung membangkitkan emosi keagamaan masyarakat Islam Surabaya. Beberapa hari kemudian sekelompok pemuda Islam berintikan Banser (Barisan Ansor Serbaguna) menyerbu balik masjid tersebut dengan semangat *"Jihad fi Sabilillah."* Mereka menyeret keluar pemuda-pemudi anggota Pemuda Rakyat dan Gerwani yang ada di dalam mesjid, dan masjidpun berhasil diselamatkan.

NU Surabaya meneruskan kejadian tersebut melalui prosedur hukum. Melalui serangkaian sidang, Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan agar masjid dikembalikan kepada fungsinya semula, sedangkan mereka yang terlibat dalam penyerbuan dan penodaan masjid divonis penjara. Menteri Agama secara resmi memberi sedikit dana dan material sebagai bantuan "pancingan" untuk perbaikan masjid, simbol keberpihakannya kepada umat Islam menghadapi aksi PKI. Pancingan ini mendapat sambutan luarbiasa dari masyarakat sehingga dalam tempo yang tidak lama "Masjid Bangkuning" selesai diperbaiki melalui gotong royong masyarakat. Kini dengan bentuk bangunan dan rupa lebih bagus dari keadaan semula mesjid itu berfungsi kembali. Pada hari Jum'at, hari yang sama dengan peresmian kampus IAIN Surabaya, atas permintaan masyarakat setempat masjid itu diresmikan oleh Menteri Agama dengan nama Masjid "Raden Rakhmat" dan menteripun bersembahyang Jum'at di sana bersama masyarakat setempat.[20]

Propaganda Daging Tikus

Dalam sebuah rapat umum di Istora Senayan, Pemuda Rakyat beramai-ramai mendemonstrasikan pesta makan daging tikus. Pesta ini merupakan refleksi dari sikap mereka untuk melecehkan "hukum Islam", sekaligus sebagai pertanda dimulainya gerakan pengganyangan sistematis mulai dari tikus (koruptor dan manipulator), setan desa, setan kota, kapitalis birokrat dan semua musuh PKI.

Bahwa isu daging tikus merupakan bagian dari propaganda anti agama yang sistematis terbukti dengan dimunculkannya isu tersebut pada sidang DPA yang dipimpin Presiden Sukar-

---

[20]*Berangkat* ... , hal 507-509.

no. Menteri Agama Saifuddin Zuhri, yang saat itu merangkap anggota DPA, duduk di sebelah kanan DN Aidit (Ketua CC PKI) pada jarak kira-kira hanya 20 cm. Tetapi dengan nada sinis Aidit tidak bertanya langsung baik-baik secara pribadi melainkan secara antipati melalui forum. Katanya: "Saudara Ketua, tolong tanyakan kepada Menteri Agama yang duduk di sebelah kanan saya, bagaimana hukumnya menurut agama Islam makan daging tikus?"

Refleks spontan santri Saifuddin Zuhri muncul dan dengan enteng menjawab: "Saudara Ketua, tolong beritahukan kepada si penanya di sebelah kiriku ini bahwa aku sedang berjuang agar rakyat mampu makan ayam goreng. Karena itu jangan dibelokkan (mereka) untuk makan daging tikus!"[21] Jawaban ini (konon) mengundang gelak tawa seluruh hadirin termasuk Bung Karno sendiri, yang memimpin sidang.

Peristiwa Masjid Bangkuning, propaganda daging tikus dan banyak peristiwa serta insiden lain, telah menjadi catatan Saifuddin. Merasa sebagai pengemban missi agama unsur mutlak *nation building*, semua itu merupakan tantangan yang harus dijawab. Yang menjadikan perjuangannya pelik adalah bahwa pada waktu itu isu-isu yang dilontarkan PKI selalu mendapat angin dari Bung Karno, berkat kemampuan PKI menggunakan Bung Karno. Dengan demikian, dalam pikiran Saifuddin, kunci permainan sesungguhnya terletak pada siapa yang lebih mampu menggunakan Bung Karno. Berkat kemampuan melihat dan memainkan kunci ini, akhirnya keluarlah Penpres No.1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Isi Penpres tersebut antara lain berbunyi: "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: (a) Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap sesuatu agama yang dianut di Indonesia; (b) Dengan maksud, agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan YME.[22]

---

[21]*Berangkat* ... , hal.546-547.
[22]*Amal Bakti* ... , hal. 66-67

Krisis HMI

Keluarnya Penpres No. 1/1965 jelas secara formal menyulitkan dan mempersempit ruang gerak agitasi PKI padahal partai ini sedang semakin matang mempersiapkan segala rencana politiknya. Namun dengan kepandaian memanfatkan Bung Karno pula partai ini seolah tak bergeming ingin terus menghancurkan lawan-lawannya. Setelah Masyumi berhasil ia kanvaskan, yang lain harus menyusul sehingga pada akhirnya yang tinggal harus PKI sendiri sebagai satu-satunya kekuatan tunggal di republik ini.

Menurut pengamatan Saifuddin Zuhri, di mata PKI semua organisasi Islam sama jahatnya, tidak beda antara Masyumi, NU atau apapun. Masalahnya tinggal mana yang lebih dahulu gampang dibereskan. Dalam konteks strategi PKI tahun 1960-an, sekalipun Masyumi memiliki sejumlah besar cendekiawan berpikiran maju, partai ini tergolong empuk untuk dikunyah. Betapa tidak, orang-orang Masyumi lebih banyak menempuh jalan oposisi terhadap Presiden Sukarno. Hampir semua tindakan dan kebijaksanaannya hanya dinilai dari sisi negatifnya saja. Tokoh-tokoh moderat yang mempunyai hubungan baik secara pribadi dengan Bung Karno seperti Dr Sukiman, Ki Bagus, Kyai Badawi dan KH Farid Ma'ruf tak berdaya menetralisasi keadaan. Tidak demikian halnya dengan NU yang mempunyai kedudukan baik di mata Bung Karno, di mata golongan nasionalis dan di mata ABRI. Dalam sejarahnya NU tidak tercatat pernah melakukan pemberontakan bersenjata terhadap republik. Dengan reputasi itulah maka Nyono, tokoh muda PKI, dalam sidang Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub) tahun 1966 mengungkapkan:

> NU sangat menyulitkan PKI ... ! Dikatakan reaksioner nyatanya NU pejuang kemerdekaan. Dikatakan borjuis dan feodal, nyatanya kebanyakan anggota NU petani dan buruh kecil, dan NU sendiri dicintai rakyat kecil. Dikatakan golongan tuan tanah, justru tokoh-tokoh NU sendiri tak punya tanah. Dan karena NU merupakan kekuatan dinamis dan yang ikut menyelamatkan negara, maka presiden Sukarno ingin dekat dengan NU, ini pula yang menyulitkan PKI.[23]

---

[23]*Berangkat* ... , hal. 525.

Sangat masuk akal kalau setelah Masyumi bubar, yang dilirik sebagai giliran untuk menjadi korban berikutnya adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII). Kedua organisasi Islam ini di mata PKI punya titik lemah yang amat jelas, yaitu keduanya punya hubungan genealogis maupun spiritual dengan Masyumi. Bukti otentiknya antara lain, idola para anggota dan tokoh HMI dan SBII adalah tokoh-tokoh Masyumi.

Kampanye anti HMI dan SBII pun dilancarkan dengan gigih dan sistematis di berbagai front serta melalui berbagai cara untuk membentuk opini publik bahwa keduanya musuh Republik. Dalam rapat umum di Senayan, Aidit sesumbar agar anggota CGMI lebih baik "pakai sarung saja" kalau sampai tidak bisa membubarkan HMI.[24] Ungkapan "pakai sarung saja" tentu hanya sebuah ejekan untuk menunjukkan "keterbelakangan" berpolitik golongan Islam. Termasuk dalam skenario ini adalah serangan terhadap tokoh-tokoh Masyumi yang lain. Dengan tuduhan bahwa buku *Tenggelamnya Kapal van der Wijk* sebagai plagiat, misalnya, Hamka pun tak luput dari serangan. Bukan buku itu sendiri yang penting, tetapi terutama lantaran Hamka adalah tokoh Masyumi. Harian *Duta Masyarakat*, satu di antara koran-koran yang ada saat itu, di mana nama Saifuddin Zuhri terpampang sebagai Pemimpin Umum, gigih membela Hamka.[25]

Apa yang terjadi tatkala "krisis HMI" mencapai klimaks, mungkin tidak banyak yang tahu. Saifuddin Zuhri ternyata memegang salah satu peran kunci pada penyelamatan HMI. Suatu pagi ia dipanggil Presiden Sukarno ke Istana Merdeka. Sejumlah orang dari berbagai kalangan, perwira tinggi, menteri, diplomat dan pengusaha, saat itu sedang menghadap. Ketika tamu tinggal 3-4 orang (salah seorang diantaranya adalah Hasyim Ning), Bung Karno menyuruh Saifuddin duduk di samping-

---

[24]CGMI adalah singkatan dari Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia, organisasi mahasiswa mantel PKI.

[25]Saat itu Saifuddin Zuhri sebenarnya sudah non aktif, karena menjabat Menteri Agama. Tugasnya sehari-hari diambil alih oleh H. Mahbub Djunaidi dan Said Budairy (*Berangkat* ... , hal. 526).

nya dan berkata: "Saya ingin bicara dengan Saudara, biarlah ada Hasyim Ning tidak apa. Saya memberi tahu kepada Saudara, selaku Menteri Agama, bahwa saya akan membubarkan HMI!"

Menurut ceritanya, Saifuddin seakan disambar petir yang dalam "beberapa detik sempat terpana" namun untung dapat menguasai diri dan berhasil mengatasi kegoncangan batin; selanjutnya terjadilah dialog antara Saifuddin Zuhri (SZ) dan Bung Karno (BK) sbb:

SZ: "Mengapa HMI akan dibubarkan?"

BK: Berbagai laporan disampaikan kepada saya bahwa di mana-mana HMI melakukan tindakan anti revolusi dan bersikap reaksioner."

SZ: "Kadar anti revolusinya maupun kereaksionerannya sampai di mana?"

BK: "Yaaah, misalnya selalu bersikap aneh, tukang kritik, bersikap liberal seolah-olah hendak mengembalikan adat kebarat-baratan, dan lain-lain."

SZ: "Apakah HMI sudah pernah Bapak panggil untuk dinasihati?"

BK: "Secara umum dan terbuka saya sudah berulang-ulang memperingatkan lewat pidato-pidato saya!"

(SZ sejenak mengatur keseimbangan antara emosi dan pikiran. Ia menduga-duga tentang arti BK memanggilnya ke istana; apakah berarti BK menghargai dirinya dan menganggapnya sebagai masih perlu diperhitungkan. Bukankah sebenarnya BK dapat saja membubarkan HMI tanpa kehadirannya atau memberitahukan kepadanya. Ataukah kehadirannya memang disengaja untuk diperlihatkan kepada sejumlah orang agar orang tahu bahwa dirinya memang setuju HMI bubar?).

SZ: "Mohon dipertimbangkan sekali lagi! HMI itu anak-anak muda. Mereka sudah termakan oleh pidato-pidato Bapak di banyak peristiwa. Kalau saya ini anak muda, saya akan memberontak melihat hal-hal yang tidak beres di kanan-kiri kita. Lha HMI-HMI itu itu telah mempraktekkan anjuran Bapak, apakah Bapak tidak bangga?"

(BK menatap wajah SZ dengan pandangan lunak seolah mengisyaratkan masih terbuka diskusi lebih lanjut, SZ meneruskan).

SZ: "Mereka itu para mahasiswa berbagai fakultas, mereka adalah calon insinyur, dokter, ekonom, sarjana hukum dan lain-lain. Mereka itu merupakan kader-kader bangsa. Sudah jamak anak-anak muda berpikiran dinamis, karena itu, seperti yang sering Bapak pidatokan, mereka bisa membentuk gelombang arus listrik. Bapak lebih tahu dari pada saya, arus listrik itu harus ditransformir ... supaya menjadi kekuatan yang bermanfaat. Kalau HMI itu dibubarkan mereka menjadi frustrasi dan kita rugi semua!"

BK: "Mereka 'kan anak-anak Masyumi. Tentu seperti 'bapak'nya, tetap saja reaksioner!"

SZ: "Pak, ketika masa jaya-jayanya Masyumi mereka masih anak-anak SMA dan SMP. Mereka tidak tahu persis apa itu Masyumi. Kita jangan mengikuti falsafah yang mengatakan: Karena Bapaknya salah, anak-anaknyapun berdosa semuanya ... !"

(SZ merasa di atas angin, sementara BK menghentikan sejenak dialog itu seraya BK sedang kehabisan argumen (dengan nada ringan) kami para pembantu Presiden (untuk mengingatkan)."

BK: "Bukan berlebihan. Tetapi saya berbuat menurut *gewetan* saya, perasaan hati saya!"

SZ: "Kalau Bapak tetap hendak membubarkan HMI, artinya pertimbangan saya bertentangan dengan *gewetan* Bapak. Maka tugasku sebagai pembantu Bapak hanya sampai di sini ... !"

BK: "Oooooh, jangan berkata begitu. Saya tetap memerlukan Saudara membantu saya...!" (kalimat ini diucapkan sambil senyum, lalu mengulurkan tangannya yang disambut tangan SF, berjabat tangan). "Baiklah HMI tidak saya bubarkan. Tetapi saya minta jaminan. HMI akan menjadi organisasi yang progresif. Kau bersama Nasution, Ruslan Abdulgani dan Syarif Thayeb harus membimbing HMI."[26]

Keempat orang yang ditunjuk itu tidak pernah bertemu untuk maksud yang namanya "bimbingan." Kepada siapapun (selain PB NU), Saifuddin tidak pernah menceriterakan dialognya dengan BK tentang HMI. Namun Saifuddin dan KH Masykur pernah dipanggil Subandrio, Wakil Perdana Menteri I untuk dipertemukan dengan PB HMI (Sulastomo dan Ismail Metareum) dan PB SBII (Wartomo dan Agus Sudono). Kepada mereka Subandrio memberi tahukan bahwa HMI berada dalam bimbingan Saifuddin, sedangkan KH Masykur untuk SBII. Pada pertemuan itu Saifuddin hanya memberi sambutan pendek, mengatakan bahwa yang menyuruh untuk bimbingan itu sesungguhnya Bung Karno.[27] Sementara itu di sejumlah surat kabar, khususnya *Duta Masyarakat* sudah terpampang pernyataan politik PB NU bahwa rongrongan terhadap sekelompok umat Islam, akan dianggap (oleh NU) sebagai rongrongan terhadap umat Islam secara keseluruhan. Pernyataan ini tentu sudah sangat jelas apa artinya dan ke mana arahnya.

---

[26]*Berangkat* ... , hal 526-529.

[27]*Berangkat* ... , hal 528-529. Dalam pesta perkawinan putra Ali Sadikin Saifuddin bertemu denga Hasyim Ning, menceritakan bahwa dirinya sedang membuat memoir. Hasyim Ning berujar: "Tulis saja bahwa sayalah saksi hidup Pak Saifuddin Zuhri menghalang-halangi pembubaran HMI. Tulis saja nama saya." Lihat: *Berangkat* ... , hal 529.

Hubungan Islam-Kristen: Gereja di Istana?

Suatu hari Bung Karno bertanya bagaimana pendapat Saifuddin Zuhri selaku Menteri Agama kalau demi toleransi dan agar adil, di Istana Merdeka yang sudah ada Masjid Baitur Rahim didirikan juga gereja. Kata Bung Karno, ada orang yang memberi tahu, suatu ketika Rasulullah saw menerima pendeta Kristen dan memperkenankan pendeta itu sembahyang di mesjid Nabi di Medinah. Saifuddin Zuhri menjawab bahwa ia belum menemukan referensinya; tetapi seandainya itu benar, mungkin karena di Madinah tidak ada gereja sebuahpun. Untuk di Indonesia, hal itu tidak mungkin karena jumlah gereja cukup banyak. Kalau soal toleransi dan adil, kata Saifuddin Zuhri, Gubernur Jenderal Kolonial yang tinggal di Istana Bogor itu telah membangun gereja di samping kiri Istana, tetapi tidak membangun masjid di samping kanannya. Di Vatikan, meskipun ada sejumlah umat Islam yang tinggal di sana (termasuk staf KBRI), Sri Paus tak mau mendirikan masjid. Sambil mengangguk-angguk, Bung Karno berkata: "Kalau begitu, saya tidak mau mendirikan gereja di lingkungan Istana Kepresidenan! Ini bukan musium!"[28]

Interpelasi Simorangkir

> Semua orang tahu bahwa aku -meski Menteri Agama- tetapi selaku pribadi adalah orang Islam. Suatu hari datang kepadaku seorang propagandis Kristen menawarkan buku-buku bacaan ke-Kristenan untuk anak-anakku. Aku katakan kepadanya bahwa aku mempunyai perpustakaan pribadi di rumah, juga untuk anak-anakku... kalau kepada seorang Muslim yang kebetulan Menteri Agama propagandis Kristen dengan leluasa mendatanginya, betapa pula terhadap orang-orang Islam golongan awam.[29]

Ketegangan Islam-Kristen meningkat terutama setelah PKI dibubarkan tahun 1966. Dengan dukungan dana yang kuat dan terorganisasi baik, kelompok Kristen aktif menawarkan perlindungan kepada simpatisan PKI agar tidak dituduh terlibat G30S. Pendirian gereja-gereja yang pesat di mana-mana, terutama di tempat-tempat yang tidak ada orang Kristen, menyebabkan

---

[28]*Berangkat* ... , hal. 528-529.
[29]*Berangkat* ... , hal. 566.

hubungan Islam-Kristen terganggu.[30] Di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, timbul ketegangan bahkan meningkat secara fisik dengan pembakaran gereja oleh kalangan Muslim. Untuk menjaga kerukunan, Menteri Agama melakukan pendekatan kepada berbagai pihak agar kebebasan mengembangkan agama dilakukan secara sehat dan tidak ekspansionistis.

Di Meulaboh, kota kecil di Aceh, sekelompok penduduk Kristen juga mendirikan gereja di tengah-tengah kota dengan merombak rumahsakit yang dibeli melalui perantaraan seorang pejabat yang kebetulan Kristen. Pada 18 April 1967 masyarakat Islam setempat, yang merupakan mayoritas, melalui Majelis Ulama memprotes proses pembelian rumahsakit dan pendirian gereja tersebut yang mereka anggap menyalahi prosedur. Protes itu tak diindahkan sehingga situasi terus memburuk, melibatkan Front Nasional dan DPRD DI Aceh. Untuk menghindari perkembangan lebih buruk, Panca Tunggal (sekarang Muspida) DI Aceh memerintahkan agar gereja Meulaboh ditutup. Dalam pada itu sebuah delegasi dari Aceh datang ke Jakarta menemui Menteri Agama, Saifuddin Zuhri, meminta agar keputusan Panca Tunggal DI Aceh disahkan Pemerintah Pusat (Departemen Agama). Permohonan ini disertai "penjelasan" bahwa bila pemerintah tidak mensahkan keputusan Panca Tunggal DI Aceh, maka masalah gereja Meulaboh akan diselesaikan masyarakat Aceh dengan "cara Aceh."

Mendengar istilah "cara Aceh" Menteri Agama memang merasa agak ngeri tetapi itu hanya salah satu dari sekian hal yang harus diperhatikan. Pertimbangan objektif dan etik juga penting. Di antaranya adalah kehendak mayoritas masyarakat setempat dan badan-badan resmi seperti, Front Nasional, DPRD dan Panca Tunggal. Prinsip universal toleransi beragama juga harus diletakkan secara wajar di mana sekelompok umat suatu agama yang hendak melaksanakan haknya tidak boleh merugikan kelompok lain. Prinsip "yang besar harus dihormati dan yang kecil dilindungi" juga harus ditegakkan karena toleransi tidak bisa datang hanya dari satu pihak sementara yang lain hanya berpegang pada hak-hak-

---

[30]Dicontohkan oleh Saifuddin Zuhri, di Jalan Anggrek (Slipi-Jakarta) misalnya, gereja didirikan hanya 7 meter dari masjid, pada hal di sana terkenal sebagai Kampung santri, dan saat itu tidak ada penganut Kristen seorangpun.

nya sendiri. Atas dasar itu semua Menteri Agama menentukan sikap bahwa penutupan gereja Meulaboh dibenarkan. Tujuannya adalah untuk menyadarkan semua pihak agar toleransi beragama hendaknya dipraktekkan oleh semua golongan dengan semangat saling menghargai secara wajar dan sehat.

Namun sesudah itu, pada 7 Juni 1967 sejumlah anggota Fraksi Kristen Protestan dan Katolik dalam DPR GR mengajukan interpelasi kepada pemerintah mengenai penutupan gereja Meulaboh. Interpelasi itu ditandatangani sebelas orang, yaitu JCT Simorangkir, FX Sudijono, Lie Beng Giok, VB da Costa, M Mahar, RHS Hadisudibjo, Sabam Sirait, Ch C Mooy, Harry Chan, Soegaib dan Th Hardjowasito. "Interpelasi Simorangkir" in berisi enam butir pernyataan kedua Fraksi tersebut di atas kepada pemerintah, dengan tembusan dikirimkan kepada: (1) Dan Rem 012 Teuku Umar; (2) Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Barat; (3) Kepala Jawatan Penerangan Kabupaten Aceh Barat; dan (4) Ketua-ketua parpol dan ormas Kabupaten Aceh Barat.

Selaku Menteri Agama, sambil mewakili aspirasi Partai NU, Saifuddin Zuhri melobi tokoh Parkindo dan Partai Katolik di DPR-GR dan Kabinet untuk mempertimbangkan kembali apakah interpelasi itu diteruskan, mengingat akibat politiknya bisa serius, apalagi karena jumlah kedua Fraksi itu digabung masih kalah jauh dibanding jumlah anggota Fraksi NU. Namun mereka bertekad untuk meneruskannya sehingga sidang Panitia Musyawarah DPR-GR tanggal 30 Juni 1967, memutuskan untuk memberi kesempatan kepada JCT Simorangkir mengemukakan interpelasinya di hadapan Sidang Pleno DPR-GR. Keenam butir pertanyaan tersebut berbunyi:

1. Sependapatkah Pemerintah dengan kami para penanya, bahwa kejadian tersebut (penutupan Gereja di Meulaboh) dapat dipandang merusak jiwa toleransi antar pemeluk agama di Indonesia?
2. Sependapatkah Pemerintah dengan kami para penanya,bahwa kejadian tersebut berarti meragukan kemurnian pelaksanaan/ pengamalan sila pertama dari Pancasila?
3. Sependapatkah Pemerintah dengan kami para penanya, bahwa sikap dari golongan mana pun atau siapa pun yang bersifat merintangi atau menghambat kebebasan ber-agama, berarti menolak hak-hak asasi manusia yang sama-sama kita junjung tinggi?
4. Sependapatkah Pemerintah dengan kami para penanya, bahwa bila hal tersebut no.3 terjadi, akan merusak iklim persatuan

nasional di dalam pembinaan Orde Baru?

5. Sependapatkah Pemerintah dengan kami para penanya, bahwa kejadian semacam itu akan mempengaruhi kelancaran MPRS di dalam mempersiapkan Piagam Hak Asasi Manusia?
6. Bersediakah Pemerintah, untuk mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu, baik preventif maupun represif, agar kejadian-kejadian semacam itu tidak akan timbul di dalam Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila, baik secara langsung maupun tidak langsung?[31]

Terhadap Interpelasi Simorangkir yang diplomatis namun cukup menyulitkan posisi pemerintah tersebut Menteri Agama segera melapor kepada Pejabat Presiden Jenderal Suharto yang kemudian memerintahkannya agar dihadapi sebagaimana mestinya. Beberapa hari sesudah itu Menteri Agama membuat teks Keterangan Pemerintah yang dibacakan pada rapat pleno DPR-GR tanggal 21 Juli 1967. Prosesnya agak kompleks namun secara keseluruhan pada akhirnya sukses, dalam arti interpelasi tersebut tidak berujung pada mosi tidak percaya DPR-GR kepada Pemerintah sehingga sama sekali tidak menimbulkan krisis politik.

Catatan Akhir

Seperti yang lain, Federspiel juga mengenal Saifuddin Zuhri sebagai wartawan, pendidik, tokoh politik kalangan NU dan Menteri Agama.[32] Namun lebih dari itu Saifuddin Zuhri adalah seorang santri yang pribadinya dibentuk oleh lingkungan pesantren dengan tradisi belajar yang bersahaja yaitu harus bersila karena kursi dan bangku tak lazim di sana. Proses autodidak membawanya aktif dalam gerakan sosial dan pendidikan. Ia-pun lalu berjuang dengan pena dan senjata untuk bangsa dan negara. Bergesernya NU menjadi partai politik, melibatkannya juga terjun ke dalam kancah politik. Tahun 1962-1967 ia mencapai tahta pemerintahan memimpin Departemen Agama. Paparan di atas hanyalah sekelumit butir-butir episode dari untaian perjalanan hidupnya selaku Menteri Agama. Apa yang sebenarnya ada dan terjadi tentu jauh lebih kompleks ketimbang paparan di atas.

---

[31] *Berangkat*, hal. 566-568

[32] Federspiel, H.M., *A Dictionary of Indonesia Islam* (Athens: CIS Ohio University, 1995).

Saat Saifuddin Zuhri menjadi Menteri Agama, kondisi sosial, politik dan ekonomi berada dalam suasana kritis. Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga munculnya Orde Baru 1968 kekuasaan politik mulai terkonsentrasi pada diri seorang tokoh, Bung Karno. Sementara itu kekuatan rakyat yang semestinya menjadi aset pembangunan terpecah dalam serpihan fanatisme ideologis, "jor-joran" antar golongan: nasional-agama-komunis, yang satu sama lain siap menerkam. Pada saat itu syarat hidup bagi suatu kekuatan sosial-politik hanya satu, yaitu kolaborasi dengan Bung Karno; tanpa itu ia akan dipaksa minggir atau bahkan harus terkubur.

Bagi NU dan Saifuddin Zuhri, bertahan hidup adalah segala-galanya; karena itu hukumnya wajib. Demi mempertahankan hidup, orang boleh membunuh lawan yang mengancam atau berdamai dengan lawan yang sudi berteman, walau sementara. Dalam kelaparan, juga ada saat di mana yang haram menjadi halal. Bangkai segar yang semula haram, misalnya, bila merupakan satu-satunya alternatif untuk bisa bertahan hidup, boleh dimakan. Hanya dengan hiduplah manusia, secara individu maupun kelompok, bisa mengabdi melaksanakan tugas suci menjadi khalifah Allah di bumi. Bahwa dalam hidup lalu tergelincir dosa, ada aturan dan kesempatan untuk bertobat.

Dalam kerangka pentingnya hidup itulah Saifuddin sejak kecil bersila di pesantren akhirnya mau berkolaborasi memegang tahta dan menduduki jabatan Menteri Agama. Niatnya baik, yaitu untuk berjuang demi umat:

> ... menduduki jabatan menteri bukanlah kemauanku. Aku menduduki jabatan yang bukan pilihanku itu dengan sikap yang dingin saja. Tetapi setelah tidak bisa menghindari kenyataan bahwa jabatan Menteri Agama itu benar-benar diletakkan di atas pundakku, aku tidak bisa main-main dengan jabatan itu. Aku tidak boleh bekerja separuh hati. Aku harus bekerja dengan betul-betul. Bismillah!.[33]
>
> Tugas Menteri Agama adalah tugas perjuangan.[34]

---

[33]*Berangkat* ... , hal 504.
[34]*Berangkat* ... , hal 500.

K.H. Mohammad Dachlan;

Departemen Agama di Masa Awal Orde Baru

Kamal Muchtar

Kiyai Haji Mohammad Dachlan (1909-1977) tampil sebagai pemimpin masyarakat semenjak masa kolonial hingga permulaan Orde Baru. Kepemimpinannya yang terkenal tegas dan demokratis tampak tersalurkan melalui NU, tetapi berkat kepiawaian serta sikapnya yang moderat dia pun mendapat tempat di hati semua golongan, sehingga pantaslah bila dirinya dipercaya menjadi Menteri Agama RI pada Kabinet Pembangunan Pertama (1968-1971). Demikian pula pemikiran Dachlan di bidang kemasyarakatan dan agama layak dipandang sebagai konstribusi yang sangat bermakna bagi kebutuhan masyarakat dewasa ini.

Segala hal yang terpantul dari sirah Mohammad Dachlan itu, terutama menyangkut perjuangan dan pemikirannya, ingin dipaparkan dalam karya sederhana ini. Tulisan ini tersaji berkat dukungan bahan dokumen, khususnya yang ditemukan di Lakpesdam (Lajnah Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) NU di Jakarta dan keterangan-keterangan yang diperoleh dari para informan, yaitu keponakan, adik kandung dan tokoh NU yang hidup sejaman dengan almarhum di Mojokerto, Pasuruan, keponakan dan putra kandungnya di Jakarta, dan mantan sekretaris almarhum, A. Sjahri, di Bekasi.[1]

---

[1]Atas keterangan-keterangan mereka diucapkan terima kasih sehingga potret kehidupan Mohammad Dachlan tampak lebih jelas.

Keluarga

Mohammad Dachlan lahir pada tanggal 2 Juni 1909, bertepatan dengan 14 Jumadil Ula 1327 Hijriah di desa Mandaran Rejo, Pasuruan, Jawa Timur. Dia adalah putra keempat dari delapan bersaudara yaitu: Mohammad Hasyim, Hasan dan Husen (saudara kembar), Mohammad Dachlan, Baidhowi, Maimunah, Hafsah dan Zainab. Mereka adalah putra-putri dari pasangan Abdul Hamid dan Kasminah. Nenek moyang mereka dikatakan berasal dari daerah Mandar, Sulawesi Selatan, yang dibuang oleh pemerintah Belanda ke Pantai Pasuruan. Namun Dachlan sendiri merupakan darah campuran, yaitu kakeknya bernama Haji Ali berdarah asli Makasar yang menikah dengan Suti asal daerah Mayangan Pasuruan. Dari pasangan Ali-Suti inilah lahir putra tunggal, Abdul Manaf, yang setelah menunaikan ibadah di tanah suci biasa dipanggil dengan Haji Abdul Hamid yang termasuk tokoh masyarakat dan pemuka agama di desanya, yang kala itu desa Mandar telah berpenduduk mayoritas muslim dan tergolong taat menjalankan agamanya.

Desa Mandar terletak di pesisir pantai, lebih kurang 3 kilometer dari kota Pasuruan. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani tambak. Udang dan ikan bandeng merupakan penghasilan utama petani tambak, yang dikelola secara tradisional, yaitu dengan pembuatan petakan-petakan tambak dan pemanfaatan aliran sungai yang melintasi desa tersebut. Di lingkungan seperti inilah Dachlan dibesarkan, bahkan masih dalam usia remaja ia telah diberi tanggung jawab menjaga beberapa petak tambak milik kakeknya. Kedua orang tua Dachlan sangat ketat memberikan bimbingan kepada putra-putrinya. Mereka sejak dini diarahkan agar taat menjalankan ajaran agama, dan juga mulai dilatih membantu orang tua dalam usahanya. Abdul Hamid bukan hanya seorang kiyai, tapi juga seorang pengusaha dan pedagang besar di daerahnya. Dia memiliki banyak kapal untuk disewakan kepada para nelayan selain untuk keperluannya sendiri.

Sebagai seorang ulama, Abdul Hamid sangat memperhatikan pendidikan agama putra-putrinya. Ia pun memberikan dorongan kepada mereka yang ingin melanjutkan pendidikan keluar desanya. Dorongan itu dimanfaatkan, khususnya oleh Mohammad Hasyim dan Mohammad Dachlan.

Menjelang usia dewasa, mereka dikirim berguru kepada Kiyai Khuzaimi di pesantren Tambakan, kemudian kepada Kiyai Yasin di

Kebon Sari. Di kedua pesantren yang termasyhur di Pasuruan pada waktu itu, mereka belajar berbagai ilmu agama tingkat dasar, seperti al-Qur'an, fiqh dan ilmu alat. Guna memantapkan pengetahuannya, mereka menuntut ilmu di Pesantren Kiyai Kholil (w. 1343 H/1925 M) Bangkalan, Madura. Dia adalah ulama besar yang alim dalam ilmu nahwu, fiqh dan tarekat dan guru Kiyai-kiyai besar di Jawa, seperti Kiyai Hasyim Asy'ari, Kiyai Wahab Chasbullah, dan Kiyai Bisri Syamsuri.[2] Mereka semua pernah *nyantri* di Pesantren Bangkalan. Sepeninggal Kiyai Kholil, keduanya pindah berguru kepada Kiyai Hasyim Asy'ari di Pesantren Tebuireng, Jombang. Hasyim dan Dachlan rupanya lebih mantap menimba ilmu di pesantren terakhir itu, yang diperkirakan berlangsung hingga akhir tahun 1920-an. Kedua putra Abdul Hamid ini tidak hanya berhasil mendalami ilmu agama, melainkan juga memperoleh pengalaman serta bimbingan dalam kepemimpinan dan organisasi, sebab pada masa itu guru mereka tengah gencar meletakkan dasar-dasar Jam'iyah NU. Pendidikan pesantren banyak mewarnai kepribadian mereka, khususnya bagi Dachlan yang aktif berorganisasi, mulai dari tingkat ranting sampai ke tingkat Pengurus Besar dan kemudian menjadi salah satu tokoh NU.

Dalam tradisi pesantren, belumlah dipandang mantap manakala seorang abituren yang diharapkan menjadi pemuka agama dan masyarakat di daerah asalnya tidak menyempatkan dulu ke Tanah Suci. Apalagi jika dia berasal dari keluarga mampu. Ini juga dijalani Dachlan sebelum bermukim di Pasuruan. Atas biaya dari kakeknya, dia bersama kakak sulungnya pergi haji dan selama tinggal di Mekkah keduanya mendalami ajaran agama Islam. Mereka rajin mengikuti kegiatan pengajian yang diselenggarakan di sekitar Masjid al-Haram. Walaupun tidak lebih dari satu tahun tinggal di sana, kemantapan beribadah serta ilmu yang didapatkannya sangat berarti bagi jiwa keagamaan dan bekal perjuangan Dachlan di kemudian hari. Sekembalinya dari Tanah Suci, ia tampaknya telah siap menata berbagai persoalan kehidupan yang harus dihadapinya. Dachlan tiba di kampung halaman sekitar permulaan 1930, dan tidak lama kemudian ayahnya meninggal dunia. Sejak itu, ia bersama

---

[2]Saifullah Ma'shum, ed., *Menapak Jejak Mengenal Watak, Sekilas Biografi 26 Tokoh Nahdatul Ulama*, (Jakarta: Yayasan Saifudin Zuhri, 1994), hal. 15.

Hasyim harus bertanggung jawab menghidupi keluarga, terutama dalam mengelola sumber pokok penghasilan orang tua mereka dari usaha tambak dan nelayan. Pada saat yang sama, Dachlan juga meneruskan peran ayahnya sebagai tokoh agama dengan membina berbagai kegiatan keagamaan di masjid Mandaran Rejo dan sekitarnya.

Pada 1930 Mohammad Dachlan mulai menempuh hidup berkeluarga. Ia menikah dengan Khadijah, seorang gadis asal Bangil. Bahtera kehidupan keluarga ini dikaruniai dua orang putri yaitu: Khalifah dan Umi Kulsum, tetapi karena satu dan lain hal ikatan suami-istri itu terpaksa *firaq* (cerai). Kemudian Dachlan menikah lagi dengan gadis asal Pasuruan yang juga bernama Siti Khadijah. Rupanya ujian kedua kalinya menimpa tokoh yang tengah naik daun itu. Belum lagi keluarga terbina secara baik, Khadijah meninggal dunia. Menurut sebuah cerita, Khadijah wafat karena ditembak pemberontak PKI Madiun, sewaktu ia mau pergi ke pasar. Dachlan bersama istri memang pernah tinggal di Madiun dalam rangka menjalankan tugas sebagai Pengurus Besar NU.[3] Peristiwa yang memilukan itu terjadi sekitar tahun 1948, dan dari pernikahan itu mereka tidak dikaruniai anak.

Selama kurang lebih tiga tahun Dachlan hidup menduda. Di tengah kesibukan mengurus NU, dia cukup merasa bahagia tinggal bersama kedua putrinya tercinta. Baru pada 1951 ia menikah lagi dengan Aisyah, seorang gadis Minang asal Pariaman Sumatera Barat, yang waktu itu bekerja sebagai salah seorang sekretaris di Kementerian Agama di Jakarta. Aisyah adalah lulusan Diniyah Putri Padang Panjang, sebuah lembaga pendidikan khusus putri yang dirintis oleh Rahmah El-Yunusiyah dan bercorak pembaru.[4]

Perjodohannya dengan Dachlan adalah atas perantaraan K.H.A Wahid Hasyim, yang kala itu Menteri Agama (1949-1952),* sedangkan Dachlan sendiri sebagai wakil Wahid dalam kepengurusan PB NU. Mereka rupanya merupakan pasangan ideal; suami-istri sama-sama berminat tinggi dalam pengabdian masyarakat. Bila Dachlan

---

[3]*Ensiklopedi Islam Indonesia*, jilid 2, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1993), hal. 764.

[4]Tentang Diniyah Putri, lihat misalnya, *Peringatan 55 Tahun Diniyah Putri Padang Panjang*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978).

*Lihat bab tentang Wahid Hasyim.

selaku pentolan NU yang tak pernah surut dari aktivitasnya sebagai organisator, maka Aisyah senantiasa aktif dalam dunia pendidikan di samping kesibukannya sebagai ibu rumah tangga dan pegawai negeri. Aisyah sangat serius mengelola "Dharma Muslimah", sebuah yayasan pendidikan Islam di sekitar Sarinah, Jl. Thamrin Jakarta, yang didirikan oleh suaminya sebelum ia menjadi Menteri Agama.

Pasangan Dachlan-Aisyah memperoleh empat orang anak (dua putri dan dua putra); pertama, Aida Sofyati (lahir 1952), kini menjadi dokter di Rumah Sakit Dharmais Jakarta; kedua, A. Hafiz Dachlan (lahir 1957), sarjana ekonomi yang sekarang memimpin perusahaannya sendiri di bidang penukaran valas, PT Tetra Dua Sisi (TDS); ketiga, Dian Fauziah (lahir 1960), insinyur arsitektur, bekerja sebagai konsultan pada PT Yoda Karya Jakarta, dan terakhir Hamdan Dachlan (lahir 1961), insinyur perikanan, sekarang bekerja pada PT Unilever. Bila dilihat dari *setting* pendidikan putra-putri Dachlan, tidak ada yang diarahkan kepada pendidikan agama, sehingga di kemudian hari bisa meneruskan jejak ayahnya. Sebagaimana dituturkan Hafiz, rupanya ayahanda mengharapkan anak-anaknya terlebih dahulu menguasai pengetahuan umum, baru kemudian agama. Bahkan, ia mengharapkan agar menggali agama itu bertolak dari pengetahuan umum. Hal ini disadari putra-putrinya setelah mereka dewasa. Meskipun begitu, bimbingan agama ketika mereka anak-anak dan remaja cukup ketat diberikan kedua orang tua; setiap sore mereka disuruh belajar di madrasah, atau di rumah dengan mendatangkan guru privat agama, dan sesekali langsung dibimbing orang tua mereka terutama dalam ibadah.

Sifat dan Kepribadian

Menurut kesan banyak orang, keluarga dekat, kawan segenerasi maupun kader dan murid-muridnya, Mohammad Dachlan adalah tokoh berwatak keras, tetapi tegas dan konsisten terhadap tanggung jawab yang dipikulnya. Ia juga teguh membela dan memperjuangkan prinsip yang diyakininya. Secara alamiah, karakter keras Dachlan cukup wajar karena ia dibesarkan di lingkungan pesisir yang kesehariannya bergumul dengan masyarakat yang agresif. Sementara pendidikan agama yang ditempuh semenjak kecil hingga dewasa begitu mendukung terhadap sifatnya yang kukuh dalam

membela nilai-nilai kebenaran. Kecenderungan ini sangat nyata dalam pandangan dan tindakannya selama menempuh jenjang-jenjang perjuangan.

Mohammad Dachlan juga dikenal sebagai tokoh yang memiliki banyak ide dan cemerlang dalam berfikir. Keluasan wawasannya bukan karena ditopang oleh pendidikan moderen, tetapi semata-mata karena banyak membaca buku. Di lingkungan keluarga, dia suka berdebat dalam berbagai masalah, terutama dengan kakak kandungnya, Mohammad Hasyim. Namun dia tetap hormat kepada orang yang dipandang lebih senior, sehingga dalam banyak hal, kepada Hasyimlah Dachlan selalu berkonsultasi. Demikian pula di kalangan lebih luas, khususnya NU, dia amat tajam dalam berargumentasi. Dalam setiap forum *Bahtsul Masail* NU, dia selalu andil, dan sering beradu pendapat dengan Kiyai Syukri Ghozali. Sebagai ulama yang terbilang ahli dalam bidang fiqh, Dachlan dinilai kalangan NU cukup moderat dalam berfatwa. Sekedar contoh, tutur Abdul Hasyim (keponakan yang tinggal bersama Dachlan), bahwa kebanyakan ulama NU memperbolehkan seorang Muslim meminum bir hitam dalam rangka pengobatan, dengan alasan tidak ada obat lain. Bagi Dachlan, minuman keras itu boleh diminum manakala dipandang cocok untuk pengobatan; jadi bukan karena alasan darurat saja

Maslahah Ummah (kemaslahatan umat) bagi Mohammad Dachlan adalah prinsip yang sangat penting dan dipantulkan dalam kepemimpinannya, baik di organisasi maupun di medan perjuangan lainnya. Untuk itu, meski seringkali berseberangan pendapat dengan tokoh-tokoh sezaman, dia tetap tunduk kepada hasil musyawarah. Selama kiprahnya dalam NU, dia hampir tak pernah absen dari kedudukannya sebagai pemimpin utama. Namun kedudukannya itu juga atas dasar prinsip maslahah tadi. Pada periode kepemimpinan NU 1960-an, misalnya, dia bersedia memegang jabatan wakil ketua, walaupun periode sebelumnya dia adalah ketua umum. Baginya selama masih ada tokoh lain yang bersedia menjadi pemimpin teras dan musyawarah menghendakinya, maka dia tak pernah menolak apalagi menjadi oposisi.

Pola kepemimpinan Dachlan tegas dan proporsional, sehingga sebagian orang menyebutnya pemimpin yang *saklek* (*zakelijk*). Bagi Dachlan, segala pekerjaan harus dilakukan secara betul dan tidak boleh dilakukan main-main. Umpamanya, menurut A. Syahri, dalam

pengisian anggota DPR dari partai NU pasca pemilu 1955, Dachlan menolak beberapa calon yang dipandang kurang tepat. Baginya, calon itu dilihat dulu jasanya terhadap partai dan juga kualitasnya. Dalam hal inilah, sebagian orang kurang simpati kepadanya. Ia tampaknya berbeda dengan Idham Cholid, yang lebih toleran dan luwes. Namun demikian, sebagaimana penilaian Kiyai Munatsir, tokoh NU dari Mojokerto Jawa Timur, kehadiran Dachlan dan Idham dalam pucuk pimpinan NU justru membuat suasana berimbang; perpaduan antara watak keras dan lenturnya dua pemimpin besar itu, roda organisasi NU dapat dikemudikan di tengah suhu politik Indonesia yang semakin memanas.

K.H. Mohammad Dachlan dikenal pula sebagai administrator yang baik. Menurut A. Syahri, Sekretaris PB NU pada tahun 1950-an, Dachlan selalu menggunakan waktunya secara tepat. Dia hampir tak pernah meninggalkan kantornya sebelum jam kerja usai. Satu lembar suratpun tak pernah luput dari koreksiannya; semua dibaca dan tidak ditumpuk begitu saja. Tugas administrasi di kantor PB NU pada setiap harinya harus selesai pada hari itu juga, dan dia sendiri selalu menunggui para stafnya. Sewaktu PB NU dipimpin Kiyai Idham Cholid, posisi Dachlan sebagai wakilnya menunjukkan suasana kepemimpinan yang saling mendukung. Sebab, Kiyai Idham lebih sering menjalankan aktivitas di luar kantor, mengunjungi atau memenuhi undangan-undangan pengurus daerah, sementara Dachlan bertanggung jawab menyelesaikan tugas-tugas administrasi.

Perjuangan

Bila tidak disebutkan terlebih dahulu *setting* keluarga dan organisasi, perhatian orang dalam perbincangan tokoh bernama Dachlan akan segera terfokus pada K.H. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah di Yogyakarta. Barangkali, popularitas tokoh ini bisa disamakan dengan nama Hasyim, yang sering diasosiasikan K.H. Hasyim Asy'ari, pencetus berdirinya NU. Sementara itu, di kalangan NU sendiri paling sedikit terdapat empat tokoh bernama Dachlan yang sama-sama berjasa bagi kebangunan NU, khususnya, dan bangsa Indonesia, pada umumnya. Mereka sama sekali tidak berhubungan secara geneologis, untuk ini keempat tokoh Dahlan dari NU perlu dipaparkan sekilas pandang.

Pertama, K.H. Ahmad Dahlan yang berasal dari Kebon Dalem, Surabaya, adalah tokoh yang menjadi wakil Hadratus Syekh Hasyim

Asy'ari.[5] Dia juga salah seorang dari empat pengurus *al-Madjlisoel-Islamil-A'laa Indonesia* (MIAI), sedangkan tiga tokoh lainnya adalah: W. Wondoamiseno, K.H.M. Mansoer, dan K.H. Abdoelwahab.[6] Dahlan yang kedua adalah K.H. Dahlan bin Abdul Kohar yang berasal dari Kertosono,[7] yang kemudian populer dengan panggilan Kiyai Dahlan Kertosono. Dialah salah seorang pendiri Sarekat Islam cabang Mekah, di samping aktivis Nahdlatul Watan dan NU.[8] Ketiga, Haji Muhammad Dahlan dari Bandung, Jawa Barat. Dahlan ini adalah anggota fraksi NU dalam Konstituante RI tahun 1957.[9] Adapun Dahlan keempat adalah K.H. Mohammad Dachlan yang perjuangannya akan dipaparkan di bawah ini dan lebih populer karena ia pernah menjadi Menteri Agama.

Perjuangan Mohammad Dachlan melalui NU dimulai dari tingkat paling bawah, ranting. Ketika mukim di desa Mandaran Rejo, dialah yang membentuk ranting NU di sana. Dalam usianya yang masih muda, ia telah menunjukkan pengabdiannya kepada masyarakat. Hampir setiap hari ia mengajar dan memberikan pengajian ke desa-desa sekitar. Pada 1930 ia tinggal di lingkungan keluarga istrinya, dan pada tahun yang sama kiyai muda Mohammad Dachlan mempelopori terbentuknya NU Cabang Bangil, sekaligus menjadi ketuanya. Lalu pada 1935, ia terpilih menjadi Ketua NU Cabang Pasuruan.[10] Keberhasilan Mohammad Dachlan memimpin cabang NU tersebut mempercepat karirnya dalam jenjang lebih lanjut. Dua tahun kemudian ia dipercaya menjadi konsul NU Daerah I Jawa Timur, berkedudukan di Pasuruan. Konsul ini membawahi daerah Karesidenan Malang, meliputi Pasuruan, Probolinggo, Krasaan, Bangil, dan Lumajang.[11]

Selain seorang organisator, Mohammad Dachlan juga mahir ber-

---

[5]*Menapak Jejak*, hal. 267.

[6]W. Wondoamiseno, "Riwayat Singkat Perjalanan MIAI 1937-1941," dalam *Boekoe Peringatan MIAI 1937-1941*, (Surabaya: MIAI, 1941), hal. 2-3.

[7]*Menepak Jejak*, hal. 267.

[8]M. Ali Haidar, *Nahdhatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1984), hal. 41, 133.

[9]"Daftar Nama dan Alamat Anggota Fraksi Nahdlatul Ulama dalam KonstituanteRI," *Arsip Pimpinan Fraksi NU dalam Konstituante RI*, 1957.

[10]*Menepak Jejak*, hal. 270.

[11]*Ensiklopedi Islam Indonesia*, hal. 765.

argumentasi. Sebagai contoh, pada Muktamar NU ke-13 di Menes, Banten, 1938, dia mengusulkan agar mekanisme pencarian dana melalui "list derma" diubah. "List derma" yang dikeluarkan satu kepengurusan NU cabang hanya berlaku di daerah cabang bersangkutan, dan ketika merambah ke cabang lain, harus disertai kurir yang lengkap dengan segala keterangannya, serta tidak dititipkan kepada pengurus cabang yang dituju. Usulan ini semula ditolak sejumlah cabang karena dipandang akan mempersempit ruang gerak pencarian dana dan memudarkan tolong menolong antarcabang. Rupanya, Mohammad Dachlan bersikeras memperjuangkan usulannya. Dengan kelihaiannya berargumentasi dia akhirnya dapat meyakinkan peserta sidang, sehingga mayoritas muktamirin menerimanya.[12]

Masih di sekitar permasalahan penting yang mencuat pada Muktamar Menes, ialah munculnya gagasan tentang pembentukan bagian wanita dalam struktur NU. Sebelumnya, keberadaan wanita di lingkungan organisasi ini hanya sebagai anggota jama'ah *Ahlussunnah wal Jama'ah*, karena kehadiran kaum ibu dalam forum-forum Muktamar belum memiliki hak suara untuk memilih dan dipilih.[13] Usulan itu terutama disampaikan Nyonya Djoeaesih, *voorzitter* wanita NU Bandung, yang menekankan bahwa agama Islam bukan hanya mengutamakan kaum laki-laki dalam mengurus berbagai persoalan, tetapi juga kaum perempuan, sehingga mereka juga wajib memperoleh pendidikan yang selaras dengan kehendak dan tuntunan agama. Usulan tersebut belum diterima peserta muktamar, kecuali bahwa mereka menjadi anggota NU yang memiliki hak sebagai pendengar saja. Upaya wanita jamaah untuk menempatkan posisinya dalam kepengurusan NU terus bergulir hingga Muktamar ke-15 tahun 1940 di Surbaya. Dalam muktamar ini, ide tentang Muslimat NU dengan kepengurusan tersendiri menjadi pembahasan yang cukup menegangkan. Mohammad Dachlan kala itu termasuk peserta yang gigih memperjuangkan agar usulan itu diterima muktamar. Namun usulan tersebut belum juga berhasil menjadi suatu keputusan, dan peserta muktamar hanya sepakat agar hal itu diserahkan kepada PB Syuriah.[14]

---

[12]*Menapak Jejak*, hal. 271.

[13]Pucuk Pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama; *50 tahun Muslimat NU Berkhidmat untuk Agama, Negara dan Bangsa*, (Jakarta: 1996), hal. 18

[14]*Menapak Jejak*, hal. 273.

Mohammad Dachlan tampaknya tidak berhenti begitu saja. Dia terus memperjuangkan berdirinya Muslimat sebagai bagian tersendiri dari NU. Oleh karena itu pada Muktamar NU ke-16, 1946, di Purwokerta, setelah melewati perdebatan sengit di antara peserta muktamar, Dachlan bersama A. Aziz Dijar membuat pernyataan penerimaan lengkap dengan penyusunan peraturan khusus bagi Muslimat NU, yang kemudian ditandangani oleh Rais Akbar K.H. Hasyim Asy'ari dan K.H.A. Wahab Chasbullah.[15] Dengan demikian Mohammad Dachlan memainkan peranan penting dalam proses pembentukan Muslimat NU, yang secara resmi ditetapkan pada 29 Maret 1946. Terpilih sebagai ketuanya adalah istrinya, Chadijah Dachlan asal Pasuruan.

Tentang perjuangan Mohammad Dachlan pada masa pendudukan Jepang, tidak banyak informasi yang didapatkan, kecuali bahwa dia disebut sebagai salah seorang komandan Hizbullah. Kemudian sejak awal Kemerdekaan RI, Dachlan mulai tampil di pentas kepemimpinan NU tingkat nasional. Berdasarkan keputusan Muktamar NU ke-16 di Purwokerto, ia terpilih menjadi salah seorang Ketua PBNU, yang waktu itu berkedudukan di Surabaya. Atas nama NU, Dachlan menjadi anggota Dewan Pimpinan Partai Masyumi sejak didirikan pada 1945 hingga 1952, saat NU memisahkan diri dari Masyumi. Di samping itu, ia juga menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) di Yogyakarta tahun 1946.[16]

Selaku pimpinan teras NU, Mohammad Dachlan berjasa mengamankan sekretariat PBNU. Sewaktu terjadi peristiwa 10 November 1945 di Surabaya, PBNU dihijrahkan ke Pasuruan, menempati rumah keluarganya di Jl. Diponegoro 5 Pasuruan.[17] Dua tahun kemudian, karena Pasuruan diduduki Belanda, PBNU dipindahkan lagi ke Madiun yang kala itu termasuk daerah Republik. Namun di kota ini, Dachlan beserta tokoh NU lainnya hanya bertahan tidak lebih dari satu tahun karena pada 1948 terjadi pemberontakan PKI yang menjadikan kota Madiun sebagai pusat pemerintahannya.[18]

---

[15]*Menapak Jejak*, hal. 273, bandingkan pula dengan *50 tahun Muslimat NU*, hal. 20.

[16]*Menepak Jejak*, hal. 275.

[17]Rumah tersebut hingga kini masih berdiri tegak dengan gaya arsitektur Eropa, dan sekarang dihuni salah seorang keponakan Mohammad Dachlan.

[18]*Ensiklopedi Islam Indonesia*, hal. 764.

Karier kepemimpinan Mohammad Dachlan terus menanjak. Berdasarkan hasil Muktamar NU ke-19 di Palembang pada 1952, ia terpilih menjadi Wakil Ketua I PBNU, dengan Ketua Umumnya K.H.A. Wahid Hasyim. Tidak lama setelah NU memisahkan diri dari Masyumi (keputusan Muktamar Palembang, 5-6 April 1952), Dachlan adalah tokoh NU yang diberi kuasa Pengurus Besar untuk menghadiri sidang kilat Masyumi pada 5 Juli 1952.[19] Dalam sidang tersebut, Dachlan menjadi juru bicara NU untuk menegaskan sikap pemisahan dari Masyumi. Pada tahun yang sama, Dachlan termasuk salah seorang yang berperan dalam membidani kelahiran Liga Muslim Indonesia, pada 30 Agustus 1952. Liga ini merupakan federasi yang diusulkan NU, dan memperoleh dukungan PSII, Perti, Darud Da'wah wal Irsyad, dan Persyarikatan Tionghoa Islam Indonesia.[20]

Sepeninggal K.H.A. Wahid Hasyim, yang wafat pada 1953, Dachlan melaksanakan tugas-tugas Ketua Umum PBNU hingga ia sendiri terpilih sebagai Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-20 di Surabaya 1954. Selama itu perannya yang penting dicatat ialah ketegasannya dalam mengantisipasi gerakan komunisme. Dalam suratnya kepada PP Gerakan Pemuda Ansor, PBNU secara tegas tidak menyetujui gerakan/aliran komunisme, meskipun sikap ini masih harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi, sehingga tidak merugikan jalannya roda perjuangan NU. NU juga berpendirian bahwa Pancasila harus dilandaskan pada prinsip-prinsip Islam, walau juga harus mempertimbangkan faktor waktu dan keadaan.[21] Penyataan tegas mengenai gerakan Komunisme tersebut disusul dengan instruksinya kepada Zainul Arifin, K.H. Masykur dan Moh. Hanafiah agar melakukan peninjauan kembali tanda gambar PKI dalam pemilihan umum 1955. Instruksi itu dikeluarkan karena di dalam pengumuman Panitia Pemili-

---

[19]"Surat Kuasa PBNU," Ditandatangani A. Wahid Hasyim dan A. Sjahri, *arsip* tersimpan di Lakpesdam NU Jakarta.

[20]K.H.M. Dachlan, *Riwayat Singkat Nahdhatul Ulama*, Arsip Lakpesdam NU, Jakarta.

[21]Baca surat PBNU kepada Dewan Harian PP Gerakan Pemuda Ansor, tertanggal 6 Juni 1954, yang ditandatangani K.H.M. Dachlan dan A. Sjahri (*Arsip* pada Lakpesdam NU di Jakarta).

han Umum termuat "PKI dan orang-orang tak berpartai", yang menurut pertimbangan PBNU merupakan siasat kaum komunis untuk menipu rakyat Indonesia. Padahal, rakyat yang belum menjadi anggota partai tidak sedikit jumlahnya.[22]

Berdasarkan gambaran itu terlihat bahwa K.H.Mohammad Dachlan begitu serius memikirkan perjuangan NU sebagai partai politik. Kecenderungan demikian semakin tampak selama ia menjadi Ketua Umum PBNU (1954-1957). Dia bertanggung jawab penuh dalam melakukan konsolidasi demi keberhasilan NU dalam menghadapi Pemilihan Umum, termasuk strategi yang dirancang untuk menyusun kabinet pasca pemilihan umum.[23] Melalui partai yang dipimpinnya, Dachlan pada gilirannya duduk dalam anggota Konstituante RI hingga 1959, dan di dalam fraksi NU, ia menjadi penasehat.[24] Dalam Muktamar NU ke-21, 1959 di Medan, Dachlan terpilih sebagai Ketua I dengan Ketua Umum Idham Chalid; dan pada Muktamar 1960 ia diangkat menjadi Wakil Ketua I Majlis Syuriah yang Rais Aamnya adalah K.H. Wahab Chasbullah. Pada tahun yang sama, dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR), Dachlan diangkat sebagai salah seorang anggotanya. Namun, pengangkatan itu ditolaknya dengan alasan pembentukan lembaga legislatif tersebut tidak demokratis, karena tidak memberi kesempatan kepada golongan oposisi.[25] Dia tetap konsisten menjadikan NU sebagai wadah perjuangannya dan selalu tunduk kepada hasil musyawarah, terlihat dari kesediannya menjadi Ketua I PBNU hasil Muktamar 1962 di Surakarta, yang menetapkan Kiyai Idham Chalid sebagai Ketua Umum Tanfidziyah. Kemudian pada Muktamar ke-25 di Surabaya ia kembali terpilih sebagai Ketua Dewan Partai NU hingga partai ini berfusi dalam Partai Per-

---

[22]Surat PBNU, 10 Juni 1954, Perihal "Peninjauan kembali tanda gambar PKI dalam Pemilihan Umum jad", (*Arsip* pada Lakpesdam NU Jakarta).

[23]Baca "SuratPB Partai NU kepada PCNU seluruh Indonesia tentang Pedoman Kerja", tertanggal 1 September 1955, ditandatangani K.H.M. Dachlan dan H. Saifuddin Zuhri, (*Arsip* Lakpesdam NU Jakarta).

[24]Baca Surat Keputusan Fraksi NU dalam Konstituante RI, tertanggal 18 Februari 1957, dan daftar nama dan alamat anggota Fraksi NU dalam Konstituante RI, ditandatangani Achmad Anwar selaku Sekretaris Fraksi, tertanggal 30 Maret 1957, (*Arsip* Lakpesdam NU Jakarta).

[25]*Menapak Jejak*, hal. 275.

satuan Pembangunan.[26]

Di samping perjuangan Mohammad Dachlan di bidang politik, sebagaimana dipaparkan di atas, perjuangan lainnya di bidang sosial juga patut dicatat. Pada penghujung tahun 1950-an, dia bersama K.H. Munir Abisudjak, seorang tokoh NU yang pada 1960 menjadi Ketua PP Lembaga Mabarrot NU, merintis usaha Perjalanan Haji Indonesia (PHI). Usaha tersebut berpusat di Jakarta, tetapi belakangan dapat membuka cabang-cabangnya di Semarang, Surabaya, Makasar, dan Padang. Untuk memperlancar usaha ini, Dachlan berhasil membangun PT Arafah yang bergerak dalam usaha angkutan haji, dengan 9 kapal yang dimilikinya.[27]

Ketokohan dan perjuangan Mohammad Dachlan hampir tak pernah lepas dari gerak langkah NU. Hal ini juga terjadi ketika bersama tokoh NU lainnya dia mendirikan Yayasan Muawanah NU (Yamanu), sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang pendanaan NU. Dalam perkembangannya, Yamanu bekerjasama dengan PHI, khususnya dalam pembekalan calon jamaah haji, sedangkan perjalanan haji merupakan tanggung jawab PHI sendiri. Adapun usaha-usaha Yamanu lainnya yang juga menjadi perhatian Dachlan, ialah percetakan dan *suplayer* kain mori bagi perusahaan-perusahaan batik. Mori yang didatangkan Yamanu dari India mampu memenuhi kebutuhan para pengusaha batik di Pekalongan, Ponorogo, Solo, dan Yogyakarta.[28]

Mohammad Dachlan juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang berani. Keberaniannya ini ditunjukkan dalam sikap politiknya ketika berhadapan dengan kekuasaan pada waktu itu. Ketika Presiden Soekarno menjalankan Demokrasi Terpimpin, Dachlan bersama-sama Kiyai Imorn Rosyadi mendirikan Liga Demokrasi. Liga yang memperoleh dukungan tokoh-tokoh seperti Cosmas Batubara, Napitupulu dan Silalahi ini, secara terang-terangan menunjukkan sikap anti Demokrasi Terpimpin dan Nasakom. Demikian pula ketika terjadi krisis politik Indonesia akibat Gerakan 30 September yang dilancarkan PKI, Dachlan termasuk tokoh yang segera

---

[26]*Ensikopledi Islam Indonesia*, hal. 765.

[27]Wawancara penulis dengan Abdullah Hasyim (keponakan Dachlan) di Jakarta dan A. Sjahri (mantan Sekretaris PBNU masa Orde Lama). Masing-masing dilangsukngkan pada tanggal 4 dan 5 Agustus 1977.

[28]Wawancara dengan A.Sjahri.

memberikan tanggapan atas gerakan tersebut. Pada 4 Oktober 1965, atau 4 hari setelah meletusnya peristiwa nahas itu, dia mengeluarkan pernyataan yang mengutuk PKI dan menuntut pembubarannya. Tidak lama kemudian, bersama Subchan Z.E., dia memunculkan "Front Pancasila" sebagai *counter* atas Front Nasional-nya Bung Karno.[29]

Beriringan dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966, Mohammad Dachlan selaku pimpinan Partai NU berserta tokoh-tokoh lainnya, baik dari organisasi otonom NU maupun badan keluarganya mengeluarkan pernyataan tegas sebagai berikut:

1. Mendukung sepenuhnya Perintah Presiden kepada Letnan Jenderal Soeharto dan siap sedia membantunya dalam melaksanakan perintah Presiden itu.
2. Menyambut gembira Keputusan Presiden tertanggal 12 Maret 1966 tentang pembubaran PKI beserta semua organisasi yang bernaung di bawahnya.
3. Menginstruksikan kepada jamaah NU untuk membantu Pemerintah dan ABRI di dalam menjamin ketenangan dan ketertiban jalannya pemerintahan dan revolusi.
4. Menginstruksikan kepada segenap jamaah NU dan rakyat pada umumnya untuk menyelamatkan Pancasila dan revolusi Indonesia dari setiap usaha gerilya politik PKI dan simpatisannya.[30]

Tampaknya, atas jasa-jasanya bagi kepentingan bangsa, negara dan agama itulah, melalui Keputusan Presiden Nomor 171/1967 Dachlan diangkat menjadi Menteri Agama, terhitung sejak 11 Oktober 1967. Jabatan ini didudukinya sampai dengan 6 September 1971, masa Kabinet XXVI/Kabinet Ampera yang disempurnakan dan Kabinet XXVIII/Kabinet Pembangunan I.[31] Selaku Menteri Agama, dia mencatat beberapa kebijakan yang hingga kini menjadi prioritas dalam program-program kerja Departemen, di antaranya sebagai berikut:

---

[29]Wawancara dengan A. Sjahri.

[30]Baca selengakapnya "Pernyataan Partai Nahdlatul Ulama dan Ormas/Otonom Partai NU dan Badan Keluarganya", Djakarta, 12 Maret 1966 (*Arsip* Lakpesdam NU Jakarta).

[31]Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Djambatan), hal. 216.

1. Merukunkan Umat Beragama

Keputusan pemerintah membubarkan PKI dan menangkap pengikutnya, telah mendorong banyak orang rajin mengunjungi tempat-tempat peribadatan agar tidak dituduh sebagai anggota PKI. Sementara itu, kalangan pemuka agama, terutama Islam dan Kristen, menunjukkan gairahnya dalam penyebaran agama. Namun di balik itu ada pula kecenderungan retaknya hubungan antarpemeluk agama, bahkan tidak jarang berlanjut menjadi konflik yang menegangkan. Insiden yang terjadi pada waktu itu, misalnya di Ujung Pandang, sebuah gereja dirusak oleh orang Islam karena ada pemuka Kristen di kota itu yang menghina Nabi Muhammad. Di Aceh, sebuah gereja yang baru dibangun tidak diijinkan dibuka, karena masyarakat Aceh tidak memperkenankannya.[32]

Dalam suasana seperti itu Mohammad Dachlan mengadakan musyawarah antaragama pada 30 November 1967, yang bertujuan mencari jalan pemecahan agar peristiwa intoleransi antaragama itu tidak terulang. Tokoh-tokoh agama yang hadir dalam musyawarah tersebut antara lain: Dr. T.B. Simatupang, Ben Mang Reng Say, dan A.M. Tambunan mewakili golongan Kristen, sedangkan wakil dari golongan Islam K.H. Masykur, M.Natsir dan Dr. H.M.Rasyidi. K.H. Mohammad Dachlan sendiri, yang memimpin langsung musyawarah itu, menyampaikan pokok pikirannya agar propaganda agama tidak dilakukan dengan tujuan meningkatkan jumlah pemeluk masing-masing agama, melainkan semata-mata untuk memperdalam pemahaman serta pengamalan ajaran agama masing-masing. Penyebaran agama hendaknya tidak dilakukan pada komunitas yang jelas menganut agama tertentu, tetapi dilakukan di daerah yang penduduknya belum memeluk suatu agama.[33]

Di samping musyawarah yang mengarah pada upaya menciptakan kerukunan antarumat beragama tersebut, Dachlan juga berusaha menciptakan suasana damai dalam kehidupan intern umat beragama. Setidaknya, walaupun dia termasuk tokoh kuat NU, selaku Menteri Agama dia tidak menampilkan sikap primodialisme. Berbeda dengan pendahulunya yang cenderung

---

[32]*Menapak Jejak*, hal. 216.
[33]*Menapak Jejak*, hal. 276.

mengutamakan kelompoknya, Dachlan bersikap moderat dan mementingkan kelompok lain termasuk porsi kedudukan dalam jajaran Departemen Agama.

2. Memajukan Pendidikan Agama

   K.H. Mohammad Dachlan sangat peduli terhadap pendidikan umat Islam. Pada masanya, banyak dibangun madrasah. Dia juga mempelopori pembaruan sistem pendidikan pesantren dengan penyelenggaraan pendidikan formal di dalamnya. Dalam upaya memajukan pendidikan agama, pemenuhan sarana dan prasarananya lebih ditingkatkan. Untuk keperluan tenaga pendidik, tidak kurang dari 60.000 guru agama diangkat sebagai pegawai negeri pada masanya.[34]

3. Memprakarsai MTQ dan PTIQ

   Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) yang sampai sekarang merupakan kegiatan nasional Departemen Agama, pertama kalinya diselenggarakan atas prakarsa K.H. Mohammad Dachlan dan K.H. Ibrahim Hossen (kala itu Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hubungan Luar Negeri, Departemen Agama RI). MTQ tingkat Nasional pertama kali diselenggarakan pada 1968 di Ujungpandang. Lalu pada 1971, mereka berdua merintis Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ), sebuah perguruan tinggi yang secara khusus mengajarkan seni baca dan menghafal al-Qur'an serta mengkaji ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Kitab Suci ini.

4. Terjemah dan Tafsir al-Qur'an

   Pada masa Dachlan, terjemahan al-Qur'an dengan nama "Al-Qur'an dan Terjemahannya" berhasil diselesaikan dan diterbitkan pada 1968. Pada tahun yang sama dimulai penyusunan "Al-Qur'an dan Tafsirnya."

Setelah mengakhiri jabatannya sebagai Menteri Agama, Kiyai Dachlan kembali aktif di kepengurusan PBNU sebagai anggota Syuriah, di samping juga menduduki jabatan formal lainnya sebagai anggota DPA. Selain itu, bersama istrinya, Ny. Aisyah, dia pun aktif mengembangkan pendidikan Islam di Masjid Istiqlal, terutama lewat Sekolah Da'wah dan Kesenian Islam. Bersama Ibnu Sutowo, dia memajukan Kesenian Istiqlal dan pernah keliling Asia Tenggara dalam memperkenalkan kesenian Islam Indonesia.

---

[34]*Ensiklopedi Islam Indonesia*, jilid 2, hal. 765.

Pemikiran Keagamaan dan Kemasyarakatan

Telah disebutkan di atas, bahwa K.H. Mohammad Dachlan dikenal juga ahli dalam ilmu fiqh. Keahliannya ini selain karena ketekunannya membaca kitab-kitab fiqh, juga karena dia sangat *concern* terhadap permasalahan yang dihadapi umat Islam, terutama yang menyangkut perbedaan pendapat di antara mereka. Dari situlah kemudian dia mampu memunculkan gagasan-gagasan luas dan dapat bersikap moderat. Jadi, selain sebagai pemimpin yang pandai menentukan strategi dan kebijakan organisasi, pemikirannya dalam masalah-masalah keagamaan dan sosial merupakan sumbangan yang signifikan. Kedua bidang pemikiran tersebut akan dijelaskan di bawah untuk melengkapi biografi tokoh ini.

1. Keagamaan

Salah satu karya Dachlan yang berkenaan dengan pemikiran keagamaan adalah makalahnya berjudul "Peranan Idjtihad dan Qijas di dalam Islam adalah Inhaerent [sic.] dengan al-Qur'an sebagai Sumber Hukum."[35] Makalah ini ditulis atas permintaan Lembaga Penelitian Islam Pemerintah Pakistan untuk seminar ilmiah dalam rangka "Peringatan Turunnya al-Qur'an 14Abad," yang diselenggarakan pada 10-13 Februari 1968 di Rawalpindi. Dalam makalah tersebut Dachlan mengemukakan dalil-dalil al-Qur'an dan al-Hadits serta amal perbuatan para sahabat kenamaan yang menunjukkan bahwa ijtihad dan qiyas adalah salah satu sumber hukum sesudah kedua sumber utama.

Ijtihad dalam pandangan Dachlan ialah "*rabithah* (pertalian) antara hukum dan dalilnya yang *danni*"[36] Pendapat ini dia tegaskan sebagai kesimpulan dari pengertian dan fungsi ijtihad yang dirumuskan golongan mayoritas maupun minoritas ahli ushul fiqh, meskipun secara kontekstual dia lebih berpihak pada pendirian mayoritas. Menurutnya, tempat ijtihad bukan pada *nas* (dalil *qath'i*), tetapi tempatnya pada dalil *zhanni*, sedangkan qiyas dilakukan terhadap dalil-dalil *qath'i*. Oleh karena itu, ijtihad bukanlah qiyas

---

[35]K.H.M. Dachlan, *Peranan Idjtihad dan Qijas di dalam Islam adalah Inhaerent dengan Al-Qur'an sebagai Sumber Hukum*, (Djakarta: Departemen Agama, 1968).

[36]*Peranan Idjtihad*, hal. 13. Beliau menulis "danni", maksudnya ialah "zhanni", lawan dari "qath'i."

begitu pula sebaliknya. Qiyas adalah salah satu sumber hukum syara' sesudah al-Qur'an dan al-Hadits.[37]

Bagi Dachlan, pengertian ijtihad sebagai pengerahan segenap daya dalam menggali hukum dari sumbernya adalah identik dengan *istinbath*. Dengan mengutip kitab tafsir Fakhrurrazi jilid III, *istinbath* diartikan "mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya." Dalam kenyataan sejarah, hukum telah dihasilkan oleh sahabat pada masa Rasul (atas persetujuan Rasul), para sahabat setelah beliau wafat, dan mujtahidin pada generasi selanjutnya. Perbedaan ijtihad di antara mereka sesungghnya disebabkan perbedaan sistem *instinbath* yang dipergunakan dalam berijtihad. Hukum yang dikeluarkan dengan ijtihad itu kemudian terkenal dengan fiqh.[38] Dalam hal ini, Dachlan berpendirian bahwa ijtihad memainkan peranan penting dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Lafaz-lafaz al-Qur'an yang *dalalah*-nya *zhanniyah*.
b. Hadits-hadits *qauli* yang *dalalah* lafaznya *zhanniyah*.
   Pada (a) dan (b), seorang mujtahid, antara lain, disyaratkan mengetahui bahasa Arab secara mendalam.
c. Hikmah-hikmah dan kemaslahatannya yang dikandung sesuatu hukum, baik itu hukum *manshush* atau *mustanbath*. Dalam ijtihad bidang, seorang mujtahid tidak disyaratkan mengetahui bahasa Arab secara mendalam.[39]

Berdasarkan kriteria-kriteria di atas, Dachlan menegaskan bahwa hukum syar'i itu qadim, atau tidak diciptakan karena adanya sesuatu peristiwa, mengingat hukum syar'i itu muncul lebih dulu dari peristiwa, sehingga setiap peristiwa itu telah tersedia hukumnya. "Sebab dan *illah*" hanyalah memperkenalkan bahwa hukum itu adalah untuk peristiwa tersebut. Adapun bagi suatu peristiwa yang tidak terdapat nash hukumnya, maka kewajiban mujtahidlah mengeluarkan hukum dengan jalan *istinbath*.[40]

---

[37]*Peranan Idjtihad*, hal. 13.
[38]*Peranan Idjtihad*, hal. 23.
[39]*Peranan Idjtihad*, hal. 23.
[40]*Peranan Idjtihad*, hal. 24. Memperkuat pendapatnya, Dachlan merujuk ayat-ayat al-Qur'an, surat: al-An'am, al-Maidah 4, an-Nahl 89, dan at-Tin 8.

Masih bolehkan melakukan ijtihad, dan masih terbukakah pintu ijtihad itu? Dua pertanyaan ini merupakan sub topik selanjutnya yang dibahas K.H. Mohammad Dachlan. Menurutnya, di kalangan ahli ushul terdapat dua golongan yang berbeda pendapat mengenai masalah itu. Golongan pertama berpendirian bahwa ijtihad itu tetap terbuka, sedangkan golongan lain berpendirian bahwa ijtihad itu adalah suatu pekerjaan mujtahid dan baginya pintu ijtihad sudah tetutup dengan wafatnya para mujtahidin kenamaan.[41]

Dua kecenderungan ini ditengarai Dachlan dengan merujuk hasil Muktamar Lembaga Penelitian Islam al-Azhar, yang memutuskan bahwa:

a. Ijtihad *mutlak mustaqil* secara perorangan atau kolektif sudah tetutup pintunya.
b. Ijtihad *mutlak muntasib* secara perorangan sudah tertutup, tetapi terbuka bagi orang yang memenuhi syarat-syarat ijtihad jika dilakukan secara bersama.
c. Ijtihad di bidang *tarjih* secara perorangan masih tetap terbuka bagi yang memenuhi syarat-syarat ijtihad.
d. Masalah fiqh tidak dapat dilepaskan dari persoalan mazhab, karena mazhab adalah suatu sistem dari berijtihad.[42]

Sesuai dengan keputusan tersebut, Dachlan menyimpulkan bahwa bidang ijtihad dalam hal menciptakan norma dan sistem penggalian hukum sudah tertutup. Sedangkan ijtihad dalam hal penggalian hukum atau pentarjihan dan penelitian masih terbuka. Dachlan mencoba mempertemukan perbedaan para ahli ushul, sebagai berikut:

a. Golongan ahli ushul yang berpendirian bahwa telah terjadi kefakuman mujtahid, hendaklah ditafsirkan bahwa yang dimaksud mujtahid tersebut ialah *mujtahid mutlaq mustaqil* dan *mujtahid mutlaq muntasib*. Sebab, kedua derajat ijtihad itu sudah tidak mungkin dicapai umat Islam dewasa ini.
b. Golongan ahli ushul yang berpendirian bahwa umat Islam

---

[41]*Peranan Idjtihad*, hal. 25.
[42]*Peranan Idjtihad*, hal. 25.

tidak mungkin mengalami kefakuman mujtahid, hendaknya ditafsirkan sebagai mujtahid di bidang tarjih, perbandingan, dan penelitian, baik secara perorangan maupun kolektif, asalkan syarat-syarat ijtihad seperti ditetapkan dalam qaidah ilmu ushul terpenuhi.[43]

Selanjutnya, dalam bab II tulisannya itu, Dachlan menguraikan pengertian dan kedudukan *qiyas*. Secara definitif, qiyas diartikan "melahirkan hukum dari hukum." Qiyas dapat dilakukan kalau memenuhi empat syarat: hukum asal mempunyai *illah*, *illah*-nya tertentu, *illah* terdapat dalam hukum *furu'*, dan tidak ada *mani'* untuk menetapkan hukum asal pada furu'. Keempat syarat qiyas tersebut semuanya bersifat *zhanni*, karena ada kemungkinan perbedaan pendapat antarmujtahid dalam melihat hukum asal. Misalnya, sebagian mujtahid menganggapnya *ta'abbudi*, sementara yang lain tidak; sebagian menganggap hukum asal mempunyai *illah*, sebagian lain tidak; sebagian menganggap ada *mani'* untuk menetapkan hukum asal pada *furu'*, sebagian tidak.[44]

Namun begitu, Dachlan berpendirian bahwa qiyas dapat diberlakukan dan ada dasarnya dalam al-Qur'an. Ayat al-Qur'an yang menjadi pegangannya antara lain adalah an-Nisa:58 "...Taatilah Allah SWT dan taatilah Rasul dan ulil amri..." Berdasakan ayat ini, jika terjadi perselisihan antarulama mengenai hukum suatu hal yang tidak disebut dalam al-Qur'an, Sunnah dan ijma', hendaklah dikembalikan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Dengan kata lain, kembali kepada nash. Pengembalian sesuatu kepada nas itulah yang dinamakan qiyas.[45] Dengan demikian, menurut Dachlan, terdapat perintah agama untuk mengamalkan qiyas, sehingga tidak tepat bila dikatakan bahwa orang yang mengamalkan qiyas berarti beramal selain Kitabullah dan Sunnah Rasul. Kesimpulan tersebut dinyatakan setelah ia mengemukakan berbagai dalil dan keterangan yang memperkuat argumentasinya.

---

[43]*Peranan Idjtihad*, hal 27-28.
[44]*Peranan Idjtihad*, hal. 34-35.
[45]*Peranan Idjtihad*, hal. 35-36.

2. Kemasyarakatan

Buah pikiran K.H. Mohammad Dachlan mengenai kemasyarakatan cukup banyak dan tertuang dalam berbagai tulisan, terutama naskah pidato-pidatonya sewaktu menjabat Menteri Agama. Dalam kapasitasnya sebagai Menteri, dapat dipastikan bahwa dia lebih berorientasi pada upaya memotivasi masyarakat agar bergairah dalam kiprah mereka berbangsa dan bernegara. Dalam karyanya berjudul "Peranan Umat Islam dalam Pembangunan Bangsa dan Negara,"[46] Dachlan berkeinginan agar masyarakat Islam bisa selalu tampil sebagai pelopor serta pemeran dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Hal ini ditekankan karena umat Islam yang mayoritas di bumi pertiwi ini menjadikan segala sesuatu yang berkenaan dengan masalah-masalah kebangsaan dan kenegaraan terkait pula dengan kepentingan dan kehidupan umat.

Dachlan menekankan besarnya tugas yang harus dipikul umat Islam bagi kesuksesan pembangunan. Bercermin kepada sejarah, kegemilangan sikap dan tindakan umat di masa lampau telah ditunjukkan dalam perlawanan terhadap penjajah, antara lain dengan menggerakkan pendirian madrasah dan pondok pesantren, menolak kerja sama dengan penjajah, menolak ordonansi 1925, menolak penetrasi kebudayaan dengan politik isolasi, dan menolak ajakan-ajakan mengadakan milisi untuk mempertahankan pemerintah Hindia Belanda. Semua itu dilakukan semata-mata dalam rangka menanam dan memupuk semangat kebangsaan serta cinta kemerdekaan.[47]

Mohammad Dachlan menggaris bawahi kepeloporan para ulama. Menurutnya, kepeloporan mereka dalam rentetan usaha pembangunan bangsa dan negara adalah sesuai dengan sifat dan kodrat perjuangan masa silam, sehingga menafikan peranan mereka berarti mengingkari sejarah. Pada gilirannya, umat Islam (khususnya para ulama) dihadapkan pada tantangan dalam mengisi kemerdekaan dan melaksanakan pembangunan. Pembangunan yang mesti diwujudkan bukan hanya bersifat material tetapi juga spiritual. Pembangunan

---

[46]*Peranan Idjtihad*, hal. 47.

[47]Kyai H. Moh. Dachlan, "Peranan Umat Islam dalam Pembangunan Bangsa dan Negara," Pidato/ceramah Menteri Agama RI, pada Musyawarah Alim Ulama Ahlussunnah wal-Jama'ah di Jombang, Jawa Timur (Jakarta, 16 April 1971).

spiritual di negeri ini berbeda dengan di negara-negara sekuler yang hanya terbatas pada usaha-usaha memenuhi kebutuhan akal, rekreasi, kebudayaan, dan keamanan saja. Di negeri ini, pembangunan spiritual adalah pemenuhan semua hasrat rakyat dalam mengabdikan dirinya kepada Allah SWT. Hal ini sesuai dengan falsafah negara Pancasila, yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Implementasi sila ini secara kongkrit ialah kehidupan beragama yang dimanifestasikan dalam amal ibadah, sifat dan karakter kehidupan bangsa, dan ruh serta semangat yang tercermin dalam segala peraturan dan undang-undang yang berlaku.[48]

Pembangunan dalam bidang keagamaan, tegas Dachlan, bertujuan membuat rakyat Indonesia bukan saja menjadi umat beragama, tetapi yang lebih penting "menjadikan mereka umat yang sadar beragama, sadar beribadah, sadar dalam menjalankan perintah-perintah Allah SWT, dan menjauhi larangannya, berakhlak tinggi dan berbudi luhur," yang dimanifestasikan dalam tingkah laku dan tindak hidup sehari-hari.[49]

Zaman kini adalah zaman puncaknya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia sedang menguasai dan menggunakan kekuatan dan rahasia alam ini dengan hasil-hasil yang besar dan menakjubkan. Akan tetapi, menurut Dachlan, di tengah kemajuan seperti itu kehidupan rohaniah justru mengalami kemunduran yang cepat. Kebahagiaan di bidang spiritual tidak seimbang dengan kemajuan di bidang material, sehingga kehidupan manusia (individual maupun masyarakat) menjadi pincang. Apabila kepincangan tersebut terus berjalan, maka suatu waktu materialisme akan menggantikan Pancasila. Oleh karena itu para pemimpin agama yang merupakan teknokrat-teknokrat di bidang spiritual harus tampil dengan usaha-usaha kongkrit dan program-program yang jelas untuk memberikan konsumsi-konsumsi rohaniah yang seimbang dengan konsumsi-konsumsi jasmaniah.[50]

Mohammad Dachlan atas nama pemerintah pada waktu itu menginginkan agar umat Islam senantiasa memberikan andil dalam segala kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Setidaknya, ada sebelas butir masalah yang perlu dipikirkan dan dipecahkan umat

---

[48]"Peranan Umat Islam," hal. 3.
[49]"Peranan Umat Islam," hal. 6.
[50]"Peranan Umat Islam," hal. 7.

Islam, terutama para ulama, yakni:

1. Pandangan Islam mengenai Keluarga Berencana perlu dipertegas segi-segi hukumnya, dan diterangkan kepada seluruh lapisan masyarakat.
2. Masalah kesehatan rakyat perlu didukung hukum Islam yang berkenaan dengan ilmu-ilmu kesehatan moderen.
3. Kegiatan mendirikan masjid, langgar, madrasah dan pondok pesantren hendaknya sejalan dengan kegitan mendirikan klinik, rumah sakit dan rumah bersalin.
4. Komunikasi moderen untuk kepentingan dakwah dalam arti luas perlu ditingkatkan.
5. Masalah zakat yang pelaksanaannya belum menggembirakan, perlu dicarikan bentuk penyelenggaraan dan pengelolaannya.
6. Pemeliharaan yang intensif dan peningkatan sarana pendidikan agama, termasuk manajemen administrasinya.
7. Peningkatan pemeliharaan dan perbaikan rumah ibadah yang sehat.
8. Upaya memberantas kemiskinan.
9. Upaya memberantas demoralisasi dan hal-hal yang menyebabkannya.
10. Upaya mencegah dan menanggulangi segala bentuk kemaksiatan, seperti pelacuran dan perjudian.
11. Upaya memasyarakatkan atau memajukan suku-suku terasing.

Penutup

Pada akhir tulisan ini dapat disimpulkan bahwa K.H. Mohammad Dachlan, yang wafat pada tanggal 1 Februari 1977 di Jakarta, adalah seorang ulama, politikus, tokoh masyarakat, dan juga negarawan. Keunggulannya dalam berbagai bidang tersebut dilatarbelakangi penempaan dirinya dalam keluarga, pendidikan pesantren, dan masyarakat, yang semuanya sarat dengan nilai-nilai keagamaan. Aktivitasnya di organisasi yang tak pernah absen dan kepemimpinannya merupakan teladan bagi para pemimpin umat dan bangsa yang telah berhasil mengantarkan kemerdekaan Indonesia, dan mengisinya dengan berbagai program pembangunan. Segala langkah perjuangannya juga didukung pemikiran yang luas dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan.

Prof. Dr. A. Mukti Ali;
Modernisasi Politik-Keagamaan Orde Baru

Ali Munhanif

Di antara sekian banyak tokoh yang pernah menjabat Menteri Agama, Prof. Dr. A. Mukti Ali barangkali merupakan salah seorang yang menempati posisi khusus dalam sejarah kebijakan pemerintah Indonesia di bidang agama. Terlebih lagi bila dikaitkan dengan proses panjang modernisasi politik-keagamaan Orde Baru. Mukti Ali memegang jabatan Menteri Agama pada periode transisi pemerintahan yang penuh gejolak, saat Orde Baru tengah membangun basis legitimasi politik dalam masyarakat. Bagi kalangan yang dengan serius mengamati perjalanan Indonesia sebagai bangsa, periode tersebut sering dipandang sebagai masa "pancaroba" perpolitikan dan kebudayaan di Indonesia. Mukti Ali berhasil melewati masa-masa sulit itu dan, bahkan, memberi sumbangan yang tidak kecil bagi konsolidasi Orde Baru dalam menjaga keutuhan Indonesia sebagai bangsa.

Sebagai orang yang dipercaya memimpin Departemen Agama di awal dasawarsa 1970an, masa di mana Depag identik dengan aspirasi keagamaan Islam dan dikenal sensitif terhadap isu-isu modernisasi, Mukti Ali sebenarnya memikul tugas yang cu-

kup berat. Tugas itu secara singkat bisa digambarkan: mentransformasikan sikap dan pandangan keagamaan umat beragama Indonesia—Muslim khususnya—sedemikian rupa, sehingga melicinkan jalan bagi konsolidasi kekuasaan Orde Baru dan, untuk kemudian, mempersiapkan landasan bagi program-program modernisasi. Karena tantangan itu, Mukti Ali lalu mengadakan reorientasi kebijakan pemerintah dalam bidang politik-keagamaan. Pada periode kementeriannya, wacana keagamaan di Indonesia diwarnai reorientasi total hampir di seluruh aspek kehidupan masyarakat; mulai dari perumusan konsep negara moderen yang cocok bagi kultur keagamaan Indonesia, pembaharuan pemikiran, dialog antar-umat beragama, modernisasi lembaga keagamaan, hingga pembaruan kurikulum lembaga pendidikan agama.

Semua langkah itu, kalau ditilik dari perjalanan hidup Mukti Ali, bukanlah sesuatu yang terpisah dari kegelisahan keagamaan yang sudah lama dirasakan. Kebijakan-kebijakannya merefleksikan suatu titik dari proses panjang pergulatan seorang Muslim, dalam usaha menjawab berbagai persoalan sosial dan keagamaan di negerinya.

Pembentukan Kepribadian:
Masa Kecil, Sekolah dan Awal Kegiatan Politik

Di ujung timur dataran tinggi kapur utara yang tandus, ada sebuah kota kecil yang bernama Cepu. Kota yang di tengahnya membentang sungai Bengawan Solo ini menjadi pembatas bagian tengah dari Propinsi Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Selama masa pemerintahan kolonial, setidaknya hingga awal abad ke-20, Cepu pernah terkenal karena ladang minyaknya yang banyak dan produktif. Meskipun dewasa ini pemerintah masih mengelola beberapa sumur minyak yang masih bisa ditemukan di sana-sini, tingkat produktifitasnya sangat rendah. Tak heran, banyak ladang minyak yang terlantar dan, akhirnya, dikelola penduduk setempat secara kecil-kecilan. Membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam perjalanan darat ke arah barat dari Surabaya, atau sekitar 30 menit ke arah timur dari kota Blora, Cepu menandai suatu titik wilayah areal hutan jati yang luas, kering, diselingi sawah-sawah tanpa pengairan.

Di kota itulah Prof. Dr. A. Mukti Ali dilahirkan, pada 23 Agus-

tus 1923, dengan nama kecil: Boedjono.[1] Ia adalah anak kelima dari tujuh saudara. Ayahnya, Idris, atau Haji Abu Ali — nama yang digunakan setelah menunaikan haji — adalah seorang pedagang tembakau yang cukup sukses. Ia dikenal sebagai orang tua santri yang saleh dan dermawan, khususnya untuk mendanai kegiatan-kegiatan keagamaan di kota Cepu. Dengan demikian, Islam, dalam pengertian santri, merupakan tradisi yang turun temurun telah diwarisi keluarga Mukti Ali.

Meskipun tingkat pendidikan Abu Ali sangat rendah, diperolehnya hanya dari mengaji kitab di pesantren di Cepu, ia adalah orang tua yang dengan keras menyuruh anaknya untuk sekolah. Abu Ali mendatangkan guru *ngaji* untuk anak-anaknya ke rumah mengajarkan al-Qur'an dan ibadah. Di sinilah, Boedjono memperlihatkan sikap yang sungguh-sungguh untuk belajar. Pada usia 7 atau 8 tahun, Boedjono didaftarkan pada sekolah milik Belanda yang, belakangan pada 1941, menjadi HIS. Pada usia yang sama, ia juga terdaftar sebagai siswa madrasah diniyah di Cepu, yang kegiatan belajarnya berlangsung pada siang hari. Di kedua sekolah ini, Boedjono dikenal sebagai seorang siswa yang berprestasi dan bersahaja. Menurut teman-temannya waktu itu, selain ia memperlihatkan nilai mata pelajaran yang gemilang, Boedjono juga dipandang sebagai anak dari sebuah keluarga kaya yang bersikap biasa saja.

Delapan tahun kemudian, Boedjono menamatkan sekolah HIS dan mendapatkan sertifikat pegawai pemerintah Belanda *(Klein Ambtenar Examen)* di Cepu. Pada pertengahan 1940, Boedjono lalu dikirim ayahnya belajar di pondok Pesantren Termas, Kediri, sekitar 170 km dari rumahnya.[2] Tidak jelas mengapa Abu Ali lebih mengutamakan memasukkan anaknya ke pondok dari pada meneruskannya ke sekolah Belanda. Mukti Ali, dalam memoarnya, hanya menjelaskan,

---

[1]Abdurrahman, Burhanuddin Daya, Djam'annuri (ed.), *Agama dan Masyarakat; 70 Tahun H.A. Mukti Ali* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press), 1993. hal. 7. Sejauh ini, biografi paling lengkap tentang Mukti Ali adalah buku yang diterbitkan untuk memperingati ulang tahunnya ke 70 itu. Bahan-bahan mengenai riwayat hidup di sini, dengan demikian, banyak didasarkan pada buku tersebut, dan sejumlah wawancara.

[2]*Agama dan Masyarakat*, hal. 9.

> Bapak adalah seorang yang sangat *takdhim* kepada kiyai. Apalagi orang yang mengaku sebagai golongan sayyid. Malah, di masa akhir hidupnya, Bapak meninggalkan urusan dagangnya, tidak *ngurus* lagi urusan hidup duniawi, dan masuk ke perkumpulan tarekat Qadiriyah di Cepu. Mungkin dalam maksud inilah, bahwa bapak menginginakan anaknya mendalami agama, menjadi orang yang saleh.[3]

Dari pondok Pesantren Termas inilah, tahap lain dari perjalanan hidup Boedjono muda bermula. Ia diterima belajar di tingkat menengah di pondok pesantren ini, yang metode belajarnya menggunakan sistem *madrasi* — sistem sekolah dengan menggunakan kelas yang menyerupai sistem pendidikan Belanda. Saat itu, tidak banyak pesantren di Jawa yang menggunakan sistem belajar seperti itu. Kendatipun demikian, Boedjono tidak hanya belajar di sekolah pesantren, tetapi juga diwajibkan mengikuti kegiatan *ngaji* kitab, dengan sistem *sorogan* (bacaan) atau *bedongan* (diskusi). Materinya terdiri dari fiqh, hadits, tasawuf dan akhlak. Di masa-masa kemudian, Boedjono merenungkan bahwa, lewat pendidikan di pondok inilah ia di kemudian hari bisa mengapresiasi khazanah intelektual Islam klasik dan, akhirnya, membentuk luasnya pandangan keagamaannya.

Tetapi, Pesantren Termas bukan satu-satunya tempat pendidikan agamanya. Beberapa pesantren lain yang turut membentuk wawasan keagamaanya adalah Tebuireng, Rembang (yang secara khusus mengajarkan kitab-kitab yang berkaitan dengan ilmu hadits), Pesantren Lasem dan Padangan, Jawa Timur.[4] Boedjono melewatkan belajarnya di pesantren-pesantren itu bisanya dalam bentuk *'mondok'* beberapa bulan, yang diadakan pada bulan Ramadhan dan Syawal.

Kendatipun demikian, Pesantren Termas tetap menjadi yang terpenting dalam perkembangan kepribadian Boedjono. Ada dua pengalaman yang tak terlupakan yang mengubahnya menjadi seorang dengan etos keagamaan dan keilmuan yang tinggi.[5] *Pertama*, setelah tiga tahun 'nyantri' di Termas, suatu malam, KH. Abdul Hamid, memanggilnya dan mengatakan bahwa pengasuh

---

[3]Wawancara dengan Mukti Ali, 1 September 1997.
[4]*Agama dan Masyarakat*, hal. 11.
[5]*Agama dan Masyarakat*, hal. 12.

pesantren itu bermaksud mengangkatnya sebagai anak. Karena itu ia meminta agar Boedjono mengubah nama Jawanya dengan nama yang lebih Islam. Mukti Ali menceritakan pengalaman itu:

> Malam itu, Kiyai Hamid ingin meminta saya agar bersedia dipungut sebagai anak. Lalu, mengusulkan agar saya mengganti nama saya dengan Mukti Ali, karena itulah namanya sendiri sebelum ia naik haji ke Mekkah. Saya tentu terkejut, tetapi bangga juga, karena permintaan dari seorang kiyai seperti itu pasti ada maksud tertentu. Saya yakin bahwa itu adalah suatu kehormatan. Bagi saya, mengganti nama di kalangan masyarakat Jawa adalah biasa, seperti juga terjadi di keluarga saya. Tetapi, untuk menerima sebuah nama dari seorang kiyai besar seperti kiyai Hamid belum tentu dialami setiap orang. Bagi si penerima nama, hal itu merupakan tanggungjawab moral. Tetapi, hikmah juga.[6]

Boedjono dengan gembira menceritakan peristiwa itu kepada kedua orang tuanya sewaktu ia pulang ke rumah beberapa bulan kemudian. Ayah-ibunya menyambut baik, bahkan, dengan senang menambahkan nama keluarganya "Ali" agar ditaruh di belakang: Abdul Mukti Ali. Diiringi *selametan* dan upacara keagamaan di hadapan sanak-keluraga, semenjak tahun 1943, Boedjono secara resmi diganti menjadi Abdul Mukti Ali; Abdul Mukti diambil dari pemberian kiyai Hamid, dan Ali dari usulan orang tuanya.

Pengalaman kedua berkaitan dengan keputusannya untuk mengubur keinginannya aktif di perkumpulan tarekat. Tampaknya, keluarga Mukti Ali yang mempunyai tradisi keagamaan yang dekat-dekat dengan tasawuf (ayahnya dan kakak tertuanya adalah pengikut jama'ah tarekat Qadiriyah di Cepu) berpengaruh padanya untuk ikut aktif di pengajian tarekat Naqsyabandiyah, yang dipimpin KH. Hamid Dimyati, di Pondok Termas.[7] Setelah sekian lama mengamalkan ajaran tarekat itu, kiyai Dimyati tiba-tiba menasehatkan agar Mukti Ali meninggalkan amalan kegiatan tarekat.

> Tentu saya terkejut, dan kurang bisa menerima. Saya waktu itu begitu tertarik dengan kegiatan tarekat. Saya terkadang malah minta, supaya kiyai

---

[6]Wawancara dengan Mukti Ali, 1 September 1997.

[7]Wawancara dengan Mukti Ali, 24 Juli 1997. Mukti Ali sendiri pernah dimasukkan ke pesantren tarekat di Padangan, Tuban. Tetapi ia segera menghentikan amalan-amalan tarekat itu setelah mendengar nasehat Kiyai Dimyati.

memberi amalan-amalan tarekat. Tetapi, kenyataannya saya malah disuruh meninggalkan. Saya ingat persis kata-kata yang keluar dari Kiyai Hamid Dimyati: "Ini bukan duniamu. Kamu tidak ada bakat menjadi sufi, menjadi *mutasawwif*. Kalau kamu ingin memperdalam ilmu agama, coba baca *Milhaq al-Nadhar*-nya al-Ghazali. Dan saya sendiri yang akan mengajarmu." Saya lantas mencoba merenungkan kata-kata Kiyai Dimyati, eh... siapa tahu ada hikmahnya di masa depan. Akhirnya, saya hanya bersikap *sam'an wa ta'atan* [mendengar dan menerimanya].[8]

Dalam pertemuan dengan Kiyai Dimyati selanjutnya, perasaan sedihnya terobati ketika mendengar penjelasan tentang buku itu. Buku *Milhaq al-Nadhar*, Teori tentang Analisis, ternyata berisi tentang filsafat logika al-Ghazali. Dari situlah terbuka pikirannya untuk menjadikan buku itu sebagai bacaan *ngaji* tambahan, dari pada aktif di jama'ah tarekat.

Di tengah-tengah pergumulannya dengan pengalaman keagamaannya, selama di Termas juga, Mukti Ali dikenal sebagai seorang pemuda yang cakap dalam hal mengorganisasikan kegiatan politik. Ia menjadikan isu-isu politik yang sedang tumbuh waktu itu sebagai pemicu untuk kegiatan politiknya di pesantren: menyebarnya nasionalisme di awal 1945, masuknya Jepang, berdirinya Masyumi, terbentuknya tentara Hizbullah, dll, hanya contoh kecil yang bisa ditunjukkan.[9] Di Termas juga, Mukti Ali membentuk semacam kelompok kecil yang terdiri dari teman-teman dekatnya di mana ia bisa menyampaikan ide-ide politik. Di antara teman-temannya itu adalah dua orang putra Kiyai Hamid yang, di kemudian hari, tetap menjadi kolega dalam dunia politik.

Maka tidak mengherankan, pada tahun kelima sepanjang kehidupannya di Termas, yakni pada 1945, sebagaimana yang dialami hampir setiap pemuda pada akhir masa penjajahan Jepang, Mukti Ali dan beberapa temannya segera terlibat dalam "pergerakan"; sebuah istilah yang populer waktu itu untuk menggambarkan sikap perjuangan menentang penjajah. Pergerakan ini diikuti oleh para santri, pelajar sekolah, pegawai rendah, dan guru-guru agama yang berasal dari berbagi desa di Termas. Pada mulanya, pergerakan ini adalah gerakan anak-anak muda tanpa identitas politik yang jelas. Ia lebih merupakan gerakan politik sipil dalam

---

[8]Wawancara dengan Mukti Ali, 24 juli 1997.
[9]*Agama dan Masyarakat*, hal. 19.

hal tujuan dan karakternya, namun dengan semangat nasionalisme sebagai ideologinya. Mukti Ali sendiri, sebagai pemuda terkemuka di gerakan ini, mengatakan bahwa, pergerakan itu dimotivasi oleh komitmen terhadap perjuangan para kiyai, misalnya KH. Hasyim Asy'ari — dalam hal semangat keagamaan — dan komitmen terhadap pemimpin nasional mereka — dalam hal memperjuangkan kemerdekaan Hindia-Belanda.[10]

Tetapi, dalam perkembangannya, pergerakan ini kemudian berubah menjadi sebuah perkumpulan militer, tak lama setelah Masyumi mengambil alih kepemimpinan, dan diubah menjadi sayap militer Masyumi, Hizbullah distrik Termas. Mukti Ali dan teman-temannya tidak keberatan dengan langkah Masyumi untuk mengubah 'pergerakannya' menjadi barisan militer Hizbullah. Bahkan, Mukti Ali dengan senang ingin masuk secara resmi menjadi tentara. Apa yang dibayangkannya waktu itu, sebagaimana setiap pemuda di Indonesia di masa itu, adalah: berseragam tentara warna hijau atau abu-abu, berpeci pelet, mengenakan pangkat di pundak, dengan pistol di pinggang dan bersepatu lars.[11] Setelah itu, ia berkampanye di pesantren-pesantren lain di Kediri mengajak para santri bergabung dengan Hizbullah.

Karena itu, sebelum terjun ke medan tempur, Mukti Ali lantas pulang ke Cepu untuk minta restu dari kedua orang tuanya. Apa yang ia inginkan adalah kerelaan dan dorongan kepadanya untuk bertempur melawan Belanda, sebagaimana yang didapat teman-temannya. Sangat disesalkan Mukti Ali, ternyata orang tuanya tidak mengijinkan untuk masuk ke dalam dunia militer. "Saya mengirimmu ke Termas bukan untuk jadi tentara. Tetapi, untuk belajar, untuk jadi orang". Itulah kalimat yang keluar dari mulut ayahnya dan diucapkan dengan marah, sewaktu Mukti Ali mengemukakan niatnya ingin jadi tentara. Ibunya pun demikian. Dengan sedih ibunya mengatakan, bahwa dia tidak akan sanggup membayangkan anaknya yang paling disayang itu akan bertempur melawan Belanda, membawa bedil, tertembak, lalu berdarah, dan .... Menyadari kemarahan ini, Mukti Ali tidak bisa menolak keinginan ayah-ibunya. Sebagai anak yang kaya dengan pengalaman relijius,

---

[10]*Agama dan Masyarakat*, hal. 22.
[11]*Agama dan Masyarakat*, hal. 22.

Mukti Ali lalu mengubur niatnya untuk menjadi tentara, bergabung dengan Hizbullah. Meskipun demikian, ia tetap kembali ke Termas menjelaskan kepada teman-temannya, bukan untuk jadi tentara, tetapi aktif dalam berpolitik sebagai anggota Masyumi.[12]

Tahun berikutnya, Mukti Ali menamatkan — atau persisnya — berhenti 'mondok' di Termas. Perhatiannya pada dunia politik selama masa-masa pergerakan kemerdekaan Indonesia membuat karir politiknya terus berkembang. Pada 1946, ia terpilih sebagai anggota Dewan Wakil Rakyat untuk Kabupaten Blora, mewakili Masyumi. Di keanggotaannya sebagai wakil rakyat inilah wawasannya tentang masalah-masalah sosial dan politik umat Islam terbentuk. Masyarakat Muslim waktu itu, khususnya kalangan santri, di awal kemerdekaan Indonesia sangat terbelakang, dibandingkan dengan komunitas-komintas lain. Dan lebih memprihatinkan lagi, rasa curiga dan kekhawatiran orang Islam terhadap negara yang baru didirikan, dan keinginan mereka menegakkan negara yang berdasarkan Islam, semakin membentuknya sebagai seorang pribadi yang menaruh minat besar terhadap berbagai persoalan politik dan keagamaan kaum Muslimin.

Meskipun Mukti Ali sudah menjadi tokoh politik di tingkat daerah, ia tetap menaruh minat besar terhadap dunia akademik. Masa *ngaji* -nya semasa kecil, belajar di sekolah Belanda, dan pergulatan pemikirannya di Termas, semua mendorong keputusannya untuk mendaftar menjadi mahasiswa di Sekolah Tinggi Islam (STI) di Yogyakarta — kemudian berubah menjadi Universitas Islam Indonesia (UII) — di Yogyakarta, pada 1947. Mukti Ali diterima sebagai mahasiswa tingkat persiapan pada Fakultas Studi Agama di perguruan tinggi itu.[13]

Di sinilah, Mukti Ali bertemu dan, akhirnya, tertarik pada KH. Mas Mansur, seorang tokoh Muhammadiyah dan dosen yang paling dikagumi di STI. Mukti Ali terutama dibuat kagum dengan cara mengajar Kiyai Mas Mansur yang lebih banyak memasukkan wawasan-wawasan keagamaan baru. Ajaran-ajaran Islam yang ditafsirkan Kiyai Mas Mansur sedemikian berpengaruh pada Mukti

---

[12]*Agama dan Masyarakat*, hal. 25.
[13]*Agama dan Masyarakat*, hal. 26.

Ali, sehingga ia memberanikan diri untuk belajar secara pribadi dengannya. Ia lalu sering bertemu dengan Kiyai Mas Mansur di rumahnya, dan kemudian, minta supaya dijinkan untuk ikut aktif di Muhammadiyah di Yogyakarta. Dengan senang hati, Kiyai Mas Mansur lantas mengajak Mukti Ali di Muhammadiyah, dan hal ini, membawanya semakin dekat dengan organisasi modernis itu, meninggalkan latarbelakang dan afiliasi keluarganya yang tradisional di NU.[14]

Tetapi, sekali lagi, keasyikannya belajar di STI itu terhenti akibat kedatangan Belanda ke Yogyakarta yang, dalam perkembangan selanjutnya, berujung pada *clash* militer antara Indonesia dengan Belanda pada 1949. Terpanggil rasa patriotismenya, Mukti Ali langsung terjun ke dalam pertempuran sebagai anggota pasukan tentara Agkatan Perang Sabil (APS) di bawah pimpinan KH. Abdurrahman dari Kedungbanteng. Kali ini tanpa meminta restu orang tua. Salah seorang teman di medan tempur yang kelak masih menjalin persahabatan sewaktu ia menjadi dosen di IAIN Jakarta adalah Mr. Burhanuddin Harahap, Perdana Menteri Indonesia pada 1961.[15]

Bulan-bulan pertempuran militer di Yogyakarta itu sangat berpengaruh pada kehidupan Mukti Ali. Dirasakan dengan semangat yang berkobar, baik sebelum maupun ketika pecah perang, pertempuran itu akhirnya menjadi kilas balik dalam sejarah Indonesia, dengan kemerdekaannya. Tetapi, pada saat yang sama, pertempuran itu juga dilalui dengan penuh ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Perang juga melahirkan ketidakpastian dan ketidaktenteraman yang luar biasa. Inilah situasi yang, menurut penilaian Mukti Ali sendiri, membayangi pikiran dan perasaan para mahasiswa sepertinya. Hal itu terjadi karena minatnya ada-

---

[14]Wawancara dengan Mukti Ali, 1 September 1997. Kisah ini tidak terdapat dalam biografinya. Dan ia sendiri merasa tidak pernah secara resmi terdaftar sebagai anggota Muhammadiyah; hanya aktif, tetapi ia juga bukan anggota NU. Namun, ia sering ditokohkan orang-orang Muhammadiyah, khususnya jika muncul persoalan politik yang membutuhkan kalkulasi. Untuk diskusi mengenai biografi intelektual Mukti Ali, lihat, Ali Munhanif, "Islam and the Struggle for Religious Pluralism: A Reading of the Religious Thought of Mukti Ali," dalam *Studia Islamika*, Vol. 3 No. 1, 1996. hal. 111-127.

[15]*Agama dan Masyarakat* hal. 28.

lah ingin belajar, sebagaimana ia akan selalu patuh pada pesan ayahnya. Karenanya, setelah Yogyakarta diambil alih dan kedaulatan Pemerintah Republik Indonesia kembali diakui, Mukti Ali menerima tawaran orang tuanya untuk menunaikan ibadah haji dengan syarat: ia dijinkan untuk belajar di Mekkah atau Madinah selama beberapa tahun. Bersama adiknya, pada akhir Maret 1950, Mukti Ali berangkat ke Tanah Suci. Baginya, berangkat ke Arab Saudi dan menjadi "haji" hanyalah tiket untuk memenuhi minatnya yang besar terhadap ilmu.[16]

Dari Mekkah ke Karachi, lalu ke Montreal

Mukti Ali mendarat di Jeddah pada pertengahan tahun 1950, lalu meneruskan perjalanan ke Mekkah. Tidak banyak diceritakan tentang kota ini. Bagi Mukti Ali sendiri, Mekkah di tahun 1950an itu ibarat "desa besar" dihiasi dengan pola kehidupan masyarakat abad pertengahan. Orang-orang yang hidup di Mekkah juga tidak mempunyai tingkat pendidikan yang lebih baik dari umumnya masyarakat Indonesia. Tidak sampai satu tahun Mukti Ali tinggal di Mekkah setelah menunaikan haji, Mukti Ali memutuskan untuk pergi ke negara lain. Apalagi setelah, mendengar saran dari H. Imron Rosyadi, SH., Konsul Haji Indonesia waktu itu, ia semakin teguh untuk belajar ke tempat lain.[17] Imron Rosyadi mengatakan bahwa, saat itu tidak ada yang bisa diharapkan dari belajar di Mekkah, akibat situasi politik yang ditimbulkan oleh kerasnya kaum Wahabi di Arab. Mukti Ali lantas mempertimbangkan melanjutkan ke Kairo, Mesir. Tetapi akhirnya, ia memutuskan untuk pergi ke Karachi, Pakistan, lantaran menyadari bahwa di kota terakhir itu ada beberapa orang teman Imron Rosyadi yang diharapkan bisa membantu. Pada bulan berikutnya, setelah ia melepas adiknya kembali ke Indonesia, ia berangkat ke Pakistan dan tiba di Karachi pada musim semi 1951.

Dengan kemampuannya yang baik dalam bahasa Arab, Belanda, dan Inggris, Mukti Ali diterima di program sarjana muda di Fakultas Sastra Arab, Universitas Karachi. Ia mengambil program sejarah Islam sebagai bidang spesialisasi. Menyadari sistem bela-

---

[16]*Agama dan Masyarakat*, hal. 30.
[17]*Agama dan Masyarakat*, hal. 31.

jar yang sudah mapan di Karachi, Mukti Ali segera disibukkan dengan kegiatan belajar. Beberapa orang mahasiswa yang sama-sama belajar satu perkuliahan dengannya adalah Kurshid Ahmad (belakangan dikenal sebagai sarjana dengan aspirasi fundamentalisme di Pakistan), Aziz Ahmad (kelak menjadai juru bicara pemikiran neo-modernisme Islam). Sosialisasinya di Universitas Karachi juga membuatnya bisa berkenalan dengan sejumlah sarjana orientalis Barat yang menulis tentang Islam, yang kelak akhirnya bertemu kembali ketika ia belajar di McGill University, Kanada.

Setelah lima tahun, Mukti Ali menamatkan programnya di tingkat sarjana muda dan dilanjutkan program Ph.D. di Universitas Karachi. Ia merencanakan kembali ke tanah air. Di tengah mempersiapkan segala dokumen kepulangan itu, ketika Mukti Ali sedang mengunjungi Kedutaan Besar RI, ia menerima khabar dari orang kedutaan bahwa Anwar Harjono, mantan Sekjen Masyumi (sekarang ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia), melarangnya pulang dan memerintahkannya untuk meneruskan studi di Institute of Islamic Studies, McGill University, Montreal, Kanada.[18] Inilah berita yang akhirnya membuat Mukti Ali menunda kepulangannya ke Indonesia dan melanjutkan program belajar di Universitas McGill. Setelah dikonfirmasi bahwa dirinya telah terdaftar sebagai calon mahasiswa di McGill, ia segera meninggalkan Pakistan menuju Kanada. Ia tiba di Montreal pada Agustus 1955, dan segera memulai belajar di universitas itu dengan mengambil spesialisasi pada ilmu perbandingan agama.

Di Universitas McGill inilah, pemahaman Mukti Ali tentang Islam berubah secara fundamental. Ini terutama dihasilkan dari perkenalannya dengan metode studi agama-agama, dan pertemanan yang sangat dekat dengan profesor-profesor kajian Islam di universitas itu, khususnya Wilfred Cantwell Smith; seorang ahli Islam berkebangsaan Amerika dengan pemahaman yang sangat simpatik atas Islam.[19]

Dalam kaitan ini, Mukti Ali mengatakan bahwa ia benar-benar

---

[18]*Agama dan Masyarakat*, hal. 32. Selama di Karachi, Mukti Ali juga menjadi staf lokal Kedutaan RI.

[19]*Agama dan Masyarakat*, hal.34. Mukti Ali mengaku terkagum-kagum kepada Smith, baik dari segi intelektual, kepribadian, maupun pengalaman keagamaan.

dibuat terpikat oleh program kajian Islam di Universitas McGill itu yang diajarkan dengan pendekatan yang sistematis, rasional, dan — meminjam istilahnya sendiri — holistis; baik dari segi ajaran, sejarah maupun peradabannya. Di McGill juga, Mukti Ali mendapatkan, bahwa belajar Islam, atau agama apapun, mestinya diarahkan pada usaha bagaimana sebuah tradisi keagamaan itu bisa menjawab masalah-masalah masyarakat moderen. Atas dasar ini, ia menegaskan perlunya memperkenalan pendekatan yang empiris atas Islam sebagai jalan untuk menafsirkan ulang khazanah pemikiran Islam dalam konteks modernitas. Pendekatan atas Islam seperti itu — yang selama ini diabaikan oleh metode belajar tradisional seperti pesantren — akan membawa Islam dan umatnya bisa menerima, bahkan bersikap simpatik, terhadap wacana kemodernan. Misalnya, kebebasan intelektual, konsep kenegaraan, hak-hak wanita dan dialog antar-umat beragama.

Hal terpenting yang harus dicatat adalah perkembangan intelektual dan kesadaran keagamaan Mukti Ali ketika ia tinggal, belajar, dan bersosialisasi di McGill. Adalah profesor pembimbingnya, WC. Smith, yang mengantarkannya pada perhatiannya yang sangat besar terhadap problem dialog antarumat beragama.[20] Semenjak kedatangannya ke Montreal, hingga waktu ketika ia menamatkan studinya, Mukti Ali terus menerus menunjukkan kekaguman yang dalam kepada profesornya itu. Ia menulis dalam memoarnya:

> Ketika saya tiba di Kanada, saya kaget karena Prof. Smith sendiri, ditemani dua orang mahasiswa, yang menjemput saya di lapangan udara. Dia bilang pada saya, "*Welcome*, Mr. Ali!" Saya bertanya-tanya dalam hati, mengapa Prof. Smith sendiri yang pergi ke lapangan udara, hanya untuk menjemput saya?

Kemudian, kekagumannya terus tumbuh sewaktu WC. Smith memperkenalkannya kepada suatu pendekatan baru dalam studi agama, yakni pendekatan perbandingan. Ditambah lagi, cara mengajar WC. Smith yang begitu sistematis dan komprehensif seakan-akan menghilangkan kritisisme Mukti Ali.

---

[20]Wawancara dengan Mukti Ali, 1 September 1997.

> Sebelum pergi ke Kanada, saya tidak tahu sama sekali tentang Ilmu Perbandingan Agama. Spesialisasi saya di Karachi adalah Sejarah Islam. Karenanya, walaupun di McGill saya belajar dengan banyak profesor, seperti Niyazi Berkes dari Turki, William Bugli dari Inggris, Bahy dari Mesir, saya lebih banyak tertarik dengan kuliah dengan Prof. Smith. Saya tidak tahu kenapa. Ada alasannya, tentu saja. Pertama adalah cara mengajarnya sangat bagus dan menguasai; kedua, saya menyukai metode analisa yang dipakai...[21]

Kemudian ia melanjutkan:

> Yang terpenting dari semua itu adalah, Prof. Smith memperkenalkan kepada saya suatu pendekatan baru dalam studi Islam. Ia menggunakan analisa perbandingan dalam kajian agama-agama, yaitu, mencoba melihat suatu fenomena keagamaan dari seluruh aspeknya. Kalau boleh saya menyebut, pendekatan itu adalah "pendekatan holistik" terhadap agama. Suatu pendekatan yang banyak mempengaruhi jalan pikiran saya, atau bahkan dalam konteks yang lebih luas, mengubah sikap saya dalam memahami hidup manusia.[22]

Melihat perubahan dirinya dalam kisah terakhir ini, dengan demikian, perhatian Mukti Ali terhadap problem masalah kerukunan umat beragama sebenarnya bisa dinilai sebagai sebuah transformasi religio-intelektual dalam mana ia menemukan jawaban atas pergulatan-pergulatan pribadi selama ini, yakni interaksi antar umat beragama di Indonesia. Proses pergulatan itu berakhir dengan pertemuannya dengan WC. Smith, yang memberinya suatu horison baru dalam memandang kehidupan agama.

Dengan demikian, WC. Smith bukan hanya sebuah sumber inspirasi intelektual, tetapi juga seorang yang ide dan perjalanan intelektualnya berbagi semangat dengannya. Atas kenyataan itulah, Mukti Ali di kemudian hari dikenal sebagai sarjana Muslim yang selama hidupnya tidak pernah lelah memperkenalkan kepada masyarakat luas, terutama mahasiswa, perlunya belajar ilmu perbandingan agama. Dan lebih dari itu, sewaktu ia menjadi Menteri Agama dan, dengan begitu, berkesempatan untuk menerapkan ilmu itu dalam kebijakan publik, Mukti Ali menjadikan dialog antarumat beragama sebagai kebijakan utama di Departemen Agama.

---

[21]Wawancara dengan Mukti Ali, 1 September 1997.
[22]Wawancara dengan Mukti Ali, 1 September 1997.

Mukti Ali menamatkan program studinya di Institute for Islamic Studies, McGill University, pada 1957. Ia memperoleh gelar Master of Arts dengan tesis yang berjudul, *A Bibliographical Study of Muhammadiyah Movement in Indonesia.* Pada pertengahan tahun 1957, Mukti Ali kembali ke Indonesia. Seminggu setalah tiba di tanah air dan bertemu keluarga di Cepu, bapaknya, Abu Ali, meninggal dunia. Kematian yang begitu cepat itu agaknya mengisyaratkan kepergian yang menunggu kedatangan puteranya, Mukti Ali, yang sudah tujuh tahun meninggalkan tanah air. Tak lama setelah itu, Mukti Ali langsung meneguhkan diri pergi ke Jakarta, dengan harapan bisa mengamalkan ilmu di sebuah lembaga pendidikan.

Menuju Kursi Kementerian

Mukti Ali dilantik menjadi Menteri Agama beberapa bulan setelah Pemilu, pada 11 September 1971. Ia menggantikan KH. Muhammad Dachlan, Menteri Agama dari NU pada Kabinet Pembangunan I 1968, yang belum habis masa jabatannya. Tidak banyak yang diketahui, mengapa pergantian pimpinan di Departemen Agama itu terkesan begitu mendadak. Beberapa analisis menyatakan, ditunjuknya Mukti Ali untuk memimpin Departemen Agama itu dimaksudkan sebagai langkah Orde Baru untuk mengadakan restrukturisasi dan reorientasi kebijakan di departemen tersebut. Dengan keahliannya dalam bidang ilmu-ilmu agama, dan keaktifannya di berbagai forum dialog antarumat beragama, Mukti Ali dianggap sebagai orang yang paling kompeten menjalankan maksud tersebut. Lalu, pada 28 Maret 1973, setahun setelah berlangsungnya Pemilu pertama Orde Baru, ia kembali dikukuhkan sebagai Menteri Agama bersama menteri-menteri lain dalam Kabinet Pembangunan II.[23]

Karir politiknya justru tidak diawali dari kegiatan berpolitik, tetapi dari dunia akademik. Sekembalinya dari belajar di Institute of Islamic Studies, McGill University, Montreal, Kanada, pada 1957, Mukti Ali dipercaya untuk mengajar di Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Jakarta, dan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri

---

[23]Untuk hubungan Mukti Ali dan Orde Baru, lihat, Munhanif, "Islam and the Struggle".

(PTAIN), di Yogyakarta, yang keduanya kemudian menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Ini semua berkat pertemuannya dengan, KH. Fakih Usman, yang baru saja mengakhiri jabatannya sebagai Menteri Agama, lalu ditugasi memimpin Biro Administrasi Departemen. Saat itu, beberapa minggu setelah tiba di Jakarta dan menyaksikan keadaan yang tidak menentu akibat krisis Demokrasi Parlementer 1957, Mukti Ali lalu memberanikan diri bertemu dengan KH. Fakih Usman. Tidak sulit baginya untuk mendapatkan ijin bertemu mantan menteri, mengingat posisinya sebagai seorang sarjana yang baru saja menamatkan studinya di salah satu perguruan tinggi di Barat. Mukti Ali lantas mengungkapkan keinginannya bahwa, setelah sekian lama belajar, ia ingin mengajar di salah satu perguruan tinggi. Dengan cepat KH. Fakih Usman menjawab, "mengapa tidak mulai dengan bekerja di sini. Setelah itu, saya sendiri yang nanti akan mengaturnya. Departemen Agama sudah membuka Perguruan Tinggi."[24] Setelah dua atau tiga bulan menjadi tenaga administrasi di Departemen, mulailah ia mengajar di IAIN Jakarta. Pada tahun itu juga, Mukti Ali menikah dengan As'adah, seorang gadis yang dikenalnya lewat KH. Fakih Usman.

Sejak awal mengajar di IAIN, Mukti Ali sendiri memilih mengajarkan ilmu perbandingan agama. Bagi masyarakat Muslim di Indonesia hingga 1950an, mempelajari ilmu ini adalah suatu fenomena baru. Bahkan di lingkungan masyarakat yang mempunyai latar pendidikan tinggi sekalipun. Sehingga, tugas utamanya bukan sekedar mengajarkan suatu disiplin, tetapi sekaligus memperkenalkannya. Mukti Ali berhasil merintis dikenalnya ilmu itu dan, pada akhirnya, menumbuhkan gairah besar di kalangan mahasiswa IAIN untuk memperdalam pengetahuan dalam ilmu ini. Untuk alasan inilah, sebuah program studi dibuka di IAIN Jakarta dan Yogyakarta pada 1960, yang diberi nama program Jurusan Perbandingan Agama. Mukti Ali segera ditunjuk Departemen Agama untuk memimpin program itu dan merumuskan kurikulumnya. Kesetiaannya pada disiplin yang dirintisnya itulah yang kemudian membuat banyak orang

---

[24]*Agama dan Masyarakat*, hal. 34.

menjulukinya sebagai "Bapak Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia". Meskipun menurut dia, julukan itu dirasakan terlalu berlebihan.

Pada awal 1963, ia mulai menetap di Yogyakarta. Karena minatnya pada dunia akademik ini pula, dia berjumpa, berkenalan dan merelakan rumahnya dijadikan tempat berkumpul bagi sekelompok anak muda dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang ingin membawa angin segar dalam pemikiran keagamaan Islam. Ini terutama diilhami kenyataan bahwa, setelah kegagalan PKI 1965 yang juga dirasakan orang di Yogyakarta, banyak anak muda mendambakan adanya pemikiran baru tentang Islam, yang tidak melulu bernada politik. Mereka lantas bergabung dengan Mukti Ali untuk membentuk sebuah—yang mereka sebut—*limited group*, untuk berdiskusi masalah-masalah agama. Anak-anak muda itu menobatkan Mukti Ali sebagai "bapak pelindung" bagi gerakan mereka yang kelak pada awal tahun 1971 muncul sebagai Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam. Setiap Jum'at malam, anak muda itu berkumpul, berdiskusi dan berdialog tentang masalah-masalah keagamaan. Beberapa orang yang terlibat dalam gerakan pembaharuan itu adalah Dawam Rahardjo, Ahmad Wahib (alm.), Djohan Effendi, Wajiz Anwar (alm.), Syu'bah Asa. Mereka mengundang Nurcholish Madjid, Utomo Dananjaya atau WS Rendra, tak jarang pula orang-orang non-Muslim, untuk berdiskusi di rumah Mukti Ali.[25] Namun demikian, Mukti Ali—seperti yang diakuinya sendiri—tetap tidak ingin disebut sebagai "inspirator bagi munculnya gerakan pembaharuan itu."

Pergumulan di dunia akademik juga menempatkan Mukti Ali pada posisi lain di lingkungan pendidikan tinggi. Sebelum menduduki kursi Menteri Agama, ia adalah dosen di Fakultas Ushuluddin, IAIN Sunan Kalijaga. Di lembaga pendidikan agama tinggi itu ia pernah memangku jabatan Pembantu Rektor III bidang urusan publik tahun 1964, dari situ dia dipercayai menjabat sebagai Pembantu Rektor I bidang akademik, 1968. Kelak ketika baru saja sebulan menjabat menteri, pada Oktober 1971, dia dikukuhkan sebagai guru besar ilmu agama di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakar-

---

[25]*Agama dan Masyarakat*, hal. 37. Lihat juga, Ismet Natsir dalam pengantarnya untuk buku, Ahmad Wahib, *Pergolakan Pemikiran Islam*, (Jakarta: LP3ES, 1983).

ta. Mukti Ali juga dikenal sebagai cendekiawan Muslim terkemuka dengan karya tulis yang cukup banyak, sekitar 32 judul buku. Di antara yang paling populer adalah *Pengantar Ilmu Perbandingan Agama* (1959 dan 1987), *Pemikiran Keagamaan di Dunia Islam* (1990), *Masalah-masalah Keagamaan Dewasa ini*, (1977), *Mengenal Muslim Bilali dan Muhajir di Amerika* (1993) dan *Agama dan Pembangunan di Indonesia* (1979); sembilan jilid buku yang ditulis selama periode kementeriannya.

Orang mungkin bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang seperti Mukti Ali yang dikenal sebagai akademisi, cendekiawan dan ahli ilmu agama dipercaya menjadi Menteri Agama? Bukankah jabatan menteri adalah jabatan politis, yang mensyaratkan pengalaman-pengalaman politik? Bahkan, mengapa dia ditugasi memimpin Departemen Agama di saat Orde Baru menghadapi berbagai persoalan, khususnya yang berkaitan dengan Islam? Jawabannya terletak pada kultur politik Orde Baru yang lebih mengutamakan tokoh-tokoh dengan kecakapan teknokratis untuk memimpin suatu departemen, dari pada tokoh-tokoh yang aktif di arena politik.

Pada masa-masa awal konsolidasi kekuasaan Orde Baru, jabatan-jabatan struktural yang berhubungan dengan kebijakan strategis banyak diserahkan kepada golongan teknokrat: yakni, golongan terdidik yang memiliki keahlian akademik di bidang tertentu, dan dengan keahliannya itu mereka menguasai kebijakan publik.[26] Hampir seluruh pos strategis pada Kabinet Pembangunan II diisi kaum teknokrat, meskipun pemegang pusat kekuasaan yang sebenarnya tetap ABRI — Angkatan Darat. Pada masa ini, teknokrat yang berasal dari Universitas Indonesia, khususnya yang telah menamatkan studinya di Universitas Berkeley, menguasai hampir seluruh instansi pemerintah yang berhubungan dengan kebijakan strategis Orde Baru. Dipilihnya Mukti Ali untuk memimpin Departemen Agama, pada batas-batas tertentu, juga tidak bisa lepas dari kerangka kultur politik teknokrasi tersebut. Keahliannya dalam ilmu agama, ketokohannya sebagai intelektual Muslim, dan perhatiannya pada dialog antarumat beragama, barangkali bisa

---

[26]Untuk diskusi mengenai teknokrasi dalam politi, lihat Ignas Kleden, "Politik Teknokrasi", dalam *Prisma*, No. 3 tahun 1983.

dijadikan sebagai beberapa alasan dipercayainya memimpin Departemen Agama.

Namun demikian, sebagaimana layaknya perjalanan seorang tokoh menuju puncak kekuasaan, ada kisah lain di balik pengangkatan Mukti Ali sebagai Menteri Agama. Kisah itu, antara lain, bisa ditelusuri dari usaha pemerintah Orde Baru — dalam hal ini ABRI dan Golongan Karya — untuk mengakhiri pengaruh partai-partai politik pada lembaga atau instansi-instansi pemerintah. Mungkin karena warisan dari kecenderungan politik yang berkembang pada Orde Lama, dari awal kebangkitan Orde Baru hingga tahun 1970an itu, hampir semua departemen dijadikan tempat untuk melindungi kepentingan partai-partai politik yang ada. Pada masa itu, Departemen Agama sangat didominasi kepentingan-kepentingan politis NU.[27] Partai ini menguasai hampir semua posisi penting, dan menentukan kebijakan-kebijakan yang dibuat Departemen Agama. Melalui Menterinya, KH. Mohammad Dachlan, Departemen Agama diatur sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah jawatan pemerintah yang secara politis berperan sebagai penopang terlaksananya agenda politik NU. Hal itu terutama tampak dari berbagai kebijakan yang — jika dilihat dari upaya konsolidasi politik pemerintah waktu itu — tidak mendasarkan pada agenda-agenda pemerintah Orde Baru, melainkan pada kepentingan politik partai.

Boleh dikatakan, sebelum tahun 1971 itu, Departemen Agama merupakan salah satu departemen terburuk jika dilihat dari segi sumberdaya kepemimpinannnya. Dan akibat besarnya pengaruh Partai NU itu, usaha untuk mengintegrasikan Departemen Agama ke dalam unit kekuasaan Orde Baru, dan dengan begitu, menjalankan kebijakan pembangunan bagi umat Islam Indonesia, selalu menemui jalan buntu. Bahkan, 'kampanye' besar-besaran yang dilakukan Orde Baru sebelum Pemilu 1971 untuk mengkooptasi seluruh departemen ke dalam barisan pendukung Golkar, tidak banyak mengubah orientasi ideologis pimpinan Departemen Aga-

---

[27]Ini terjadi semenjak kejatuhan Orde Lama dan berpuncak pada waktu menjelang Mukti Ali memimpin Departemen Agama. Untuk diskusi lebih lanjut, lihat, Allan A. Samson, "Islam and Politics in Indonesia" (disertasi tak diterbitkan pada University of California, Berkeley, 1972), hal. 297-299.

ma. Upaya itu hanya membantu tumbuhnya sekelompok kecil orang, sebagian besar adalah para akademisi, yang mempercayakan aspirasinya ke Golkar. Menteri Agama sendiri, KH. Mohammad Dachlan, tetap saja berperan sebagai instrumen politik untuk melindungi kepentingan-kepentingan NU. Dan akibatnya, nepotisme partai menggejala di hampir seluruh jenjang dan jajaran Departemen Agama.[28]

Layaknya sebuah lembaga nepotis di mana pun, setiap kali Departemen Agama mengadakan restrukturisasi atau mutasi pimpinan lembaga-lembaga yang ada di bawahnya — seperti kantor peradilan agama, lembaga penelitian, atau IAIN, upaya melindungi kepentingan NU biasanya merupakan pertimbangan utama. Karena itu, evaluasi yang dilakukan biasanya bukan berdasarkan pada penilaian yang obyektif atas calon yang bersangkutan, melainkan pada kedekatan dengan pimpinan NU. Departemen, misalnya, pada akhir tahun 1969 mengubah struktur pimpinan akademis dan aparat administratif IAIN dengan mengangkat beberapa tokoh NU menjadi rektor, pembantu rektor, dekan atau yang lain. Restrukturisasi pejabat di lingkungan kantor peradilan agama juga tidak jauh berbeda, yang dipilih umumnya yang mempunyai hubungan dekat dengan Partai NU. Akibatnya, sejumlah orang di Departemen yang dipandang tidak memiliki afiliasi politik dengan NU terdepak dari posisi mereka dan, dengan sendirinya, menganggur dalam keadaan yang tidak menentu. Di antara orang-orang yang menjadi korban restrukturisasi itu adalah Dr. Harun Nasution (sekarang Direktur Paska-Sarjana IAIN Jakarta), Dr. Muljanto Sumardi (dosen IAIN Jakarta, sekarang ketua HIPPIS), Prof. Mr. Soenarjo (waktu itu Rektor IAIN Jakarta), dan beberapa orang tokoh yang secara umum berasal dari keluarga Masyumi.[29]

Bagi Orde Baru, keberadaan KH. Mohammad Dachlan dan pendukungnya secara jelas menjadi ganjalan bagi upaya kooptasi politik Departemen Agama ke dalam barisan pendukung Golkar. Karena itu, salah satu cara yang dimungkinkan adalah mencari

---

[28]Lihat B.J. Bolland, *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*, (The Hague: Martinus Nijhoff, 1971) hal. 267-7.

[29]Wawancara dengan Muljanto Sumardi, Desember 1995.

pengganti Menteri Agama dan, dari situ, memutus hubungan politik Departemen Agama dari NU. Pada saat yang sama, pada Januari 1970, orang-orang yang menjadi korban dari kebijakan restrukturisasi tadi mendirikan forum pegawai bernama Korps Karyawan (Kokar) Departemen Agama; sebuah forum yang kelak memainkan peran kunci *(king maker)* bagi jalan Mukti Ali menuju kursi kementeriannya.[30]

Melalui loby informal antara Muljanto Sumardi, tokoh utama Kokar, dengan beberapa kenalannya di Center for Strategic and International Studies (CSIS), di Tanahabang, Kokar kemudian secara resmi disahkan seorang tokoh utama Golkar waktu itu, Soenawar Sukowati, di Ciputat pada Pebruari 1970. Meskipun Departemen Agama berusaha keras menghalang-halangi berdirinya Kokar, misalnya dengan mengganggu jalannya peresmian di Ciputat itu, keberadaan dan peran politiknya dalam melakukan kontrol terhadap gerak politik NU di Departemen Agama sangat berhasil; mungkin karena patronase politik yang diperoleh dari CSIS. Muljanto Sumardi menceritakan kembali pengalamannya ketika ia dan kawan-kawannya berjuang untuk tujuan tersebut:

> Kita [Korps Karyawan] sadar benar bahwa, keadaannya begitu serba sulit. Untuk menentang kebijakan restrukturisasi di IAIN itu, tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan kecuali bekerja sama dengan pusat kekuasaan *(power center)* Orde Baru. Pada waktu itu, di tahun 1969, kalau kita sebut pusat kekuasaan ya maksudnya CSIS atau Kelompok Tanahabang, karena kantornya di Jl. Tanahabang. Di Korps Karyawan, kita mempunyai pak Narjo, Rektor IAIN, yang kebetulan berkawan dekat dengan pak Sumiskun. Lewat kontak personal dengan pak Sumiskun itu, kita akhirnya berhasil bertemu dengan pak Ali Moertopo dan pak Soedjono Humardani.[31]

Lewat berbagai pertemuan yang berliku-liku, dan langkah politik yang diam-diam di kalangan pegawai yang dikecewakan, selanjutnya sebuah rencana politik terhadap Departemen Agama disusun:

---

[30]Muljanto menceritakan bahwa desain organisasi forum itu sangat sederhana. Hanya beberapa orang yang aktif, dan anggotanya hanya puluhan saja. Tetapi, karena organisasi itu muncul dalam situasi seperti itu, Kokar seolah-olah menjadi besar. Versi yang lebih lengkap, lihat, Munhanif, "Islam and the Struggle".

[31]Wawancara dengan Muljanto, Desember 1995.

> Di salah satu pertemuan di rumah pak Moer, kira-kira pertemuan kedua atau ketiga, kita ditanya: 'apa yang bisa dibantu untuk saudara'. Kemudian kita jelaskan keprihatinan kita terhadap kondisi Departemen waktu itu. Dan kita tegaskan pula bahwa, kita menghendaki pergantian pimpinan Departemen Agama, karena Menteri yang saat itu menjabat sangat memihak kepada kepentingan NU. Kita ceritakan juga pengalaman kita di IAIN Jakarta, bagaimana tokoh-tokoh NU menekan orang-orang yang dianggap tidak segaris. Kita sungguh-sungguh terkejut, bahwa Orde Baru sendiri, dalam hal ini CSIS, ternyata mempunyai *concern* yang sama: yakni, ingin menjadikan Departemen Agama sebagai salah satu departemen yang berada di bawah Golkar. Saya ingat betul pak Moer bilang, 'sebenarnya kita ingin melakukan ini setelah Pemilu. Tetapi, setelah mendengar cerita saudara, baiklah kita kerjakan sekarang saja.' Dari sini saya sadar, kita rupanya mempunyai agenda yang sama, dalam arti bahwa, harus ada menteri baru untuk Departemen Agama.[32]

Bertemunya dua kepentingan itulah, mendorong terjadinya kerjasama antara CSIS dengan Kokar untuk mengadakan restrukturisasi total di Departemen Agama, sesuai dengan rencana dan harapan Orde Baru.

Pada Agustus 1970, diadakan pertemuan antara Kokar, Ali Moertopo dan Soedjono Humardani, di Pacet, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan itu untuk mencari figur yang tepat yang akan ditempatkan sebagai Menteri Agama. Empat nama calon muncul: Kafrawi Ridwan, Anton Timur Jaelani, Bahrum Rangkuti dan Mukti Ali. Setelah diskusi panjang dan melelahkan berkenaan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing calon itu, baik CSIS maupun Kokar akhirnya sepakat untuk memilih Mukti Ali sebagai orang yang tepat untuk menempati posisi menteri. Muljanto Sumardi menggambarkan, tampilnya Mukti Ali itu sebagai pilihan dilematis di antara sekian kemungkinan buruk yang harus diambil untuk mengganti KH. Mohammad Dachlan. "Kita sendiri tidak banyak tahu Mukti Ali. Yang terpenting, pertama-tama, Mukti Ali bukan tokoh NU. Malah sering ditokohkan sebagai orang Muhammadiyah. Dia dikenal ahli ilmu agama, dan menyokong gerakan pembaharuan anak-anak muda. Dia juga terlibat aktif dalam

---

[32]Wawancara dengan Muljanto, Desember 1995.

kegiatan dialog antarumat beragama," kata Muljanto.[33] Presiden Soeharto menyetujui usulan yang diajukan CSIS, dengan harapan bahwa, Mukti Ali akan melakukan reorientasi kebijakan-kebijakan agama di Departemen Agama, sejalan dengan strategi modernisasi politik Orde Baru.

Lalu, pada suatu hari di awal September 1971, baru saja tiba dari Jakarta untuk menyampaikan makalah seminar di Gothe Institute tentang "Religion and Development", Mukti Ali kedatangan seorang tamu di rumahnya, Kol. Ery Supardjan, Komandan Korem Yogyakarta. Itulah hari yang tak mungkin terlupakan selama hidupnya. Tidak banyak yang mereka bicarakan. Kol. Ery sendiri hanya menyampaikan pesan penting, "Mukti Ali harus segera pergi ke Jakarta menghadap Presiden." Tak jelas apa keperluannya. Sore itu juga, Mukti Ali bertolak ke Jakarta dengan kereta api. Sesampainya di stasiun Gambir, sepasukan tentara berseragam menjemputnya, lalu dibawa ke kediaman Soedjono Humardani. Malamnya, ditemani Soedjono dan Ali Moertopo, Mukti Ali diterima Presiden di Jl. Cendana. Sama sekali tidak terpikir olehnya, bahwa masalah yang ditanyakan adalah menyangkut kesiapannya diangkat menjadi Menteri Agama. Terkejut tentu saja. Tetapi, Mukti Ali adalah pribadi yang berhasil menguasai kekakuan ini. Setelah menyatakan kesediaannya, Mukti Ali lantas dipesan Presiden agar dengan baik-baik mengajak masyarakat—dari seluruh komunitas beragama—di Indonesia, agar mulai membangun. "Pembangunan, itulah kata yang berulang kali dipesankan Presiden kepada saya," ujar Mukti Ali mengenang.[34] Paginya ia kembali ke Yogyakarta dan hari-hari berlangsung biasa.

Mukti Ali datang kembali ke Jakarta pada 11 September 1971. Kali ini bersama keluarga, karena hari itulah hari pelantikannya sebagai orang nomor satu di Departemen Agama. Bertempat tinggal di rumah dinas menteri di Kebayoran Baru, berkantor di Jl. MH. Thamrin, mulailah ia bergulat dengan persoalan-persoalan bangsa, dengan berbagai keruwetannya.

---

[33]Wawancara dengan Muljanto, Agustus 1997. Kafrawi sebenarnya menolak, dengan alasan situasinya sangat keras. Anton Timur tidak disetujui ABRI, dan Bahrum kurang dikenal sebagai tokoh intelektual.

[34]Wawancara dengan Mukti Ali, September 1997.

Dari Kursi Kementerian:
Memperjuangkan Aspirasi keagamaan

Ketika Mukti Ali memimpin Departemen Agama, posisi jawatan pemerintah ini sudah begitu mantap di dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia. Boleh dikatakan, hampir tidak ada lagi kalangan masyarakat di Indonesia yang mempertanyakan, apalagi meragukan, kehadiran dan fungsi Departemen Agama. Struktur organisasinya juga sudah lebih lengkap dan, pada batas-batas tertentu, dianggap lebih mewakili kepentingan-kepentingan seluruh komunitas beragama. Semenjak langkah reorganisasi yang diprakarsai KH. Wahid Hasyim, Menteri Agama pada pemerintahan RIS dan Kabinet Natsir (1949-1953), dan berlanjut hingga KH. Mohammad Dachlan, susunan organisasi Departemen Agama terus mengalami perubahan dan penambahan. Hal ini terjadi karena desakan-desakan politik yang mempertanyakan fungsi departemen yang secara khusus mengatur masalah-masalah keagamaan; suatu proses panjang yang membuat departemen ini berada dalam posisi sulit untuk sekian lama.

Mukti Ali terhindar dari periode itu. Sehingga, tak banyak yang dilakukan dalam kaitannya dengan penataan internal organisasi Departemen. Kebijakan internal organisasinya, seperti yang tercermin dalam Keputusan Menteri Agama No. 18/1975, lebih diprioritaskan pada efekifitas dan efisiensi kerja Departemen. Misalnya, penjabaran tugas pokok Departemen, pengajuan dan pengelolaan dana yang besar, serta perbaikan sumberdaya manusia.

Dalam kaitan ini, prestasi utama Mukti Ali terletak pada peran yang ia mainkan dalam reorientasi politis kebijakan Departemen Agama dengan membangkitkan kegairahan kehidupan beragama dan memperbaiki citra lembaga-lembaga keagamaan. Pada saat yang bersamaan, kebijakan itu dibarengi dengan kebijakan menumbuhkan keharmonisan hubungan antarumat beragama, khususnya antara Muslim dan Kristen, di Indonesia.[35]

---

[35]Untuk diskusi mengenai ide dialog antarumat beragama, lihat, Munhanif, "Islam and the Struggle," hal. 120-4.

Secara garis besar, kerangka kebijakan keagamaan Mukti Ali mengikuti keyakinannya pada posisi agama dalam Pancasila dan peran agama di dalam agenda modernisasi Orde Baru. Dasar Negara Pancasila, yang lahir bersamaan dengan UUD 45, merupakan suatu bentuk konsumasi politik dari upaya mencari landasan persatuan dari seluruh komunitas-komunitas agama: Muslim, Kristen, Katholik, Hindu dan Buddha. Sehingga terciptalah suatu basis ideologi politik yang dapat diterima semua pihak yang mengambil bentuk otoritas negara non-theokratis. Dengan demikian, menurut Mukti Ali, diasumsikan adanya suatu sistem pemerintahan dengan bentuk kekuasaan yang memisahkan antara otoritas politik dan otoritas keagamaan. Tetapi, pada sisi lain, pemerintah turut bertanggungjawab dalam mendukung dan membina kehidupan agama masyarakat. Negara Pancasila, dengan demikian, mengakui wewenang Departemen Agama dan kebijakan-kebijakan keagamaan sebagai bagian yang integral dari kebijakan politik pemerintah.[36]

Karakteristik ideologi negara semacam itu oleh Mukti Ali dipandang sebagai basis legitimasi bagi agenda modernisasi politik Orde Baru. Bagi Mukti Ali, pemerintah Orde Baru membagi kegiatan keagamaan ke dalam dua bentuk, di satu sisi secara murni bersifat agama, dan di sisi lain bersifat politis. Terhadap yang pertama, pemerintah membolehkan, bahkan mendukung, segala bentuk kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan peningkatan penghayatan terhadap agama. Namun demikian, pemerintah menghindari segala bentuk kegiatan keagamaan yang menyandarkan, atau cenderung bersandar, pada perjuangan politis.[37] Atas dasar inilah, dalam sebuah seminar di Malang pada 1972, Mukti Ali menegaskan bahwa, "itulah suatu aspirasi dan pilihan politik yang saya percaya akan memperbaiki hubungan antara Islam dan negara di Indonesia."[38]

Dengan penegasan di atas, Mukti Ali berupaya menjawab kekhawatiran sementara kalangan Muslim Indonesia yang sejauh itu masih curiga terhadap pilihan Orde Baru untuk menegakkan

---

[36]Munhanif, "Islam and the Struggle," hal. 116-117.
[37]Wawancara dengan Mukti Ali, September 1997.
[38]Dikutip dari, *Agama dan Masyarakat*, hal. 27.

negara kebangsaan moderen, yang tidak didasarkan pada ideologi agama. Secara politis, kekhawatiran itu muncul akibat berbagai perubahan politik paska kudeta PKI 1965 yang gagal, yang dianggap sangat merugikan kelompok Islam.[39] Semenjak konsolidasi Orde Baru dicanangkan pada Seminar Angkatan Darat di Bandung 1966, ABRI, khususnya Angkatan Darat, tampil sebagai kekuatan politik yang paling dominan. Beberapa agenda politik yang ditetapkan ABRI adalah melakukan restrukturisasi politik, ekonomi dan kebudayaan yang diarahkan kepada *modernisasi* — istilah yang sangat populer waktu itu, tetapi pada saat yang sama sangat kontroversial.[40]

Di saat pemerintah percaya bahwa "modernisasi" merupakan jalan terbaik bagi penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi Indonesia, beberapa pemimpin Muslim justru menolak. Umumnya mereka berpendapat, agenda modernisasi itu hanya dimaksudkan untuk mengakhiri bentuk sistem pemerintahan yang bersifat ideologis, yang berarti juga, mengakhiri kekuatan Islam sebagai ideologi politik di Indonesia. Modernisasi — yang secara jelas ditopang dengan stabilitas politik dan pragmatisme — juga dianggap mengabaikan kondisi demokratis di mana Islam, sebagai kekuatan religio-politik, mempunyai peluang besar untuk mempertegas kembali kehadirannya di dalam pentas politik nasional.

Dengan latar belakang politik semacam itu, dan didukung oleh kenyataan massa Islam yang secara ideologis masih kuat, elit Muslim menyampaikan beberapa harapan kepada Presiden Soeharto. Harapan itu sendiri sebenarnya bermuatan politis. Namun, karena coraknya yang sangat ideologis dan substansinya mengarah pada ideologi Islam, banyak kalangan memandang bahwa harapan itu menampakkan sisa-sisa aspirasi ideologis umat Islam untuk tetap memperjuangkan berdirinya negara Islam di Indonesia. *Pertama*, rehabilitasi Partai Masyumi oleh pemerintah. *Kedua*, pemberian status resmi terhadap Piagam Jakar-

---

[39]Untuk diskusi tentang Islam dan awal konsolidasi Orde Baru, lihat *Muslim Intellectuals Responses to "New Order" Modernization in Indonesia*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia, 1982).

[40]*Muslim Intellectuals Responses*, hal. 7-10.

ta dalam Pancasila, dan *ketiga*, pelaksanaan Pemilu secara demokratis dengan menggunakan sistem multi-partai secepatnya.[41]

Harapan pertama ditolak. Bahkan, Presiden Soeharto, dengan mengikuti apa yang telah diputuskan Angkatan Darat pada 1966, secara tegas melarang rehabilitasi Masyumi. Hal ini diambil karena alasan konstutisional, yakni posisi Masyumi yang terlibat dalam usaha pemberontakan mengganti Pancasila. Dan yang lebih penting, alasan psikologis, yakni, trauma politik yang dialami sebagian besar perwira Angkatan Darat.[42] Sedangkan terhadap harapan kedua, pemerintah mengambil sikap untuk tidak membicarakannya lagi, dengan pertimbangan bahwa, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 telah memutuskan kandungan Piagam Jakarta yang menjiwai UUD 1945 dan menyatu dengan konstitusi. Presiden pun akhirnya menegaskan bahwa setiap upaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara adalah tindakan subversif. Sementara itu, pemerintah mengabulkan harapan mengadakan Pemilu pada 1968, tetapi kemudian menundanya hingga 1971, dengan syarat: tanpa keikutsertaan Masyumi. Sebagai konsesi politisnya, untuk umat Islam dibentuk suatu wadah politik yang diharapkan bisa mengganti posisi Masyumi, yakni Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), pada 1967. Partai ini menjadi kontestan Pemilu 1971 dan diasosiasikan sebagai partai golongan Muslim reformis di samping Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII); sementara NU dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) menjadi dua partai politik Muslim yang berorientasi Islam tradisional.

Pemilu pertama dalam sejarah Orde Baru berlangsung, pada Mei 1971. Meskipun banyak pihak yang menuduh adanya kecurangan dan ketidakadilan dalam mekanismenya, partai pemerintah, Golkar, memperoleh kemenangan besar, dengan 62% suara. Sedangkan dari keseluruhan perolehan suara gabungan dari keempat partai-partai politik Islam hanya memperoleh 27%. Kekalahan telak ini tampaknya semakin memperkecil harapan-harapan sebagian besar kalangan Muslim untuk terus berusaha memba-

---

[41]Lihat Alfian, "Suharto and the Question of Political Stability," *Pacific Community*, Vol. II, No. 3 (April, 1971), hal. , hal. 536.

[42]Kamal Hasan, *Muslim Intellectuals*, hal. 9

ngun masyarakat Muslim yang secara politis kuat.[43] Kekecewaan mereka, yang menimbulkan serangkaian peristiwa yang semakin memperlemah kekuatan Islam politis, diperburuk lagi oleh posisi Angkatan Darat yang semakin dominan dan memberi kesempatan kepada sekelompok kecil di luar Islam — terdiri dari Katolik, penganut Aliran Kepercayaan dan tokoh-tokoh PSI. Hal ini segera menimbulkan perasaan terancam di kalangan pemimpin Muslim, bahwa masa depan politik Indonesia akan didominasi oleh aliansi kelompok-kelompok yang berpentingan tidak Islami itu.[44] Dihadapkan pada berbagai perubahan yang semakin menempatkan Islam sebagai kekuatan politik pinggiran, pada akhir dasawarsa 1960an, para tokoh Muslim berkesimpulan bahwa restrukturisasi sistem dan agenda politik Orde Baru adalah suatu strategi yang terencana untuk melenyapkan pengaruh Islam dalam menentukan perubahan masyarakat di Indonesia.

Faktor lain, sekalipun bersifat internal, yang mengakhiri harapan-harapan politis kaum Muslimin adalah semakin banyaknya tokoh Muslim yang bersikap akomodatif terhadap Orde Baru.[45] Pada Januari 1970, satu tahun menjelang dilangsungkannya Pemilu, bersama sekelompok generasi muda Muslim dari HMI dan PII, Nurcholish Madjid—intelektual HMI yang masa itu dijuluki

---

[43]*Muslim Intellectuals Responses*, hal. 9. Lihat juga Kenneth E. Ward, *The 1971 Election in Indonesia*, (Monash University Papers on Southeast Asia, No. 2, 1974), hal. 64-6.

[44]Dikutip dari Ward, *The 1971 Election*, hal. 35. Ada tiga kelompok — umumnya cendekiawan — yang menjadi anggota aliansi pemerintah Orde Baru. Pertama, kelompok Katolik yang terdiri dari Liem Bian Kie, Liem Bian Khoen, Harry Tjan dan Moertopo. Di kemudian hari, tokoh-tokoh ini tergabung dalam CSIS. Kedua, kelompok UGM, yang diasosiasikan dengan beberapa sarjana yang berasal dari Universitas Gadjahmada: Sumiskum, Sulistyo, Sugiharto dan Suroso yang dikenal bersifat memusuhi aspirasi-aspirasi Islam. Ketiga, Kelompok Bandung, dengan tokohnya Rachman Tolleng dan Midian Sirait, yang mewarisi etos modernisme Sutan Syahrir dari PSI (partai Sosialis Indonesia). Ketiga kelompok ini menikmati hubungan yang dekat dengan tokoh-tokoh Angkatan Darat, khususnya Ali Murtopo dan Soedjono Humardani, dua orang perwira yang waktu itu menjadi Asisten Pribadi Presiden Suharto.

[45]Kategori akomodasi politik di sini diambil dari, Kamal Hasan, *Muslim Intellctual*, untuk membedakan dari sikap idealis dari kalangan Muslim yang masih memperjuangkan Islam politik yang bersifat ideologis, politis, dan tidak realistis.

sebagai Natsir Muda—menyerukan gerakan pembaharuan pemikiran Islam yang membela modernisasi Orde Baru. Lalu, pada 14 Oktober 1970, Gerakan Pembaharuan ini memperoklamasikan 'kredo politiknya': *Islam Yes, Partai Islam, No.* Sebagai gerakan pemikiran, pembaharuan itu sendiri merupakan upaya memformulasikan kembali kesimpulan-kesimpulan keagamaan Islam seperti Tuhan, manusia dan alam semesta *vis-a-vis* realitas-realitas baru masyarakat. Tetapi, kandungan politisnya sangat besar: yakni, kegelisahan kaum muda Muslim yang teralienasi oleh sikap perilaku politik umat dan citra populer tentang Islam saat itu. Gerakan pembaharuan ini terus berkembang, didukung sebagian besar kelas terpelajar Muslim dan, pada batas-batas tertentu, juga turut memperbesar rasa frustasi di kalangan yang ingin membangkitkan kembali Islam sebagai kekuatan politik. Hal itu khususnya di kalangan generasi tua Muslim.

Bagi Mukti Ali, kekalahan partai-partai Islam itu memang sudah bisa diramalkan. Berbagai bentuk aspirasi Islam ideologis untuk membangun suatu partai yang secara politis tangguh juga terbukti tidak pernah menarik sebagian besar kalangan masyarakat. Kendatipun demikian, fenomena politik dan pergulatan pemikiran keagamaan yang terjadi menyadarkannya bahwa, hingga masa itu, partai-partai politik Islam dan umat Islam umumnya masih mendambakan terbentuknya Indonesia sebagai "negara yang berdasarkan Islam", atau "negara di mana hukum-hukumnya berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadits." Bahkan, partai-partai Islam juga berpandangan, "jika Indonesia tidak di bawah pemerintahan partai Islam, negara ini akan menjadi negara sekuler: yakni, negara yang memisahkan antara urusan agama dan urusan politik."[46]

Dalam konteks inilah, semenjak periode awal jabatannya, Mukti Ali memberi perhatian yang besar terhadap upaya untuk mendekatkan hubungan umat Islam dengan pemerintah Orde Baru. Kepada para ulama dan politisi Muslim, ia meyakinkan adanya ikti-

[46]Wawancara dengan Mukti Ali, September 1997. Menurutnya, pandangan itu ia peroleh dari percakapan dengan beberapa tokoh Muslim waktu itu.

kad baik pemerintah Orde Baru untuk membina kehidupan beragama. Pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama, akan memberikan keleluasaan, bahkan membantu, umat Islam mengerjakan semua kewajiban agama. Salah satu sikap politik yang dimaksudkan untuk tujuan itu disampaikan Mukti Ali pada sebuah seminar di Malang tahun 1972; sebuah elaborasi yang tersaring dari konsep kenegaraan yang diharapkan cocok dengan kultur masyarakat relijius Indonesia, khususnya Islam:

> Indonesia telah memilih jalannya sendiri. Indonesia bukanlah negara teokratis, dan juga bukan negara sekuler. Dasar Negara kita, Pancasila, sudah benar dengan menegaskan negara ini berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara multi relijius. Tetapi, agama (Islam), dalam bentuknya yang resmi, bukan dasar negara ... tidak dijadikan sebagai agama negara. Namun demikian, pemerintah akan merumuskan suatu prinsip-prinsip operasional bagi pembangunan agama, yang diperuntukkan kepada semua komunitas beragama di Indonesia, dalam rangka melindungi, membantu, mendukung dan membina semua bentuk kegiatan keagamaan.[47]

Pernyataan ini segera disosialisasikan Orde Baru di hampir setiap kesempatan, khususnya jika berhadapan dengan kelompok Muslim. Tampaknya rumusan konsep kenegaraan semacam itulah yang dikehendaki Orde Baru untuk dijadikan basis legitimasi modernisasi di kalangan umat Islam.

Adalah Ali Moertopo yang dikenal sebagai orang yang merumuskan strategi modernisasi Indonesia, dan secara gigih mencoba mengerahkan potensi keagamaan masyarakat agar menjadi titik tolak modernisasi itu. Dalam bukunya *Akselerasi Modernisasi Indonesia*, Moertopo menegaskan, dalam rangka mencapai tahap-tahap pembangunan, setiap program dan kebijakan yang diambil pemerintah bukan saja harus sesuai dengan kemajemukan sosial dan keagamaan masyarakat Indonesia, tetapi juga harus mencerminkan suatu re-orientasi mental seluruh rakyat Indonesia untuk

---

[47]Dikutip dari, Mukti Ali, "Indonesia Tidak Negara Sekuler dan Tidak teokratis," dalam Bahrun Kayo (ed), *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama, 1973) hal. 64.

siap ditransformasikan menjadi suatu masyarakat modern.[48] Salah satu bidang sosial yang harus menjadi garapan program re-orientasi itu adalah bidang agama.

Moertopo memandang ideologi keagamaan sebagai "kekuatan yang barangkali dapat mengganggu jalannya proses pembangunan nasional."[49] *Pertama,* karena semangat ideologi keagamaan yang menampilkan aspirasinya berkaitan dengan fanatisme dan sektarianisme, dengan ketaatan massa secara tidak terbatas terhadap pemimpinnya, pemerintah sudah seharusnya mulai mengurangi peranan ideologi keagamaan bagi partai-partai politik dan organisasi sosial-kemasyarakatan. *Kedua,* setelah sekian lama hubungan Islam dan negara diwarnai ketegangan dan ketidakharmonisan, pemerintah mempunyai harapan besar untuk menyemarakkan kehidupan beragama dan membantu pelaksanaan kewajiban agama bagi pribadi-pribadi Muslim. Hal ini terutama disebabkan meningkatnya gairah umat Islam menjalankan agamanya, karena kenyataan bahwa, akibat meningkatnya taraf pendidikan dan keterbukaan masyarakat di desa-desa, Orde Baru semakin mudah mengubah arah aspirasi umat Islam dari "perjuangan menegakkan negara Islam" menjadi "kesadaran untuk membangun masyarakat yang agamis secara luas."

Berdasarkan dua landasan inilah kebijakan Departemen Agama selama periode Mukti Ali dipetakan. Pada dasarnya, kebijakan tersebut ditujukan untuk membentuk masyarakat relijius. Departemen Agama mencanangkan berbagai program kegiatan keagamaan — sejauh tetap berada di luar arena politik — dan memberi perhatian besar terhadap segala bentuk yang berkaitan dengan ibadah dan pengajaran agama: di sekolah, di penjara, di rumah sakit, di kantor-kantor pemerintah, dan sebagainya. Departemen juga bertanggungjawab terhadap pembangunan di bidang sosial dan kebudayaan yang dipusatkan pada mempertahankan tradisi-tradisi keagamaan yang hidup di Indonesia. Termasuk salah satunya, dan barangkali monumental, adalah kebijakan untuk mengembangkan seni baca al-Qur'an. Berdasarkan Su-

---

[48]Ali Moertopo, *Akselerasi Modernisasi Indonesia,* (Jakarta: CSIS, 1975), hal. 51-56.

[49]Ali Moertopo, *Strategi Pembangunan Indonesia,* (Jakarta: CSIS, 1980), hal. 46.

rat Keputusan Bersama (SKB) dengan Menteri Dalam Negeri No. 19 tahun 1977 mengenai Pengembangan Tilawatil Qur'an, Departemen Agama menyelenggarakan Lomba MTQ di tingkat nasional yang diadakan secara tahunan, dan diikuti perwakilan-perwakilan dari seluruh propinsi. Keputusan itu diikuti Instruksi Menteri Agama No. 2/1978, tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) di tingkat propinsi, kodya, kabupaten dan kecamatan.

Langkah lain untuk menunjukkan perannya sebagai "pelindung" kepentingan umat Islam, adalah gagasannya untuk mensponsori berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI), pada akhir 1975. Mukti Ali melihat, hingga tahun 1975, berbagai lembaga keagamaan yang dimiliki komunitas agama di Indonesai telah berdiri: Dewan Gereja Indonesia (DGI) milik umat Protestan; MAWI milik umat Katolik; Walubi milik umat Buddha; dan PHDI milik Hindu. Tetapi, bagi umat Islam, lembaga keagamaannya yang bersifat independen — dalam arti bukan partai politik dan bukan Departemen Agama, belum ada. Sehingga, setiap kali usaha mendialogkan kebijakan di bidang agama yang menyangkut Islam selalu terbentur dengan lembaga-lembaga keagamaan yang berada di bawah partai politik. Sebab itulah muncul gagasan untuk membentuk MUI. Melalui MUI, Mukti Ali mengharapkan aspirasi umat Islam di bidang agama dan masalah sosial yang lain bisa lebih mandiri disuarakan. Mukti Ali lantas meminta Buya Hamka, ulama senior dan sangat dihormati umat Islam, untuk bersedia memimpin MUI. Kendatipun, pada 1980, ketika dirasakan kemandirian MUI tidak bisa lagi dipertahankan, dan Mukti Ali sudah tidak menjabat Menteri Agama, Hamka mengundurkan diri dari Ketua Umum MUI. Pada tingkat ini, langkah pendirian MUI itu tidak hanya menempatkan Mukti Ali sebagai Menteri Agama yang berhasil menyuarakan kepentingan keagamaan umat, tetapi juga menjadi "juru bicara pemerintah berhadapan dengan kelompok Islam".

Kebijakan "menghidupkan gairah beragama" ini berjalan seiring dengan perjuangan gigih Mukti Ali untuk mengajak komunitas-komunitas agama di Indonesia agar saling toleran, menghormati dan berdialog. Dari sinilah Departemen Agama menggalakkan program Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama.

Dialog Antarumat Beragama

Kebijakan ini didorong kenyataan bahwa, selama proses konsolidasi Orde Baru, hubungan antarumat beragama di Indonesia diwarnai dengan ketegangan dan, bahkan, konflik yang cukup tajam, khususnya antara komunitas Muslim dan Kristen. Konsolidasi Orde Baru secara nyata memperlihatkan keengganan AD mengajak kalangan Muslim, baik reformis maupun tradisional, sebagai partner politiknya. Di samping itu, masuknya kelompok-kelompok non-Islam ke dalam lingkaran pusat kekuasaan, dan ditempatkannya orang-orang Kristen ke dalam pos-pos penting di pemerintahan maupun di ABRI, secara tidak langsung turut menyumbangkan kian tingginya rasa tidak suka umat Islam terhadap Kristen. Fenomena terakhir ini, misalnya, dibaca oleh orang-orang Islam sebagai bentuk dari sikap politik pemerintah terhadap kelompok agama minoritas yang *'over represented'*:

> ... Sebagai gantinya, dalam komandan tentara, maka diangkatlah Jenderal Maraden Panggabean; dan Ketua Partai Katolik [tahun 1955], Frans Seda, Menteri Keuangan dan, kemudian, menjadi Menteri Komunikasi. Melalui kontak-kontak politik mereka di "tingkat tinggi", orang-orang Katolik khususnya dilihat oleh umat Islam sebagai mendesakkan pengaruh yang tidak semestinya dalam masalah-masalah pemerintahan.[50]

Namun demikian, yang paling mencolok, ketidak-sukaan umat Islam terhadap Kristen tadi memanifestasikan diri dalam bentuknya yang paling serius, yakni: polemik keagamaan antara Islam dan Kristen.

Antara 1967 sampai 1970, berlangsung polemik keagamaan yang keras antara Islam-Kristen dalam bentuk ceramah dan pamflet-pamflet kecil, yang diterbitkan secara resmi maupun tidak. Dalam polemik itu diungkapkan pandangan-pandangan yang saling mencela satu sama lain. Para pembicara ataupun penulis Muslim "menyangkal ajaran-ajaran teologi Kristen .. (dan menganggapnya) sebagai takhayul dan tidak logis. Sedangkan pende-

---

[50]Peter Polomka, *Indonesia Since Sukarno*, (Melbourne: Penguin Books, 1971), hal. 188.

ta Protestan atau pastor Katolik menganggap keimanan Islam sebagai terbelakang dan fanatik."[51] Puncaknya, pada 1974 Dewan Gereja-gereja se-Dunia memutuskan untuk membatalkan tempat sidang Majelis Umumnya di Jakarta, dan memindahkannya ke sebuah kota di Afrika pada 1975, akibat tekanan politik dari umat Islam.[52] Waktu itu, pemerintah sendiri sebenarnya menerima baik penyelenggaraan pertemuan Dewan itu. Tetapi, umat Islam, khususnya diwakili Dewan Dakwah Islamiyah (berdiri tahun 1967), menuduh sikap orang-orang di pemerintahan itu sebagai cara umat Kristen untuk pamer kekuatan dan ingin menunjukkan hal itu sebagai, "Sidang Dewan Gereja-gereja se-Dunia yang pertama-tama diadakan di sebuah negara Muslim terbesar." *

Hal lain yang mungkin lebih berpengaruh pada runcingnya ketegangan hubungan Islam-Kristen adalah keberhasilan spektakuler yang dicapai oleh kegiatan missionaris Kristen selama lima tahun setelah 1965. Di awal dasawarsa 1970an, masyarakat Muslim Indonesia dikejutkan oleh pesatnya peningkatan jumlah gereja Kristen Protestan di Jawa, khususnya di Jawa Tengah dan Timur. Tampaknya, antara 1966 dan 1971, missionaris Kristen yang memusatkan perjuangan mereka lewat pendidikan, pelayanan kesehatan serta pemberian material, berhasil membaptis 2,000,000 orang Muslim-Jawa menjadi Kristen. Banyak tokoh Muslim menuduh pemerintah telah memberi angin terhadap kegiatan Kristenisasi.[53] Sebagian besar penganut Kristen baru itu memang berasal dari golongan Islam abangan, yang setelah peristiwa Gestapu PKI sangat dimusuhi orang-orang Islam santri. Bahkan sebagian besar mereka adalah bekas anggota PKI yang, baik secara sosial dan keagamaan, mendapatkan perilaku buruk dari kaum santri. Namun tetap saja, perkembangan jumlah Kristen yang pesat itu — bahkan menurut perhitungan Missionaris sendiri, hasil itu bisa

---

[51]Dikutip dari Bolland, *The Struggle*, hal 42.

[52]Bolland, *The Struggle*, hal. 43.

[53]Lihat, Avery T. William, *Indonesian Revival: Why Two Million Came to Christ*, (South Pasadena; William Carey, tt).

*Cf bab tentang Muhammad Dachlan.

disamakan dengan kegiatan missionaris selama 50 tahun di tempat lain — memicu sikap permusuhan yang dalam umat Islam terhadap Kristen. Sikap saling memusuhi antara Islam-Kristen itu berujung pada konflik sosial yang keras, berupa perusakan tempat-tempat ibadah. Di beberapa kota di Jawa Tengah dan Aceh, terjadi pembakaran gereja oleh pemuda Muslim. Di Sulawesi Utara dan Ambon sebaliknya terjadi pembakaran masjid oleh para penganut Kristen Protestan.[54] Konflik agama ini seolah-olah melambangkan ketidakmampuan Orde Baru dalam menjaga kerukunan umat beragama. Mukti Ali datang memimpin Departemen Agama pada saat konflik Islam-Kristen itu mencapai intensitas paling tinggi dalam sejarah keagamaan Indonesia.

Pemerintah lantas memberi perhatian terhadap masalah kerukunan antarumat beragama. Bagi Mukti Ali, tujuan dialog antar agama adalah, bagaimana pemerintah menyediakan suatu *modus vivendi* yang dapat membawa komunitas agama yang berbeda-beda saling menghormati, memahami, dan menyadari bahwa mereka hidup bersama di bawah satu payung kebangsaan. Dalam kertas kerjanya pada World Conference of Religion and Peace, pada Juni 1973, di Beirut, Mukti Ali menegaskan karakter dialog antar agama sebagai:

> encounters between persons and groups with different religions or ideologies in order to come to a common understanding on certain issues, to agree and disagree with appreciation and, therefore, to work with them to discover the secret of the meaning of life.
>
> It [dialogue] is a process in which individuals and groups learn to wipe out fear and distrust of each other and develop new relations based on mutual trust. A dialogue is a dynamic contact between life and life — not only between one rational view against the other — which is directed towards building the world a new together.[55]

---

[54]Avery T. William, *Indonesian Revival*, hal. 14. BJ. Bolland juga mengungkapkan beberapa peristiwa utama tentang perusakan tempat ibadah itu di Jawa dan Sumatera. Semuanya menggambarkan keadaan yang tidak menguntungkan bagi pemerintah Orde Baru dalam hal membina kerukunan antar umat beragama. Lihat, Bolland, *The Struggle*, hal. 54.

[55]Mukti Ali, "Dialogue Between Muslims and Christians in Indonesia", dalam Mukti Ali. *Dialog Antar Agama*, (Yogyakarta: Yayasan Nida, 1981), hal. 37.

Mukti Ali menyadari bahwa kebijakan dialog antarumat beragama semacam itu belum tentu akan membuahkan hasil perdamaian yang total antar-komunitas beragama di negara seperti Indonesia. Tetapi, ia percaya bahwa pasti ada sekelompok sosial-keagamaan tertentu yang bisa diharapkan memberi sumbangan terhadap berjalannya dialog agama. Berdasarkan pemikiran ini, Mukti Ali mempertemukan dan berkumpul dengan tokoh agama, ulama, pendeta, pastor, bhiksu, cendekiawan dan sarjana, organisasi agama, untuk berdialog. Departemen Agama lantas menghidupkan kembali forum Musyawarah Antarumat Beragama; sebuah forum yang berdiri pada masa Menteri KH. Muhammad Dachlan, tetapi tidak berjalan akibat kegagalan mencapai kesepakatan tentang aturan-aturan organisasi pada pertemuan pertamanya, 30 November 1967. Forum ini dimaksudkan menjadi tempat musyawarah, diskusi dan dialog bagi kalangan umat-umat beragama, khususnya dalam hal metode penyiaran agama.

Tidak ada tugas khusus dari forum ini. Diketuai sendiri oleh Menteri Agama, forum ini pada prinsipnya ditujukan untuk mendiskusikan, membicarakan dan memberikan sumbangan terhadap berbagai masalah konflik antarumat beragama, khususnya jika suatu persoalan timbul di masyarakat. "Paling tidak," demikian Mukti Ali, "kita bisa berharap bahwa para pemuka agama tadi bisa memberi tauladan dan menyiarkan masalah toleransi. Dan lewat forum ini, pemerintah berharap umat beragama yang berbeda-beda itu bisa saling menghormati perasaan satu sama lain."[56]

Mempertimbangkan misi pokok yang digariskan dalam dialog antarumat agama itu, maka Mukti Ali tidak pernah lelah mengajak semua komunitas agama untuk melakukan dakwah atau penyiaran agama secara bijak. Ia tampaknya ingin menyelesaikan ketegangan antara semangat dialog dengan penyiaran agama dengan anjuran moral yang ada pada agama itu sendiri. Hasilnya, dialog antar agama sangat bergantung kepada itikad baik komunitas agama yang bersangkutan. Sebuah pernyataan tegas di-

---

[56]Wawancara dengan Mukti Ali, 1 September 1997.

ungkapkan Mukti Ali di depan peserta Peringatan Hari Natal nasional, di Jakarta, pada 1972. Dalam kesempatan ini, Mukti Ali memperingatkan komunitas Kristen untuk menjaga perasaan keberagamaan komunitas lain dengan cara tidak berdakwah di tengah-tengah mereka. Tegasnya:

> Adalah tidak mungkin, untuk mengajak orang yang sudah beragama masuk ke dalam agama lain, baik secara paksa maupun dengan memberi tawaran-tawaran bendawi. Tidak pantas juga, seorang penyiar agama memanfaatkan kelemahan orang-orang yang tidak berpendidikan, orang sakit, anak-anak muda, untuk memeluk agama penyiar itu ... Adalah tidak pantas, sebagai seorang yang beragama seperti kita, berusaha menyiarkan agama dengan cara menyerang atau menjelek-jelakkan ajaran agama orang itu.[57]

Kontroversi UU Perkawinan 1974

Di tengah periode kementerian Mukti Ali, ada satu kebijakan Orde Baru yang menyedot partisipasi atau *concern* Islam secara besar-besaran, yakni: Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan. Proses pengajuan RUU ini membawa pemerintah Orde Baru, khususnya Departemen Agama, ke dalam situasi politik dan psikologis yang mencekam. Tak terhindarkan, Mukti Ali terpaksa berhadapan penolakan keras terhadap RUU.

Pada 1973, pemerintah menyampaikan RUU Perkawinan kepada DPR yang berisi gagasan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan. Ditunjuk sebagai wakil pemerintah mempertahan asumsi-asumsi RUU tersebut adalah Mukti Ali, Menteri Agama, dan Oemar Senoadji, Menteri Kehakiman.[58] RUU itu memancing reaksi keras umat Islam, baik di dalam DPR maupun di kalangan masyarakat luas. Umat Islam menolak beberapa hal yang secara mendasar dipandang bertentangan dengan syari'at Islam. Respon dan pernyataan-pernyataan terbuka, khotbah di masjid-masijd, pengutusan delegasi untuk bertemu pemerintah, bahkan demonstrasi politik, mewarnai proses panjang pembahasan RUU Perkawinan tersebut.

---

[57]Mukti Ali, "Orang Yang Sudah Beragama Jangan Sampai Jadi Sasaran Penyiaran Agama," dalam Bahrun, *Agama*, hal, 39.

[58]Amak F.Z., *Proses Undang-undang Perkawinan*, (bandung: PT Al Ma'arif, 1976), hal. 16-17.

Di lingkungan DPR, penolakan bukan hanya berasal dari fraksi politik Islam seperti NU, Parmusi dan Perti, tetapi juga dari fraksi ABRI dan Golkar yang beragama Islam. Kendati sikap itu diungkapkan secara diam-diam. Di luar gedung DPR, Buya Hamka, ulama senior yang pada 1975 menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), menilai bahwa RUU tersebut diajukan sebagai upaya memaksa umat Islam yang mayoritas untuk meninggalkan agamanya melalui pemaksaan berlakunya peraturan perundang-undangan bertentangan dengan asas hukum Islam. Dengan keras, Hamka mengatakan bahwa, jika RUU tersebut digolkan di DPR berdasarkan pemungutan suara dan kegagahperkasaan mayoritas, kaum Muslimin tidak akan memberontak karena keadaannya sangat lemah. "Tetapi demi kesadaran beragama," begitu Hamka menulis, "UU itu tidak akan diterima, tidak akan dijalankan."[59] Para pelajar Muslim juga menunjukkan sikap yang sama. Badan Kontak Pelajar Islam (BKPI) menggalang solidaritas dari kalangan IPNU, PII, IPM, dan secara tegas menyatakan menolak RUU Perkawinan.

Penolakan terhadap RUU Perkawinan tersebut ternyata tidak hanya datang dari kalangan Islam. Meskipun tidak secara eksplisit, sejumlah eksponen GMNI, PMKRI, GMKI, GPM dan GSNI, pada 19 Desemnber 1973, mengeluarkan pernyataan yang meminta agar DPR dan pemerintah dalam menyusun UU Perkawinan tetap menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber hukum. Terutama, mengenai sahnya perkawinan yang harus tetap mengacu pada pasal 27 dan pasa 29 UUD 1945.

Respon umat Islam atas RUU perkawinan tersebut mencapai puncaknya pada peristiwa yang sangat dramatis dengan terjadinya demonstrasi massa Islam di gedung DPR. Gedung itu akhirnya diduduki oleh sekitar 500 pemuda-pemudi Muslim selama kira-kira 2 jam. Peristiwa itu terjadi ketika Mukti Ali sedang menyampaikan jawaban pemerintah tentang RUU Perkawinan. Kegaduhan di gedung DPR sudah tidak bisa dikendalikan lagi, akhirnya Mukti Ali ditarik dua orang tentara dan, bersama Menteri Oemar Senoadji, diungsikan masuk ke ruang Ketua DPR/MPR wak-

---

[59]Amak F.Z., *Proses Undang-undang*, hal. 34.

tu itu, KH. Idham Cholid. Sidang akhirnya berhenti. Tidak satupun kesepakatan yang dibuat antara pemerintah dan umat Islam. Setelah 1 pleton KKO dan sepasukan AD diturunkan, gedung DPR akhirnya dikuasai dan para demonstran berhasil dihalau.[60]

Penolakan umat Islam yang keras itu dan sikap politik mereka yang terlihat tanpa kontrol dapat dipahami. Di samping banyaknya pasal dari RUU Perkawinan 1974 yang tidak sesuai, bahkan bertentangan, dengan prinsip-prinsip hukum Islam, formulasi dan proses politik pengajuan RUU itu juga menimbulkan kecurigaan yang mendalam. Menurut pemimpin Muslim waktu itu, itulah pertama kali sebuah RUU yang menyangkut peribadatan Islam diajukan tanpa berkonsultasi dengan orang-orang yang mempunyai otoritas untuk itu. Sehingga banyak kalangan Islam yang menafsirkan langkah unifikasi hukum perkawinan itu sebagai strategi terselubung dari golongan-golongan minoritas Kristen dan sekuler untuk mewujudkan negara Pancasila yang benar-benar sekuler. Tak terhindarkan, Mukti Ali juga menjadi target dari tuduhan-tuduhan umat Islam sebagai orang yang bertanggungjawab atas langkah politik Orde Baru menuju proses de-Islamisasi.

Di antara 73 pasal dari draft RUU Perkawinan, setidaknya 11 pasal ditemukan bertentangan dengan hukum Islam.[61]

Namun begitu, jumlah pasal dari RUU Perkawinan yang ditolak tampak bervariasi. Menurut penilitan yang dilakukan IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, misalnya, ada 14 pasal di dalam RUU yang bertentangan dengan hukum Islam. Musyawarah para ulama di Pesantren Denanyar, Jombang, Jawa Timur, jumlahnya lebih besar lagi: mereka mengajukan perbaikan draft dengan mengusulkan RUU Perkawinan sampai 98 pasal.[62]

Kegaduhan politik yang berkenaan dengan RUU Perkawinan itu mulai mereda setelah diadakan pendekatan dengan Presiden

---

[60]Banyak versi mengenai kisah ini. Tulisan ini sendiri didasarkan pada wawancara dengan Mukti Ali, 1 September 1997.

[61]Tentang hal ini, lihat Azyumardi Azra, "The Indonesian Mariage Law: An Institutionalisation of the Syari'ah for Social Change," dalam *Istiqra Journal* No. 6/IV (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1992) hal. 25.

[62]Afan Gaffar dan Ahmad Mahmud, *Dua Menteri*, hal. 117.

Soeharto. Intinya, pendekatan itu dimaksudkan untuk memberi pengertian kepada Presiden, bahwa muatan RUU tersebut benar-benar mengganggu akidah umat Islam. Dari situ, Mukti Ali lantas memprakarsai dialog dan loby informal dengan pemuka-pemuka Islam untuk mencari penyelesaian di luar sidang DPR. Berbagai pertemuan dilakukan, termasuk beberapa kali di kediaman Mukti Ali sendiri. Akhirnya sebuah Majelis Syura dari partai-partai Islam, yang waktu itu sudah membentuk fusi menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mengadakan ramah tamah dengan Presiden. Yang hadir tidak hanya orang-orang yang berasal dari lingkungan partai, tetapi juga tokoh politik Islam senior, seperti M. Natsir, Rasyidi, Syafruddin Prawiranegara, dan Kasman Singodimedjo.[63]

Namun, pertemuan yang dianggap paling menentukan penyelesaian akhir atas masalah RUU Perkawinan adalah pertemuan dua tokoh Majelis Syura PPP, yaitu KH. Bisri Syamsuri dan KH. Masykur, dengan Presiden Soeharto pada 26 Nopember 1973.[64] Dalam pertemuan itu, Presiden mengisyaratkan bahwa rancangan UU itu, sebagaimana prosedur yang harus dilalui di setiap pembuatan undang-undang, bukanlah suatu yang tidak dapat ditawar. Presiden sendiri lantas menanyakan, 'bagaimana baiknya'. Setelah mendengar pandangan kedua tokoh itu, Presiden memberi tugas kepada Jenderal Soemitro, waktu itu menjabat Pangkopkamtib, untuk menempuh jalur informal, mengajak tokoh-tokoh Islam memusyawarahkan RUU Perkawinan. Selanjutnya, Soemitro menyerahkan upaya pemufakatan kepada Amir Moertono, KH. Masykur, dan beberapa orang petinggi ABRI. Orang-orang kunci yang disebut terakhir inilah yang kemudian berhasil merumuskan suatu bentuk RUU yang dapat diterima semua pihak di DPR dan, akhirnya, disetujui Presiden Soeharto. Setelah melalui prosedur teknis persidangan, maka

---

[63]Mereka dikenal tokoh Masyumi. Meskipun tidak lagi menjabat sebagai pengurus partai Islam tertentu, kharisma politik mereka masih sangat berpengaruh di kalangan umat Islam. Lihat, Kamal Hasan, *Muslim Intellectuals*, hal. 45.

[64]*Muslim Intellectuals*, hal. 45.

pada 22 Desember 1973, DPR menetapkan bahwa RUU Perkawinan telah diterima menjadi UU. No. 1 tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan Nasional, dan Presiden menandatangani UU tersebut pada 2 Januari 1974.

Mukti Ali, orang terdepan yang bertanggungjawab terhadap kontroversi, baik di mata pemerintah maupun umat Islam, memainkan peran tidak kecil. Masa-masa itu dikenangnya sebagai masa yang paling sulit, meskipun dirinya merasa tidak bisa memahami sikap umat Islam. Tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepadanya sebagai orang yang bersekongkol dengan CSIS atau orang-orang Kristen di pemerintahan, untuk menjalankan politik de-Islamisasi ditanggapinya dengan dingin. Karena dia merasa tidak punya sedikitpun niat untuk itu:

> Tidak benar bahwa saya mengadakan konspirasi. Misi saya hanya satu, yaitu mengajukan RUU Perkawinan di hadapan sidang. Rumusannya? Saya sendiri tidak tahu. Sewaktu saya dilantik menjadi Menteri, rumusan itu sudah ada. Saya ditugasi untuk mempelajari. Tetapi, saya tidak boleh membocorkan dulu. Lalu, berbagai permintaan diajukan kepada saya supaya apa yang terangkum dalam RUU Perkawinan itu supaya diterima saja. Salah satunya adalah permintaan dari Kowani [Kongres Wanita Indonesia].[65]

Dari sinilah, Mukti Ali lantas berpikir bahwa, "kalau permintaan-permintaan itu semua bersifat informal, mengapa saya tidak mengambil jalan yang sama":

> Lantas, saya tempuh jalan yang informal. Pokoknya saya berpikir, tidak mungkin menyelesaikan masalah ini di hadapan sidang formal. Saya lalu mengajak kiyai-kiyai ke rumah, ke kantor, untuk berdiskusi. Saya sendiri berkunjung ke rumah-rumah tokoh Islam. Dari situlah saya jelaskan, tidak ada jalan lain, dari pada protes-protes seperti ini, yang rugi kita semua, saudara-saudara harus menghadap Presiden. Nah, ceritanya menjadi lancar, Presiden sendiri menyetujui rumusan RUU yang baru itu.[66]

---

[65]Wawancara dengan Mukti Ali, Juli 1997. Sumber lain menyatakan bahwa RUU itu disusun oleh CSIS. Jenderal Sumitro, misalnya dalam memoarnya mengungkapkan hal itu. Lihat, Heru Cahjono, *Pangkopkamtib Jendral Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 1974* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998).

[66]Wawancara dengan Mukti Ali, Juli 1997.

Masalah Pendidikan dan SKB Tiga Menteri 1975

Selama menjadi Menteri Agama, salah satu konstatasi Mukti Ali yang hampir selalu diungkapkan di setiap kali memberi ceramah di depan umat Islam, adalah bahwa "kesemarakan umat Islam dalam beribadah dan berpolitik, belum diimbangi dengan kesibukan memikirkan masalah pendidikan umat".[67] Tentu saja, ungkapan ini tidak bermaksud untuk menafikan berbagai bentuk upaya yang telah dilaksanakan kalangan umat Islam lewat program-program sosial dan kesejahteraan; namun jelas hal itu belum merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh potensi umat Islam secara terprogram dan terencana. Masalah yang lebih memprihatinkan, upaya tersebut belum menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya, yaitu masalah pembenahan lembaga pendidikan Islam.

Dari situlah, Mukti Ali meminta beberapa orang ahli dan praktisi pendidikan Islam untuk memprakarsi pembenahan lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Departemen Agama, seperti madrasah, pesantren dan sekolah agama. Prioritas terhadap lembaga pendidikan ini juga dilandasi pada kenyataan bahwa, di lembaga pendidikan itulah sebagian besar masyarakat Muslim mempercayakan pendidikan putra-putrinya.

Namun demikian, setiap kali langkah pembenahan itu digariskan, Departemen Agama menghadapi persoalan pelik yang sangat politis sifatnya, yakni menyangkut posisi lembaga pendidikan Islam di dalam sistem pendidikan nasional. Memang disadari hingga masa itu, terdapat dualisme sistem pendidikan di Indonesia, yakni pendidikan umum yang berada di bawah tanggungjawab Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan pendidikan agama di bawah Departemen Agama. Ini adalah konsekwensi dari peristiwa-peristiwa politik yang terjadi setelah kemerdekaan, khususnya setelah terbentuk suatu departemen yang secara tersendiri mengurus bidang agama, pada 13 Januari 1946, Kementerian Agama.

Dalam rumusannya tentang pendidikan Islam, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melaporkan mengenai posisi

---

[67]Dikutip dari, *Agama dan Masyarakat*, hal. 31.

pendidikan Islam:

> Madrasah dan pesantren-pesantren yang pada hakekatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata, yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya, hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan yang nyata dari pemerintah. Karena lembaga pendidikan ini memberikan pendidikan agama, maka ia dimasukkan dalam Departemen Agama.[68]

Mengikuti rumusan ini, bisa ditarik kesimpulan bahwa lembaga-lembaga pendidikan Islam itu, yang memang sudah hidup sejak sebelum Indonesia meredeka, sudah semestinya mendapat status formal sebagai lembaga yang menjadi tanggungjawab pemerintah juga. Tetapi, posisinya tetap berbeda dari lembaga pendidikan umum. Di sinilah dualisme sistem pendidikan itu bermula.

Pemerintah memang sudah sejak lama mengambil langkah-langkah yang ditujukan untuk integrasi sistem pendidikan yang satu. Semenjak tahun 1950an, Kementerian Agama menganjurkan supaya pesantren dan madrasah disusun secara klasikal, dengan memakai kurikulum yang tetap dan memasukkan mata pelajaran umum, di samping agama. Sehingga murid-murid madrasah mendapatkan pendidikan umum yang sama dengan murid di sekolah umum. Untuk berjalannya anjuran ini, Kementerian Agama hanya memberikan bantuan bagi madrasah-madrasah yang memasukkan pelajaran umum. Lahirlah Undang-undang Pendidikan tahun 1950, pada pasal 10, yang menyebutkan bahwa belajar di sekolah agama yang mendapat pengakuan Kementerian Agama (madrasah dan pesantren yang memasukkan kurikulum yang digariskan), sudah dianggap memenuhi kewajiban belajar. Pada dasawarsa itu, tumbuh berbagai inovasi yang dilakukan para pemilik madrasah. Di samping ada SD 6 tahun, SMP dan SMA, yang berada di bawah Kementerian P dan K, didirikanlah madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah. Meskipun, dalam kaitan itu juga, masih banyak yang enggan menerima anjuran dari pemerintah dan siap untuk tidak meminta bantuan kepada Departemen Agama; karena khawatir mata pelajaran agama harus

---

[68]Dikutip dari, Bolland, *The Struggle*, hal. 37.

dikurangi secara drastis.[69]

Gejolak politik timbul pada 1961, ketika suatu rencana untuk mengatur madrasah dan lembaga pendidikan Islam di bawah satu Departemen. Dalam Rencana Pembangunan 8 tahun (1961-1969), yang diserahkan pemerintah kepada MPRS, dinyatakan, bahwa madrasah akan berkembang mengikuti tipe sekolah umum dan akhirnya akan masuk ke dalam wewenang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut konsep ini, tugas Departemen Agama akhirnya akan terbatas pada pendidikan untuk memenuhi kebutuhan pegawai Departemen yang bersangkutan. Dengan demikian, pada akhirnya posisi Departemen Agama akan dilucuti. Sebab, mengikuti rencana ini, maka tugas pendidikan agama akan dibatasi, sebagaimana juga departemen lain di luar P dan K.[70] Sekolah Pendidikan Guru dan IKIP, misalnya, di masa datang harus sudah memuat mata pelajaran yang cukup, termasuk program untuk mencetak guru agama. Sehingga, tidak akan diperlukan lagi suatu Lembaga Pendidikan Guru Agama tersendiri, seperti yang ada di Fakultas Tarbiyah IAIN. Dalam masa peralihan itulah, madrasah harus sudah mulai diarahkan secara lebih intensif oleh Departemen P & K, sehingga tujuan integrasi sistem pendidikan akan tercapai. Tetapi, MPRS sendiri, pada 1960 dan kemudian pada 1963, berkat kegigihan partai-partai Islam menolak rencana itu, menetapkan bahwa madrasah akan tetap berada di bawah tanggungjawab Departemen Agama.

Dalam kondisi yang rumit itulah, pada pemerintahan Orde Baru, Departemen Agama kembali merencanakan untuk melakukan pembenahan lembaga pendidikan Islam. Mukti Ali lantas mengambil inisiatif untuk merembuk berbagai rencana itu dengan departemen lain, khususnya Departemen P&K. Setelah melalui proses panjang dan hati-hati, lahirlah Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri — atau yang dikenal dengan SKB Tiga Menteri, No. 6 tahun 1975 dan No. 037/U/1975.

---

[69]Pembahasan yang lengkap tentang perkembangan lembaga pendidikan Islam, lihat, Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen*, (Jakarta: LP3ES, 1986).

[70]Departemen Agama, *Eksistensi dan Derap langkah Departemen Agama*, (Jakarta: Depag RI, 1996), hal. 73-74.

Dalam SKB Tiga Menteri itu digariskan: (1) Agar madrasah — dalam semua jenjang — dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat, (2) agar lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat dan lebih atas, dan (3) agar siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat, maka kurikulum yang diselenggarakan madrasah harus terdiri dari 70% pelajaran umum dan 30% pelajaran agama. Melihat garis besar dari keputusan ini, setidaknya ada dua sasaran politik yang diharapkan Mukti Ali tentang masa depan pendidikan Islam. *Pertama*, tentu saja adalah intergrasi sistem pendidikan nasional. Departemen Agama berusaha sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi pendapat umum bahwa madrasah telah siap memasukkan kurikulum pelajaran umum sebagaimana yang digariskan oleh Departemen P dan K. *Kedua*, dengan memasukkan kurikulum pelajaran umum dalam jumlah jam yang besar itu, diharapkan pembenahan madrasah untuk ditrasformasikan menjadi lembaga pendidikan yang berorientasi pada pengembangan sumberdaya manusia Muslim dapat diwujudkan. Dengan demikian, pengakuan sosial lembaga pendidikan Islam di Indonesia di masa depan akan semakin bisa diperoleh. Mukti Ali menceritakan tentang tujuannya itu sebagai:

> ... langkah agar iklim belajar-mengajar di madrasah itu terbuka, tidak hanya belajar agama saja. Tetapi, ada juga pelajaran Paspal, Ilmu Bumi, Sejarah, Matematika, dan pelajaran umum yang lain, yang semua buku pegangan dan standar nilainya itu berada di bawah peraturan resmi pemerintah. Tidak dibiarkan liar. Itu saja. Lha, persoalan 70% dan 30% itu hanya ada dalam rumusan ide kita saja. Dalam prakteknya kan bagaimana kedua jenis mata pelajaran itu saling mengisi. Itu juga yang disetujui oleh pak Syarif Thayib [Menteri P dan K waktu itu] dan pak Amir Mahmud [Mendagri].[71]

Sudah bisa diduga, respon umat Terhadap SKB Tiga Menteri 1975 demikian antusias. Gejolak politik segera muncul ke permukaan segera setelah Departemen Agama mensosialisasikan kebijakan itu. Para ulama, ustadz, dan pengelola pendidikan Islam,

---

[71]Wawancara dengan Mukti Ali, September 1997. Bergulirnya ide integrasi sistem pendidikan itu sendiri adalah proses panjang dari Syarif Thayib dan Mukti Ali. Lihat juga, "Menuntaskan Integrasi Sistem Pendidikan", dalam *Jurnal Madrasah*, No. 3 th. 1997.

yang memang merupakan orang paling langsung berurusan dengan nasib madrasah, bereaksi sangat keras dan menyatakan menolak SKB Tiga Menteri. Tuduhan kembali dialamatkan kepada Mukti Ali sebagai orang yang ingin menghancurkan lembaga pendidikan Islam. Inti penolakan itu terletak pada kenyataan bahwa, pemberlakuan kurikulum mata pelajaran umum itu begitu besar. Sehingga, dikhawatirkan akan menghilangkan misi lembaga pendidikan Islam sebagai tempat pendidikan ilmu agama.

> Saya bisa mengerti kekhawatiran itu. Bahkan, para ulama di daerah-daerah ada yang mengancam akan membunuh saya. Mungkin mengkait-kaitkan dengan peran saya pada kontroversi UU Perkawinan tahun 1973. Tetapi, sudah lah. Waktu itu, mereka belum melihat substansinya. Saya sama sekali tidak punya tujuan politik. Kalau yang dimaksud politik adalah bagaimana membuat posisi madrasah itu setara dengan sekolah umum, sekolah militer. dll, lalu semua lembaga pendidikan itu tunduk di bawah satu UU, itu benar. Sudah saya bilang tadi, pembagian 70% dan 30% itu hanya ada di dalam rumusan ide.[75]

Pada tingkat itu, menurut Mukti Ali, target yang sebenarnya adalah bagaimana umat Islam sebaiknya mengakhiri persepsi mereka tentang pembagian ilmu agama dan ilmu umum. Madrasah, sebagai lembaga pendidikan, harus berperan untuk tujuan itu.

> Saya jadi ingat, sewaktu kita ramai-ramainya disibukkan isu itu, beberapa ulama, guru madrasah, ada juga yang baru tamat dari Tarbiyah IAIN, datang ke Thamrin [Depag] mengajak berdebat. Saya terima baik-baik. Mereka lalu merinci, satu per satu, ingin membuat prosentase. Supaya nantinya bisa dibuat prosentase yang pas, berapa untuk agama, berapa untuk umum. Lalu, sampai pada mata pelajaran bahasa. Mereka bilang, bahasa Indonesia masuk pelajaran ilmu umum, sedangkan bahasa Arab masuk ke ilmu agama. Di situ saya angkat bicara: kalau orang belajar bahasa Indonesia, atau bahasa Inggris, saudara masukkan ke ilmu umum, lalu Arab ke ilmu agama, di mana letak adilnya. Bahasa itu ya bahasa manusia, tidak ada bahasa agama. Abu Jahal saja bicaranya bahasa Arab, Abu Lahab juga demikian, apakah saudara juga memasukkan itu bahasa agama. Padahal mereka memusuhi Nabi... Lalu, saya jelaskan masalahnya, ini kan hanya masalah rumusan saja. Pada prakteknya, bagaimana kedua jenis ilmu itu bisa saling mengisi ...[72]

---

[72]Wawancara dengan Mukti Ali, September 1997. Dalam versi yang lebih lengkap, *Madrasah*, Ibid.

Dengan sosialisasi yang terus-menerus oleh Departemen Agama, maka sikap umat Islam atas SKB Tiga Menteri itu lambat laun berubah. Madrasah semakin mengkuti arus kebijakan kependidikan yang telah digariskan oleh pemerintah, baik dari segi kurikulum maupun metode belajar-mengajarnya.

Hal yang sama juga terjadi pada lembaga pendidikan pesantren. Berdasarkan gagasan tentang masalah pendidikan Islam itu, Departemen Agama mulai mencanangkan modernisasi lembaga pesantren. Meskipun Mukti Ali tetap menjaga kemandirian pesantren, dengan mempertahankan sitem atau bahkan kurikulum yang sudah berjalan, keinginannya untuk membawa pesantren ke pusat perhatian pemerintah Orde Baru sangat nyata. Apa yang dimaksudkan dengan sasaran itu adalah membawa pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan Islam ke dalam *mainstream* dari rencana pembangunan nasional. Mukti Ali, misalnya lewat SKB Menteri Agama dan Menteri Pertanian No. 34 A tahun 1972, mengadakan program bersama dengan Departemen Pertanian untuk mengadakan pembinaan pondok pesantren dalam bidang pertanian dan perikanan. Kerjasama itu juga dilakukan dengan departemen-departemen lain, yang intinya ditujukan untuk memberikan pembinaan-pembinaan managerial bagi pengelolaan lembaga pendidikan Islam.

Lebih dari semua itu, perhatian Mukti Ali dalam masalah pendidikan Islam tidak hanya terbatas pada lembaga pendidikan dasar dan menengah, atau madrasah. Pada masa kementeriannya, Departeman Agama mengeluarkan kebijakan tentang pembenahan IAIN, lembaga pendidikan tinggi Islam. Segera setelah Departemen Agama mencanangkan perluasan pendidikan tinggi bagi umat Islam, seperti yang tercantum dalam Repelita I tahun 1969-1973, umat Islam secara beramai-ramai — entah atas nama yayasan agama, organisasi, pesantren, atau pribadi — mendirikan IAIN. Menurut laporan Departemen Agama, disebutkan bahwa pada pertengahan tahun 1973, jumlah lembaga pendidikan tinggi Islam se-Indonesia ada sekitar 112 IAIN, tersebar di seluruh pelosok tanah air.[73]

---

[73]Wawancara dengan Muljanto Sumardi, Juli 1997. Muljanto waktu itu bertindak sebagai Direktur Binperta, Departemen Agama RI.

Ada yang di kota besar, ada juga yang di kota kecamatan, bahkan di pedesaan.

Mempertimbangkan perkembangan ini, Mukti Ali lantas meneliti kelayakan IAIN yang berjumlah besar itu, apakah memang memenuhi persyaratan sebagai lembaga pendidikan tinggi. Hasilnya, berdasarkan Keputusan Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama (Binperta) No. 32 tahun 1975, dari 112 IAIN itu hanya 13, semuanya terdapat di kota propinsi, yang memenuhi syarat-syarat menjadi lembaga pendidikan tinggi agama dan diberi izin untuk beroperasi. Selebihnya ditutup. Sementara beberapa IAIN yang terdapat di kota Kabupaten, seperti Cirebon, Serang, Malang dan Mataram, yang dipandang memenuhi syarat dijadikan IAIN cabang yang secara administratif berada di bawah supervisi IAIN yang ada di kota propinsi. Mukti Ali mengenang kebijakannya itu sebagai sesuatu yang mendasari rencana pengembangan IAIN selanjutnya.

Pengembangan yang dimaksud adalah perbaikan kualitas IAIN selanjutnya. Mukti Ali memulai dengan langkah untuk meningkatkan mutu tenaga pengajar di IAIN. Dalam kaitan itu, Departemen Agama mulai mengirimkan dosen-dosen untuk belajar ke luar negeri, antara lain Timur Tengah, Amerika Serikat, Belanda dan Kanada; sebuah langkah, sejauh itu, baru pertama kali diambil oleh Menteri Agama dalam meningkatkan mutu akademik IAIN. Menurut Mukti Ali:

> Apa yang akan dicapai dengan program belajar lanjutan di luar negeri adalah, membina mereka untuk memiliki sikap ilmiah yang baik. Cara berpikir seorang, sebagai unsur paling depan dalam mutu akademik di perguruan tinggi, sudah harus menunjukkan sikap yang modern, terbuka dan kritis. Di Barat, mereka akan menemukan hal itu. Bukan belajarnya itu sendiri yang penting, tetapi sosialisasi, mengalami pendidikan dan memahami hidup di dalam masyarakat modern itu sendiri. Itu yang penting.[74]

Menurut catatan Departemen Agama, hingga tahun 1972, jumlah dosen IAIN dan pejabat Departemen yang dikirim belajar di Barat ada sekitar 55 orang. Meskipun disadari, bahwa keberhasilan dari program itu masih perlu diteliti lebih jauh.

---

[74]Dikutip dari *Agama dan Masyarakat*, hal. 31.

Mengamati perkembangan terakhir pendidikan Islam dewasa ini, memang sulit untuk diambil suatu kesimpulan apakah langkah-langkah integrasi dan perbaikan yang dibuat oleh Mukti Ali sudah mencapai sasaran. Dan perkembangan baru juga menunjukkan bahwa kebijakan untuk menuntaskan integrasi masih tetap berlangsung. Berdasarkan UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, lalu diikuti dengan SK Mendikbud No. 0487/U/1992 dan No. 054/U/1993, tentang kurikulum nasional, integrasi dan perbaikan lembaga madrasah dan pesantren ke dalam sistem pendidikan yang satu tetap berada dalam proses perkembangan. Namun demikian, dengan SKB Tiga Menteri 1975 itu, Departemen Agama, dalam posisinya yang sangat dilematis, dapat dipandang telah mengambil langkah yang sangat berani dalam hal mengintegrasikan sistem pendidikan Islam ke dalam pendidikan nasional.

Penutup

Mukti Ali mengakhiri jabatannya sebagai Menteri Agama menyusul terbentuknya Kabinet Pembangunan III (1978-1982). Tak jelas mengapa namanya tidak tercantum dalam susunan kabinet yang baru itu. Posisinya digantikan oleh Alamsjah Ratu Perwiranegara, seorang perwira AD yang sejauh itu merupakan orang ABRI pertama kali memimpin Departemen Agama. Mukti Ali sendiri diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA), yang diketuai oleh KH. Idham Cholid.

Meskipun demikian, ia tetap memilih untuk tinggal di Yogyakarta. Kegairahannya untuk mengajar para mahasiswa dan, dengan demikian, kembali menekuni dunia perguruan tinggi mendorongnya untuk aktif lagi mengajar di IAIN Sunan Kalijaga. Banyak sudah buku yang ditulis dan mahasiswa yang dibimbing selama periode paska kementerian ini. Sampai tulisan ini dibuat, Mukti Ali masih tetap tinggal di Yogyakarta, ditemani keempat putra-putrinya, dan 7 cucunya, yang semuanya tinggal di kota Yogyakarta.

Prestasi Mukti Ali yang tercermin dalam kebijakan-kebijakannya di atas tampaknya memang dimaksudkan untuk mengadakan suatu reorientasi dari kebijakan keagamaan Orde Baru. Ada beberapa agenda pokok yang terkandung dalam reorientasi itu. *Pertama*, kebijakan keagamaan Mukti Ali mengisyaratkan usaha-

nya untuk menjadi juru bicara tentang program modernisasi Orde Baru, dan pada saat yang sama, tetap melindungi kepentingan-kepentingan sosial dan keagamaan umat Islam. *Kedua*, Mukti Ali memainkan peran yang sangat penting sebagai "pemelihara" pluralisme keagamaan di Indonesia, baik dalam kapasitasnya sebagai akademisi maupun sebagai Menteri Agama. *Ketiga*, dalam periode kementerian Mukti Ali, Departemen Agama memperlihatkan diri sebagai lembaga pemerintah yang ingin secara sungguh-sungguh memajukan umat Islam melalui usaha perbaikan lembaga pendidikan Islam sekaligus meningkatkan mutu akademiknya.[75]

---

[75]Peta tentang tugas dan kebijakan Menteri Agama Orde Baru setelah Mukti Ali, lihat Taufik Abdullah, "The Formation of A New Paradigm: A Sketch on Contemporary Islamic Discourse," dalam, Mark Woodward, *Toward A New Paradigm*, (Tempe: Arizona State University, 1997), hal. 89-116.

Alamsjah Ratu Perwiranegara;

Stabilitas Nasional dan Kerukunan

Masykuri Abdillah

Banyak studi tentang hubungan antara Islam dengan negara pada masa Orde Baru, menganggap dasawarsa 1970-an sebagai masa ketegangan antara pemerintah dengan umat Islam.[1] Banyak faktor yang mempengaruhi hal ini, baik secara internal maupun eksternal umat Islam. Faktor internal ini antara lain adalah kemunculan kembali aspirasi sebagian tokoh Islam untuk reaktualisasi partai dan ideologi Islam dalam kehidupan politik Orde Baru, sebagaimana pada masa Demokrasi Parlementer. Namun dalam diri umat Islam sendiri sebenarnya terdapat sejumlah masalah, terutama rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi, sehingga sering diungkapkan adanya jumlah umat yang mayoritas tetapi minoritas dari segi kemampuan teknis (*numerical majority but technical*

---

[1]Lihat, antara lain, Ruth McVey, "Faith at the Outsider: Islam in Indonesian Politics", dalam James P. Piscatori (ed.), *Islam in the Political Process*, (Cambridge, London, New York, New Rochelle, Melbourne and Sydney: Cambridge University Press, 1983), hal. 199; dan Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hal.240-261.

minority). Hal ini mengakibatkan lemahnya kekuatan politik umat Islam, sehingga sering disebut "Islam mayoritas dalam jumlah, tetapi minoritas dalam konstelasi politik".[2] Sementara itu, pemerintah, yang didukung kalangan abangan, sekular dan non-Muslim, berkeinginan menghilangkan peran agama sebagai gerakan politik. Pemerintah mendukung agama (Islam) sebagai sistem kepercayaan dan bukan sebagai kekuatan politik.[3] Selanjutnya, perkembangan tadi mengakibatkan pemerintah beranggapan, bahwa sebagian umat Islam belum menerima sepenuhnya Pancasila sebagai ideologi negara.

Dalam kondisi tersebut di atas pengangkatan Alamsjah, yang berlatarbelakang militer, dan bukan pendidikan agama seperti lazimnya, sebagai Menteri Agama dianggap paling tepat oleh Presiden Soeharto, meskipun pada mulanya menimbulkan tanda tanya di kalangan sebagian tokoh Islam. Alamsjah menyadari betul permasalahan tersebut di atas, sehingga hanya dalam beberapa hari setelah ia diangkat menjadi Menteri Agama, ia berusaha menjelaskan kesalahpahaman terhadap umat Islam yang dianggap sebagai anti Pancasila. Ia juga menjelaskan kepada umat Islam tentang posisi Pancasila sebagai ideologi negara yang menurutnya merupakan "pengorbanan dan hadiah umat Islam". Upaya ini diikuti dengan upaya-upaya lain untuk mengatasi persoalan internal umat Islam, yang secara umum menurutnya berupa "kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan". Dalam pandangan Alamsjah, permasalahan-permasalahan tersebut menjadi penyebab utama munculnya ketegangan antarumat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah; dan dalam kondisi ini umat Islam sering menjadi korban dalam pergolakan politik di tanah air. Ia pun kemudian merumuskan kebijakan kerukanan beragama yang sampai saat ini masih tetap populer, yakni Trilogi Kerukunan Umat Beragama. Hal-hal inilah yang menjadi acuan bagi semua kebijakan Alamsjah ketika menjadi Menteri Agama (1978-1983).

---

[2]Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1987), hal. 52.

[3]Cf. Allan A. Samson, "Conceptions of Politics, Power and Ideology in Contemporary Indonesia", dalam Karel D. Jackson dan Lucian W. Pay (ed.), *Political Power and Communication in Indonesia*, (Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1978), hal. 222.

Kondisi Sosial Politik tahun 1978-1983

Sebagaimana disebutkan di atas, hubungan antara Islam dengan negara pada masa Orde Baru, khususnya pada 1970-an sering dianggap sebagai masa ketegangan antara pemerintah dengan umat Islam. Ketegangan ini sebenarnya mulai terjadi sejak akhir dasawarsa 1960-an, yang terutama disebabkan perbedaan latar belakang aspirasi sebagian besar tokoh pemerintahan dan militer dengan latar belakang Muslim santri. Perbedaan ini antara lain terlihat dari tiga tuntutan umat Islam dan penolakan pemerintah terhadap tuntutan ini, yaitu: (a) rehabilitasi Masyumi, (b) pemberian status resmi terhadap Piagam Jakarta, dan (c) penyelenggaraan pemilihan umum secara demokratis secepatnya. Tuntutan ini terutama terjadi karena begitu pemberontakan PKI dipatahkan, banyak umat Islam abangan mengunjungi masjid dan belajar al-Quran, sehingga banyak tokoh Islam beranggapan, bahwa lenyapnya komunis di Indonesia akan memberikan peluang bagi kemenangan Islam; Islam akan memperoleh peran penting dalam masyarakat dan menjadi kekuatan politik pada masa Orde Baru, sebagaimana pada masa Demokrasi Perlementer.

Namun tuntutan rehabilitasi Masyumi tersebut tidak dipenuhi pemerintah. Pada Desember 1966 Angkatan Darat mengeluarkan pernyataan tentang pelarangan PKI dan Masyumi, karena keduanya menyalahi Pancasila dan UUD 1945. Sebagai jawaban terhadap pernyataan ini, Prawoto Mangkusasmito, mantan ketua umum Masyumi ketika dibubarkan, mengirimkan surat kepada Ketua Presidium Kabinet, Jenderal Soeharto untuk mengemukakan keberatannya terhadap anggapan bahwa Masyumi memiliki status yang sama dengan PKI; karena Masyumi membubarkan dirinya, bukan dilarang. Soeharto membalas surat ini dengan mengatakan, bahwa pertimbangan konstitusional dan psikologis menjadikan Angkatan Darat tidak dapat menerima rehabilitasi ini.[4] Sedangkan tuntutan untuk memberikan status resmi Piagam Jakarta, sebagaimana dituntut partai-partai Islam dalam sidang-sidang MPRS tahun 1968, juga berakhir dengan kegagalan; meski mereka mengajukan tuntutan ini dengan penegasan menjadikan Pancasila se-

---

[4]Nasir Tamara, "Islam under the New Order : A Political History", dalam *Prisma* (edisi bahasa Inggris), No. 49, 1990, hal. 11.

bagai dasar negara. Tuntutan semacam ini bahkan menimbulkan tudingan, bahwa umat dan partai Islam masih ingin mendirikan "Negara Islam". Para tokoh Islam menegaskan kembali, bahwa pembicaraan tentang Piagama Jakarta tidak relevan lagi, karena piagam ini telah mendapatkan pengakuan dalam Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, yakni bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan menyatu dengan konstitusi ini.[5] Pemerintah kemudian menegaskan kembali, bahwa setiap upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara adalah tindakan subversif.

Sementara itu, Pemilu baru dilaksanakan pada 1971, yakni setelah terjadi perdebatan antara pemerintah dengan DPR tentang peraturan Pemilu. Salah satu di antara peraturan ini adalah bahwa masyarakat tidak diperkenankan dalam kampanye mempersoalkan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk menghadapi Pemilu, pemerintah memperkuat Golongan Karya (Golkar) sebagai organisasi politik yang mendukungnya. Sedangkan umat Islam (kelompok santri) pada umumnya tetap berada dalam partai masing-masing, yakni NU, PSII, Perti dan Parmusi yang baru dibentuk pada 1968 oleh para mantan tokoh Masyumi. Terlepas dari kritik-kritik terhadap pelaksanaan Pemilu yang dinilai belum demokratis, dalam Pemilu 1971, Golkar memperoleh kemenangan besar (62 %), sedangkan partai-partai Islam hanya mendapat 27,1 %.

Di sisi lain, pemerintah banyak mendapat dukungan dari kelompok abangan, sekular dan non-Muslim, yang memiliki aspirasi berbeda dengan partai-partai Islam yang didukung kelompok santri. Kelompok non-santri ini menjadi pendukung pemerintah dalam merumuskan program-program pembangunan. Akibatnya, muncul kritik dari sebagian tokoh dan intelektual Muslim terhadap ide-ide pembangunan dan modernisasi pemerintah pada masa awal Orde Baru, karena dinilai serupa dengan konsep pembangunan di negara-negara maju (Barat) yang *nota bene* sekular. Namun kemudian dicapai kesepakatan, bahwa pembangunan dan modernisasi yang dilaksanakan tidak identik dengan "western-

---

[5]Allan A. Samson, "Conception of Politics, Power and Ideology in Contemporary Indonesia", dalam Karel D. Jackson dan Lucian W. Pay (ed.), *Political Power and Communication in Indonesia*, (Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1978), hal. 222.

isasi". Hakekat pembangunan nasional pun dirumuskan sebagai "pembangunan manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia"; pembangunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan baik material maupun spiritual untuk mewujudkan manusia seutuhnya.

Sejalan dengan pelaksanaan pembangunan, pemerinatah juga melancarkan program penataan politik, melalui serangkaian kebijakan seperti deideologisasi, depolitisasi, *floating mass* dan lain-lain. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya untuk mengoreksi praktik politik masa lalu yang menempatkan politik sebagai panglima. Pada waktu itu, menurut pemerintah Orde Baru, partai-partai politik yang berorientasi pada politik aliran terlibat dalam konflik-konflik ideologis yang berkepanjangan, sehingga kurang memiliki perhatian pada upaya menciptakan kesejahteraan rakyat. Atas dasar ini, pemerintah Orde Baru menetapkan kebijakan massa mengambang (*floating mass*) dan depolitisasi atau deideologisasi agama atau sub-ideologi tertentu dalam berbagai partai politik. Upaya ini direalisasikan, misalnya, dengan penyederhanaan organisasi politik melalui fusi pada 1973, dari 10 menjadi tiga partai, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan fusi dari empat partai Islam, yakni NU, Parmusi, PSII dan Perti; dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), fusi dari PNI, Parkindo, Partai Katholik, Murba dan IPKI. Sedangkan Golkar tetap sebagai organisasi politik yang didukung pemerintah. Partai Islam merasa dirugikan dengan kebijakan ini, karena unsur-unsur dari bekas partai yang lalu tidak sepenuhnya cocok. Selain itu, dengan kebijakan *floating mass*, partai tidak dapat menjalin hubungan langsung dengan para pendukungnya di tingkat bawah, sehingga kurang efektif. Di samping itu, karena tumbuhnya kembali kecurigaan terhadap Islam, maka para politisi Muslim dalam PPP kurang bisa mengekspresikan aspirasi Islam secara bebas.

Semua keadaan tersebut di atas menjadikan umat Islam cenderung berhadapan secara oposisional dengan pemerintah; banyak politisi, tokoh agama, ulama dan intelektual Muslim mengambil sikap kritis terhadap pemerintah. Bahkan pada dasawarsa ini umumnya fatwa-fatwa ulama mewajibkan umat Islam memilih partai Islam dalam Pemilu. Banyak tokoh Islam mengritik pemerintah dalam ceramah atau khutbah-khutbah mereka. Di pihak lain, pemerintah membatasi aktivitas da'wah Islam, termasuk mem-

berlakukan keharusan adanya surat izin dari aparat keamanan setempat bagi da'i sebelum penyampaian dakwah. Ketegangan ini membuat komunikasi antara umat Islam dengan pemerintah kurang lancar, sehingga muncul tuduhan dari kalangan pemerintah, bahwa umat Islam anti Pancasila, anti pembangunan dan anti modernisasi.[6] Sebaliknya, muncul pula tuduhan dari kalangan umat Islam, bahwa pemerintah cenderung sekular dan anti Islam. Salah satu kasus yang menunjukkan ketegangan antara kedua belah pihak adalah pengajuan RUU tentang Perkawinan pada 1973; banyak pasalnya, menurut kaum Muslimin, bertentangan dengan Islam. Tetapi karena protes-protes keras dari umat Islam baik melalui lobby maupun demonstrasi, akhirnya RUU ini harus direvisi sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Sementara itu, pemerintah merasa kesulitan dalam berkomunikasi dengan umat Islam, karena tidak ada organisasi Islam yang betul-betul supportif terhadap pemerintah. Karena itu, pemerintah kemudian membentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 1975. Organisasi baru ini berfungsi : (1) memberikan fatwa atau nasehat tentang masalah agama dan masalah-masalah sosial, (2) meningkatkan ukhuwwah (persaudaraan) Islam serta memelihara sikap toleran dengan kelompok-kelompok agama lain, (3) mewakili umat Islam dalam komunikasi dengan pemeluk agama lain, dan (4) bertindak sebagai media komunikasi antara ulama dengan pemerintah, dan untuk menterjemahkan kebijakan pemerintah tentang pembangunan, agar dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat umum.[7] Namun demikian, keberadaan MUI tidak lantas menjadikan komunikasi antara umat Islam dengan pemeriantah menjadi lancar. Buktinya, ketegangan itu masih berlangsung sepanjang dasawarsa 1970-an, meskipun sejak tahun 1978 agak mereda ketika Alamsjah menjabat Menteri Agama.

---

[6]Tuduhan yang lebih berat lagi adalah tuduhan ekstrimisme di kalangan umat Islam, dengan dalih munculnya gerakan-gerakan komando jihad yang akan mendirikan negara Islam Indonesia.

[7]Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Risalah-Rajawali, 1983), hal. 141.

Ketegangan juga tampak dalam Pemilu 1977, di mana PPP menggunakan fatwa atau isu agama dalam kampanye; hal yang sama juga dilakukan Golkar dan, dalam skala terbatas, PDI. Ini mendorong Menteri Dalam Negeri, Amir Machmud untuk menghimbau agar para kontestan Pemilu tidak menggunakan isu agama dalam kampanye atau memanfaatkan agama untuk kepentingan politik. PPP yang mengklaim sebagai satu-satunya partai Islam, secara potensial, bisa sangat diuntungkan dengan penggunaan isu agama ini. Berbeda dengan Pemilu 1971 ketika antara satu partai Islam dengan partai Islam lainnya berada dalam konflik atau persaingan, pada Pemilu 1977 hanya ada satu partai Islam, sehingga seolah-olah lebih mudah bagi PPP "mempersatukan" umat Islam. Namun ternyata PPP hanya dapat meningkatkan suara 2,2% dari Pemilu 1971, yakni dari 27,1% menjadi 29,3%. Golkar sendiri pada Pemilu 1977 mendapatkan suara 62,1% atau turun 0,7% dari Pemilu 1971 yang mendapat suara 62,8%, sedangkan PDI mendapat suara hanya 8,6% atau turun 1,5% dari Pemilu 1971 ketika partai-partai pendukungnya (PNI, Parkindo, Partai Katholik, Murba dan IPKI) secara keseluruhan mendapat suara 10,1 %.

Pada Pemilu 1977 tersebut memang sudah tidak ada partai politik yang mengunakan agama, tetapi partai politik masih boleh menjadikan agama atau "sub-ideologi" tertentu sebagai asas partai di samping ideologi Pancasila. Keadaan ini dipandang oleh pemerintah sebagai potensial bagi terjadinya konflik ideologis di kalangan masyarakat. Apalagi ketika dalam sidang penetapan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) pada sidang umum MPR 1978, PPP menolaknya dengan melakukan *walk out*. Sebenarnya keberatan PPP terhadap P4 tidak terletak pada substansinya, melainkan pada dasar hukumnya, yakni TAP MPR. Bagi PPP P4 itu cukup ditetapkan dengan perundangan lebih rendah, tidak dengan TAP MPR. Kenyataan bahwa partai ini mendukung substansi P4 terlihat ketika pemerintah mengumumkan program penyelenggaraan penataran P4, PPP termasuk organisasi pertama yang mengajukan penataran bagi para pengurusnya. Penataran P4 dan upaya pemasyarakatan lain yang cukup intensif di kalangan ulama dan umat Islam, terutama yang dilakukan oleh Menteri Agama Alamsjah sebagaimana akan diuraikan kemudian, menjadikan mereka semakin memahami Pancasila sebagai ideologi negara. Tetapi pemerintah merasa belum cukup dengan langkah-

langkah ini. Pada sidang umum MPR tahun 1983 pemerintah mengajukan ketetapan untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi politik. Kemudian pada 1985 diundangkan UU Keormasan yang menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas setiap organisasi massa.

Dalam kenyataannya, peristiwa *walk out* tersebut tidak hanya memperkuat kekhawatiran pemerintah terhadap munculnya konflik ideologis di kalangan masyarakat, melainkan juga menjadi pemicu munculnya konfilk internal PPP, terutama setelah meninggalnya Rais Am Dewan Penasehat PPP, K.H. Bisjri Sansuri tahun 1980. Konflik itu terjadi terutama antara kubu NU yang umumnya kritis terhadap pemerintah dengan kubu Muslimin Indonesia (MI) yang umumnya akomodatif terhadap pemerintah.[8] Konflik ini ternyata juga mempengaruhi perolehan PPP dalam Pemilu tahun 1982, meskipun tidak terlalu besar. Dalam Pemilu ini PPP kehilangan suara 2,1 % menjadi 27,2 %, Golkar mendapatkan tambahan suara menjadi 64,3 %, sedangkan PDI hanya mendapatkan suara 7,9 %.

Kekalahan partai Islam dalam ketiga Pemilu serta posisi oposisional umat Islam *vis-a-vis* pemerintah, menjadikan umat berada di luar kekuasaan,[9] sehingga muncul ungkapan "Islam mayoritas, tetapi minoritas dalam konstelasi politik".[10] Hal ini juga mengakibatkan semakin kurangnya akses umat Islam di bidang

---

[8]Lihat, antara lain, Fachry Ali dan Iqbal Abdurrauf Saimima, "Merosotnya Aliran dalam Partai Persatuan Pembangunan", dalam *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1991), hal. 256

[9]Seorang pengamat, Ruth McVey, bahkan membuat judul dalam sebuah artikelnya *Faith as the Outsider: Islam in Indonesian Politics*. Dalam artikel ini ia, antara lain, menulis:

> By 1968 tension between government and Islam was openly acknowledged; from then on, religious parties and activists appeared ever more clearly in opposition, and with the general election of 1977 Islam established itself as the chief popular voice against the regime. It is not the Muslim modernist who led the protest, however, but the hitherto reluctantly political traditionalists. Their opposition does not simply reflect the reaction of rural obscurantism; to the contrary, 'traditional' Islam has increasingly become the voice of younger-generation, urban protest against the status quo ...

Lihat Ruth McVey, "Faith at the Outsider," hal. 199.

[10]Lihat Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat*, hal. 52.

ekonomi. Kegiatan ekonomi sebagian besar semakin dikuasai kalangan non-Muslim, sementara masyarakat bawah yang umumnya umat Islam itu masih berada dalam kemiskinan. Tingkat ekonomi yang masih rendah ini berpengaruh pula pada tingkat pendidikan mereka, yang rata-rata masih rendah pula. Keadaan ini mendorong para tokoh Islam merumuskan kembali format perjuangan Islam. Kalau pada masa lalu, para tokoh Islam mengidentifikasikan format perjuangan Islam dengan pendekatan politik, tetapi sejak tahun 1970-an banyak dari mereka merumuskan perjuangan dengan penekanan pada pendidikan dan da'wah. Dalam kenyataannya, format perjuangan baru ini, yang sering disebut sebagai "pendekatan kultural", membuahkan hasil cukup besar, yang baru terlihat setelah pertengahan dasawarsa 1980-an, yakni dengan semakin banyaknya kalangan santri yang terdidik dengan pendidikan moderen, sehingga banyak dari mereka yang masuk dalam birokrasi, militer dan akademik serta dunia profesi dan bisnis, meskipun dua bidang terakhir ini terhitung masih sedikit. Demikian pula, dengan penyelenggaraan da'wah yang lebih intensif semakin banyak orang yamg semula abangan kemudian menjadi santri.

Menjadi Menteri Agama

Di tengah kondisi sosial politik yang tidak menguntungkan umat Islam itu, Alamsjah diberi kepercayaan oleh Presiden Soeharto yang terpilih kembali dalam sidang umum MPR 1988 menjadi Menteri Agama. Dilihat dari konteks sosial politik tadi, tugas yang diembannya cukup berat. Oleh karena itu, di samping tugas utama, ia juga memiliki tugas khusus yang diamanatkan oleh Presiden Soeharto dan segera dilaksanakan, yakni :

1) Membimbing dan mengarahkan agar seluruh umat beragama masuk dalam kerangka Pancasila dan UUD 1945;
2) Mengarahkan supaya seluruh umat beragama di Indonesia menjadi faktor yang membantu usaha pemantapan stabilitas dan ketahanan nasional;
3) Menghilangkan segala keraguan dan kecurigaan yang sudah berjalan hampir 33 tahun antara umat beragama dan pemerintah, sehingga akhirnya umat beragama dan pemerintah dapat bersama-sama membangun bangsa dan negara berdasarkan Pancasila;

4) Membimbing dan mengarahkan umat beragama untuk meningkatkan keikutsertaan dalam Pembangunan Nasional dan memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.[11]

Dalam rangka pelaksanaan tugas khusus tersebut, Menteri Agama Alamsjah menetapkan tiga prioritas utama, yakni (1) menetapkan ideologi dan falsafah Pancasila dalam kehidupan umat beragama, (2) memantapkan stabilitas dan ketahanan nasional, dan (3) meningkatkan partisipasi umat beragama dalam menyukseskan pembangunan nasional di segala bidang yang berkesinambungan, sehingga terjamin persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara Republik Indonesia yang utuh berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.[12] Di antara ketiga prioritas utama, yang segera ditangani adalah butir pertama, karena beberapa hari menjelang ia diangkat secara resmi sebagai menteri, Presiden mengamanatkan kepadanya untuk "menjelaskan kepada umat beragama, umat Islam khususnya mengenai Pancasila, sehingga mereka tidak lagi bersikap *a priori*. Selama Pancasila tidak jelas bagi umat Islam, atau sebagian dari mereka tidak dapat menerimanya, persatuan dan kesatuan nasional ini tetap dalam keadaan rapuh".[13]

Untuk melaksanakan amanat Presiden tersebut Menteri Agama Alamsjah berusaha menjelaskan hakekat Pancasila, termasuk TAP MPR Nomor II/MPR/1978 tentang P4, di kalangan umat beragama, terutama umat Islam. Dengan penjelasan ini banyak di antara para tokoh agama kemudian mengetahui lebih jelas tentang hakekat Pancasila ini, sehingga dapat menghilangkan ketegangan ideologis di kalangan tokoh agama, yang semula kurang memahami betul Pancasila sebagai ideologi negara. Ia pun menjelaskan bahwa tokoh-tokoh Islam masuk dalam Panitia Sembilan yang merumuskan Pancasila pada 22 Juni 1945 dalam naskah Piagam Jakarta. Mereka adalah Ki Bagus Hadikusumo, K.H.A. Wa-

---

[11]Alamsjah Ratu Perwiranegara, *Pembinaan Kehidupan Beragama di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1982), hal. 38.

[12]*Amal Bakti Departemen Agama RI (50 Tahun Departemen Agama): Eksistensi dan Derap Langkahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1996).

[13]Suparwan G. Parikesit dan Krisna R. Sempurnadjaja, *H. Alamsjah Ratu Perwiranegara: Perjalan Hidup Seorang Anak Yatim Piatu*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hal. 244.

hid Hasyim, A. Kahar Muzakkir dan H. Agus Salim. Dalam berbagai acara di kalangan tokoh dan warga NU Alamsjah menjelaskan peran Wahid Hasyim dalam perumusan Pancasila; sementara di kalangan tokoh dan warga Muhammadiyah ia menjelaskan peran Ki Bagus Hadikusumo dalam perumusan itu. Ia bahkan mengatakan bahwa warga NU yang menolak Pancasila berarti mengkhianati Wahid Hasyim, sedangkan warga Muhammadiyah yang menolak Pancasila berarti mengkhianati Ki Bagus Hadikusumo.[14]

Di antara ungkapan Alamsjah yang populer adalah "Pancasila merupakan pengorbanan dan hadiah umat Islam".[15] Ungkapan ini sempat mengundang pertanyaan dari kalangan nasionalis dan non-Muslim, karena mereka juga merasa berperan besar dalam merumuskan Pancasila. Alamsjah menjawab pertanyaan ini dengan mengatakan bahwa dalam sidang-sidang BPUPKI kelompok Islam menuntut agar dasar negara Indonesia adalah Islam, karena mayoritas penduduk negara ini beragama Islam. Namun kemudian dicapai konsensus antara kelompok-kelompok yang ada dalam bentuk rumusan Piagam Jakarta, yang sila pertamanya berbunyi "Ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya". Sesudah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 ternyata rakyat Indonesia bagian timur yang mayoritas beragama Kristen dan Katholik keberatan dengan kata-kata ini, dan meminta agar ketujuh kata tersebut dicoret. Demi persatuan dan kesatuan bangsa, para tokoh Islam bersedia mencoretnya. Menurut Alamsjah, pencoretan ini merupakan pengorbanan dari umat Islam, dan karena itu, tepat juga kalau dikatakan bahwa pengorbanan ini sebagai hadiah. Namun ia menambahkan pula bahwa kalangan non-Muslim juga ikut berkorban dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.[16]

Untuk memasyarakatkan Pancasila dan P4 tersebut, Departemen Agama merintis pelaksanaan P4 bagi umat beragama yang

---

[14]Lihat Suparwan G. Parikesit, *H. Alamsjah*, hal. 249-258.

[15]Alamsjah Ratu Perwiranegara, "Islam and other Religions: A Case of an Inter-Religious Life in Indonesia", dalam *Dialog*, No. 4, Maret Tahun VII, hal. 5.

[16]Lihat Suparwan G. Parikesit, *H. Alamsjah*, hal. 249-254.

dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan dakwah dan penerangan agama. Sasaran pada tahap pertama adalah sejumlah tokoh dan juru penerang agama (*da'i*) baik di pusat maupun di daerah yang diharapkan menjadi pelopor dalam pemasyarakatan P4 melalui jalur agama. Sejak itu, dalam berbagai kesempatan penerangan agama (khutbah dan ceramah-ceramah agama) banyak para juru penerang mengaitkan ajaran agamanya dengan Pancasila atau P4. Dalam ceramah-ceramah agama ini sering ditegaskan, bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan agama, karena masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Pancasila adalah falsafah hidup bangsa Indonesia dan ideologi negara Indonesia yang harus menjadi pedoman bersama bagi bangsa Indonesia, sedangkan agama adalah tuntunan hidup yang berasal dari Tuhan untuk menjadi pedoman bagi pemeluk agama masing-masing. Orang yang taat beragama dapat sekaligus menjadi orang yang Pancasilais; dan sebaliknya, orang yang Pancasilais dapat sekaligus menjadi orang yang taat beragama. Alamsjah bahkan mengatakan, bahwa pada hakekatnya umat beragama telah melaksanakan Pancasila. Sejalan dengan upaya ini, disebarkan pula buku-buku tentang P4 menurut ajaran masing-masing agama, agar lebih mudah dipahami umat beragama.

Selain tentang Pancasila, Alamsjah juga menjelaskan tentang masalah aliran kepercayaan yang pada sidang umum MPR 19778 ditolak PPP masuk dalam GBHN. Umat Islam memang khawatir kalau aliran kepercayaan itu menjadi agama, karena nantinya bisa jadi akan ada ratusan agama di Indonesia ini. Setelah berkonsultasi dengan presiden, Alamsjah menjelaskan bahwa aliran kepercayaan itu bukan agama, tetapi kebudayaan; dan karena itu, tempatnya bukan di Departemen Agama, melainkan di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.[17] Dimasukkannya aliran kepercayaan dalam GBHN merupakan upaya pembinaan agar ia tidak mengarah pada pembentukan agama baru. Penjelasan ini disambut gembira umat Islam yang sejak beberapa tahun sebelumnya khawatir dengan adanya dukungan sebagian pejabat terhadap berkembangnya aliran kepercayaan. Kedudukan aliran keper-

[17]Lihat Suparwan G. Parikesit, *H. Alamsjah*, hal 248.

cayaan ini ditegaskan kembali dalam pidato Presiden Soeharto pada 16 Agustus 1978 di depan sidang DPR, yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Agama kepada Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia, yang isinya antara lain "bahwa dalam negara Pancasila tidak dikenal adanya tatacara perkawinan, sumpah dan penguburan jenazah menurut aliran kepercayaan dan tidak dikenal pula penyebutan aliran kepercayaan sebagai 'agama' baik dalam kartu penduduk dan lain-lain".[18] Kebijakan Menteri Agama ini mendapatkan sambutan Menteri Dalam Negeri dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 557/268/SJ tanggal 12 Januari 1980, yang menginstruksikan agar semua perkawinan dilaksanakan menurut Ketetapan Menteri Agama Nomor MA/650/79 tanggal 18 Desember 1979 sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Adapun tugas utama yang dilaksanakan oleh Alamsjah adalah tugas pokok Departemen Agama sebagaimana dinyatakan dalam Kepres Nomor 44 tahun 1975, yakni menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang agama. Sedangkan tujuan pembangunan nasional di bidang agama yang ingin dicapai dalam Repelita III, sebagaimana ditetapkan dalam Kepres No. 7 tahun 1979 adalah :

1) Menciptakan masyarakat Pancasila yang agamis/masyarakat pemeluk agama dengan menikmati kehidupan beragama;
2) Seluruh umat beragama menjadi unsur utama (soko guru) dari negara yang berdasarkan Pancasila;
3) Masyarakat beragama menempatkan diri sebagai modal utama pembangunan, keagamaan dan ketahanan nasional dari negara yang berdasarkan Pancasila;
4) Agama menjiwai kehidupan bangsa dan mempengaruhi sikap hidup, tingkah laku dan perbuatan sehari-hari.[19]

Kebijakan-kebijakan Menteri Agama Alamsjah dalam melaksanakan tugas pokok Departemen Agama tersebut dapat diklasifikasikan menjadi delapan bidang.

---

[18]*Amal Bakti Departemen Agama*, hal. 82.
[19]Alamsjah Ratu Perwiranegara, *Pembinaan*, hal. 36.

1. *Pembinaan Aparat dan Struktur Organisasi*

Kondisi administrasi dan manajemen Departemen Agama pada waktu itu masih belum rapi. Demikian pula tingkat kecakapan dan kesejahteraan para aparatnya. Hal ini disebabkan sebagian besar aparat departemen ini berlatarbelakang pendidikan agama, yang pada umumnya kurang memiliki keterampilan teknis, administratif dan manajerial. Sementara sistem pendidikan dan latihan (diklat) bagi pegawai negeri pada waktu itu belum terlaksana secara sistematis. Kondisi demikian ini menjadikan Departemen Agama sebagai departemen kelas dua, sehinga banyak pegawainya sendiri enggan menyebut dirinya sebagai pegawai Departemen Agama. Menyadari keadaan ini, Alamsjah sejak pertama menjabat Menteri Agama berupaya menata kembali sistem administrasi dan manajemen serta meningkatkan kecakapan dan kesejahteraan aparatnya. Penataan ini dilakukukan, antara lain, dengan penyempurnaan mekanisme dan sistem perencanaan, pengendalian, pengawasan pembangunan, penyempurnaan organisasi dan tata kerja, penyempurnaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kearsipan. Karena dalam penataan ini faktor manusia sangat menentukan, maka dilaksanakan pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani administrasi dan manajemen, terutama dengan penataran pegawai, Sespa, Sepadya dan Sepala.

Menteri Alamsjah juga berusaha meningkatkan kesejahteraan pegawai, karena hal ini sangat menunjang produktivitas kerja pegawai. Upaya ini dilakukan, antara lain, dengan membentuk koperasi pegawai, menyediakan alat transportasi (bus) untuk antar jemput mereka serta memberikan makanan di siang hari. Di sisi lain, peningkatan kemampuan pegawai juga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan pegawai, karena dengan adanya kemampuan teknis administratif dan manjerial, mereka akan mampu pula menyusun program-program/proyek-proyek dengan baik, yang sedikit banyaknya juga akan menambah penghasilan mereka. Kalau semula penghasilan tambahan itu tidak ada atau sangat sedikit, hal ini terutama disebabkan kurangnya kemampuan mereka menyusun perencanaan ini.

Kemudian dalam rangka peningkatan struktur organisasi dan

tata kerja tersebut dilakukan penyempurnaan Keputusan Menteri Agama No. 18/1975 sebagai penjabaran Kepres No. 44 dan 45 dengan Keputusan Menteri Agama No. 6/1979 sebagai penjabaran Kepres No. 30/1978, yakni tentang pembentukan dua Direktorat Jenderal di kalangan Islam, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji dan Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam. Penyempurnaan struktur ini merupakan solusi terhadap semakin banyaknya tugas-tugas yang berkaitan dengan pembinaan masyarakat Islam, yang jika hanya ditangani satu Ditjen saja, tugas-tugas itu tidak akan dapat ditangani dengan efektif.

Di samping itu, dikeluarkan pula Keputusan Menteri Agama No. 66/1980 sebagai penjabaran Kepres No. 22/1980 tentang Ditjen Bimas Hindu dan Buddha. Sejalan dengan ini, kalau semula hanya hari raya agama Islam, Protestan dan Katholik saja yang dijadikan sebagai hari libur nasional, maka sejak 1980 hari raya Hindu, Waisak, dan hari raya Buddha, Nyepi, juga dijadikan sebagai hari libur nasional. Hal ini untuk memperlakukan kelima agama resmi di Indonesia secara adil. Sebelum munculnya kebijakan ini, sering umat Hundu dan Buddha merasa kurang diperhatikan eksistensinya, karena mereka tidak memiliki hari raya keagamaan sebagai hari libur nasional.

2. *Penyiaran Agama*

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pengamalan ajaran agama masing-masing umat serta partisipasi mereka dalam pembangunan, diadakanlah penyiaran atau penerangan agama, terutama terhadap kelompok-kelompok masyarakat tertentu, seperti karyawan, suku terasing, transmigran, narapidana, tunasusila, dan sebagainya. Penerangan agama ini diberikan kepada semua umat, baik umat Islam, Protestan, Katholik, Hindu maupun Buddha. Namun, ada satu hal yang menjadi ganjalan umat Islam untuk berdakwah, yakni keharusan adanya izin dari aparat keamanan. Dengan keharusan izin ini banyak da'i yang dicekal, tidak boleh dakwah, terutama mereka yang dianggap kritis terhadap pemerintah. Menyadari hal ini, setelah berkonsultasi dengan Presiden Soeharto dan berbicara dengan Kaskopkamtib Sudomo pada 20 Mei 1978, Alamsjah menghapuskan keharusan minta izin dalam pelaksanaan dakwah dan kuliah subuh di radio, melalui Keputusan Menteri Agama No. 44 tahun 1978, yang ditetapkan pada 23

Mei 1978. Surat Keputusan ini berisi, antara lain: (1) bahwa untuk kegiatan-kegiatan dakwah dan kuliah subuh tidak diperlukan izin, (2) isi dakwah dan kuliah subuh hendaknya bersifat pembinaan akhlak serta iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, (3) dakwah dan kuliah subuh tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, serta tidak mengganggu stabilitas nasional.

Hal lain yang menjadi ganjalan dalam hubungan antarumat beragama adalah adanya kegiatan penyiaran agama secara intensif kepada orang-orang yang sudah beragama; "Kristenisasi" sempat meresahkan di kalangan masyarakat Islam. Menyadari bahwa keresahan ini bisa mempengaruhi stabilitas nasional, Menteri Agama Alamsjah mengeluarkan Surat Keputusan No. 70 tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama, yang ditetapkan pada 1 Agustus 1978. Surat Keputusan ini berisi:

1) Untuk menjaga stabilitas nasional dan demi tegaknya kerukunan antar umat beragama, pengembangan dan penyiaran agama supaya dilaksanakan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, tepo seliro, saling menghargai, hormat mengormati antar umat beragama sesuai jiwa Pancasila.
2) Penyiaran agama tidak dibenarkan untuk :
   a) Ditujukan terhadap orang dan atau orang-orang yang telah memeluk agama lain;
   b) Dilakukan dengan menggunakan bujukan/pemberian meterial, uang, pakaian, makanan/minuman, obat-obatan dan lain-lain agar supaya orang tertarik untuk memeluk suatu agama.
   c) Dilakukan dengan cara-cara penyebaran pamflet, buletin, majalah, buku-buku dan sebagainya di daerah-daerah/di rumah-rumah kediaman umat/orang yang beragama lain,
   d) Dilakukan dengan cara-cara masuk keluar dari rumah ke rumah orang yang telah memeluk agama lain dengan dalih apapun.

Erat hubungannya dengan persoalan penyiaran agama adalah persoalan bantuan luar negeri kepada lembaga-lembaga keagamaan di Indonesia. Persoalan bantuan luar negeri ini menjadi salah satu pemicu ketegangan hubungan antarumat beragama, karena dengan bantuan ini suatu agama bisa melakukan aktivitas dan

penyiaran agama dengan intensif, termasuk kepada orang yang beragama lain, dengan memanfaatkan kelemahan sosial ekonomi pemeluk agama lain. Sebelum 1978, bantuan luar negeri di luar kontrol pengetahuan pemerintah, sehingga tidak dapat diketahui bentuk dan pemanfaatan bantuan itu. Melihat kondisi tersebut, Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan No. 77 Tahun 1978, tertanggal 15 Agustus 1978, tentang Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga-Lembaga Kegamaan di Indonesia. Surat Keputusan ini antara lain berisi, bahwa bantuan luar negeri kepada lembaga-lembaga keagamaan di Indonesia, baik berupa tenaga, benda atau keuangan, harus dimintakan persetujuan Menteri Agama lebih dahulu, agar dapat diketahui bentuk bantuannya, negara/lembaga luar negeri yang memberikan, serta pemanfaatan bantuan. Dengan demikian, pemerintah dapat memberikan bimbingan, pengarahan dan pengawasan terhadap bantuan tersebut, sehingga bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendukung pembangunan nasional.

Kedua Surat Keputusan tersebut kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, masing-masing Nomor 1 Tahun 1979 tertanggal 2 Januari, tentang Tatacara Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia. Sebagian umat Kristen Protestan dan Katolik, sebagaimana terlihat dari surat Dewan Gereja-Gereja Indonesia (DGI) dan Majelis Agung Wali Gereja Indonesia (MAWI), keberatan dengan SK atau SKB ini, karena berarti mempersempit gerak mereka dalam menyiarkan agama di kalangan orang yang sudah beragama. Padahal, menurut mereka, agama mereka memerintahkan umatnya untuk menyebarkan ajaran agama, termasuk kepada orang-orang yang sudah beragama sekali pun. Reaksi keras juga ditunjukkan kalangan luar negeri, karena hal ini berarti menghalangi berkembangnya suatu agama, yang dianggap sebagai hak asasi manusia. Namun setelah mereka memahami kondisi sosial Indonesia dan demi persatuan dan kesatuan bangsa, pada umumnya mereka bisa menerimanya.

3. *Kerukunan Antarumat Beragama*

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai suku dan agama. Hetrogenitas agama ini sangat potensial bagi munculnya konflik atau ketegangan antaragama dan

bahkan antarsesama pengikut agama tertentu. Pada dasawarsa 1970-an terjadi ketegangan atau saling curiga (*mutual distrust*) antara pemerintah dengan umat Islam dan antara umat Islam dengan umat lain, terutama Kristen yang dianggap mendapatkan angin dari pemerintah. Konflik fisik antara kelompok Muslim dengan kelompok non-Muslim pernah beberapa kali terjadi, meskipun hal ini juga dipengaruhi faktor sosial ekonomi dan politik. Bahkan kadang-kadang terjadi pula konflik antarpemeluk agama yang sama, hanya karena perbedaan aliran atau mazhab. Hal semacam ini dapat memperlemah persatuan dan kesatuan nasional, serta mengganggu stabilitas nasional. Maka Menteri Agama Alamsjah menerapkan kebijakan Trilogi Kerukunan Umat Beragama, yakni (1) kerukunan intern umat beragama, (2) kerukunan antarumat beragama, dan (3) kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah.

Untuk memantapkan kerukunan intern umat beragama, Departemen Agama mendorong para pemeluk agama untuk saling menghargai perbedaan pendapat dan aliran/mazhab yang mereka ikuti. Upaya ini dilakukan dengan cara, antara lain, mempertemukan para tokoh agama dari berbagai organisasi keagamaan yang ada untuk membicarakan hal-hal yang menjadi persoalan dasar umat, sehingga dapat dicapai kesepakatan tentang bentuk pembinaan umat. Sejalan dengan ini, umat beragama dihimbau agar menghindari hal-hal yang memicu perselisihan. Menteri Agama Alamsjah juga memperingatkan bahaya fanastisme buta yang diikuti umat, misalnya dengan mengatakan bahwa pemahaman dirinya/alirannya saja yang benar, sedangkan lainnya salah.[20] Klaim semacam ini dapat merusak kerukunan umat, karena hal ini berarti menganggap orang/aliran lain sesat.

Kemudian, untuk memantapkan kerukunan antarumat beragama, Menteri Agama juga membentuk Wadah Musyawarah Antarumat Beragama, melalui Surat Keputusan Menteri Agama No. 35 Tahun 1980, yang ditetapkan pada 30 Juni 1980. Wadah ini merupakan forum komunikasi antarumat beragama di Indonesia, agar para pemimpin masing-masing agama dapat memusyawarahkan

[20]Lihat Alamsjah Ratu Perwiranegara, "Islam and other Religions," hal. 9.

persoalan-persoalan nasional, terutama yang terkait dengan kehidupan umat beragama. Dalam wadah yang hanya ada di pusat ini, masing-masing umat diwakili oleh majelis agamanya, yakni :

a. Mejelis Ulama Indonesia (MUI) untuk umat Islam,
b. Dewan Gereja-Gereja di Indonesia (DGI), yang kemudian berubah nama menjadi Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), untuk umat Kristen Protestan,
c. Majelis Agung Wali Gereja Indonesia (MAWI), yang kemudian berubah nama menjadi Konferensi Wali Gerja Indonesia (KWI), untuk umat Katolik,
d. Parisada Hindu Dharma Pusat (PHDP) untuk umat Hindu,
e. Perwalian Umat Buddha Indonesia (Walubi) untuk umat Buddha. Organisasi ini dibentuk pada 8 Mei 1979 atas inisiatif Menteri Agama Alamsjah, dengan maksud mempersatukan organisasi-organisasi Buddha yang ada sehingga mempermudah komunikasi antara umat Buddha dengan pemerintah dan dengan umat lain.

Ada satu hal yang menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam dalam hal kerukunan antarumat bergama, yakni acara Natal bersama, yang terutama diselenggarakan di kantor-kantor dan sekolah-sekolah. Menanggapi hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 1981 mengeluarkan fatwa, bahwa menghadiri peringatan Natal itu haram, karena acara ini merupakan bentuk ritual. Fatwa ini dimaksudkan agar umat Islam tidak mencampuradukkan aqidah dan ibadahnya dengan aqidah dan ibadah agama lain, tanpa mengurangi usaha umat Islam dalam pembinaan kerukunan umat beragama di Indonesia.[21]

Melihat situasi yang mulai memanas dan dinilai dapat menimbulkan konflik antara umat Islam dan Kristen, Menteri Agama menyarankan kepada MUI agar fatwa itu dicabut, dengan catatan ia akan mengambilalih hal ini dalam bentuk peraturan. Menteri kemudian mengeluarkan surat edaran No. MA/432/1981 tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan, tertang-

---

[21]Alamsjah Ratu Perwiranegara, *Pembinaan Kehidupan Beragama di Indonesia*, hal. 100.

gal 2 September 1981. Surat edaran ini ditujukan kepada Pimpinan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, para Menko dan Menteri serta Pimpinan Lembaga Non-Departemen, Pangkopkamtib, Jaksa Agung, Kapolri, Gubernur/Kepala Daerah se-Indonesia. Isinya antara lain, bahwa peringatan terdiri dari dua acara, yakni acara ritual dan acara seremonial. Acara ritual, seperti sembahyang, doa, puji-pujian, bernyanyi, dan sebagainya, hanya boleh diikuti umat bersangkutan. Sedangkan acara seremonial, seperti ucapan selamat yang dilakukan seusai acara ritual, dapat diikuti umat lain. Walaupun fungsionaris MUI sudah setuju semua, tetapi di luar dugaan, pencabutan fatwa tersebut menimbulkan sedikit ketegangan antara Ketua Umum MUI, Buya Hamka, dengan Menteri Agama Alamsjah, yang diakhiri dengan pengunduran diri Hamka sebagai Ketua Umum MUI.[22]

Untuk memantapkan kerukunan antara umat beragama, terutama umat Islam, dengan pemerintah, Menteri Agama Alamsjah berusaha menciptakan kebebasan berdakwah, yakni dengan menghilangkan persyaratan izin dalam berdakwah. Namun, Menteri juga menghimbau agar para da'i tidak "menyalahgunakan" dakwah untuk kepentingan politik dengan mendiskreditkan pemerintah. Hal tersebut bisa tercapai jika apa yang diharapkan pemerintah dan apa yang diinginkan umat beragama dapat terwujud. Yang diharapkan pemerintah adalah pelaksanaan tiga prioritas nasional, yaitu pemantapan idelogi Pancasila, pemantapan stabilitas dan ketahanan nasional, dan suksesnya pembangunan di segala bidang. Sedang yang diinginkan umat beragama adalah adanya kehidupan beragama yang semarak, yang tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.[23] Terlepas dari banyak faktor yang mempengaruhinya, dalam kenyataannya, pada awal dasawarsa 1980-an, atau masa akhir Alamsjah menjabat Menteri Agama, muncul bentuk baru hubungan antara umat Islam dengan pemerintah, tidak lagi berbentuk ketegangan atau saling curiga (*mutual distrust*) melainkan berbentuk saling memahami (*mutual understanding*).

---

[22]Cf. Supawan G. Parikesit, *H. Alamsjah*, hal. 267.

[23]Lihat *Pola Kebijaksanaan Pemerintah di Bidang Agama dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta : Proyek Perencanaan Peraturan Perundangan Keagamaan 1979/1980), hal. 38-40.

4. *Pendidikan Agama*

Pendidikan agama juga mendapatkan perhatian dari Menteri Agama Alamsjah, baik pendidikan agama di madrasah yang struktur kelembagaannya di bawah Departemen Agama maupun pendidikan agama di sekolah umum yang struktur kelembagaannya di bawah Depdikbud. Pendidikan agama dilaksanakan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang terdapat dalam GBHN, yakni untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama, dilakukan upaya-upaya pembangunan madrasah percontohan, penyempurnaan kurikulum, pengadaan buku-buku pedoman, penataran guru, pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah agama (madrasah) serta pengadaan sarana-sarana lainnya. Sekolah agama yang dimaksud adalah Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri, Pendidikan Guru Agama Negeri, PGA Kristen, PGA Protestan dan PGA Hindu Negeri. Bantuan pembinaan dan pembangunan ini juga diberikan kepada sekolah-sekolah agama swasta dan pondok pesantren. Di samping itu, pembinaan pendidikan tinggi agama juga mendapat perhatian cukup besar, baik bagi perguruan tinggi agama Islam, Protestan, Katholik, Hindu maupun Buddha, misalnya dengan pembangunan/rehabilitasi kampus, penyediaan buku perpustakaan, penataran dosen, studi purna sarjana, penyelenggaraan program doktor, dan sebagainya.

Namun demikian, upaya-upaya tersebut tidak langsung menampakkan hasil yang diinginkan, mengingat sebagian besar lembaga pendidikan agama (madrasah) yang ada berstatus swasta yang pada umunya didirikan hanya berbekal "niat ikhlas", dan tidak disertai dengan perencanaan yang matang serta sumber dana dan sumber daya manusia yang memadahi. Bahkan di lingkungan madrasah negeri pun terjadi "*mismatch*" dalam penempatan guru-gurunya, sehingga proses belajar mengajar tidak dapat berjalan dengan efektif. Tidak jauh berbeda dengan kondisi ini adalah kondisi pendidikan tinggi agama, baik di IAIN maupun PTAI swasta, yang kualitas dosen-dosennya secara umum masih rendah, dan fasilitas-fasilitas pendidikannya pun masih terbatas. Sementara itu, pendidikan agama di sekolah umum juga mendapatkan tantangan dengan sedikitnya jam pelajaran pendidikan agama,

yakni 2 jam dalam seminggu. Dengan jumlah jam yang sangat terbatas ini tidak mudah untuk melakukan sosialisasi ajaran-ajaran agama di kalangan anak-anak didik, apalagi jika lingkungan sekolah itu kurang mendukung bagi pendidikan agama.

Dukungan Menteri Alamsjah terhadap pendidikan tidak terbatas pada pendidikan agama saja, tapi juga pendidikan secara umum. Dalam berbagai kesempatan ia sering mengemukakan tentang kondisi umat Islam di Indonesia yang berada dalam Tiga K, yakni kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan. Karena itu, ia sangat marah, ketika Mendikbud, Daoed Joesoef menolak memberikan izin pendirian Lembaga Bahasa Arab oleh Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta. Apalagi dalam kenyataannya Mendikbud telah memberikan izin penyelenggaraan kursus bahasa yang diadakan beberapa kedutaan besar di Jakarta, tetapi menolak memberikan izin penyelenggaraan kursus bahasa Arab, yang sebenarnya dibutuhkan mayoritas rakyat Indonesia. Karena Mendikbud keberatan memberikan izin, atas upaya Alamsjah izin operasional itu dikeluarkan Departemen Luar Negeri. Dengan demikian, Lembaga Bahasa Arab di Kedutaan Arab Saudi ini merupakan satu-satunya lembaga kursus bahasa asing yang izinnya dikeluarkan Deplu, dan bukan Depdikbud.

Pada periode Menteri Agama Alamsjah ini muncul kontroversi tentang Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang diperkenalkan Mendikbud, Daoed Joesoef. Banyak umat Islam berpendapat, bahwa PMP ini mencampuradukkan antara Pancasila dengan agama, sehingga dapat mendangkalkan aqidah. Alamsjah kemudian memerintahkan stafnya untuk merumuskan saran-saran penyempurnaan, dengan menempatkan fungsi masing-masing dari keduanya secara proporsional. Pancasila adalah falsafah hidup bangsa dan ideologi negara Indonesia yang harus menjadi pedoman bersama bangsa Indonesia, sedangkan agama adalah tuntunan hidup yang berasal dari Tuhan untuk menjadi pedoman pemeluk agama masing-masing.

Selain itu, muncul pula kontroversi tentang penghapusan libur sekolah pada bulan puasa. Sebelum Daoed Joesoef menjadi Mendikbud, sekolah diliburkan pada bulan puasa, tetapi setelah ia menjabat menteri, libur ini ditiadakan sampai sekarang. Alamsjah sangat menyayangkan proses pengambilan keputusan ini yang tidak dirundingkan terlebih dahulu dengan tokoh-tokoh

Islam, sehingga menimbulkan kontroversi.[24] Keputusan Menteri Daoed Joesoef lain yang mungundang reaksi keras umat Islam adalah pelarangan pemakaian jilbab bagi murid sekolah. Meskipun terjadi serangkaian demonstrasi menentang pelarangan ini, Daoed Joesef tetap mempertahankan keputusan tersebut. Baru pada 1991, larangan berjilbab ini dapat diselesaikan, sejalan dengan munculnya kebijakan baru pemerintah terhadap umat Islam yang lebih akomodatif.

5. *Perjalanan Haji dan Umrah*

Ketika Alamsjah menjadi Menteri Agama, terjadi perubahan/perbaikan dalam pelaksanaan ibadah haji. Mulai 1978 pengangkutan calon jamaah haji dengan kapal laut ditiadakan, karena selain tidak adanya perusahaan angkutan laut yang dinilai layak meyelenggarakan angkutan jamaah haji, juga ONH laut ternyata lebih mahal dari pada ONH udara. Untuk meningkatkan pelayanan haji pada 1981 telah dirintis pola baru, yakni: (a) pengelompokan sistem haji berdasarkan daerah dengan pimpinannya masing-masing, (b) petugas kesehatan dan pembimbing haji selalu berada di tengah jamaah, dan (3) pelaksanaan sistem katering, dengan tujuan agar para jamaah dapat memusatkan pikiran dan kegiatannya untuk ibadah semata. Di samping itu, juga dilakukan: (a) pembangunan asrama haji, (b) penataran petugas, dan (c) penyediaan buku pedoman perjalanan dan ibadah haji serta sarana informasi lainnya.[25]

Selain itu, terjadi perkembangan baru dalam penyelenggaraan umrah. Menurut Kepres No. 22 tahun 1969 dan Inpres No. 6 tahun 1969 penyelenggaraan haji dilaksanakan pemerintah, sedangkan penyelenggaraan umrah dilaksanakan perorangan atau biro-biro perjalanan swasta. Ternyata, sebagian umat Islam yang datang ke Arab Saudi dengan tiket umrah berlama-lama di sana sampai musim haji tiba, tanpa membawa bekal cukup, sehingga terlantar dan menimbulkan ekses negatif yang menyulitkan pemerintah. Salah satu faktor yang mendorong mereka melakukan hal ini adalah dihapus-

---

[24]Cf. Suparwan G. Parikesit, *H. Alamsjah*, hal. 285.

[25]Lihat Alamsjah Ratu Perwiranegara, *Pembinaan Kehidupan Beragama di Indonesia*, hal. 116-117.

kannya pengangkutan haji melalui laut, yang menjadikan sesorang bisa lebih lama tinggal di Tanah Suci, sementara melalui udara hanya memungkinkan seseorang tinggal di Tanah Suci selama sekitar sebulan. Umat Islam memang percaya, bahwa ibadah yang dilakukan di Masjid al-Haram itu lebih besar pahalanya daripada ibadah yang dilakukan di tempat lainnya. Untuk menghindari hal ini, Menteri Agama dan Menteri Kehakiman menetapkan Keputusan Bersama Nomor: JS.8/22/8 dan 29 tahun 1979 tentang Perjalanan Umrah. SKB ini berisi, antara lain: (a) penyelenggaraan perjalanan umrah dilaksanakan oleh perorangan atau badan hukum yang *bonafide* dan cukup terpercaya untuk menyelenggarakan suatu perjalanan umrah secara rombongan; (b) penyelenggaraan umrah hanya dapat dilakukan selama periode mulai satu bulan sesudah selesainya bulan haji dan berakhir dua bulan sebelum bulan haji berikutnya.

6. Peradilan Agama

Menurut UU No. 1 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, sistem peradilan di Indonesia terdiri atas peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan administrasi negara. Peradilan Agama berwenang menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian dan fatwa waris. Namun keberadaan Peradilan Agama kurang mendapatkan perhatian, termasuk setelah adanya UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, yang sebenarnya memperkokoh keberadaannya dari segi kelembagaan. Pengadilan Agama (PA) tidak memiliki kemandirian dalam melaksanakan keputusannya, karena keputusan-keputusannya harus diperkuat atau disetujui pengadilan umum. Persoalan lainnya adalah ketidakseragaman nama badan ini, yang disebabkan latar belakang sejarah masing-masing daerah. Di Jawa dan Madura, misalnya, badan ini menggunakan nama Pengadilan Agama; di sebagian Kalimantan menggunakan nama Kerapatan Qadhi, sedangkan di daerah lainnya menggunakan nama Mahkamah Syari'ah. Oleh karena itu, pada 1980 Alamsjah menginstruksikan penyeragaman badan ini dengan nama Pengadilan Agama.[26] Namun demiki-

[26]Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hal. 252-253.

an, penyeragaman ini masih terbatas pada segi nama, sementara dasar hukum dan kewenangan masing-masing PA masih tetap beraneka ragam. Eksistensi Pengadilan Agama di Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan, misalnya, masih berdasarkan hukum kolonial, sementara lainnya sudah berdasarkan hukum Indonesia merdeka.

Di samping itu, meskipun sudah ada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Syari'ah, belum ada hakim agung yang secara khusus menangani perkara kasasi yang berasal dari pengadilan agama. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal ini adalah tuntutan dari partai Islam untuk mengangkat hakim agung bidang ini dari kalangan ulama, padahal hakim agung itu semuanya pegawai negeri. Melihat persoalan tersebut, Alamsjah mengusulkan kepada Ketua Mahkamah Agung, Prof. Umar Seno Adji, untuk sementara waktu mengangkat hakim agung yang ada tetapi mengetahui hukum Islam, guna menangani perkara-perkara kasasi di lingkungan peradilan agama. Departemen Agama akan memperbantukan penasehat-penasehat ahli, sambil mempersiapkan hakim-hakim agama yang cakap untuk diangkat menjadi hakim agung. Usulan ini menjadi kenyataan pada 1982, dengan diangkatnya Busthanul Arifin, SH sebagai Ketua Muda Mahkamah Agung bidang Agama.[27] Kebijakan ini kemudian dilanjutkan dengan penandatangnan empat Surat Keputusan Bersama (SKB) pada awal 1983, yakni :

1) Keputusan Bersama Nomor KMA/001/SK/I/1983 dan No. 1 Tahun 1983, tentang Forum Kerjasama/Konsultasi di Bidang Administrasi Fungsional, Personil dan Peradilan Agama;
2) Keputusan Bersama Nomor KMA/002/SK/I/1983 dan No. 2 Tahun 1983, tentang Pengawasan terhadap Hakim pada Peradilan Agama;
3) Keputusan Bersama Nomor KMA/003/SK/I/1983 dan No. 3 Tahun 1983, tentang Pengawasan terhadap Pemberian Bantuan Hukum;
4) Keputusan Bersama Nomor KMA/004/SK/I/1983 dan No. 5 Tahun 1983, tentang Usaha untuk membantu Memperlancar Pengadaan Tenaga Hakim pada Peradilan Agama.

---

[27]Lihat Suparwan G. Parikesit, *H. Alamsjah*, hal. 277-278.

Upaya-upaya tersebut dapat meningkatkan citra hakim agama menjadi setara dengan hakim di lingkungan pengadilan-pengadilan lainnya, meskipun sebenarnya masih terjadi ketidaksetaraan status antara Pengadilan Agama dengan pengadilan-pengadilan lainnya, karena hakim PA ini tidak memiliki kemandirian dalam melaksanakan keputusannya, sebagaimana disebutkan di atas.

7. Pembangunan Sarana Keagamaan

Sejalan dengan kebijakan-kebijakan di atas yang bersifat non-fisik, Departemen Agama pada masa Alamsjah juga membangun sarana-sarana keagamaan yang bersifat fisik, seperti pengadaan dan distribusi kitab-kitab suci dari kelima agama, pembangunan/rehabilitasi rumah-rumah ibadah, sekolah-sekolah agama, asrama haji, balai nikah dan penasehat perkawinan, balai sidang Peradilan Agama, dan sebagainya. Termasuk dalam pembangunan fisik ini adalah pembangunan gedung/kantor Departemen Agama, baik di pusat maupun di daerah, terutama kantor Departemen Agama pusat yang terletak di jantung kota (Lapangan Banteng). Sebagai gambaran, selama Pelita III telah selesai dibangun balai nikah dan penasehat perkawinan, sekitar 40 % dari jumlah yang dibutuhkan, yakni jumlah seluruh kecamatan yang ada di Indonesia. Demikian pula, selama Pelita III ini telah dibangun seluruh gedung Pengadilan Agama, baik tingkat pertama, yang terletak di kota kabupaten, maupun tingkat banding, yang terletak di kota propinsi.[28]

Namun demikian, Alamsjah menyadari betul, bahwa dana untuk pembangunan sarana keagamaan umat Islam itu masih sangat terbatas. Karena itu, ia mengusulkan kepada Presiden Soeharto mendirikan yayasan yang dapat menghimpun uang sumbangan pegawai negeri yang beragama Islam, yang pada waktu itu berjumlah sekitar 3,5 juta. Sumbangan yang diminta dari setiap pegawai berkisar antara Rp 100,- s/d Rp 1000,-, tergantung dari tingkat kepegawaian masing-masing. Meskipun agak lama menjawab usulan tersebut, Presiden Soeharto akhirnya menyetujuinya, dengan nama Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila. Pre-

[28]Lihat Alamsjah Ratu Perwiranegara, *Pembangunan Kehidupan Beragama di Indonesia*, hal. 107-109.

siden Soeharto, dalam kapasitasnya sebagai pribadi, bahkan setuju menjadi ketuanya. Sedangkan wakil ketuanya adalah Alamsjah, Amir Machmud dan Widjojo Nitisastro. Pengumpulan dana ini sampai sekarang masih berlangsung, dan telah berhasil membangun ribuan masjid serta sarana-sarana keagamaan lainnya.

8. *Hubungan dengan Negara-negara Islam.*

Selama menjadi Menteri Agama, Alamsjah melalukan perjalanan ke negara-negara yang mayoritas rakyatnya beragama Islam, seperti Arab Saudi, Pakistan, Mesir, Yordania, Kuwait, Maroko, Pakistan dan Bangladesh. Di antara misi perjalanan itu adalah menjelaskan kepada dunia Islam tentang kehidupan keagamaan di Indonesia, termasuk kedudukan Pancasila sebagai dasar negara serta isu-isu Kristenisasi di Indonesia. Di samping itu, Alamsjah juga mengadakan pembicaraan dengan sejumlah negara Islam tentang kerjasama di bidang agama, ekonomi dan sosial budaya. Dalam sidang tingkat menteri Panitia Yerusalem (Al-Quds) tahun 1979, ia menegaskan kembali komitmen Indonesia kepada perjuangan bangsa Arab untuk membebaskan diri dari Israel. Sedangkan di Arab Saudi dan Mesir, ia menekankan kerjasama dalam pendidikan keagamaan. Sejak masa penjajahan sampai kini memang banyak anak-anak Indonesia belajar agama di negara-negara Arab, terutama kedua negara ini. Sebaliknya, Menteri Alamsjah juga mengundang beberapa ulama dan tokoh Islam dari luar untuk melihat secara langsung perkembangan Islam di Indonesia, dengan harapan dapat menghilangkan kesan negatif terhadap Indonesia yang berasal dari pemberitaan media massa yang kurang imbang.

Hubungan dengan negara-negara Islam itu juga terwujud dalam bentuk penyelenggaraan Muktamar Media Massa Islam di Jakarta, pada 1-3 September 1981. Muktamar yang diselenggarakan atas usul Sekjen *Rabithah 'Alam Islami*, M. Ali al-Harakan ini diikuti sekitar 450 peserta, terdiri dari perwakilan negara-negara Islam, wakil lembaga-lembaga internasional, perwakilan Organisasi Konferensi Islam (OKI), Kantor Berita Islam Internasional (IINA), dan pemuda Islam se-dunia. Muktamar ini menghasilkan "Deklarasi Jakarta" yang antara lain menegaskan perlunya universitas-universitas Islam mendirikan jurusan publisistik, membentuk lembaga periklanan untuk melindungi umat dari pengaruh pers asing,

mendirikan kantor berita Islam, dan himbauan agar negara-negara Islam melarang media atau buku-buku yang memusuhi Islam. Di samping menyelenggarakan muktamar ini, Menteri Agama Alamsjah juga menyambut usulan Sekjen Rabithah untuk mendirikan Markas Dewan Masjid se Asia Pasifik pada 1982 dengan mengambil tempat di Masjid Istiqlal.[29] Semua upaya ini dapat mengurangi kecurigaan negara-negara Islam terhadap perkembangan Islam di Indonesia yang semula dinilai sangat negatif, terutama dengan adanya isu-isu Kristenisasi serta pembatasan aktivitas keagamaan di Indonesia.

Riwayat hidup[30]

1. Waktu kecil

Alamsjah Ratu Perwiranegara lahir pada tanggal 25 Desember 1925 di Penagan Ratu, sebuah kampung yang kini masuk dalam Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara. Sebenarnya ia memiliki banyak nama, yakni Abdullah yang merupakan pemberian ayahnya, Abdul Sattar pemberian kakeknya, Ahmad Syamsuri pemberian ibunya, dan Mohammad Dumas pemberian neneknya. Nama Alamsjah dipergunakan sejak ia masuk sekolah, dan diterima seluruh anggota keluarga, sedangkan Ratu Perwiranegara adalah gelar yang diperoleh sejak ia menikah. Alamsjah adalah anak ke 9 (terakhir) dari ayah bernama Baharuddin Yusuf dan ibu bernama Siti Mariam. Baharuddin adalah kepala kampung, yang bergelar Pangeran Raja Mega. Namun karena suatu ketika ia pernah menampar seorang kontroler Belanda yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat, maka Belanda dengan halus mencopotnya dari jabatan sebagai kepala kampung, dan menawarinya sebagai kontraktor jalan kereta api, lengkap dengan fasilitas yang dibutuhkannya. Ia pun dapat mengerjakan tugasnya dengan baik, yakni mengawasi 90 km dari 500 km jalan kereta

[29]Lihat Suparwan G. Parikesit, *H. Alamsjah*, hal. 282-294.

[30]Dalam bahasan tentang riwayat hidup Alamsjah sebelum menjadi Menteri Agama, penulis menjadikan buku Suparwan G. Parikesit dan Krisna R. Sempurnadjaja, *H. Alamsjah Ratu Perwiranegara: Perjalanan Hidup Seorang Anak Yatim Piatu*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995) sebagai sumber utama.

api yang sedang dikerjakan, yang membentang dari Lampung ke Palembang. Namun tidak lama kemudian Allah memanggilnya dalam usia yang masih relatif muda (38 tahun) atau tepatnya pada 1929, ketika Alamsjah masih berumur 4 tahun.

Dengan wafatnya sang ayah, Alamsjah dibesarkan ibu dan kakeknya. Kedua orang inilah yang pertama kali mendorong Alamsjah belajar membaca al-Quran di bawah bimbingan penghulu kampungnya, dan kadang-kadang bahkan kakeknya sendiri yang mengajarnya. Mereka juga mengajari Alamsjah mengerjakan shalat dan puasa Ramadhan. Ketika Alamsjah menginjak 7 tahun, ibunya memasukkannya ke sekolah desa milik marga, yakni sekolah dasar tiga tahun yang guru-gurunya berasal dari desa itu sendiri. Baru setelah selesai di sekolah desa ini, ia dikirim ke Teluk Betung untuk meneruskan sekolah di *Hollands Inlandsche School* (HIS). Namun karena Alamsjah pada waktu itu sudah berumur 10 tahun, ia tidak bisa diterima di HIS pemerintah, yang mensyaratkan batas umur maksimal 7 tahun. Sebagai gantinya, ia dimasukkan di HIS Arjuna dan diterima di kelas 2. Dua tahun kemudian ibunya wafat, yakni ketika Alamsjah berumur 12 tahun dan duduk di kelas IV. Maka jadilah Alamsjah sejak itu sebagai anak yatim piatu.

Setelah selesai sekolah di HIS Arjuna, hanya beberapa bulan setelah Jepang masuk ke Indonesia tahun 1942, Alamsjah kemudian masuk SMP *Lampung Gakuin*. Di sekolah ini ia dapat menyelesaikan pendidikan dengan lancar, meskipun 6 bulan pertama ia sempat tertinggal oleh teman-temannya. Beberapa minggu menjelang selesainya pendidikan ini, ia bersama beberapa temannya mendapat perintah dari Residen (*Syu Chokan*) untuk masuk sekolah perwira, yang ketika itu disebut *Gyu Gun Kyo Iku Kanbu* di Pagar Alam, dekat Lahat. Pendidikan kemiliteran ini hanya berlangsung 3 bulan, dan umur Alamsjah ketika itu baru sekitar 17 tahun. Begitu selesai pendidikan kemiliteran ini, ia lalu memasuki dunia kerja sebagai anggota militer.

2. Karir sebelum menjadi Menteri Agama

Setelah selesai pendidikan kemiliteran (*Gyu Gun Kyo Iku Kanbu*) tersebut, Alamsjah kemudian ditugaskan di lapangan sebagai anggota Kompi Pengawal Pantai di Krui, sebuah kota kecil di pantai barat Lampung Utara. Kompi ini di samping bertugas meneruskan latihan militer, juga untuk membuat kubu-kubu pertahanan,

jalan dan jembatan. Setelah selesai tugas ini, ia dan teman-temannya diangkat sebagai perwira *Gyu Gun*. Ia dilantik dengan pangkat letnan dua (*Shoi*) dan bertugas di Krui sebagai *karegakari*, semacam kepala staf kompi yang bertugas dalam penanganan administrasi. Kemudian pada akhir 1944, ia dipindahkan ke Lahat dengan jabatan sebagai komandan peleton kesehatan (*eseitai*) di markas tentara Bandar Agung, meski ia sebenarnya tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang kesehatan. Untungnya dalam melaksanakan tugas ini ia ditemani Shoi Amin Kaum yang berlatarbelakang pendidikan kedokteran dan sedikit banyak memahami tugas ini. Sebagai perwira kesehatan ia tidak hanya membantu para anggota *Gyu Gun* yang sakit, melainkan juga masyarakat sekitar asrama yang memerlukan bantuan.

Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 14 Agustus 1945, yang berarti berakhirnya perang Pasifik, Jepang membubarkan pasukan-pasukan *Gyu Gun*. Kemudian setelah adanya pemberitaan resmi tentang kemerdekaan Indonesia, Alamsjah kembali ke Kotabumi (Lampung Utara). Bersama teman-temannya ia membentuk Penjaga Keamanan Rakyat (PKR), dan menjadi wakil ketua pasukan ini. Di daerah lain, pasukan semacam ini disebut Badan Keamanan Rakyat (BKR). Para bekas anggota *Gyu Gun* yang menjadi anggota PKR itu kemudian memilih pangkat masing-masing. Di antara mereka ada yang memilih pangkat mayor dan bahkan letnan kolonel, tetapi Alamsjah memilih pangkat kapten. Dalam perkembangannya mereka yang memilih pangkat berlebihan itu ternyata gagal di tengah jalan.

Tiga bulan berikutnya Alamsjah ditarik ketua PKR Lampung, Jenderal Mayor Pangeran Emir M. Noor, dan diangkat menjadi sekretaris. Pada Oktober 1945 ia diajak Emir M. Noor memeriksa perkembangan PKR di Baturaja dan Lahat serta menghadiri acara reuni tokoh bekas anggota *Gyu Gun* dan *Heiho* di Pagar Alam. Pertemuan ini berhasil menyusun organisasi tentara Sumatera Bagian Selatan, dan Jenderal Mayor Pangeran Emir M. Noor terpilih sebagai panglima. Namun dalam perjalanan menuju ke Palembang, setelah kunjungan dari Jambi, rombongan Pangeran Emir mendapatkan musibah, yakni ditangkap dan diperlakukan sebagai tawanan oleh Wedana dan pasukan (TKR dan Hizbullah) di Sekayu. Penangkapan ini dilaterbelakangi kecurigaan dan kebencian Dr. A.K. Gani terhadap semua yang berbau Jepang, sementara hasil

pertemuan di Pagar Alam itu belum mendapatkan pengesahan dari pusat. A.K. Gani sendiri pada 15 November 1945 ditunjuk pemerintah pusat sebagai Wakil Menteri Pertahanan dan sekaligus menjadi koordinator TKR seluruh wilayah Sumatera. A.K. Gani kemudian menyusun satu komandemen TKR Sumatera dan mengangkat Soehardjo Hardjowardojo sebagai komandan, serta memindahkan Markas Umum TKR dari Pelembang ke Bukittinggi. Sedangkan pasukan Pangeran Emir M. Noor dinyatakan di luar koordinasi Divisi II TKR Sumatera Selatan, tetapi Alamsjah dan beberapa anggota lainnya masih diminta A.K. Gani bergabung dengan TKR.

Menyadari bahwa banyak dari anggota Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang berasal dari anggota masyarakat yang belum pernah mengenal pendidikan militer, maka didirikanlah sekolah-sekolah pendidikan militer yang dipusatkan di Sekolah Opsir Kadet di Pabem, Palembang. Dalam sekolah ini Alamsjah diangkat sebagai instruktur bidang strategi, taktik dan teknik penggunaan senjata. Kemudian untuk menghadapi Sekutu dan Belanda yang kembali datang ke Indonesia, ia diangkat sebagai Kepala Pertahanan Staf Divisi II yang dipimpin Kolonel Bambang Utoyo. Pasukan Sekutu mendarat pertama kali di Palembang pada 12 Oktober 1945, dan keduanya pada 13 Maret 1946.

Kedatangan tentara Sekutu di Indonesia tersebut dapat diterima pemerintah RI, karena dimaksudkan untuk melindungi dan mengungsikan tawanan-tawanan perang dan orang-orang Sekutu yang menjadi tawanan Jepang, sekaligus melucuti dan mengembalikan tentara Jepang ke negara mereka. Ternyata kemudian, pada 7 November 1946, Sekutu menyerahkan kekuasaan kepada Belanda, dan sejak itu keadaan menjadi berubah, karena Belanda ingin menjajah kembali Indonesia. Maka muncullah perlawanan dari rakyat Indonesia, di antaranya perang lima hari lima malam di kota Palembang, yakni pada 1-5 Januari 1947. Dalam pertempuran ini Alamsjah menjadi pimpinan komando, dan sejak itu ia selalu memimpin pertempuran-pertempuran berikutnya sampai Belanda menyerahkan kedaulatan kepada pemerintah RI melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 27 Desember 1949 yang diadakan di Den Haag. Dalam memimpin pertempuran-pertempuran itu, Alamsjah menggunakan taktik perang secara jitu. Ia tidak hanya melakukan pertempuran terus menerus, tetapi juga berini-

siatif melakukan perundingan genjatan senjata jika hal ini dinilai menguntungkan.

Setelah penyerahan kedaulatan, Alamsjah mendapat tugas mempersiapkan pembentukan Brigade Sumatera Selatan (BSS). Dalam persiapan ini muncul persoalan yang cukup pelik, karena terjadi penciutan yang semula empat brigade menjadi hanya satu brigade, sehingga tidak semua pejuang dapat masuk dalam formasi BSS. Persoalan yang lebih pelik lagi bahkan muncul dalam pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) sebagai konsekuensi dari hasil KMB, yakni pengintegrasian TNI (Tentara Nasional Indonesia) dengan KNIL (*Koninklijke Nederlandsche Indie Leger*), karena proses kelahiran masing-masing sangat berbeda, dan bahkan bertolak belakang. TNI berasal dari kesatuan-kesatauan pemuda yang berjuang melawan Belanda, sedangkan KNIL adalah pasukan profesional bentukan Belanda sebagai alat penjajah. Kemudian Brigade ini pada 1950 berubah nama menjadi Komando Tentara dan Teriterium II/Sriwijaya yang bermarkas di Palembang. Panglima Komando ini adalah Kolonel Bambang Utoyo, sedangkan Alamsjah tetap menjadi Asisten II/Operasi dengan pangkat kapten.

Pada 1950 ini, yakni ketika Alamsjah berumur 25 tahun, keluarganya mendesak agar ia mengakhiri masa lajangnya, dan sekaligus menyatakan ketidaksetujuan keluarganya terhadap hubungan cintanya dengan anak bibinya di Tanjung Karang yang sudah berjalan sekitar dua tahun. Sesuai dengan tradisi keluarganya, ia menuruti nasihat itu, dan kebetulan hubungannya dengan anak bibinya itu masih sebatas saling *naksir* dan belum ada ikatan apa-apa. Maka Alamsjah pun berusaha mencari calon lain di kota Palembang. Di kota ini ia dikenal dengan Kapten Alamsjah Alim, karena ia tidak pernah ikut teman-temannya dalam pesta "hura-hura" maupun dalam dansa-dansi dengan gadis-gadis kota ini. Namun atas desakan keluarga tadi, ia berpikir untuk bisa segera mendapatkan calon istri. Pada suatu hari ia bersama empat orang gadis Palembang berjalan-jalan ke Tanjung Raja (50 km dari Palembang). Tiga di antara mereka sangat agresif, tetapi seorang lainnya, bernama Tity (Siti Maimunah), hanya pasif saja. Alamsjah ternyata tertarik dengan kepasifan ini, dan ia pun berpacaran dengan Tity ini seperti lazimnya remaja masa kini; orang tua Tity mengizinkan keduanya menonton bioskop bersama asalkan pu-

lang tidak melewati jam 09.00 malam. Hubungan kedua insan ini disetujui baik oleh keluarga Alamsjah maupun keluarga Tuty. Setelah melalui bermacam-macam proses yang berkaitan dengan adat, keduanya kemudian menikah pada 12 Januari 1952. Dari perkawinan ini Alamsjah dikaruniai tiga putra dan dua putri, yang kesemuanya dapat memperoleh pendidikan sampai perguruan tinggi.

Tidak lama Alamsjah menjadi Asisten II, karena ia kemudian dipindahkan menjadi Asisten I sampai 1956 dengan pangkat mayor. Pada kurun waktu antara 1956 sampai 1958, ia diangkat sebagai Kepala Staf Penguasa Perang Sumatera Selatan. Pada tahun 1958, tepatnya pada 15 Februari, ia dihadapkan pada munculnya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang diproklamasikan di Bukittinggi. Banyak di antara perwira di Sumatera, termasuk anggota Teriterium II/Sriwijaya, mendukung pemerintahan tandingan ini, antara lain Mayor Nawawi. Sejak semula (rapat di Sungai Dareh yang membicarakan tentang rencana ini), Alamsjah bersikap tegas dan menganggapnya sebagai perbuatan makar dan pemberontakan terhadap pemerintah RI yang sah. Pemberontakan ini dapat ditumpas pemerintah hanya dalam waktu sekitar setengah tahun. Karena sikap Alamsjah yang tegas itu, banyak di antara kawan-kawannya yang ikut dalam PRRI menganggapnya sebagai pengkhianat. Cap ini bahkan melekat sampai munculnya peristiwa pemberontakan G30S/PKI tahun 1965.

Namun, Alamsjah tidak dapat mengikuti penumpasan pemberontakan PRRI tersebut, karena pada 1958 ia ditugaskan mengikuti pendidikan di *Senior Officers Course* di India. Setelah selesai pendidikan ini pada 1959, ia kemudian ditugaskan di Komando Pendidikan dan Latihan TNI/AD Bandung dengan pangkat letnan kolonel. Pada awal 1960 ia dipindahkan ke Markas Besar Angkatan Darat/Staf Umum Angkatan Darat (SUAD) di Jakarta sebagi perwira yang diperbantukan kepada Deputi I Men/Pangad yang pada waktu itu dijabat Brigjen Soeharto. Pada 1961 ia mendapat tugas dari Men/Pangad Achmad Yani untuk mengikuti pendidikan pada *US Army Command & General Staff College* di Fort Leavenworth, Kansas. Tugas belajar ini semula diberikan kepada Kolonel Pranoto, Panglima Daerah Militer VII Diponegoro, tetapi karena ia tidak bersedia, Pangad kemudian menunjuk Alamsjah. Ia tentu sangat senang dengan penugasan untuk mengikuti pendidikan

di sekolah staf bergengsi ini, walaupun penugasan ini sangat mendadak, hanya seminggu sebelum berangkat ke Amerika Serikat.

Setelah selesai pendidikan tersebut, pada akhir 1962 Alamsjah ditugaskan di SUAD sebagai Wakil Asisten VII/Men Pangad. Kemudian pada awal 1965 ia diangkat menjadi Asisten VII dengan pangkat Brigadir Jenderal, dan ia menjadi salah seorang dari 11 pucuk pimpinan Angkatan Darat. Pada tahun 1965 ini ketegangan semakin memuncak antara PKI, yang berupaya mendominasi politik Indonesia, dengan Angkatan Darat, yang merupakan salah satu kekuatan utama pendukung Pancasila. Ketika terjadi pemberontakan G30S/PKI tahun 1965 Alamsjah termasuk orang yang dicari-cari PKI untuk diculik.[31] Alamsjah selanjutnya banyak terlibat dalam penumpasan G30S/PKI, yang dipimpin Pangkostrad, Mayjen Soeharto dan didukung rakyat yang anti komunisme, terutama umat Islam. Di antara peran penting yang dilakukan Alamsjah adalah meyakinkan Soeharto untuk tetap bertindak mengamankan keadaan, walaupun ia kecewa (*mutung*) dengan respons Presiden Soekarno yang tidak mau memenuhi usulannya dan desakan rakyat untuk membubarkan PKI. Alamsjah kemudian mengusulkan kepada Soeharto agar menjadikan Dasaad, yang merupakan teman dekan Soekarno, sebagai penghubung antara Soeharto dengan Soekarno. Untuk memperlancar tugas ini Dasaad kemudian meminta persetujuan Soeharto untuk mengajak Hasyim Ning menemui Soekarno. Pertemuan itu terjadi pada 6 Maret 1966, dan presiden berjanji akan membicarakannya dalam sidang kabinet pada 11 Maret 1966.

Namun, ternyata sidang kabinet itu bubar sebelum membicarakan persoalan tersebut, karena di luar gedung terdapat pasukan tentara tanpa tanda kesatuan. Presiden Soekarno bersama Wakil Perdana Menteri Subandrio dan Chairul Saleh kemudian meninggalkan sidang menuju Istana Bogor. Melihat peristiwa ini, Mayjen

---

[31]Alamsjah sebenarnya tidak tahu betul apakah ia termasuk orang yang menjadi sasaran penculikan atau tidak. Yang jelas pada 1 Oktober 1965, tetangganya, Ny. dr. Suroyo mendengar ribut-ribut yang beteriak „Ini bukan rumah Alamsjah. Ini rumah Perwiranegara". Memang papan nama yang tertulis di rumahnya adalah A.R. Perwirangera, dan banyak masyarakat pada waktu itu belum mengetahui nama belakang Alamsjah. Lihat Suparwan G. Parikesit, *H. Alamsjah*, hal. 150-151.

Basuki Rachmat bersama Brigjen M. Yusuf dan Amir Mahmud menyusul Presiden untuk menjelaskan peristiwa yang sebenarnya. Dengan penjelasan ketiga orang ini, yang sebenarnya telah didahului pembicaraan pada 6 Maret 1966, Presiden mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966, yang isinya memberikan wewenang kepada Soeharto untuk mengatasi situasi. Dalam waktu hanya beberapa jam setelah menerima surat itu Soeharto mengambil keputusan membubarkan PKI, melalui sebuah surat yang ia tandatangani pada 12 Maret 1966 jam 00.04. Supersemar ini kemudian dikuatkan dalam sidang umum MPRS IV bulan Juni 1966 sebagai TAP MPRS No. IX/1966.

Setelah peristiwa Supersemar yang kemudian disebut sebagai titik tolak Orde Baru itu, Alamsjah banyak mendapatkan kepercayaan dari Soeharto. Sehari setelah sidang umum MPRS IV, Alamsjah mendapat tugas membentuk tim yang akan membantu Soeharto dalam melaksanakan tugasnya sebagai ketua Presidium Kabinet Ampera. Pada 20 Februari 1967 Presiden Soekarno bersedia menyerahkan kekuasaan eksekutif kepada Soeharto; kemudian dalam sidang istimewa MPRS, 12 Maret 1967, Soeharto diangkat sebagai Pejabat Presiden, dan pada sidang umum MPRS 1968 diangkat sebagai presiden. Selama menjabat Koordinator Staf Pribadi Pejabat Presiden, Alamsjah dilibatkan dalam penanganan berbagai persoalan penting. Salah satu di antaranya adalah tentang musyawarah antarumat beragama, yang kelak sangat membantu tugasnya sebagai Menteri Agama. Ia diminta oleh Pejabat Presiden untuk ikut memprakarsai musyawarah kerukunan umat beragama pada 1967. Musyawarah yang dibuka Pejabat Presiden ini diikuti sekitar 100 orang pemuka agama. Musyawarah itu gagal, karena pihak Kristen dan Katholik tidak menyetujui usul keputusan musyawarah "agar tidak menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama". Para tokoh agama ini, antara lain A.J. Kasimo dan Dr. Tambunan, berargumentasi, bahwa salah satu kewajiban umat Kristen adalah "menggembalakan orang-orang yang belum percaya", atau dalam bahasa lain meng-Kristenkan orang yang belum masuk Kristen.

Beberapa bulan sebelum sidang umum MPRS tersebut, atau tepatnya pada 10 Februari 1968, Alamsjah diangkat sebagai Sekretaris Negara. Selama menjadi Sekneg ada beberapa tugas penting yang ia lakukan untuk menunjang tugas utamanya mengkoordi-

nasikan administrasi lembaga-lembaga non-departemen. *Pertama*, penertiban personalia, yakni upaya mengubah mentalitas dan orientasi para pegawai negeri yang semula merupakan bagian birokrasi Orde Lama menjadi orang yang bermental Orde Baru. *Kedua*, penertiban administrasi dan inventarisasi barang-barang milik Sekretariat Negara. *Ketiga*, mendirikan gedung *operation room* untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan komunikasi antara Sekneg dengan Presiden serta dengan gubernur di seluruh Indonesia. Gedung ini diberi nama Bina Graha.

Namun, jabatan Alamsjah sebagai Sekretaris Negara tersebut menimbulkan rumor-rumor politik yang merugikan dirinya. Menurut Alamsjah, terdapat gejala iri hati di kalangan elit ini terhadap kedekatan hubungan antara dirinya dengan Presiden Soeharto. Ia sering dihasut oleh mereka, antara lain Sudjono Humardani, sebagai "terlalu Islam" dan "anti aliran kebatinan", bahkan ia diisukan berambisi menjadi presiden, dan akan didukung oleh umat Islam dan MPR mendatang. Alamsjah pun menyampaikan persoalan ini kepada Presiden Soeharto, dan menyatakan, bahwa untuk menghindari berkembangnya fitnah yang dapat menyudutkan posisi Presiden, ia bersedia mengundurkan diri dengan sukarela. Namun Presiden selalu mempertahankan kedudukannya sebagai Sekneg; dan baru dalam pertemuan akhir 1971 Presiden menerima permintaan Alamsjah ini, sekaligus memintanya menjadi Duta Besar di Negeri Belanda.

Pada Februari 1972 Alamsjah diangkat sebagai duta besar di Negeri Belanda. Kebetulan ia sudah saling mengenal dengan Ratu Juliana dan beberapa menteri kabinet Partai Katolik dan Partai Anti Revolusioner Belanda, yakni ketika ia menjabat Sekretaris Negara (1968-1971). Hal ini dapat memperlancar tugas-tugasnya, terutama dalam mensukseskan bantuan dari *Inter-Governmental Group on Indonesia* (IGGI) dan penyelesaian masalah eks anggota Republik Maluku Selatan (RMS). Alamsjah cukup berhasil mensukseskan bantuan IGGI ini, yang antara lain, karena kedekatan hubungannya dengan PM Biesheuvel, Menlu Drs. Schmeltzer, dan Menteri Urusan Kerjasama Ekonomi Luar Negeri Drs, Boertin.

Alamsjah bahkan dinilai sangat berhasil menangani masalah eks anggota RMS yang selalu membuat keributan di Belanda. Ia mencoba melakukan pendekatan manusiawi terhadap para eks RMS itu. Pada acara perayaan 17 Agustus 1973, ia mengundang

seluruh tokoh eks RMS dan pemudanya untuk makan bersama di *Congres Gebauw* di Den Haag, meskipun pemerintah Belanda menyatakan tidak menjamin keselamatannya. Dalam pertemuan itu Alamsjah menghimbau kepada mereka untuk melupakan masa lalu dan sekaligus mengakhiri salah pengertian yang sudah berlangsung lama. Ia juga menghimbau agar mereka memilih kewarganegaraan yang pasti, Belanda atau Indonesia, agar status mereka tidak terkatung-katung. Dalam kesempatan lain, ia menyetujui pengiriman 25 orang pemuda eks RMS untuk melihat secara langsung kondisi Indonesia, dan terutama Maluku. Kunjungan mereka ke Maluku itu berhasil merubah persepsi mereka tentang Indonesia dan Maluku, karena Maluku ternyata sudah lebih maju daripada yang mereka bayangkan sebelumnya. Mereka pun berubah sikap dengan memaki-maki tokoh mereka, yakni Manusuma dan Tamaela yang selalu memberikan informasi salah tentang Indonesia dan Maluku. Tugas sebagai Duta Besar tersebut dijalaninya sampai pada April 1974, tidak lama setalah ia mengalami sakit flu yang cukup berat, sehingga tim dokter memutuskan untuk melakukan operasi, dan bahkan menyarankannya agar tidak tinggal di negara yang berhawa dingin.

Sesampai di tanah air ia mendapatkan dispensasi untuk beristirahat selama sekitar delapan bulan (sampai akhir 1974). Kemudian pada awal 1975 ia diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA), dan kemudian dipilih sebagai Wakil Ketua DPA menggantikan posisi Letjen Sarbini yang meninggal dunia pada 1977. Ketua DPA pada waktu itu adalah Wilopo, tokoh PNI dan mantan Perdana Menteri. Ketua DPA ini bersikap kritis terhadap pemerintah, sehingga sering menyulitkan posisi Alamsjah sebagai Wakil Ketua DPA yang dikenal sebagai orang yang dekat dengan Presiden. Misalnya, Ketua DPA diminta memberikan ceramah pada acara Kongres Himpunan Pengamat Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIS) tahun 1977 di Manado. Naskah pidato pun kemudian dipersiapkan oleh Tim, dan akan dibacakan sendiri oleh Wilopo. Namun tiba-tiba Wilopo berhalangan hadir, sehingga Alamsjah harus membacakan pidato yang isinya cukup keras itu. Hari berikutnya Presiden Soeharto memanggilnya dan memintanya agar ia menjelaskan isi pidato itu. Penjelasan Alamsjah pada waktu itu nampaknya dapat dimaklumi Presiden. Hal ini bisa dilihat dari kenyataan, bahwa setahun kemudian, yakni pada 1978, ia

mendapatkan kepercayaan dari Presiden menjadi Menteri Agama dalam Kabinet Pembangunan III.

3. Setelah menjadi Menteri Agama

Nampaknya Presiden Soeharto puas dengan hasil-hasil yang dicapai Alamsjah selama menjabat Menteri Agama. Buktinya, Alamsjah masih tetap mendapat kepercayaan untuk menjadi anggota Kabinet Pembangunan IV (1983-1998), yakni sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra). Tugas Menko ini adalah mengkoordinasikan, menyusun dan menyiapkan kebijakan serta pelaksanaan tugas masing-masing departemen yang berada di bawah koordinasinya. Departemen-Departemen yang masuk dalam kordinasinya adalah Departemen Agama, Depdikbud, Depkes, Depsos, Kantor Menpora, Kantor Menteri UPW, dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Secara umum tugas Menko ini memang tidak serumit dan sedetail tugas Menteri di departemen. Namun Menko memiliki tanggung jawab juga terhadap persoalan-persoalan yang muncul di departemen-departemen yang di bawah koordinasinya. Salah satu persoalan yang muncul adalah persoalan Porkas. Persoalan ini bermula dari konsep yang diajukan Mensos dan Menpora tentang penggalangan dana untuk pembinaan olahraga dan bantuan sosial. Gagasan yang diajukan itu adalah semacam *football forecasting* yang dipraktikkan, antara lain, di Inggris, Pakistan, Malaysia, dsb. Berdasarkan penelitian Alamsjah, gagasan ini bagus, sehingga ia pun melaporkannya kepada Presiden. Presiden pada prinsipnya menyetujui gagasan ini, tetapi hal ini perlu dibicarakan dengan MUI. Setelah mendapatkan penjelasan dari Menpora, Ketua Umum MUI pun memberi fatwa bahwa Porkas ini bukan judi; dan karena itu, ia tidak bisa menghalanginya. Karena tidak ada keberatan dari Ketua Umum MUI dan Menko Polkam, Porkas pun resmi dioperasikan di bawah kontrol Departemen Sosial.

Dalam praktiknya, Porkas ini menjelma menjadi judi, yang sebagian besar pesertanya berasal dari kalangan masyarakat bawah, sehingga dampak negatif yang ditimbulkan bersifat massal. Dampak ini menjadi semakin parah sejak Porkas berganti nama menjadi Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB). Oleh karena

itu, sejak muncul pertama kali banyak tokoh agama, intelektual, pendidik dan politisi menunut penghapusan Porkas/SDSB ini. Namun pemerintah tetap mempertahankannya, dan baru bersedia menghapuskan pada 1993. Sebagian umat Islam ada yang mempertanyakan sikap Menko Alamsjah terhadap tuntutan untuk menghapus Porkas, di samping terhadap larangan memakai jilbab di sekolah-sekolah negeri, karena persoalan ini berada di bawah koordinasi Menko Kesra, yang dinilai memiliki komitmen cukup tinggi terhadap Islam.

Setelah selesai menjabat Menko Kesra, selesailah masa bakti Alamsjah dalam pemerintahan. Namun hal ini bukan berarti bahwa ia lepas dari percaturan politik nasional. Pada pertengahan September 1989 Presiden Soeharto mengeluarkan pernyataan yang cukup keras, bahwa siapa saja yang mencoba-coba bertindak tidak konstitusional, walaupun ia seorang jenderal atau politisi, Presiden akan menggebuknya. Ternyata tidak ada politisi, tokoh agama, intelektual atau lainnya yang menanggapi pernyataan ini. Karena itu, pada akhir September 1989 Alamsjah mengundang 21 orang tokoh Islam sebagai pribadi-pribadi, antara lain, K.H. Hasan Bisri, K.H. Ali Yafie, K.H. Ibrahim Hosen, K.H. Masjkur, Drs. Anwar Nurris, Drs. Lukman Harun, dsb. Alamsjah menjelaskan perlunya membantu Presiden yang dinilainya telah banyak membantu umat Islam. Maka para peserta pertemuan itu sependapat mengeluarkan semacam sikap bersama, yang isinya meminta kesediaan Jenderal (Purn) Soeharto untuk dicalonkan kembali sebagai presiden periode 1993-1998. Hal yang hampir sama diulangi lagi menjelang Pemilu 1992; tidak dalam bentuk pernyataan bersama, melainkan dalam bentuk do'a bersama agar H. Mohammad Soeharto diberi kekuatan oleh Allah untuk dipilih kembali menjadi Presiden RI dalam SU MPR 1993. Kalau pernyataan bersama tahun 1989 itu ditandatangani 21 tokoh Islam dalam kapasitas sebagai pribadi-pribadi, maka do'a bersama tahun 1992 ditandatangai 37 tokoh dalam kapasitas sebagai pimpinan ormas, terutama ormas Islam.

Pernyataan dan do'a bersama tersebut mengundang bermacam-macam interpretasi, baik dari kalangan umat, kalangan luar maupun para pengamat. Meskipun Alamsjah dan para tokoh penandatangan itu menjelaskan, bahwa pernyataan dan do'a itu dike-

mukakan secara ikhlas, banyak pengamat dan aktivis politik melihat hal ini sebagai *move politik* Alamsjah. Bahkan tidak sedikit pula muncul tuduhan bahwa Alamsjah menginginkan jabatan Wakil Presiden dengan cara "menjilat". Lainnya, termasuk dari kalangan fungsional DPP Golkar sendiri, mengritik bahwa pernyataan dukungan untuk menjadi presiden itu terlalu dini dan tidak proporsional. Alamsjah menerima tetapi juga mencoba menjawab segala komentar dan tuduhan itu; dan bahkan mengatakan, bahwa yang mau ikut silakan, dan yang tidak mau juga silakan, karena masing-masing memiliki pilihannya sendiri.

Di samping memiliki peran yang penting dalam mewujudkan pernyataan politik bersama di kalangan tokoh dan organisasi Islam, Alamsjah juga memiliki andil yang cukup besar dalam pembentukan organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), yang sering disebut sebagai tanda hubungan mesra antara umat Islam dengan pemerintah. Menurut pengakuannya, pada Juni 1990 tiga orang mahasiswa Universitas Brawijaya yang diantar Dr. Imaduddin Abdurrahim datang kepadanya dengan menunjukkan proposal penyelenggaran seminar atau pertemuan cendekiawan Muslim. Proposal itu juga mengajukan tiga orang nama yang dinilai tepat untuk memimpin organisasi cendekiawan Muslim yang akan dibentuk, yakni Prof. Dr. Emil Salim, Ir. Azwar Anas dan Prof. Dr. B.J. Habibie.

Alamsjah sangat mendukung gagasan tersebut, dan bahkan menunjukkan, bahwa yang paling tepat untuk memimpin adalah Habibie, karena di samping tingkat ke-Islamannya baik, ia dekat dengan Presiden dan dikenal di dunia luar, sehingga akan mendapatkan dukungan dari orang-orang muda. Alamsjah pun bersedia menghubungkan ketiga mahasiswa tersebut dengan Habibie, dan bahkan melaporkan gagasan itu kepada Presiden Soeharto. Alamsjah juga ikut meyakinkan Habibie agar ia bersedia menerima jabatan itu. Setalah melalui beberapa proses, seminar itu dapat diselenggarakan pada awal Desember 1990. Di samping membahas beberapa makalah tentang sumbangan cendekiawan Muslim dalam pembangunan nasional, seminar yang diikuti oleh sekitar 500 peserta ini berhasil membentuk ICMI dan sekaligus memilih Habibie sebagai Ketua Umum organisasi ini.

Namun demikian, pada 1994 Alamsjah muncul dengan sikap

yang kurang menyenangkan sebagian anggota ICMI, yakni dukungannya atas gagasan pembentukan organisasi cendekiawan independen. Bukan karena dukungannya itu sendiri, melainkan karena latar belakang gagasan pembentukan ini, yakni kritik terhadap kecenderungan organisasi cendekiawan yang ada (ICMI, PIKI, ISKA, dan FCHI), yang dinilai tidak lagi berwawasan kebangsaan, melainkan berorientasi pada kepentingan kelompok agama masing-masing. Nama yang diajukan adalah Ikatan Cendekiawan Kebangsaan Indonesia (ICKI), dan kemudian berubah menjadi Persatuan Cendekiawan Pembangunan Pancasila (PCPP). Organisasi ini diprakarsai Muhono SH dan koleganya dan menurut rencana akan dipimpin Rektor Universitas Krisnadwipayana ini, tetapi hal ini berbeda dengan persepsi Alamsjah yang menghendaki organisasi ini dipimpin oleh seorang Menteri dan berpendidikan doktor. Menurut pengakuan Alamsjah, ia sebenarnya akan diterima Presiden Soeharto pada 26 Mei 1994 untuk melaporkan gagasan ini, tetapi Presiden tidak jadi menerimanya. Maka pada 31 Mei 1994 ia membuat pernyataan pengunduran diri dari keterlibatannya dalam pembentukan ICKI/PCPP. Nampaknya Presiden kurang merestui pembentukan organisasi ini, sehingga walaupun organisasi ini sudah sempat mengadakan kegiatan, tetapi kini keberadaanya tidak terdengar lagi.

Penutup

Pengangkatan Letjen (Purn) Alamsjah sebagai Menteri Agama dalam Kabinet Pembangunan III pada mulanya menimbulkan tanda tanya sebagian umat Islam: apa sebenarnya yang diinginkan Presiden dengan pengangkatan seorang militer yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal agama untuk menjadi Menteri Agama? Ternyata tanda tanya itu tidak berlalu lama, karena sejak bulan pertama menjabat menteri, ia berhasil memperjelas persoalan yang sejak beberapa tahun menjadi gänjalan umat Islam, yakni tentang status aliran kepercayaan yang ditempatkan sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia, dan bukan sebagai agama. Penjelasan ini kemudian diikuti kebijakan-kebijakan lain yang umumnya sangat diharapkan umat Islam, seperti kebebasan berdakwah, pedoman penyiaran agama, dan sebagainya, sehingga kehadirannya sebagai Menteri Agama dapat mengurangi kete-

gangan antara umat Islam dan pemerintah. Ia sepenuhnya sadar bahwa sebagian kebijakan, misalnya tentang pedoman dan bantuan luar negeri bagi lembaga keagamaan, tidak disenangi sebagian umat tertentu, tetapi ia tetap melanjutkannya, karena kebijakan itulah yang mendukung terwujudnya stabilitas nasional. Sampai kini kebijakan ini masih tetap dipertahankan.

Kehadiran Alamsjah sebagai Menteri Agama dinilai dapat mengubah citra negatif umat Islam; yang semula dianggap anti Pancasila menjadi pendukung Pancasila. Ia juga dinilai mampu menaikkan citra Departemen Agama, yang semula dianggap departemen kelas dua, menjadi sejajar dengan departemen-departemen lain. Bahkan penegakan disiplin di Departemen Agama pada waktu itu menjadi contoh penegakan disiplin di departemen-departemen lain. Keberhasilan ini dinilai bertambah besar jika dihubungkan dengan kebijakan Mendikbud pada waktu itu yang cenderung mengurangi peran dan pengaruh agama (Islam) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, sebagian besar pegawai di lingkungan Departemen Agama serta sebagian besar umat Islam merasa kehilangan ketika untuk periode berikutnya ia tidak diangkat lagi menjadi Menteri Agama. Namun demikian, jabatan Alamsjah sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam Kabinet Pembangunan IV (1983-1988) masih terkait dengan tugas bidang keagamaan ini. Hanya bedanya, kalau pada waktu menjabat Menteri Agama hampir tidak ada kritik dari umat Islam, tetapi pada waktu menjabat Menko Kesra ada sebagian umat yang mengritiknya, yakni ketidakberhasilannya menyelesaikan masalah jilbab dan Porkas, yang sebenarnya berada di bawah koordinasinya.

Kemudian setelah masa purna bakti, ia pun masih sering berkiprah dalam kehidupan sosial keagamaan, termasuk menjadi salah satu kunci dalam pendirian Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Bahkan ia masih sering dimintai pendapat atau analisis tentang perkembangan politik nasional, terutama tentang hubungan antara agama dengan negara di Indonesia. Namun, kiprahnya dalam kehidupan sosial keagamaan serta analisisnya tentang perkembangan politik nasional tidak akan terdengar lagi untuk selamanya, karena ia telah dipanggil kehadirat Allah SWT pada 8 Januari 1998 akibat serangan asma berat yang

dideritanya sejak November 1997. Banyak kalangan merasa kehilangan atas wafatnya Alamsjah, seraya mengenang jasa-jasanya, baik bagi bangsa Indonesia maupun bagi umat Islam. Menteri Agama Tarmizi Taher, misalnya, mengemukakan bahwa bangsa Indonesia telah kehilangan seorang tokoh pencetus ide "Trilogi Kerukunan Kehidupan Beragama." Ide ini sampai kini masih tetap menjadi kebijakan pemerintah, dan tetap menunjukkan relevansinya bagi bangsa Indonesia yang majemuk.

Munawir Sjadzali, MA;

Pencairan Ketegangan Ideologis

Bahtiar Effendy, Hendro Prasetyo, Arief Subhan

Pada 1950 Munawir menulis—dan menerbitkan sendiri—*Mungkinkah Negara Indonesia Bersendikan Islam?* Sebuah buku setebal 80 halaman sebagai respons terhadap semakin menguatnya aspirasi di kalangan para tokoh Islam, terutama yang tergabung dalam Masyumi, untuk menjadikan Islam sebagai ideologi negara dan memberlakukan sistem politik Islam di Indonesia. Penerbitan buku ini menandai awal keterlibatan Munawir dalam wacana perumusan sintesis yang *viable* antara Islam dan negara di Indonesia.

Dekade 50-an, panggung pentas politik nasional ditandai kuatnya aspirasi kaum Muslim Indonesia untuk memperjuangkan sistem politik Islam di Indonesia. Perjuangan yang mengambil bentuk ide menjadikan Islam sebagai dasar negara ini memang mendapat momentum setelah terlaksananya Pemilu 1955. Seluruh unsur bangsa, yang diwakili partai-partai peserta Pemilu 1955, mendapat kesempatan mendiskusikan kembali konstruk dan ideologi negara dalam sidang-sidang Konstituante. Namun, dilihat dari sudut sejarah, aspirasi demikian sebenarnya tidak baru. Pada dasawarsa 40-an aspirasi Islam ideologis sudah muncul di pentas politik nasional dibawa para pemikir dan aktivis Islam yang tergabung dalam organisasi-organisasi Islam seperti Serikat Islam (SI), Muhammadiyah, NU, dan sebagainya. Mula-mula aspirasi Islam muncul dalam bentuk gerakan-gerakan Islam yang diarahkan pada usaha menumbuhkan kesadaran dan semangat nasionalisme dalam rangka menen-

tang kolonialisme Belanda.[1] Namun, pada masa-masa menjelang Proklamasi Kemerdekaan RI 1945, terutama dalam diskusi-diskusi mencari format sistem politik dan ideologi negara yang permanen, para pemikir dan aktivis Islam mulai mengajukan Islam sebagai alternatif format politik dan ideologi negara yang hendak dibentuk.[2]

Meskipun tidak seluruh seluruh usulan yang diajukan tokoh-tokoh Islam diterima oleh kelompok lain, format politik dan ideologi negara yang disepakati merupakan hasil kompromi dari berbagai pandangan dan usulan yang berasal dari sejumlah kelompok kepentingan. Bentuk kompromi itu pertama terwujud dalam "Piagam Jakarta." Tetapi dalam perkembangannya konsep ini mengalami koreksi, yang dari sudut pandang komunitas politik Islam dipandang merugikan kepentingan umat Islam Indonesia.[3] Dari titik inilah kemudian, perjuangan yang mengambil bentuk Islam ideologis di kalangan sebagian kaum Muslim terus hidup. Mereka tidak hanya memperjuangkan aspirasinya dengan cara-cara yang konstitusional, tetapi juga mengambil jalur-jalur yang oleh negara dipandang inkonstitusional, ilegal, bahkan subversif.

Munawir, yang waktu itu aktif di Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII)— sebuah organisasi kepemudaan yang pada awal kemerdekaan bernaung di bawah Masyumi—merasa terpanggil untuk memberikan tanggapan kritis terhadap aspirasi kalangan pemikir dan aktivis Islam yang memperjuangkan ide menjadikan Islam sebagai dasar negara. Di mata Munawir, format politik Islam yang dilontarkan para tokoh itu masih belum jelas secara konseptual. Uraian dan argumentasi yang dikemukakan tidak hanya membingungkan, bahkan terkesan tidak meyakinkan. Munawir juga

---

[1]Tentang peran Islam dalam pembentukan kesadaran nasionalisme Indonesia diantaranya lihat Fred R. von der Mehden, "Islam and Rise of Nationalism in Indonesia," Disertasi Doktor, University of California Berkeley, 1957, h. 34

[2]Diskusi tentang fomrat sistem politik Indonesia terjadi di BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan). Lihat Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945*, Volume I, (Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959).

[3]Tentang "Piagam Jakarta" lihat Saifuddin Anshari, *The Jakarta Charter 1945: The Struggle for an Islamic Constitution in Indonesia.* (Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia [ABIM], 1979).

mempunyai kesan para tokoh Islam itu kurang senang jika ada yang mempertanyakan detil pandangan itu. Kenyataan ini semakin menambah ketidakjelasan pandangan yang dikedepankan mereka, baik pada level konsep maupun praktik.[4]

Munawir yang berlatang belakang pendidikan madrasah, dan dengan demikian memiliki akses terhadap kitab-kitab klasik Islam, merasa terpanggil memberikan respons. Dengan memanfaatkan koleksi buku KH. Munawar Cholil, ulama terkemuka di Semarang, Munawir menuliskan tanggapan-tanggapannya dalam buku kecil sebagaimana disebutkan. Respons yang dilontarkan Munawir, tak diduga sebelumnya, mendapat sambutan antusias dari berbagai kalangan. Hal ini antara lain diindikasikan oleh demikian cepatnya buku itu habis terjual. Buku yang dicetak 5000 eksemplar itu habis terjual dalam waktu empat bulan. Sambutan yang demikian antusias ini, menurut pengakuan Munawir, bukan karena pertama-tama isi buku ini bermutu, tetapi lebih-lebih karena masih langkanya bahan bacaan mengenai sistem politik Islam pada waktu itu.[5]

Tetapi, lebih dari sekadar respons, buku itu selanjutnya mengantarkan Munawir untuk berkenalan dengan Bung Hatta, Wakil Presiden RI saat itu. Bung Hatta tertarik dan menyampaikan penghargaan tinggi terhadap buku karangan Munawir; bukan pada substansinya, tetapi lebih pada keberanian Munawir berpikir mandiri dan mensosialisasikan hasil pemikirannya melalui tulisan. Perkenalan dengan Bung Hatta ini berujung pada diterimanya Munawir di Kementerian Luar Negeri yang waktu itu formasinya kecil dan jumlah pegawainya pun tidak banyak, apalagi yang menyandang gelar sarjana. Maksud utama Bung Hatta "memasukkan" ke Kementerian Luar Negeri adalah agar Munawir mendapat kesempatan melanjutkan studi di luar negeri dan menekuni persoalan-persoalan keislaman dan negara di Indonesia.[6]

Kisah di atas penting diungkap karena darinya tidak hanya dapat dilihat perhatian utama Munawir sepanjang kariernya di pe-

---

[4]Lihat Munawir dalam "Dari Lembah Kemiskinan," dalam *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA* (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995), hal. 45

[5]Munawir Sjadzali, "Dari Lembah Kemiskinan."

[6]Kisah tersebut diungkap Munawir dalam "Dari Lembah Kemiskinan," hal. 45.

merintahan, tetapi juga konsistensi pemikirannya sejak masa muda hingga menjabat Menteri Agama, khususnya berkaitan dengan pandangannya mengenai hubungan Islam dan negara. Awal karier Munawir ditandai sebuah karya intelektual yang mempertanyakan dan mencari landasan doktrinal sistem politik Islam; pertengahan kariernya ditandai oleh karya intelektual—tesis MA yang—berjudul "Indonesia's Muslim Political Parties and Their Political Concepts" yang berisi elaborasi dan perluasan pandangan-pandangannya tentang hubungan Islam dan negara di Indonesia dengan mengungkap konsep-konsep politik yang dikembangkan partai-partai Islam; sedangkan puncak kariernya sebagai Menteri Agama ditandai upaya-upaya untuk meneguhkan pandangannya mengenai hubungan Islam dan negara pada tingkat praktis di lapangan. Jika ditelusuri, pandangan Munawir tentang hubungan Islam dan negara layaknya sebuah garis lurus: tidak ada ketetapan doktrinal yang mengharuskan kaum Muslim untuk mendirikan negara Islam; pandangan ini dipegang Munawir sejak awal perkembangan intelektualitasnya, kerja di Departemen Luar Negeri sebagai diplomat dan birokrat, hingga menjabat Menteri Agama selama dua periode berturut-turut (1983-1993), bahkan hingga kini—sebagai Ketua Komnas HAM dan Dosen Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Masa Kecil dan Remaja:
Perkembangan Intelektual dan Sosialisasi[7]

Munawir Sjadzali lahir di desa Karanganom, Klaten, Jawa Tengah, pada 7 November 1925. Munawir adalah anak tertua dari delapan bersaudara dari pasangan Abu Aswad Hasan Sjadzali (putra Tohari) dan Tas'iyah (putri Badruddin). Setelah menikah, sesuai dengan tradisi di desa Karanganom, ayah Munawir mendapat nama tua Mughaffir.[8] Dari delapan bersaudara yang masih hidup hingga

[7]Sebagian besar ini riwayat hidup ini diambil dari otobiografi Munawir, "Dari Lembah Kemiskinan."

[8]Menurut Munawir di desa Karanganom terdapat tradisi untuk memberikan nama tua bagi setiap pasangan yang baru menikah. Dengan nama itu pula pasangan itu dipanggil, baik oleh keluarga maupun kawan-kawan dekatnya.

sekarang tinggal tiga orang: Munawir sendiri, Hamnah Qasim (anak kelima), dan Hifni (anak keenam). Hasyim (anak ketiga) gugur dalam perang kemerdekaan 1948; empat lainnya meninggal sebelum mencapai usia lima tahun; satu orang meninggal karena terbakar lampu minyak; dan satu lagi meninggal—menurut Munawir sendiri—karena kurang gizi.

Dari segi ekonomi, keluarga Mughaffir memang jauh dari sejahtera, tetapi dari segi agama keluarga ini adalah santri. Mughaffir sendiri memang tipe seorang santri pada masanya. Hal ini antara lain dicirikan oleh pengembaraannya untuk mencari ilmu (*rihlah ilmiyah*) ke berbagai daerah yang merupakan unsur terpenting dalam tradisi santri pada masa itu. Mughaffir tercatat sebagai santri di sejumlah pesantren tradisional yang cukup terkenal pada masa itu, antara lain Pesantren Jamsaren (Solo), Pesantren Tebuireng (Jombang), dan Pesantren Termas (Pacitan). Latar belakang ini tidak hanya menjadikan Mughaffir kepala keluarga yang menghiasi rumah tangganya dengan nilai-nilai religius, tetapi juga menjadikannya orang yang memiliki pengetahuan agama cukup luas. Karena itu pula di lingkungan masyarakat Karanganom ia dikenal sebagai *kiyai*, suatu sebutan yang tidak hanya menunjuk kepada sekelompok orang yang dipandang ahli dalam ilmu-ilmu keagamaan Islam, tetapi juga sekaligus pemimpin informal masyarakat.[9]

Kondisi ekonomi yang serba kekurangan dan penghargaan yang tinggi terhadap ilmu-ilmu keagamaan menghadapkan Munawir pada satu pilihan pendidikan: madrasah.[10] Bukan saja karena biaya pendidikan di lembaga pendidikan Islam ini relatif murah, tetapi juga karena lembaga pendidikan ini mengutamakan ilmu-ilmu tra-

---

[9]Tentang *kiyai*—dan pandangan hidupnya—dalam masyarakat Islam Indonesia lihat Zamakhsari Dhofir, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiyai* (Jakarta: LP3ES, 1982); juga Taufik Abdullah, "Pola Kepemimpinan Islam di Indonesia," dalam *Islam dan Masyarakat, Pantulan Sejarah Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1987).

[10]Sebenarnya selain menempuh pendidikan di madrasah ibtidaiyah, Munawir juga belajar di Sekolah Desa Tiga Tahun—bukan Sekolah Rakyat Lima Tahun yang sederajat dengan Sekolah Dasar (SD) sekarang. Namun, di sekolah ini Munawir tidak mendapat ijazah. Ia mengakui bahwa ia tidak terlalu rajin, bahkan kurang bersemangat menempuh pendidikannya di sekolah desa, terutama karena kemiskinan yang dideritanya waktu itu.

disional Islam—meskipun harus ditegaskan bahwa pertimbangan pertama lebih dominan daripada yang kedua. Karena alasan ini pula, setelah menamatkan Madrasah Ibtidaiyah (setingkat SD) di kampungnya Munawir melanjutkan ke Mambaul Ulum,[11] Solo, yang berjarak lebih-kurang 30 kilometer dari desa Karanganom. Dorongan untuk melanjutkan pendidikan di Mambaul Ulum datang dari sang ayah, figur pecinta ilmu, yang sudah sejak lama bercita-cita memasukkan Munawir ke madrasah moderen yang didirikan atas prakarsa Sri Susuhunan Pakubuwono X ini.

Namun, cita-cita untuk sekolah di Mambaul Ulum tidak dapat segera terwujud karena pendaftaran untuk tingkat Tsanawiyah belum dibuka. Sambil menunggu, Munawir dimasukkan ke Madrasah al-Islam, madrasah moderen lain di Solo, yang didirikan oleh KH. Ghazali, salah seorang sahabat senior Mughaffir. Hanya satu tahun Munawir belajar di Madrasah al-Islam karena pada tahun berikutnya ia diterima di Mambaul Ulum.

Pada 1943 tepat di usia 17 tahun Munawir, dengan segala penderitaan dan perjuangan, berhasil menamatkan Mambaul Ulum dengan mengantongi ijazah dari madrasah terkenal ini.[12] Melihat pendidikan formal yang ditempuh, Munawir dapat dikategorikan sebagai santri dalam pengertian teknis kata itu. Sebagai santri, ciri yang paling menonjol dari Munawir adalah kemampuannya untuk memahami kitab-kitab klasik Islam. Pada gilirannya hal ini membawa implikasi kepada luasnya wawasan keagamaan Munawir.[13]

Lepas dari Mambaul Ulum rencana Munawir adalah bekerja.

---

[11]Mambaul Ulum didirikan pada 1905 oleh R. Adipati Sosrodiningrat dan Raden Penghulu Tafsirul Anam (ayah KH. Adnan). Pada mulanya, lembaga pendidikan ini hanya berbentuk pesantren. Kemudian pada 1916, diadakan pembaruan-pembaruan dengan mengadakan kelas-kelas; dari kelas I sampai XI. Lihat Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1985), cetakan ke-4, hal. 286-7

[12]Perjuangan dan penderitaan Munawir di masa kecil dan remaja, teruttama ketika menempuh pendidikannya di Mambaul Ulum, secara terperinci lihat, "Dari Lembah Kemiskinan," hal. 8-12.

[13]Bagi yang belum mengenal, fakta bahwa Munawir memiliki akses kuat terhadap kitab-kitab klasik Islam, bukan hanya mengejutkan tetapi juga meragukan. Lihat misalnya kesan Dr. Satria Effendi M. Zein, "Munawir Sjadzali dan Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia," dalam *Kontekstualisasi Ajaran Islam*.

Tetapi, mencari pekerjaan di masa itu dengan selembar ijazah madrasah jelas tidak mudah. Karena seluruh surat lamaran yang disebarkan, tak satu pun yang mendapat tanggapan, Munawir memutuskan untuk mengembara, tanpa tujuan jelas. Dalam pengembaraan inilah ia sampai di Salatiga di mana ia mendengar sekolah Muhammadiyah setempat membutuhkan seorang guru. Munawir segera menghubungi pengurus Muhammadiyah untuk mengajukan lamaran. Tanpa menemui kesulitan ia diterima sebagai guru Sekolah Rakyat Muhammadiyah dengan masa percobaan.

Tetapi karena kondisi sekolah ini dirasakan tidak begitu menyenangkan, Munawir masih mencari kesempatan mendapatkan pekerjaan di tempat lain. Pada saat yang sama, Kiyai Muhammad Irsam, seorang tokoh Muhammadiyah setempat, menawarkan kepada Munawir untuk mengajar di Gunungpati, daerah kabupaten Semarang, yang letaknya sekitar delapan kilometer dari Ungaran. Di Gunungpati, sejumlah tokoh dari berbagai organisasi Islam, termasuk Muhammadiyah dan NU, bersepakat untuk membuka madrasah Ibtidaiyah, dan karena itu dibutuhkan seorang guru. Munawir segera menerima tawaran ini dengan pertimbangan bahwa tawaran ini lebih memberikan kepastian dibandingkan kegiatan yang sedang dilakukannya.

Setelah menyelesaikan segala urusan dengan Pengurus Muhammadiyah Salatiga, pada pertengahan 1944 Munawir segera berangkat ke Gunungpati. Dari Gunungpati inilah keterlibatan Munawir dengan kegiatan-kegiatan umat Islam dalam skala nasional dimulai. Bermula dari sedikitnya kaum terpelajar di kota kecil ini, kegiatan Munawir yang tadinya hanya mengajar berkembang ke arah kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Munawir hampir selalu dilibatkan dalam pembentukan badan-badan semi-resmi maupun swasta. Hal ini selain membawa Munawir pada kegiatan-kegiatan yang berskala nasional, juga membawa implikasi kesejahteraan ekonomi. Atas keterlibatannya pada kegiatan-kegiatan sosial, Munawir memperoleh keistimewaan dalam hal-hal seperti pembagian bahan sandang dan pangan sehingga ia memberanikan diri memboyong ibu dan sebagian adik-adiknya ke Gunungpati. Sementara ayah dan sebagian adik-adiknya yang lain masih bertahan di Desa Karanganom.

Di Gunungpati inilah untuk pertama kalinya Munawir bertemu dengan Bung Karno yang waktu itu menjabat sebagai Ketua Umum Putera (Pusat Tenaga Rakyat). Waktu itu di wilayah Karesidenan Se-

marang diadakan perlombaan pengumpulan gabah dan dukungan-dukungan lain untuk memenangkan perang. Dalam perlombaan ini, Gunungpati termasuk kecamatan yang dinyatakan baik. Sebagai penghargaan, kecamatan ini mendapat kunjungan Bung Karno, dan madrasah tempat Munawir mengajar merupakan salah satu tempat yang dikunjungi. Meskipun dialog antara Munawir dan Bung Karno hanya berlangsung singkat, pertemuan ini menggoreskan kesan mendalam dalam diri Munawir.

Peristiwa di Gunungpati yang secara langsung mengantarkan Munawir untuk terlibat dalam kegiatan umat Islam dalam skala nasional adalah acara pekan "orientasi" ulama dan tokoh agama wilayah Semarang. Acara ini diselenggarakan pemerintah Jepang dalam rangka menggalang potensi rakyat dan pendekatan terhadap ulama-ulama Islam. Pada tingkat karesidenan, usaha ini dilaksanakan melalui Kantor Urusan Agama Karesidenan Semarang yang waktu itu dikepalai KH. Munawar Cholil. Munawir diutus mewakili Kecamatan Gunungpati dalam acara tersebut. Melalui pekan "orientasi" ini selanjutnya terjalin semacam jaringan di antara para peserta yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan perjuangan karena secara berkala para peserta kegiatan ini melakukan pertemuan-pertemuan untuk membicarakan masalah-masalah umat Islam.

Dalam situasi demikian, gairah belajar Munawir kembali menyala. Apalagi pada waktu itu, awal 1945, terdengar khabar bahwa di Jakarta akan dibuka Sekolah Tinggi Islam, atau semacam Pesantren Luhur.[14] Namun, gairah ini kembali padam karena ketika berkonsultasi dengan KH. Munawar Cholil, Munawir dihadapkan pada kenyataan pahit. Pertama, belum tentu ijazah Mambaul Ulum dapat diterima di Sekolah Tinggi Islam. Hal ini karena pengetahuan

---

[14]Sekolah Tinggi Islam (STI) ini tepatnya didirikan di Jakarta pada 8 Juli 1945. Pada 1946, ketika Jakarta dikuasai Belanda (sekutu), STI dipindahkan ke Yogyakarta. Selanjutnya, pada 22 Maret 1948, namanya diubah menjadi University Islam Indonesia (UII), yang memiliki fakultas umum dan agama. Pada 1950, fakultas agama diserahkan ke Kementrian Agama dan dijadikan PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri). Lihat Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, hal. 288.

umum yang diterima di madrasah dianggap sejajar dengan pengetahuan umum di sekolah menengah pertama, sedangkan Sekolah Tinggi Islam mensyaratkan calon mahasiswanya memiliki pengetahuan umum yang setara dengan sekolah menengah atas. Kedua, Sekolah Tinggi Islam itu berada di Jakarta. Selain membayar uang sekolah, mahasiswa dari luar Jakarta juga harus membayar uang pondokan dan kebutuhan hidup yang lain. Sementara Munawir tidak mempunyai tumpuan selain pekerjaanya sebagai guru madrasah di Gunungpati.

Proklamasi kemerdekaan RI 1945 membawa perubahan-perubahan di wilayah Kecamatan Gunungpati yang dalam batas-batas tertentu juga berpengaruh pada diri Munawir; proklamasi kemerdekaan ini bahkan mengantarkan Munawir keluar dari Gunungpati. Kecamatan yang berdekatan dengan Kota Semarang ini—hanya dipisahkan oleh aliran Kali Garang yang dangkal—sejak hari-hari pertama proklamasi kemerdekaan sudah bergolak. Banyak warga Semarang yang mengungsi ke kota kecil ini. Situasi ini dengan sendirinya menimbulkan masalah-masalah politik, keamanan dan sosial yang dilihat dari segi jumlah maupun frekuensinya di luar kemampuan aparat pemerintahan kecamatan dan masyarakat Gunungpati pada umumnya. Menghadapi kompleksnya masalah ini, masyarakat Gunungpati kemudian membentuk Angkatan Muda Gunungpati. Munawir, sebagai pemuda yang dikenal aktif, dipilih menjadi ketua Angkatan Muda Gunungpati; suatu posisi yang bukan hanya mengejutkan karena belum memiliki kesiapan mental, dan karenanya pula diterima dengan ragu sekaligus bangga. Dalam kapasitas sebagai Ketua Angkatan Muda Gunungpati Munawir—bersama rombongan dari Semarang—menghadiri Kongres Pemuda di Yogyakarta yang berlangsung beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan.

Kembali dari kongres, rombongan Munawir terhenti di Ambarawa dan tidak bisa meneruskan perjalanan ke Semarang karena waktu itu tentara Sekutu sudah menguasai Benteng Ambarawa. Munawir, bersama seluruh rombongan Angkatan Muda Kabupaten Semarang, selanjutnya menggabungkan diri dengan kesatuan-kesatuan pejuang yang waktu itu banyak macam dan ragamnya. Munawir sendiri, karena jaringan yang dimilikinya pada masa pendudukan Jepang, menggabungkan diri dengan kelompok pejuang Islam yang dike-

nal dengan pasukan Hizbullah.[15] Dapat diduga, selanjutnya Munawir terlibat dalam perang melawan tentara sekutu di Ambarawa. Atas usul Munawir, pasukan Hizbullah Surakarta, tempat ia bergabung, menamakan dirinya pasukan "Gatjo", singkatan dari *Gaboengan Tjalon Oelama.*

Sejarah mencatat besar dan luasnya partisipasi fisik Hizbullah dan Sabilillah[16] dalam perang kemerdekaan. Namun, antara keduanya tidak ada kordinasi sehingga terkadang terjadi miskomunikasi. Apalagi lokasi kedua pasukan ini tersebar di seluruh Jawa. Untuk menjembatani keduanya selanjutnya dibentuklah Markas Pimpinan Pertempuran Hizbullah-Sabilillah (MPHS) yang berfungsi sebagai forum komunikasi dan kordinasi. Untuk wilayah Jawa Timur MPHS dipimpin Wahib Wahab*—kelak menjabat Menteri Agama; untuk wilayah Jawa Barat dipimpin Kamran; dan wilayah Jawa Tengah, karena KH. Idris, pemimpin Sabilillah Surakarta dan mantan Daidancho Peta Wonogiri menolak, maka Munawir ditunjuk sebagai pemimpin.

Berkaitan dengan posisinya sebagai pemimpin MPHS, Munawir menulis:

> Penunjukan saya sebagai pimpinan MPHS merupakan tugas yang berat. *Pertama,* oleh karena wahana tidak memadai untuk dapat dengan lancar melaksanakan tugas yang meliputi empat sektor *palagan* itu. MPHS sama sekali tidak mempunyai kendaraan bermotor sendiri, dan harus menggantungkan diri dengan pinjaman dari Markas Pimpinan Pertempuran. Juga untuk menjangkau empat karesidenan dan satu Daerah Istimewa Yogyakarta saya harus lebih banyak menggunakan jasa kereta api. *Kedua,* pada awal-awal revolusi, yang pada waktu itu fanatisme golongan masih kuat, tidak mudah menjadi penghubung antara Markas Pimpinan Pertempuran yang didominasi oleh golongan "sekularis" dengan pejuang-pejuang Islam. Sebagai orang tengah memang dicurigai oleh kedua belah pihak dan kalau tidak hati-hati bisa gagal misinya Saya kira pada waktu itulah mulai tumbuh "bakat" saya dalam diplomasi,

---

[15]Hizbullah adalah semacam unit militer bagi pemuda Islam yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang, tepatnya akhir tahun 1944. Lihat, Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante* (Jakarta: LP3ES, 1985), hal. 98.

[16]Sabalillah sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Hizbullah. Bedanya anggota Sabilillah terdiri dari para ulama; jadi merupakan kelompok militer Islam yang anggotanya terdiri dari ulama. Pada praktiknya, Sabilillah ini berperan sebagai pelindung Hizbullah. Lihat Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan,* hal. 99.

*Lihat bab tentang Wahib Wahab.

dan di MPHS lah saya mulai mempunyai kesempatan untuk berusaha mencari titik temu antara berbagai pendapat yang berbeda dan antara banyak kepentingan yang berlainan (esensi dari diplomasi).[17]

Pada awal Mei 1947 keluar Dekrit Presiden tentang peleburan semua badan kelaskaran, termasuk Hizbullah dan Sabilillah, ke dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI). Karena sadar tidak memiliki bakat di dunia militer, Munawir tidak ikut meleburkan diri ke dalam TNI; ia memilih kembali ke Solo dan aktif lagi di Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII). Ketika meletus "Peristiwa Madiun" Munawir sedang menduduki jabatan pimpinan Kesatuan Aksi Pemuda Surakarta mewakili GPII. Namun, ketika tentara Belanda menduduki Solo dalam Aksi Militer II, Munawir kembali aktif di dunia militer dan bergabung dengan kesatuan-kesatuan yang memilih tetap beroperasi di daerah pendudukan. Selanjutnya, pada akhir 1949 dengan usainya perang kemerdekaan dan terlaksananya Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Munawir kembali ke Semarang. Kali ini bukan ke Gunungpati melainkan ke rumah KH. Munawar Cholil.

Penting dicatat, ketika terlibat dalam melawan Aksi Militer II, Munawir masih sempat kursus bahasa Inggris kepada seorang Cina, Chan, yang tinggal di Purwopuran. Dalam waktu enam bulan, Munawir berhasil menyelesaikan apa yang oleh siswa lain diselesaikan selama dua tahun. Ketika di Semarang, kursus ini dilanjutkan, namun kali ini bukan bahasa Inggris lagi yang ingin dipelajari Munawir melainkan bahasa Prancis. Munawir mengambil kursus privat dari seorang Belanda-Indo pegawai Jawatan Sosial.

Hanya satu tahun Munawir tinggal di Semarang. Namun, waktu satu tahun ini sangat mempengaruhi perjalanan hidup Munawir di kemudian hari. Pertama, Munawir menemukan jodohnya, seorang gadis bernama Murni, yang waktu itu aktif di Pelajar Islam Indonesia (PII). Ceritanya bermula dari inisiatif Munawir untuk mendirikan cabang GPII di Semarang. Inisiatif ini bukan hanya disambut antusias oleh kalangan pemuda Islam Semarang, tetapi mereka juga mendaulat Munawir untuk menjadi Ketua Umum. Demiki-

[17]"Dari Lembah Kemiskinan," hal. 37-38

an antusiasnya GPII Cabang Semarang, mereka menawarkan diri kepada Pucuk Pimpinan GPII di Yogyakarta untuk menjadi panitia penyelenggara sekaligus tuan rumah muktamar pertama organisasi ini setelah pengakuan kedaulatan. Untuk kelancaran muktamar, panitia meminta bantuan tenaga dari organisasi-organisasi Islam yang ada di kota itu, termasuk PII. Murni adalah salah seorang pelajar putri dari sekolah menengah yang diperbantukan PII untuk kelancaran muktamar. Setelah melewati proses yang sederhana, pada 25 Mei 1950 Munawir melangsungkan gantung nikah atau "nikah siri" dengan Murni, putri Tas Sekti, cucu Tasripin—yang semasa hidupnya merupakan "konglomerat" pribumi di Semarang. Acara pernikahan resmi yang diikuti resepsi selanjutnya dilaksanakan pada 11 Oktober 1950. Pernikahan Munawir-Murni ini dianugerahi enam orang anak, tiga laki-laki dan tiga wanita.

Kedua, seusai Muktamar GPII, karena memiliki banyak waktu luang, Munawir mencoba menelaah konsepsi politik Islam yang berkembang di masa klasik. Hal ini didorong oleh demikian kuatnya aspirasi Islam sebagai dasar negara yang muncul di kalangan para aktivis dan pemikir Islam, terutama para tokoh Masyumi. Dengan memanfaatkan perpustakaan KH. Munawar Cholil, yang penuh kitab-kitab klasik Islam, Munawir berhasil menulis buku *Mungkinkah Negara Indonesia Bersendikan Islam* seperti disebut pada awal tulisan ini. Buku inilah yang selanjutnya mengantarkan Munawir bekerja di Kementerian Luar Negeri.

Karir di Pemerintahan: Bekerja dan Belajar

Ketika masuk di Kementerian Luar Negeri, Munawir ditempatkan di Seksi Arab dengan tugas membaca suratkabar harian dan majalah berbahasa Arab kiriman dari sejumlah Kedutaan Besar RI di negara-negera Arab. Berdasarkan bahan bacaan ini Munawir menulis resume untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Direktorat Politik. Karena memiliki pekerjaan yang mulai mapan, pada akhir Oktober 1950 Munawir memboyong isterinya pindah ke Jakarta.

Pada 1951, setelah setahun bekerja, Kementerian Luar Negeri membuka kursus Diplomatik dan Konsuler Angkatan II. Melihat kesempatan ini, Munawir segera mendaftarkan diri namun ditolak karena adanya hambatan birokratis. Di Kementerian Luar Negeri, ijazah Mambaul Ulum yang dimiliki Munawir ternyata disamakan

dengan tamatan SLTP. Kondisi ini berbeda dengan di Kementerian Agama yang menyamakan ijazah Mambaul Ulum dengan tamatan SLTA. Akibatnya, tidak hanya dari segi kepangkatan dalam Peraturan Gaji Pegawai (PGP) Munawir diposisikan sederajat dengan tamatan SLTP, tetapi juga kesempatan untuk mengikuti kursus itu menjadi tertutup. Persyaratan pokoknya selain lulus seleksi adalah memiliki ijazah setingkat SLTA. Beruntung penolakan itu tidak definitif, karena pimpinan kementerian waktu itu, termasuk sekretaris jenderal, yang sudah membaca laporan-laporan Munawir segera merekomendasikan kepada panitia seleksi agar Munawir mendapat pengecualian dan diizinkan mendaftar sebagai peserta kursus.

Selanjutnya, meskipun dengan susah-payah, Munawir bukan hanya lulus seleksi kursus, tetapi juga berhasil menyelesaikan kursus dengan baik. Selesai kursus, oleh Kantor Urusan Pegawai (KUP) pangkat Munawir dinaikkan. Alasannya, selain sertifikat kursus itu dianggap sama dengan ijazah sarjana muda, juga sebagai "koreksi" atas penilaian yang salah selama ini. Di samping itu, dengan memiliki sertifikat kursus ini, otomatis Munawir telah masuk dalam Korp Diplomatik yang jika ditempatkan di luar negeri nanti berhak menyandang pangkat *Atase*, jenjang terbawah dalam dinas diplomatik. Dengan pangkat ini, Munawir berharap segera ditempatkan di luar negeri.

Harapan itu tak kunjung datang. Bukan tawaran untuk ditempatkan di luar negeri sebagai diplomat yang datang, tetapi justru tawaran untuk belajar di luar negeri. Waktu itu, Kementerian Luar Negeri mendapat jatah tiga beasiswa dari PBB untuk belajar di luar negeri selama satu tahun, dan Munawir dipandang tepat untuk mengisi kesempatan ini. Munawir tidak dapat segera menerima tawaran ini karena alasan-alasan ekonomi dan keluarga. Namun, ia juga teringat pada Bung Hatta; tokoh yang membantu memasukkannya di Kementerian Luar Negeri dengan tujuan agar dapat melanjutkan studi di luar negeri dan kini kesempatan itu telah datang. Karena teringat Bung Hatta ini, Munawir akhirnya memutuskan menerima tawaran tersebut.

Pada akhir Agustus 1953 Munawir berangkat ke Inggris untuk belajar ilmu politik di University College of South West of England, Exerter. Universitas ini pada 1956 menjadi universitas mandiri dengan nama University of Exerter. Sedangkan istri dan kedua anaknya dititipkan kepada mertua di Semarang. Tepat setahun persis,

Munawir berhasil menyelesaikan studinya dan pada Juli 1954 Munawir kembali ke tanah air. Mula-mula ia ditempatkan di Direktorat Eropa, namun pada awal 1955 ia ditarik ke Sekretariat Bersama Konferensi Asia Afrika dan terlibat penuh dalam urusan kesekretariatan konferensi yang cukup bersejarah itu.

Pertengahan 1955, kepala Sekretariat, Nugraha SH, mengucapkan terima kasih atas bantuan Munawir dalam kesekretariatan dan sebagai imbalan ia menanyakan apakah ada yang dapat dibantu sehubungan dengan penempatan Munawir di luar negeri. Menjawab pertanyaan ini, Munawir menegaskan bahwa ia masih ingin meneruskan studi sambil meniti karir; dan untuk ini ada dua negara pilihan, yakni Amerika Serikat atau Filipina, meskipun Munawir lebih condong pada yang pertama. Keinginan ini rupanya benar-benar terpenuhi, Munawir ditugaskan di Kedutaan Besar RI di Washington DC. Pertengahan Desember 1955, Munawir bertolak ke Amerika Serikat dengan kapal laut. Awal Januari 1956, Munawir, bersama istri dan anak-anaknya, tiba di Amerika Serikat dan langsung diperbantukan di Atase Penerangan untuk selanjutnya dipindahkan ke bagian politik. Dubes RI untuk Amerika Serikat waktu itu adalah Mukarto Notowidagdo, tokoh PNI yang bukan hanya berwawasan luas, tetapi juga mendorong para diplomat muda untuk memanfaatkan kehadiran mereka di Amerika Serikat dengan melanjutkan studi.

Pada Agustus tahun itu juga Munawir mendaftarkan diri di Universitas Geogetown dan diterima langsung di Fakultas Pascasarjana untuk Master of Arts (MA). Hal ini karena Kursus Diplomatik dan Konsuler serta satu tahun di University College of South West of England, Exerter, dinilai sebagai sedikit di bawah gelar Bachelor of Arts (BA). Jika para penyandang gelar BA harus mengambil 30 SKS, maka Munawir diharuskan mengambil 36 SKS untuk meraih gelar MA. Munawir memulai kuliahnya pada semester musim gugur 1956 dan selesai pada 1959 dengan *major subject* hubungan internasional dan *minor subject* filsafat politik. Meskipun demikian, Munawir diijinkan untuk menulis tesis sesuai dengan *minor subject*, filsafat politik, dengan judul "Indonesia's Muslim Political Parties and Their Political Concepts." Dengan tesis ini Munawir bukan hanya meraih gelar MA, tetapi juga memenuhi obsesinya selama ini untuk mencari konsepsi politik Islam.

Selama mengambil gelar MA sambil bekerja, Munawir mengala-

mi banyak suka-duka. Paling dirasakan berat oleh Munawir adalah saat-saat menjelang ujian akhir. Dirasakan berat karena ujian akhir semester ini bersamaan waktunya dengan persidangan Majelis Umum PBB. Banyak diplomat senior yang diperbantukan ke New York sehingga Munawir selain harus mempersiapkan ujian, juga harus mengambil oper tugas-tugas mereka di Washington DC. Karena terlalu keras bekerja dan kuliah, Munawir jatuh sakit dan harus istirahat total selama tujuh minggu. Hari pertama, Munawir benar-benar istirahat. Namun hari-hari berikutnya, setelah konsultasi dengan dokter, Munawir menghabiskan waktu istirahatnya dengan membaca buku-buku pelajaran kuliah. Selama tujuh minggu, Munawir bergumul dengan buku-buku pelajaran, tanpa memikirkan pekerjaan KBRI dan kuliah. Dari tiga mata kuliah yang diujikan, dua di antaranya mendapat nilai A- dan B+. Munawir memandang musibah sakit yang menimpanya sebagai *blessing in disguise.*[18]

Setelah meraih MA, Munawir kembali menekuni karirnya di Kementerian Luar Negeri. Berkaitan dengan ini, ada dua peristiwa penting yang patut dicatat karena hal itu sangat berpengaruh terhadap karir Munawir di kemudian hari. Pertama, peristiwa meletusnya pemberontakan PRRI/Permesta. Munawir yang di masa lalu cukup aktif dalam pergerakan pemuda Islam mempunyai hubungan yang relatif dekat dengan tokoh-tokoh Islam di masa itu, baik yang aktif di Masyumi, NU, Muhammadiyah maupun GPII. Kedekatan hubungan ini di antaranya diwujudkan dalam bentuk kesediaan Munawir menerima tokoh-tokoh Islam yang sedang berkunjung ke Amerika di rumahnya. Karena itu, ketika meletus PRRI/Permesta Munawir tidak hanya dideskriditkan oleh teman-teman sekerja, tetapi juga dituduh sebagai simpatisan pemberontak. Kedua, peristiwa-peristiwa menjelang G30S PKI 1965. Peristiwa yang sangat kritis bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara ini telah menyebabkan Munawir dikucilkan dari pergaulan di Departemen Luar Negeri. Bukan saja karena ia menolak ideologi Manipol-Usdek, tetapi juga menolak tawaran dari aktivis politik Islam yang menawarkan jabatan Duta Besar melalui jalan pintas sehingga ia mendapat julukan "*die hard* Masyumi."[19]

---

[18]Dari Lembah Kemiskinan," hal. 52

[19]Lihat "Dari Lembah Kemiskinan," hal. 54-57

Peristiwa pertama dapat diatasi dengan bantuan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Mukarto Notowidagdo. Tokoh PNI ini tidak hanya melindungi Munawir dari "fitnah" yang berbahaya, tetapi juga terus mempromosikan Munawir dengan memberi kepercayaan lebih untuk ukuran diplomat setingkat Munawir seperti menulis *position paper*, dan *speech writing*. Sedangkan peristiwa kedua dapat dilewati berkat konsistensi Munawir sebagai pegawai negeri serta kesediannya untuk "disingkirkan" ke Kolombo menduduki posisi Sekretaris I. Selama lima tahun kurang dua bulan (1963-1968) Munawir bertugas di Kolombo sehingga ketika G30S PKI meletus Munawir berada di luar negeri.

Melewati dua peristiwa politik penting ini, karir Munawir terus menanjak. Pada 1970 ia ditugaskan KBRI London mendampingi Roesmin Nurjadin sebagai *Deputy Chief Mission* (orang kedua) dengan pangkat Minister Counsellor. Sukses menjalankan tugas ini, pada 1975 Munawir diangkat sebagai Duta Besar RI untuk Kuwait, yang waktu itu masih dirangkap KBRI Irak. Tugas pokok Munawir di pos ini adalah mengusahakan pinjaman lunak jangka panjang di samping mencari investasi dari negera-negara teluk. Sebagai Duta Besar RI untuk Kuwait Munawir juga merangkap Duta Besar RI *non-resident* untuk Uni Emirat Arab, Qatar, dan Bahrain. Ketika menjabat Duta Besar di wilayah Timur Tengah ini menyempatkan diri mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan konsep politik Islam, terutama dari khazanah Islam klasik.[20]

Pada 1980, setelah lebih dari tiga setengah tahun bertugas di Kuwait, Munawir dipanggil pulang ke tanah air untuk membantu merumuskan politik Indonesia di Timur Tengah setelah terjadi kesepakatan damai antara Mesir dan Israel. Ketika tiba di tanah air Munawir diangkat sebagai Direktur Jenderal Politik Deplu menggantikan Chaidir Anwar Sani. Dalam posisi inilah Munawir sering mewakili Menlu—ketika yang bersangkutan sedang di luar negeri—untuk menghadiri rapat-rapat Polkam tingkat menteri. Inilah yang selanjutnya mengantarkan Munawir ke kursi Menteri Agama—setelah lebih kurang 33 tahun (1950-1983) mengembangkan karir di lingkungan Departemen Luar Negeri.

---

[20]Wawancara dengan Munawir Sjadzali di Jakarta, 6 September 1991.

Konteks Sosial-Politik Dekade 80-an

Jika diletakkan dalam konteks dunia Islam, perhatian besar Munawir terhadap masalah hubungan antara Islam dan negara, yang terutama terefleksikan dalam karya-karya intelektualnya, sebenarnya sesuatu yang wajar. Di seluruh dunia Islam, hubungan Islam dan negara memang sudah sejak lama menjadi satu persoalan pelik. Ungkapan *inna al-Islam din wa dawlah* yang populer di lingkungan kaum Muslim sebenarnya lebih menunjuk pada manifestasi Islam dalam sejarah daripada sebuah rumusan konsepsional yang *applicable* dalam realitas. Oleh karena itu, tepatnya sejak keruntuhan kolonialisme Barat pada pertengahan abad ke-20 negara-negara Islam seperti Turki, Mesir, Sudan, Marokko, Pakistan atau Aljazair mengalami kesulitan dalam upaya membangun hubungan yang memungkinkan (*viable*) antara Islam dan negara. Di sejumlah negara itu hubungan Islam dan negara tak jarang mengalami ketegangan, bahkan permusuhan. Padahal pada saat yang sama di sejumlah negara itu Islam menduduki posisi penting, baik karena masa lalunya maupun karena Islam merupakan agama yang dianut mayoritas pendudukuknya. Oleh karena itulah di kalangan pengamat kemudian muncul pertanyaan krusial: apakah Islam sesuai atau tidak dengan sistem politik modern, di mana ide tentang negara-bangsa (*nation-state*) merupakan unsur terpentingnya.

Dalam konteks Indonesia hubungan antara Islam dan negara tidak hanya telah berlangsung lama. Sejak negara ini merdeka masalah tersebut telah menyulut ketegangan, permusuhan, bahkan konflik fisik antara keduanya. Dalam masa-masa formatif negara ini kaum Muslim tidak hanya terus-menerus menyuarakan aspirasinya untuk tidak hanya menjadikan Islam sebagai dasar negara, tetapi juga menjadikan sistem politik Islam sebagai panduan dalam mengatur negara. Meskipun pada akhirnya terjadi kompromi-kompromi, aspirasi demikian itu tak kunjung padam; setiap ada kesempatan dan peluang sekecil apa pun aspirasi demikian kembali muncul ke permukaan.

Paling sedikit terdapat dua kesempatan dan peluang resmi yang digunakan kaum Muslim Indonesia untuk mewujudkan aspirasi politiknya. *Pertama*, pada saat berlangsungnya diskusi mengenai dasar negara pada 1945. Pada kesempatan ini wakil-wakil Islam mengusulkan agar Islam dijadikan ideologi atau agama negara. *Kedua*, pada dekade 1950-an dalam sidang-sidang Konstituante yang

memberi peluang pada setiap kelompok untuk mendiskusikan kembali konstruk ideologi dan undang-undang dasar. Pada kesempatan ini, melalui tokoh-tokoh Masyumi, aspirasi ideologi Islam kembali muncul. Bahkan jika dibandingkan dengan yang terjadi pada kesempatan pertama, kesempatan kedua ini menyajikan perdebatan lebih luas dan mendalam mengenai pentingnya ideologi Islam dan konsepsi sistem politik Islam dalam negara Indonesia. Akan tetapi, di samping peluang-peluang resmi tadi, kaum Muslim juga terus-menerus menyuarakan aspirasi Islam ideologis dalam berbagai forum dan kesempatan.[21]

Kerasnya sikap kaum Muslim dalam memperjuangkan aspirasi politiknya, ternyata membawa implikasi negatif—jika tidak boleh dikatakan merugikan—masyarakat Islam Indonesia, baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru. Di kalangan pemerintah tidak hanya muncul kecurigaan terhadap kaum Muslim, tetapi mereka juga dipandang sebagai kelompok yang tidak sepenuhnya bersedia menerima Pancasila sebagai ideologi negara.

Situasi demikian pada gilirannya menimbulkan respons balik. Tidak sedikit pemikir dan aktivis politik Islam yang memandang negara dengan curiga. Terlepas dari kesediaan negara untuk memberikan berbagai fasilitas dan bantuan bagi masyarakat Islam dalam menjalankan agamanya, mereka tetap menganggap negara berusaha menghilangkan arti penting Islam secara politik dan menerapkan kebijakan sekuler. Dalam situasi demikian, bahkan berkembang anggapan bahwa negara menerapkan kebijakan ganda (*dual policy*) terhadap Islam. Sementara membiarkan—atau bahkan mendorong—dimensi ritual Islam untuk tumbuh, negara tidak memberi kesempatan bagi politik Islam untuk berkembang.[22] Dalam kaitan

---

[21]Lepas dari berbagai analisis yang muncul, gerakan-gerakan Islam seperti DI /TII pada dekade 40-an dan PRRI/Permesta pada dekade 60-an sering diidentifikasi sebagai salah satu bentuk perjuangan Islam ideologis melalui kekuatan bersenjata. Bahkan hingga dekade 80-an, aspirasi Islam ideologis ini masih kental di sebagian kaum Muslim.

[22]Pandangan ini sering dihubungkan dengan warisan kebijakan kolonial Belanda tentang Islam yang dirumuskan oleh Snouck Hurgronje. Lihat Harry J. Benda, *The Cresent and the Rising Sun: Indonesian Islam under the Japanese Occupation 1942-1945* (The Hague and Bandung: W. van Hoeve Ltd., 1958).

ini dapat dikatakan bahwa dalam negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam berkembang rasa saling curiga antara kelompok Islam dan negara.

Berkembangnya rasa saling curiga dan permusuhan politik antara Islam dan negara ini pada gilirannya memicu munculnya gerakan intelektualisme Islam baru. Gerakan yang muncul pada 1970-an ini secara umum bertujuan meredusir—jika tidak bisa menghilangkan sama sekali—rasa saling curiga antara Islam dan negara yang dalam pandangan mereka tidak hanya merugikan masyarakat Islam Indonesia, tetapi juga tidak kondusif bagi perkembangan bangsa karena menyiratkan adanya perpecahan antarunsur dalam negara. Di samping itu, yang lebih penting lagi, gerakan ini juga bermaksud menciptakan format baru politik Islam yang dipandang sesuai dengan konstruk ideologis negara kebangsaan Indonesia.

Dengan tujuan yang demikian mendasar, gerakan ini bekerja pada berbagai tingkat. Pertama, mereka bekerja pada tingkat pemikiran, yaitu merumuskan basis teologis yang sejalan dengan pandangan mereka mengenai hubungan Islam dan negara. Kedua, mereka bekerja pada tataran gerakan sosial, yaitu melakukan aksi-aksi sosial yang bertujuan memberdayakan dan mentransformasikan masyarakat Islam Indonesia sehingga dari segi sosial-ekonomi sejahtera dan dari pemikiran tidak lagi terikat dan memperjuangkan aspirasi Islam sebagai ideologi. Ketiga, mereka juga bekerja di birokrasi pemerintahan.

Meskipun antara yang satu dengan lainnya tidak selalu memiliki hubungan, antara ketiganya terdapat kesamaan pandangan mengenai hubungan antara Islam dan negara. Pada prinsipnya mereka meneguhkan adanya perspektif baru yang berguna untuk melihat hubungan Islam dan negara. *Pertama,* dalam pandangan mereka tidak ada bukti yang jelas bahwa al-Qur'an dan Sunnah mengharuskan komunitas Muslim untuk mendirikan sebuah negara Islam. Menurut pengamatan mereka, pengalaman politik Nabi Muhammad tidak meliputi proklamasi berdirinya sebuah negara Islam. Oleh karena itu, mereka menolak agenda politik dan aktivis politik Islam terdahulu yang seakan-akan menuntut berdirinya sebuah negara Islam atau negara yang berdasarkan ideologi Islam.

Kedua, meraka menyadari bahwa Islam mengandung prinsip-prinsip atau etika sosial-politik. Meskipun demikian, mereka berpendapat bahwa Islam bukan ideologi, bahkan mereka tegaskan

bahwa tidak ada ideologi Islam. Lebih dari itu, mereka berpendapat bahwa mengideologikan Islam dapat dipandang sebagai tindakan meredusir posisi Islam.

Ketiga, karena Islam dipandang sebagai doktrin yang abadi dan universal, pemahaman Muslim terhadap seluruh doktrin Islam tidak boleh dibatasi pada dataran yang bersifat legal-formal. Mereka menganjurkan agar pemahaman Muslim terhadap doktrin Islam hendaknya didasarkan atas penafsiran yang menyeluruh yang sesuai dengan tuntutan zaman. Pandangan seperti ini pada gilirannya mengharuskan adanya transformasi Islam terhadap prinsip-prinsip dan praktik kontemporer.

Keempat, mereka sepakat bahwa hanya Allah yang memiliki kebenaran mutlak. Dengan demikian adalah mustahil menangkap realitas absolut Islam. Pandangan kaum Muslim atas doktrin Islam, dengan demikian, bersifat relatif dan karenanya bisa berubah. Karena sifat Islam yang *polyiinterpretable* dan kenyataan bahwa Islam tidak mengakui adanya struktur kependetaan dalam Islam (*la rahbaniyah fi al-islam*), maka tak boleh ada individu-individu yang mengklaim pemahamannya tentang Islam lebih otoritatif dibandingkan yang lain. Oleh karena itu, sudah semestinya kaum Muslim bersikap toleran dalam beragama, baik internal maupun eksternal.[23]

Dari perspektif intelektualisme baru ini, perjuangan politik Islam harus diwujudkan dalam dataran substansi daripada dataran logal-formal; mereka lebih mementingkan isi daripada simbol. Mengesampingkan fokus perhatian terhadap struktur dan berusaha mengakhiri hubungan antagonistik antara Islam dan negara, mereka tidak melihat adanya suatu alasan yang kuat untuk tidak menerima konstruk negara-bangsa dengan Pancasila sebagai dasarnya. Dalam pandangan mereka, kaum Muslim hendaknya membangun komitmen kepada nilai-nilai Islam dan bukan pada institusi atau organisasi yang memakai simbol Islam—termasuk di dalamnya partai Islam.

Dalam konteks kemunculan intelektualisme baru Islam dan resistensi kalangan Islam ideologis terhadapnya, pemerintah mengintrodusir gagasan untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satu-

---

[23]Lihat Bahtiar Effendy, "Islam and the State in Indonesia: Munawir Sjadzali and the Development of a New Theological Underpinning of Political Islam," *Studia Islamika,* Volume 2, Number 2, 1995, hal. 106-7

nya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Gagasan Pancasila sebagai asas tunggal ini dilontarkan Presiden Soeharto dalam Rapim ABRI di Pekanbaru, pada 27 Maret 1980. Selanjutnya ditegaskan kembali dalam pidato tanpa teks pada acara ulang tahun Kopassandha (Korp Pasukan Sandi Yudha; kini Kopassus) di Cijantung pada 16 April 1980. Pidato Presiden ini pada gilirannya menimbulkan reaksi dari para pemimpin Islam dan sejumlah pensiunan perwira militer yang kemudian membentuk kelompok yang disebut dengan "Petisi 50". Dalam "Pernyataan Keprihatinan" yang disampaikan ke DPR-RI pada 13 Mei 1980, "Petisi 50" antara lain menuduh Presiden Soeharto telah menggunakan Pancasila sebagai senjata untuk melumpuhkan lawan-lawan politiknya, padahal oleh para pendiri republik ini (*founding fathers*) Pancasila dimaksudkan sebagai pemersatu bangsa.

Lepas dari reaksi yang muncul, keputusan menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal terus menggelinding dan membesar seperti bola salju. Secara resmi Presiden bahkan mengungkapkan kembali keputusan ini dalam pidato kenegaraan di hadapan sidang umum terbuka DPR-RI menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-37, 16 Agustus 1982. Dalam pidato tersebut Presiden menyinggung persaingan ideologis antarpartai-partai politik peserta Pemilu yang tidak hanya *counter productive*, tetapi juga merugikan kesatuan dan persatuan bangsa. Oleh karena itu, Presiden menegaskan agar partai politik hanya mengikatkan diri kepada Pancasila.[24] Keputusan ini selanjutnya diulang dan ditegaskan kembali dalam acara "halal bil halal" antara Presiden dengan para perwira senior ABRI di Tapos Bogor.[25]

Dalam konteks perkembangan politik Indonesia Orde Baru, keputusan menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal ini merupakan kelanjutan dari keputusan politik pemerintah pada masa sebelumnya yang secara umum tidak mengijinkan berkembangnya Islam sebagai kekuatan politik riil. Pada awal Orde Baru pemerintah tidak hanya menolak rehabilitasi Masyumi, tetapi juga melarang para tokohnya untuk aktif di Parmusi, partai Islam yang dipandang se-

---

[24]Lihat "Parpol Sebaiknya Hanya Mengikatkan Diri pada Pancasila," *Antara*, 16 Agustus 1982.

[25]Lihat "Asas Tunggal Perlu untuk Stabilitas, Presiden Berhalal bi halal dengan Perwira Senior ABRI di Tapos Bogor," *Suara Pembaruan*, 18 Juli 1983.

bagai pengganti Masyumi. Pada perkembangan lebih lanjut, di samping menerapkan kebijakan *floating mass,* pemerintah juga memfusikan partai-partai politik menjadi tiga kekuatan politik, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). PPP merupakan fusi dari partai-partai Islam, Golkar merupakan kekuatan profesional yang terutama terdiri dari para pegawai negeri sipil, dan PDI merupakan fusi dari partai-partai nasionalis, Katolik, dan Kristen.

Keputusan politik pertama dimaksudkan untuk memutus mata rantai antara partai politik dengan massa pendukungnya sehingga secara gradual masyarakat mengalami depolitisasi. Sedangkan yang kedua, lepas dari argumentasi yang dikemukakan pemerintah, telah menyebabkan melemahnya ideologi-ideologi partai yang di masa lalu demikian kuat dan dominan, khususnya untuk tujuan pengumpulan suara dalam Pemilu. Bersamaan dengan itu, pemerintah mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila melalui Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang disahkan melalui Ketetapan MPR.

Motif pemerintah menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal adalah semata-mata untuk menjaga Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dan mensosialisasikannya dalam kehidupan kebangsaan. Sepanjang sejarah, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, memang selalu mendapat tantangan dari berbagai pihak—dalam perspektif pemerintah tantangan ini bersumber dari kalangan "ekstrim kiri" dan "ekstrim kanan." Meskipun tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi, ia dapat dibaca sebagai petunjuk masih adanya kelompok-kelompok dalam masyarakat yang belum bersedia menerima Pancasila sebagai ideologi negara.

Namun, secara langsung—seperti terungkap dalam Pidato Presiden—keputusan menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal dilatarbelakangi sejumlah peristiwa. Antara lain peristiwa *walk-out* PPP dari Sidang Umum MPR 1978 sebagai reaksi terhadap disahkannya P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Partai ini juga melakukan *walk-out* dalam sidang-sidang DPR pada 1980. Karena dua kali melakukan *walk-out* pemerintah memandang bahwa PPP yang merupakan hasil fusi partai-partai berhaluan Islam belum sepenuhnya menerima Pancasila sebagai ideologi negara. Hal lain yang turut mendorong pemerintah menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal adalah peristiwa yang terjadi sepanjang kam-

panye Pemilu 1982. Dalam masa kampanye, terjadi persaingan ideologis yang tak jarang disertai dengan kekerasan yang menimbulkan korban jiwa antara para pendukung PPP dan Golkar. Tidak hanya itu, persaingan itu bahkan muncul dalam level agama. Isu-isu keagamaan seperti mengkafirkan kelompok lain dan sebagainya mewarnai kampanye-kampanye pada masa ini. Ketua Umum Golkar waktu itu, Amir Moertono, sampai merasa perlu menegaskan bahwa Pemilu adalah semata-mata masalah politik, karena itu tidak bisa dijadikan ukuran ketaatan orang dalam beragama.[26]

Sejauh yang dapat dilihat, karena peristiwa-peristiwa itulah setelah Pemilu 1982, melalui Ketetapan MPR-RI No. II Tahun 1983, Pancasila ditetapkan sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai kelanjutan dari ketetapan MPR ini, pemerintah secara berturut-turut mengajukan lima RUU bidang politik yang terdiri RUU tentang Pemilihan Umum; RUU tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD; RUU tentang Partai Politik dan Golongan Karya; RUU tentang Referendum; dan RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas). Kelima RUU ini telah mengundang munculnya reaksi dari berbagai kalangan. Namun, dari kelima RUU tersebut dua di antaranya, yaitu RUU tentang Partai Politik dan Golongan Karya dan RUU tentang Ormas, merupakan RUU paling menyita perhatian. RUU pertama akan menghilangkan asas ciri dari setiap parpol sehingga nantinya akan menjadi partai terbuka, termasuk PPP dan PDI. Sedangkan RUU kedua, intinya mengharuskan setiap ormas, termasuk ormas yang berhaluan keagamaan, untuk menjadikan Pancasila sebagai asasnya.

Untuk partai politik, masalah Pancasila sebagai asas tunggal ini tidak mendapat ganjalan berarti, meskipun dalam kasus PPP masalah ini melewati perdebatan alot. Namun, untuk ormas, termasuk ormas-ormas Islam, pelaksanaan Pancasila sebagai satu-satunya asas tidak hanya melewati proses yang alot dan polemik keras, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Reaksi paling keras, dapat diduga, muncul dari kalangan aktivis dan pemikir Islam lama yang masih memperjuangkan aspirasi politik Islam secara formalistik. Sementara itu, dari lingkungan ormas-ormas Islam seperti NU, Mu-

---

[26] *Kompas*, 22 April 1982

hammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan sebagainya bersikap menunggu sambil mempelajari maksud pemerintah.[27]

Dalam situasi sosial-politik seperti inilah Munawir Sjadzali diangkat sebagai Menteri Agama. Di sini Munawir segera dihadapkan kepada kelompok-kelompok Islam lama yang masih memperjuangkan ideologi Islam dan secara *a priori* menolak Pancasila sebagai asas tunggal; kalangan intelektualisme baru yang tidak lagi memperjuangkan ideologi Islam dalam bentuk partai Islam atau negara Islam, sebaliknya malah bersemboyan *"Islam yes, Partai Islam, No!"*; dan kalangan ormas-ormas Islam yang masih bersikap menungggu.[28]

Perkembangan-perkembangan yang terjadi di kalangan umat Islam Indonesia tersebut tidak terlepas dari pengamatan Munawir, meskipun secara formal ia bekerja di Departemen Luar Negeri. Bahkan karena tidak terlibat langsung dalam organisasi-organisasi Islam, Munawir mengakui dapat sepenuhnya mendudukkan diri sebagai pengamat. Bahkan dengan posisinya ini, ia dapat berpikir dan menganalisis secara "objektif" perkembangan-perkembangan yang terjadi di kalangan umat Islam Indonesia.[29]

Menjadi Menteri Agama Dua Periode

Pada 14 Maret 1983, Munawir dipanggil menghadap Presiden Soeharto di Jalan Cendana untuk diberitahukan soal pengangkatan sebagai Menteri Agama dalam Kabinet Pembangunan IV. Munawir sama sekali tidak kaget dengan pengangkatan ini karena jauh sebelumnya ia sudah mempunyai "firasat." Hal ini bermula dari sebuah peristiwa tak terduga yang terjadi pada April 1982. Sebagai Direktur Jenderal Politik, Munawir sering mewakili Menteri Luar Negeri, Prof.

---

[27]Lihat Faisal Ismail, "Pancasila as a Sole Basis for All Political Parties and for All Mass Organizations: An Account of Muslims' Responses," *Studia Islamika*, Volume 3, Number 4, 1996.

[28]Sikap menunggu ini sebenarnya tidak monopoli ormas-ormas Islam. Ormas-ormas di lingkungan Kristen dan Katolik juga bersikap sama. Penting dicatat, meskipun memberikan reaksi keras, ormas-ormas Islam pada akhirnya bersedia menerima Pancasila sebagai asas. Penerimaan ini bahkan tergolong cepat dibandingkan dengan ormas Kristen dan Katolik.

[29]Wawancara dengan Munawir Sjadzali, Jakarta 6 September 1991

Dr. Muchtar Kusumaatmadja, dalam rapat-rapat Polkam tingkat menteri jika yang bersangkutan sedang melakukan kunjungan ke luar negeri. Rapat bulan April 1982 yang dipimpin Menko Polkam Panggabean, antara lain, mendengarkan laporan Menteri Penerangan Ali Murtopo, yang baru pulang dari Konferensi Menteri-menteri Penerangan Negara-negara anggota Gerakan Non-Blok di Baghdad. Dalam laporan itu, Islam juga menjadi pembahasan, yang di mata Munawir, meskipun sebagian besar betul, ada sebagian kecil yang kurang lengkap. Menghadapi hal ini Munawir merasa berada pada situasi dilematis: kalau menanggapi ia bukan dari Departemen Agama, jika tidak mengeluarkan tanggapan ia khawatir para menteri yang hadir mendapat pengertian yang tidak utuh tentang Islam. Akhirnya, dengan membulatkan keberanian, Munawir memberikan tanggapan; butir-butir laporan yang menurutnya benar digarisbawahi dan yang dipandang kurang utuh dilengkapi.

Di luar dugaan, tanggapan Munawir itu mendapat sambutan dari Sekretaris Kabinet, waktu itu Drs. Moerdiono. "Adalah suatu kejutan, Direktur Jenderal Politik Departemen Luar Negeri demikian 'menguasai' agama," ungkap Moerdiono. Sementara Jaksa Agung Ismail Saleh menimpali dengan mengatakan, "tampaknya ini satu keahlian terpendam." Munawir menduga, peristiwa ini selanjutnya dilaporkan ke atas. Selain itu, kejadian lain yang juga penting untuk dicatat adalah makalah yang ditulis Munawir atas permintaan Sekretaris Kabinet Moerdiono untuk menanggapi sebuah pidato muballig Islam di Masjid Agung al-Azhar, Jakarta, pada September 1982 yang menentang Pancasila sebagai asas tunggal. Makalah tanggapan diselesaikan Munawir dalam waktu tiga hari. Tulisan itu secara umum merupakan "ringkasan" tesis masternya 24 tahun lalu. Oleh Sekretaris Kabinet makalah tersebut selanjutnya dikirimkan ke "alamatnya".[30]

Dua kejadian ini, menurut Munawir, secara langsung berkaitan dengan pengangkatannya sebagai Menteri Agama. Hal ini berarti, Munawir sebagai intelektual yang dengan konsisten menolak konsep negara Islam tidak hanya menemukan momentum untuk me-

---

[30]"Dari Lembah Kemiskinan," hal. 76.

realisasikan prinsipnya, tetapi juga memiliki persesuaian yang prinsipil dengan keputusan yang sedang disosialisasikan pemerintah Orde Baru. Ia mengatakan:

> ... sejak tahun 50-an, saya tertawan oleh semacam keinginan untuk mengetahui betulkah ada atau tidak ada sistem politik dalam Islam. Tetapi saya sendiri condong untuk sependapat dengan mereka yang berpendapat bahwa tidak ada sistem politik dalam Islam. Yang ada hanya tata nilai politik. Dan ini menjadi pendapat saya. Dengan pandangan seperti itu, saya sebagai seorang birokrat yang sedang menjabat Dirjen Politik di Deplu diminta Presiden untuk menjadi Menteri Agama pada 1983. Nampaknya, sikap saya yang demikian itu diketahui Mandataris... Dengan demikian, maka saya tidak banyak menghadapi kesulitan dengan Mandataris. Artinya ada semacam persamaan pandangan.[31]

Meskipun dikenal sebagai birokrat, Munawir sebenarnya memiliki pertalian erat dengan tokoh-tokoh organisasi-organisasi Islam. Sebagaimana telah disebutkan, di masa lalu ia tidak hanya dikenal aktivis GPII, tetapi juga aktivis Hizbullah dan Sabilillah. Tetapi harus segera ditegaskan bahwa Munawir tidak pernah tercatat sebagai anggota organisasi-organisasi politik dan kemasyarakatan Islam, baik PPP, NU maupun Muhammadiyah. Latar belakangnya yang santri dan pengetahuannya yang cukup luas atas kitab-kitab klasik Islam serta pengalamannya yang panjang dalam birokrasi menjadikan Munawir sebagai tokoh yang dipandang tepat memangku jabatan Menteri Agama periode ini; periode di mana pemerintah sedang memperkuat landasan Pancasila sebagai ideologi negara, dan organisasi sosial-politik dan kemasyarakatan.

Selama menjabat Menteri Agama, tidak sedikit hal-hal yang telah dilakukan Munawir. Setidak-tidaknya ada tiga agenda yang menonjol, dan berkaitan erat dengan persoalan umat Islam Indonesia. Pertama, adalah tugas untuk menuntaskan Pancasila sebagai asas organisasi sosial-kemasyarakatan. Kedua, pembenahan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Ketiga, penguatan keberadaan Pengadilan Agama dan kompilasi hukum Islam.

Keputusan pemerintah untuk menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal telah membawa sejumlah implikasi positif terhadap kehi-

---

[31]Ini diakui dalam wawancara dengan Munawir Sjadzali, Jakarta 6 September 1991

dupan keagamaan di negeri ini. Di antaranya adalah kesediaan negara untuk lebih mengakomodasi aspirasi umat Islam. Peraturan-peraturan agama tidak hanya diakui, tetapi juga dijalankan. Lembaga Pengadilan Agama juga diakui sejajar dengan lembaga-lembaga pengadilan lain. Di samping itu, kehidupan keagamaan di kalangan masyarakat juga semakin semarak. Kajian-kajian keagamaan muncul di kantor-kantor dan hotel-hotel berbintang. Terdapat antusiasme yang besar di kalangan masyarakat untuk mengkaji Islam. Karena dipandang berhasil menjalankan tugas-tugasnya, Munawir kembali dipercaya oleh Mandataris MPR untuk menjabat Menteri Agama dalam Kabinet Pembangunan V.

Asas Tunggal Pancasila

Tugas pokok pertama Munawir sebagai Menteri Agama adalah mensosialisasikan dan menuntaskan Ketetapan MPR-RI No. II Tahun 1983 tentang Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi seluruh organisasi kemasyarakatan yang berhaluan keagamaan, termasuk Islam.[32] Tugas ini jelas tidak ringan. Bukan saja karena masalah ini, seperti telah disebutkan, telah menimbulkan kontroversi di kalangan agamawan, tetapi reaksi yang muncul di kalangan umat Islam—terutama dari kelompok Islam ideologis—juga demikian keras. Lebih dari itu, organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam yang besar seperti NU dan Muhammadiyah juga tidak bersedia menerima begitu saja kebijakan ini. Berhadapan dengan kondisi ini Munawir mengajak tokoh-tokoh dari agama-agama yang ada di Indonesia untuk mencari jalan bagaimana menerapkan Ketetapan MPR itu tanpa mengurangi keutuhan akidah dan iman.

Dalam meyelesaikan tugas berat ini, Munawir bertitik tolak pada prinsip bahwa pemerintah tidak ada maksud sama sekali untuk menggantikan agama dengan Pancasila atau mengagamakan Pancasila.[33] Motif pemerintah adalah agar masalah asas negara ini sudah dapat diselesaikan secara tuntas sebelum republik ini "diserahteri-

---

[32]Tentang Tugas pokok ini diakui Munawir dalam "Dari Lembah Kemiskinan," hal. 78.

[33]Wawancara Munawir Sjadzali, Jakarta 6 September 1991. Prinsip tersebut dikemukakan Presiden dalam Pidato 16 Agustus 1986.

makan" kepada generasi pasca-45. Dikhawatirkan jika masalah mendasar ini tidak diselesaikan, maka bukan tidak mungkin akan muncul krisis-krisis nasional seperti yang terjadi di masa lalu. Jika ini terjadi, maka usaha mengembalikan kesatuan bangsa ini merupakan pekerjaan yang sulit, lebih sulit dibandingkan dengan sebelumnya. Langkah pertama Munawir adalah memanfaatkan forum Wadah Musyawarah Umat Beragama yang merepresentasikan majelis-majelis agama seperti MUI , DGI, MAWI, Parisada Hindhu Dharma dan Walubi.

Pada Desember 1983, Munawir dalam kapasitasnya sebagai Menteri Agama meminta forum tersebut untuk menyelenggarakan pertemuan. Pokok-pokok pikiran dalam pertemuan ini selanjutnya dikirimkan kepada pemerintah—dalam hal ini Depertemen Dalam Negeri—sebagai masukan penyusunan RUU Keormasan. Meskipun demikian, bukan berarti masalah Pancasila sebagai asas tunggal ini telah selesai. Sebagian besar organisasi kemasyarakatan masih mengajukan keberatan-keberatan. Dari pihak MAWI dan DGI keberatan karena mereka merasa bukan organisasi massa, juga merupakan bagian dari organisasi yang bertaraf internasional. Meskipun pada 1986 mereka bersedia menerima Pancasila, proses yang dilewati cukup rumit.[34] Padahal Presiden telah menyatakan akan menjamin bahwa "Pancasila tidak akan menggantikan agama; adalah mustahil Pancasila menggantikan agama. Pancasila juga tidak disejajarkan dengan agama, dan adalah mustahil menyejajarkan Pancasila dengan agama."[35]

Selain menggunakan forum Wadah Musyawarah Umat Beragama untuk menyamakan persepsi di kalangan agamawan tentang penerapan Pancasila sebagai asas organisasi, Munawir juga menugaskan jajaran staf ahli Menteri Agama untuk berdialog dengan para pemimpin ormas Islam. Dialog ini dimaksudkan untuk menjaring pendapat dan aspirasi mereka berkaitan dengan keputusan politik pemerintah tersebut. Sehubungan dengan ini Dr. Anwar Haryono, salah seorang tokoh Masjumi di masa lalu dan eksponen Dewan

---

[34]Setelah menerima Pancasila sebagai asas organisasi, DGI kemudian berganti nama menjadi PGI (Persekutuan Gereja-gereja Indonesia).

[35]Lihat *Panji Masyarakat*, No. 407, 11 Juni 1985.

Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) berkomentar, "sungguh *surprise* bahwa pemerintah sekarang memperlihatkan sikap akomodatif terhadap aspirasi umat; ini jelas berbeda dengan masa Demokrasi Terpimpin dahulu."[36]

Dalam pandangan Munawir pribadi, keputusan menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal ini bukan hanya tepat, tetapi juga penting untuk menjamin integrasi nasional di masa depan. Sebaliknya, tuntutan sebagian kelompok Islam untuk menjadikan Islam sebagai ideologi negara atau bahkan mendirikan negara Islam dalam konteks Indonesia adalah tidak tepat. Ide tersebut secara konseptual tidak ditemukan rujukannya dalam al-Qur'an dan hadits yang merupakan sumber-sumber pokok Islam. Tidak ada kewajiban bagi kaum Muslim untuk menjadikan Islam sebagai ideologi negara, apalagi kewajiban mendirikan negara Islam. Al-Quran dan hadits hanya memberikan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan dan pengaturan negara, seperti prinsip musyawarah (*syura*), keadilan (*al-adl*), dan persamaan (*al-musawah*).[37] Apalagi pemerintah sendiri tidak ada maksud untuk menggantikan agama dengan Pancasila atau pun mengagamakan Pancasila. "Jika masih ada kelompok-kelompok yang menentang Pancasila sebagai asas tunggal, penolakan ini hanya didasarkan pada *a priori* saja."[38] Sebagai Menteri Agama, Munawir juga mengajak umat Islam untuk menerima negara Indonesia berdasarkan Pancasila "sebagai sasaran terakhir aspirasi politik, bukan sasaran sementara untuk mencapai sasaran-sasaran lainnya."[39]

---

[36]Lihat Hasbullah Mursyid, "Menelusuri Faktor Sosial yang Mungkin Berpengaruh," dalam *Kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 tahun Munawir Sjadzali,* hal. 202

[37]Lihat Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), Cet. Ke-5; juga wawancara Munawir Sjadzali, Jakarta 6 September 1991.

[38]*Suara Karya,* 21 Maret 1984

[39]Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran,* hal. 236; Secara eksplisit Munawir mengungkapkan konsep ini pada acara Dies Natalis HMI ke-43 dalam makalah "Wawasan Perjuangan Muslim Indonesia," Yogyakarta, 4 Pebruari 1990; Konsep ini sebenarnya berasal dari NU. Dalam Muktamar ke-27, organisasi ini mendeklarasikan bahwa Negera Indonesia merupakan tujuan final masyarakat Islam Indonesia. Lihat "Pimpinan PBNU bertemu Presiden: Negara RI adalah Bentuk Final," *Kompas,* 15 Pebruari 1985

Meskipun Munawir telah mengadakan dialog dengan para tokoh agama, reaksi keras dari pemimpin dan aktivis Islam tetap tak terhindarkan. Deliar Noer, salah seorang tokoh intelektual Islam yang cukup berpengaruh, mengatakan bahwa pandangan-pandangan Munawir tidak merefleksikan intelektualitasnya, tetapi lebih merefleksikan dirinya sebagai politisi yang berperan sebagai juru bicara pemerintah Orde Baru. Deliar mengakui bahwa di bawah Orde Baru kehidupan keagamaan mengalami perkembangan menggembirakan. Akan tetapi, harus juga dicatat bahwa pembangunan yang dicanangkan dibarengi dengan semakin besarnya kesenjangan antara "yang kaya" dan "yang miskin", Kristenisasi, sekularisme, konsumerisme, kejahatan dan prostitusi.[40] Penolakan Deliar terhadap Pancasila sebagai asas tunggal didasarkan pada dua alasan pokok. Pertama, Pancasila sebagai asas tunggal selain bertendensi pada terbentuknya partai tunggal, juga akan menghalangi kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya—yang merupakan ciri utama masyarakat yang demokratis. Kedua, adalah keliru melihat konflik yang terjadi pada masa kampenye merupakan akibat perbedaan ideologis di kalangan partai-partai peserta Pemilu. Deliar menunjuk Pemilu 1955 yang berlangsung tanpa konflik sebagai bukti. Padahal partai-partai peserta Pemilu waktu itu mendasarkan diri pada ideologi yang berbeda-beda.[41]

Di tangan kelompok-kelompok lain, kritisisme dari para pemimpin dan aktivis Islam ini selanjutnya berkembang menjadi penolakan total. Menurut penjelasan resmi pemerintah, penolakan ini memuncak pada peristiwa kekerasan antara sekelompok umat Islam dan aparat pemerintah di Jakarta pada 1984, yang populer dengan "Peristiwa Tanjung Priok." Peristiwa yang menimbulkan jatuhnya korban jiwa ini dalam pandangan pemerintah, akibat sikap militan sebagian kaum Muslim dalam menyikapi Pancasila sebagai asas tunggal. Para pemimpin kelompok militan bahkan menyatakan siap menjadi martir dalam mempertahan "dasar Islam." Selanjutnya, peristiwa kekerasan ini diikuti peledakan BCA (Bank Central Asia) di Jakarta, Candi Borobudur di Jawa Tengah, dan Kom-

---

[40]Deliar Noer, *Islam dan Pemikiran Politik: Bahasan Kitab 'Islam dan Tata Negara' oleh H. Munawir Sjadzali, MA* (Jakarta: LIPPM, 1990), hal. 20-21

[41]Lihat Deliar Noer, *Islam, Pancasila, dan Asas Tunggal* (Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1984)

pleks Marinir Cilandak.[42]

Rentetan peristiwa ini oleh Munawir dipandang sebagai bentuk ekstrim penolakan aktivis dan pemikir Islam lama terhadap keputusan menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Sementara ormas-ormas Islam yang besar dan berpengaruh, seperti NU dan Muhammadiyah, tidak menunjukkan sikap mereka. Sebaliknya, ormas-ormas ini malah aktif mencari informasi yang akurat dari pemerintah tentang maksud di balik keputusan menjadikan Pancasila sebagai asas organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan. Akhirnya, seluruh ormas Islam bersedia menerima Pancasila sebagai asas organisasinya.

Ormas Islam pertama yang menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah NU. Penerimaan ini terjadi dalam Musyawarah Alim Ulama NU yang berlangsung Desember 1983. Setelah melalui perdebatan keras dan adu argumentasi, NU menerima Pancasila sebagai asas organisasi dengan pengertian tetap utuhnya akidah Islamiyah *Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah*.[43] Keputusan-keputusan ini akhirnya dikukuhkan dalam Muktamar NU di Situbondo pada Desember 1984.[44] Sedangkan Muhammadiyah, meskipun tidak secepat NU dalam menerima Pancasila sebagai asas organisasinya, sejak semula tidak *a priori* terhadap keputusan pemerintah tersebut. Muhammadiyah terlebih dahulu ingin mencari kejelasan di mana tempat Islam setelah menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam organisasi. Upaya Muhammadiyah ini dilakukan melalui segala tingkat; mulai dari pertemuan AR. Fakhrudin dengan Presiden Soeharto, pendekatan dengan menteri-menteri bersangkutan, khususnya Mendagri dan Menag, sampai pertemuan dengan pimpinan DPR dan fraksi-fraksi. Dengan proses demikian, tidak heran jika penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi Muhammadiyah pada Muktamar ke-41 di Solo berlangsung lancar—tanpa perdebatan.[45]

---

[42]Faisal Ismail, "Pancasila as a Sole Basis", hal. 57-59.

[43]Pada saat ini NU terpecah menjadi "kelompok Sitobondo" dan "kelompok Cipete." Sehari sebelumnya "Kelompok Cipete" sudah menerima Pancasila sebagai asas organisasi NU. Lihat Einar Martahan Sitompul, *NU dan Pancasila* (Jakarta: Sinar Harapan, 1989).

[44]Lihat Einar Martahan Sitompul, *NU dan Pancasila*.

[45]Mengenai proses penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal organisasi Muhammdiyah lihat Lukman Harun, *Muhammadiyah dan Asas Pancasila* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986); juga Faisal Ismail, "Pancasila as a Sole Basis."

Di belakang NU dan Muhammadiyah segera menyusul HMI, MUI dan hampir seluruh organisasi-organisasi masyarakat Islam seperti Perti, SI, Persis, PMII, dan sebagainya. Di antara ormas-ormas Islam tersebut, hanya PII yang tidak bersedia menerima Pancasila sebagai asas tunggal sampai batas waktu yang diberikan pemerintah (Mendagri) habis. Akibat penolakan para pemimpin PII, umat Islam Indonesia, khususnya kalangan modernis, kehilangan salah satu aset yang sangat berharga. PII merupakan organisasi pemuda Islam tingkat sekolah menengah yang selama ini tekun melakukan kegiatan pengkaderan. Kader-kader PII tidak hanya terlatih dalam organisasi, tetapi juga merupakan calon pemimpin masa depan yang tangguh.

Sehubungan dengan peristiwa ini, Munawir menyimpulkan bahwa pemerintah Orde Baru ternyata sangat memperhatikan pendapat masyarakat. Hal ini tampak dalam perbedaan antara RUU Keormasan dan UU No. 8 Th. 1985 di mana banyak sekali penyempurnaan-penyempurnaan mendasar. Munawir menyebut pola yang dipakai oleh NU sebagai contoh. Menurut ketentuan, agar tidak terjadi asas ganda maka tidak dibenarkan menggunakan kata-kata dasar, alas, dan sendi. Tidak dibenarkan menggunakan rumusan bahwa organisasi bersangkutan berasaskan Pancasila dan bersendikan Islam. Menghadapi masalah ini, NU mengusulkan rumusan "berasaskan Pancasila dan beraqidah Islam." Rumusan tersebut diterima pemerintah dan selanjutnya menjadi pola bagi organisasi-organisasi lain. Selain itu, ia juga mendapat pengetahuan bahwa ternyata demokrasi Pancasila mampu menyalurkan aspirasi rakyat. Dengan kesimpulan demikian, tidak heran jika Munawir mempertanyakan kelompok atau individu yang tidak bersedia menerima Pancasila sebagai asas tunggal dengan pertanyaan: "Jika masih ada kelompok-kelompok Islam yang masih menolak Pancasila sebagai asas tunggal, mereka mewakili siapa?"[46]

Keberhasilan Munawir menuntaskan masalah Pancasila sebagai asas tunggal bagi ormas-ormas berhaluan keagamaan selanjutnya menjadi "batu loncatan" bagi suksesnya program-program Munawir yang lebih belakangan. Di antaranya yang menonjol adalah pem-

[46]Dikutip dalam Faisal Ismail, "Pancasila as a Sole Basis," hal. 39

benahan IAIN dan lembaga-lembaga pendidikan Islam di bawahnya; restrukturisasi Peradilan Agama dan Kodifikasi Hukum Islam; dan reaktualisasi Islam. Harus diakui bahwa kesediaan ormas-ormas Islam untuk menerima Pancasila sebagai asas tunggal telah mengubah pandangan pemerintah tentang umat Islam yang selama ini dicitrakan sebagai "ekstrim kanan." Hubungan antara negara dan umat Islam digambarkan oleh pengamat sebagai "bulan madu" di mana pada masa ini kepentingan-kepentingan umat Islam diakomodasi oleh pemerintah. Memandang ke belakang, Munawir mengatakan bahwa kepentingan-kepentingan kaum Muslim justru terpenuhi dengan absennya partai-partai Islam.[47]

"Penyempurnaan" SKB Tiga Menteri 1975

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) merupakan lembaga pendidikan tinggi Islam di Indonesia yang memiliki posisi strategis. Bukan hanya karena jumlahnya banyak (14 buah) dan tersebar di berbagai provinsi, tetapi juga merupakan lembaga pendidikan yang secara khusus mengkaji dan mengembangkan ilmu-ilmu keislaman. Dalam kaitan ini IAIN tidak hanya muncul sebagai jalur formal mobilitas sosial kaum santri, lebih dari itu telah melahirkan sarjana-sarjana Muslim yang berpengetahuan luas dan sanggup berkomunikasi dengan unsur-unsur modernitas. Namun, posisi strategis IAIN ini tidak diimbangi dengan landasan hukum yang kuat padahal sebagai lembaga pendidikan tinggi negeri IAIN tergolong tua. Kondisi demikian selanjutnya berimplikasi pada kecilnya anggaran yang diterima IAIN, khususnya jika dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri lainnya—yang bernaung di bawah Depdikbud. Kecilnya anggaran ini menyebabkan perkembangan IAIN tersendat-sendat. Bahkan di mata Munawir struktur dan organisasinya pun masih tampak rancu.

Menghadapi situasi ini Munawir segera melakukan pembenahan terhadap IAIN. Pembenahan pertama dilakukan dari segi dasar hukum, dan kedua dari segi sumber daya manusia. Dari segi dasar hukum, Munawir menjalin kerjasama dengan Depdikbud dan

---

[47]Lihat Munawir Sjadzali, *Muslims' Interest are Better Served in the Absesnce of Muslim Parties* (Jakarta: Departemen Agama, 1992), hal. 9-10

Kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Baik Mendikbud, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto maupun Menpan Prof. Dr. Saleh Afif menyambut baik prakarsa ini. Mereka bahkan sangat antusias membantu usaha Departemen Agama untuk menata IAIN. Jika IAIN dapat memenuhi syarat-syarat minimal sebuah perguruan tinggi yang ditetapkan Depdikbud, IAIN akan diberlakukan sebagai perguruan tinggi yang sama statusnya dengan perguruan tinggi di bawah Depdikbud.

Rancangan PP tentang IAIN akhirnya tersusun. Pada Mei 1985, bersama Prof. Dr. Nugroho Notosusanto dan Prof. Dr. Saleh Afif, Munawir menghadap Presiden Soeharto di Bina Graha. Rancangan PP tentang dasar hukum IAIN tersebut akhirnya ditetapkan menjadi PP No. 33 Tahun 1985. Dengan PP ini status, perlakuan, dan fasilitas 14 IAIN yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia sederajat dengan perguruan tinggi negeri yang dikelola Depdikbud. Peraturan Pemerintah itu selanjutnya dijabarkan dalam Keppres No. 9 Tahun 1987 yang kemudian menjadi bagian dari UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UUSPN tersebut pendidikan agama diletakkan sebagai sub-sistem pendidikan nasional

Setelah berhasil membenahi segi dasar hukum IAIN, langkah Munawir selanjutnya adalah melakukan pembenahan segi sumber daya manusia. Pertama kali yang mendapat perhatian Munawir adalah sistem pendidikan madrasah. Selama ini madrasah masih dianggap sebagai lembaga pendidikan kelas dua dibandingkan dengan sekolah umum. Fasilitas yang minimal, lokasi yang kebanyakan di pedesaan, dan kurikulum yang tidak seimbang antara pendidikan agama dan umum menyebabkan lembaga ini tidak banyak menghasilkan bibit unggul bagi IAIN. Dengan kondisi ini, langkah pertama yang dilakukan Munawir adalah meninjau kembali SKB Tiga Menteri Tahun 1975, yang dikeluarkan pada masa Prof. Dr. Mukti Ali* menjabat Menteri Agama. SKB Tiga Menteri antara lain metetapkan bahwa madrasah harus bermuatan 70% pengetahuan umum dan 30% pengetahuan agama dengan harapan agar madrasah sederajat dengan perguruan umum, terutama dari segi kurikulum. Maksudnya memang baik, tetapi akibat yang tampaknya kurang diperhitungkan adalah tamatan Aliyah menjadi lebih siap

*Lihat bab tentang Mukti Ali.

masuk ke perguruan tinggi umum daripada perguruan tinggi agama. Mereka jelas bukan merupakan bibit unggul untuk IAIN. Penguasaan ilmu agama tamatan Aliyah bukan hanya sangat lemah, lebih dari itu bahkan tidak dapat diandalkan untuk menjadi calon-calon ulama. Padahal para ilmuwan Muslim Indonesia yang mampu berkomunikasi dengan kosa kata moderen adalah mereka yang di samping mendapat pendidikan S1 di Timur, juga mengenyam pendidikan S2 dan S3 di Barat. Munawir menunjuk nama-nama seperti Prof. Dr. HM. Rasjidi, Prof. Dr. Mukti Ali, dan Prof. Dr. Harun Nasution sebagai *prototype* ilmuwan Muslim Indonesia. Mereka tidak hanya sanggup menancapkan pengaruh di lingkungan kaum terpelajar, tetapi juga di lingkungan masyarakat luas.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Munawir merasa perlu untuk "menyempurnakan" SKB Tiga Menteri. Bentuk "penyempurnaan" itu adalah mengadakan *"pilot project"* Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) dengan muatan kurikulum 70% pengetahuan agama dan 30% pengetahuan umum. Dengan struktur kurikulum demikian, konsekuensinya tamatan MAPK tidak dapat masuk ke perguruan tinggi umum, tetapi mereka adalah bibit-bibit unggul bagi IAIN. Dengan proyek ini, harapan untuk mengembangkan ilmu-ilmu keislaman yang sejalan dengan tantangan modernitas melalui IAIN akan dengan cepat terwujud. Usulan "penyempurnaan" SKB Tiga Menteri ini tidak hanya disetujui, tetapi lebih dari itu Presiden Soeharto bahkan memberikan saran agar proyek serupa juga diterapkan untuk tingkat Tsanawiyah. Pada 1988 proyek MAPK dimulai dan untuk tahap pertama dibuka di lima lokasi; Padang Panjang, Ciamis, DI Yogyakarta, Ujung Pandang, dan Jember. Selanjutnya, MAPK ditambah di lima kota lagi, yaitu di Banda Aceh, Lampung, Solo, Banjarmasin, dan Mataram.[48]

Bersamaan dengan proyek ini, Munawir juga berusaha meningkatkan mutu staf pengajar IAIN. Hal ini dilakukan dengan menghidupkan kembali tradisi mengirim dosen IAIN untuk studi di negara-negara Barat—khususnya ke Universitas McGill, Monteral Kanada dan Universitas Leiden, Belanda—yang dulu dirintis Mukti Ali. Menurut pengakuan Munawir, pengiriman dosen ke luar negeri ini

---

[48]Lihat *Memori Akhir Tugas Menteri Agama Republik Indonesia H. Munawir Sjadzali Masa Bakti 1988-1993 Kabinet Pembangunan V*, Jakarta, 1993

merupakan proyek kesayangan sehingga tidak hanya memperoleh perhatian serius, tetapi juga diikuti dengan menjalin lobi ke sejumlah negara dan universitas yang dipandang *qualified* dalam *Islamic Studies*. Pengalaman panjang Munawir sebagai diplomat sangat membantu suksesnya lobi-lobi tersebut.

Untuk memenuhi persyaratan yang diminta lembaga-lembaga pemberi beasiswa dan universitas-universitas Barat sekaligus menjaring tamatan IAIN yang berkualitas pada 1988 dibuka Program Pembibitan Calon Dosen IAIN. Selain sangat terbatas, hanya diikuti oleh tak lebih dari 30 peserta, program ini juga hanya menerima mereka yang indeks prestasi kumulatifnya di atas tiga. Di samping itu para peserta juga harus memiliki dasar-dasar penguasaan bahasa yang memadai, baik Inggris maupun Arab. Periode 1988-1991 program ini mengalami sukses. Tak kurang dari 75% pesertanya diterima untuk program S2 dan S3 di universitas-universitas Barat, seperti McGill di Kanada; UCLA, Columbia, Chicago, dan Harvard di USA; London, Leiden, dan Hamburg di Eropa Barat; dan ANU, Monash, dan Flinders di Australia.[49]

Proyek pengiriman dosen IAIN ke universitas-universitas Barat dapat dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan konsep Munawir tentang hubungan antara Islam dan negara. Munawir menginginkan agar para dosen IAIN mampu berkomunikasi dengan para teknokrat dan birokrat yang rata-rata tamatan universitas-universitas Barat. Kelompok pertama mewakili kalangan agama, sedangkan yang kedua merepresentasikan unsur-unsur modernitas. Dengan kemampuan komunikasi itu, maka tidak akan terjadi lagi kesenjangan antara Islam dan negara di Indonesia.

Undang-undang Peradilan Agama

Peradilan agama di Indonesia sudah ada sejak sebelum penjajahan Belanda, yakni dalam kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak, Banten, dan Sumatera. Namun, sejak masa penjajahan Belanda sampai dekade 70-an, peradilan agama masih menjadi peradilan "pupuk bawang." Hal ini dibuktikan sejumlah indikasi berikut. Pertama, sejak 1882 Pengadilan Agama di Jawa dan Madura tidak diberi ke-

[49]Lihat "Intellectual Engineering in IAIN," *Studia Islamika*, Volume 2, Number 1, 1995

wenangan untuk ikut campur dalam pembagian warisan umat Islam. Pada 1937, "pengebirian" ini selanjutnya diperluas ke wilayah Kalimantan Selatan dan Timur. Kedua, keputusan Pengadilan Agama perlu dikukuhkan Peradilan Umum, bahkan pelaksanaan eksekusinya pun dilaksanakan Peradilan Umum. Ketiga, hakim-hakim agama cukup diangkat dan diberhentikan Menteri Agama, berbeda dengan hakim-hakim di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang pengangkatan dan pemberhentiannya melalui keputusan Presiden. Dengan demikian, hakim agama bukanlah hakim negara.[50]

Dalam rangka pembangunan hukum nasional, pada 1970 sebenarnya, telah diundangkan UU No. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan Kehakiman dalam Negara Republik Indonesia. Dalam UU ini antara lain dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di negara RI dilaksanakan oleh badan-badan pengadilan dalam empat lingkungan peradilan: Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara. Semuanya berpuncak pada Mahkamah Agung. UU ini dengan eksplisit menegaskan bahwa Pengadilan Agama merupakan sub-sistem dari sistem Peradilan Nasional. Berdasarkan kondisi objektif ini, Munawir melakukan restrukturisasi Peradilan Agama agar mempunyai posisi sejajar dengan badan-badan pengadilan lain.

Berkaitan dengan itu, Departemen Agama mengajukan RUU tentang Peradilan Agama. RUU itu merupakan hasil pembahasan para ahli hukum, baik dari universitas umum maupun agama. Namun, pengajuan dan pembahasan RUU tersebut tidak berjalan mulus. Reaksi keras, baik yang mendukung maupun menentang, datang dari berbagai kalangan. Dukungan keras ini muncul dari kalangan Islam, sedangkan reaksi yang menentang muncul terutama dari kalangan Kristen dan Katolik. Melalui majalah *Hidup* yang dipandang menyuarakan aspirasi kalangan Katolik, Munawir bahkan dituduh mempunyai hubungan dan "komitmen rahasia" dengan kelompok-kelompok ekstrem kanan, yaitu DI/TII. Kelompok ini menuduh bahwa RUU Peradilan Agama ini selain didasari semangat menghidupkan kembali "Piagam Jakarta," juga mendis-

---

[50]Istilah "Pupuk Bawang" dan tiga cacat pokok ini diungkap dalam wawancara dengan Munawir Sjadzali, Jakarta 6 September 1991; lihat juga, "Dari Lembah Kemiskinan," hal. 89

kriminasikan kelompok-kelompok non-Islam.

Di samping itu, PGI sebagai organisasi resmi kelompok Kristen juga mengeluarkan statemen yang tidak kalah kerasnya. Mereka menolak RUU dengan argumentasi bahwa; *pertama,* sesuai dengan konsep "Wawasan Nusantara" maka semestinya hanya ada satu sistem hukum nasional untuk menyelesaikan masalah-masalah masyarakat. *Kedua,* RUU ini bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Meskipun mendapat reaksi keras dan cenderung menjurus kepada konflik, Munawir tetap tenang menghadapi situasi. Ia menceritakan,

> ... tanggapan-tanggapan yang ngawur itu telah menimbulkan kemarahan banyak pemuda Islam. Tokoh-tokoh mereka berbondong-bondong datang ke rumah kediaman saya, untuk menawarkan bantuan dan minta diberi perintah harus berbuat apa... menyadari gawatnya situasi ... saya menyatakan bahwa kalau mereka betul membantu saya, saya meminta mereka jangan berbuat apa-apa ... kalau mereka tidak mampu menguasai massa ... kalaupun RUU ini berhasil menjadi undang-undang, orang dapat mengatakan bahwa RUU menjadi undang-undang karena ada tekanan politik. Berarti hasilnya *benjol* dan tidak bulat.[51]

Reaksi-reaksi keras ini baru mulai reda setelah Presiden menegaskan bahwa RUU tersebut dimaksudkan untuk melindungi kaum Muslim Indonesia dalam aspek-aspek yang berkaitan dengan *ibadah* sebagaimana dijamin oleh Pasal 29 UUD 1945.[52] Munawir sendiri berkeyakinan bahwa kaum Muslim membutuhkan pengadilan sendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum di antara mereka. Lebih dari itu, dalam pandangan Munawir, RUU tersebut tidak akan mengganggu kepentingan penganut agama lain karena hanya berlaku bagi umat Islam, itu pun masih terbuka peluang untuk memilih. Oleh karena itu, Munawir minta pengertian kelompok agama lain agar bersedia menerima RUU tersebut.

Dalam teori, umat Islam memang berhak memilih: menyelesaikan masalahnya di pengadilan agama atau umum. Namun, dalam

---

[51]"Dari Lembah Kemiskinan," hal. 101-2; Wawancara Munawir Sjadzali, Jakarta 6 September 1991

[52]Lihat Sirajuddin Syamsuddin, Religion and Politics in Indonesia: The Case of the Muhammadiyah in Indonesia's New Order, (Ph.D Dissertation, UCLA, 1991), hal. 259

praktik hampir 99% umat Islam menyelesaikan masalahnya di pengadilan agama. Oleh karena itu pula, UU PA tidak bisa dipandang sebagai menghidupkan kembali "Piagam Jakarta." Sebab, dalam "Piagam Jakarta" ada unsur pemaksaaan. Jika memang UUPA disemangati "Piagam Jakarta," maka seluruh umat Islam diwajibkan menyelesaikan masalahnya di Pengadilan Agama. Akan tetapi yang terjadi dalam kenyataan, umat Islam Indonesia tetap diberi kebebasan untuk memilih antara lembaga Peradilan Umum dan Peradilan Agama dalam menyelesaikan masalah-masalahnya.

Situasi di DPR sendiri tetap tenang. Fraksi ABRI sejak awal bahkan mendukung RUU PA dengan aktif berkampanye. Demikian juga halnya dengan Fraksi PPP. Mereka bahkan secara khusus bertemu dengan Munawir dan menyatakan dukungannya. Golkar juga memberikan dukungan meskipun pada mulanya bersikap dingin karena adanya sekelompok kecil dalam fraksi yang berusaha menggagalkan RUU PA dengan menyiapkan makalah yang bernada menentang dengan harapan menjadi sikap resmi Golkar. Seorang tokoh remaja masjid binaan Golkar bahkan melontarkan tuduhan bahwa RUU PA ini merupakan hasil kerja "Gerombolan Munawir." Fraksi PDI yang pada mulanya alot, akhirnya juga memberikan dukungan. Atas usaha keras pemerintah (Departemen Agama) dan dukungan fraksi-fraksi di DPR, pada 29 Desember 1989 RUU tersebut akhirnya disahkan sebagai UU, yaitu UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.[53]

Dengan disahkannya UU Peradilan Agama ini, maka semua pengadilan agama hanya tunduk pada satu peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 7 Tahun 1989. Pengebirian kekuasaan pengadilan agama berakhir sudah. Keputusan pengadilan agama dengan sendirinya bersifat final, tidak perlu dikukuhkan pengadilan umum. Pelaksanaan eksekusi pun dilakukan pengadilan agama sendiri. Oleh karena itu, di pengadilan agama diadakan jabatan juru sita. Hakim-hakim pengadilan agama, sebagai hakim negara, diangkat dan diberhentikan Presiden. Mereka juga memiliki kedudukan, hak, dan fasilitas yang setara dengan hakim-hakim dari lingkungan peradilan lain. Dengan demikian, secara teori mereka mempunyai kesempat-

---

[53]Lihat "dari Lembah Kemiskinan"; Juga *Memori Akhir Tugas.*

an untuk menduduki jabatan Ketua MA. Di samping itu, yang penting juga dicatat, jabatan hakim, panitera, dan juru sita pada pengadilan agama hanya diisi orang-orang yang beragama Islam.[54]

UUPA menjadi sangat signifikan jika diletakkan dalam konteks negara-negara Islam. Di sejumlah negara yang secara eksplisit menyatakan berdasarkan Islam dan menjadikan Islam sebagai agama negara, kedudukan Mahkamah Syariah tidak sekokoh dan seterhormat Peradilan Agama di Indonesia. Bahkan di antara negara-negara itu terdapat sementara negara yang hanya memiliki mahkamah syariah di negara bagian, sementara di pusat tidak ada, itu pun dengan wewenang yang sangat terbatas. Tidak heran jika para tokoh agama dari negara itu sering mengeluh bahwa mahkamah Syariah itu tidak dirasakan kehadirannya.[55]

Kompilasi Hukum Islam

Hampir bersamaan dengan pengajuan RUU Peradilan Agama, Munawir juga mengadakan proyek kompilasi hukum Islam. Proyek ini dipandang penting karena selama ini belum ada buku standar yang dapat dijadikan sebagai rujukan para hakim agama dalam memutuskan satu perkara. Selama ini para hakim agama merujuk kepada sejumlah kitab fikih yang bukan hanya berbeda, tetapi juga merupakan produk para ahli hukum pada abad pertengahan Islam. Kondisi ini selanjutnya berakibat pada perbedaan keputusan para hakim agama dalam satu masalah yang sama. Kondisi demikian, jelas tidak mencerminkan semangat keadilan yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Pada 1985 Presiden Soeharto sendiri memprakarsai pembentukan proyek kompilasi hukum Islam yang diketuai Prof. Dr. Bustanul Arifin, SH. Proyek ini melibatkan para ahli bidang hukum, baik dari universitas umum, agama maupun dari kalangan ahli dan praktisi hukum—dari Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman. Pada akhir 1987, proyek ini berhasil menyusun tiga rancangan buku. Selanjutnya, pada 2-6 Pebruari 1988 diselenggara-

---

[54]"Dari Lembah Kemiskinan," hal. 89-99; juga *Islam dan Tata Negara,* hal. 200; wawancara dengan Munawir Sjadzali, Jakarta 6 September 1991.

[55]Wawancara dengan Munawir Sjadzali, Jakarta 6 September 1991.

kan lokakarya yang diikuti para ahli hukum umum, hukum agama, ulama, dan ormas-ormas Islam. Peserta lokakarya, dengan suara bulat menerima baik rancangan buku itu dengan perbaikan dan sejumlah penyempurnaan.

Dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 yang dikeluarkan pada 10 Juni 1991, Menteri Agama menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam agar digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukan. Kompilasi hukum Islam ini terdiri dari tiga buku: Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan. Menteri Agama sendiri mengeluarkan Keputusan No. 154 Tahun 1991 sebagai pelaksanaan Inpres tersebut. Keputusan Menag itu antara lain: *pertama*, berisi seruan kepada seluruh instansi di bawah Departemen Agama dan instansi lainnya yang terkait agar memasyarakatkan dan sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam di samping peraturan perundangan lainnya. *Kedua*, memerintahkan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji untuk mengkordinasikan pelaksanaan Keputusan Menteri Agama RI ini dalam bidang tugasnya masing-masing.[56]

Dengan selesainya UUPA dan Kodifikasi Hukum Islam, pengadilan agama menjadi lembaga yang secara formal kuat dan secara meterial memiliki buku rujuan yang standar. Dari segi formal dan kelembagaan, pengadilan agama tidak bisa dikatakan lagi sebagai lembaga "pupuk bawang." Di samping itu, karena memiliki buku rujukan yang standar, pengadilan agama berarti telah memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Reaktualisasi Ajaran Islam

Sebagaimana disebutkan, dalam percaturan intelektual Islam Indonesia, Munawir sebenarnya datang belakangan. Keterlibatan Munawir dalam wacana gerakan pembaruan Islam di Indoensia bahkan tidak bisa dipisahkan dari posisinya sebagai Menteri Agama. Meskipun demikian, bukan berarti ia sama sekali tidak mengikuti perkembangan Islam Indonesia, baik dari segi perjuangan poli-

[56]Lihat *Memori Akhir Tugas.*

tik maupun segi perkembangan pemikiran. Perhatiannya yang besar terhadap diskusi tentang hubungan antara Islam dan negara, bukan hanya merupakan indikasi yang sulit dibantah, tetapi juga menjadi semacam dorongan dalam dirinya untuk terlibat dalam kancah pemikiran Islam di Indonesia.

Munawir tidak hanya dikenal kritis terhadap para pemimpin dan aktivis Islam yang mengajukan aspirasi mendirikan negara Islam. Lebih dari itu, secara intensif ia melakukan studi, dengan bersumber pada kitab-kitab klasik Islam, tentang konsep politik Islam. Tak heran jika dua tahun setelah diangkat menjadi Menteri Agama, tepatnya akhir 1985, Munawir melontarkan gagasan perlunya reaktualisasi ajaran Islam. Dengan lontaran gagasan ini Munawir mau tidak mau kemudian terlibat aktif di dalam gerakan pembaruan Islam di Indonesia, bahkan dapat dikatakan salah satu eksponen gerakan pembaruan Islam di Indonesia; kontribusinya terhadap isi dan bentuk gerakan pembaruan Islam Indonesia, terutama dalam lingkungan intelektualisme Islam baru, jelas tidak dapat diabaikan.

Titik sentral pesan Munawir adalah mendorong komunitas Islam untuk melakukan *ijtihad* secara berani dan jujur. Hanya dengan cara inilah, menurutnya, Islam bisa lebih responsif terhadap keperluan-keperluan lokal dan temporal Indonesia. Masalah yang pertama kali disentuh adalah soal waris. Tentang persoalan ini al-Qur'an menggariskan bahwa anak laki-laki menerima dua kali lebih banyak dari anak perempuan. Menurut Munawir, dengan mempertimbangkan realitas keseharian—dalam situasi tertentu—prinsip semacam ini dapat berseberangan dengan makna keadilan. Menurutnya pula, situasi ini juga disadari banyak ulama, tetapi mereka belum bersedia menyentuh persoalan ini. Para ulama ini justru mengambil langkah-langkah tertentu dengan cara mengurangi jumlah yang diwariskan melalui *hibah*. Dengan demikian, jumlah harta yang diwariskan relatif menjadi tidak begitu besar.[57] Melihat kasus demikian, Munawir menilai para pemuka agama tidak jujur dalam beragama.

Sebenarnya, arti penting agenda reaktualisasi Munawir terletak di luar retorika masalah waris. Dengan mengamati konstruk

---

[57]Munawir Sjadzali, "Reaktualisasi Ajaran Islam," dalam Iqbal Abdurrauf Saimima (ed.), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), hal. 1-11.

gagasan-gagasan teologisnya secara lebih cermat, akan kelihatan bahwa perhatian utamanya terletak pada premis bahwa terdapat sejumlah stipulasi al-Qur'an—khususnya yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial, bukan ritual—yang tidak sesuai dengan kebutuhan masa kini, seperti hukum waris, perbudakan, dan sebagainya. Dalam soal ini, Munawir antara lain merujuk pada semangat pengalaman Khalifah Umar ibn Khattab. Menurut Munawir, karena perubahan situasi sosial, Umar pernah merumuskan suatu kebijakan yang tidak sesuai dengan stipulasi-stipulasi yang telah digariskan al-Qur'an dan tradisi Nabi. Di antara yang paling mencolok adalah kebijakan Umar tentang pembagian harta rampasan perang.

Pola ijtihad Umar yang berani dan jujur ini telah memberi inspirasi kepada Munawir untuk berpendapat bahwa hendaknya komunitas Muslim jujur dan berani dalam berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Percaya akan dinamika dan vitalitas syari'ah, ia menganjurkan kalangan Islam untuk melakukan reaktualisasi paham keagamaan. Dengan demikian, artikulasi keislaman kaum Muslim Indonesia akan lebih relevan dengan situasi lokal dan temporal Indonesia. Dibaca dari perspektif ini, sebenarnya kebijakan-kebijakan Munawir selaku Menteri Agama dalam bidang keagamaan dapat dilihat sebagai bagian dari rekatualisasi ajaran Islam yang ia cita-citakan.

Penutup

Sebagai Menteri Agama yang menduduki jabatannya dua periode berturut-turut (1983-1993) Munawir telah banyak mengeluarkan kebijakan berkenaan dengan kehidupan keagamaan dan lembaga-lembaga keagamaan. Namun, secara umum kebijakan-kebijakan itu berada di bawah semangat Munawir untuk merumuskan hubungan yang *viable* antara Islam dan negara. Rumusan yang diajukan Munawir memiliki afinitas dengan *mainstream* kebijakan negara yang ingin meneguhkan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi seluruh organisasi politik dan organisasi sosial kemasyarakatan, termasuk yang berhaluan agama. Konsep-konsep yang dibawa Munawir mendapat dukungan sepenuhnya dari negara. Tidak heran jika semasa Munawir menjabat Menteri Agama pemerintah Orde Baru mengakomodasi banyak kepentingan umat Islam.

Pemerintah Orde Baru tidak hanya mendorong kaum Muslim untuk menjalankan agama dengan mendirikan lembaga-lembaga

bantuan, tetapi juga melaksanakan perintah-perintah ritual agama dengan terang-terangan. Gairah kehidupan keagamaan tidak hanya mengalami kebangkitan, tetapi juga mendapatkan fasilitas untuk berkembang. Tercatat pada 1982 pemerintah mendirikan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, yang diketuai oleh Presiden sendiri.* Pendirian yayasan ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa kaum Muslim masih membutuhkan masjid untuk melaksanakan ajaran agamanya. Sampai Juli 1990, yayasan ini telah berhasil mendirikan tak kurang dari 400 buah masjid di berbagai daerah. Selanjutnya, dari dana yayasan ini MUI juga mengirimkan sejumlah juru dakwah ke seluruh penjuru tanah air guna memberikan bimbingan keagamaan bagi masyarakat.

Selain itu, pada 1990 berdiri Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) yang disusul dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI). Baik ICMI dan BMI merupakan wujud kesediaan pemerintah mengakomodasi kepentingan-kepentingan masyarakat Muslim Indonesia karena jauh sebelumnya ide-ide semacam ini tidak pernah mendapat restu dari pemerintah. Di samping itu, sebagai monumen "Musibah Mina" pemerintah mendirikan Rumah Sakit Haji di beberapa embarkasi yang disusul dengan pendirian Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI). Yang tak kurang pentingnya, Presiden menginstruksikan pembangunan Kantor Baru Departemen Agama ke Lapangan Banteng yang dulunya milik Komando Daerah Militer (Kodam) Jakarta. Lokasi ini menurut Munawir lebih strategis karena berdekatan dengan Masjid Istiqlal, masjid terbesar di Indonesia.

Pemikiran politik dan keagamaan Munawir, sebagaimana tercermin dalam karya-karya intelektualnya dan kebijakan-kebijakan yang diambilnya sebagai Menteri Agama—yang secara umum terekspresikan dalam agenda reaktualisasi ajaran Islam—memang telah menumbuhkan makna baru politik Islam di Indonesia. Munawir lebih menekankan pentingnya substansi daripada yang formal dan legal, baik secara keagamaan maupun sosial. Dengan konsepsi semacam ini, sejalan dengan mobilitas sosial ekonomi umat, aspirasi umat Islam tidak lagi didasarkan atas simbolisme ideologis yang formalistik dan legalistik.

---

*Lebih lanjut lihat bab tentang Alamsjah Ratu Perwiranegara.

H. Tarmizi Taher;

Globalisasi Kerukunan*

Usep Fathudin**

Tarmizi Taher dilantik sebagai Menteri Agama bersama para menteri Kabinet Pembangunan VI lainnya oleh Presiden Soeharto pada 19 Maret 1993. Tampilnya Tarmizi sebagai Menteri Agama yang ke-13 sebenarnya tidaklah terlalu mengejutkan, mengingat ia masuk Departemen Agama sudah sejak 30 Juni 1987, yaitu ketika ia ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal, dari jabatan sebelumnya, Kepala Pusat Pembinaan Mental ABRI. Jauh sebelum namanya diumumkan, para pengamat keagamaan sudah memperkirakan Tarmizi bakal menjadi orang nomor satu di Departemen Agama.

Beberapa bulan sebelum menjadi Menteri Agama, Tarmizi santer disebut bakal menjabat Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi. Menteri Agama saat itu, H Munawir Sjadzali, juga mendukung penuh jika Tarmizi jadi dubes. Tarmizi sendiri hanya senyum-senyum ketika dikonfirmasi soal bakal jadi dubes itu. "Saya ini tak pernah dan tak mau meminta-minta jabatan. Soal saya bakal menjabat apa nanti, hanya Allah yang tahu. Terpenting kita harus melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan niat ibadah, pengabdian untuk bangsa dan negara," kata Tarmizi kala itu. Tatkala Tarmizi memimpin doa, saat penutupan Sidang Umum MPR 1993, suara

---

*Catatan biografis: Untuk biografi, kebijakan sebagai Menteri Agama, dan pandangannya, lihat antara lain, Wakhidin, *Tarmizi Taher: Jembatan Umat, Ulama dan Umara* (Bandung: Ganesha, 1983); Tarmizi Taher: *Aspiring for The Middle Path: Religious Harmony in Indonesia* (Jakarta: CENSIS, 1997); Tarmizi Taher, *Masyarakat China: Ketahanan Nasional dan Integrasi Bangsa di Indonesia* (Jakarta: PPIM, 1997); *Himpunan Pidato Menteri Agama Dr. H. Tarmizi Taher* (Jakarta: Biro Hukum dan Humas, Depag RI (tt.).

**Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bambang SP (*Kompas*), Usman Yatim (*Suara Karya*), dan M. Sidik (*Pelita*) atas bantuannya dalam penulisan ini.

santer ia akan jadi dubes menghilang, berganti menjadi bakal Menag. Kenyataannya memang demikian, ia menggantikan H Munawir Sjadzali yang sudah dua kali menjabat.

Mengingat ia sebelumya sudah magang 6 tahun di Departemen Agama dan ditambah pengalamannya bertugas di ABRI, mantan aktivis kampus yang sejak kecil selalu dekat dengan agama ini yakin bahwa ia dapat memimpin lembaga pemerintah yang mengurus masalah keagamaan tersebut. Terlebih lagi Tarmizi punya penilaian bahwa dalam kehidupan ini selalu ada masalah. Hidup itu sendiri adalah masalah dan berarti kalau mau hidup maka harus berani menghadapi dan memecahkan masalah.

Awal menjabat Menteri Agama, cukup banyak tantangan dihadapi Tarmizi sehingga tidak sedikit orang atau kelompok yang menyorotnya, baik itu bernada positif maupun negatif. Misalnya saja dalam soal haji, Tarmizi dihadapkan kepada masalah meledaknya jumlah calon haji yang melampaui kuota. Sementara dalam pembinaan umat beragama, Tarmizi diberi pekerjaan rumah dengan masalah kerukunan umat beragama. Namun Tarmizi tidak grogi menghadapi semua tantangan yang dihadapi. *Inna ma'a al- usri yusra,* demikian sering dikatakan Tarmizi, ketika ia mendapat banyak kritikan dan kecaman. Maksud Tarmizi, dengan mengutip al-Qur'an, Surat Alam Nasyrah ayat 6 itu adalah "sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."

Tarmizi benar. Berbagai masalah penuh tantangan yang ia hadapi akhirnya dapat diselesaikan dengan hasil yang memuaskan. Kalau semula ia dikecam, dikritik, dan bahkan ada yang menyuruhnya mundur, maka kemudian yang datang adalah pujian di sana sini. Banyak orang semula tidak menduga atau bahkan ragu terhadap langkah-langkah kebijakan Tarmizi. Ternyata kemudian, sikap yang ia ambil itu memang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Begitu Tarmizi dipercaya menjadi Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan VI, dia berdialog dengan Menteri Sekretaris Negara Murdiono. Murdiono mengatakan, "Tarmizi, lima tahun itu sangat singkat. Kalau kita tidak membuat sasaran-sasaran yang jelas, kita sudah sampai akhir tahun kelima, dan kita tidak mencapai sasaran apapun." Ucapan Moerdiono ini terasa mengena bagi Tarmizi dan karena itu ia melakukan banyak kebijakan kongkrit dan bisa memenuhi sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam masa jabatan yang relatif singkat itu.

Selama Tarmizi menjabat Menteri Agama, karya nyata yang ia tampilkan antara lain memasyarakatkan kerukunan hidup beragama, bukan saja pada tingkat nasional tapi juga internasional. Tarmizi mendirikan LPKUB (Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat beragama), lembaga tempat bergumulnya para pakar dan cendekiawan berbagai agama pada Oktober 1993. Tarmizi berupaya meningkatkan citra Departemen Agama, mengangkat mutu sekolah yang dikelola Depag serta menata IAIN (Institut Agama Islam Negeri), melahirkan STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) yang mulai berkiprah pada tahun akademik 1997/1998. Dalam bidang haji, selain membenahi manajemen dan menambah dua bandara haji (Solo dan Balikpapan), Tarmizi juga berhasil menghimpun dana abadi sekitar Rp 300 milyar yang berasal dari pengelolaan dana ONH (Ongkos Naik Haji). Dalam era Tarmizi pula, berhasil diwujudkan proyek raksasa senilai hampir Rp 50 milyar, yaitu Bayt Al Quran dan Museum Istiqlal di kompleks Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada awal 1997.

I. Kebijakan Yang Telah Dilakukan

A. Memasyarakatkan Kerukunan Ke Tingkat Dunia

Tarmizi Taher mendapat banyak pujian saat berlangsungnya Konperensi Internasional Hubungan Islam-Kristen di Hotel Horison Jakarta, 7-9 Agustus 1997. Sanjungan buat Tarmizi itu muncul karena ia dinilai berhasil menghimpun sekitar 30 pakar internasional dari 18 negara untuk berbicara tentang hubungan Islam-Kristen dalam satu forum yang belum pernah terjadi di Indonesia. Prof. Dr. John L. Esposito, Direktur Pusat Kajian Hubungan Antaragama dari Georgetown University AS, misalnya, karena kekagumannya, tanpa ragu mengundang Tarmizi ke Washington untuk mau membuka kegiatan serupa Oktober 1997. Begitu pula dengan Prof. Dr. John C. Raines mengundang Tarmizi untuk tampil berbicara di Temple Unversity USA, juga di Amerika Serikat.

Tarmizi telah membuat terobosan dalam upaya mengangkat citra kerukunan umat beragama di Indonesia ke tingkat dunia. Ia mengajak para pakar dan sekaligus pengamat untuk menoleh ke Asia Tenggara, khususnya Indonesia, dalam kerangka mewujudkan kerukunan umat beragama di muka bumi ini. Ternyata ajakan Tarmizi tersebut mendapat sambutan hangat. Prof. Dr. Mahmoud Ayoub dari Temple University mengemukakan, Indonesia pantas

jadi kajian studi keagamaan di Barat, khususnya universitas di Amerika, mengingat Pancasila yang mengayomi agama dan umat beragama, terlihat sebagai satu alternatif dari negara yang hanya menerapkan paham sekuler atau teokratis. Melihat keunikan Indonesia, Ayoub dengan nada bercanda mengatakan, adalah bodoh mereka yang tidak mau mempelajari perkembangan keagamaan di Indonesia.

Dr. Alwi Shihab dari IAIN Jakarta menyatakan pula, hampir semua para pakar yang hadir dalam konperensi itu menilai bahwa Indonesia, dengan peran Depag yang dipimpin Tarmizi, telah berprestasi besar dalam ikut berperan memecahkan salah satu persoalan dunia, yaitu menciptakan keharmonian hubungan antaragama, khususnya Islam-Kristen. "Departemen Agama telah melaksanakan diplomasi handal, membina banyak kawan di luar negeri sehingga nanti dapat membantu Indonesia dalam menjelaskan setiap persoalan yang ada," kata Alwi yang kini menjadi dosen tamu di Hartford Seminary, Amerika Serikat.

Menurut pengamat sosial politik, Fachry Ali, MA, konferensi itu setidaknya telah menghilangkan rumor, cerita negatif tak berdasar yang ditudingkan kepada Indonesia. Tuduhan tentang perpecahan Islam-Kristen di Indonesia, Islamisasi di Timor Timur dan Irian Jaya yang banyak bergema di Barat, kini bisa dibantah sendiri oleh para pakar itu. "Saya harus acungkan jempol buat Menteri Agama kita. Perannya luar biasa. Pak Tarmizi bisa menunjukkan kepada dunia luar bahwa Indonesia itu tidak seperti yang mereka dengar. Soal Timtim, misalnya, tidak ada konflik agama, tak ada Islamisasi. Ini dampaknya besar sekali karena para pakar yang datang ke sini itu akan banyak bercerita di forum internasional," kata Fachry yang cukup lama mukim di Australia.

Cendekiawan dan rohaniawan Katolik, Dr. AB Sinaga mengemukakan, dialog antarpakar dan tokoh sangat mendukung cita-cita memajukan kerukunan umat beragama dan perdamaian dunia. Lewat dialog terbuka, para pakar menyampaikan komitmen, tekad memajukan kehidupan dan hubungan lebih baik antara Islam dan Kristen. "Kini, dengan memiliki Pancasila kita benar-benar sudah dilirik Barat. Ternyata kerukunan kita bukan dituding, tapi malah mereka mau belajar. Artinya, negara Pancasila bisa menyumbang untuk dunia. Di sini saya kira, peran Pak Tarmizi cukup besar," ujar Sinaga.

Tarmizi Taher sebelumnya telah banyak tampil berceramah pada sejumlah perguruan tinggi terkemuka di Eropa dan Amerika. Maret 1997, Tarmizi tampil di Hartford Seminary, AS. Sebelumnya, November 1995, Tarmizi juga berbicara di Harvard University, Cambridge, Massachussetts, AS. Kemudian pada pertengahan 1996, Tarmizi kembali memberi ceramah di Leiden University, Belanda. Tema ceramah yang disampaikan Tarmizi semuanya menekankan kepada peran Pancasila dan agama dalam memberikan sumbangan bagi perdamaian atau kerukunan umat manusia.

Sebelum ke Harvard 1995, Tarmizi mengawali kunjungannya bersama para pimpinan majelis-majelis agama ke Vatikan dan diterima Sri Paus. Kunjungan ini sangat istimewa karena menurut pejabat di Vatikan, baru pertama kali Sri Paus* menerima suatu rombongan terdiri dari pejabat negara (Menteri Agama dan pejabat Depag lainnya) dan pemuka-pemuka agama, antara lain Prof. Dr. Quraish Shihab (MUI), Mgr. Dr. AB Sinaga (KWI) dan Pdt. Dr. Soelarso Sopater (PGI). Sri Paus yang pernah berkunjung ke Indonesia menyambut hangat rombongan Menag dan kembali berkeyakinan bahwa dengan Pancasila, rakyat Indonesia yang majemuk dapat hidup dalam suasana penuh kerukunan.

Sementara kehadiran Tarmizi di Leiden, bersamaan dengan diselenggarakannya pertemuan internasional yang juga membicarakan masalah kerukunan hidup umat beragama. Berbagai pakar dari Barat dan Timur membahas tentang masalah kerukunan umat beragama dalam berbagai aspek. Juga dibahas masalah peran agama menghadapi tantangan globalisasi pada abad XXI.

Tampilnya Tarmizi di lembaga pendidikan yang bergengsi tersebut, juga untuk menjalin kerja sama. Dapat terselenggaranya program kerja sama antara Hartford Seminary dan Departemen Agama, yang dalam hal ini berhubungan dengan IAIN dam LPKUB (Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama), merupakan satu terobosan baru dalam hal mengintensifkan forum kajian kerukunan umat beragama di Indonesia. Orang-orang LPKUB yang pernah berada di Hartford dapat menyerap berbagai metoda kajian masalah hubungan antaragama yang telah banyak dipakai Hartford Seminary.

---

*Makalah Tarmizi Taher di Vatican, Hartford Seminary, Harvard University, dan Leiden University, lihat, *Aspiring for the Middle Path.*

Hubungan Departemen Agama dengan lembaga perguruan tinggi di Amerika diharapkan Tarmizi dapat terus berlanjut, seperti dengan Hartford Seminary, Harvard University, Temple University dan Georgetown University. Begitu pula dengan sejumlah perguruan tinggi terpandang lainnya, baik yang ada di Asia (Tokyo University), Timur Tengah (Al-Azhar Mesir, Maroco University, dll), maupun di Eropa (Leiden University) dan Kanada (McGill University). Selain dalam bentuk pengiriman orang-orang IAIN dan LPKUB untuk belajar atau studi banding ke lembaga perguruan tinggi di luar negeri tersebut, kerja sama juga dilakukan dalam bentuk mengadakan forum atau pertemuan seminar/diskusi.

Melihat begitu banyak bentuk kerja sama yang telah dan akan dilakukan Departemen Agama RI dengan berbagai lembaga pendidikan di luar negeri, terasa bahwa Tarmizi sangat antusias dalam upaya mengangkat citra Indonesia di bidang kerukunan hidup beragama. Upaya ini dilakukan dengan strategi atau pendekatan yang berbobot ilmiah. Masalah keagamaan yang sangat sensitif, bernuansa sejarah hubungan manusia yang diliputi konflik, dianggap Tarmizi akan lebih efektif bila dibahas dalam forum ilmiah.

Menurut Tarmizi, untuk mengangkat citra Indonesia, termasuk bidang kehidupan beragama, pergaulan intelektual di forum internasional harus sering dilakukan. Kunjungannya ke berbagai perguruan tinggi di luar negeri, tidak lain sebagai rangkaian dari upaya menggalang pergaulan intelektual tersebut. Menag berkeyakinan, lewat upaya yang telah dilakukannya itu berbagai masalah yang dihadapi seperti menyangkut kerukunan umat beragama di tanah air dapat dipahami pihak luar secara obyektif, tidak dilihat dari sudut pandang politis.

Berbagai kasus perusakan rumah ibadah yang sempat terjadi seperti di Tasikmalaya dan Situbondo, misalnya, di mata dunia luar dapat dipahami dan dilihat sebagai suatu dinamika masyarakat sedang berkembang. Apalagi kasus-kasus serupa, juga terjadi di negara yang sudah disebut maju dalam segala bidang. "Indonesia masa lalu dan kini banyak mempunyai masalah. Tapi semua negara besar seperti Amerika, India, dan Cina juga banyak mempunyai masalah," demikian kata Tarmizi.

Sejak jadi Menteri Agama, Tarmizi telah banyak melihat, membaca, dan menelaah hasil-hasil penelitian dari luar negeri. Ternyata salah satu fenomena dunia akhir-akhir ini yang diamatinya adalah

konflik bernuansa agama. Tarmizi sependapat bahwa agama dapat menjadi salah satu kekuatan bagi umat manusia, keadilan dan perdamaian. Sebaliknya, semangat keagamaan yang tidak toleran, tidak saling menghargai, dapat menyebabkan konflik, ketegangan, bahkan kehancuran masyarakat suatu bangsa.

Tarmizi memandang, adalah tanggung jawab setiap umat beragama untuk mempertahankan kerukunan umat beragama, yang pada gilirannya merupakan salah satu hal penting bagi persatuan dan kesatuan, serta kelanjutan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. "Nilai dan norma agama diharapkan menjadi landasan spiritual, moral dan etik pembangunan. Tidak ada langkah yang lebih baik daripada mengembangkan saling pengertian, saling hormat dan kerja sama di antara para pemeluk berbagai agama," kata Tarmizi.

Diingatkan pula, upaya pemantapan kerukunan umat harus terus menerus dilakukan karena kerukunan bukanlah suatu barang jadi. Apalagi tantangan kerukunan umat beragama akan selalu ada, mengingat tidak ada satupun agama yang bisa *immune*, kebal atau lepas dari masalah radikalisme, ekstrimisme dan fanatisme sempit dari para penganutnya. Karena itulah, pandangan-pandangan yang stereotip dari hubungan antar-agama harus dihilangkan dan dicari ke akar-akarnya.

"Agama-agama dan umat beragama di masa depan akan menjadi pemeran agama dari perdamaian atau konflik dunia. Paling menentukan atau kunci kerukunan umat beragama, wajah perdamaian atau perang dunia itu adalah hubungan Islam dan Kristen. Itu harus dikelola dengan arif karena keduanya mempunyai semangat dakwah dan misionaris. Jumlah kedua agama ini juga terbanyak di dunia, termasuk di Indonesia."

"Peranan agama secara etik dalam dunia moderen semakin menonjol. Budaya kejujuran, percaya mempercayai itu sumbernya dari sosial budaya masyarakat yang asalnya dari agama. Agama akan menjadi sumber dari kebenaran-kebenaran abadi dan juga sebagai rujukan-rujukan dalam masalah etik dalam kerelatifan kebudayaan yang menggiring manusia pada zaman global," ujar Tarmizi.

B. Rencana Strategis Dan LPKUB

Dalam upaya mengembangkan dan memperkokoh kerukunan umat beragama, kini dan masa depan, Departemen Agama telah

merumuskan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang. Rencana strategis jangka pendek mencakup: fase pertama, memecahkan masalah-masalah yang dapat mempengaruhi kerukunan beragama di antara umat Islam, di antara denominasi-denominasi Kristen Protestan dan Katolik dan di antara umat Hindu dan Buddha. Fase kedua, menyelesaikan kecurigaan timbal balik antara umat Islam dan Kristen. Fase ketiga, memperkuat seluruh umat beragama dalam persatuan dan kesatuan bangsa.

Sedangkan rencana strategis jangka panjang dirumuskan untuk menunjang akselerasi Kebangkitan Nasional Kedua bangsa Indonesia, di mana umat beragama mempunyai peranan dan posisi sangat penting. Rencana strategis jangka panjang ini juga terdiri dari tiga tahap. Fase pertama, mempertahankan dan meningkatkan stabilitas kerukunan agama; kedua, mendorong partisipasi berkelanjutan umat beragama dalam kemajuan sains, teknologi dan kesejahteraan jasmani dan rohani; dan ketiga, meningkatkan peran dan partisipasi umat beragama dalam Kebangkitan Nasional Kedua bangsa Indonesia.*

Untuk menciptakan dan mengembangkan kondisi seperti itu, kata Tarmizi, peranan ahli-ahli ilmu sosial dan kaum intelektual umumnya sangat diperlukan, khususnya dalam memecahkan masalah yang muncul dari hubungan antar agama secara profesional, akademis dan ilmiah, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kaitan ini, Departemen Agama membentuk Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama (LPKUB) dalam Kongres I Agama-agama di Yogyakarta pada 11-12 Oktober 1993. Ketua Umum LPKUB adalah Prof. Dr. H. Burhanuddin Daya, dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dibantu beberapa wakilnya dari intelektual agama (Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Budha).

Tujuan LPKUB, pertama; mengkaji dan mengembangkan pemikiran keagamaan tentang hubungan yang harmonis di antara pemeluk-pemeluk agama yang berbeda; kedua, menyumbangkan pemikiran keagamaan kepada pemerintah tentang hubungan yang

---

*Tentang kedua rencana strategis ini lihat, "Pancasila heading toward the 21st Century for the Enhancement of Religious Harmony", dalam *Aspiring for the Middle Path*, hal. 20.

harmonis di antara pemeluk-pemeluk agama yang berbeda. Kehadiran LPKUB telah disambut hangat kalangan intelektual dari berbagai kelompok agama yang berbeda sehingga setiap agama yang diakui masyarakat dan bangsa eksistensinya di bumi Nusantara terwakili dalam LPKUB. LPKUB kini telah mendirikan cabang-cabangnya di Ambon dan Medan—dua wilayah yang dikenal punya khazanah kultural dalam kerukunan hidup beragama.

Melalui kajian-kajian yang dilakukan LPKUB dan lembaga-lembaga lain, Tarmizi mengharapkan bahwa kerukunan hidup beragama yang berakar secara kultural maupun sosial di berbagai wilayah Indonesia dapat selalu dipertahankan, disegarkan dan disebarkan ke seluruh pelosok Tanah Air. Tarmizi yakin, hanya melalui kerukunan hidup beragama, umat beragama dapat menjadi pilar di tengah persatuan dan kesatuan bangsa.

LPKUB ini berbeda dengan Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama (WMAUB) yang anggotanya tokoh-tokoh agama dan pemimpin-pemimpin agama. Walau baru tahap awal, LPKUB telah mampu merangsang pemikiran cendekiawan agama untuk melakukan banyak dialog dan kegiatan kajian keagamaan. Tak pelak lagi, Tarmizi sangat berkeinginan dapat mengangkat citra LPKUB sebagai lembaga kajian yang produknya bukan saja berdampak bagi pemantapan kerukunan umat beragama di Tanah Air tapi juga bisa mendapat pengakuan internasional sebagai lembaga kajian ilmiah yang layak dan berkualitas.

Saat ini LPKUB mulai mengeluarkan jurnal ilmiah *Religiosa* dalam tiga bahasa (Inggeris, Arab dan Prancis) yang mengulas berbagai permasalahan agama dan kerukunan antar umat beragama. Melalui LPKUB ini para cendekiawan Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha, secara bersama mencoba mendalami bingkai kultural teologi kerukunan yang khas Indonesia. Sekarang ini LPKUB tengah merintis pembangunan gedungnya di Yogyakarta yang diharapkan dapat menjadi monumen hidup bagi pemantapan kerukunan antarumat beragama di Indonesia.*

---

*Lihat *Aspiring for the Middle Path*, hal. 20.

C. Semua Umat Beragama Memiliki Negeri Ini

Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton, sempat meluangkan waktunya secara khusus untuk mengunjungi Masjid Istiqlal, ketika ia berada di Indonesia dalam rangka menghadiri Sidang APEC 1994 di Jakarta. Clinton yang waktu itu didampingi Menteri Agama Dr. H. Tarmizi Taher secara terus terang memuji Indonesia yang mampu menciptakan kerukunan beragama di tengah masyarakat yang sangat majemuk. Senada dengan Clinton, Syeikh al-Azhar Prof. Gad Haq El Haq (alm) dari Mesir yang meninjau berbagai lembaga pendidikan agama Islam di Indonesia, September 1995, juga mengagumi kehidupan umat beragama di Indonesia yang demikian semarak.

Cerita Indonesia dipuji para tokoh dan pakar mancanegara tentang kehidupan beragama sudahlah sangat sering terdengar. Bahkan tidak sedikit lembaga atau negara asing yang mempelajari resep tentang bagaimana Indonesia mampu mempertahankan keutuhan bangsa dan negaranya yang pluralistik. Kenyataan ini sungguh berbeda dengan situasi dunia sendiri yang banyak dihinggapi aneka pertentangan dan konflik, yang di antaranya berlatar-belakang sentimen etnis dan agama.

Hubungan dan dialog antar-pemuka agama melalui Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama (WMAUB) sangat diintensifkan selama era Tarmizi. Pemuka dan tokoh agama dinilai dapat menjadi penengah, penyejuk, pendamai dan penentu bagi penyelesaian berbagai permasalahan hubungan antar-agama. Begitu kerusuhan terjadi seperti di Situbondo dan Tasikmalaya, Menag Tarmizi langsung membawa para pemimpin majelis-majelis agama berkeliling Indonesia sebagai upaya menenangkan umat dan sekaligus untuk menunjukkan bahwa itu bukan konflik antar-agama.

Bahkan masih dalam suasana Idul Fitri 1417 H, misalnya, Menag melakukan safari silaturahmi dengan membawa para pemuka dan tokoh semua agama tersebut. Para pemuka agama, seperti Prof. Dr. Quraish Shihab (MUI-Islam), Mgr. Dr. AB Sinaga (KWI-Katolik), Pdt. Dr. Soelarso Sopater dan Pdt. Dr. Victor Tanja (PGI-Kristen Protestan), Drs. Oka Diputhera (Walubi-Buddha) dan Sukrenta Soekarta (PHDI-Hindu), semua bisa berjalan seiring, dan sesama mereka tumbuh suasana dialog, sikap saling pengertian dan kebersamaan. Para tokoh agama ini berpendapat, kerukunan beragama kita sekarang ini masih mantap. Buktinya, kerusuhan yang terjadi masih bersifat lokal, tidak meluas dan tak punya pengaruh untuk menggoyahkan

keutuhan bangsa.*

Tarmizi selalu mengingatkan tentang posisinya bahwa ia bukanlah Menteri Agama hanya untuk orang Islam, tapi juga untuk orang Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan juga Budha. Oleh karena itu Tarmizi menegaskan, jangan sampai ada sama sekali yang punya pikiran dan menganggap bahwa negara dan bangsa ini hanya dimiliki salah satu umat beragama. Negara ini adalah Negara Kesatuan RI, negara Pancasila, yang menegaskan bahwa semua pemeluk agama adalah pemilik sah dan tidak boleh ada satu pun yang merasa menumpang di republik ini. Masing-masing pemeluk agama bebas menjalankan ibadah menurut keyakinan dan kepercayaan agamanya.

Tarmizi selalu mengingatkan, pemerintah tidak mencampuri urusan intern masing-masing agama, tetapi berkewajiban membina tata hubungan antar-pemeluk agama yang berbeda sebagai unsur yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Suasana kehidupan beragama yang diciptakan adalah iklim yang sejuk dan semarak, saling menghormati, terhindar dari curiga-mencurigai dan dari pertentangan yang dapat menggoyahkan integrasi bangsa. Tarmizi menegaskan pula, komitmen Indonesia dalam kehidupan beragama sudahlah sangat jelas dan tidak perlu diinterpretasikan kepada hal negatif atau yang menimbulkan sikap saling curiga. Semua agama boleh berkembang subur di tengah pemeluknya. Indonesia mengakui bahwa agama adalah salah satu hak asasi manusia yang patut dihormati. Komitmen ini akan tetap dipertahankan dan dikembangkan, termasuk ketika memasuki abad XXI yang penuh dengan tantangan globalisasi dan modernisasi.

Tarmizi berkeyakinan bahwa pembangunan berkesinambungan yang dilaksanakan dewasa ini haruslah tetap diwarnai oleh semangat keberagamaan. Melalui nilai-nilai ajaran agama, akhlak dan moral, bangsa ini dipandu agar tidak terjerumus ke dalam kehidupan materialisme, tidak terjangkit penyakit hedonisme yang menimbulkan despiritualisasi. Kehidupan beragama perlu dikembangkan

---

*Untuk mengkaji akar-akar kerusuhan itu Menteri Agama mengundang Prof. Lukman Sutrisno (UGM) dan Prof. Sarlito Wirawan Sarwono (UI) untuk melakukan dua penelitian besar secara terpisah pada tahun 1997.

karena masyarakatnya sangat religius, yang menghendaki agar pembangunan nasional tidak hanya mementingkan kemajuan lahiriah tapi juga rohaniah sehingga terpelihara keselarasan hubungan manusia dengan Tuhannya, sesama manusia, manusia dengan alam lingkungannya, serta antara cita-cita hidup di dunia dan akhirat.

Walau kerukunan hidup beragama sangat mantap dan kesemarakan beragama terlihat di mana-mana, tidaklah berarti kehidupan umat beragama bebas dari masalah. Ajaran agama yang tumbuh dalam kehidupan pribadi dan masyarakat, bahkan sebagian sudah menyatu dalam kehidupan sosial budaya, tetaplah selalu menghadapi berbagai tantangan yang kalau tidak diantisipasi dapat menjauhkan umat dari nilai-nilai keagamaan dan bahkan sebaliknya dapat saja agama dianggap sebagai faktor penghambat. Agama, di satu sisi, bisa menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa, tapi di sisi lain, dapat juga menjadi penyebab timbulnya disintegrasi bangsa.

Menurut Tarmizi, semua umat beragama beserta para pemuka agamanya, diharapkan secara bersama mau mendukung semua program pembangunan. Tantangan dalam pembangunan adalah juga tantangan bagi umat beragama. Masalah dampak globalisasi dan industrialisasi, misalnya, merupakan tantangan bagi keberhasilan pembangunan; dan ini juga berpengaruh ke dalam kehidupan umat beragama. Begitu pula soal kemajemukan bangsa, termasuk agama, harus dapat dihadapi secara bersama. Mantapnya kehidupan umat beragama, termasuk kerukunan umat, bukanlah suatu barang jadi tapi ia akan terus dalam proses yang tak pernah henti.

D. Memantapkan Citra Departemen Agama

Selain mengangkat citra kehidupan beragama di Indonesia di tingkat dunia, Menag Tarmizi juga sangat antusias mengangkat citra Departemen Agama dan ini juga dilakukan bekerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi di luar negeri. Dalam berbagai kesempatan Menag menegaskan, sekarang ini Depag bukan lagi departemen marjinal, yang orang-orangnya hanya dikenal sebagai tukang doa. "Kita orang Departemen Agama, harus punya kepercayaan diri. Kita merupakan jajaran yang sangat menentukan dalam mengawal keberhasilan pembangunan bangsa ini. Di tengah tantangan globalisasi, modernisasi, kehidupan yang penuh diwarnai oleh materialisme, konsumerisme, dan hedonisme, peran kita sangat

dituntut, yaitu sebagai pembawa obor pesan dan pemandu moral," kata Tarmizi.*

Berbagai keberhasilan Departemen Agama selama era Tarmizi, antara lain, disebabkan sudah tertatanya organisasi Departemen Agama. Beruntunglah Tarmizi, sebelum menjabat Menag ia telah dipercaya menjadi Sekjen yang tugas utamanya membina organisasi Depag. Bagi Tarmizi, dipercaya sebagai Menteri Agama adalah amanah untuk terus melanjutkan tugas yang telah ia rintis ketika menjabat Sekjen, selain tentu saja meneruskan tampuk kepemimpinan sebelumnya yang dipegang H Munawir Sjadzali.**

Saat baru menjabat Sekjen itu, Tarmizi mengakui bahwa sebagai orang kedua di departemen yang berkaitan dengan "moral spiritual", tugasnya cukup berat karena ia dituntut untuk kerja keras dalam mengelola departemen yang selama ini menganut sistem "tradisi". Semasa menjabat Sekjen Depag, Tarmizi merasa punya misi untuk mengangkat citra Departemen Agama, dari lembaga "sekadar tukang doa" menjadi wadah yang berperan menentukan dalam mengawal kehidupan bangsa dan negara ini menuju masa depan yang gemilang, berhasil dalam pembangunan ekonomi tapi tetap punya kepribadian yang dilandasi etik, moral dan spiritual agama.

Departemen Agama di mata Tarmizi adalah benar-benar sebagai lembaga untuk mengembangkan kehidupan beragama, membina kerukunan beragama dan sekaligus turut dalam upaya memajukan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diamanatkan GBHN (Garis-garian Besar Haluan Negara) 1993, ia sebagai pembantu Presiden/Mandataris MPR harus dapat melaksanakan tugas pembinaan kehidupan beragama yang diarahkan pada peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terpeliharanya kerukunan antar dan antara umat beragama, serta meningkatkan kesadaran dan peranserta aktif umat beragama akan tanggung jawabnya untuk secara bersama-sama memperkukuh landasan spiritual, moral, dan etik bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.

---

*Lihat, *Himpunan Pidato Menteri Agama Dr. H. Tarmizi Taher Tahun 1995*, dan *Tahun 1996* di mana ia mejelaskan banyak kebijakan pengembangan Departemen Agama.

**Lebih jauh lihat bab tentang Munawir Sjadzali.

Tentu saja dalam mengemban tugas yang diamanatkan, ia harus punya personil yang handal dan profesional, serta diimbangi perangkat organisasi yang solid dan punya daya dukung dalam penerapan langkah-langkah kebijakan dan program. Oleh karena itu, sejak menjabat Sekjen, Tarmizi yang sudah "makan asam-garam" di lingkungan ABRI, berupaya mencari kunci permasalahan daerah medan tugas yang baru ia masuki. Ia merenung, menganalisis, apakah cara pengelolaan Depag selama ini sudah sesuai dengan GBHN, semangat Undang Undang Dasar 1945 dan Pancasila? Dalam waktu singkat, kunci itu ia temukan, yaitu dengan mendapatkan data dan informasi detil tentang Depag, baik secara politis maupun administratif. Tarmizi merasa perlu mempelajari Depag dari sudut pandang "politis", karena dia datang dari Markas Besar ABRI yang dikenal punya semangat loyalitas, disiplin dan kebersamaan sangat tinggi. Sementara Depag sejak kelahirannya, 3 Januari 1946, punya latar sejarah yang banyak terlibat dalam kemelut politik. Baik kemelut politik antar-umat Islam maupun antarumat beragama.

E. Membenahi Organisasi Departemen Agama

Departemen Agama ketika baru dimasuki Tarmizi 1987, belumlah punya tradisi sejarah yang mengakrabkan pejabat lama (senior) dengan pejabat baru, terlebih yang datang dari luar lingkungan Depag. Kondisi ini menurut Tarmizi perlu dibenahi. Suasana feodal perlu dikikis, dikembalikan pada situasi dan kondisi lingkungan kerja yang sesungguhnya. Salah satu tradisi lama di Departemen Agama yang menonjol adalah bahwa dalam diri pribadi-pribadi pejabat lama selalu curiga terhadap pejabat baru yang datang bukan dari lingkungan sendiri (Depag). Mereka menganggap orang lain yang datang itu sebagai musuh, saingan yang membahayakan.

Kondisi demikian terutama terlihat dari mereka yang mendapat posisi bukan karena kemampuan, prestasi dan profesionalitas yang dimiliki. Perasaan *su'uzhon* (berburuk sangka) dari sejumlah pejabat Depag banyak faktor dari rasa tidak percaya diri. Sementara mereka yang berkualitas dan percaya diri, kedatangan pejabat baru di Departemen Agama itu tidak menjadi masalah. Karena itu, Tarmizi merasakan bahwa ada "perang dingin" di lingkungan intern yang baru ia masuki dan sebagai "kepala staf" ia harus dapat meredakannya.

Tarmizi menyadari bahwa sebagai orang baru ia bukanlah ber-

asal dari lingkungan Depag. Karena itu, berbagai kondisi yang ia lihat, ia rasakan dan ia hadapi, dianggapnya sebagai suatu tantangan. Pimpinan ABRI telah menugaskannya untuk membenahi kekurangan-kekurangan yang ada di tempat barunya, sekaligus mengangkat citra Departemen Agama ke arah tujuan yang sesuai dengan cita-cita bangsa dan negara Indoenesia. Lantas, langkah-langkah tegas dan berani dilakukan oleh Tarmizi. Pejabat tidak disiplin dikenakan sanksi dan yang menyimpang diganti mendadak.

Pembenahan mental para pejabat dalam lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) dilakukan Tarmizi, sekaligus menjadikan Sekjen betul-betul sesuai dengan ketentuan organisasi, yakni sebagai motor administrasi dan pendukung Menteri dengan kebijaksanaannya. Walau dengan sedikit gaya berbeda dan bervariasi, sistem dan manajemen ABRI diterapkan oleh Tarmizi. Siapa pimpinan "bataliyon" dan siapa kepala staf didudukkannya secara jelas. Dalam lingkungan ABRI, antara pimpinan bataliyon dan staf di Markas Besar kebijakannya berbeda. Seorang pimpinan bataliyon harus menguasai anak buah di lapangan, baik dengan teriakan, raut muka, pemberian petunjuknya, maupun dalam menggerakkan prajurit, seperti dalam baris berbaris. Sementara di Markas Besar, baik Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara, maupun Kepolisian, menggerakkan orang itu dengan kertas. Artinya sehari-harinya selalu berkaitan dengan pembuatan kebijaksanaan dan petunjuk pelaksanaan, sehingga banyak menekankan "kerja menulis".

Tarmizi tatkala sebagai Sekjen Depag, menempatkan dirinya sebagai Kepala Staf. Dalam karier di ABRI, dia memang selalu berkecimpung (bekerja) dengan kertas, seperti menyiapkan pidato atasan, menyiapkan rapat kerja, membuat *policy*, menganalisa data dan lain-lain. Dari pengalamannya itu, tidaklah sulit bagi Tarmizi menerapkan kebijaksanaan di lingkungan Departemen Agama.

Tahun pertama menjadi Sekjen, Tarmizi memperhatikan bahwa rapat kerja di Departemen Agama (bahkan hampir seluruh departemen) lebih menjurus kepada pidato menteri dan tidak menguraikan secara rinci kebijaksanaan departemen. Keadaan ini berbeda dengan rapat kerja atau rapat pimpinan di ABRI yang betul-betul suatu rapat kebijaksanaan. Dalam pidato menteri, misalnya, selalu "melenceng" pada profesi menteri yang bersangkutan. Jika menteri mempunyai profesi, dia cerita tentang profesinya dan tidak terkait dengan apa yang harus diberikan dan dibutuhkan untuk dijadikan

suatu kebijaksanaan anak buahnya.

Untuk itu, Tarmizi memberitahukan masalah rapat kerja yang kurang pas itu kepada Menteri Agama H. Munawir Sjadzali. Menurut Tarmizi, rapat kerja tahun pertama merupakan rapat kebijaksanaan perencanaan dan pelaksanaan. Kegiatan ini harus dipimpin Sekjen untuk menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan rapat tersebut, seperti mempersiapkan pidato Menteri pada pembukaan dan penutupan. Pada pembukaan, pidato Menteri berkaitan dengan kebijaksanaan dari perencanaan dan kebijaksanaan tahun kerja yang bersangkutan. Pada akhir rapat kerja penekanannya adalah prioritas yang diminta menteri untuk diselesaikan tahun anggaran yang bersangkutan dan juga untuk mempersiapkan anggaran yang akan datang. Jadi, yang paling giat pada masa raker ini seharusnya Sekjen dan stafnya.

Sementara rapat tengah tahunan adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan dari tahun anggaran dan motornya adalah Irjen. Dalam raker ini, akan dapat dihitung bagaimana kinerja kita dalam setahun sehingga kelemahan dan kekurangan yang terjadi dapat diantisipasi dengan cara yang lebih menjurus. Tarmizi mengakui, sebelum memasuki Depag, rapat bulanan dan rapat koordinasi tidak pernah diadakan. Ini tentu akan menyulitkan dan merapuhkan koordinasi, sehingga program yang telah dicanangkan kurang berhasil. Jika hal ini didiamkan, ke mana Departemen Agama akan dibawa? Menyadari hal itu, Tarmizi mulai menata tentang posisi rapat kerja dan rapat tengah tahunan dalam keseluruhan kebijaksanaan dan pelaksanaan kerja Depag dalam membina umat. Dalam waktu yang sama ia juga membina kemampuan para Kakanwil, ketua PTA (Pengadilan Tinggi Agama) dan Rektor IAIN (Institut Agama Islam Negeri).

Kelebihan Tarmizi dalam membina dan mengakrabkan bawahannya adalah bahwa dia hafal betul berapa orang Depag yang mempunyai golongan 4A, 4B, 4C dan 4D. Setelah ditata melalui Raker, forum formulasi kebijaksanaan, ia dapat dengan mudah menata personil, sumber daya manusia (SDM). Administrasi pegawai Depag ketika itu sangat lemah. Padahal penyelesaian administrasi pegawai itu adalah salah satu pemberi motivasi yang penting kepada anak buah, seperti naik pangkat. Anak buah jangan dibiarkan frustrasi karena biro kepegawaian seperti "pasar". Waktu itu diakui Tarmizi, Biro Kepegawaian Depag seperti "pasar", masing-masing ingin

menyogok orang biro tersebut agar mulus naik pangkat/golongan.

Tarmizi lalu menginstruksikan bahwa Biro Kepegawaian hanya boleh menerima orang Kanwil yang berlingkup kerja daerah tingkat I/propinsi, sementara orang Kandepag yang berlingkup kerja tingkat II/kabupaten/kotamadya jangan dilayani. Organisasi Depag, kata Tarmizi, harus berstruktur dan sesuai dengan aturan yang benar. Orang Kandepag harus ke Kanwil dan orang Kanwil yang ke Pusat. Dalam membenahi kelemahan-kelemahan yang terjadi di Depag, Tarmizi melakukan banyak pembinaan mental para pejabat, terutama mental pegawai biro kepegawaian dan keuangan. Memang, yang paling rawan dan berbahaya dalam manajemen adalah biro kepegawaian. "Orang bisa frustrasi nasibnya jika tidak diperhatikan dan gembira karena dimanjakan."

Tarmizi mencontohkan, ada pegawai Depag yang minta naik pangkatnya dipercepat lebih dari tiga kali. Keadaan ini bukan hanya terjadi pada pegawai tingkat bawah atau menengah, tapi juga di tingkat puncak. Padahal, menurut Peraturan Pemerintah (PP), naik pangkat dipercepat itu hanya terbatas tiga kali. Jika ini terjadi, maka mental personil tersebut telah banyak mempengaruhi pimpinan, sekaligus menggunakan kelemahan pimpinan.

Kekuatan Tarmizi sebagai tentara betul-betul dipergunakan untuk menghapuskan "sistem buruk" yang menggejala di lingkungan Depag. Sebagai seorang mubaligh, Tarmizi mengerti betul fungsi hadits yang menyatakan, "Barangsiapa melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan (kekuatan). Jika tidak mampu, ubahlah dengan lisan (nasihat), dan jika tidak mampu, ubah dengan hati (tidak setuju). Itu adalah selemah-lemah iman."

Dengan kekuatan itulah Tarmizi membongkar berbagai kasus yang terjadi di biro kepegawaian. Misalnya, kasus Surat Keputusan (SK) palsu yang beredar di Jawa Barat dan hampir seluruh Jawa. SK yang ditandatangani Sekjen (palsu) dijual Rp 2 juta kepada calon pegawai Departemen Agama. Sementara jika yang dipalsukan itu tanda tangan Kakanwil, dijual Rp 1 juta. Tarmizi berhasil memberantas kasus yang merusak citra Departemen Agama itu. Ternyata yang memperjualbelikan adalah seorang guru agama di Bekasi yang sebelumnya pernah "dihukum", tapi tidak tuntas. Dalam melakukan aksinya, sang "guru" itu bekerja sama dengan oknum ABRI, sehingga "SK Palsu" berjumlah ribuan itu beredar cepat di seluruh Jawa. Kala itu di Depag dan Depdikbud memang sering kali mun-

cul kasus SK palsu, sebab kedua departemen ini "dinilai lemah".

Kasus lain yang diberantas Tarmizi adalah penerimaan 100 pegawai berpendidikan sarjana (S1) yang diwarnai sogok-menyogok. Setelah diteliti, ternyata yang main adalah kepala bagian kepegawaian dengan imbalan uang. Empat dari lima kepala bagian di biro kepagawaian akhirnya diberhentikan akibat kasus tersebut. Tapi yang satunya lagi, setelah diuji kejujurannya, akhirnya juga harus diganti. Lengkaplah sudah, diberhentikannya lima oknum yang selama ini dicurigai "menggerogoti" dari dalam.

Tindak lanjut kebijakannya, Tarmizi memerintahkan Kepala Biro Kepegawaian (waktu itu Drs H Subagjo), untuk memberikan peluang kepada lulusan IAIN yang mempunyai peringkat 1-10 agar diterima di Departemen Agama. Cara ini diharapkan dapat menghalangi kasus sogok dalam penerimaan pegawai baru. Mereka yang lulus IAIN dengan peringkat 1-10 langsung dikirimi surat ke alamat masing-masing, untuk ditawarkan menjadi pegawai Depag tanpa dikenakan biaya. Cara penempatan pegawai baru pun selalu dipelajari Tarmizi. Mereka yang orang pusat umumnya tidak tahu daerah. Untuk itu mereka yang baru diterima ditempatkan di KUA (kantor urusan agama) di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Setelah langkah-langkah itu barulah Tarmizi merasa bahwa Depag dengan biro kepegawaiannya mulai mampu bekerja dengan baik. Meski demikian, Tarmizi masih sangsi, karena personil Depag cukup banyak. Tidak tertutup kemungkinan ada oknum yang mencari kelemahan orang lain. "Untuk itu kita perlu mengantisipasinya sejak dini," kata Tarmizi.

Tarmizi juga pernah membongkar tindakan pegawai Inspektorat Jenderal Depag dalam masalah penerimaan pegawai. Modusnya, dari nama 100 orang yang akan diserahkan ke BAKN, 50 orang di antaranya dikembalikan dengan pernyataan BTL (bahan tidak lengkap). Lantas dimasukkan nama calon baru yang sudah direkayasa alias produk kolusi sebagai pengganti. Kasus ini pernah dibincangkan langsung oleh Tarmizi kepada Irjen (waktu itu Slamet). Tarmizi bertanya, kalau ada pejabat dan pegawai di departemen diduga bersalah maka yang memeriksa adalah Irjen. Tapi jika pejabat Irjen yang bersalah, siapa yang memeriksa? "Yang memeriksa, ya Sekjen," kata Tarmizi tegas. Waktu itu juga Tarmizi, sebagai Sekjen melapor kepada Menag Munawir Sjadzali agar menindak yang bersalah. Penggantian pejabat Itjen dan urusan pegawai pun dilaku-

kan secara mendadak oleh Menteri Agama. Inilah antara lain langkah-langkah Tarmizi dalam upaya membersihkan departemen agama dari "tradisi buruk" kepada *akhlakul karimah*.

Setelah menjabat Menteri Agama, jabatan Sekjen yang disandang Tarmizi diserahkan kepada Drs H Zarkowi Soejoeti (kini Dubes Indonesia untuk Arab Saudi). Sebagai orang yang sebelumnya menjadi "kepala staf" dan kini beralih menjadi "panglima", Tarmizi menegaskan langkah dan kebijakan yang telah ia lakukan harus diteruskan dan kalau perlu dimantapkan agar lebih baik. Saat itu Tarmizi mengingatkan agar jangan sampai muncul feodalisme baru di Departemen Agama. Misalnya ia ingatkan, "Bapak-bapak, istri saya itu adalah Hajjah Djusma Tarmizi. Karena itu, panggil saja ia dengan nyonya atau Ibu Tarmizi. Jadi, jangan panggil ibu menteri karena ibu menteri itu jumlahnya tidak satu."

Sebagai orang yang sudah lama di Depag, Tarmizi tidak menginginkan ada perubahan suasana pergaulan di jajaran Depag. "Jangan sampai ada feodalisme baru. Jangan ada feodalisme jabatan. Mentang-mentang naik eselon, jangan bersikap yang aneh-aneh. Kita jangan terkena polusi dehumanisasi." Dia mengingatkan, jangan sampai ada pejabat yang karena pamrih lantas menghamba dan memuji-muji atasannya. Bahkan kalau ia ke daerah, Tarmizi minta agar jangan disambut secara berlebihan. "Kalau saya masuk pada satu ruangan, hadirin tidak perlu berdiri. Penghargaan berdiri itu cukup buat Presiden dan Wakil Presiden." Pejabat di daerah juga diingatkan agar tidak mengeluarkan dana besar untuk menyambut pejabat dari pusat, karena pejabat pusat sudah punya dana sendiri, seperti untuk penginapan.

F. Pengiriman Pejabat Depag ke Luar Negeri

Menyangkut manajemen di Departemen Agama yang ia pimpin, Tarmizi Taher tak bisa menutup-nutupi rasa bangganya. Dalam berbagai kesempatan bertemu dengan jajarannya, ia mengingatkan bahwa Departemen Agama punya anggaran yang tidak banyak tapi sekali-kali warga Depag jangan berpenampilan atau berlagak *kere*.

Sikap Tarmizi itu tidak mengada-ada, apalagi sekadar menyombongkan diri. Pejabat Depag dewasa ini banyak yang muda-muda tapi bukan saja mereka sudah bergelar sarjana tapi ada yang bergelar master dan doktor. Cerita bahwa pegawai Depag disekolahkan ke luar negeri, bukan lagi hal baru, apalagi dianggap aneh. Sudah

banyak pegawai Depag yang belajar ke Amerika atau Eropa. Bahkan Tarmizi mengakui, naskah pidatonya secara berganti banyak dibuat atau mendapat masukan dari mereka yang bergelar master atau doktor.

Sebelum berkantor di Jalan Lapangan Banteng, Tarmizi mengakui bahwa Departemen Agama adalah satu-satunya departemen yang belum pernah menempatkan personilnya untuk mengikuti pendidikan di luar negeri. Kalaulah ada, itu hanyalah buat tenaga pengajar IAIN. Sedangkan buat staf Depag masih merupakan impian belaka. Padahal departemen dan lembaga nondepartemen, termasuk ABRI, dalam meningkatkan kualitas personilnya di bidang administrasi, manajemen dan perencanaan, diberi kesempatan belajar ke luar negeri.

Setelah rapat dengan jajaran Hankamnas bersama-sama dengan Deputi Administrasi Bappenas, mengenai rencana jangka panjang lima tahun (Pelita V), Tarmizi yang kala itu Sekjen Depag melihat Bappenas menyetujui 500 personil dari Departemen Dalam Negeri untuk belajar ke luar negeri. Mereka adalah para bupati dan wakil gubernur yang diberi kesempatan belajar sekitar tiga bulan. "Namun, buat personil Depag kok tak ada?" Tidak mau kalah dengan departemen lain, Tarmizi kemudian mengajukan 100 pegawai untuk dapat belajar *strategic planning* ke luar negeri. Usulan pertama yang diajukan Sekjen Depag itu ternyata mendapat tanggapan positif pihak Bappenas. Waktu Tarmizi melapor bahwa 100 pegawai Depag akan mendapat kesempatan belajar ke luar negeri, Menag Munawir sangat gembira. Malah dengan nada bercanda Munawir mengatakan, "Mengapa tidak minta dua ratus saja?"

Menurut Tarmizi, jika yang belajar ke luar negeri hanya dari lingkungan IAIN sedangkan dari departemen sendiri tidak ada maka akan mengakibatkan orang IAIN bertambah pintar dan maju, tapi yang mengelola (dari Kantor Pusat dan Kanwil Depag) bertambah bodoh. Selain itu, Tarmizi juga menganggap soal pendidikan itu penting. Tarmizi menginginkan, kalangan Depag juga banyak mendapat kesempatan belajar di luar negeri guna memperdalam bidang manajemen. Sungguh tidak layak jika pimpinan di sebuah departemen buta akan manajemen. Tanpa manajemen suatu organisasi akan mengalami kemunduran. Padahal di zaman moderen ini para pegawai dituntut meningkatkan kuali-

tas guna keberlangsungan dan peningkatan sistem secara keseluruhan.

Pengiriman pejabat Depag ke luar negeri bukanlah tanpa hambatan. Tarmizi mengakui, banyak pejabat Depag tidak mengerti bahasa Inggris. Karena itu, Tarmizi lalu membicarakannya dengan pihak Bappenas dan mengatur agar dalam satu rombongan yang berjumlah 20 orang, lima di antaranya harus benar-benar bisa bahasa Inggris. Sementara yang 15 orang lainnya harus dibantu, yaitu setiap setelah kuliah 15-20 menit, pelajaran yang mereka serap diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Di dalam diskusi kelompok, yang bisa bahasa Inggris menerangkan kepada mereka yang tidak bisa berbahasa Inggris. Jadi orang yang bisa bahasa Inggris otomatis menurunkan ilmunya kepada mereka yang tidak bisa berbahasa Inggris. Jadi para peserta harus meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya, sehingga mereka dapat menyerap dan mengerti betul apa yang dikuliahkan tersebut.

Banyaknya orang Depag yang dapat belajar ke luar negeri, ternyata sangat berpengaruh besar dalam gerak organisasi. Pola pikir manajer Depag pada semua jenjang, termasuk bagian perencanaan di Kanwil se Indonesia pun sudah berubah. Karena itu, Tarmizi sempat tertawa ketika ada yang mempertanyakan dan sekaligus menawarkan tentang perlunya Depag belajar menerapkan manajemen moderen, antara lain dengan memakai analisa SWOT. "Saya jawab, kami tidak lagi belajar tapi sudah melaksanakan cara analisa yang dalam bahasa Indonesia disebut *kekepan*, singkatan dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman itu," kata Tarmizi.

Depag sudah punya pola pikir perencanaan strategis yang memakai analisa SWOT. Setiap orang Depag, sebagai kepala wilayah, kepala biro di pusat, sudah dapat berpikir tentang apa kelemahan dan kekuatan Depag, sehingga mereka dapat mencari peluang-peluang dan menghadapi ancaman-ancaman yang ditimbulkan dari luar. Terlebih lagi, selain mengirim tenaga ke luar negeri, Depag menjalin pula kerja sama dengan Mabes ABRI. Termasuk dalam pembenahan manajemen masalah haji, Depag juga bekerja sama dengan Mabes ABRI karena operasional haji mirip pengerahan pasukan ke medan tempur.

G. 70 Persen Pikiran Kakanwil Depag Harus Pendidikan

Tarmizi sungguh merasa tergugah dan tidak bisa menerima keadaan tentang rendahnya kualitas lembaga pendidikan yang dikelola Depag. Menurut obsesinya, sekolah yang dikelola Depag, mulai dari Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, hingga IAIN dan ditambah STAIN, hendaklah tidak kalah dengan lembaga pendidikan umum, paling tidak sejajar atau bahkan harus lebih baik. Mengapa sekolah Depag rendah mutunya dan kurang peminat? Mengapa para ulama lebih gandrung menyekolahkan anaknya ke sekolah umum dari pada ke sekolah agama?

Menag mengakui, tujuan orang tua dalam menyekolahkan anaknya adalah agar mendapat lapangan kerja, memenuhi tuntutan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Pesatnya laju pembangunan telah membuat orang berpacu dalam kehidupan, mengejar materi. Itulah dampak modernisasi, yaitu materialisme dan konsumerisme, bahkan hedonisme yang berbuntut pada despiritualisasi dan dehumanisasi. Namun, apakah akhirnya sekolah yang dikelola Depag harus ditutup? "Tidak, sekali lagi tidak. Sekolah Depag kurang dilirik, hanyalah karena soal kelemahan dalam menatanya, sehingga kualitasnya memang rendah dan tak menjanjikan peluang masa depan. Kalau tamat dari sekolah Depag hanya jadi tukang doa, buat apa?"

Melihat kondisi itu, Tarmizi menegaskan kepada seluruh Kepala Kanwil Depag agar lebih memperdulikan upaya peningkatan pengelolaan lembaga pendidikan yang dimiliki. "Saya minta, 70% yang ada di benak para Kakanwil adalah menangani masalah pendidikan," kata Tarmizi. Menurutnya, sekolah Depag, mulai dari tingkat dasar (Ibtidaiyah) hingga lanjutan (Tsanawiyah dan Aliyah) harus bisa punya kualitas lebih dibanding sekolah umum. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Mendikbud dan Mendagri, lulusan sekolah Depag punya kesempatan sama dengan sekolah umum, yaitu tamatan Ibtidaiyah selain bisa masuk Tsanawiyah dapat pula masuk SMP. Begitu pula tamatan tsanawiyah dan aliyah, bebas masuk SMU dan perguruan tinggi umum.

Keberadaan lembaga pendidikan di bawah Depag makin dituntut untuk mengimbangi lembaga pendidikan umum di bawah Depdikbud karena status dan posisinya sama, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No 2/1989 tentang Sistem Pen-

didikan Nasional berikut peraturan pelaksanaannya. Karena itu, menurut Tarmizi, orang Depag tidak perlu ragu memajukan sekolah-sekolahnya karena setara dan sejajar dengan sekolah umum tapi punya ciri khas Islam.

Sekolah yang dikelola Depag seharusnya punya nilai plus karena selain tetap menerapkan kurikulum sekolah umum, juga punya tambahan bobot pelajaran pendidikan keagamaan. Semua orangtua sesungguhnya menginginkan anak-anaknya mendalami ajaran agama. Orangtua menginginkan anaknya dapat tetap terbina akhlak dan moral agamanya, tapi juga menginginkan anaknya tidak tertinggal dalam pengetahuan umum. Karena itu, Tarmizi menekankan sekali perlunya peningkatan kualitas guru mata pelajaran umum.

Genjotan Tarmizi dalam meningkatkan mutu sekolah yang dikelola Depag sudah mulai terlihat hasilnya. Minat orangtua menyekolahkan anak ke madrasah mulai terlihat meningkat. Hal ini karena citra sejumlah sekolah Depag mulai naik, ditandai dengan banyaknya tamatan yang bisa melanjutkan ke lembaga pendidikan umum. Lulusan Aliyah juga mulai banyak diterima di perguruan tinggi negeri umum. Namun Tarmizi mengakui, peningkatan mutu sekolah yang dikelola Depag masih belum memuaskan; masih perlu waktu dalam pembinaan segala aspek, baik itu soal pengadaan dan peningkatan kualitas guru maupun dalam penataan penerapan kurikulum dan pemenuhan perlengkapan sarana pendidikan.

H. Mengangkat Citra Sarjana Agama

Tarmizi Taher dan keluarga besar IAIN (Institut Agama Islam Negeri) dan STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) sungguh merasa bersyukur dan gembira atas kehadiran Presiden Soeharto pada Dies Natalis ke-40 dan wisuda sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 29 Juli 1997. Baru pertama kali inilah Pak Harto berkenan menghadiri acara dies dan wisuda di IAIN sehingga maknanya punya bobot dalam mengangkat citra IAIN, bukan saja yang di Jakarta tapi juga seluruh Indonesia. Kehadiran Presiden juga bisa diartikan sebagai suatu restu atau pengakuan terhadap langkah-langkah kebijakan pembantunya, dalam hal ini Menteri Agama, dalam berupaya menata lembaga pendidikan tinggi agama Islam tersebut.

Tarmizi memang telah bertekad untuk mengangkat citra IAIN

sebagai lembaga pendidikan tinggi agama yang tidak kalah mutunya dibanding lembaga-lembaga pendidikan tinggi umum, baik negeri maupun swasta. Sekarang ini sudah digariskan, pimpinan IAIN harus orang-orang berbobot secara akademis, menyandang gelar doktor atau profesor. Selain itu, Tarmizi menantang sejumlah IAIN untuk dapat menjadi lembaga ilmiah kebanggaan, bukan saja pada tingkat nasional tapi juga internasional. Bahkan Tarmizi mendorong gagasan, kemungkinan sejumlah IAIN dijadikan universitas.

IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang dipimpin Prof. Dr. Quraish Shihab, misalnya, termasuk yang dimungkinkan untuk jadi universitas Islam Negeri, yang nantinya dapat menghilangkan dikotomi ilmu agama dan ilmu umum itu. Sementara ini, kualitas IAIN Jakarta terus dikembangkan. Sejak 1994, berkat ide dan dukungan penuh Tarmizi, IAIN Jakarta menerbitkan jurnal *"Studia Islamika"* dalam 3 bahasa (Indonesia, Inggris, Arab) yang diedarkan ke berbagai perguruan tinggi terkemuka di dunia. Jurnal yang dipimpin Dr. Azyumardi Azra ini kini sudah banyak dibicarakan para pakar dunia yang menaruh perhatian terhadap studi keislaman, khususnya di Indonesia. Sementara itu, IAIN Walisongo Semarang yang kini dipimpin Dr. Zamakhsyari Dhofier diharapkan Menag dalam waktu dekat dapat menjadi pusat kajian Islam Asia Tenggara.

Tarmizi cukup banyak mendapat sorotan dalam upayanya membenahi IAIN. Salah satu yang banyak disorot adalah kebijakannya mengubah hampir seluruh fakultas kelas jauh IAIN menjadi STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri). Dari 37 Fakultas IAIN kelas jauh yang semula berinduk kepada salah satu IAIN itu, mulai tahun akademik 1997/1998 sebanyak 33 buah ditetapkan berdiri sendiri, mandiri dalam pengelolaannya. Semula kebijakan Tarmizi ini mendapat kecaman, bahkan ditandai dengan kegiatan unjuk rasa oleh sejumlah mahasiswa IAIN kelas jauh tersebut karena merasa khawatir bobot dan gengsinya jadi melorot karena tidak memakai nama IAIN induk.

Namun kini, kecaman dan kritik terhadap kebijakan Menag Tarmizi itu hilang dengan sendirinya. Sesungguhnya tidaklah beralasan kalau ada yang protes terhadap lahirnya STAIN karena tidak ada yang dirugikan, apalagi para mahasiswa. Malah sebaliknya rasa syukur dan sambutan gembira harus diungkapkan, mengingat perubahan status itu akan berdampak sangat luas, bukan saja buat

mahasiswa tapi juga segenap civitas STAIN dan lingkungannya. Betapa tidak, bagi warga kota tempat STAIN itu berada boleh punya kebanggaan karena mereka telah memiliki sebuah perguruan tinggi negeri yang mandiri. Walau dari skala organisasi agak kecil dibanding 14 IAIN induk yang ada, namun secara akademik bisa saja nanti dalam perkembangannya punya bobot kualitas lebih. STAIN yang kini membuka program sarjana (S-1), nanti bisa saja membuka program magister (S-2).

Menurut Tarmizi, peleburan fakultas IAIN kelas jauh menjadi STAIN dimaksudkan sebagai antisipasi lembaga pendidikan tinggi agama Islam menghadapi tantangan masa depan. Selama ini kualitas IAIN masih sering dianggap di bawah perguruan tinggi negeri (PTN), bahkan malah di bawah IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan) Negeri. Padahal kehadiran sarjana agama yang berkualitas di masa depan sangatlah penting, seirama dengan sangat strategisnya peran agama sebagai pemandu moral dan akhlak bangsa. "Mau tidak mau, kita harus memacu STAIN dan IAIN agar bisa mengimbangi PTN umum yang sudah dikenal selama ini," kata Tarmizi.

Menanggapi adanya protes sejumlah mahasiswa IAIN yang akan jadi STAIN, Menag Tarmizi menyatakan, hal tersebut terjadi karena mahasiswa tidak memahami maksud dari perubahan yang dilakukan. Berdasarkan Undang-undang Pendidikan Nasional dan berbagai peraturan yang ada, keberadaan sekolah tinggi, baik dilihat dari status maupun kiprahnya, sama saja dengan universitas atau institut. Perbedaannya hanya dari sturuktur dan organisasi di mana sekolah tinggi memang lebih ramping. "Namun ini cocok buat sekarang, yaitu *small but effective*, kecil tapi efektif. STAIN nanti tak perlu berurusan lagi ke IAIN induk tapi bisa langsung ke Dirjen. Ini artinya, kita memangkas birokrasi. STAIN juga bisa bersaing dengan IAIN yang ada dan bahkan bisa membuka program S2," kata Menag.*

---

*Kebijakan mengenai ini dilakukan Menteri Agama dengan menerbitkan tiga SK tentang pembentukan/pembukaan Program Pasca Sarjana (S2) Studi Islam pada Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Islam Malang dan Universitas Islam Bandung. Selain itu juga disetujui pembukaan program S2 pada IAIN Pekanbaru, IAIN Bandung dan IAIN Padang.

Karena itulah, guna memasyarakatkan kebijakannya, Menag Tarmizi bersama Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama (Binbaga) Islam, Prof. Malik Fadjar, Msc, telah melakukan dialog dengan sejumlah civitas akademika bakal STAIN tersebut. "Ternyata respon mahasiswa di Solo sangat positif. Mereka cukup antusias menyambut STAIN. Protes yang terjadi hanyalah karena mereka tidak mengerti tapi *sok ngerti*. Kita mau memajukan sekolahnya, *kok* malah main protes? Lulusan IAIN atau STAIN nanti sama saja, tetap S.Ag., Sarjana Agama. Apa mereka dirugikan?," ucap Tarmizi, seraya menegaskan, upaya memajukan STAIN dan IAIN tidak akan surut walau ada yang menentangnya.

Menurut Tarmizi, IAIN dan STAIN harus dapat menatap masa depannya dengan kondisi yang bisa diandalkan sehingga punya semangat penuh optimistis. Selama ini sejak bertahun-tahun kondisi IAIN, terutama di daerah-daerah dan yang menjadi kelas jauh, sungguh sangat memprihatinkan. Bukan saja secara fisik tapi juga dalam kehidupan akademiknya. Dari penerimaan mahasiswa saja, kalau Akabri yang melamar 100 diterima 1, PTN 14 melamar diterima 1, IKIP 8 melamar diterima 1, maka IAIN yang melamar 30 tapi tempat tersedia untuk 50 orang. "Jadi banyak yang masuk IAIN bukan karena pilihan utama tapi hanya karena tidak diterima di tempat lain. Kalau begini, kualitas macam apa yang dapat kita harapkan," kata Tarmizi.*

Dengan kemandiriannya, STAIN nantinya dapat leluasa berkembang sesuai dengan dinamika pimpinan, mahasiswa, dan lingkungan masing-masing. STAIN nantinya dapat pula mengembangkan bidang atau program studi unggulan yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan lingkungannya. STAIN Surakarta, misalnya, yang dikenal sebagai wilayah yang masyarakatnya banyak bergelut dengan dunia usaha, bisa saja punya unggalan dalam program studi ekonomi Islam. STAIN Surakarta bukan saja dapat bersaing dengan IAIN Walisongo di Semarang yang selama ini menjadi induknya,

---

*Dalam hal ini Menteri Agama menerbitkan SK tentang revisi Kurikulum IAIN yang kemudian dikenal sebagai Kurikulum 1997. Dirjen Bimbaga Islam A. Malik Fajar yang memimpin revisi itu menegaskan, bahwa dengan revisi itu, kurikulum IAIN menjadi lebih "sederhana" tetapi padat substansi.

tapi juga dapat bersaing dengan Universitas Sebelas Maret, Universitas Muhammadiyah Surakarta dan perguruan tinggi lainnya. "Saya bangga kalau STAIN dapat menyalip IAIN dan perguruan tinggi lainnya. Ini mungkin saja karena peluang dan kesempatan sudah dibuka," ujar Tarmizi.

Abad XXI adalah era Asia Pasifik yang wilayahnya juga mencakup Indonesia. Aspas punya peranan sangat strategis bukan saja ekonomi tapi juga sosio kultural. Karena itu, sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas sangat menentukan untuk menyongsong abad baru itu. Abad XXI punya tantangan berat, terutama buat agama, karena berkembangnya kecenderungan dehumanisasi, despritualisasi, dekadensi moral, industri pornografi dan kriminalitas terorganisasi. "Kalau lembaga pendidikan agama tidak memberi respon yang cepat terhadap perkembangan zaman, maka ia akan terpuruk. Sebagai Menteri Agama, saya tak rela kita terpuruk. Kita harus menghadapi tantangan masa depan, dengan jawaban kelembagaan dan disiplin ilmu. Karena itu saya ingatkan, kita jangan main protes asal-asalan, apalagi dengan memakai kata agama. *Masak* mengubah IAIN, dibilang haram. Apa IAIN mau jadi lembaga pendidikan kelas 3. Ingat, untuk kemajuan saya tak mau mundur dari kebijakan yang sudah ditempuh. Tak ada pilihan, kecuali perubahan agar kita tidak dilalap oleh masa depan," demikian kata Tarmizi.

Pandangan Tarmizi itu sesungguhnya senada dengan Presiden Soeharto yang mengharapkan IAIN dan tentu juga STAIN dapat menjadi pusat kajian Islam yang berprestasi tinggi dan penuh toleransi. Sebagai lembaga pendidikan tinggi, IAIN diminta Kepala Negara harus sanggup menjadi pusat pengembangan ilmu-ilmu keagamaan dan sekaligus ilmu pengetahuan yang disinari nafas keagamaan. Selain itu IAIN hendaknya bukan saja menjadi perguruan tinggi Islam terkemuka di Tanah Air, tapi juga harus menjadi salah satu perguruan tinggi keislaman terkemuka yang sejajar dengan pusat-pusat kajian Islam di negara-negara lain.

Sesuai harapan terakhir Pak Harto itu, Tarmizi telah mendorong seluruh IAIN tampil dalam forum-forum ilmiah tingkat internasional. Selain makin memperbanyak pengiriman tenaga dosen ke luar negeri, IAIN juga diminta memperbanyak kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi terkemuka di luar negeri, seperti Amerika Serikat, Jepang, serta sejumlah negara Timur Tengah, dan Eropa. Dalam

kegiatan bersama bidang kajian hubungan antaragama, misalnya, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mensponsori konferensi internasional tentang Islam-Kristen bersama Temple University dan Hartford Seminary USA, 7-9 Agustus 1997. Tahun sebelumnya, IAIN juga mengadakan kegiatan serupa di Belanda, bekerjasama dengan Leiden University, dan Maroco Unversity.

I. Dana Abadi Terhimpun Berkat Membenahi Haji

Sebagai seorang manajer, Tarmizi sebelum menerapkan kebijakan merasa perlu melakukan kajian dan prediksi. Karena itu, awal menjabat Menteri Agama, 1993, Tarmizi memprakarsai kegiatan Muzakarah Haji Tahun 2000. Kegiatan yang diketuai pengusaha Bob Hasan ini dimaksudkan sebagai antisipasi menghadapi tantangan persoalan haji abad ke-21. Muzakarah ini sudah memprediksikan bakal bertambahnya jumlah calon haji, namun sungguh di luar dugaan, jumlah kuota yang diperkirakan baru terpenuhi awal Pelita VII ternyata sudah terjadi tahun 1994, awal Pelita VI.

Lonjakan drastis jumlah calon haji, sungguh cukup merepotkan jajaran Departemen Agama yang dipimpin Tarmizi. Mengapa? Persoalannya bukan semata tentang pengelolaan pemberangkatan orang banyak ke Tanah Suci tapi juga berkait soal kuota yang ketentuannya dibuat atas kesepakatan negara-negara OKI (Organisasi Konperensi Islam). Tak pelak lagi, awal menjabat Menteri, Tarmizi banyak disorot dalam persoalan haji itu. Kasus pendaftar melebihi kuota, paspor hijau, kesemrawutan pada awal pemberangkatan, dan lain-lain, membuat nama Tarmizi ramai di media massa.

Namun, itulah Tarmizi. Sorotan, kritikan atau kecaman pedas sekalipun, tidak membuat ia bergeming atau *grogi*. Sikapnya yang selalu terbuka dan siap melayani tiap pertanyaan pers, termasuk yang "nakal" sekalipun, tidaklah berubah. Berbagai sorotan kepadanya dijawab dengan berbagai langkah kebijakan yang sifatnya bukan untuk sekadar menyelesaikan masalah sesaat tapi dijadikan kerangka dasar, bagi pemantapan manajemen haji di masa depan.

Langkah Tarmizi yang sangat berarti, antara lain, diterapkannya Sistem Komputer Haji Terpadu (Siskohat) sebagai upaya melancarkan proses pendataan calon haji dan sekaligus untuk memantapkan koordinasi antara Departemen Agama, bank penerima ONH (Ongkos Naik Haji), dan PT Garuda Indonesia. Selanjutnya, Tarmizi memantapkan posisi Departemen Agama sebagai pelaksana dan

koordinator penyelenggaraan haji, mulai dari tingkat II hingga tingkat pusat. Dualisme antara Departemen Agama dan Pemerintah Daerah berhasil dihilangkan, setelah Keppres Nomor 53/1981 dicabut dan diganti dengan Keppres Nomor 62/1995.

Bertambahnya bandar udara untuk pemberangkatan dan pemulangan haji, yaitu Bandara Sepinggan Balikpapan dan Adisumarmo Solo, merupakan terobosan pada era Tarmizi, untuk mengurangi daya tampung Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta dan sekaligus sebagai efisiensi dalam meringankan beban jamaah. Lebih dari itu, berkat hasil diplomasinya dengan pemerintah Arab Saudi, mulai 1997 Tarmizi berhasil meminta dibukanya layanan pembuatan visa haji di Surabaya dan Ujungpandang guna mempercepat penyelesaian visa jamaah.

Yang patut menjadi jadi catatan sejarah adalah, melalui efisiensi pengelolaan dana haji Tarmizi berhasil menghimpun dana abadi yang sampai pada 1997 bisa mencapai sekitar Rp 300 milyar. Dana abadi ini dikelola melalui suatu badan, yang disebut Badan Pengelola ONH Indonesia. BP ONHI resmi dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No 35 tahun 1996. Ketua pelaksana BP ONH adalah Menteri Agama, Sekretaris dipegang Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, pengawas Menteri Keuangan bersama Gubernur Bank Indonesia, dan pelindungnya adalah Presiden Soeharto sendiri.

Dana abadi yang setiap tahun dapat mencapai Rp 50 milyar dari hasil efisiensi ini, bunganya digunakan untuk membantu lembaga pendidikan dan dakwah agama Islam yang dinilai potensial dan layak untuk dikembangkan. Dana ini diharapkan dapat terus berkembang sepanjang masa. Tahun 1996/1997, dana abadi ini telah ikut berperan dalam mendirikan Bayt Al Quran dan Museum Istiqlal di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), serta pembangunan Masjid Agung Surabaya yang luasnya 3 kali Masjid Istiqlal Jakarta.

Timbul pertanyaan, bagaimana mungkin tiba-tiba saja pada era Tarmizi bisa terhimpun dana abadi dari pengelolaan haji? Mengapa masa sebelumnya, dana abadi ini tidak bisa dihimpun? Menurut Tarmizi, ia hanyalah meneruskan petunjuk Presiden Soeharto yang pada awal ia menjabat Menag pernah berujar: "Tarmizi, benahi permainan-permainan yang ada dalam masalah haji." Nyatanya, memang sebelumnya ada yang tak beres dalam pengelolaan dana haji. Misalnya saja, pengeluaran dana ONH hanya ditandatangani oleh Bendahara ONH, tanpa harus diketahui Dirjen Haji, apalagi Men-

teri Agama. Akibatnya, Bendahara ONH kekuasaannya bisa melebihi Dirjen dan terkadang Menteri.

Dana APBN memang yang tanda tangan cukup bendahara karena yang mempunyai uang itu adalah negara. Jika terjadi penyimpangan, negara bisa mencekal orang yang memegang uang tersebut. Sementara dana haji adalah uang rakyat tapi rakyat tidak bisa berbuat lebih daripada negara. Untuk itu, Tarmizi memerintahkan bahwa yang mengeluarkan dana ONH itu harus dua orang, yaitu bendahara ONH dan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji. "Kita bukan malaikat. Masalah uang ini tentu banyak godaannya," kata Tarmizi. Berkat kebijakan ini, pos-pos pengeluaran dana lebih terkontrol dan transparan sehingga bisa diketahui bahwa sesungguhnya ada dana yang terkumpul dari bunga dan hasil selisih pencairan dana kredit yang diberikan Bank Indonesia.

II. Riwayat Hidup

A. Ayah Yang Nasionalis Dan Ibu Yang Religius

Sosok Tarmizi Taher tidak bisa dilepaskan dari kepribadian ayah dan ibunya. Rasa kagum dan hormat Tarmizi terhadap mereka sangat besar. Jika menyinggung masalah kepribadiannya, Tarmizi selalu ingat akan ayah dan ibunya. Ayah Tarmizi adalah seorang yang berjiwa nasionalis dan punya intelektulitas tinggi. Sementara ibu Tarmizi adalah seorang religius yang selalu memperjuangkan *amar makruf nahi munkar* melalui dakwah dan aktif dalam organisasi keagamaan, Aisyiah.

Tarmizi adalah orang yang selalu merasa beruntung mendapatkan rahmat dan kurnia dari Allah. Betapa tidak, ayahnya menginginkan ia menjadi seorang dokter sedangkan ibunya mengharapkan ia menjadi tokoh agama, mubaligh. Kedua keinginan ayah dan ibunya tersebut sudah dipenuhi Tarmizi. Sebagai dokter, nama Tarmizi cukup populer di mata para pasien. Sedang sebagai mubaligh, nama Tarmizi Taher tidaklah asing di mata umat, terlebih setelah ia menjabat Menteri Agama dalam Kabinet Pembangunan VI. Bahkan karena ingin mendapat bea siswa, Tarmizi masuk TNI Angkatan Laut dan berhasil meniti karir dengan pangkat terakhir Laksamana Muda.

Tarmizi Taher sejak kecil hidup dalam keluarga bahagia karena mempunyai orangtua yang terdidik dan berada. Karena itu, Tarmizi dilahirkan tidak di rumah dan tidak pula oleh dukun beranak, tapi

di rumah sakit Ibu dan Anak (IDA)—sekarang menjadi rumah sakit tentara—di kota Padang. Bayangkan saja, orangtua Tarmizi adalah pribumi tapi melahirkan anaknya di rumah sakit. Ini suatu yang masih jarang terjadi pada masa penjajahan.

Tarmizi dilahirkan pada 7 Oktober 1936 dari ayah yang bernama Taher Marah Sutan dan ibu bernama Djawanis. Ia adalah anak kedua dari 7 bersaudara. Kakaknya bernama Tabrani (almarhum), adik-adiknya adalah Kartini, Thamrin, Tanzil, Farida, dan Ledianis. Dari nama-nama saudaranya, terlihat orangtua Tarmizi sangat berjiwa nasionalis sehingga mengaitkan nama anaknya dengan nama tokoh pergerakan. Suatu kebanggaan buat Tarmizi, karena ia sampai kini masih menyimpan catatan tentang masa balita yang dibuat ayahnya. Taher sangat teliti dan cermat dalam mencatat segala sesuatu tentang anak-anaknya. Tanggal Tarmizi dilahirkan, bisa merangkak, kapan tumbuh gigi dan lain-lain ada dalam catatan Taher Marah Sutan.

B. Seorang Nasionalis

Ayah Tarmizi, Taher Marah Sutan, adalah putra satu-satunya dari Tengku Syekh Sabir. Kakek Tarmizi yang berasal dari Batusangkar tersebut adalah seorang ulama yang dikenal pandai berbicara dan selalu memukau saat berceramah sehingga digelari Syeikh Berbulu Lidah. Taher merupakan anak satu-satunya dari ibu yang dinikahi Tengku Syeikh Sabir. Ibu Tarmizi, Djawanis, juga anak tunggal dari ayah dan ibunya.

Saat Tarmizi lahir, usia Taher Marah Sutan sudah 55 tahun, sementara Djawanis masih berusia 20 tahun. Ibu Tarmizi adalah istri kedua, sementara dengan istri pertama Taher Marah Sutan tidak memiliki anak. Kehidupan moderen sudah dialami Tarmizi sejak kecil. Ia memanggil ayahnya papi dan ibunya mami—suatu panggilan yang waktu itu hanya dipakai orang-orang Belanda. Taher Marah Sutan memang tidak mau dianggap bangsa rendah oleh penjajah, karena itu ia juga menyekolahkan anak-anaknya bersama anak-anak Belanda. Kalau bepergian dengan kereta api, Taher pasti memilih gerbong yang diisi orang-orang Belanda. Maksudnya bukan mau menjadi orang Belanda tapi ingin menunjukkan bahwa ia bukan bangsa yang rendah.

Taher Marah Sutan pada zamannya adalah seorang tokoh pergerakan nasional di Ranah Minang dan sangat mendukung perjuang-

an tokoh-tokoh nasionalis. Ketika akan diselenggarakan Kongres Pemuda II pada 1928, Taher Marah Sutan bersama rekannya di Padang ikut mengirim dana sebesar 800 Gulden. Waktu itu, Yamin sendiri menulis surat bahwa kegiatan mereka kekurangan dana. Lantas Taher Marah Sutan mengirim bantuan guna suksesnya kegiatan yang kemudian dikenal sebagai salah satu tonggak sejarah terpenting bagi bangkitnya persatuan dan kesatuan Indonesia.*

Taher Marah Sutan boleh disebut sebagai seorang otodidak. Bangku sekolah hanya sampai kelas 2 SR (sekolah rakyat), tapi Taher Marah Sutan fasih berbahasa belanda. Selain karena memang gurunya adalah orang-orang Belanda, Taher Marah Sutan juga banyak belajar sendiri dan rajin membaca. Koleksi buku-bukunya sangat banyak.

Saat terjadi konflik kaum tua dengan kaum muda di Sumatera Barat, Taher Marah Sutan termasuk kaum muda yang menginginkan adanya kemajuan, kebebasan dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam faham keagamaan, tidak boleh jumud dan taklid buta. Agama juga harus mendorong semangat untuk memperjuangkan bangsa Indonesia lepas dari belenggu penjajahan. Dalam hal ini, Taher banyak mengamati dan mendukung berbagai gerak organisasi sosial dan dakwah seperti Muhammadiyah yang lahir di Yogyakarta.

Selain bergelut dalam dunia pergerakan, Taher juga aktif dalam bidang pendidikan dan hasilnya sampai kini masih ada. Taher ikut berjasa mendirikan Adabiyah, lembaga pendidikan yang sekarang dikenal berkualitas di kota Padang. Sementara itu, dalam memajukan perekonomian bangsa, Taher Marah Sutan bersama teman-teman memiliki *veem* (perusahaan)—Syarikat Usaha yang bergerak di bidang perdagangan dan pelayaran. Taher menilai ekonomi rakyat perlu ditingkatkan bersama dengan pendidikan sehingga rakyat tidak terjerat kemiskinan dan kebodohan. Nama syarikat usaha ini

---

*Lihat Sutrisno Kutoyo, *Prof. Mohamad Yamin* (Jakarta: Depdikbud, 1975), hal. 32. Lebih jauh tentang peran Taher Marah Sutan dan pengusaha Minang lainnya dalam gerakan Islam dan nasionalisme Indonesia, lihat Azyumardi Azra, "Peran Pengusaha Muslim dalam Kebangkitan Kaum Muda di Minangkabau" (akan terbit).

TARIKAH, singkatan dari Taher, Marjukan, Rustam dan Yahya. Rustam itu adalah Rustam Effendi, tokoh pergerakan nasional, sedangkan Yahya adalah ayah dari Adel Yahya.

Taher Marah Sutan pernah bekerja di perusahaan Belanda yang bergerak di bidang pengangkutan perkapalan dan perdagangan. Kemudian ia juga bergelut dengan koperasi dan dunia perbankan. Taher ikut mendirikan koperasi Inkorba dan Bank Nasional, bank pribumi pertama di Indonesia dan kini masih tetap berdiri. "Kalau ada peringatan ulang tahun Bank Nasional, maka orang bank tersebut melakukan ziarah ke makam para pendiri bank, termasuk makam ayah saya," tutur Tarmizi. Taher juga pernah bekerja di Bank Muslimin Indonesia di Bukittinggi, tapi sayang sekarang bank tersebut sudah tidak ada lagi.

Taher Marah Sutan menanamkan semangat kebangsaan, semangat belajar dan menuntut ilmu setinggi-tingginya kepada anak-anaknya. Sikap mental pejuang, mandiri, tidak merendahkan diri dan martabat, sudah ditanamkan sejak dini. Taher tidak suka anaknya menjadi seorang penghamba, bermental anak jajahan. Bagi Taher, semua manusia punya derajat yang sama dari manapun suku dan bangsanya. Semangat nasionalisme juga diajarkan Taher kepada Tarmizi dengan menyuruhnya mendengarkan pidato para pemimpin nasional pada masa perjuangan fisik tahun 1947-1950. Taher bangga jika anak-anaknya berhasil, tapi ia tidak mau memuji langsung saat anak-anaknya mendapat suatu penghargaan atau berhasil dalam melakukan sesuatu. Hal ini agar anak tidak menjadi orang yang sombong atau sok pintar.

Masa kecil Tarmizi diarahkan untuk banyak belajar di sekolah dan karena itu Taher Marah Sutan tidak suka anaknya mencari uang saat masih sekolah dasar. Ketika masih SD, Tarmizi pernah mencoba mendapatkan pengalaman kerja di sebuah pabrik rokok sebagai penggulung rokok. Mengetahui anaknya bekerja, Taher Marah Sutan mengadukan perusahaan rokok tersebut ke polisi karena telah mempekerjakan anak di bawah umur. Sementara ketika di SMP, Tarmizi sempat pula dijadikan tenaga pengambil bola tenis saat para guru bermain tenis. Hal ini dinilai Taher Marah Sutan sangat tidak mendidik karena memperlakukan murid sebagai suruhan atau pembantu. Lantas ayah Tarmizi berkirim surat ke sekolah, mengingatkan sang guru bahwa harga sebuah kemerdekaan sangatlah mahal dan karena itu jangan jadikan murid-muridmu sebagai budak.

C. Pengaruh Ibu

Masa kecil bagi Tarmizi Taher adalah masa yang paling dekat bersama ibunya. Ibu Tarmizi, Djawanis—yang dalam bahasa Arab berarti "wanita Jawa"—sering membawa Tarmizi saat berdakwah ke sejumlah tempat. Sebagai seorang mubalighah dan sekaligus menjadi Ketua Aisyiah, Djawanis banyak diundang untuk ceramah agama. Tarmizi kecil sering tertidur di belakang podium, saat sang ibu tengah menyampaikan seruan *amar makruf nahi mungkar*. Kenangan terhadap ibunya inilah yang sangat membekas di hati Tarmizi, agar suatu waktu kelak ia bisa pula mendalami agama Islam dan menjadi juru dakwah seperti ibunya.

Kedekatan Tarmizi dengan ibunya sampai kini masih menjadi kenangan baginya. Tarmizi sungguh merasa bahagia, saat ia menginjakkan kakinya di Departemen Agama sebagai Sekjen, ibunya masih sempat menyaksikannya. Sama dengan ayahnya, ibu Tarmizi, selain sebagai mubalighah, juga seorang intelektual yang menginginkan anaknya selalu belajar menambah ilmu pengetahuan. Karena itu, untuk mengenang sang ibu, Tarmizi menjadikan rumah ibunya di Padang Panjang sebagai perpustakaan yang terbuka untuk umum.

Suasana kehidupan keagamaan sudah dialami Tarmizi kecil dalam lingkungan keluarga, terutama dari ibunya. Tarmizi masih ingat dan sampai kini menjadi kebiasaannya, yaitu kalau hendak melangkah selalu mendahulukan kaki kanan. Guna lebih mendalami ilmu agama, orangtua Tarmizi mengundang guru mengaji untuk pendidikan agama anak-anaknya. Guru mengaji yang didatangkan ibunya ke rumah dipilih yang baik. Tarmizi masih ingat bahwa gurunya, yang dipanggil Pak Yunif, pernah tinggal di Timur Tengah. Dengan demikian, Tarmizi mendapatkan ilmu agama di luar sekolah formal, karena ia tidak pernah sekolah di madrasah atau pesantren. Karena itu sampai saat ini, Tarmizi tak mau mendaulat dirinya sebagai seorang kiyai atau ulama dan lebih senang mengaku sebagai seorang mubaligh, juru dakwah.

Tidaklah aneh kalau sekarang Tarmizi Taher juga dikenal sebagai seorang mubaligh dan terlihat cukup lihai berbicara di atas mimbar. Kebolehan Tarmizi dalam berbicara di mimbar bukan saja karena turunan dari sang ibu tapi juga berkat pengalaman sejak kecil. Pada masa kanak-kanak, Tarmizi sudah pernah unjuk kebolehan berpidato di depan orang dewasa. Waktu itu di salah satu kampung dari Padang Panjang, orang yang seharusnya memberi ceramah berha-

langan hadir. Padahal warga sudah banyak yang berdatangan sehingga membuat resah panitia. Kepala kampung mencoba ikut berpidato tapi tidak menarik perhatian hadirin. Untuk menenangkan keadaan, Tarmizi yang dikenal anak ibu Djawanis, mubalighah populer saat itu, didaulat untuk berpidato. Tarmizi mau saja, walau di podium ia harus berdiri di atas bangku agar wajahnya bisa terlihat. Ternyata pidato Tarmizi kecil lebih mengundang tepuk tangan ketimbang pidato sang kepala kampung. Di sekolah dasar pun Tarmizi juga pernah tampil berpidato, membawakan tema tentang kemerdekaan dan kebangkitan nasional. Pidato Tarmizi yang teksnya dibuat oleh guru itu juga mendapat banyak pujian karena mampu menggugah hadirin.

Tarmizi Taher mengaku bahwa dirinya pada masa kecil termasuk nakal karena suka berkelahi. Namum meski suka berkelahi, sejak kanak-kanak Tarmizi sudah terlihat cerdas dan cerdik. Sejak kelas 1 SD, usia 7 tahun, Tarmizi satu kelas dengan kakaknya (Tabrani) yang beda usia 1 tahun. Pendidikan SD, ditempuh Tarmizi pada 1943 sampai 1949 di tiga tempat. Pada 1945, Tarmizi sekolah di Padang, tempat sekolahnya Mohammad Yamin. Ketika perang meletus di Padang, 1946-1947, Tarmizi dan keluarga pindah ke Padang Panjang.

Cerita masa kecil Tarmizi di Padang Panjang masih bisa didapatkan dari guru SD-nya yang walau sudah sepuh sampai sekarang masih hidup; yaitu Ibu Reno Gudam. Setiap berada di Padang Panjang, Tarmizi selalu menjenguk guru SDnya tersebut, termasuk setelah menjabat Menteri Agama. Ibu Reno Gudam memang mengakui bahwa Tarmizi seorang anak yang cerdas. Kecerdasan itu bukan sekadar pengakuan tetapi dibuktikan dengan predikat juara kelas. Malah waktu tamat SD, Tarmizi menjadi juara I tingkat Kabupaten Tanah Datar (waktu itu termasuk Padang Panjang).

Tarmizi menempuh Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada 1949-1952. Awal SMP Tarmizi di Padang Panjang, kemudian pindah ke Jakarta dan duduk di bangku SMPN 4 yang kini terletak di Jl Perwira, samping gedung Departemen Agama Pusat, Lapangan Banteng. Lingkungan sekolah Tarmizi di Jakarta kebetulan selalu berdekatan dengan tempat ia memimpin Departemen Agama sekarang. Tamat SMP 4, Tarmizi masuk SMAN 1 (1952) di Jl Budi Utomo yang juga tidak jauh dari Lapangan Banteng. Sejak dulu SMAN 1 memang sudah dikenal sebagai sekolah favorit dan bersa-

ing dengan SMAN 2 di Jl Batu, Gambir, Jakarta Pusat.

Saat berada di Jakarta, Tarmizi pernah bertemu Bung Hatta yang waktu itu menjabat Wakil Presiden. Tarmizi bisa bertemu Bung Hatta bersama ayahnya. Saat itu Taher Marah Sutan mendapat serangan *stroke* di Padang. Bung Hatta yang mendengar Taher sakit langsung memintanya untuk berobat ke Jakarta. Kepada Tarmizi, Taher menasihati supaya meneladani Bung Hatta—seorang nasionalis yang berkepribadian religius, berdisplin tinggi dan seorang intelektual kawakan. Hatta diakui oleh Taher sebagai orang yang teguh pada pendirian, sangat kukuh dan gigih memperjuangkan cita-cita bangsa dan negara Republik Indonesia. Sampai-sampai Hatta hanya mau menikah bila bangsa Indonesia sudah lepas dari penjajahan dan negara RI sudah terwujud. Tekad Hatta itu memang ia buktikan.

Tarmizi mengakui bahwa ia pengagum Bung Hatta. Selain soal disipilinnya yang tinggi, Tarmizi banyak dipengaruhi Bung Hatta dalam hal kecintaan pada buku. Bung Hatta hidupnya selalu bersama buku. Saat dalam pengasingan pun, buku tidak pernah lepas dari Bung Hatta. Kecintaan Bung Hatta pada buku itu sama dengan Taher Marah Sutan.* Ayah Tarmizi dekat dengan buku karena sekolah formalnya hanya sampai SR kelas II dan untuk menambah ilmu dan kepandaian hanyalah melalui buku. Kini Tarmizi pun ketularan kebiasaan ayahnya dan Bung Hatta, yaitu di manapun ia berada, buku selalu ada di sampingnya. Mobil B-33 yang sehari-hari ia pergunakan juga selalu penuh dengan buku, ibarat suatu perpustakaan kecil yang selalu menyertainya.

Tarmizi tinggal di Jakarta bersama paman, Ahmad Syafei, di daerah Kwitang Jakarta Pusat. Dari pamannya, Tarmizi diajari untuk jujur dan berani berterus terang. Ahmad Syafei waktu itu bergerak dalam bidang percetakan. Ketika ia harus memimpin Percetakan Rahman Tamin di Surabaya (1955), keluarga, termasuk Tarmizi, diboyong ke kota Pahlawan tersebut. Tarmizi lantas masuk SMA 2, Jl Wijaya Kusuma, kelas III.

Di SMA 2 Surabaya ini, Tarmizi berteman dengan Try Sutrisno (kini Wakil Presiden RI). Keduanya satu sekolah, hanya beda kelas;

---

*Lebih jauh tentang hubungan Taher Marah Sutan dan Hatta, lihat, Azra, "Peran Pengusaha Muslim".

Tarmizi kelas III B-5 dan Try Sutrisno kelas B-2. Sama dengan SMA 1 Budi Utomo Jakarta, SMA 2 Wijaya Kusuma Surabaya juga sekolah favorit, bahkan Bung Karno sendiri juga pernah belajar di sekolah tersebut. Tamat SMA, Tarmizi dan Try berpisah, karena Tarmizi melanjutkan ke Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, sedangkan Try Sutrisno masuk Atekad (Akademi Teknik Angkatan Darat) di Bandung.

D. Menjadi Mubaligh

Tarmizi Taher boleh disebut sebagai satu-satunya Menteri Agama selama masa Orde Baru yang paling banyak tampil di masjid sebagai khatib Jumat, bahkan tampil jadi khatib pada Idul Fitri atau Idul Adha. Bagi Tarmizi, menjadi khatib Jumat, termasuk saat melaksanakan kunjungan kerja ke daerah, sudah merupakan kebiasaan sejak sebelum menjabat Menteri Agama. Malah boleh dikata, tugas sebagai khatib adalah salah satu bagian dari profesinya sebagai mubaligh. "Saya ini dokter, bukan ulama. Tapi, disebut mubaligh, yah boleh juga," ucapnya.

Semasa kuliah di FK Unair, selain aktif dalam aktivitas kampus, kebiasaan masa kecil Tarmizi Taher masih tetap berlangsung, yaitu terus mempelajari agama secara sendiri dengan membaca buku-buku agama. Masalah agama makin ia perdalam setelah masuk TNI Angkatan Laut, tingkat IV FK Unair (1960). Tarmizi banyak didorong belajar agama karena pengaruh bunyi ayat-ayat al-Quran yang sarat dengan makna dan menyuruh manusia untuk terus menafsirkan, menggunakan akal dan fikiran untuk mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah.

Ayat yang berbunyi *iqra bismirabbikalladzi khalaq khalaqal insaana min 'alaq*, misalnya, sempat mengusik jalan pikiran Tarmizi sebagai seorang calon dokter. Kata *'alaq* dalam ayat al Quran itu, sering diterjemahkan sebagai segumpal darah. Apa ini betul? Ternyata yang dimaksudkan *'alaq* adalah sesuatu yang menempel di dinding rahim atau kini disebut *ovum* yang dibuahi oleh sperma dan memang menempel di dinding rahim.

Tarmizi makin banyak belajar agama, setelah tanpa disangka ia disuruh menggantikan Buya Ghafar Ismail menyampaikan khutbah Idul Adha di Masjid Mujahidin Surabaya, 1965. Waktu itu Buya Ghafar, ayah penyair Taufiq Ismail, yang seharusnya menjadi khatib berhalangan hadir dan meminta Tarmizi menggantikannya. Per-

mintaan Buya Ghafar ini mirip dengan pengalaman masa kecil Tarmizi, ketika di kampung ia disuruh berpidato karena penceramah yang sesungguhnya tidak bisa hadir. Akhirnya Tarmizi tampil juga jadi khatib dan ia tidak mengecewakan khalayak, meski Buya Ghafar saat itu sudah dikenal sebagai mubaligh *kondang*. Sampai kini, Tarmizi masih ingat pesan Buya Ghafar, yaitu "kita jangan cepat puas dengan apa yang sudah didapat."

Guru agama lainnya yang sangat mempengaruhi Tarmizi dalam ilmu agama adalah Umar Hubeys yang saat itu telah menjadi Ketua Umum al-Irsyad. Ketika itu, Tarmizi sudah dinas di Angkatan Laut, di Morokrembangan, Surabaya. Dari Umar Hubeys, yang sekarang anak-anaknya semua profesor, Tarmizi belajar Tafsir al-Quran. Selama beberapa tahun, setelah shalat subuh ia langsung keluar rumah. Dalam perjalanan ke kantor, ia menyinggahi Umar Hubeys untuk belajar agama. Waktu belajarnya sekitar 05.00-06.30 dan pada pukul 07.00 Tarmizi sudah berada di kantornya di Angkatan Laut. Belajar Tafsir Qur'an ini dilakukan Tarmizi antara 1965-1968.

Ilmu agama yang didapat Tarmizi semasa kecil dan kemudian ia tekuni terus setelah perguruan tinggi dan masa awal di TNI Angkatan Laut, ternyata telah mengarahkan aktivitasnya ke dunia dakwah. Ia sering diminta tampil memberikan ceramah agama di lingkungan TNI AL. Saat dalam pelayaran, ikut dalam kapal perang RI sebagai Kepala Departemen Kesehatan, Tarmizi pernah punya pengalaman mendampingi para jamaah haji. Tepatnya saat ia mengikuti KRI Halmahera (1964-1965) yang mendapat tugas membawa jemaah haji ke Tanah Suci.

Walau awalnya sibuk dalam dunia kesehatan TNI Angkatan Laut, pada pertengahan karirnya Tarmizi juga melibatkan diri dalam masalah pembinaan mental personil ABRI. Bicara soal pembinaan mental, tentu tidak lepas dari masalah pembinaan agama dan ini berarti ilmu agama yang didalami Tarmizi sebelumnya sangat membantu dalam melaksakan tugasnya. Tahun 1979-1980, Tarmizi malah dipercaya sebagai Kepala Dinas Pembinaan Mental TNI AL. Dinilai sukses, Tarmizi lantas diangkat sebagai Wakil Kepala Pusat Pembinaan Mental (Pusbintal) ABRI (1979-1980) dan kemudian menjadi Kepala Pusbintal ABRI (1982-1987).

Di luar dinas ABRI, pada 1972-1976, Tarmizi menjabat Ketua I PTDI (Pendidikan Tinggi Dakwah Islam) DKI Jakarta. Lembaga pendidikan Islam yang pengurus pusatnya saat itu diketuai Letjen

TNI Sarbini ini banyak berkecimpung dalam meningkatkan pendidikan umat Islam. Keaktifan Tarmizi di PTDI sudah dimulai ketika masih berada di Surabaya. Tahun 1966-1968, Tarmizi menjadi Ketua Bidang Pendidikan dan Organisasi PTDI Jawa Timur, sementara Ketua Umumnya dipegang Mayjen TNI M. Anwar.

Saat berkecimpung dalam dunia pembinaan mental ABRI, nama Tarmizi Taher sudah banyak dikenal masyarakat luas. Selain tetap melaksanakan profesi dokter, Tarmizi banyak pula menyampaikan ceramah agama di luar lingkungan ABRI. Berbagai masjid dan tempat kegiatan keagamaan dikunjungi Tarmizi. Nama Tarmizi sudah terjadwal pada sejumlah masjid besar di DKI Jakarta, sebagai khatib Jumat, pemberi ceramah Ramadhan, kuliah subuh, dan juga khatib Idul Adha dan Idul Fitri. Salah satu masjid langganan Tarmizi sebagai khatib Jumat, adalah Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tarmizi juga aktif dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak 1979. Pada periode 1985-1990 ia menjadi salah satu Ketua MUI Pusat.

Tarmizi merasa patut bersyukur ke hadhirat Allah SWT karena dalam profesinya sebagai dokter dan tentara di Angkatan Laut, ia bisa pula mengabdikan diri sebagai mubaligh, juru dakwah, sebagaimana ibunya dahulu. Karena itu, dalam berbagai kesempatan pertemuan dengan umat dan ulama, Tarmizi menyatakan bahwa ia tidak akan merasa pensiun setelah tidak lagi menjabat Menteri Agama. Menurutnya jabatan boleh copot, namun Insya Allah, profesi sebagai mubaligh akan tetap ia jalani sampai akhir hayat.

E. Mengutamakan Kehidupan Keluarga

Dalam setiap pertemuannya dengan banyak kalangan, termasuk di masjid, Tarmizi selalu mengangkat tema pembicaraan tentang pentingnya pembinaan kehidupan keluarga. Bagi Tarmizi, membina kehidupan masyarakat, bangsa dan negara harus dimulai dari keluarga. Tarmizi berkeyakinan, lewat pembinaan keluarga segala tantangan hidup dalam zaman modern atau globalisasi ini akan mudah dihadapi. Sikap dan keyakinan Tarmizi itu bukan sekadar ia ucapkan tapi benar-benar ia praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Tarmizi memang sering menunjukkan rasa bangga dengan kehidupan keluarganya. "Alhamdulillah, saya bersyukur kehidupan keluarga saya dapat saya bina," kata Tarmizi.

Ucapan Tarmizi tersebut dibenarkan istri dan anak-anaknya. Ny

Djoesma Tarmizi, mengakui bahwa suaminya sangat peduli dengan perkembangan anak-anaknya. "Baik jasmani maupun rohani anak-anak, selalu Bapak perhatikan. Bapak benar-benar menginginkan anak-anaknya menjadi orang yang terpelajar, intelek, tapi tetap tidak lepas dari kehidupan agama," kata Ny Djoesma, putri Ranah Minang kelahiran 13 Juli 1940 ini.

Menurut Ny Djoesma, penanaman disiplin dan akhlak terhadap anak-anak sangat ditekankan dalam kehidupan keluarganya. Sejak dini, Tarmizi selalu membiasakan shalat berjamaah bersama istri dan anak-anak di rumah. "Kedekatan hubungan keluarga terus dipelihara, termasuk sekarang walau anak-anak ada yang sudah menikah," kata Ny Djoesma lagi. "Bapak itu, lebih banyak memberi teladan dari pada memberi nasihat kepada anak-anak-nya. Soal belajar tekun, misalnya, anak-anak bisa belajar dari hobi bapak membaca," tambah Ny Tarmizi.

Keempat anak Tarmizi, yaitu Afgan (lahir di Surabaya, 16 September 1965), Sakina (Surabaya, 10 Oktober 1966), Halbana (Tanjung Pinang, 19 Nopember 1968), dan Diegantoro (Jakarta, 13 Januari 1974), semua berpendidikan tinggi. Afgan dan Halbana menempuh pendidikan tinggi di Jerman, Sakina di Jakarta, dan yang bungsu di Fakultas Ekonomi UI. Dari perkawinan Sakina dengan dr. Eka Swabhawa Uttama, putra dr. Ngesti Oetomo, Tarmizi-Djoesma dikaruniai dua orang cucu. Sementara Halbana baru saja menikah dengan Santi Budiasih, putri Dr. dr. Salamun.

Tarmizi mengaku, sebagai Menteri Agama dan juga sebagai pembina Dharma Wanita unit Departemen Agama, ia tidak pernah langsung melakukan pembinaan. "Saya hanya bisa membina istri dan anak-anak saya," ucapnya. Maksud Tarmizi, para ibu-ibu, istri pegawai negeri, jangan gara-gara sibuk aktif dalam Dharma Wanita melupakan keluarga. "Jangan aktif di Dharma Wanita karena ingin suami cepat naik pangkat, naik jabatan. Binalah keluarga, anak-anak, agar suami tenang bertugas," kata Tarmizi.

F. Praktik Dokter Sambil Belajar Soal Pembauran

Ketika suatu saat terdengar berita bahwa Tarmizi hendak berkunjung ke Tanjung Pinang, A Hok, seorang warga keturunan Cina di sana, menelepon Ny Djusma Tarmizi, menanyakan tentang kebenaran berita tersebut. "Ibu, apa pasti Bapak Tarmizi datang? Apa yang diperlukan, biar saya sediakan semuanya," kata A Hok. Apa

yang dikemukakan A Hok bukanlah basa-basi dan bukan pula untuk maksud-maksud tertentu terhadap seorang pejabat negara. A Hok merasa perlu menelepon ke rumah Menag Tarmizi karena sudah lama tak berjumpa dan ingin menjamu seorang yang punya hubungan dekat.

A Hok adalah salah satu dari sekian banyak warga keturunan di Tanjung Pinang, Riau, yang punya hubungan akrab dengan Tarmizi Taher. Ketika Tarmizi dan istri berkunjung ke Tanjung Pinang, pertengahan Ramadhan 1417 H/1997, yang menyambut tak hanya para pejabat setempat tapi sebagian adalah warga keturunan. Tanpa banyak penghormatan, warga keturunan ini menyalami Tarmizi. Baik Tarmizi maupun istri ternyata juga mengenal mereka. "Saya masih sehat, sekarang sudah punya cucu," ucap Hanning, seorang ibu tua, kepada Ny Djusma. Rupanya A Hok, Hanning, dan sebagian warga keturunan lainnya, adalah bekas pasien Tarmizi, saat ia berada di Tanjung Pinang antara 1968-1972. "Pasien saya paling banyak orang keturunan Cina. Saya banyak menguasai masalah Cina tak lain karena banyak bergaul dengan orang Cina di Tanjung Pinang," ucap Tarmizi.*

Tarmizi adalah alumni Fakultas Kedokteran Unair Surabaya, 1964. Dalam kesatuannya di TNI Angkatan Laut, Tarmizi pernah menjabat Kepala Rumah Sakit TNI AL Dr. Midiyato S di Tanjung Pinang. "Tanjung Pinang adalah kampung halaman kedua saya," kata Tarmizi. Jadi, kehadiran Tarmizi di Tanjung Pinang, 1997, boleh disebut sebagai nostalgia. Terlebih lagi ia berkesempatan meninjau Rumkit Midiyato yang pernah dipimpinnya 18 tahun lalu. Beberapa orang pegawai masih mengenal Tarmizi.

Saat berceramah di depan jemaah Masjid Al Hikmah, Tarmizi mengatakan, kalau mau melihat kota pembauran yang baik maka datanglah ke kota Tanjung Pinang. Di kota ini, hubungan pribumi dan nonpribumi begitu dekat walau di antaranya masih ada perbedaan, baik etnis, agama maupun kehidupan sosial ekonomi. Warga

---

*Pengalaman ini mendorong Tarmizi untuk mendalami masalah Cina, sehingga ia sering memberikan makalah pada berbagai kesempatan, seperti kursus Lemhanas. Pemikiran Tarmizi tentang ini dituangkan secara lebih rinci dalam, *Masyarakat Cina*.

keturunan di kota ini hidup membaur secara alami. Mereka umumnya para pedagang, tapi tidak semuanya dalam kehidupan yang berkecukupan. "Pasien saya orang Cina ada juga yang berobat gratis. Soalnya memang ia tidak punya uang karena dari kalangan tak mampu," kata Tarmizi.

Tarmizi banyak punya cerita tentang keakraban hubungan warga keturunan Cina dengan penduduk asli dan dikaitkan dengan kerukunan beragama. Seorang keturunan Cina, lanjut Tarmizi, yang tinggal di dekat tempat praktiknya saat di Tanjung Pinang, menyatakan tidak ada masalah soal suara azan Subuh yang terdengar dari pengeras suara di masjid. "Saya senang tinggal dengan orang Islam," ucap warga keturunan itu kepada dr. Tarmizi. Alasannya, azan Subuh itu justru membantu ia bangun pagi. Mendengar itu Tarmizi lantas menyuruh pasiennya itu mau membantu warga setempat, yaitu ikut mencat masjid. "Dengan senang hati, orang Cina itu membantu membelikan cat buat masjid. Padahal ia bukan orang Islam. Kalau orang Cina dibangunkan oleh azan Subuh untuk bekerja, berbisnis mencari uang banyak, orang kita malah habis Subuh banyak yang tidur lagi," kata Tarmizi.

Menurut Tarmizi, pembauran yang berhasil adalah bila para pendatang (warga keturunan) bisa menyatu secara total dengan warga setempat. Apalagi bila ada perasaan senasib dan sepenanggungan, tidak ada masalah dalam hal pri dan nonpri. Kerjasama antara warga keturunan dan kalangan pribumi harus selalu dilaksanakan. Eksklusifisme harus dihindarkan agar jangan sampai perbedaan sosial ekonomi menumbuhkan kecemburuan karena tidak adanya perasaan kebersamaan sebagai warga negara Indonesia.

Tarmizi mengatakan, majunya orang keturunan Cina dalam masalah ekonomi sebenarnya tidak perlu menimbulkan kecemburuan atau iri hati yang sampai mengarah kepada sentimen SARA. Hal ini karena sejak lama, Cina perantauan dikenal sebagai orang-orang yang ulet dan menguasai ilmu dan praktik dagang. "Dari sejarah saja, kita bisa tahu bahwa pada zaman Belanda, orang Cina sudah berkiprah luas dalam bidang ekonomi. Orang Belanda, dalam memajukan ekonomi atau meningkatkan pendapatan mereka sebanyak-banyaknya, selalu mengandalkan orang keturunan Cina."

Tampaknya, lanjut Tarmizi, memajukaan dunia ekonomi tanpa sentuhan dari warga keturunan Cina, seperti tidaklah mungkin.

Hampir semua negara maju, baik di Asia, Eropa dan bahkan Amerika, selalu melibatkan orang keturunan Cina dalam kehidupan ekonomi mereka. "Apalagi di Tanah Air kita, warga keturunan tampaknya memang paling banyak berorientasi ke dalam dunia bisnis. Sedangkan pribumi, bahkan generasi mudanya, menurut penelitian LIPI, umumnya banyak ingin jadi pegawai negeri atau ABRI. Zaman Belanda dulu, orang kita juga senang jadi pegawai, priyai," kata Tarmizi.

Pandangan Tarmizi tentang masalah pembauran, terutama dengan mengambil contoh kondisi di Tanjung Pinang, terlihat jadi menarik, terlebih dengan munculnya berbagai peristiwa kerusuhan, seperti Situbondo, Tasikmalaya, Rengasdengklok, Pontianak, dan terakhir Banjarmasin. Semangat pembauran tampaknya perlu lebih dimasyarakatkan lagi. Tarmizi dalam berbagai kesempatan banyak mengangkat cerita tentang keuletan dan semangat berusaha warga keturunan. Sementara warga keturunan hendaknya sebagai warga negara Indonesia, harus mau peduli dengan kehidupan saudara-saudaranya yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Kalau tidak ada kepedulian, hanya mau maju atau berhasil sendiri, itu sama artinya dengan hidup ingin eksklusif. Kalau mau eksklusif, berarti hanya akan menimbulkan kecemburuan yang buntutnya bisa mengait pada agama dan selanjutnya akan memicu konflik yang berbuntut keresahan dan kerusuhan sosial. "Bila timbul kerusuhan, apalagi berbau SARA, yang rugi kita semua," ujar Tarmizi.

Tarmizi memang sangat menyenangi profesinya sebagai dokter. Setiap ia praktik pasti ramai dikunjungi pasien. Sikapnya yang memberi keringanan kepada orang-orang tak mampu, termasuk juga buat tokoh-tokoh agama (ulama, pendeta, pastur, bikhu), membuat namanya cukup populer di kalangan para pasien. Banyaknya warga keturunan Cina yang berobat kepadanya adalah berkat promosi pasien sendiri. "Ketika saya di Tanjung Pinang, para suhu di klenteng yang jadi pasien banyak mempromosikan saya. Rupanya, orang Cina itu kalau ke klenteng juga bertanya kepada suhu tentang tempat berobat yang manjur. Jadi, para bikhu yang jadi pasien saya menyuruh jemaahnya berobat kepada dukun Tarmizi. Lukun itu sama dengan tabib atau dokter," tambah Tarmizi

Tarmizi masih praktik dokter saat menjabat Sekjen Depag, yaitu pada perusahaan kontraktor minyak dari Prancis. Ketika menja-

bat Kapusbintal ABRI, selain berdakwah Tarmizi juga disibukkan oleh pasien yang ingin berobat. Jumlahnya bisa mencapai 90 orang per hari. Setelah makin sibuk dalam tugas di ABRI, juga berdakwah sehingga jam praktiknya sering digantikan dokter lain, jumlah pasien Tarmizi semakin menurun. Namun ada juga pasien yang fanatik. Dari Duren Sawit ia mencari Tarmizi ke Pondok Labu hanya ingin berobat.

Dalam aktivitas sosial kemasyarakatan, terlebih dalam mengemban tugas sebagai pejabat, Tarmizi masih banyak memakai pola pikir dan pola kerja seorang dokter. Kebetulan ia ahli dalam bidang pencegahan. "Dalam masalah pencegahan, saya melihat pola pikir sebagai dokter. Lalu saya beri batasan. Kemudian saya melihat gejala-gejalanya, apa yang menjadi diagnosanya. Saya tidak mau mendadak, harus teliti, sehingga nanti kita dapat membuat apa terapi kita. Jadi pola pikir kita sebagai seorang dokter, cukup banyak bisa dipakai dalam menghadapi masalah-masalah bangsa dalam politik," ucapnya.

G. Berbagai Pengalaman Yang Pernah Dijalani

Sebagai dokter, Tarmizi pernah aktif dan menjabat Ketua II Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Surabaya (1966-1968) dan Ketua I Pengurus Besar PPTI (Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosa Indonesia (1973-1979). Boleh dikata, karir Tarmizi baik sebagai dokter maupun tentara, dan bahkan mubaligh, terlihat saling menunjang. Dari karir sebagai dokter, Tarmizi berkesempatan menambah ilmu, antara lain mengikuti Medical Observership, US Naval Hospital San Diego (1972-1973) dan Study for Senior Medical Officer US Navy, Washington (1975). Sementara pendidikan dalam militer yang diikuti adalah Latihan Kilat Militer PPKD Surabaya (1960), Latihan Kemiliteran Pertama Sispa XIII Kobangdikal/AAL Surabaya (1965/1966) serta Sekolah Staf dan Komando (Sesko) ABRI Bagian Laut II 1976/1977.

Adapun karir dalam jajaran TNI AL/ABRI, Tarmizi menapaknya mulai dari menjabat Kepala Departemen Kesehatan KRI Irian (1964/1965), Kepala Kesehatan Denma Armada (1965), Kesehatan KRI Halmahera (membawa jemaah haji) (1965/1966), Kepala Kesehatan Kojenjelru (1965-1968), Kepala Kesehatan Daeral-2 (1968-1972), Kepala Bagian Kesehatan Preventif Diskesal (1972-1974), Ketua Pelaksana Keluarga Berencana TNI AL (1973-1976), Asisten Operasi

Diskesal (1975-1976), Asisten Pembinaan Jankesal (1976-1978), Kadisbintal TNI AL (1979-1980), Wakil Kepala Pusbintal ABRI (1980-1982) dan Kepala Pusbintal ABRI (1982-1987).

Tarmizi pernah menghadiri Cancer Society Meeting California (1973), mewakili TNI AL pada Seventh Asian's Occupational Conference, perwira Proyek Trial Rimactawe ABRI (kerjasama Hankam, Depkes, Ciba Geigy Swiss) dan Ketua Delegasi ke Kongres TBC Dunia di Brussel (1978). Selain itu Tarmizi pernah pula menjabat anggota Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara' (1979-1987). Sementara masuk dalam Fraksi ABRI, Tarmizi duduk sebagai anggota MPR periode 1978-1982 dan 1982-1987.

Saat di FK Unair, Tarmizi pernah aktif dalam kegiatan media kampus. Oleh karena itulah, di sela-sela kesibukannya Tarmizi suka menulis baik mengenai dunia kedokteran maupun masalah keagamaan yang sering dimuat sejumlah media massa. Harian Suara *Pembaruan* dan *Suara Karya*, misalnya, pada saat Tarmizi menjabat Sekjen Depag, sering memintanya menulis untuk menyambut hari-hari besar Islam. Secara khusus Tarmizi menulis karangan kesehatan dan pendidikan mental untuk majalah *Angkatan Bersenjata* Kepulauan Riau (1968-1972).

Berbagai penghargaan dan tanda jasa telah diperoleh Tarmizi. Tanda jasa itu antara lain Satyalencana Penegak, Satyalencana Kesetiaan VIII Tahun, Satyalencana Dwikora, Jalasena Naraya, dan Bintang Mahaputra Adipradana.

H. Aktifis Kampus Yang Tegas Menghadapi Komunis

Tarmizi adalah orang yang kenyang berorganisasi. Ia mantan aktivis kampus dan termasuk tokoh Angkatan 66. Saat menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya (1956-1964), ia pernah menjabat Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (1962/1963), Ketua Senat Mahasiswa dan Ketua I Dewan Mahasiswa Unair (1963/1964). Bersamaan dengan itu, karena sudah masuk TNI Angkatan Laut, Tarmizi juga menjabat Ketua Pelajar Calon Perwira Angkatan Laut (1963).

Sebagai aktivis, Tarmizi adalah seorang tokoh mahasiswa yang sangat anti komunis/PKI dan karena itu ia termasuk orang yang gigih dalam operasi penumpasan Gerakan 30 September/PKI. Saat pertemuan dewan-dewan mahasiswa se-Indonesia di Malino, Sulawesi Selatan, 1964, Tarmizi gigih membela rekan-rekannya yang

berasal dari HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) dalam berhadapan dengan CGMI (Central Gerakan Mahasiswa Indonesia) yang dekat dengan PKI. "Tarmizi selain ketua dewan juga adalah tentara. Ia pernah mengancam akan menembak para mahasiswa PKI kalau berani berbuat macam-macam kepada saya. Ini saya harus akui, Tarmizi itu sangat keras dalam mendukung HMI kala itu," kata Drs H Lukman Harun, mantan Sekjen Dewan Mahasiswa Universitas Nasional Jakarta yang juga aktivis HMI dan Pemuda Muhammadiyah.

Kemudian ketika mengajar di Sesko ABRI, Tarmizi juga banyak berbicara masalah komunisme dan Cina. Karena itu, berbicara tentang bahaya komunisme bagi Tarmizi, sama saja seperti membuka kamus lama atau bagai melakukan kilas balik dari pengalaman hidup yang pernah ia lalui. Berbagai kerusuhan yang terjadi 3 tahun belakangan ini, terutama berkait pada perusakan rumah-rumah ibadah, Tarmizi punya keyakinan bahwa kejadian tersebut merupakan skenario dari sisa-sisa atau kader muda PKI/komunis yang mencoba ingin bangkit kembali. Komunis paham betul bahwa praktik adu domba, mengembangkan sikap saling curiga dan fitnah antar umat beragama adalah salah satu strategi paling ampuh untuk menggoyahkan stabilitas nasional.

Dalam suatu pertemuan silaturahmi dengan alim ulama se-Jawa Timur, Juni 1997, Tarmizi kembali mengingatkan tentang bahaya komunisme yang menyusup melalui aksi-aksi perusakan rumah ibadah. Menurut Tarmizi, pemuka dan umat beragama merupakan ujung tombak yang paling ampuh dalam menghadapi bahaya komunisme tersebut. Karena itu, segenap pemuka dan umat beragama harus terus menerus waspada terhadap penyusupan dan rongrongan yang setiap saat dilakukan kader-kader PKI/komunis. Diingatkannya, kaum beragama harus sadar, kader komunis selalu berupaya untuk bangkit kembali. Mereka ingin membalas dendam atas tragedi tertumpasnya mereka pada saat melakukan beberapa kali pemberontakan.

Tarmizi sendiri pernah mendengar cerita dari sejumlah kiyai dan keluarga korban PKI di Jombang, Jatim yang mengalami kebiadaban PKI/komunis. "Para kiyai itu bercerita saat acara di pondok pesantren yang dikelola KH Yusuf Hasyim, paman KH Abdurrahman Wahid. Apa yang diungkapkan para kiyai itu merupakan fakta sejarah, pengalaman nyata yang bukan direkayasa," kata Tarmizi.

Menurut Tarmizi, walaupun agama merupakan benteng terdepan dalam menghadapi komunis, tapi ajaran agama juga dapat disusupi dan dirongrong oleh teori-teori komunis. Diingatkannya, Syarikat Islam tahun 1927, pernah disusupi dengan mencoba mendekati ajaran-ajaran Islam dengan teori-teori komunis. Bahkan apa yang terjadi pada kerusuhan 27 Juli 1996 dengan kemunculan PRD, kemudian diikuti perusakan rumah-rumah ibadah di Situbondo, Tasikmalaya, Rengasdengklok dan Banjarmasin, dapat diindikasikan bahwa kader-kader komunis sudah menyusup dan mengelabui masyarakat.

Persoalannya, tidak mudah anggota masyarakat menyadari tentang bahaya komunisme. Seolah bahaya komunis hanyalah dianggap sebagai suatu karangan fiktif atau ibarat hantu di siang bolong yang sengaja ditiupkan pemerintah. Apalagi hal ini didukung oleh mereka yang mengaku sebagai pendekar demokrasi dan hak asasi manusia tapi hanya dalam ucapan semata. Padahal masih banyak saksi dan bahkan pelaku sejarah tentang apa dan siapa itu PKI/komunis. Karena itulah, Tarmizi sama sekali merasa tidak menyesal dengan pernyataannya yang cukup keras, tentang halalnya darah perusuh.

Sikap keras dan tegas Tarmizi tersebut bukanlah karena emosi yang tak terkendali, melainkan benar-benar didasarkan kepada ajaran agama. Malah halalnya darah perusuh ini, sesungguhnya hanyalah untuk memperkuat apa yang dinyatakan Prof. Dr. Quraish Shihab, pakar tafsir al-Quran yang menguraikan sikap umat Islam terhadap tindakan para perusuh yang merusak rumah ibadah. "Halalnya darah perusuh itu saya tujukan kepada kaum komunis yang menyusup dalam aksi perusakan rumah ibadah. Selain itu prosesnya tentu sesuai hukum yang berlaku. Ingat, hukuman mati masih berlaku di Indonesia," kata Tarmizi.

Terhadap mereka yang mengkritiknya dalam soal halalnya darah perusuh itu, Tarmizi terlihat tenang-tenang saja. Menurut dia, mereka yang mengritik itu hanyalah orang-orang yang asal kritik atau mengecam tapi tidak tahu ujung pangkal persoalan sesungguhnya. Apalagi yang mengecamnya itu bukanlah dari ulama atau tokoh agama yang kredibilitasnya diakui. Jadi, Tarmizi merasa tak perlu menanggapi. Berbagai reaksi yang muncul itu malah dinilainya sangat bagus karena dari situ dapat diketahui seberapa jauh kepekaan mereka terhadap bahaya komunis/PKI; atau bahkan bisa saja

di antaranya memang sudah tidak menganggap lagi PKI/komunis sebagai musuh bangsa dan negara ini.

"Di Afghanistan, kaum Taliban, mahasiswa, telah menggantung mati tokoh komunis Najibullah. Tapi di Indonesia, banyak mahasiswa atau *taliban* mau saja dibohongi kaum komunis, termasuk sebagian anak-anak atau oknum mahasiswa IAIN. Sayang sekali, kalau sebagian kaum muda Islam kita ada yang jadi sasarannya, telah termakan oleh teori-teori rakyat tertindas. Saya berharap kaum muda masa kini dapat menyadari dan mereka harus tahu bahwa senior-seniornya dulu, bersama ABRI telah menumbangkan kaum komunis. Jangan sampai kaum muda di kampus, lebih-lebih cendekiawan dan mahasiswa Islam, sempat disusupi, termakan taktik setan gundul PKI," ujar Tarmizi.

Menurut Tarmizi, ajaran-ajaran komunis menyusup dengan memakai baju Barat, seperti hak asasi, demokrasi serta keterbukaan. Mereka ingin mencoba menggoyang negara Pancasila, dengan melihat peluang adanya kesenjangan yang tampak antara si kaya dan si miskin. "Apakah mereka itu benar-benar memperjuangkan si miskin? Saya tegaskan, tidak. Kata Marx, kalau ada orang miskin minta-minta, biarkan saja. Biarkan dia lapar, biar mereka berontak. Jadi perjuangan untuk si miskin, bagi komunis adalah kedok, hanya sebagai alat untuk merebut kekuasaan. *Naudzubillah min dzalik,*" kata Tarmizi.

Tarmizi berpendapat, pembangunan kini terus dalam proses. Upaya mengentaskan kemiskinan, mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin terus dilakukan secara bersama, dengan melibatkan semua pihak termasuk umat Islam, para kiyai dan santri yang ada di pesantren-pesantren. Upaya pengentasan kemiskinan itu, bukan untuk mengeksploitasi dan memperalat si miskin, tapi benar-benar untuk mengangkat harkat, derajat dan martabat kehidupannya. "Kita umat Islam punya pandangan dalam melihat si miskin, yaitu dalam milik orang kaya ada hak orang miskin. Kita berusaha membantunya, supaya tidak ada kebencian dari si miskin kepada orang kaya. Ini artinya, tidak berlaku teori dialektika komunis yang menciptakan konflik, seperti berbagai kerusuhan yang sempat terjadi, yang membakar barang rakyat tak bersalah."

Tarmizi menegaskan, bahaya komunis tak hanya dihadapi Islam, tapi juga agama-agama lain. Dicontohkannya, di Timor Timur, kaum komunis termasuk paling utama yang menentang integrasi.

Konflik-konflik umat beragama 1995 di Timtim, bukan tidak mungkin ditunggangi atau disusupi komunis. "Maka umat Katolik hendaknya waspada pada Teologi Pembebasan yang diimpor dari Amerika Latin, Filipina, dan Australia. Kita tidak rela, kalau pemuda Katolik di Indonesia yang tidak berdosa ikut pula menjadi korban. Karena itu saya peringatkan kepada semua tokoh agama, jangan bermain api dengan agama di Nusantara ini. Jangan sampai terjadi kasus Bosnia, Lebanon dan Afghanistan di negara ini. Mari kita renungkan sedalam-dalamnya agar terhindar dari malapetaka besar. Mari kita bina generasi muda, jauhkan mereka dari kebencian antar agama. Mari harga-menghargai antaragama."

"Saya harapkan para ulama, kiyai, pemuka agama, seperti saat tahun 1927, 1948 dan 1965, harus tetap punya semangat menghadapi bahaya komunis. Kita jangan mau kena hasut, fitnah dan intrik-intrik yang mengadu domba. Kehancuran PKI dalam pemberontakannya di bumi Nusantara ini, saya kira karena kaum agama. Memakai istilah kaum agama, perjuangan komunis gagal karena mereka tidak diridhai Allah," demikian Tarmizi Taher.

I. Terbuka Dan Jago Lobi

Salah satu ciri khas Tarmizi adalah kalau dalam bicara, baik saat di atas mimbar maupun dalam diskusi atau bincang-bincang, ia dikenal sangat terbuka dan blak-blakan. Sikap dan sifat Tarmizi ini tampaknya tak lepas dari kondisi daerah yang pernah ia diami, yaitu Ranah Minang, Betawi dan Surabaya, yang dikenal orang-orangnya berpembawaan terbuka dan blak-blakan. Kalau Tarmizi berbicara di ketiga daerah itu, Tarmizi memang suka mengaku sebagai orang Betawi (Jakarta), orang Minang, dan arek Suroboyo.

Namun demikian, jangan sekali-kali mendekati Tarmizi dengan semangat kedaerahan atau primordial tertentu, karena ia akan sangat marah. Pernah suatu ketika, ada pegawai Depag yang karena merasa orang Minang mencoba-coba merayu Tarmizi agar bisa dipromosikan jabatannya. Jawaban Tarmizi, jabatan bukan ditentukan oleh asal daerah atau karena satu suku dengan Menteri Agama, tapi ditentukan oleh prestasi, dedikasi dan loyalitas. Menurut Tarmizi, kita tidak perlu menutup-nutupi asal daerah kita, tapi jangan sampai fanatisme daerah membuat kita tidak obyektif dalam melihat suatu persoalan. "Nasionalisme jangan sampai kita lupakan. Hanya dengan semangat nasionalisme, semua sekat-sekat SARA bisa

kita hilangkan," ucapnya suatu ketika.

Satu hal lain yang cukup menonjol dari Tarmizi Taher adalah dalam hal kemampuannya meyakinkan orang guna memenuhi apa yang ia rencanakan. Kemampuan tersebut, yang sering disebut sebagai lobi itu, banyak membuat orang lain harus angkat topi kepadanya. Contohnya, ketika Tarmizi berhasil mendatangkan Syeikh Al-Azhar ke Indonesia. Sebelumnya, sangat langka Syeikh Al-Azhar berkunjung ke luar negeri, apalagi ke Indonesia. Namun berkat kepiawaian lobi Tarmizi, tokoh dari Mesir itu mau berkunjung ke Indonesia pada 1995.

Contoh lain, ketika Tarmizi menginginkan perlunya Surabaya dan Ujung Pandang sebagai tempat pembuatan visa haji, selain Jakarta. Banyak orang menilai keinginan tersebut bakal sulit dipenuhi. Apalagi saat itu Dubes Arab Saudi untuk Indonesia, juga menyatakan harapan tersebut sulit dipenuhi dan dikatakan tenaga di Jakarta masih mampu menyelesaikan visa tersebut. Nyatanya, saat Tarmizi berkunjung ke Arab Saudi, 1996, pemerintah Arab Saudi akhirnya menyetujui permintaan Indonesia tersebut.

Menurut Tarmizi, keberhasilannya tersebut hanyalah dengan mengikuti cara atau prosedur yang benar. Syeikh al-Azhar mau ke Indonesia, misalnya, karena Tarmizi sebelumnya terlebih dulu menghadap Wakil Presiden Try Sutrisno dan mohon perkenannya untuk mau mengundang Syeikh tersebut. Begitu pula dengan usulan pembukaan perwakilan pembuatan visa di Surabaya dan Ujung Pandang, Tarmizi mengusulkannya dengan membawa surat Presiden kepada Raja Fahd. Tentu saja, karena sudah pada tingkat atas, usulan itu mudah diselesaikan. Apalagi Tarmizi sendiri dengan mitranya, Menteri Haji Arab Saudi dan keluarganya punya hubungan yang sangat akrab.

Tarmizi juga termasuk salah seorang pejabat yang mampu mencairkan hubungan antartokoh, terutama di kalangan tokoh umat beragama yang sempat terlihat dingin. Sejumlah tokoh Petisi 50 berhasil "dirangkul" Tarmizi, seperti Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Dr. Anwar Haryono dan rekannya sesama aktifis, Drs H AM Fatwa. Menjelang Pemilu 1997, Tarmizi berhasil pula mempertemukan KH Abdurrahman Wahid, Ketua Umum PB NU, dengan Mbak Tutut (Ny Siti Hardiyanti Rukmana), putri Presiden Soeharto, yang selain dikenal sebagai pengusaha sukses dan juga Ketua DPP Golkar. Kala itu, Ketua Umum PB NU yang dikenal tokoh

kontroversial banyak disebut sedang kurang mesra hubungannya dengan pemerintah sehingga pertemuannya dengan Mbak Tutut menimbulkan berbagai macam interprestasi.

Berhasilnya Tarmizi bersama para tokoh agama-agama diterima Sri Paus di Vatikan, 1995, terselenggaranya berbagai pertemuan tingkat internasional di Indonesia yang berkaitan dengan masalah keagamaan, terakhir pertemuan Menteri-Menteri Agama negara OKI pada Oktober 1997, serta diundangnya Tarmizi ke sejumlah universitas di Barat, tak lain berkat reputasi Tarmizi dalam melakukan dialog dan lobi dengan berbagai kalangan.

***

Appendiks

Teuku Moehammad Hasan;

Menteri Agama Kabinet PDRI

Dwi Purwoko

Proses sosialisasi baik yang bersifat internal, lingkungan keluarga, maupun bersifat eksternal, lingkungan sosial masyarakat dan kondisi negara, terkadang mempengaruhi sikap politik seseorang. Kedua unsur tersebut saling terkait sehingga dapat memperjelas persepsi dan tingkah laku seseorang dalam melaksanakan tugasnya.

Demikian halnya dengan Teuku Moehammad Hasan. Dalam mencapai jenjang karier politiknya tidak terlepas dari didikan keluarganya sejak kecil. Arah pendidikan keluarga yang menekankan pendidikan umum dan agama membentuk kepribadiannya. Lingkungan sosial Aceh yang terkenal dengan julukan Serambi Mekkah telah mendorong dirinya untuk memahami nilai-nilai keislaman. Dan kondisi kenegaraannya yang terkadang telah sampai ke jurang kehancuran mendorong dirinya untuk segera bertindak. Ia tampil sebagai Gubernur Sumatera yang pertama dan menjadi seorang menteri dalam Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang menangani beberapa bidang sekaligus dan salah satunya adalah agama.

Keluarga Bangsawan

Hasan, demikian panggilan akrabnya, dilahirkan pada 4 April 1906. Ia adalah anak pasangan T. Bintara Pineung Ibrahim (ayah) dan Cut Maayak (ibu). T. Ibrahim adalah Uluebalang (*zelfbestuurder*) di Landschap Pineueng, Aceh.

Hasan menghabiskan masa kecilnya di tanah kelahirannya, desa Peukan Set, Sigli, Aceh. Sejak kecil Hasan telah memperoleh pendidikan agama. Meskipun ayahnya adalah uluebalang atau kepala daerah, tapi ia mempunyai perhatian besar terhadap pendidikan agama, khususnya terhadap anaknya-anaknya. Bahkan ayahnya mendirikan pesantren Blang Paseh yang cukup terkenal di Peukan Sigli. Ia mendatangkan seorang ulama yang masih mempunyai pertalian darah (kakak ibu Hasan), yakni Teungku M. Ali Basyah yang juga wakil kadi.

Tak jarang sang ayah memberi pelajaran agama secara langsung kepada Hasan, terutama pelajaran fiqh. T. Ibrahim selalu mengingatkan anak-

nya tentang kewajiban melaksanakan salat lima waktu dan berpuasa pada bulan Ramadhan. Ia juga memberi pelajaran bahasa Arab. Namun bahasa Arab yang diberikannya tidaklah terlalu mendalam. Hasan belajar bahasa Arab lebih lanjut dengan ulama tempat kelahirannya yakni Teungku Nurdin dan lebih memperdalam ketika pindah ke Jakarta. Ketika belajar Islamologi di Belanda, Hasan menyempatkan diri belajar bahasa Arab dengan Prof. Wensink dan Prof. Snouck Hurgronje.

Memang kedengarannya aneh, bahwa sementara rakyat Aceh tak pernah bisa menerima kehadiran Belanda, tapi Hasan justru belajar ke negeri Belanda dan belajar Islamologi dengan Snouck Hurgronje—orang yang paling berjasa "menjinakkan" Aceh dan yang merumuskan "politik Islam" yang menguntungkan kolonialisme Belanda. Mungkin jawabannya adalah karena *policy* pemerintah Belanda yang ketika itu ingin memisahkan antara kelompok keagamaan (ulama) dengan kelompok bangsawan (kaum adat). Hasan berasal dari kaum bangsawan. Dengan memberi kesempatan belajar ke luar negeri (Nederland), Belanda ingin agar nantinya ia dapat mendukung kebijakan pemerintah kolonial. Belanda tidak pernah memberi kesempatan seperti ini kepada anak para ulama di Aceh. Bagi Hasan, menuntut ilmu itu hukumnya wajib walau "harus ke negeri Cina." Ia tidak mempunyai sikap fanatisme sempit. Namun ironisnya, Hasan kemudian justru melawan kekuasaan Belanda.

Pendidikan Umum

Selain mempelajari pengetahuan agama, T. Ibrahim juga selalu menekankan pentingnya pendidikan umum kepada anaknya. Karena itu ia menyekolahkan anaknya ke Sekolah Rakyat (SR), yang waktu itu masih disebut "sekolah desa" di Lampoih Saka pada tahun 1915. Meskipun Hasan berasal dari kalangan bangsawan tapi ia dimasukkan di sekolah rakyat agar dapat banyak bergaul dengan bangsanya dan merasakan nasib murid lainnya.

Setelah menamatkan SR, Hasan dibawa ke Sigli dan masuk sekolah dasar Belanda, Hollandsch Inlandsche School (HIS). Karena sekolah ini menggunakan bahasa Belanda dan Hasan belum mengenal bahasa Belanda ia dimasukkan di kelas 0. Namun proses adaptasi yang cepat menyebabkan Hasan dapat mengikuti pelajaran dengan baik.

Setelah itu, Hasan masuk Koningin Wilhelmina School (KWS) dan melanjutkan ke Algemeene Middelbare School (AMS) yang sekarang disebut Sekolah Menengah Umum. Setelah tamat dari AMS Hasan masuk Rechthoogeschool atau Sekolah Hakim Tinggi, yang sekarang sejajar dengan Fakultas Hukum, di Belanda. Minatnya masuk ke sekolah hukum ini dipengaruhi karibnya yakni Hanafiah. Ia memberi saran kepada Hasan agar memilih Fakultas Hukum karena hampir semua gubernur jendral berlatarbelakang akademik sarjana hukum (Mr.). Saran sahabat karibnya

dilaksanakan oleh Hasan.

Sebelumnya, Hasan ingin melanjutkan pendidikananya di sekolah teknik (yang sekarang menjadi ITB), mengingat sejak sekolah dasar hingga lanjutan atas, ia menyukai pelajaran Aljabar dan memeperoleh angka yang baik. Akan tetapi saran Hanafiah tersebut ada benarnya. Dalam perkembangan selanjutnya, Hasan pernah menjadi Gubernur yang berkuasa penuh atas Sumatera—jabatan yang dapat disamakan dengan Gubernur Jendral pada masa kolonial. Hal ini karena segala peraturan, peradilan dan urusan-urusan pemerintah, semuanya dipercayakan kepada Hasan ketika menjabat sebagai Gubernur Sumatera. Pendidikan hukumnya sangat berguna bagi Hasan dalam memahami sistem ketatanegaraan.

Aktif di Pergerakan

Pada 1931 Hasan pergi ke Belanda untuk belajar hukum di Rijk Universiteit, Leiden. Di negeri ini ia tidak hanya belajar tapi juga aktif dalam kegiatan politik. Ia menghadari rapat-rapat Perhimpunan Indonesia (PI) meskipun sering diadakan di luar kota Leiden. Hasan pernah turut dengan rombongan PI ke Amsterdam guna mengadakan rapat anti kolonialisme. Pada 1932 Hasan juga turut rombongan PI ke Rotterdam berhubung untuk menemui Mohammad Hatta.

Selama di Leiden, Hasan pernah menerima surat dari Assiten Residen J. Jongejans di Sigli (Aceh) yang isinya mengajak Hasan bekerjasama demi kepentingan Indonesia. Surat Jongejans itu dibalas Hasan dengan menyatakan bahwa kerjasama antara Belanda dan Indonesia adalah hal yang mustahil karena Belanda adalah pemerintah dan Indonesia adalah yang diperintah. Dari sisi budaya pun jelas berbeda; Belanda menghalalkan minum-minuman keras, sedangkan Indonesia terutama rakyat Aceh sangat anti terhadap perilaku semacam itu karena Islam mengharamkannya.

Surat balasan Hasan di atas yang secara tegas menolak kerjasama dengan Belanda kemudian oleh Jongejans dikirim kepada Gubernur Aceh di Kutaraja dan disimpan di map khusus, dengan diberi catatan bahwa Hasan adalah anti Belanda dan harus diawasi secara khusus.

Meskipun aktif dalam pergerakan, hal itu tidak sampai menggagalkan studi hukumnya. Hal ini terbukti bahwa pada 1933 ia telah menyelesaikan studinya. Setelah itu ia kembali ke Aceh. Namun sebelum pulang, ia sempat singgah di Mesir untuk belajar agama dengan Nur Ibrahimi (menantu Daud Baureh) yang sedang memperdalam studi Islam di Universitas Al-Azhar, Kairo. Setelah itu ia pulang ke tempat kelahirannya.

Selama di Aceh, ia sering mengunjungi keluarga, pedagang, uleebalang dan ulama. Ia sering dimintai bantuan oleh para pedagang besar di Sigli, khususnya dalam mengurus masalah perizinan perdagangan. Sedangkan dengan para ulama ia sering mendiskusikan hukum barat dan hukum Islam.

Kedekatan Hasan dengan rakyat, keluarga bangsawan dan kalangan ulama menimbulkan rasa kekawatiran Belanda. Tidak mengherankan bila kemudian pemerintah mengirimnya ke Batavia (Jakarta) dengan dalih dicarikan pekerjaan.

Piagam Jakarta

Karena Hasan berasal dari Aceh, yang dianggap sebagai pusat perlawanan Islam terhadap kolonalisme Belanda, dan ia sendiri juga mempunyai pengetahuan agama yang memadai dan pendidikan umum yang baik serta keterlibatannya dalam menentang pemerintah Belanda, Hasan diperhitungkan dalam struktur birokrasi pemerintah RI setelah maupun sebelum merdeka, yakni ketika terjadi keputusan penghapusan tujuh kata keramat Piagam Jakarta yang menyangkut kepentingan bangsa.

Ketika Jepang menyampaikan janji kemerdekaan, Hasan bersama Dr. Moehammad Amir dan Mr. Abdul Abbas diangkat pemerintah Jepang sebagai utusan Sumatera pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sebelum sidang dimulai, masalah yang mengganjal adalah adanya tujuh kata "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dalam Piagam Jakarta yang telah ditetapkan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Kisahnya bermula pada pagi hari, 18 Agustus 1945, sebelum sidang PPKI dimulai, Hatta mengundang para anggota PPKI yang dianggap mewakili Islam untuk meninjau kembali perumusan tujuh kata tersebut. Wakil Islam yang diundang terdiri dari Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Kasman Singodimedjo dan Teuku Moehammad Hasan .

Wakil-wakil Islam itu diundang tidak terlepas dari keterangan yang diperoleh Hatta dari pihak Jepang, bahwa rakyat Kristen di daerah Indonesia Timur akan menolak masuk dalam RI yang diproklamasikan bila tetap mempertahankan tujuh kata tersebut dalam konstitusi. Mereka menganggap rumusan Piagam Jakarta cenderung diskriminatif.

Diantara keempat wakil Islam, Ki Bagus Hadikusumo adalah yang paling keras menolak dihapuskannya tujuh kata dari Piagam Jakarta. Soekarno-Hatta juga sulit menghadapi kekukuhan pendapat Ki Bagus Hadikusumo.

Hatta kemudian mencari Hasan dan menjelaskan kepadanya tentang kekokohan Ki Bagus Hadikusumo untuk mempertahankan tujuh kata. Hasan pun dipanggil Sukarno untuk membicarakan masalah itu. Kemudian Hatta menunjuk Hasan yang dianggap mampu berdiplomasi untuk melunakkan sikap Ki Bagus Hadikusumo. Hatta percaya pada Hasan karena ia orang Aceh, taat menjalankan agama dan mengetahui masalah.agama serta mempunyai kemampuan dalam berdiplomasi.

Hasan kemudian menemui Ki Bagus Hadikusumo dan menyarankan agar melunakkan sikapnya. Hasan mengingatkan Ki Bagus Hadikusumo

agar tidak sekedar melihat kepentingan "kelompoknya", tapi harus melihat kepentingan nasional. Hasan menekankan bahwa yang terpenting adalah kemerdekaan. Menurut Hasan, bila kita terus mempertahankan kepentingan sepihak, bisa-bisa orang Kristen dipersenjatai Belanda. Padahal, yang kita cari adalah kemerdekaan, bukan berperang.

Hasan mengatakan: "Kita tidak perlu takut, mengingat jumlah ummat Islam adalah 90%. Kalau kita banyak, kita tidak perlu cemas. Yang penting adalah merdeka dulu. Setelah itu terserah kita, mau dibawa ke mana negera ini."

Hasan kemudian-melanjutkan: "Yang penting bagi bangsa ini merdeka lebih dahulu; rakyat kita cukup besar; tak ada yang mampu menggoyahkannya, meskipun tujuh kata itu dihapus. Kalau kita bersikeras, kemungkinan perang masih tetap ada. Mungkin Belanda akan mempersenjatai mereka. Meskipun kita bisa menang, karena jumlah kita banyak, lalu kapan kita merdeka."

Tampaknya argumen Hasan tersebut diterima Ki Bagus Hadikusumo. Setelah Ki Bagus menyetujuinya, Hasan kemudian segera melaporkan hasil pembicaraannya kepada Soekarno-Hatta. Diterimanya penghapusan tujuh kata dari Piagam Jakarta adalah untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan ini merupakan pengorbanan yang besar dari ummat Islam.

Menjadi Menteri Agama

Setelah merdeka, Hasan menjabat Gubernur Sumatera yang pertama. Ketika Yogyakarta sebagai ibu kota RI jatuh ke tangan Belanda dan Sukarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI ditawan, Hasan memerintahkan para pejabat tinggi Sumatera untuk berkumpul pada malam hari dan bersama-sama berangkat ke Halaban, dekat Bukit Tinggi. Di Halaban inilah PDRI diproklamirkan pada 22 Desember 1949.

Integritas keagamaan dan mengutamakan kepentingan nasional terlihat ketika Hasan menerima jabatan sebagai Menteri Agama pada masa PDRI. Pada masa ini, selain dipercaya menjadi Menteri Agama ia juga merangkap sebagai Wakil Ketua PDRI, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Sewaktu menjabat Menteri Agama, tidak ada fasilitas sama sekali, baik berupa kantor maupun dana kegiatan. Semuanya dilakukan serba darurat dan bertujuan untuk menghidupkan negara RI. Perjuangan Hasan pada masa ini luar biasa. Bersama rombongannya ia berjuang keluar masuk hutan demi negara.

Selama bergerilya, Hasan menyamar sebagai pejabat agama sambil memakai sarung, tongkat, tudung dan memelihara kumis dan jenggot. Penyamaran tersebut terpaksa dilakukan, sebab bila tidak, akan mudah diketahui kaki tangan Nica yang segera melaporkannya kepada tentara

Belanda. Tetapi tetap saja ia masih dikenali orang-orang tertentu. Meskipun Hasan berjalan dengan seorang pengiring saja, sedangkan pengawal dan pengiring lain berjalan jauh di belakangnya, mereka yang mengenalinya tetap memberi hormat.

Sebagai menteri agama pada masa darurat, Hasan tidak mengenal tidur di tempat yang enak. Ia dan rombongan justru tidur di hutan belukar, di atas lantai dahan kayu dengan atap ranting dan dedaunan. Tengah malam, mereka terkadang disiram hujan lebat, sering tidak bisa tidur nyenyak dan kelaparan. Mereka pernah tidur di sebuah pondok kecil di pinggir anak Sungai Batanghari dan dikelilingi banyak kecoa.

Mereka berjalan kaki menaiki perbukitan, menyeberangi sungai deras dengan barang-barang bawaan yang berat. Namun setelah tiba di sebuah perkampungan, mereka disambut dengan rasa persaudaraan yang mendalam oleh penduduk setempat.

Meskipun kementerian agama berada dalam keadaan darurat, tugas menteri agama tetap ada. Hal ini terlihat dari maklumat yang dikeluarkan Hasan berkaitan dengan awal Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Pada 25 Juni 1949 Mr. Teuku Moehamamad Hasan selaku Menteri agama PDRI menyampaikan telegram kepada Komisaris Pemerintah Sumatera dan Gubernur Militer Sumatera yang isinya menetapkan awal Ramadhan hari Senin, 27 Juni 1949 dan awal Syawal 1368 H. (hari raya Idul Fitri) jatuh pada Rabu, 27 Juli 1949.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PDRI adalah kabinet perang atau kabinet gerilya. PDRI merupakan kabinet tanpa kedudukan yang menetap, tetapi terus menerus *mobile* dan berpindah-pindah. Namun kementerian-kementeriannya termasuk Kementerian Agama merupakan mata rantai penting dari rangkaian perjuangan RI.

Berpulang ke Rahmatullah

Selain menjadi Menteri Agama pada masa pemerintahan darurat, Hasan juga pernah memegang beberapa jabatan pemerintah lainnya, seperti Gubernur Sumatera dan panitia Penyelidikan Peraturan dan hukum Perkawinan, Talak dan rujuk pada 1950-1957.

Di antara mantan menteri-menteri agama, Hasan dikaruniai umur paling panjang, 91 tahun. Masa tuanya dihabiskan untuk beribadah. Baginya ibadah adalah kebutuhan rohani. Baginya, salat lima waktu yang merupakan bagian dari syariat Islam adalah yang paling pokok dalam ibadah, sebab dengan salat jiwa orang akan terbentuk menjadi jujur, arif dan bijakasana yang semuanya merupakan modal penting dalam perjalanan hidupnya.

Perhatiannya dalam masalah ibadah juga diimplementasikan dengan membentuk Yayasan Kurnia di mana ia menjadi ketuannya. Tujuan yayasan ini adalah untuk memberi bantuan perbaikan rumah ibadah, mem-

bantu fakir miskin dan yatim piatu serta membantu pelajar, terutama yang berasal dari Aceh, yang kurang mampu membiayai uang sekolahnya. Ia juga menjadi Ketua umum Yayasan Pembangunan Serambi Mekkah yang telah berhasil mendirikan Perguran Tinggi Serambi Mekkah di Banda Aceh. Perguruan tinggi ini merupakan perpaduan antara pendidikan umum dan agama. Hasan sengaja menggabungkan kedua unsur tersebut mengingat antara agama dan ilmu pengetahuan tidak bisa dipisahkan. Tidaklah mengherankan bila di perguruan tinggi ini terdapat Fakultas Teknik dan Tarbiah yang mendapat respons besar dari masyarakat Aceh.

Meskipun aktifitas sosial keagamaan pada masa tuanya cukup banyak, ia terhindar dari publikasi pers. Hasan yang memperoleh penghargaan Bintang Maha Putera Adhi Pradana dari pemerintah RI kini telah tiada. Kepergian Hasan untuk selamanya pada 21 September 1997 juga tidak banyak diketahui pers. Namun pada kesempatan tersebut Menteri Agama Tarmizi Taher turut melakukan sembahyang jenazah.

Sekilas Para Penulis

Taufik Abdullah adalah Ahli Peneliti Utama pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Guru Besar Luar Biasa Ilmu Sejarah di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Menyelesikan pendidikannya di Universitas Gadjah Mada (1961) kemudian melanjutkan ke Cornell University, Ithaca, New York, dan mendapatkan gelar MA (1967) dan Ph.D. (1970) dalam bidang Sejarah. Dia pernah menjadi guru besar tamu di sejumlah perguruan tinggi, seperti Pascasarjana IAIN Jakarta; University of Wisconsin, Madison; Cornell University, Ithaca; dan McGill University, Montreal, Kanada. Selain itu dia juga menjadi *fellow* di sejumlah lembaga, seperti Department of Political Science, University of Chicago; Netherlands Institute for Advanced Studies in Social Sciences and Humanities; The Center for Sotuheast Asian Studies, Kyoto University; dan Research School of Asian and Pasific Studies, Australian National University. Saat ini dia juga menjabat Wakil Ketua Yayasan Ilmu Ilmu Sosial (YIIS), Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI), dan President International Association of Historians of Asia.

Muljanto Sumardi adalah Guru Besar IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Direktur Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) IAIN Jakarta. Selain itu dia juga Ketua HIPPIS dan Projec Officer Yayasan Ilmu Ilmu Sosial. Lahir di Banjarnegara, 14 Januari 1937, mendapatkan MA dalam bidang Linguistik dari University of Michigan (1959), MA dalam Teaching English as a Foreign Language, Columbia University, New York (1968), dan Ph.D. bidang Education juga dari Columbia University (1970). Pernah menjadi Direktur Perguruan Tinggi Agama, Departemen Agama (1972-1975) dan Kepala Badan Litbang Agama, Departemen Agama (1975-1979). Menulis beberapa buku, seperti *Pengajaran Bahasa Asing: Sebuah Tinjauan dari Segi Metodologi* (Bulan Bintang, 1974) dan *Sejarah Singkat Pendidikan Islam di Indonesia 1945-1975* (Dharma Bhakti, 1978).

Azyumardi Azra adalah dosen Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Wakil Direktur Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) IAIN Jakarta, Pembantu Rektor I (Bidang Akademik) IAIN yang sama, dan *Editor in Chief* jurnal *Studia Islamika*. Lahir di Lubuk Alung, Sumatera Barat, 4 Maret 1955. Tamat dari Fakultas Tarbiyah IAIN Jakarta (1982), mendapatkan MA bidang Sejarah Islam Timur Tengah (1988), M.Phil. bidang Sejarah Islam Asia Tenggara (1990), dan Ph.D. dalam bidang Sejarah Islam (1992), semuanya dari Columbia University, New York. Telah menulis beberapa buku, antara lain *Pergolakan Politik Islam* (Paramadina, 1996) dan *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Nusantara Abad 17 dan 18* (Mi-

zan, 1995) serta kontributor sejumlah buku, baik dalam bahasa Indonesia maupun Inggris. Selain itu tulisannya juga tersebar di berbagai jurnal dan media massa, dalam dan luar negeri.

M. Atho Mudzhar adalah Rektor IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, setelah sebelumnya menjabat Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam (1994-1997) dan Direktur Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum Negeri (1991-1994). Lahir di Serang, Jawa Barat, 20 Oktober 1948, mendapatkan gelar sarjana pada IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1975) dan Master of Social Planning and Development dari Dept. of Soicology and Anthropology, University of Queensland, Australia (1981). Menyelesaikan program Ph.D. bidang Islamic Studies di University of California Los Angeles, California, USA (1990). Di antara bukunya yang telah diterbitkan adalah *Belajar Islam di Amerika* (Pustaka Panjimas, 1992) dan *Fatwas of the Council of Indonesian Ulama: a Study of Islamic Legal Thought in Indonesia* (INIS, 1993). Berbagai tulisannya telah diterbitkan di berbagai jurnal ilmiah, baik dalam maupun luar negeri.

Akh. Minhanji adalah dosen Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga dan Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Selain itu dia juga Asisten Direktur Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga dan Pimpinan Jurnal *al-Jami'ah* yang diterbitkan IAIN yang sama. Lahir di Pamekasan, Madura, 19 September 1958 dan menyelesaikan sarjananya di IAN Sunan Kalijaga (1985). Mendapatkan MA (1992) dan Ph.D. (1997) dalam bidang Hukum Islam dari McGill University, Montreal, Kanada. Salah satu penulis dalam berbagai buku, antara lain, *Islam Berbagai Aspek: Dedikasi untuk 70 tahun Prof. Dr. Munawir Sjadzali, MA* (LPMI, 1995) dan *Pengalaman Belajar Islam di Kanada* (Titian Ilahi, 1997). Selain itu juga menulis di berbagai jurnal dan media massa.

Ahmad Syafi'i adalah Kepala Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan Jakarta dan Pemimpin Umum Jurnal *Penamas*. Lahir di Demak, Jawa Tengah, 4 Juli 1950, menyelesaikan sarjananya di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang (1978), mendapatkan MA dalam bidang Antropologi dari Universitas Indonesia (1991) dan sekarang tengah menyelesaikan program Doktor di lembaga terakhir. Aktif dalam berbagai seminar/lokakarya dan penelitian serta menulis di berbagai media. Di antara bukubukunya yang telah diterbitkan adalah *Zikir sebagai Pembina Kesejateraan Jiwa* (Bina Ilmu, 1995) dan *Bianglala di atas Khatulistiwa: Dinamika Pemikiran dan Gerakan Islam di Indonesia* (Bina Ilmu, 1988). Sebagai peneliti, pangkat terakhirnya adalah Ahli Peneliti Madya.

Saiful Umam adalah dosen pada Fakultas Adab IAIN Syarif Hidayatullah, peneliti pada Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) IAIN Jakarta, dan redaktur Jurnal Pendidikan Islam *Madrasah* serta Jurnal Perguruan Tinggi Agama *Perta*. Lahir di Pati, 8 Desember 1967, menyelesaikan S1 di Fakultas Adab IAIN Jakarta (1990) dan mendapatkan MA dalam bidang Studi Timur Tengah dari Princeton University, New Jersey, USA (1996).

Didin Syafruddin adalah dosen Fakultas Da'wah IAIN Syarif Hidayatullah dan staf ahli FKP-DPR RI bidang kepemudaan. Lahir di Kuningan, Jawa Barat, 7 Maret 1960. Selesai SD PUI Kuningan (1972), melanjutkan ke PGA PUI 4 Tahun (1976) dan PGAN 6 Tahun di Bandung (1979). Mendapat gelar sarjana dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Tarbiyah, Jurusan Bahasa Arab (1987) dan MA dalam bidang Islamic Studies dari McGill Univeristy, Montreal, Kanada (1994). Sebelum menjadi staf ahli FKP dia adalah Sekretaris Eksekutif Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) IAIN Jakarta dan salah seorang editor Jurnal *Studia Islamika*.

Masdar F. Mas'udi adalah Direktur Eksekutif Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Jakarta. Lahir di Purwokerto, Jawa Tengah, 1954. Tamat dari SD segera *nyantri* kepada alm. KH. Khudori, Tegalrejo, Magelang (1966-1969), kepada alm. KH. Maksoem, Krapyak, Yogyakarta (1969-1975), dan tamat dari Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1979). Pernah menjadi wartawan dan redaktur Harian *Jurnal Ekuin* (1982-1983). Tulisannya tersebar di pelbagai media massa antara lain *Tempo* (almarhum), *Forum*, *Kompas*, *Republika*, *Media Indonesia*, dan lain-lain. Menulis dua buku *Agama Keadilan/Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam* (Pustaka Firduas dan P3M) dan *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan* (Mizan). Di samping itu ia juga kontributor beberapa buku.

Syafiq Hasyim adalah staf Program Fiqh An-Nisa' untuk Penguatan Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam di Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dan Redaktur Pelaksana Tabloid *SEHAT*, yang diterbitkan P3M. Lahir di Jepara, Jawa Tengah, 18 April 1971. Tamat SD melanjutkan ke MTs dan MA Matholi'ul Huda Jepara. Menyelesaikan studi di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ushuluddin, Jurusan Akidah dan Filsafat (1996). Salah satu penulis buku *Tradisi, Modernisme, dan Metamodernisme* (LKIS, 1996) dan *Beragama di Abad 21* (Dzikrul Hakim, 1997) serta aktif menulis di koran dan majalah, seperti *Kompas*, *Media Indonesia*, *Republika*, *Panji*, dan *Tiras*.

Abdul Aziz adalah peneliti merangkap Kepala Sub-bidang Perumusan Program, Bidang Bina Program, Puslitbang I, Badan Litbang Agama. Lahir di Cianjur, Jawa Barat, 24 September 1954. Menyelesaikan studi di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Fakultas Tarbiyah, Jurusan Bahasa Arab (1981) dan mendapatkan MA dari Department of Anthropology and Sosiology, Monash University, Melbourne, Australia (1992). Salah satu penulis *Harkat Dakwah di Lapis Bawah* (P3M, 1986) dan editor sekaligus penulis beberapa buku yang diterbitkan Badan Litbang Agama, seperti *Penelitian Agama dalam Perspektif* (1995), *Orientasi Keagamaan pada Masyarakat yang sedang Berubah* (1996), dan *Sumbangan Agama dalam Pengentasan Kemiskinan* (1996).

Muhaimin Abdul Ghofur adalah Kepala Bidang Bina Program pada Puslitbang Pendidikan Agama, Badan Libang Agama sekaligus Peneliti pada Badan Litbang Agama Departemen Agama. Lahir di Cirebon, 9 September 1946, menyelesaikan sarjananya dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Tarbiyah, Jurusan Bahasa Inggris. Kemudian melanjutkan ke Macquaric University, Australia, dan mendapatkan MA di bidang Development of Education (1982), dan Ph.D. Anthropology dari The Australian National University, Australia (1995). Kontributor berbagai buku, antara lain *Wacana Baru Fiqh Sosial: 70 Tahun K.H. Ali Yafi* (Mizan, 1997) dan sejumlah buku terbitan Badan Litbang Agama. Selain itu juga menulis di berbagai jurnal ilmiah, seperti *Studia Islamika.*

Kamal Muchtar adalah Pembantu Rektor I (Bidang Akademik) IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan dosen pada Fakultas Tarbiyah IAIN yang sama. Lahir di Pariaman, Sumatera Barat, 5 Maret 1934. Selesai Sekolah Rakyat, melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Padang Panjang (1951), lalu Sekolah Guru Agama Atas Muhammadiyah Padang Panjang (1954) dan tamat Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (1962). Menulis *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Bulan Bintang, 1973) dan anggota penulisan *Al-Qur'an dan Terjemahannya* serta *Al-Qur'am dan Tafsirnya* yang diterbikan Departemen Agama.

Ali Munhanif adalah dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, peneliti pada Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) IAIN Jakarta, editor Jurnal *Studia Islamika*, dan pemimpin redaksi Jurnal Pendidikan Islam *Madrasah*. Lahir di Blora, 12 Desember 1965, menamatkan S1 di Fakultas Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (1989) dan mendapatkan MA bidang studi agama dari Temple University, Philadelphia, USA (1995). Pernah menjadi wartawan majalah *Editor* (1989-1991) dan salah seorang penulis *Mencari Islam: Biografi Intelektual Generasi Muslim 1980an* (Mizan, 1992).

Masykuri Abdillah adalah dosen Fakultas Syari'ah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan peneliti pada Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) IAIN Jakarta. Lahir di Kendal, Jawa Tengah, 22 Desember 1958, menyelesaikan sarjana mudanya di Fakultas Syari'ah Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (1981) dan sarjana lengkapnya di Fakultas Syari'ah IAIN Jakarta (1985), kemudian mendapatkan Ph.D. bidang Islamic Studies dari University of Hamburg, Jerman. Disertasinya telah diterbitkan dengan judul *Responses of Indonesian Muslim Intellectuals to the Concept of Democracy* (Abera-Verlag, Jerman, 1997).

Bahtiar Effendy adalah Wakil Direktur Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha Indonesia (LSPEUI) dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selain itu ia juga dosen Pascasarjana IAIN Jakarta dan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta. Lahir di Ambarawa, Semarang, 10 Desember 1958, menyelesaikan sarjananya di Fakultas Ushuluddin, IAIN Jakarta (1986), mendapatkan MA bidang South East Asian Studies Ohio University (1988), MA Political Science (1991), dan Ph.D. Political Science (1994) yang keduanya di Ohio State University, USA. Bersama Fachry Ali, ia menulis *Merambah Jalan Baru Islam* (Mizan, 1988). Selain itu ia juga menulis di berbagai media massa dan jurnal ilmiah.

Hendro Prasetyo adalah peneliti pada PPIM IAIN Jakarta dan redaktur Jurnal Internasional *Studia Islamika*. Lahir di Pekalongan, 19 Juli 1964, menyelesaikan sarjana di Fak. Ushuluddin Jurusan Aqidah-Filsafat IAIN Jakarta (1989), dan menamatkan MA di Jurusan Sosiologi-Antropologi, School of Oriental and African Studies (SOAS) London University (1992).

Arief Subhan adalah dosen Fak. Dakwah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan staf di PPIM IAIN yang sama. Lahir di Jepara, 10 Januari 1966, menyelesaikan S1 Fak. Ushuluddin IAIN Jakarta (1991). Pernah menjadi wartawan dan Redaktur Pelaksana Jurnal Ilmu dan Kebudayaan *Ulumul Qur'an*, Jakarta (1995).

Usep Fathudin adalah Staf Khusus Menteri Agama RI dan Ketua PB Mathla'ul Anwar. Lahir di Bandung, 19 September 1940, menyelesaikan sarjananya di Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta (1980) dan mendapatkan MA bidang Komunikasi dari Cornell University, Ithaca, New York (1987). Pernah aktif di berbagai organisasi sosial keagamaan, seperti Pelajar Islam Indonesia (PII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam (GUPPI), KODI. Pernah juga menjadi Pembantu Rekto II Universitas Islam Assyafi'iyah, Jakarta; Direktur Perguruan Islam Al-Azhar, Kelapa Gading; Ketua Perwakilan Univer-

sitas Australia Selatan di Jakarta; dan Ketua Yayasan Pondok Karya Pembangunan, Jakarta. Salah satu penulis di sejumlah buku terbitan Departemen Agama, seperti *Profil Masjid Ibukota, Metodologi Dawah di Lingkungan Narapidana,* dan *Daw'ah di Lingkungan Trasmigrasi.*

Dwi Purwoko adalah peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Lahir pada 18 Nopember 1964, ia menyelesaikan pendidikannya di Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Indonesia. Salah satu hasil karyanya adalah buku *Dr. Mr. Teuku Moehammad Hasan: Salah Seorang Pendiri Republik Indonesia dan Pemimpin Bangsa* (Pustaka Sinar Harapan, 1995). Selain itu ia juga Redaktur Pelaksana majalah *Masyarakat dan Budaya* yang diterbitkan LIPI dan terlibat dalam berbagai penelitian yang dilakukan lembaga tempat kerjanya.

Indeks

A
Abduh, Muhammad 13, 14
A Hok 454, 455
Abbas, K.H. 179, 180
Abdoelwahab, K.H. 252
Abdurrahman 279
Abdurrasyid bin Haji Jakfar 205
Abisudjak, Munir 257
ABRI li, 258, 287, 295, 302, 307, 309, 388, 389, 415, 416, 428, 429, 434, 435, 452, 458, 460, 462
Abubakar 10
Aceh xliii, 23, 238, 259, 304
Adabiyah 446
Adieb 210
Adisumarmo 443
Adji, Umar Seno 347
Afandi 184
Afghani, al 14
Afghanistan 454, 462
Afif, Saleh 402
Afrika 382
Agung, Anak Agung Gde 148
Ahlussunn wal Jama'ah 253
Ahmad, Aziz 281
Ahmad, Khursid 281
Ahmad, Malik 150
Ahmad, Syatiri 228
Aidit, DN 219, 232, 234
Aisyah 38, 102, 248, 249
Aisyah, Ny. 260
Aisyiah 444, 448
Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) l, 136, 225
al-Azhar 13, 14, 38, 119, 240, 385, 393, 424, 464
Ali, Abu 273, 284
Ali, Mukti xxii, xxxv, xxxvi, l, 29, 148, 223, 271, 272, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 287, 290, 291, 292, 293, 294, 298, 301, 304, 305, 306, 310, 311, 314, 317, 318, 403
al-Irsyad 213
Aljazair 240
Aly, Fachri 418
Amalia, Liliek 38
Ambon xliii, 304, 423
Amerika Serikat 356, 382, 384, 417, 418, 420, 424, 434, 457
Amin, M. 37, 38
Amir Syarifuddin xxi, xxx, 61, 62, 63, 185
Amrullah, Abdul Karim xlvii
AMS 137
Anas, Azwar 362
Anies, Junus 132, 210
Annie 210
Ansor xvii, 181, 185, 187, 213, 213, 255
Antara 212
Anwar, M. 453
Anwar, Wajiz 286
Anwar,Rosihan 7
APEC 424
APRA 219
APRIS 354
Arab Saudi 15, 17, 123, 161, 216, 280, 344, 349, 404, 415, 423, 433, 464
Arifin, Zaenal 183
Aristoteles xl
Arwani, Kiyai 57
As'adah 285
Asa, Su'bah 286
Asia 382, 420; Asia Afrika 382; Asia Tenggara 260
Asraruddin 206
Assaat, Mr. 44, 138
Assiddiqy, Hasbi l, 195, 223, 224

Asy'ari, K.H. Hasyim 49, 100, 109, 119, 121, 129, 155, 213, 247, 251, 254, 277
Ayoub, Mahmoud 417, 418
Ayyubi, Salahuddin al 102
Aziz, Aminuddin 186

B
Bachtiar, Harsja I
Badawi, Ahmad 150
Badawi, Kyai 233
Badruddin 372
Baghdad 393
Bagus, Ki 233
Bahrul 'Ulum 177
Bahtsul Masail 250
Baidhowi 246
Baihaqi 210
Bakker 7
Balikpapan 417, 443
Bangil 248, 252
Bangkalan 247
Bangladesh 349
Banjarmasin 457
Bank Muamalat Indonesia (BMI) 412
Banser 231
Banten xliii, 253, 404
Barisan Sabilillah 132
Basri, Hasan 150
Basri, Hassan 161
Baswedan, A.R. 17
Batubara, Cosmas 257
Bayt-ul Qur'an xxxviii, 417
Beirut 304
Belanda xvii, xxxvi, xliv, 8, 10, 17, 68, 117, 120, 123, 128, 134, 136, 142, 186, 254, 273, 279, 280, 350, 353, 358, 419, 445, 447
Ben Mang Reng Say 259
Beograd 216
Berita Nahdlatul Ulama 212
Berkes, Niyazi 19, 283
Bintang Islam 123
Bintang Mahaputra Adipradana 459
BKPI 307
BKR 183, 352
BKS 188
Boedjono 273, 274, 275
Boertin 358
Bogor 182, 223, 291, 389
Boland 8
Bombay 17
Bonn 171
Borobudur 398
BP-KNIP 5, 44
BPUPKI xix, 7, 55, 77, 84, 112, 129, 133, 333
Brigade Sumatera Selatan 354
Buchainah binti Hisyam 38
Buddha xliii, 422, 423, 425, 294, 337, 422, 424
Budiasih, Santi 454
Bugli, William 283
Burhanuddin 163
Bustanul Arfin I
Bustanul Arifin 347, 408

C
Cendana 292
CGMI xvii, 234, 460
Chadijah Dachlan 102, 254
Chalid, Idham 140, 217, 251, 256, 308, 318
Chasbullah, K.H. Wahab 64
Chiang Kai Sek xiv
Cholil, Kiyai 119
Cholil, Munawar 371, 376, 380
Cina xiv, xviii, 120, 144, 184, 230, 420, 455, 456, 457
Cirebon xliii, 124, 161, 180, 317
Clinton, Bill 424
Cokroaminoto, HOS 212
Cokrosujoso, Abikoesno xlviii, 213
CSIS 28, 290, 291, 292, 310

D
Dachlan 246, 247, 248, 249, 251, 257, 252, 260, 262
Dachlan, A. Hafiz 249
Dachlan, Hamdan 249
Dachlan, K.H. M. I
Dachlan, K.H. xxxiv, 178
Dachlan, Kiyai xxiv
Dachlan, Mohammad 102, 245, 246, 248, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 263, 265

Dachlan, Muhammad 284, 289, 293, 305
Dahlan, Ahmad 120, 121, 251
Dahlan, K.H. Ahmad 40
Dahlan, KHM 213
Dahlan, Muhammad 125, 126, 252
Daradjat, Zakiah 228
Dardiri, Abu xlvii, 8, 10
Dardiri, Hudan 177
Darud Da'wah wal Irsyad 255
Daya, Burhanuddin 422
DDII 397, 464
Dekrit Presiden 296, 326
Deliar Noer 5, 129, 398
Demokrasi Parlementer 257, 285, 323, 325
Demokrasi Terpimpin xxi, xxxii, xxxiii, 215,
Den Haag 17, 86, 133, 353, 359, 379
Dewan Banteng 189
Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia 281, 303
Dewan Gereja-gereja se-Dunia 303
Dewan Masjid se Asia Pasifik 350
Dewantoro, Ki Hajar xlviii, 46, 128, 135, 136
DGI 301, 339, 341
Dharma Muslimah 249
Dharmais 249
Dhofier, Zamakhsyari 84, 438
DI/TII 75, 192, 219, 405
Diegantoro 454
Dimyati 275, 276
Diniyah Putri Padang Panjang 248
Diponingrat, Wardan 149
Diputhera, Oka 424
Djaelani, R.A.C. 10
Djajadiningrat, Husein xlvii
Djawanis 433, 445, 448, 449
Djojomartono, Muljadi 217, 225
Djuanda 191
DPA xxxvi, 161, 215, 231, 260, 318, 359
DPR 188, 177, 212, 307, 335; DPRGR 215, 256
DPRGR (Raykyat Gotong Royong) 147
Dumas, Mohammad 350
Duta Masjarakat 191, 215

E
Effendi, Djohan 28, 286
Effendi, Rustam 447
Emir M. Noor 352
Esposito, John L. 417

F
Fachruddin, AR. 150, 151, 399
Fadjar, Malik 440
Fahmi 210
Fahrurrazi 262
Faizah 181
Fansuri, Hamzah xliii
Farida 445
Faried Ma'roef 132, 149, 233
Fathurrahman, K.H.R. xlix
Fatimah Alkaf 228
Fatwa, AM 464
Fauziah, Dian 249
FCHI 363
FDR 64
Fleming, Daniel J. 24
Flinders 404
Front Nasional 258
Front Pancasila 258
Fuad, Djalaluddin 38

G
G 30 S/PKI 78, 383, 384
Gabungan Politik Indonesia (Gapi) 127
Gad Haq El Haq 424
GAH 223
Gakuin 351
Gandhi, Mahatma xiv
Gani, A.K. 352, 353
Gani, Bustami A. 223
Gani, Bustami Abdul l, 195
Gatjo 378
GBHN 334, 343, 427
Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) 379
Gerwani 230, 231
Ghafar, Buya 452
Ghani, M. Fadlan Abd. 38
Ghani, Muhammad Fadlan Abdul 37
Ghazali 374
Ghazali, al 276

Ghazali, Imam 171
Ghazali, Syukri 250
Ghozi, Muhammad 181
GMKI 307
GMNI 307
Gobel 196
Golongan Karya (Golkar) xxxv, li, 177, 288, 289, 290, 291, 296, 307, 326, 327, 329, 330, 362, 390, 391, 407
Gontor 66, 67
Gorontalo 212
Gothe Institute 292
GPII xvii, 370, 380, 383, 394
GPM 307
Graham, Dr. Frank 61
GSNI 307
Gudam, Reno 449

H
Habibie, B.J. 362
Hadikusuma, Djamawi 149
Hadikusuma, Ki Bagus xlviii, 130, 332, 333, 139, 148
Hadjid 213
Hafiz 249
Hafsah 246
Hajid, RH. 150
Hakim, Abdul 145
Halbana 454
Halim, dr. A. 71, 138
Hamengkubuwono, Sultan IX 187
Hamid 276
Hamid Dimyati 275
Hamid, Abdul 246, 247, 274
Hamka, Buya 148, 149, 150, 234, 307, 342
Hamnah Qasim 373
Hanafiah, Moh. 255
Hanning 455
Hanum, Latifah 38
Harahap, Boerhanoedin 146
Harahap, Burhanuddin 279
Harakan, Ali al 349
Hardjowardojo, Soehardjo 353
Hartford Seminary 419, 442
Harun, Lukman 150, 201, 361
Harvard 404; University 419
Haryono, Anwar 150, 396, 464
Hasan, Mr. Teuku Muhammad 68, xix, xxiii, xix
Hasani, Kyai Nur 206
Hasjim Ning 234, 356
Hasyim, Abdul 250
Hasyim, Wahid, K.H. xix, xxii, xxx, xlviii, xlix, 4, 8, 42, 59, 72, 73, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 95, 97, 99, 102, 103, 105, 107, 110, 112, 119, 121, 126, 139, 143, 213, 214, 215, 225, 247, 248, 250, 255, 293, 332, 333, 373
Hasyim, Mohammad 246
Hasyim, Yusuf 460
Hatta, Mohammad xxi, xiii, xxi, 17, 28, 51, 63, 69, 86, 130, 138, 189, 219, 371, 450; Kabinet 64
HBS 121
Hegel 29
Hidayat, Kamal 38
Hifni 373
Hijaz 59
HIK 136
Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa Hokokai 129
Hindu xli, xlii, xliii, 294, 337, 341, 422, 423, 424, 425; Hindu Bali 168
HIPIS 359
HIS 120, 137, 273, 351
Hizbullah xix, 110, 128, 129, 132, 182, 183, 184, 214, 254, 276, 277, 278, 352, 378, 379, 394
HMI xxxiv, 205, 233, 234, 236, 237, 286, 297, 392, 400, 460
Hong Po 211, 212
Hossen, Ibrahim 260, 361
Hotel Yamato 59
Hubeys, Umar 126, 213, 452
Huda, al 211
Humardani, Soedjono 291, 292, 358
Husein, Ahmad 189

I
IAIN xxxiii, xxxv, xxxviii, xlix, liii, 28, 42, 94, 137, 194, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 279, 285, 286, 289, 290, 291, 308, 317, 343, 401,

402, 404, 417, 419, 420, 422, 430, 432, 434, 436, 437, 438, 441, 462; Aceh liii; Sunan Kalijaga l, 224, 422, 442; Surabaya 227, 231; Syarif Hidayatullah l, 136, 227, 438; IAIN Walisongo 438, 440;
Ibrahim, Maulana Malik 118
Ibrahim, Saleh 149
Ibrahim, Tahir 13
ICKI 363

ICMI(Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia) xxxviii, lii, 362, 363, 364, 412
Ida 210
Idris 273, 378
IGGI 358
IINA 349
IKIP 313, 439
Iljas, Mohammad xvii, xxxiii, xlix, 103, 155, 156, 158, 161, 162, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 173, 216, 225
India 420
Inggris ix, 280, 283, 423
Inkorba 447
IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) 412
IPKI 327, 329
IPM 307
IPNU 307
Iraq 17
Irian Jaya 418
Irsam, Muhammad 375
Irsyad, al 12, 13, 126
Isa Anshary 148
ISKA 363
Iskandar, Huson 10
Islam xliii, 160, 205, 220, 231, 259, 337, 341, 423, 424; Islam Jawa Abangan 14; Negara Islam 326
IWS 211
Izutsu, T 19, 20

J
Jaelani, Anton Timur 291
Jakarta 17, 216, 238, 257, 284, 424, 438; Jakarta Charter xix
Jalasena Naraya 459
Jam'iyyah al-Khayriyyah al-Thalabiyyah al-Jawiyyah 14
Jamsaren 38, 373
Jawa xvii, xlii, 9, 11, 18, 30, 121, 404; Jawa Barat 212, 252, 291; Jawa Tengah 205, 213, 238, 272, 303, 304, 372, 398; Jawa Timur 12, 38, 119, 137, 177, 179, 182, 238, 246, 251, 272, 274, 308, 378; Jawa Hokokai 129, 183, 214; Kebatinan 15; Kedjawen 12
Jeddah 17
Jember 404
Jepang xiii, 9, 15, 16, 84, 85, 109, 128, 129, 130, 132, 181, 212, 213, 352
Jinnah, Ali xiv
Joesef, Daoed 344, 345
Jombang 119, 155, 177, 184, 247, 308, 373
Jong Islamiten Bond 125
Juanda 220
Juliana, Ratu 358

K
Kabinet Ampera 258
Kabinet Pembangunan I 258
Kadir, Abdul 17
Kafrawi, Prof. K.H.R. Fathurrahman xxix, 16, 37, 38, 134, 195
Kaiboondan 213
Kairo 13, 15, 17, 38, 228
Kali Garang 377
Kalimantan xli; Kalimantan Selatan 405
KAMI xxxiv
Kanada xxxviii, 18, 281, 404
Karachi 280, 281
Karanganom 372, 375
Kartini 445
Kartosudarmo 5
Kartosuwiryo 65, 191
KASAD 188
Kasimo, A.J. 357
Kasminah 246
Katolik 142, 190, 294, 337, 341, 422, 423, 424, 425, 337; Partai 327, 329
Kauman 205

Kebon Dalem 251
Kediri 273
Kedu 212, 214, 215
Kedungbanteng 279
Kertapati, Sidik 145
Kertosono 252
Khadijah, Siti 178, 248
Kholil, Kiyai 57, 100, 247
Khuzaimi 246
Killearn, Lord 60
Klaten 372
Klein Ambtenar Examen 273
KMB (Konferensi Meja Bundar) 17, 86, 133, 353, 354, 379
KNI (Komite Nasional Indonesia) xlviii, 184
KNIL 354
KNIP xlviii, 5, 215, 254
Kohar, K.H. Dahlan bin Abdul 252
Kohn, Hans 29
Kolombo 384
Komnas HAM 372
Komunis; PKI (Partai Komunis Indonesia) xxxiv, 22, 76, 78, 139, 145, 146, 150, 163, 164, 197, 199, 219, 220, 229, 230, 231, 232, 233, 238, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 295, 303, 325, 355, 356, 459, 460, 462, 463; Marxisme 171, 173; PKI Madiun 248
Konghucu 142
Konstituante RI 252, 256
Koppasus 389
Kotagede 11, 15
Krasaan 252
KRI Irian 458
Kristen 142, 168, 210, 238, 259, 294, 302, 357; Kristen Protestan 341, 422, 423, 424, 425; Kristenisasi 338; Nasrani xlv, xlvi; Protestan 337
Kusnadi 150
Kusumaatmadja, Muchtar 393
Kutai xli
Kuwait 349, 384
KWI 341, 419, 424

L
Lakpesdam 245
Landraad 206
Lasem 274
Latuharhary xlviii
Lawang 12
Lebanon 17
Ledianis 445
Leiden 404, 419; Leiden University 419, 420
Lembaga Mabarrot NU 257
Lembaga Penelitian Islam al-Azhar 263
Liga Demokrasi 257
Linggarjati 139
Lombok xliii
London 384, 404
Losari 161
LPKUB (Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat beragama) 417, 419, 420, 422, 423
Lubis, Zulkifli 189
Lumajang 252

M
Ma'had al-Islami 15
Ma'shum, Ali 223
Madchan 184, 186
Madiun 248, 254
Madjid, Nurcholish 27, 286, 297
Madrasah Diniyah 208; Madrasah Muallimat NU 227
Madura 9, 100, 247, 404
Maghfuroh, Wahibah 181
Mahdi, Marzuki 5
Mahfudhoh, Umroh 181
Mahfudz, K.H. 185
Mahmillub 233
Mahmud, Amir 357
Maimunah 246
Maimunah, Siti 355
Majalengka 128
Majapahit xlii
Majelis Tarjih 122
Majlis Syuriah 256
Makassar xliii, 246, 257
Malang 56, 123, 132, 137, 186, 252, 317

Malihah, Nurjat 181
Malino 459
Malioboro 8, 214
Mambaul Ulum 210, 374, 376
Manaf, Abdul 246
Mandar 246
Mandaran Rejo 246, 248, 252
Manipol-Usdek xxxiii, 383
Mansur, AR. Sutan 150
Mansur, K.H. Mas xlvii, xlviii, 108, 121, 125, 126, 213, 252, 278, 279
Mansur, Laili 228
Mao Tse Tung xiv
MAPK 404
Maqassari, Syekh Yusuf al xliii
Mardhiyyah, Siti 155
Mariam, Siti 350
Marjukan 447
Maroko 349, 385; Maroco University 420, 442
Masjid al-Haram 247
Masjid Istiqlal 260, 424
Masjkur, K.H. xix, xxi, xxxii, xlix, 55, 56, 62, 64, 65, 66, 69, 72, 75, 76, 78, 79, 132, 133, 361, 237, 255, 259, 309
Massachusetts 419
Massignon, Louis 18
Masyumi xxxii, xxxiii, 16, 18, 65, 84, 105, 107, 108, 117, 128, 131, 132, 133, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 185, 186, 190, 219, 220, 233, 234, 254, 255, 276, 277, 278, 289, 295, 296, 325, 369, 370, 383, 389, 390
Mataram xliii, 317
Mawardi, Cholid 199
Mawdudi, al 15, 26
MAWI 301, 339, 341, 396
Mayangan 246
McGill xxxviii, 19, 20, 282, 283, 284, 404; McGill University 18, 281, 420
Medan 256, 423
Medical Observership 458
Mekkah 17, 119, 120, 180, 252, 280
Melik, Sayuti 212
Merchant's Style Institute 181
Mesir 17, 38, 228, 283, 349, 385, 420, 424
Metareum, Ismail 237
Meulaboh 238
MIAI (Majlis Islam A'la Indonesia) 117, 125, 126, 127, 128, 131, 213, 252
Midiyato S 455
Milhaq al-Nadhar 276
Minangkabau 119, 121, 248
MIT 9
Moerdiono 393, 416
Moertono, Amir 391
Moertopo, Ali 291, 292, 299, 300, 393
Mojo Agung 137
Mojokerto 182, 245, 251
Mojosari 179
Monash 404
Montreal 18, 280, 281
Mook, H. J. Van 60
Morokrembangan 452
MPHS 378
MPR xxxvi, xxxvii, 330; MPRS xxxiv, 39, 240, 313, 325
MTQ 260
Mughaffir 372, 374
Muhammad, Mar'i 150
Muhammadiyah xxxvii, xvii, xlix, 11, 13, 16, 38, 108, 117, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 132, 137, 139, 140, 143, 145, 148, 149, 150, 151, 213, 217, 225, 278, 279, 291, 369, 375, 383, 391, 394, 395, 399, 400, 446; Kweekschool 11; Sekolah Rakyat 11; Sidang Tanwir 130
MUI (Majelis Ulama Indonesia) xxxvi, 301, 328, 341, 342, 360, 392, 396, 400, 412, 419, 424, 453
Mukhtar Yahya 223, 224
Mukhtar, K.H. 178
MULO 120, 121, 137
Munasir, H.M. 184, 251
MURBA 219, 327, 329
Murni 380
Musa, K.H. 178
Musaddad, HA 223
Museum Istiqlal xxxviii, 417
Muslimat 254
Muslimat NU 254
Muso 64

Muttaqin, E.Z. 148
Muwardi 5
Muzakkir, Abdul Kahar xxxvii, xlvii, xlviii, 13, 59, 150, 213, 333

N
Nahdlatul Watan 252
Nakamura, M 11
Napitupulu 257
Naqsabandiyah 275
Narjo 290
Nasakom xxxiii, 257
Nasution, A.H. 187, 188
Nasution, Harun 28, 289, 403
Nasution, M. Yunan 147, 148
Natsir, Ismet 28
Natsir, Mohammad 5, 18, 72, 131, 139, 140, 141, 146, 147, 148, 186, 213, 219, 259, 298; Kabinet 293
Nawawi, K.H. 178
Negara Indonesia Timur 133
Negara Pasundan 133
Negara Sumatra Timur 133
Nehru, Jawaharlal xiv
New York 19, 24, 383
NIAS 120, 121
NICA 42
Non-Blok 393
Noor A.G.N 187
Notosusanto, Nugroho 402
Notowidagdo, Mukarto 382, 384
NTCR 223
NTR 167
NU xvii, xxv, xxxii , xxxv, xlix, 8, 38, 43, 49, 58, 73, 105, 107, 126, 139, 140, 145, 146, 158, 160, 163, 164, 165, 184, 185, 186, 190, 191, 199, 204, 208, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 220, 227, 231, 233, 237, 240, 241, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 279, 284, 288, 289, 290, 291, 296, 307, 327, 330, 333, 383, 391, 394, 395, 399, 400, 464; Partai 256, 258, 288, 289; Tanfidziyah 256
Nugraha SH 382
Nurris, Anwar 361
Nuzulul Qur'an xxxi
Nyepi 337

O
Oetomo, Ngesti 454
OKI 349, 442
Omar, Toha Yahya 223
Ongko Loro 11
ONH 180, 224, 345, 417, 442, 443, 444
Orde Baru xxi, xxviii, xxxvii, 29, 161, 240, 271, 272, 287, 288, 291, 292, 294, 296, 297, 299, 302, 304, 306, 313, 318, 323, 325, 326, 327, 357, 358, 386, 389, 394, 398, 400, 451
Orde Lama xlix, 161, 288, 358, 386
OSVIA 120

P
P4 329, 333, 334, 390
Padang liii, 257, 446; Padang Panjang 404, 448, 449
Pagar Alam 353
Pakistan 261, 280, 281, 349, 385
Pakubuwono X 374
Palembang 255, 353
Pamanahan, Ki Ageng xliii
Pamuntjak, Nazir 17
Pancasila xxxvi, 30, 84, 239, 294, 296, 307, 324, 325, 326, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 338, 342, 344, 349, 364, 388, 389, 390, 392, 393, 397, 399, 406, 412, 417, 418, 419, 428
Panggabean, Maraden 302
Parindra 127
Parisada Hindhu Dharma 396
Parkindo 327, 329
Parmusi 296, 307, 326, 327, 389
Partai Penyadar 127
Partai Persatuan Pembangunan 256
Pasuruan 246, 247, 248, 252, 254
Paus, Sri 419, 465
PBB 17, 127, 381
PCPP 363
PDI 327, 329, 330, 390
PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) xvii, xx, xxi, 68, 69
Pekalongan 160, 257
Pekanbaru 388
Pelembang 353

Pelita V 434
Pemandangan 211, 212
Pembaruan 459
Peraturan Gaji Pegawai (PGP) 381
Perikatan Umat Islam 128
Permesta 189, 191, 219
Perpindom 14
Persatuan Umat Islam 128
Persis 11, 140, 213, 400
Persyarikatan Tionghoa Islam Indonesia 255
Perti 255, 296, 307, 326, 327, 400
Perwiranegara, Alamsjah Ratu xvii, xix, xxxvi, xxxvii, li, 324, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 340, 342, 344, 345, 351, 351, 354, 356, 358, 361, 362, 363
Pesantren Luhur 15
PETA 129, 182, 183, 214
Petisi 50 464
PGA 95, 136
PGI 341, 406, 419, 424
PHDI 301, 424
PHDP 341
PHI 96, 257
Piagam Jakarta 77, 111, 130, 296, 326, 332, 407

PII (Pelajar Islam Indonesia) 15, 126, 307, 379, 380, 400
PII (Partai Islam Indonesia) 127, 128, 213
PIKI 363
PKR 352
PMII 400
PMKRI 307
PNI (Partai Nasional Indonesia) xlix, 139, 145, 146, 186, 327, 329, 359, 382, 384
Ponorogo 257
Pontianak 457
Porkas 360, 361
Portugis 118
PPKI xxvi, 84, 130, 311
PPP 327, 329, 330, 334, 390, 391, 394
Pranarka 29
Prancis 18, 379, 423
Pranoto 356
Prawiranegara, Sjafruddin xvii, 18, 139, 148, 186, 190
Prawoto Mangkusasmito 146, 148, 325
PRI 190
Probolinggo 252
PRRI/Permesta 18, 148, 149, 190, 191, 219, 355, 383
PSI 219
PSII 126, 127, 128, 133, 145, 146, 190, 213, 255, 296, 326, 327
PT Arafah 257
PT Garuda 442
PT Garuda Indonesia 442
PT Tetra Dua Sisi 249
PT Unilever 249
PT Yoda Karya Jakarta 249
PT. Bank Haji 196
PT. Musi 196
PTA 430
PTAI 168, 285, 343
PTAIN xxxi, l, 42, 85, 194, 225
PTDI 453
PTIQ 260
Purwokerto 254
Purwopuran 379
Putera (Pusat Tenaga Rakyat) 129, 183, 375

Q
Qadiriyah 274, 275
Qatar 384
Qolyubi, Mohammad 155
Quthb, Sayyid 13, 15, 26

R
Rachmat, Basuki 357
Rahmah El-Yunusiyah 248
Raines, John C. 417
Raja Faruk 17
Rangkuti, Bahrum 291
Raniri, Nuruddin Ar- xliii
Rasjidi, H.M. xix, xxii, xxix, xlviii, l, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 41, 44, 150, 151, 214, 259, 403; Saridi 11, 12
Rasyad 137

Rawalpindi 261
Raziq, Mustapha 'Abd al 13
Rembang 274
Rendra, WS 286
Rengasdengklok 457
Renville 62, 63
Reuter 218
Ridha 14
Ridlwan, Kafrawi 291
RIS xviii, xxx, 85, 88, 133, 135, 138, 143, 293
RMS 358, 359
Roem, Mohamad 131, 145, 146, 148, 186
Rosyadi, Imron 186, 257, 280
Rukmana, Siti Hardiyanti 464
Rustam 447
RUU Anti Korupsi 187
RUU Perkawinan 306, 308

S
Sabilillah xix, 110, 132, 214, 378, 379, 394
Sabir, Tengku Syekh 445
Sakina 454
Salamun 454
Salatiga 375
Saleh, Chairul 356
Salim, Agus xlviii, 17, 59, 127, 333
Salim, Emil 362
Salladin, Dr. 37, 38
Samudera Pasai xliii
Sani, Asrul 223
Sani, Chaidir Anwar 384
Sansuri, Bisjri 330
Sarikat Islam 120
Sarikat Tani 145
Sarinah 249
Sarjono 150
Sartono 219
Sastroamidjojo, Ali xxi, xxxii, 132, 147
Satiman Wiryosanjoyo 15, 225
Sattar, Abdul 350
Saudatun, Siti 205, 206
SBII 234, 237
Schacht, J 19, 20
SDI 125
SDSB 360, 361
Seda, Frans 302
Seinendan 129, 213
Sekolah Bumi Putra 207
Sekolah Da'wah dan Kesenian Islam 260
Sekolah Guru dan Hakim Islam (SGHI) 135
Sekolah Ongko Loro 207
Sekolah Staf dan Komando 458
Sekutu 129, 131
Semarang 121, 124, 257, 376, 377, 440
Senayan 231
Senoadji, Oemar 306, 307
Sepinggan 443
Serang 317
Serat Centini 18
Seventh Asian's Occupational Conference 459
Sewoyo, Yono 182
SGHI 136
Shihab, Alwi 418
Shihab, Quraish 419, 424, 438, 461
Shodanco 182
Shumubu xlvi, xlvii, 10, 84, 109
Shumuka xlvi, xlvii
SI (Sarekat Islam); 252; SDI 120, 400
Siddiq, Mahfudz 213
Sigit, Abdullah 136
Silalahi 257
Simatupang, T.B. 187, 259
Sinaga, AB 418, 419, 424
Singapura 181
Singodimedjo, Kasman 148
Singosari 56
Siskohat 442
Siswopranoto, S. 10
Situbondo 399, 420, 424, 457
Sjadzali, Abu Aswad Hasan 372
Sjadzali, Munawir xvii, xx, xxviii, xxxvii, lii, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 380, 381, 382, 383, 384, 392, 393, 394, 397, 402, 404, 410, 415, 427, 430; Munawir-Murni 380
Sjahlan, Ghazali 148
Sjahri 245
Sjahrir xxiii, xxx, 4, 7, 16, 43, 85, 148, 219; kabinet I 43; kabinet II xxiii,

xlviii; kabinet III 85
Sjaichu, Achmad 187
Sju Sangi Kai 129
Smith, WC. 18, 19, 20, 282, 283
Snouck Hurgronje xlv, 21, 23
Soebagijo 13
Soeharto 240, 258, 309, 324, 325, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 388, 392, 399, 415, 437, 441, 443, 464
Soejoeti, Zarkowi 433
Soekarno xiii, xxxi, 4, 5, 22, 69, 78, 85, 111, 128, 130, 138, 163, 177, 183, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 203, 204, 215, 216, 218, 219, 220, 232, 224, 225, 231, 233, 234, 235, 257, 356, 357, 376; Kabinet 85
Soekarta, Sukrenta 424
Soemitro 309
Soenarjo 289
Soesanto, Mr. xxi
Sofyati, Aida 249
Solo 15, 38, 127, 209, 211, 212, 225, 257, 374, 379, 399, 417, 443
Sopater, Soelarso 419, 424
Staatblad 137
STAIN 417, 436, 437, 438, 441
STI 278
STOVIA 120
Su'aidy, Saleh 5
Su'aidy, M. Saleh xlviii
Suara Ansor 212
Suara Karya 29, 459
Suara Muslimin 213
Suara NU 106
Subagio, R. 10
Subagjo 432
Subandrio 237
Subchan Z.E. 258
Sudan 385
Sudirman 67
Sudono, Agus 150, 237
Sukabumi 128
Sukiman, Dr. 126, 127, 233
Sukowati, Soenawar 290
Sulastomo 150, 237
Sulawesi Selatan 238, 246
Sulawesi Utara 304
Suluh Nahdlaltul Ulama 106, 213
Sumandari, Siti 127
Sumardi, Muljanto 289
Sumatera 212, 353, 355, 404; Sumatera Barat xvii, 248
Sumatrani, Syamsuddin al xliii
Sumpah Pemuda 104
Sun Yat Sen xiv
Sunan Giri xliii, xliv, 118; Kalijaga l; Kudus xliii, xliv
Sunardjo l; Kabinet Sunardjo l
Sunarjo, R. 10
Sunni 15
Supardi, M. 10
Supardjan, Ery 292
Surabaya liii, 117, 121, 123, 124, 125, 126, 131, 178, 179, 212, 227, 231, 251, 254, 255, 257, 272, 443, 451, 452, 453, 459, 463
Surakarta xliv, 9, 120, 121, 124, 132, 256, 378
Surat Perintah 11 Maret 258
Sutan, Taher Marah 445, 446, 447
Suti 246
Sutikno 214
Sutomo, Dr. 127
Sutowo, Ibnu 260
Suwirjo 10, 219
Swara Oemoem 12
Syahri, A. 250, 251
Syamsuri, Ahmad 350
Syamsuri, Bisri 247, 309
Syatibi, Kyai 209
Syi'ah 28
Syria 17
Syuriah 253, 260
Syurkati, Ahmad 11, 12

T

Tabrani 445
Taher, Tarmizi xvii, xxviii, xxxviii, xxxix, lii, 415, 416, 419, 420, 421, 424, 425, 426, 429, 431, 432, 434, 436, 441, 424, 433, 444, 442, 445, 446, 447, 448, 449, 451, 455, 456, 458, 461, 463, 464
Taliban 462
Taman Siswa xlviii, 129
Tambunan, A.M. 259

Tamimy, Djindar 149
Tan Ling Djie 219
Tanja, Victor 424
Tanjung Morawa 144
Tanjung Pinang 455
Tanzil 445
Tapos 389
TARIKAH 447
Tarmizi, Djoesma 253, 454, 455
Tarmudji, H. 38
Tas Sekti 380
Tasikmalaya 420, 424, 457
Tasripin 380
Taswirul Afkar 178, 179
Tati 210
Tebuireng 155, 213, 247, 274, 373
Teheran 17
Temiyang, Arifin 136
Temple University 417, 420
Termas 179, 273, 275, 276, 277, 373
Thahir, Suryani 228
Thaib, Djanan 14
Thamrin 445
TII 192
Timor Timur 418
Timur Tengah 384, 420
Timur, Abung 350
Tirtayasa, Sultan Agung xliii
Tity 354
Tjokroaminoto 121
TKR 353
TMII (Taman Mini Indonesia Indah) 417, 443
TNI (Tentara Nasional Indonesia) xix, 183, 354, 379; TNI/AL 444, 452, 455, 458; TNI/AD 356
Tohari 372
Tokyo 216; Tokyo University 420
TRI 183
Trimurti, SK 212
TRIP 137
Try Sutrisno 451, 464
Tuban 38
Turki 283, 385

U
Ubaid, K.H. Abdullah 178
Ubaid, Shobih 198
UCLA 404
UII 41, 42
Ujung Pandang liii, 260, 404, 443
Umar 102
Umar Khattab 213
Umar, K.H. 38
Umar, Teuku 239
Ungaran 375
Uni Emirat Arab 384
Union Theological Seminary 24
Universitas Airlangga 451, 459
Universitas Gajah Mada 42
Universitas Geogetown 382
Universitas McGill 404
University College of South West of England 381, 382
University of North Carolina 20
US Naval Hospital San Diego 458
USA 404, 442
Usman, Fakih K.H. xvii, xlix72, 86, 117, 118, 119, 123, 124, 126, 128, 130, 131, 133, 134, 136, 137, 139, 141, 142, 146, 147, 148, 149, 150, 214, 285
Usman, Ismed 123
Utomo Dananjaya 286
Utomo, Budi 120, 142
Utoyo, Bambang 353, 354
Uttama, Eka Swabhawa 454
UUD 1945 xix, 9, 193, 222, 294, 296, 307, 331, 332, 338, 406, 428; kembali ke 193

V
van Bruinessen 191
Vatikan 419, 465
Vietnam 230
voorzitter 253

W
Wahab Chasbullah 125, 126, 140, 156, 163, 177, 178, 212, 213, 216, 247, 254, 256
Wahab, K.H. Wahib xlix, 180, 193
Wahabi 280
Wahib Wahab xvii, 177, 190, 196, 204, 215, 216, 225, 378
Wahib, Ahmad 28, 286

Wahib, K. H. 194
Wahib, K.H. 192
Wahib, Muhammad 178
Wahid, Abdurrahman 102, 228, 460, 464; Gus Dur 102
Waisak 337
Wakil Kepala Pusbintal ABRI 459
Wali, Muhibuddin 228
Wali Sanga 118
WALUBI 341, 396, 424
Wartomo 237
Washington D.C. 20, 22, 216, 382, 383, 458
Wibisono, Jusuf 148
Wilopo xxxii, 139, 140, 141, 144, 145, 146, 161, 359; Kabinet xxxii
Wirjosandjojo, Sukiman 131, 139, 150, 186, 213, 225
Wirjosaputro, Sukoso 5
Wiryosaputro, M. Sukoso xlviii
WMAUB 423, 424
Wondoamiseno, W. 125, 126, 213, 252
Wongsonagoro 225
Wuruk, Hayam xlii

Y
Yafie, Ali 361
Yahya 447
Yahya, Adel 447
Yahya, Mochtar l, 195
Yamin, Muhammad 215, 449
Yasin 246
Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila 412
Yayasan Rockefeller 18
Yerusalem 349
Yogyakarta xix, xxxi, xliv, l, liii, 8, 11, 15, 38, 68, 86, 120, 121, 130, 132, 135, 138, 141, 224, 225, 226, 230, 254, 257, 278, 279, 280, 285, 286, 292, 308, 377, 380, 404, 422, 423, 442, 446
Yordania 17, 349
YPI 223
Yulia 210
Yunus, Mahmud l, 119, 136, 195
Yusuf, Baharuddin 350
Yusuf, M. 357

Z
Zahrah 158
Zainab 246
Zainul Arifin 132, 215, 255
zakelÿk 250
Zuhri, Muhammad 205
Zuhri, Saifuddin xxxiv, xlix, 203, 204, 205, 207, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, 233, 234, 235, 237, 240, 241

Menteri Agama hanyalah salah satu jabatan dalam kabinet. Tetapi tidak salah kalau dikatakan bahwa secara ideologis profil Menteri Agama RI lebih "meyakinkan" dari golongan (mantan) menteri-menteri lain, apalagi kalau dibandingkan dengan golongan menteri-menteri teknis. Mereka yang pernah menjabat Menteri Agama, dengan kadar yang berbeda-beda, juga ditandai oleh apa yang disebut orang Belanda *belezenheid* dan erudisi yang pantas menjadi contoh. Semua mereka adalah kaum "Republikein" dan tidak ada yang "Federalis".

Pada saat pluralisme sosial semakin meningkat, bukan saja peranannya semakin penting, tetapi berbagai corak kebijakan yang dijalankan atau gagal dijalankan oleh Menteri Agama selalu bisa dipakai indikator penting tentang situasi dan perkembangan masyarakat-bangsa. Karena itulah langkah-langkah Menteri Agama serta keberhasilan dan kegagalan, kegembiraan dan kekecewaannya, bukan saja indikator dari kinerja Departemen yang dipimpinnya, tetapi sesungguhnya juga merupakan gambaran perkembangan sosial, politik, dan ekonomi serta budaya yang sedang terjadi.

Kumpulan tulisan ini tidak hanya sekadar kisah tentang orang perorang. Kumpulan biografi ini adalah riwayat hidup para pemangku peran sosial-politik yang strategis. Dengan demikian, kita tidak sekadar berhadapan dengan "apa yang dikerjakan Alcibiades" dan juga bukan hanya pergumulannya dengan nasib serta perjuangannya untuk mencapai cita-cita, tetapi juga, dan tak kurang pentingnya, struktur kontekstual yang dihadapi oleh pemangku peran itu. Maka, lewat biografi, yang hanya merupakan "sebagian" dari "keseluruhan" sejarah, kita dimungkinkan juga untuk memahami dinamika perjalanan bangsa, sejak masa awal kemerdekaan sampai sekarang. Dan, sebagai sejarah, dari biografi pun kita tidak hanya akan mendapatkan sekadar "hiburan" tetapi juga pengetahuan tentang perjalanan bangsa serta kearifan dari "pengelana" dalam dimensi waktu.

ISBN 979-95248-3-0

9 789799 524836 >